SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari tujuan bernegara dan daerah sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan;

b. bahwa dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan daerah agar sesuai dengan visi, misi tujuan, sasaran, dan arah kebijakan nasional, perlu memberikan arah dan tujuan dengan menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Magelang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
14. RPJPD Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
20. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah .
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
23. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
24. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil Pembangunan Daerah /Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
25. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah /Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
26. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

27. Prioritas Pembangunan Daerah adalah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
28. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
29. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
30. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
31. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
32. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan, Program, atau Sasaran dalam bentuk keluaran *(output)* dan hasil *(outcome)*.
33. Keluaran *(output)* adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil *(outcome)* dapat terwujud.
34. Hasil *(outcome)* adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
35. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Pengendalian dan Evaluasi adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
36. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
37. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
RPJMD

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati terpilih.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RTRW, RPJPD, dan RPJMN, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, KLHS Daerah, dan RPJMD kabupaten/kota sekitar.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:
a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
b. pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
c. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;
d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan
e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.

Pasal 4

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
    a. bab I berisi pendahuluan;
    b. bab II berisi gambaran umum kondisi Daerah;
    c. bab III berisi Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
    d. bab IV berisi Program Perangkat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
    e. bab V berisi penutup.

(2) Ketentuan mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Bupati melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan.
(3) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Pengendalian dan Evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah ;
    b. Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah ; dan
    c. evaluasi terhadap hasil rencana Pembangunan Daerah .
(4) Tata cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
    a. hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah ;
    b. hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
    c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2030

Pasal 7

Dalam hal RPJMD Tahun 2030-2034 belum tersusun, penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD pada tahapan 5 (lima) tahun kedua yaitu Tahun 2030-2034, serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

RKPD Tahun 2025, perubahan RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH (8/154)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertujuan untuk memberikan arah dan tujuan dalam mencapai cita-cita Pembangunan Daerah sesuai dengan Visi dan Misi Bupati terpilih. Penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah , dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah . Dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem ini mencakup arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritas, sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam RPJPN kemudian dituangkan ke dalam RPJMN yang bertujuan memberikan gambaran tentang wujud masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Selanjutnya, RPJMN diterjemahkan menjadi rencana operasional tahunan yang konkret, spesifik dan terukur.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ini memberikan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran, serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. RPJMD disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, termasuk periodesasi RPJMD mengikuti RPJMN dan RPJPD sehingga periodesasi RPJMD menjadi 2025-2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Guna terwujud sinergitas dalam perencanaan pembangunan maka dalam dokumen RPJMD ini juga mengatur terkait RKPD Tahun 2030, yang berpedoman pada RPJPD, serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Melalui RPJMD, Pemerintah Daerah memiliki arah yang jelas untuk merealisasikan tujuan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan.

Dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2025-2029 disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 123

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar ix

BAB I
PENDAHULUAN 1 – 1
1.1. Latar Belakang 1 – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1 – 2
1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya 1 – 5
1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045 1 – 6
1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 1 – 7
1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dengan Dokumen RPJMD Nasional Tahun 2025-2029 1 – 7
1.3.4. Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangat Daerah dan RKPD 1 – 8
1.3.5. Hubungan RPJMD dengan RTRW 1 – 9
1.3.6. Hubungan RPJMD dengan KLHS 1 – 9
1.3.7. Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral 1 – 10
1.4. Maksud dan Tujuan 1 – 10
1.5. Sistematika Penulisan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 1 – 11

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH 2 – 1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2 – 1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2 – 1
2.1.1.1. Aspek Geografi 2 – 1
2.1.1.2. Demografi 2 – 46
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2 – 54
2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi 2 – 54
2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua 2 – 71
2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata 2 – 83
2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif 2 – 92
2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 2 – 95
2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif 2 – 99
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah 2 – 105
2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia 2 – 105
2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 2 – 106
2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru 2 – 121
2.1.3.4. Transformasi Digital 2 – 124
2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 2 – 124
2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 2 – 128
2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro 2 – 137

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum 2 – 148
2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif 2 – 148
2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial 2 – 158
2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan 2 – 162
2.1.4.4. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar 2 – 165
2.1.4.5. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar 2 – 181
2.1.4.6. Fokus Layanan Urusan Pilihan 2 – 217
2.1.4.7. Penunjang Urusan 2 – 225
2.2. Gambaran Keuangan Daerah 2 – 235
2.2.1. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 2 – 235
2.2.1.1. Kinerja Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah 2 – 235
2.2.1.2. Analisis Neraca Daerah 2 – 261
2.2.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Tahun 2025-2030 2 – 268
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis 2 – 281
2.3.1. Permasalahan 2 – 281
2.3.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2 – 281
2.3.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2 – 284
2.3.1.3. Aspek Daya Saing Daerah 2 – 288
2.3.1.4. Aspek Pelayanan Umum 2 – 293
2.3.2. Isu Strategis 2 – 295
2.3.2.1. Telaah Dokumen Perencanaan 2 – 296
2.3.2.2. Penetapan Isu Strategis Daerah 2 – 323

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3 – 1
3.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 3 – 1
3.1.1. Visi 3 – 1
3.1.2 Misi 3 – 3
3.1.3. Tujuan dan Sasaran 3 – 9
3.2. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 3 – 13
3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah 3 – 13
3.2.2. Pentahapan Kebijakan Pembangunan Daerah Tahunan 3 – 22
3.2.3. Program Prioritas Daerah 3 – 43
3.3. Arahan Pengembangan Wilayah 3 – 98

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4 – 1
4.1. Program Perangkat Daerah 4 – 1
4.1.1. Program Perangkat Daerah Berdasar Bidang Urusan 4 – 2
4.1.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 4 – 2
4.1.1.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 4 – 6
4.1.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan 4 – 14
4.1.1.4. Urusan Pendukung 4 – 17
4.1.1.5. Unsur Penunjang 4 – 18
4.1.1.6. Unsur Pengawas 4 – 20
4.1.1.7. Unsur Kewilayahan 4 – 20

4.1.1.8 Unsur Pemerintahan Umum 4 – 21
4.1.2. Indikasi Program, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah 4 – 22
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 4 – 88
4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 4 – 88
4.2.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) 4 – 91

BAB V
PENUTUP **V – 1**

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dengan Dokumen RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045	1 – 6
Tabel	1.2	Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dengan Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	1 – 7
Tabel	1.3	Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dengan Dokumen RPJM Nasional Tahun 2025-2029	1 – 8
Tabel	2.1.1	Klasifikasi Topografi di Kabupaten Magelang	2 – 2
Tabel	2.1.2	Data Debit Mata Air Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	2 – 3
Tabel	2.1.3	Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2023	2 – 5
Tabel	2.1.4	Rincian Luas Penggunaan Lahan pada Kawasan Pertanian di Kabupaten Magelang Menurut Kecamatan Tahun 2024	2 – 6
Tabel	2.1.5	Jumlah Industri dan Tenaga Kerja di Kabupaten Magelang Tahun 2024	2 – 11
Tabel	2.1.6	Perhitungan Daya Dukung Air Permukaan Kabupaten Magelang	2 – 13
Tabel	2.1.7	Ketersediaan Air di Kabupaten Magelang Tahun 2029	2 – 14
Tabel	2.1.8	Perkiraan Kebutuhan Air dan DDA Tahun 2029 Kabupaten Magelang	2 – 15
Tabel	2.1.9	Perhitungan Daya Dukung Pangan Kabupaten Magelang	2 – 17
Tabel	2.1.10	Daya Dukung Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2029	2 – 18
Tabel	2.1.11	Luas Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten Magelang	2 – 20
Tabel	2.1.12	Luas Jasa Lingkungan Penyedia Air Kabupaten Magelang	2 – 21
Tabel	2.1.13	Luas Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Kabupaten Magelang	2 – 21
Tabel	2.1.14	Luas Jasa Lingkungan Pengatur Tata Air dan Banjir di Kabupaten Magelang	2 – 22
Tabel	2.1.15	Luas Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Banjir di Kabupaten Magelang	2 – 23
Tabel	2.1.16	Luas Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Tanah Longsor di Kabupaten Magelang	2 – 23
Tabel	2.1.17	Nama dan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar di TNGM yang Dilindungi	2 – 25
Tabel	2.1.18	Rekapitulasi Data Kepunahan Satwa, Tumbuhan, dan Jamur yang Teridentifikasi di TNGM Pascaerupsi Merapi 2010-2021	2 – 26
Tabel	2.1.19	Jenis Flora dan Fauna yang Ada di Taman Nasional Gunung Merbabu	2 – 27
Tabel	2.1.20	Kondisi Flora dan Fauna yang dilindungi di Kabupaten Magelang	2 – 27
Tabel	2.1.21	Risiko Bencana Kabupaten Magelang	2 – 39

Tabel	2.1.22	Kejadian Bencana di Kabupaten Magelang pada Tahun 2020-2024	2 – 40
Tabel	2.1.23	Data Emisi Sektor Energi, IPPU, Pertanian, Kehutanan, dan Limbah Kabupaten Magelang pada Tahun 2020-2023	2 – 43
Tabel	2.1.24	Aksi Mitigasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Magelang	2 – 45
Tabel	2.1.25	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Magelang	2 – 46
Tabel	2.1.26	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kecamatan Tahun 2025–2030	2 – 50
Tabel	2.1.27	Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kecamatan Tahun 2025–2030	2 – 51
Tabel	2.1.28	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025–2030	2 – 51
Tabel	2.1.29	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025–2030	2 – 52
Tabel	2.1.30	Proyeksi Angka Ketergantungan Kabupaten Magelang Tahun 2025–2030	2 – 53
Tabel	2.1.31	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 56
Tabel	2.1.32	Kondisi Kemiskinan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 59
Tabel	2.1.33	Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024	2 – 63
Tabel	2.1.34	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 68
Tabel	2.1.35	Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga) Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	2 – 101
Tabel	2.1.36	Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 113
Tabel	2.1.37	Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun Dasar 2010 Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 114
Tabel	2.1.38	*Location Quotient* (LQ) Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 115
Tabel	2.1.39	Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA) Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 127
Tabel	2.1.40	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 129
Tabel	2.1.41	Angka Kriminalitas Tertangani di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 161
Tabel	2.1.42	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 163
Tabel	2.1.43	Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 166
Tabel	2.1.44	Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 169
Tabel	2.1.45	Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 173

Tabel	2.1.46	Capaian Indikator Urusan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 174
Tabel	2.1.47	Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 175
Tabel	2.1.48	Capaian Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 177
Tabel	2.1.49	Capaian Indikator Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 179
Tabel	2.1.50	Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 181
Tabel	2.1.51	Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 183
Tabel	2.1.52	Capaian Indikator Urusan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 185
Tabel	2.1.53	Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 187
Tabel	2.1.54	Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 188
Tabel	2.1.55	Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 192
Tabel	2.1.56	Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 194
Tabel	2.1.57	Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 196
Tabel	2.1.58	Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 199
Tabel	2.1.59	Data Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 200
Tabel	2.1.60	Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 201
Tabel	2.1.61	Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 203
Tabel	2.1.62	Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 204
Tabel	2.1.63	Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 206
Tabel	2.1.64	Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 208
Tabel	2.1.65	Capaian Indikator Urusan Statistik Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 210
Tabel	2.1.66	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2023 Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain	2 – 211
Tabel	2.1.67	Capaian Indikator Urusan Persandian Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 211
Tabel	2.1.68	Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 213

Tabel	2.1.69	Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 214
Tabel	2.1.70	Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 216
Tabel	2.1.71	Capaian Indikator Urusan Pariwisata Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 218
Tabel	2.1.72	Capaian Indikator Urusan Pertanian Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 220
Tabel	2.1.73	Capaian Indikator Urusan Peternakan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 221
Tabel	2.1.74	Capaian Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 222
Tabel	2.1.75	Capaian Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 223
Tabel	2.1.76	Capaian Indikator Urusan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 225
Tabel	2.1.77	Capaian Indikator Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 226
Tabel	2.1.78	Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 228
Tabel	2.1.79	Capaian Indikator Urusan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 229
Tabel	2.1.80	Capaian Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 231
Tabel	2.1.81	Capaian Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 233
Tabel	2.1.82	Capaian Indikator Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 234
Tabel	2.2.1	Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	2 – 245
Tabel	2.2.2	Kemampuan Mendanai Belanja Daerah di Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	2 – 257
Tabel	2.2.3	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020-2024	2 – 258
Tabel	2.2.4	Neraca Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	2 – 263
Tabel	2.2.5	Rasio Keuangan Daerah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	2 – 266
Tabel	2.2.6	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2030	2 – 275
Tabel	2.2.7	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2030	2 – 280
Tabel	2.3.1	Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	2 – 303
Tabel	2.3.2	*Highlight* Indikasi Intervensi Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah	2 – 304
Tabel	2.3.3	Arah Kebijakan Tahunan Dalam Rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026-2030	2 – 309
Tabel	2.3.4	Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Magelang	2 – 316
Tabel	3.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029	3 – 10

Tabel	3.2	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029	3 – 14
Tabel	3.3	Pentahapan Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2026-2030	3 – 22
Tabel	3.4	Keterkaitan Tema Pembangunan, Misi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Magelang Tahun 2026-2030	3 – 25
Tabel	3.5	Implementasi Program Prioritas Pembangunan Daerah "Sapta Cipta"	3 – 46
Tabel	3.6	Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang	3 – 62
Tabel	3.7	Dukungan Kabupaten Magelang terhadap Asta Cita, PP, PHTC	3 – 95
Tabel	3.8	Dukungan Kegiatan Kabupaten Magelang pada Program Prioritas Delegasi Provinsi Jawa Tengah ke Kabupaten/ Kota	3 – 97
Tabel	4.1	Program Perangkat Daerah	4 – 23
Tabel	4.2	Indikator Kinerja Utama	4 – 89
Tabel	4.3	Indikator Kinerja Daerah	4 – 92

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	1 – 5
Gambar	2.1.1	Tren Curah Hujan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 4
Gambar	2.1.2	Skenario Daya Dukung Air Kabupaten Magelang Tahun 2020-2030	2 – 17
Gambar	2.1.3	Skenario Daya Dukung Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2023-2029	2 – 19
Gambar	2.1.4	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 30
Gambar	2.1.5	*Prevalence of Undernourishment* (PoU) Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 31
Gambar	2.1.6	Konsumsi Listrik per Kapita di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 32
Gambar	2.1.7	Cakupan Akses Layanan Air Minum Layak di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 33
Gambar	2.1.8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 34
Gambar	2.1.9	Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 34
Gambar	2.1.10	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	2 – 36
Gambar	2.1.11	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 41
Gambar	2.1.12	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 42
Gambar	2.1.13	Proporsi Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Magelang Tahun 2022	2 – 44
Gambar	2.1.14	Tren Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022	2 – 45
Gambar	2.1.15	Perkembangan Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 46
Gambar	2.1.16	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 47
Gambar	2.1.17	Distribusi Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kecamatan Tahun 2020–2024	2 – 48
Gambar	2.1.18	Piramida Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2024	2 – 49
Gambar	2.1.19	Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024	2 – 54
Gambar	2.1.20	Posisi Relatif Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	2 – 55
Gambar	2.1.21	Perbandingan Capaian Tingkat Kemiskinan (Persen) Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024	2 – 57
Gambar	2.1.22	Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Magelang	

		Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	2 – 58
Gambar	2.1.23	Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Magelang Tahun 2021-2023	2 – 60
Gambar	2.1.24	Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024	2 – 62
Gambar	2.1.25	Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024	2 – 64
Gambar	2.1.26	Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Magelang Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	2 – 65
Gambar	2.1.27	Perbandingan Capaian Indeks Gini Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024	2 – 66
Gambar	2.1.28	Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten Magelang Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	2 – 66
Gambar	2.1.29	Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024	2 – 67
Gambar	2.1.30	Posisi Relatif Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	2 – 68
Gambar	2.1.31	Perbandingan Capaian Pengeluaran per Kapita Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024	2 – 69
Gambar	2.1.32	Posisi Relatif Capaian Pengeluaran per Kapita Kabupaten Magelang Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	2 – 70
Gambar	2.1.33	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 71
Gambar	2.1.34	Posisi Relatif Capaian Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Magelang Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	2 – 72
Gambar	2.1.35	Posisi Relatif Capaian Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Magelang Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	2 – 72
Gambar	2.1.36	Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 73
Gambar	2.1.37	Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 74
Gambar	2.1.38	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 75
Gambar	2.1.39	Angka Kematian Balita di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 76
Gambar	2.1.40	Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 77
Gambar	2.1.41	Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 78
Gambar	2.1.42	Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 79

Gambar	2.1.43	Jumlah Balita *Stunting* dan Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 80
Gambar	2.1.44	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment and Coverage*) di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 81
Gambar	2.1.45	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 82
Gambar	2.1.46	Perbandingan Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024	2 – 83
Gambar	2.1.47	Posisi Relatif Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Magelang Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	2 – 84
Gambar	2.1.48	Perbandingan Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024	2 – 85
Gambar	2.1.49	Posisi Relatif Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Magelang Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	2 – 85
Gambar	2.1.50	Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun di Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	2 – 87
Gambar	2.1.51	Literasi Membaca SD/sederajat di Kabupaten Magelang Tahun 2022-2024	2 – 88
Gambar	2.1.52	Numerasi SD/sederajat di Kabupaten Magelang Tahun 2022-2024	2 – 89
Gambar	2.1.53	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan di Kabupaten Magelang Tahun 2022-2024	2 – 91
Gambar	2.1.54	Jaminan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 92
Gambar	2.1.55	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 94
Gambar	2.1.56	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 96
Gambar	2.1.57	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 97
Gambar	2.1.58	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 98
Gambar	2.1.59	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam Satu Tahun Terakhir di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 99
Gambar	2.1.60	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 102
Gambar	2.1.61	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 103
Gambar	2.1.62	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 104
Gambar	2.1.63	Angka Ketergantungan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 106

Gambar	2.1.64	PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 107
Gambar	2.1.65	Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 108
Gambar	2.1.66	Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 108
Gambar	2.1.67	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 109
Gambar	2.1.68	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 109
Gambar	2.1.69	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 110
Gambar	2.1.70	Rasio PDRB Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 111
Gambar	2.1.71	Persentase Sumbangan Kelompok Sektor di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 111
Gambar	2.1.72	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	2 – 117
Gambar	2.1.73	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	2 – 118
Gambar	2.1.74	Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	2 – 119
Gambar	2.1.75	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	2 – 120
Gambar	2.1.76	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	2 – 121
Gambar	2.1.77	Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 125
Gambar	2.1.78	Nilai dan Pertumbuhan Ekspor Non Migas Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 126
Gambar	2.1.79	Pertumbuhan Investasi Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 127
Gambar	2.1.80	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 130
Gambar	2.1.81	Proporsi Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 131
Gambar	2.1.82	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 132
Gambar	2.1.83	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 133
Gambar	2.1.84	Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 134
Gambar	2.1.85	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet dan Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 135
Gambar	2.1.86	Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 136
Gambar	2.1.87	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 138

Gambar	2.1.88	*Return on Asset* (ROA) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 139
Gambar	2.1.89	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten Magelang terhadap PDRB Tahun 2020–2024	2 – 140
Gambar	2.1.90	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten Magelang terhadap PDRB Tahun 2020–2024	2 – 142
Gambar	2.1.91	Perbandingan Inflasi Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024	2 – 143
Gambar	2.1.92	Indeks Perkembangan Harga Kabupaten Magelang Triwulan I Tahun 2024	2 – 144
Gambar	2.1.93	Perbandingan Rata–rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024	2 – 146
Gambar	2.1.94	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 147
Gambar	2.1.95	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 151
Gambar	2.1.96	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 152
Gambar	2.1.97	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	2 – 152
Gambar	2.1.98	Indeks Integritas Nasional (IIN) Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	2 – 153
Gambar	2.1.99	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 154
Gambar	2.1.100	Nilai AKIP Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 155
Gambar	2.1.101	Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	2 – 155
Gambar	2.1.102	Indeks Sistem Merit Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	2 – 157
Gambar	2.1.103	Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 158
Gambar	2.1.104	Cakupan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 159
Gambar	2.1.105	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024	2 – 160
Gambar	2.1.106	Nilai Pilar IDSD Kabupaten Magelang Tahun 2024	2 – 163
Gambar	2.1.107	Nilai Komponen Kapabilitas Inovasi Kabupaten Magelang Tahun 2023	2 – 164
Gambar	2.2.1	Perkembangan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	2 – 236
Gambar	2.2.2	Perkembangan Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	2 – 238
Gambar	2.2.3	Perkembangan Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	2 – 239
Gambar	2.2.4	Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	2 – 240
Gambar	2.2.5	Perkembangan Komponen Pendapatan Transfer Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	2 – 241
Gambar	2.2.6	Proporsi Komponen Pendapatan Transfer Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	2 – 242

Gambar	2.2.7	Perkembangan Struktur Belanja Daerah dalam Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	2 – 246
Gambar	2.2.8	Proporsi Belanja Operasi Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	2 – 248
Gambar	2.2.9	Proporsi Belanja Modal Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	2 – 250
Gambar	2.2.10	Realisasi Pembiayaan Daerah Netto Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	2 – 254
Gambar	2.3.1	Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	2 – 307

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah mulai dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan daerah. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, disebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Oleh karena itu, Kepala Daerah terpilih harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dijabarkan ke dalam dokumen Rencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra), selanjutnya dioperasionalkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Selanjutnya, sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun RPJMD Tahun 2025-2029. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, pemerintah daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan. Selain itu, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Penyusunan RPJMD harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih. Apabila penyelenggara pemerintahan daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD dalam waktu tersebut, maka kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 3 (tiga) bulan.

Terakhir, penyusunan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 7);

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

Dokumen RPJMD Kabupaten Magelang disusun dengan mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan nasional, provinsi, maupun daerah sekitarnya. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan daerah memiliki keterkaitan yang erat dan saling terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional maupun provinsi. Penyusunan dokumen RPJMD harus berpedoman pada RPJPD Kabupaten Magelang dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJM Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi dan misi, program kepala daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, pemerintah daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

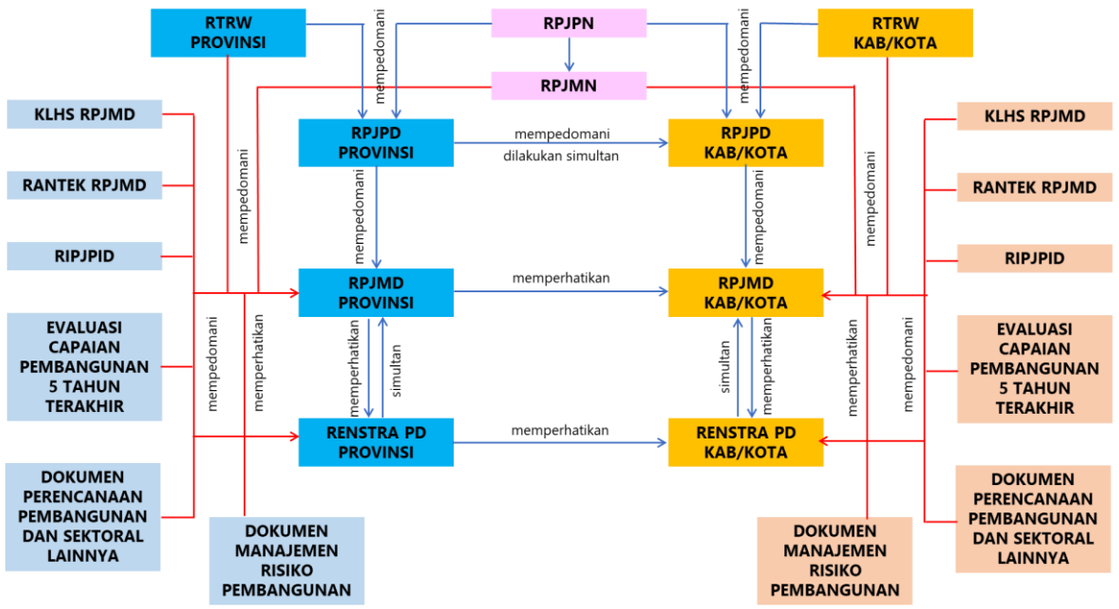

Gambar 1.1
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

Keselarasan amanat dalam RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029, dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut.

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045

Dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 masuk pada periode pembangunan menengah tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045. Oleh sebab itu, permasalahan dan isu strategis terkait dengan sasaran pokok RPJPD akan menjadi prioritas untuk diselesaikan. Sasaran pokok RPJPD yang merupakan penjabaran visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD ditempuh melalui serangkaian aktivitas pembangunan yang direncanakan melalui RPJMD. Visi dan misi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 yang mendukung pada visi dan misi pembangunan RPJPD, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dengan Dokumen RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045

RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029
Visi	**Visi**
Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan	Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera atau Magelang Anyar Gress
Misi	**Misi**
Misi 1. Mewujudkan masyarakat yang maju, berkarakter, dan berdaya saing	Misi 1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, berdaya saing, dan sehat dengan titik fokus pada pembangunan SDM
Misi 2. Memajukan perekonomian daerah berbasis potensi lokal unggulan yang berkelanjutan	Misi 3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Misi 3. Mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang andal dan berkualitas untuk mendukung perkembangan wilayah	Misi 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah
Misi 4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta responsif terhadap bencana	Misi 5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana
Misi 5. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Misi 2. Akselerasi penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan melayani

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 mengacu dan mempedomani RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Hal ini dimaksudkan agar arah pembangunan daerah juga sejalan dengan provinsi. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Magelang 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.2
Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dengan Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029
Visi	**Visi**
Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045	Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera atau Magelang Anyar Gress
Misi	**Misi**
Misi 1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global	Misi 1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing, dengan titik fokus pada pembangunan SDM
Misi 2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan	Misi 3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Misi 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas	Misi 2. Akselerasi penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan melayani
Msi 4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif	Misi 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah
	Misi 5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana
Misi 5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan	Misi 2. Akselerasi penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan melayani
	Misi 1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing, dengan titik fokus pada pembangunan SDM
Misi 6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi	Misi 3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dengan Dokumen RPJM Nasional Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 mengacu dan mempedomani RPJM Nasional Tahun 2025-2029 dalam penyusunan dokumen.

Hal ini dimaksudkan agar arah pembangunan daerah juga sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.3

Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dengan Dokumen RPJM Nasional Tahun 2025-2029

RPJM Nasional Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029
Visi	**Visi**
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera atau Magelang Anyar Gress
Misi	**Misi**
Misi 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Misi 2. Akselerasi penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan melayani
Misi 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Misi 3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Misi 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Misi 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah
Misi 4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Misi 1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing, dengan titik fokus pada pembangunan SDM
Misi 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Misi 3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Misi 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Misi 3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
	Misi 1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing, dengan titik fokus pada pembangunan SDM
Misi 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Misi 2. Akselerasi penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan melayani
Misi 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Misi 5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana

1.3.4.Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD

RPJMD dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai pedoman teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang disertai indikasi program dan kegiatan untuk

setiap bidang/fungsi pemerintahan dalam jangka waktu lima tahun. Selanjutnya RPJMD dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu oleh perangkat daerah untuk dijabarkan menjadi rencana tahunan perangkat daerah yang disebut Rencana Kerja (Renja). Dokumen Renja ini akan menjadi dasar perangkat daerah dalam mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah dan selanjutnya akan dirangkum menjadi RAPBD. Dokumen ini akan ditindaklanjuti menjadi APBD dan akhirnya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA perangkat daerah. Dengan kata lain RPJMD merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang dan menjadi dasar rencana jangka pendek sampai ke penganggarannya.

1.3.5.Hubungan RPJMD dengan RTRW

Mengutip Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan perencanaan pembangunan daerah, sehingga penyusunan RPJMD harus pula memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memberi acuan mengenai penetapan pola dan struktur tata ruang, penetapan kawasan strategis sebagai acuan dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan, serta prioritas pembangunan wilayah, agar arah kebijakan dan sasaran dalam RPJMD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. RTRW Kabupaten Magelang merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengatur pemanfaatan ruang wilayah bagi upaya perwujudan kemajuan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran daerah. Keserasian dokumen RPJMD dan RTRW dilakukan untuk menjamin bahwa penetapan tujuan, sasaran, kebijakan dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Magelang dengan mengutamakan pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, serta menjaga kelestarian dan mengamankan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.

1.3.6.Hubungan RPJMD dengan KLHS

Disamping memperhatikan RTRW, penyusunan RPJMD ini juga harus memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini bertujuan agar dapat tercipta keselarasan antara kebijakan, rencana, dan program pembangunan dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu mengelola potensi yang menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan

hidup di Kabupaten Magelang. KLHS memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Melalui KLHS, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah. Dengan demikian, KLHS menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa proses perencanaan di daerah tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial, sejalan dengan agenda global *SDGs*.

Selanjutnya, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Magelang selama tahun 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sejumlah target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang terdiri dari empat pilar yaitu Pilar Sosial (aspek kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan gender); Pilar Ekonomi (energi terbarukan, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan-pemerataan kesempatan akses, distribusi produksi-konsumsi komoditi); Pilar Hukum dan Tata Kelola (langkah-langkah reformasi birokrasi dan ASN dalam meningkatkan tata-kelola pemerintahan); serta Pilar Lingkungan Hidup (terkait isu lingkungan hidup dan perubahan iklim).

1.3.7.Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Magelang juga perlu mempedomani dan memperhatikan dokumen lainnya seperti Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Magelang, dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID), evaluasi capaian pembangunan lima tahun terakhir, dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, serta dokumen manajemen risiko pembangunan.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi, misi, dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja pembangunan daerah, target, dan indikasi pagu anggaran, yang akan digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai berikut:

1. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2025-2029.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka menengah antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.
3. Menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Magelang yang tertuang dalam Renstra PD Tahun 2025-2029 sesuai urusan, kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) selama kurun waktu 2025-2029.
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMD KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2029

Sistematika penulisan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Magelang meliputi gambaran dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, serta aspek pelayanan umum; gambaran keuangan daerah yang memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah untuk lima tahun ke depan; serta permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

Bab ini menjelaskan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Magelang disertai indikator

kinerja dan target sampai dengan tahun 2030; strategi dan arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat seluruh program perangkat daerah beserta indikator kinerja, target dan pagu indikatif, serta perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan, serta penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1.Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Aspek Geografi

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 1.129,983 km^2. Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak pada koordinat $7^0$19’13”–$7^0$42’16”LS dan $110^0$01’51”–$110^0$26’58”BT, mencerminkan posisi strategisnya di wilayah tengah Pulau Jawa. Dalam konteks administratif, Kabupaten Magelang berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

Sebelah Utara	:	Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang;
Sebelah Timur	:	Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali;
Bagian Tengah	:	Kota Magelang;
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo;
Sebelah Barat	:	Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung.

Ibu Kota Kabupaten Magelang berada di Kota Mungkid. Kabupaten Magelang terbagi menjadi 21 kecamatan, 367 desa, 5 kelurahan, 2.827 dusun, 3.360 Rukun Warga (RW), dan 10.924 Rukun Tetangga (RT). Selain posisinya yang berada di antara dua kota besar (Kota Yogyakarta dan Kota Semarang), Kabupaten Magelang juga terletak pada jalur ekonomi strategis, yaitu Semarang–Magelang–Purwokerto dan Semarang–Magelang–Yogyakarta–Solo. Hal ini memberikan keunggulan dalam aksesibilitas, yaitu berpotensi untuk mendorong perkembangan ekonomi serta mempercepat pertumbuhan daerah, seiring dengan kemudahan konektivitas yang mampu meningkatkan distribusi barang dan jasa.

Dari segi topografi, Kabupaten Magelang memiliki keragaman yang sangat signifikan, mencakup wilayah dataran rendah hingga dataran tinggi. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029, area dengan topografi datar memiliki luas 8.599 hektare, sementara area bergelombang mencapai 44.784 hektare. Adapun area dengan topografi curam seluas 41.037 hektare, dan area sangat curam seluas 14.155 hektare. Wilayah dataran tinggi, yang merupakan cekungan yang dikelilingi oleh beberapa gunung berapi aktif, termasuk Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, dan Sumbing, serta Pegunungan Menoreh, turut memengaruhi potensi sumber daya alam dan sektor pariwisata di daerah ini.

Tabel 2.1.1
Klasifikasi Topografi di Kabupaten Magelang

No.	Kemiringan	Klasifikasi	Wilayah
1.	0 – 2 persen	Datar	Kecamatan Mertoyudan, Secang, Windusari, Sawangan, dan Salaman (±1,5 persen dari luas wilayah)
2.	2 – 5 persen	Bergelombang sampai berombak	Sebagian besar kecamatan (17 kecamatan) atau 55 persen dari seluruh wilayah
3.	15 – 40 persen	Bergelombang sampai berbukit	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Srumbung, sebagian Ngablak, Pakis, Sawangan, dan sedikit di Kecamatan Dukun (meliputi 25,5 persen dari seluruh wilayah)
4.	>40 persen	Berbukit sampai bergunung-gunung	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Srumbung, Ngablak, Pakis, Sawangan, dan Dukun (18 persen dari luas wilayah)

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029

Hidrologi, sebagaimana tertuang dalam Laporan Akhir Profiling Mata Air Kabupaten Magelang Tahun 2024, menunjukkan bahwa secara geografis, Kabupaten Magelang terletak di lereng dan lembah pegunungan. Kondisi tersebut memberikan potensi sumber daya air yang melimpah di Kabupaten Magelang. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya mata air yang tersebar di seluruh wilayah. Sumber mata air di Kabupaten Magelang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti pertanian, peternakan, perikanan, wisata, serta kebutuhan domestik rumah tangga. Selain itu, mata air juga digunakan oleh berbagai lembaga penyedia air minum, seperti Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Magelang, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung, dan PAMSIMAS, yang menyediakan pasokan air bagi masyarakat di Kabupaten Magelang dan sekitarnya.

Dengan curah hujan yang tinggi, Kabupaten Magelang memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian, industri, dan rumah tangga. Wilayah ini terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan Bogowonto, dengan sebagian besar area berada di hulu DAS Progo yang mencakup luas wilayah sebesar 107.637,97 hektare. DAS Progo melintasi 21 kecamatan, sedangkan DAS Bogowonto hanya mencakup sebagian kecil wilayah Kecamatan Salaman dan Kajoran.

Tabel 2.1.2
Data Debit Mata Air Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024

No	Kelas	Debit (l/detik)	Jumlah Mata Air				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	I	≥ 10.000	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	II	1.000 ≤ X < 10.000	Tidak Ada	1	1	1	2
3	III	100 ≤ X < 1000	22	19	17	18	16
4	IV	10 ≤ X < 100	46	51	52	54	53
5	V	1 ≤ X < 10	56	85	88	74	68
6	VI	0,1 ≤ X < 1	90	85	81	118	108
7	VII	0,01 ≤ X < 0,1	9	Tidak Ada	2	5	7
8	VIII	< 0,01	2	2	0	1	69
	Mati		**1**	**2**	**3**	**4**	**9**
	Tidak ada limpasan		**42**	**57 (Kelas VIII)**	**18 (Kelas VIII)**	**32 (Kelas VIII)**	**63 (Kelas VIII)**
	Total Terukur		**268**	**302**	**262**	**271**	**326**
	Total Mata Air Terdata		**311**	**302**	**328**	**333**	**334**
	Total debit (liter/detik)		**8.510,3793**	**9.682,658**	**9.958,9986**	**8.901,96**	**9.502,63**

Sumber: Laporan Akhir Profiling Mata Air Kabupaten Magelang Tahun 2024

Posisi Kabupaten Magelang yang berada di hulu DAS Progo serta dikelilingi oleh tiga gunung api menjadikan wilayah ini kaya akan sumber mata air. Berdasarkan data yang terdapat dalam Laporan Akhir Profiling Mata Air, pada tahun 2024, jumlah mata air terukur mencapai 326 mata air, sedangkan mata air tidak terukur tercatat sebanyak 8 mata air. Mata air yang tidak terukur ini berupa genangan yang tidak memungkinkan untuk diukur. Adapun debit total mata air yang terukur adalah 9.502,63 liter per detik.

Selain itu, Kabupaten Magelang memiliki tiga gunung api aktif yang memainkan peran penting dalam sistem tata air di wilayah ini, yaitu Gunung Merapi, Merbabu, dan Sumbing. Ketiga gunung tersebut berfungsi sebagai area pengisian (*recharge area*) bagi DAS setempat, di mana sumber mata air yang muncul di kaki gunung-gunung tersebut berperan sebagai area pengeluaran (*discharge area*). Keberadaan kesatuan wilayah administrasi yang mencakup kedua area ini memberikan keuntungan dalam pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien, serta memfasilitasi terciptanya tata kelola lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Klimatologi, berdasarkan data klimatologi Kabupaten Magelang dari tahun 2020 hingga 2024, curah hujan menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Selama periode tersebut, curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu 3.725 milimeter, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada tahun 2023, yaitu 1.692 milimeter. Adapun pada tahun 2024, curah hujan tercatat sebesar 2.867 milimeter. Dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029, dijelaskan bahwa perubahan curah hujan tersebut dipengaruhi oleh dinamika atmosfer skala global dan regional yang cukup signifikan.

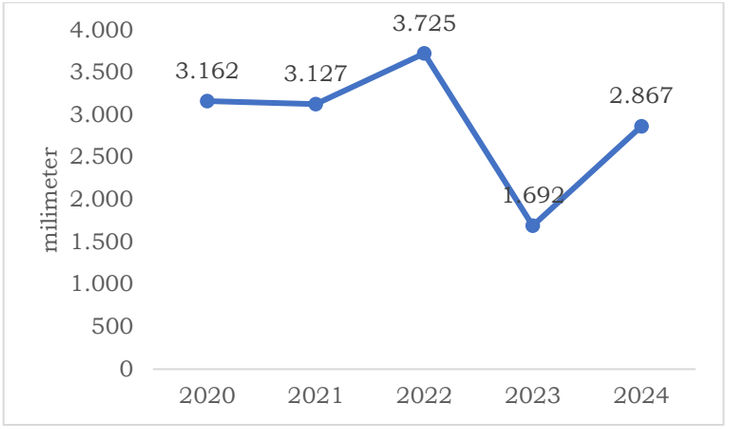

Gambar 2.1.1
Tren Curah Hujan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2021–2025, BPS Kabupaten Magelang Tahun 2025

Menurut klasifikasi iklim Schmidt Ferguson, Mohr, dan Oldeman, sebagian besar Kabupaten Magelang memiliki tipe iklim basah. Satu bulan dikategorikan sebagai bulan kering jika curah hujan kurang dari 100 milimeter dan bulan basah jika curah hujan melebihi 200 milimeter. Klasifikasi bulan basah dan kering ini berkaitan erat dengan aktivitas pertanian di daerah tersebut, sehingga penggolongan iklimnya juga dikenal sebagai zona agroklimat. Dengan curah hujan sebesar 200 milimeter per bulan, kondisi ini cukup mendukung untuk budidaya padi sawah, sementara untuk tanaman palawija diperlukan curah hujan minimal 100 milimeter setiap bulan.

Perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global, yang ditandai dengan peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta berkurangnya kapasitas serapan karbon, berpotensi memengaruhi pola curah hujan dan kondisi lingkungan lainnya di Kabupaten Magelang. Emisi GRK terutama berasal dari empat sektor, yaitu pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya (AFOLU); transportasi; industri (IPPU); serta pengelolaan limbah. Selain itu, penurunan serapan karbon akibat berkurangnya jumlah pohon semakin memperburuk dampak perubahan iklim tersebut.

Penggunaan lahan, dalam Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2024-2044, disebutkan bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Magelang dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung sebagian besar diperuntukkan untuk kawasan konservasi, yang mencakup Taman Nasional Gunung Merapi seluas 2.370 hektare dan Taman Nasional Gunung Merbabu seluas 2.210 hektare. Sementara itu, kawasan budidaya didominasi oleh sektor pertanian, dengan alokasi lahan untuk tanaman pangan seluas 29.218 hektare, hortikultura seluas 23.489 hektare, perkebunan seluas 26.693 hektare, serta

peternakan seluas 214 hektare. Secara keseluruhan, luas lahan yang dimanfaatkan di Kabupaten Magelang mencapai 112.999 hektare.

Tabel 2.1.3
Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2023

Penggunaan Lahan	Rincian Penggunaan Lahan	Luasan (Ha)
Kawasan Lindung		
Badan Air	Badan Air	899
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	Kawasan Hutan Lindung	1.364
Kawasan Konservasi	Taman Nasional	4.570
Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya	113
	Total	**6.946**
Kawasan Budidaya		
Badan Jalan	Badan Jalan	529
Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	1.794
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	2.051
Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	29.072
	Kawasan Hortikultura	23.245
	Kawasan Perkebunan	26.643
	Kawasan Peternakan	222
Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan Budidaya	61
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	525
Kawasan Pariwisata	Kawasan Pariwisata	44
Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman Perkotaan	9.598
	Kawasan Permukiman Perdesaan	11.766
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	503
	Total	**106.053**
	***Grand* Total**	**112.999**

Sumber: Perda 7 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Magelang 2024 – 2044

Selanjutnya, pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan aktivitas industri di Kabupaten Magelang berpotensi membawa dampak negatif berupa degradasi lahan, alih fungsi lahan, dan fragmentasi lahan pertanian. Fenomena ini mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap lahan pertanian secara berkelanjutan sangat diperlukan di daerah ini.

Berdasarkan rincian luas penggunaan lahan pada kawasan pertanian di Kabupaten Magelang, tercatat tiga kecamatan dengan lahan pertanian terluas, yaitu Kecamatan Kajoran (7,81 persen dari seluruh total luas sawah di Kabupaten Magelang), diikuti oleh Kecamatan Grabag (7,62 persen) dan Sawangan (7,10 persen). Sementara itu, Kecamatan Ngluwar memiliki peruntukan sawah terkecil, yakni 1,90 persen. Dalam hal kawasan tanaman pangan, Kecamatan Secang menjadi wilayah terluas mencapai 2.000 hektare atau sekitar 8,26 persen dari total kawasan tanaman pangan. Kecamatan Pakis, di sisi lain, mencatatkan luas terbesar untuk peruntukan kawasan pertanian hortikultura dengan 4.348 hektare, yang setara dengan 18,71 persen dari total luas kawasan pertanian hortikultura. Adapun Kecamatan Salaman menjadi wilayah terluas untuk kawasan perkebunan, yaitu 3.600 hektare (13,51 persen), sedangkan Kecamatan Borobudur memiliki kawasan peternakan terluas, yaitu

60 hektare atau sekitar 27,03 persen dari total luas kawasan peternakan di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.1.4
Rincian Luas Penggunaan Lahan pada Kawasan Pertanian di Kabupaten Magelang Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Kawasan Pertanian (Hektare)				
		Sub Total	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan
1	Bandongan	3.775	2.249	97	1.430	
2	Borobudur	4.134	794	539	2.801	60
3	Candimulyo	3.966	753	82	3.071	
4	Dukun	3.837	1.778	1.691	368	9
5	Grabag	6.030	2.013	968	3.040	11
6	Kajoran	6.181	1.761	1.663	2.746	7
7	Kaliangkrik	4.304	1.355	2.544	399	
8	Mertoyudan	1.950	1.003	237	710	
9	Mungkid	2.573	2.249	1	323	
10	Muntilan	1.674	1.588		86	
11	Ngablak	3.244	88	2.871	232	53
12	Ngluwar	1.507	1.373	7	127	
13	Pakis	4.907	77	4.348	446	36
14	Salam	2.065	1.574	82	410	
15	Salaman	5.257	1.604	48	3.600	6
16	Sawangan	5.619	1.505	2.958	1.150	7
17	Secang	3.462	2.400	82	980	
18	Srumbung	4.071	1.120	2.580	347	25
19	Tegalrejo	2.678	1.099	105	1.474	
20	Tempuran	3.254	1.111	301	1.834	9
21	Windusari	4.692	1.578	2.042	1.072	
	Total	79.181	29.072	23.245	26.643	222

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2025

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah, **persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW** menjadi indikator penting untuk memastikan bahwa penggunaan lahan berada dalam koridor yang ditetapkan oleh rencana tata ruang. Dengan memantau indikator ini, pemerintah dapat mengidentifikasi penyimpangan dari rencana tata ruang, mengatasi potensi masalah, menyesuaikan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan sehingga mendukung pelaksanaan RTRW.

Selanjutnya, **persentase alih fungsi lahan** juga menjadi indikator krusial lainnya dalam perencanaan pembangunan, yang membantu memahami sejauh mana lahan yang sebelumnya diperuntukkan untuk fungsi tertentu, seperti pertanian atau area konservasi, dialihkan untuk penggunaan lain, seperti perumahan dan industri. Indikator ini mampu memberikan gambaran tentang dinamika perubahan lahan serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengukur persentase alih fungsi lahan, perencanaan pembangunan dapat diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

B. Potensi Sumber Daya Alam

1. Pertanian

Berdasarkan data dari dokumen Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2025, pada tahun 2024 luas lahan sawah tercatat sebesar 25.268,72 hektare, sedangkan lahan pertanian bukan sawah mencapai 29.911,62 hektare. Produksi padi pada tahun tersebut mencapai 406.576,50 ton. Komoditas palawija dengan produksi terbesar di Kabupaten Magelang adalah jagung, dengan total produksi sebesar 22.064 ton pada tahun 2024, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 19.031,17 ton (2023), meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 31.328 ton. Produksi ubi kayu menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, produksi ubi kayu tercatat sebesar 16.408,42 ton, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 14.232 ton, namun jauh menurun dibandingkan capaian produksi tahun 2020 yang mencapai 49.185 ton. Penurunan juga terjadi pada komoditas ubi jalar, dari 17.778 ton pada tahun 2020, menurun menjadi 17.104 ton pada tahun 2021, dan terus berkurang hingga mencapai 10.545,80 ton pada tahun 2024. Sementara itu, produksi kacang tanah mengalami penurunan bertahap dari tahun 2022 ke 2024. Pada tahun 2022 sebanyak 1.559 ton, kemudian turun menjadi 1.051 ton pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 852,50 ton pada tahun 2024.

Untuk komoditas hortikultura sayur, tren produksi bervariasi antarjenis tanaman dari tahun 2023 ke 2024. Produksi sayuran terbesar masih didominasi oleh komoditas cabai. Pada tahun 2024, produksi cabai rawit, cabai besar, dan cabai keriting masing-masing sebanyak 531.555,60 kuintal, 8.671,84 kuintal, dan 340.755,75 kuintal. Selain cabai, komoditas sayuran dengan produksi terbesar berikutnya adalah kubis dengan total produksi sebesar 247.857,70 kuintal, diikuti oleh tomat dengan produksi sebesar 208.008,80 kuintal.

Pada komoditas hortikultura buah, komoditas kelengkeng menunjukkan tren peningkatan produksi yang signifikan hingga tahun 2023, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh pengembangan kawasan yang dilakukan oleh pemerintah serta keterlibatan petani dalam kegiatan agroekowisata. Ini menunjukkan bahwa integrasi kegiatan ekonomi kreatif dengan sektor pertanian dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan produktivitas. Sementara itu, produksi jeruk mengalami penurunan signifikan, dari 2.525 kuintal pada 2021 menjadi hanya 82 kuintal pada tahun 2024, dengan laju penurunan mencapai 59,33 persen.

Penurunan ini disebabkan oleh serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), menandakan lemahnya sistem pengendalian hama dan penyakit tanaman hortikultura. Selanjutnya, produksi salak, yang merupakan salah satu komoditas unggulan, menunjukkan tren pertumbuhan positif pasca-rehabilitasi setelah erupsi Merapi, meningkat dari 69.410 ton pada tahun 2022 menjadi 83.734 ton pada tahun 2024. Tren ini menegaskan pentingnya program peremajaan tanaman dan pemulihan pascabencana dalam menjaga keberlanjutan produksi.

2. Perkebunan

Merujuk pada data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang tahun 2025, dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, dinamika produksi komoditas perkebunan di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan yang bervariasi, mencerminkan pengaruh faktor teknis, iklim, dan intervensi kebijakan. Produksi cengkeh mengalami peningkatan dari 13.780 kuintal pada tahun 2023 menjadi 18.700 kuintal pada tahun 2024. Merujuk pada dokumen Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2025, tercatat bahwa produksi tebu mengalami peningkatan dari 0,6210 ribu ton pada tahun 2023 menjadi 0,938 ribu ton pada tahun 2024, produksi tembakau mengalami kenaikan dari 1,9109 ribu ton menjadi 2,327 ribu ton pada periode yang sama, begitu pula dengan produksi karet turut menunjukkan peningkatan dari 0,04 ribu ton menjadi 0,072 ribu ton.

Komoditas kelapa dalam dan kopi menunjukkan tren relatif stabil dengan sedikit fluktuasi tahunan. Kelapa dalam dibudidayakan secara luas dan intensif oleh petani sehingga menghasilkan produksi yang konsisten, dengan peningkatan tipis sebesar 0,50 persen pada tahun 2024. Kabupaten Magelang memiliki varietas kelapa dalam unggulan, yaitu Kelapa Upat-Upat, di mana komoditas tersebut merupakan salah satu varietas kelapa lokal yang memiliki karakteristik unik karena ukuran buahnya yang besar dan telah diidentifikasi sebagai potensi genetik di Kabupaten Magelang. Disamping itu, produksi kopi meningkat secara bertahap, yang dipengaruhi oleh kondisi iklim, khususnya curah hujan pada masa berbunga. Secara keseluruhan, keberhasilan pengembangan komoditas sangat bergantung pada intervensi teknis, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan iklim, serta dukungan kebijakan lintas sektor.

Selanjutnya, Kabupaten Magelang juga memiliki potensi perkebunan kakai, meskipun tidak sebesar sentra kakao utama di Provinsi Jawa Tengah

seperti Kabupaten Wonogiri, Batang, atau Kendal. Pada tahun 2024, berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Pangan tercatat bahwa terdapat 23,2 hektare luas areal kebun kakao di Kabupaten Magelang. Potensi kakao di kabupaten ini, khususnya di wilayah sekitar Pegunungan Menoreh, telah menarik perhatian untuk dikembangkan. Meskipun perkebunan kakao di Kabupaten Magelang mungkin masih dalam skala yang relatif kecil dibandingkan dengan sentra besar lainnya, namun dengan adanya inisiatif pengolahan dan dukungan untuk menjadikan kakao sebagai produk khas daerah menunjukkan potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut.

3. Peternakan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang tahun 2025, disebutkan bahwa pada tahun 2024 populasi ternak yang terdapat di Kabupaten Magelang berupa sapi perah, sapi potong, kerbau, kuda, kambing, kambing perah, domba, babi, dan kelinci. Populasi ternak terbesar adalah kambing dan domba yang masing-masing memiliki populasi sebanyak 129.765 ekor dan 81.816 ekor. Jumlah ini diikuti oleh sapi potong dengan populasi sebanyak sebanyak 31.625 ekor dan kelinci yang mencapai 7.146 ekor.

Di samping itu, Kabupaten Magelang juga mengelola berbagai jenis ternak lainnya, seperti unggas, yang terdiri dari komoditas ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, itik, itik manila, burung puyuh, merpati, dan angsa. Ayam pedaging dan ayam petelur merupakan dua jenis unggas dengan jumlah populasi terbanyak di kabupaten ini. Pada tahun 2024, masing-masing populasi ayam pedaging dan ayam petelur tercatat sebanyak 2.640.000 ekor dan 784.000 ekor. Pada tahun yang sama, populasi ayam kampung, itik, itik manila, burung puyuh, merpati, dan angsa tercatat sebanyak 574.008 ekor, 143.437 ekor, 65.540,08 ekor, 405.970 ekor, 3.285 ekor, dan 2.102 ekor.

Merujuk pada data yang diperoleh dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang tahun 2025, apabila dilihat dari segi produksinya, daging sapi dan domba merupakan dua jenis produksi ruminansia terbesar di Kabupaten Magelang hingga tahun 2024. Produksi daging sapi tercatat mencapai 1.392.567 kilogram, sedangkan produksi daging domba tercatat sebanyak 1.219.967 kilogram. Sementara itu, kerbau menghasilkan produksi daging sebanyak 173,30 ton dan kambing sebanyak 780.079 kilogram. Adapun pada sektor ternak unggas, ayam pedaging menghasilkan daging sebanyak

12.056,65 ton, ayam ras petelur sebanyak 761,87 ton, dan itik sebanyak 87.433 kilogram.

4. Perikanan

Selama periode 2020 hingga 2024, sektor perikanan di Kabupaten Magelang menunjukkan dinamika pertumbuhan yang relatif positif. Produksi perikanan secara keseluruhan meningkat dari 73,90 persen pada tahun 2020 menjadi 100 persen pada tahun 2024. Adapun produksi perikanan di Kabupaten Magelang terdiri dari produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan produksi ikan hias dengan rata-rata pertumbuhan tahunan masing-masing sebesar 2,51 persen, 7,27 persen, dan 3,01 persen (Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, 2025).

Pertumbuhan ini tidak terlepas dari peningkatan produksi ikan air tawar, terutama untuk keperluan benih dan konsumsi. Produksi ikan air tawar untuk benih yang terbesar di Kabupaten Magelang adalah ikan nila. Berdasarkan data BPS (2025), pada tahun 2024 produksi ikan nila sebanyak 843.269,24 ribu ekor, sedangkan pada tahun sebelumnya produksi mencapai 818.708 ribu ekor. Kecamatan Muntilan menjadi penyumbang produksi ikan nila terbesar. Produksi ikan air tawar kedua terbesar adalah ikan lele dengan jumlah sebanyak 700.512,27 ribu ekor pada tahun 2024. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, yakni sebanyak 680.109 ribu ekor. Kecamatan Muntilan adalah produsen terbesar untuk ikan lele di Kabupaten Magelang. Begitu pula dengan produksi ikan air tawar untuk lauk pauk, produksi terbanyak adalah ikan nila dengan jumlah 7.253,62 ton, disusul oleh ikan lele sebanyak 6.831,64 ton. Ikan lele dan ikan nila dapat dijadikan komoditas unggulan dari sektor perikanan Kabupaten Magelang, karena jumlah produksi/*supply* dan *demand*/permintaan masyarakat akan lauk pauk ikan tersebut sangat tinggi. Kecenderungan konsumsi ini juga tercermin dari meningkatnya angka konsumsi ikan per kapita per tahun, yang mengalami lonjakan signifikan dari 18,70 kilogram pada tahun 2020 menjadi 26,91 kilogram pada tahun 2023 dan 2024.

Meskipun demikian, di tengah tren positif tersebut, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang tahun 2025 diketahui bahwa kontribusi produksi dari kelompok nelayan masih tergolong sangat rendah, yaitu sebesar 1,47 persen pada tahun 2024, yang mengindikasikan perlunya intervensi yang lebih signifikan dalam pemberdayaan nelayan kecil dan tradisional. Di sisi lain, produksi benih ikan mengalami

fluktuasi, dengan peningkatan rata-rata sebesar 2,50 persen, yang menunjukkan stabilitas dalam penyediaan input untuk budidaya.

5. Industri

Kabupaten Magelang memiliki beragam jenis industri, antara lain industri makanan dan minuman, tekstil, meubel, kimia, kelistrikan, hingga jasa angkutan. Sektor ini merupakan salah satu kontributor utama penyerapan tenaga kerja di daerah. Berdasarkan data yang bersumber dari Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2025, tercatat sebanyak 128 unit industri yang beroperasi di wilayah ini pada tahun 2024. Industri makanan mendominasi dengan 26 unit usaha, diikuti oleh industri barang galian bukan logam, yakni sebanyak 16 unit, serta industri kayu, barang dari kayu dan gabus sebanyak 18 unit.

Tabel 2.1.5
Jumlah Industri dan Tenaga Kerja di Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Klasifikasi Industri	Perusahaan (Unit)	Tenaga Kerja*
1	Makanan	26	1.226
2	Minuman	2	60
3	Pengolahan Tembakau	9	138
4	Tekstil	4	2.640
5	Pakaian Jadi	4	2.445
6	Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	4	278
7	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus	18	4.940
8	Kertas dan Barang dari Kertas	2	103
9	Percetakan dan Reproduksi Media	1	—
10	Produk dan Batu Bara dan Pengilangan Minyak	—	—
11	Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	4	82
12	Farmasi Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	3	110
13	Karet, Barang dari Karet dan Plastik	5	2.004
14	Barang Galian Bukan Logam	24	688
15	Logam Dasar	—	—
16	Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	2	72
17	Komputer, Barang Elektronik dan Optik	—	—
18	Peralatan Listrik	1	—
19	Mesin dan Perlengkapan YTDL	2	141
20	Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	6	1.909
21	Alat Angkutan Lainnya	—	—
22	Furnitur	4	293
23	Pengolahan Lainnya	6	557
24	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	1	102
	Jumlah	**128**	**17.788**

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2025
*Keterangan : *) Data yang digunakan merujuk pada hasil pencacahan Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur tahun 2023 karena data jumlah tenaga kerja untuk tahun 2024 tidak tersedia*

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa struktur industri di Kabupaten Magelang menunjukkan keberagaman dengan dominasi pada subsektor industri padat karya, seperti industri kayu. Tingginya jumlah beberapa tenaga kerja di beberapa subsektor tersebut mengindikasikan bahwa sektor industri

memiliki potensi yang substansial dalam mendukung penyerapan tenaga kerja lokal. Namun, terdapat beberapa klasifikasi industri yang belum berkembang atau belum terisi, seperti industri logam dasar dan alat angkutan lainnya. Optimalisasi subsektor-sektor potensial serta dukungan kebijakan yang mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat dijadikan sebagai strategi untuk memperkuat daya saing indsutri sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

6. Pariwisata

Kabupaten Magelang memiliki Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang dikenal sebagai KSPN Borobudur. Selain itu, kawasan Candi Borobudur dan sekitarnya telah ditetapkan sebagai destinasi wisata super prioritas. Penetapan ini menegaskan bahwa pariwisata di Kabupaten Magelang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan dan dijadikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi tersebut tercermin dari keberagaman daya tarik wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang.

Pada tahun 2024, sebagaimana yang disebutkan dalam dokumen Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2025, terdapat 43 objek wisata buatan, 38 objek wisata budaya, dan 99 objek wisata alam yang tersebar di berbagai wilayah. Keberagaman ini mampu menarik kunjungan wisatawan dalam jumlah yang signifikan. Berdasarkan dokumen yang sama, tiga objek wisata dengan kunjugan tertinggi pada tahun 2024 adalah Candi Borobudur, yang menarik 1.286.029 wisatawan, diikuti oleh Ketep Pass dengan jumlah pengunjung mencapai 243.510 wisatawan, serta Candi Mendut Pawon yang mencatat 49.166 pengunjung.

Selain destinasi utama tersebut, Kabupaten Magelang juga memiliki wisata rintisan yang dikelola oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara, dengan total sepuluh objek wisata, serta 46 desa wisata yang telah memiliki Surat Keputusan Penetapan Bupati. Untuk mendukung aktivitas pariwisata, merujuk pada Kabupaten Magelang dalam Angka Tahun 2025, pada tahun 2024 Kabupaten Magelang memiliki fasilitas akomodasi sebanyak 88 unit, yang terdiri atas sepuluh hotel berbintang dan 78 hotel non bintang atau akomodasi lainnya. Sarana ini juga dilengkapi dengan 286 unit fasilitas restoran dan rumah makan yang tersebar secara merata di hampir seluruh wilayah Kabupaten Magelang sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan selama berkunjung.

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029, kondisi **Daya Dukung dan Daya Tampung Air (DDDA)** menunjukkan bahwa ketersediaan air di Kabupaten Magelang mencapai 1.202.533.112,45 m^3 per tahun, sementara kebutuhan air tercatat sebesar 1.098.069.523,99 m^3 per tahun. Dengan demikian, terdapat surplus air sebesar 104.463.588,45 m^3 per tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketersediaan air di Kabupaten Magelang masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penduduk, pertanian, dan sektor lainnya. Namun, analisis lebih lanjut memperlihatkan adanya disparitas distribusi daya dukung air antar kecamatan. Beberapa kecamatan seperti Bandongan, Secang, dan Ngluwar menunjukkan persentase terlampaui yang signifikan sehingga diperlukan pengembangan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien di wilayah-wilayah tersebut. Secara keseluruhan, sekitar 63,98 persen wilayah Kabupaten Magelang, atau seluas 72.255,91 hektare, masih berada dalam batas daya dukung air yang layak. Sementara itu, sekitar 36,02 persen atau 40.670,49 hektare wilayah telah melebihi kapasitas daya dukung airnya. Adapun rincian perhitungan daya dukung air permukaan disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.1.6
Perhitungan Daya Dukung Air Permukaan Kabupaten Magelang

No	Kecamatan	Ketersediaan (m^3/tahun)	Kebutuhan (m^3/tahun)	Selisih (m^3/tahun)	Status DDA (%)	
					Belum Terlampaui	Terlampaui
1.	Bandongan	59.027.171,61	64.372.626,90	–5.345.455,29	44,51	55,49
2.	Borobudur	59.674.358,67	53.789.915,65	5.884.443,01	75,08	24,92
3.	Candimulyo	57.134.215,14	51.668.316,43	5.465.898,71	74,62	25,38
4.	Dukun	69.224.575,86	57.155.193,28	12.069.382,58	60,10	39,90
5.	Grabag	93.463.606,02	86.032.195,58	7.431.410,44	65,72	34,28
6.	Kajoran	100.443.993,26	78.477.050,83	21.966.942,43	70,73	29,27
7.	Kaliangkrik	60.344.067,22	49.884.028,08	10.460.039,14	67,88	32,12
8.	Mertoyudan	48.553.134,95	43.978.473,70	4.574.661,25	67,80	32,20
9.	Mungkid	40.535.683,98	53.420.005,96	–12.884.321,98	32,09	67,91
10.	Muntilan	29.119.091,41	36.545.178,69	–7.426.087,28	38,23	61,77
11.	Ngablak	47.915.376,23	28.066.480,39	19.848.895,84	89,58	10,42
12.	Ngluwar	21.876.085,03	32.541.705,74	–10.665.620,71	25,27	74,73
13.	Pakis	72.552.399,42	49.359.792,67	23.192.606,74	81,57	18,43
14.	Salam	30.784.350,82	36.687.458,94	–5.903.108,11	42,05	57,95
15.	Salaman	68.502.013,73	66.783.611,25	1.718.402,48	67,95	32,05
16.	Sawangan	75.347.900,80	62.610.361,68	12.737.539,11	70,08	29,92
17.	Secang	55.568.520,81	64.831.709,25	–9.263.188,44	41,48	58,52
18.	Srumbung	62.313.463,91	46.470.962,35	15.842.501,57	73,27	26,73
19.	Tegalrejo	37.726.974,49	37.588.333,17	138.641,33	59,31	40,69
20.	Tempuran	47.212.616,00	43.887.652,16	3.324.963,84	64,41	35,59
21.	Windusari	65.213.513,08	53.918.471,30	11.295.041,78	67,98	32,02
	Total	**1.202.533.112,45**	**1.098.069.523,99**	**104.463.588,45**	63,98	36,02

Sumber: Laporan Utama Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kab.Magelang Tahun 2025–2045 dalam KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029

Selanjutnya, untuk merespons dinamika pembangunan ke depan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–

2045 telah menyusun skenario perhitungan daya dukung air untuk tahun 2029 berdasarkan sejumlah proyeksi.

1. Perubahan tutupan lahan sesuai dengan arahan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Magelang 2010-2029, yang mencakup peningkatan luas kawasan pertanian sesuai arahan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) Provinsi Jawa Tengah serta peningkatan lahan permukiman.
2. Peningkatan luasan kawasan peruntukkan industri yang akan meningkatkan kebutuhan air bersih untuk industri dengan pendekatan perhitungan kebutuhan dari jumlah pekerja industri.
3. Pertambahan jumlah penduduk yang mengikuti tren pertumbuhan saat ini akan meningkatkan kebutuhan air rumah tangga.
4. Pemenuhan kebutuhan air untuk Kota Magelang serta wilayah sekitarnya juga turut dipertimbangkan, mengingat sebagian sumber airnya berasal dari Kabupaten Magelang.

Berikut adalah hasil perhitungan berdasarkan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Magelang 2010-2029 dan perkiraan pada tahun 2029 dengan memperkirakan skenario di atas.

Tabel 2.1.7
Ketersediaan Air di Kabupaten Magelang Tahun 2029

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Koefisien	Luas x Koefisien
Hutan Lindung	1.363,57	0,18	245,44
Hutan Produksi	2.049,51	0,18	368,91
Hutan Produksi Tbts	1.792,44	0,18	322,64
Hutan Rakyat	2.731,14	0,18	491,61
Kawasan Industri	337,86	0,9	304,07
Kawasan Perkebunan	25.283,10	0,18	4.550,96
Kawasan Permukiman	19.729,01	0,7	13.810,31
Kawasan Pertanian	40.249,15	0,3	12.074,75
Kawasan Lindung Stpt	15.092,28	0,18	2.716,61
Taman Nasional	4.406,77	0,18	793,21
Total	113.034,84		37.708,51
C = Σ(ci x Ai)/ ΣAi			0,3336
R = Ri/m			
PSA = 10 x C x R x A			1.270.776.787,00
Potensi Mata Air (dianggap kontinyu) (m^3/tahun)			123.589.584,00
Ketersediaan Air Total (m^3/tahun)			1.394.366.371,00

Sumber: Laporan Utama Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029 (Perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 dan menggunakan tutupan lahan dari Rencana Pola Ruang Kabupaten Magelang 2010-2029)

Berdasarkan analisis ketersediaan air di Kabupaten Magelang tahun 2029 yang mengacu pada metode yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 dan penggunaan data tutupan lahan dari Rencana Pola Ruang 2010-2029, diperoleh bahwa indeks koefisien konservasi lahan (C) bernilai 0,3336. Dengan luas wilayah sebesar 113.034,84 hektare dan asumsi curah hujan efektif (R/m) yang telah diperhitungkan,

potensi air permukaan yang dapat dimanfaatkan (PSA) mencapai 1.270.776.787 m^3 per tahun. Ditambah dengan potensi mata air kontinyu sebesar 123.589.584 m^3 per tahun, maka total ketersediaan air di wilayah ini diperkirakan sebesar 1.394.366.371 m^3 per tahun. Angka ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi pengelolaan sumber daya air, terutama karena sebagian besar tutupan lahan didominasi oleh kawasan pertanian, perkebunan, dan permukiman, yang memiliki koefisien resapan relatif rendah. Hal ini dapat meningkatkan risiko kekurangan air saat musim kemarau serta memberikan tekanan pada keberlanjutan daya dukung lingkungan.

Tabel 2.1.8
Perkiraan Kebutuhan Air dan DDA Tahun 2029 Kabupaten Magelang

Kebutuhan Air	Jumlah	Satuan	Keb.	Satuan	Kebutuhan Air (m^3/tahun)
Penduduk Kab. Magelang	1.358.669	Jiwa	100	lt/kap./hr	48.912.084
Penduduk Kota Magelang*	370.079	Jiwa	100	lt/kap./hr	13.322.844
Sawah Irigasi	28.868,10	Hektare	1	lt/dtk/ha	910.384.402
Sawah Tadah Hujan	11.381,05	Hektare	0,3	lt/dtk/ha	107.673.838
Pekerja Industri	615.938	Jiwa	500	lt/hr/kary.	110.868.840
Kebutuhan Air					1.191.162.007
Ketersediaan Air Total (m^3/tahun)					1.394.366.371
Daya Dukung Air					1,171

Sumber: Laporan Utama Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029 (Perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 dan menggunakan tutupan lahan dari Rencana Pola Ruang Kabupaten Magelang 2010-2029)
*Keterangan: *) penduduk Kota Magelang yang pemenuhan kebutuhan airnya diambil dari Kabupaten Magelang*

Sebagai tindak lanjut dari estimasi ketersediaan air tersebut, analisis kebutuhan air menjadi langkah penting untuk menilai keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air secara spasial dan temporal. Total kebutuhan air di Kabupaten Magelang pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 1.153.710.702 m^3 per tahun, dan angka ini diproyeksikan meningkat menjadi 1.191.162.007 m^3 per tahun pada tahun 2029. Perhitungan kebutuhan air tersebut juga mencakup kebutuhan air untuk Kota Magelang. Berdasarkan perbandingan antara total ketersediaan dan total kebutuhan air, diperoleh nilai daya dukung air sebesar 1,141 pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 1,171 pada tahun 2029. Interprestasi terhadap nilai DDA mengacu pada Lutfi Muta'ali (2015; dalam Laporan Utama Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029), yaitu:

1. Nilai DDA > 1 menunjukkan kondisi surplus air, yang berarti ketersediaan air masih mampu mendukung populasi yang ada.
2. Nilai DDA < 1 menunjukkan defisit atau daya dukung air yang terlampaui.

Keterangan: Daya Dukung Air Minimal = 1

Dengan demikian, Kabupaten Magelang diperkirakan masih berada dalam kondisi surplus air pada tahun 2024 maupun 2029. Ketersediaan air permukaan dinilai masih mencukupi untuk mendukung kebutuhan penduduk, pertanian, dan industri. Surplus air permukaan ini diperkirakan dapat dipertahankan hingga tahun 2029, dengan syarat bahwa kebijakan dan pemanfaatan lahan mengikuti arahan tata ruang dan tren saat ini (*business as usual*).

Meskipun terdapat surplus sebesar sekitar 0,203 miliar m^3, secara keseluruhan terjadi penurunan daya dukung air dari nilai 1,59 pada tahun 2020 menjadi 1,171 pada tahun 2029, atau turun sekitar 0,419. Skenario masa depan yang disusun berdasarkan rencana tata ruang Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa daya dukung air masih tetap akan berada pada kondisi surplus, meskipun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Secara umum, kondisi ini masih dapat diandalkan untuk pemenuhan kebutuhan air, meskipun tergolong sedang atau bersyarat. Untuk memastikan keberlanjutan sumber daya air dan mempertahankan kondisi surplus tersebut, maka diperlukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas air sungai agar layak dimanfaatkan sebagai sumber air baku, dengan cara mengurangi beban pencemaran pada air dari kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian.
2. Meningkatkan kapasitas penangkapan air melalui pembangunan embung dan waduk.
3. Perlindungan terhadap mata air melalui upaya konservasi dan pengelolaan oleh pemerintah, termasuk pembebasan lahan di seluruh sempadan mata air.
4. Penerapan sistem produksi bersih di sektor industri untuk menghemat penggunaan air.
5. Penerapan insentif bagi kegiatan produksi, baik di sektor pertanian maupun industri, yang mampu menekan atau menghemat penggunaan air.

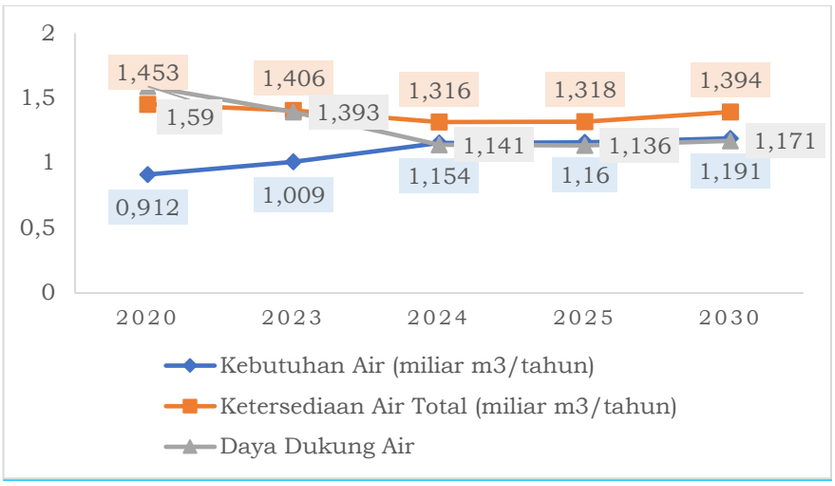

Gambar 2.1.2
Skenario Daya Dukung Air Kabupaten Magelang Tahun 2020-2030
Sumber: Laporan Utama Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029

Selain daya dukung air, evaluasi daya dukung lingkungan juga mencakup aspek ketahanan pangan. **Daya dukung pangan** di Kabupaten Magelang dievaluasi melalui analisis spasial berbasis sistem grid yang mempertimbangkan kebutuhan pangan rumah tangga berdasarkan jumlah penduduk. Pendekatan ini menerapkan pembobotan berdasarkan jenis penutupan lahan dan jaringan jalan untuk menentukan distribusi penduduk pada setiap grid. Dalam analisis ini, kawasan permukiman diasumsikan memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi dibandingkan jenis penutupan lahan lainnya. Status daya dukung pangan pada masing-masing grid ditentukan berdasarkan selisih antara ketersediaan dan kebutuhan pangan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang saat ini masih memiliki surplus daya dukung pangan sebesar 10.734,33 ton per tahun, yang mengindikasikan bahwa ketersediaan pangan di wilayah tersebut melebihi kebutuhan yang ada. Secara spasial, sekitar 27,13 persen dari total luas lahan di Kabupaten Magelang, yang setara dengan 30.639,50 hektare, telah melebihi daya dukung pangannya, sedangkan 72,87 persen, atau sekitar 82.286,90 hektare, masih berada di bawah kapasitas maksimalnya.

Tabel 2.1.9
Perhitungan Daya Dukung Pangan Kabupaten Magelang

No	Kecamatan	Ketersediaan (ton/tahun)	Kebutuhan (ton/tahun)	Selisih (ton/tahun)	Status DDP (%)	
					Belum Terlampaui	Terlampaui
1.	Bandongan	5.587,06	4.432,06	1.154,99	79,23	20,77
2.	Borobudur	5.370,72	5.811,43	–440,71	62,21	37,79
3.	Candimulyo	5.365,99	4.644,76	721,23	76,28	23,72
4.	Dukun	5.942,38	4.183,49	1.758,89	83,18	16,82
5.	Grabag	8.550,01	7.106,53	1.443,48	77,13	22,87
6.	Kajoran	8.962,12	6.218,85	2.743,28	83,25	16,75
7.	Kaliangkrik	5.510,81	3.927,63	1.583,18	83,72	16,28
8.	Mertoyudan	4.470,75	6.465,77	–1.995,02	45,43	54,57
9.	Mungkid	3.985,23	4.966,29	–981,06	56,20	43,80
10.	Muntilan	2.842,77	4.103,95	–1.261,19	45,28	54,72

No	Kecamatan	Ketersediaan (ton/tahun)	Kebutuhan (ton/tahun)	Selisih (ton/tahun)	Status DDP (%)	
					Belum Terlampaui	Terlampaui
11.	Ngablak	3.979,35	2.955,48	1.023,87	82,50	17,50
12.	Ngluwar	2.200,59	3.014,69	–814,10	54,18	45,82
13.	Pakis	6.265,02	4.515,45	1.749,57	82,98	17,02
14.	Salam	2.988,09	3.812,99	–824,90	54,63	45,37
15.	Salaman	6.323,36	6.319,41	3,94	66,28	33,72
16.	Sawangan	6.770,42	5.022,34	1.748,08	82,46	17,54
17.	Secang	5.302,05	5.571,78	–269,72	64,35	35,65
18.	Srumbung	5.396,11	4.106,37	1.289,73	76,11	23,89
19.	Tegalrejo	3.573,33	3.516,74	56,59	66,32	33,68
20.	Tempuran	4.391,41	4.189,16	202,25	68,05	31,95
21.	Windusari	5.924,78	4.082,85	1.841,93	85,41	14,59
	Total	**109.702,33**	**98.968,00**	**10.734,33**	**72,87**	**27,13**

Sumber: Laporan Utama Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kab.Magelang Tahun 2025–2045 dalam KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029

Menindaklanjuti kondisi tersebut, KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 memproyeksikan bahwa daya dukung pangan akan mengalami peningkatan hingga tahun 2029. Berdasarkan prognosis konsumsi beras di Jawa Tengah, konsumsi mencapai 98 kilogram per orang per tahun. Daya dukung pangan dihitung berdasarkan rasio antara kebutuhan beras terhadap produksi beras, yang selanjutnya dikonversikan dalam bentuk indeks daya dukung lahan pangan. Berikut hasil perhitungan daya dukung pangan di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.1.10
Daya Dukung Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2029

	Satuan	2029
Jumlah Produksi Padi	ton	189.788
Konversi Gabah Giling/GKG ke beras	ton (62,74%)	119.092
Jumlah Penduduk	jiwa	1.358.669
Jumlah Beras Dikonsumsi	ton (98 kg/orang/tahun)	133.150
Jumlah Surplus Beras	ton	-14.058
Daya Dukung Lahan untuk Pangan		0,89
Surplus Beras	ton/tahun	-14.058

Sumber: Laporan Utama Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029

Berdasarkan perhitungan tersebut, daya dukung lahan pangan di Kabupaten Magelang diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 0,04 poin hingga akhir tahun perencanaan 2029. Namun demikian, secara kuantitatif masih terdapat defisit daya dukung pangan sebesar -14.058 ton. Data produksi pangan dari BPS Kabupaten Magelang dalam buku *Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten Magelang tahun 2021* menunjukkan adanya peningkatan peningkatan produksi padi dari tahun 2020 ke 2021, meskipun belum mencapai capaian produksi tahun 2019.

Skenario yang disusun untuk meningkatkan kembali daya dukung pangan, khususnya beras, mencakup penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) serta rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi. Hal ini bertujuan untuk mengubah lahan tadah hujan menjadi lahan basah yang lebih produktif

melalui sistem irigasi yang mendukung peningkatan produksi tahunan tanaman pangan. Dengan penetapan LSD sesuai dengan RTRW Kabupaten Magelang serta dukungan peningkatan teknologi pascapanen dalam mengelola Gabah Kering Giling (GKG) menjadi beras secara lebih efisien, diharapkan produktivitas padi dan nilai daya dukung pangan di Kabupaten Magelang dapat kembali meningkat. Meskipun hingga tahun 2029 Kabupaten Magelang masih berada dalam kondisi defisit daya dukung pangan, sama seperti tahun 2024, terjadi penurunan defisit dari 19.107 ton pada tahun 2024 menjadi 14.058 ton pada tahun 2029, atau mengalami penurunan sebesar 5.049 ton. Untuk mengubah kondisi defisit menjadi surplus, skenario peningkatan daya dukung pangan diarahkan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan dan melindungi kawasan peruntukan pertanian lahan basah sesuai arahan RTRW untuk kawasan tanaman pangan seluas 28.422,45 hektare melalui LSD, dengan komposisi 70 persen lahan basah dan 30 persen lahan kering, serta menerapkan indeks tanam sebanyak dua kali pada lahan basah dan satu kali pada lahan kering.
2. Melakukan revitalisasi untuk mengoptimalkan jaringan irigasi pada lahan sawah irigasi dan pembukaan jaringan baru pada lahan sawah tadah hujan.
3. Melaksanakan diversifikasi pangan melalui penerapan pola konsumsi gizi seimbang untuk mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras per kapita.

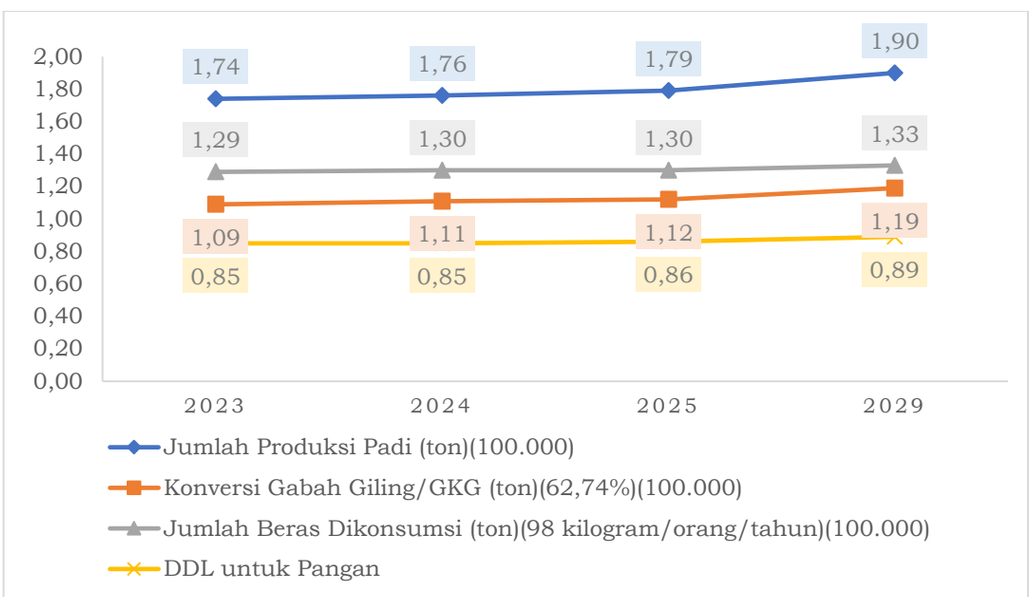

Gambar 2.1.3
Skenario Daya Dukung Pangan Kabupaten Magelang
Tahun 2023-2029
Sumber: Laporan Utama Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, untuk meningkatkan daya dukung perlu dilakukan integrasi dengan analisis potensi lingkungan, terutama terkait dengan ketersediaan lahan dan fungsi ekosistem di Kabupaten Magelang. Terdapat beberapa layanan jasa lingkungan hidup yang ada di daerah ini, yakni jasa lingkungan hidup penyedia pangan, penyedia air bersih, pengatur iklim, pengatur tata air dan banjir, mitigasi banjir, serta mitigasi tanah longsor, yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Magelang.

Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan (JLHP 1) mencakup penyediaan hasil pangan yang berasal dari hutan (tanaman dan hewan), pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan. Tujuan penyediaan jasa ini adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka mendukung ketersediaan pangan bagi masyarakat. Berikut kategori jasa lingkungan penyedia pangan di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.1.11
Luas Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten Magelang

Kelas	Luas (Ha)	Persen (%)
Sangat Rendah	166,27	0,15
Rendah	12.073,32	10,72
Sedang	28.414,03	25,24
Tinggi	49.673,10	44,12
Sangat Tinggi	22.266,45	19,78
Total	112.593,18	100

Sumber: Laporan Utama Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029

Berdasarkan hasil pemetaan, jasa lingkungan hidup penyedia pangan di Kabupaten Magelang masih menunjukkan potensi yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh dominasi kelas sangat tinggi seluas 22.266,45 hektare atau sekitar 20 persen dari total luas wilayah, serta kelas sedang seluas 28.414,03 hektare atau sekitar 25 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa Kabupaten Magelang masih memiliki lahan yang potensial untuk mendukung penyediaan pangan, seperti lahan sawah dan perkebunan. Meskipun demikian, sekitar 11 persen wilayah termasuk dalam kategori kelas rendah, yang umumnya berkaitan dengan kawasan lahan terbangun.

Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air (JLHP 2) meliputi penyediaan air tanah (termasuk kapasitas penyimpanan) dan air permukaan. Tujuan dari penyediaan jasa ini adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan guna mendukung penyediaan air bersih bagi kehidupan manusia dan keberlanjutan pembangunan. Berikut kategori jasa lingkungan hidup penyedia air di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.1.12
Luas Jasa Lingkungan Penyedia Air Kabupaten Magelang

Kelas	Luas (Ha)	Persen (%)
Sangat Rendah	675,46	0,60
Rendah	17.877,16	15,88
Sedang	93.774,26	83,29
Tinggi	1,54	0,00
Sangat Tinggi	-	-
Total	112.593,18	100

Sumber: Laporan Utama Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029

Di Kabupaten Magelang, jasa lingkungan hidup penyedia air didominasi oleh kelas sedang dengan luasan mencapai 93.774,26 hektare atau sekitar 83,29 persen dari total luas wilayah. Adapun kelas tinggi dan rendah memiliki luasan yang relatif kecil. Kelas rendah umumnya tersebar di kawasan dataran tinggi. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan lahan di Kabupaten Magelang dalam menyediakan air masih berada pada tingkat yang cukup baik.

Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim (JLHR 1) mencakup fungsi pengaturan suhu, kelembapan, dan curah hujan, serta pengendalian emisi gas rumah kaca dan karbon. Tujuan dari penyediaan jasa ini adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hutan sebagai pengatur iklim global, mengendalikan kerusakan hutan, serta mengurangi emisi karbon dan sumber gas rumah kaca lainnya. Berikut kategori jasa ekosistem pengaturan iklim Kabupaten Magelang.

Tabel 2.1.13
Luas Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Kabupaten Magelang

Kelas	Luas (Ha)	Persen (%)
Sangat Rendah	3.338,47	2,97
Rendah	11.584,78	10,29
Sedang	97.258,02	86,38
Tinggi	411,90	0,37
Sangat Tinggi	-	-
Total	112.593,18	100

Sumber: Laporan Utama Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029

Jasa lingkungan hidup pengatur iklim di Kabupaten Magelang didominasi oleh kelas sedang, dengan luas mencapai 97.258,02 hektare atau sekitar 86,38 persen dari total luas wilayah. Sementara itu, kelas rendah dan kelas tinggi memiliki persebaran yang relatif kecil. Luas kelas tinggi tercatat sebesar 411,90 hektare, yang umumnya berada pada kawasan dengan tutupan lahan bervegetasi tinggi, seperti kawasan hutan. Berdasarkan sebaran ini, dapat disimpulkan bahwa kondisi jasa pengatur iklim di Kabupaten Magelang masih tergolong cukup baik. Hal ini juga terlihat dari dominasi penggunaan lahan perkebunan, yang memiliki kemampuan dalam mendukung fungsi pengaturan iklim.

Jasa lingkungan Pengaturan Tata Air dan Banjir (JLHR 2) mencerminkan fungsi siklus hidrologi dan peran infrastruktur alam sebagai media penyimpanan air, pengendali banjir, serta pelestari sumber daya air. Tujuan dari jasa ini adalah untuk mendukung pengelolaan tata ruang dan tata lingkungan yang berkaitan dengan tata air, termasuk pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pengendalian ekstraksi air berlebih, konservasi air tanah, serta mitigasi risiko bencana banjir. Berikut ini disajikan kategori jasa lingkungan pengatur tata air dan banjir di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.1.14
Luas Jasa Lingkungan Pengatur Tata Air dan Banjir di Kabupaten Magelang

Kelas	Luas (Ha)	Persen (%)
Sangat Rendah	-	-
Rendah	6.544,55	5,81
Sedang	55.363,07	49,17
Tinggi	50.420,18	44,78
Sangat Tinggi	-	-
Total	112.593,18	100

Sumber: Laporan Utama Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029

Di Kabupaten Magelang, kategori jasa lingkungan pengatur tata air dan banjir didominasi oleh kelas sedang seluas 55.363,07 hektare atau sekitar 49,17 persen dari total luas wilayah, dan kelas tinggi seluas 50.420,18 hektare atau sekitar 44,78 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang mempunyai potensi yang cukup baik dalam hal pengaturan air. Jika dikaitkan dengan pola penggunaan lahan, potensi tersebut umumnya berada pada kawasan dengan vegetasi tinggi seperti kawasan hutan dan perkebunan. Kawasan ini memiliki kemampuan dalam mengatur tata air secara alami, terutama dalam mengendalikan laju limpasan permukaan.

Jasa lingkungan hidup untuk mitigasi banjir menggambarkan kapasitas wilayah dalam mencegah dan mengendalikan risiko bencana banjir. Tujuan dari jasa ini adalah untuk mengurangi dampak bencana banjir terhadap masyarakat Kabupaten Magelang. Hasil analisis menunjukkan bahwa kategori jasa mitigasi banjir di Kabupaten Magelang didominasi oleh kelas sedang seluas 56.695,71 hektare atau sekitar 50,35 persen, dan kelas rendah seluas 40.547,88 hektare atau sekitar 36,01 persen. Beberapa kecamatan yang memiliki kapasitas mitigasi banjir yang rendah antara lain Kecamatan Borobudur, Tempuran, dan Salaman. Sementara itu, wilayah dengan potensi mitigasi banjir yang baik umumnya berada di kawasan dataran tinggi, seperti Kecamatan Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, dan Dukun.

Tabel 2.1.15
Luas Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Banjir di Kabupaten Magelang

Kelas	Luas (Ha)	Persen (%)
Sangat Rendah	6.550,70	5,82
Rendah	40.547,88	36,01
Sedang	56.695,71	50,35
Tinggi	8.652,67	7,68
Sangat Tinggi	146,23	0,13
Total	112.593,18	100,00

Sumber: Laporan Utama Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029

Jasa lingkungan hidup mitigasi longsor menunjukkan potensi lahan dalam mencegah dan mengendalikan bencana banjir. Jasa ini berperan penting dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana, khususnya di wilayah rawan longsor. Berikut disajikan kategori kelas jasa lingkungan hidup mitigasi longsor di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.1.16
Luas Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Tanah Longsor di Kabupaten Magelang

Kelas	Luas (Ha)	Persen (%)
Sangat Rendah	49,34	0,04
Rendah	20.379,52	18,10
Sedang	90.070,60	80,00
Tinggi	2.083,65	1,85
Sangat Tinggi	10,07	0,01
Total	112.593,18	100,00

Sumber: Laporan Utama Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029

Berdasarkan hasil pemetaan, jasa mitigasi longsor di Kabupaten Magelang didominasi oleh kelas sedang dengan luasan mencapai 90.070,60 hektare atau sekitar 80 persen dari total luas wilayah. Kelas rendah mencakup 18,10 persen, sementara kelas tinggi memiliki luasan yang relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang belum memiliki kapasitas mitigasi longsor yang optimal sehingga memerlukan perhatian dalam pengelolaan lahan dan upaya konservasi wilayah rawan longsor.

Analisis terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta pemanfaatan jasa lingkungan hidup, menjadi dasar dalam memastikan memastikan keberlanjutan pembangunan wilayah. Ketika kapasitas ekologis melampaui batas yang ditentukan, maka kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan meningkat dan mengancam keberlangsungan fungsi ekosistem. Oleh karena itu, penguatan ketahanan lingkungan perlu diintegrasikan dengan upaya pelestarian keanekaragaman hayati sebagai komponen utama ekosistem. Keanekaragaman hayati berperan strategis dalam mendukung jasa ekosistem, seperti penyediaan air bersih, pembentukan dan perlindungan tanah, remediasi polutan, serta stabilisasi iklim pada skala makro maupun mikro. Selain itu, keanekaragaman hayati juga mendukung ketahanan pangan, kesehatan

(melalui potensi obat-obatan), serta memberikan nilai sosial dan budaya melalui fungsi edukatif dan pariwisata.

Kabupaten Magelang memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk flora dan fauna yang dilindungi serta kawasan konservasi seperti Cagar Biosfer Gunung Merapi dan Merbabu. Sumber daya hayati ini mencakup keanekaragaman tumbuhan, satwa, mikroorganisme, dan sumber daya genetik (plasma nutfah) yang berperan penting dalam mendukung ketahanan sosial-ekonomi dan ekologi wilayah. Namun demikian, potensi tersebut menghadapi sejumlah tekanan. Ancaman utama pada keanekaragaman hayati disebabkan oleh kegiatan pembalakan di hutan produksi pada hutan hujan tropis di dataran rendah umumnya adalah karena permasalahan degradasi habitat, fragmentasi wilayah, eksploitasi berlebih terhadap spesies tertentu, serta introduksi spesies asing. Kondisi ini berpotensi mempercepat kepunahan spesies dan menyulitkan upaya pelestarian. Oleh karena itu, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di Kabupaten Magelang perlu menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Keanekaragaman hayati Taman Nasional Gunung Merapi menunjukkan nilai konservasi yang signifikan, sebagaimana tercermin dalam data Balai Taman Nasional Gunung Merapi tahun 2021 yang mencatat keberadaan spesies yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, terdiri atas 37 jenis satwa dan lima jenis tumbuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah Taman Nasional Gunung Merapi merupakan habitat penting bagi berbagai flora dan fauna endemik serta terancam punah. Oleh karena itu, pembangunan di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Merapi perlu mempertimbangkan aspek perlindungan keanekaragaman hayati secara menyeluruh, termasuk penerapan prinsip konservasi dalam perencanaan ruang, pengendalian aktivitas penggunaan lahan, serta peningkatan pengawasan dan kolaborasi lintas sektor guna memastikan keberlanjutan fungsi ekologis wilayah tersebut. Secara rinci, daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang ditemukan di kawasan TNGM, baik yang termasuk dalam kategori dilindungi maupun tidak dilindungi, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1.17
Nama dan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar di TNGM yang Dilindungi

No	Nama Spesies		Keterangan
	Nama Ilmiah	Nama Lokal	
A	**Satwa Mamalia**		
1	*Muntiacus*	Muntjak Kijang	Dilindungi UU P.106_2018
2	*Prionailurus bengalensis*	Kucing Hutan	Dilindungi UU P.106_2018
3	*Panthera pardus*	Macan Tutul	Dilindungi UU P.106_2018
4	*Trachypithecus auratus*	Lutung Jawa	Dilindungi UU SK Menteri Kehutanan Tahun 1999 & P.106_2018
5	*Hystix brachyura*	Landak Jawa	Dilindungi UU P.106_2018
B	**Satwa Burung**		
1	*Pernis ptilorhynchus*	Sikep Madu Asia	Dilindungi UU P.106_2018
2	*Haliastur indus*	Elang Bondol	Dilindungi UU P.106_2018
3	*Spilornis cheela*	Elang ular Bido	Dilindungi UU P.106_2018
4	*Accipiter trivirgatus*	Elang alap Jambul	Dilindungi UU P.106_2018
5	*Accipiter soloensis*	Elang Alap Cina	Dilindungi UU P.106_2018
6	*Butastur indicus*	Elang Kelabu	Dilindungi UU P.106_2018
7	*Ictinaetus malayensis*	Elang Hitam	Dilindungi UU P.106_2018
8	*Nisaetus cirrhatus*	Elang Brontok	Dilindungi UU P.106_2018
9	*Nisaetus bartelsi*	Elang Jawa	Dilindungi UU P.106_2018
10	*Falco moluccensis*	Alap-Alap Sapi	Dilindungi UU P.106_2018
11	*Falco subbeteo*	Alap-alap Walet	Dilindungi UU P.106_2018
12	*Falco severus*	Alap-alap Macan	Dilindungi UU P.106_2018
13	*Falco peregrinus*	Alap-Alap Kawah	Dilindungi UU P.106_2018
14	*Psittacula alexandri*	Betet Biasa	Dilindungi UU P.106_2018
15	*Loriculus pusillus*	Serindit Melayu	Dilindungi UU P.106_2018
16	*Loriculus pusillus*	Seindit Jawa	Dilindungi UU P.106_2018
17	*Rhipidura phoenicura*	Kipasan Ekormerah	Dilindungi UU P.106_2018
18	*Rhipidura javanica*	Kipasan Belang	Dilindungi UU P.106_2018
19	*Rhipidura euryura*	Kipasan Bukit	Dilindungi UU P.106_2018
20	*Aethopyga mystacalis*	Burungmadu Jawa	Dilindungi UU P.106_2018
21	*Crypsiria temia*	Tangkar Cetrong	Dilindungi UU P.106_2018
C	**Satwa Serangga**		
1	*Troides Helena*	Kupu-kupu raja Helena	Dilindungi UU PP. 7 & P.106_1018; APP II Cites 11 Nov 2019
D	**Tumbuhan Anggrek**		
1	*Dendrobium mutabile*	-	Dilindungi UU PP.7_1999
2	*Macodes petola*	-	Dilindungi berdasarkan PP 7 Tahun 1999
E	**Jenis Pohon**		
1	*Castanopsis argentea*	Sarangan	Dilindungi UU P.106_2018
F	**Tumbuhan Lainnya**		
1	*Anaphalis javanica*	Edelweis	Dilindungi UU P.106_2018
2	*Nephentes sp*	Kantung semar	Dilindungi UU PP.7_1999 & P.106_2018

Sumber: Laporan Utama IKPLHD Kabupaten Magelang Tahun 2022 dan masukan narasumber saat UP1 (dalam Laporan Utama Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029)

Tingginya jumlah spesies burung mengindikasikan mengindikasikan fungsi ekologis dari Taman Nasional Gunung Merapi sebagai habitat dan jalur migrasi, yang mendukung keseimbangan rantai makanan dan proses regeneratif ekosistem. Keberadaan spesies anggrek dan berbagai tumbuhan lain yang dilindungi menunjukkan potensi genetika tumbuhan yang tinggi serta peran penting vegetasi endemik dalam menjaga stabilitas tanah dan ketersediaan air. Namun, terbatasnya jumlah spesies serangga, amfibi, dan pohon yang tercatat menandakan perlunya peningkatan kegiatan inventarisasi dan pemantauan berbasis data, agar seluruh elemen biodiversitas dapat teridentifikasi secara

komprehensif dan dimasukkan dalam skema perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan.

Tabel 2.1.18
Rekapitulasi Data Kepunahan Satwa, Tumbuhan, dan Jamur yang Teridentifikasi di TNGM Pascaerupsi Merapi 2010-2021

No	Spesies Tumbuhan dan Satwa	Jumlah Spesies	Persentase
A	**Golongan Satwa**		
1	Mamalia	16	4
2	Burung (Aves)	162	35
3	Reptil	24	5
4	Amfibi	17	4
5	Serangga	241	
	Kupu-kupu (200)		43
	Capung (41)		9
6	Siput (Gastropoda)	1	
7	Cacing (Clitellata)	1	
	Jumlah Spesies Satwa	**462**	
B	**Golongan Tumbuhan**		
1	Pohon	81	25
2	Perdu	33	10
3	Bambu	13	4
4	Palma	5	1
5	Anggrek	74	23
6	Paku-Pakuan	32	10
7	Tumbuhan Lainnya	59	18
8	Lumut	28	9
	Jumlah Spesies Tumbuhan	**325**	
C	**Jamur (Makroskopis)**	23	
	Total	808	

Sumber: Statistik Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Magelang Tahun 2021 (dalam Laporan Utama Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029)

Berdasarkan rekapitulasi data kepunahan spesies di TNGM pascaerupsi Merapi tahun 2010-2021, tercatat sebanyak 808 spesies flora, fauna, dan jamur yang terdampak, dengan rincian 462 spesies berasal dari golongan satwa, 325 spesies tumbuhan, dan 23 spesies jamur makroskopis. Dominasi kepunahan pada kelompok serangga (52 persen), yang terdiri atas kupu-kupu (43 persen) dan capung (9 persen). Spesies burung (35 persen) juga menunjukkan tingginya kerentanan kelompok dengan mobilitas tinggi. Sementara itu, tingginya kehilangan spesies tumbuhan berbunga seperti pohon (25 persen) dan anggrek (23 persen) mengindikasikan terganggunya suksesi vegetasi dan berpotensi mengurangi kemampuan hutan untuk beregenerasi. Data ini mencerminkan pentingnya kebijakan restorasi ekosistem berbasis keanekaragaman hayati dalam perencanaan pembangunan wilayah sekitar Merapi, guna memastikan pemulihan habitat, menjaga keseimbangan ekologis, serta memperkuat ketahanan lanskap terhadap bencana di masa yang akan datang.

Keanekaragaman hayati Taman Nasional Gunung Merbabu juga menunjukkan tingginya nilai konservasi kawasan, dengan keberadaan spesies flora dan fauna yang berstatus endemis, dilindungi, terancam punah, maupun berlimpah. Data Statistik Balai Taman Nasional Gunung Merbabu tahun 2019 mengidentikasi sejumlah spesies yang mencerminkan kompleksitas ekosistem

dan fungsi ekologis kawasan. Berikut jumlah flora dan fauna yang terdapat di Taman Nasional Gunung Merbabu berdasarkan jenisnya.

Tabel 2.1.19
Jenis Flora dan Fauna yang Ada di Taman Nasional Gunung Merbabu

No	Jenis Flora dan Fauna	Jumlah Spesies
1	**Jenis Flora**	**135**
2	***Invasive Alien Species* (IAS)**	**11**
3	**Jenis Fauna**	
	Primata	3
	Mamalia	13
	Aves	113
	Kupu-kupu	25

Sumber: Laporan Utama IKPLHD Kabupaten Magelang Tahun 2022 dan masukan narasumber saat UP1 (dalam Laporan Utama Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029)

Taman Nasional Gunung Merbabu merupakan kawasan konservasi yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang signifikan, ditunjukkan oleh keberadaan 135 spesies flora dan 154 spesies fauna yang terdiri atas tiga primata, tiga belas mamalia, 113 aves, dan 25 jenis kupu-kupu. Tingginya keragaman jenis ini menandakan pentingnya kawasan tersebut sebagai tempat hidup alami dan penyokong ekosistem regional. Namun, keberadaan sebelas spesies asing invasif menunjukkan adanya tekanan ekologis yang dapat mengganggu keseimbangan populasi spesies asli, serta menurunkan kualitas habitat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Taman Nasional Gunung Merbabu perlu diintegrasikan secara sinergis dalam rencana pembangunan daerah, terutama melalui penguatan kebijakan konservasi, pengendalian spesies invasif, serta pengembangan ekowisata yang mendukung konservasi sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan di kawasan penyangga taman nasional.

Tabel 2.1.20
Kondisi Flora dan Fauna yang dilindungi di Kabupaten Magelang

No	Golongan	Nama spesies diketahui	Status			
			Endemis	Terancam	Berlimpah	Dilindungi
1	Hewan menyusui (Mamalia)	Kera Ekor Panjang (*Macaca Sp.*)			√	√
		Trenggiling (*Manis javanica*)		√		√
		Landak (*Hystrix brachiura*)		√		√
		Lutung (*Presbytis potenziani*)		√		√
		Sigung (*Mydaus javanensis*)		√		√
		Kijang (*Muntinous muntjak*)		√		√
		Macan Tutul (*Panthera pardus*)				√
		Kucing hutan (*Felis bengalensis*)		√		√
		Musang (*Paradoxus sp.*)			√	√
		Babi Hutan (*Sus scrofa*)		√		√
		Rek-rekan (*Presbytis fredericae*)	√	√		√

No	Golongan	Nama spesies diketahui	Status			
			Endemis	Terancam	Berlimpah	Dilindungi
2	Burung	Alap-alap sapi (*Falco moluccensis*)		√		√
		Ayam hutan (*Gallus varius*)		√		
		Betet kelabu (*Lanius schach*)		√		
		Cekakak (*Halcyon cyanoventris*)		√		
		Ceret gunung/Ciblek (*Cettia vulcania*)		√		
		Cucak kutilang (*Pycnonotus aurigaster*)		√		
		Elang (*Ictinaetus maleyensis*)		√		√
		Gagak (*Corvus corax*)		√		
		Gelatik – batu kelabu (*Parus major*)		√		
		Kacamata gunung (*Zosterops montanus*)		√		
		Tekukur (*Stroptopelia chinensis*)		√		
		Pleci (*Zosterops nehrkornii*)		√		
		Prenjak (*Prinia familiaris*)		√		
		Uncal loreng (*Macropygia unchall*)		√		
		Walet lincii (*Callcalia linchii*)		√		
		Burung Madu Gunung (*Aethopyga eximia*)		√		
		Burung Madu Kelapa (*Anthreptes malacensis*)		√		
		Burung Madu Sriganti (*Cinnyris jugularis*)		√		
		Cekakak Jawa (*Halcyon cyanoventris*)		√		
		Cekakak Sungai (*Halcyon chloris*)		√		
		Elang Bido (*Spilornis cheela*)		√		√
		Elang Hitam (*Ictinaetus malayensis*)		√		√
		Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*)	√	√		√
		Tepus Pipi Perak (*Stachyris melanothorax*)			√	
3	Reptil	Sanca bodo (*Python sp*)		√		√
		Biawak (*Varanus Sp*)		√		√
4	Amphibi	Tidak ada (yang dilindungi)				
5	Ikan	Tidak ada (yang dilindungi)				
6	Tumbuh-tumbuhan	Vanda (*Vanda tricolor*)		√		√
		Kantong semar (*Nephenthes Spp*)		√		√
		Palem Jawa (*Ceratolobus glaucescens*)		√		
		Anggrek (*Dendrobium sp.*)		√		
		Pinang Jawa (*Pinanga javanica*)		√		

Sumber: Laporan Utama KLHS RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2024 (dalam Laporan Utama Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029)

Berdasarkan data, terdapat sejumlah spesies mamalia, seperti trenggiling (*Manis javanica*), lutung (*Presbytis potenziani*), dan rek-rekan (*Presbytis fredericae*) yang masuk dalam kategori dilindungi dan terancam, mencerminkan urgensi perlindungan habitat dan mitigasi tekanan ekologis akibat fragmentasi lahan serta perburuan liar. Di sektor burung, keberadaan elang jawa (Nisaetus bartelsi) sebagai spesies endemis, terancam, dan dilindungi menandai pentingnya kawasan hutan di wilayah ini sebagai habitat kritis. Lebih lanjut, keberadaan tumbuhan langka seperti anggrek (*Dendrobium sp.*) dan kantong semar (*Nephenthes spp.*) menambah nilai konsrvasi ekosistem lokal.

Keanekaragaman hayati yang terjaga dengan baik tidak hanya berfungsi sebagai penopang keberlangsungan ekosistem, tetapi juga memberikan manfaat dalam aspek ekologis, ekonomi, dan sosial budaya kepada masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan berkelanjutan, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati memerlukan pendekatan terintegrasi yang mencakup pelestarian kawasan bernilai konservasi tinggi. Salah satu instrumen strategis dalam upaya tersebut adalah penetapan dan pengelolaan cagar biosfer sebagai bagian dari jaringan kawasan lindung.

Cagar biosfer berperan sebagai contoh pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan pelestarian keanekaragaman hayati, pembangunan ekonomi, serta dukungan terhadap lapasitas kelembagaan dan masyarakat lokal. Cagar Biosfer merupakan kawasan yang terdiri atas ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi, di mana seluruh komponen alamnya dilindungi dan dilestarikan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan. Fungsi utama cagar biosfer meliputi konservasi keanekaragaman hayati, fasilitasi pembangunan berkelanjutan, dan pemberian dukungan bagi pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab.

UNESCO menetapkan Cagar Biosfer Merapi-Menoreh-Merbabu pada tanggal 28 Oktober 2020 dengan kuas total 254.876,75 hektare, yang terbagi atas zona inti seluas 12.447,47 hektare mencakup Taman Nasional Gunung Merapi, Taman Nasional Gunung Merbabu, dan Suaka Margasatwa Sermo, yang berfungsi sebagai area konservasi dengan perlindungan hukum jangka panjang dan pemantauan ekosistem berkelanjutan, zona penyangga seluas 108.788,88 hektare yang meliputi desa-desa penyangga di koridor lanskap utama antara Taman Nasional Merapi-Merbabu, Candi Borobudur, dan pengunungan Menoreh, berfungsi sebagai pelindung zona inti dari dampak negatif akibat kegiatan manusia serta mendukung kegiatan ekologis bertanggung jawab seperti ekowisata dan pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan,

serta zona transisi seluas 133.640,40 hektare yang meliputi wilayah administratif kecamatan di sekeliling zona penyangga, terdiri atas 377 desa yang tersebar di Kabupaten Semarang, Boyolali, Purworejo, Magelang, dan Klaten; Kota Salatiga dan Kota Magelang; serta Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan berkelanjutan oleh masyarakat secara langsung.

D. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah suatu indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai IKP yang diperoleh, semakin baik pula kondisi ketahanan pangan di wilayah tersebut, yang mencerminkan tingkat ketahanan pangan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

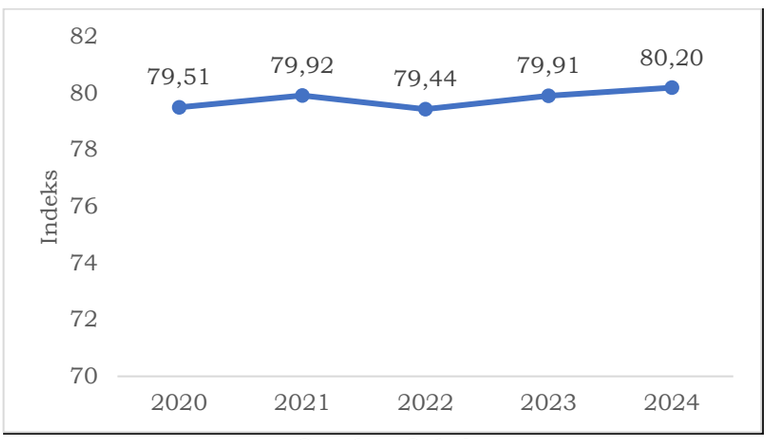

Gambar 2.1.4
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Dari tahun 2020 hingga 2024, nilai IKP Kabupaten Magelang memiliki tren yang cenderung stabil dengan sedikit fluktuasi. Meskipun terjadi kenaikan dari 79,51 pada 2020 menjadi 79,92 pada 2021, angka ini sempat menurun menjadi 79,44 pada 2022 sebelum kembali meningkat menjadi 79,91 pada 2023 dan mencapai 80,20 pada 2024. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang telah melakukan upaya yang cukup berhasil untuk memastikan ketahanan pangan. Selama periode tersebut, berbagai langkah telah dilakukan, seperti peningkatan produksi dan akses pangan, penguatan ketahanan terhadap bencana, peningkatan kesadaran gizi, serta diversifikasi pangan.

Ketidakcukupan konsumsi pangan terjadi ketika seseorang secara rutin mengonsumsi jumlah makanan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan energi yang diperlukan agar tetap hidup sehat, aktif, dan produktif. **Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of***

***Undernourishment/PoU*)** merujuk pada persentase penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi makanan dengan kandungan energi yang lebih rendah dari standar kecukupan untuk hidup sehat dan produktif. Ini juga menggambarkan probabilitas seorang individu yang terpilih secara acak dari populasi untuk mengonsumsi makanan yang tidak memenuhi kebutuhan energi hariannya.

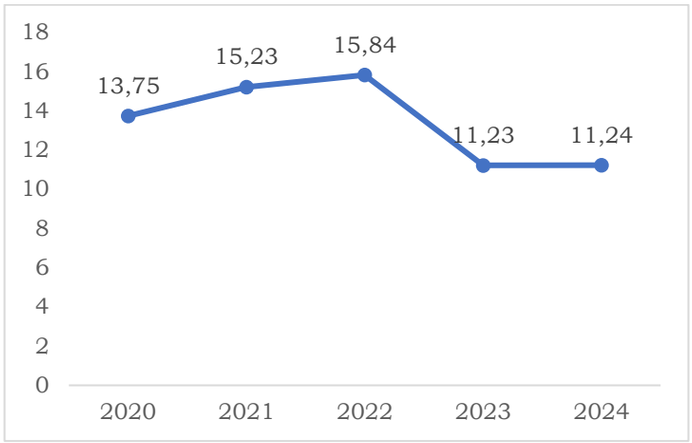

Gambar 2.1.5
***Prevalence of Undernourishment* (PoU) Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024**
Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Dalam lima tahun terakhir, PoU Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan menurun, ditandai dengan rata-rata pertumbuhan tahunan bernilai negatif sebesar -4,91 persen. Pada tahun 2020, capaian PoU tercatat sebesar 13,75 persen. Angka tersebut mengalami fluktuasi hingga menjadi 11,24 persen pada akhir periode. Ketidakcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) merupakan salah satu indikator yang memiliki keterkaitan dengan risiko kejadian stunting. Indikator tersebut juga berkaitan dengan salah satu agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yakni tanpa kelaparan (*zero hunger*), di mana tidak ada seorang pun yang kekurangan gizi maupun yang mengalami malnutrisi.

Indeks ketahanan energi merupakan salah satu indikator penting untuk melihat ketahanan suatu daerah dalam aspek energi. Indeks ini diukur melalui konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita), yang merupakan perbandingan antara pemakaian tenaga listrik dengan jumlah penduduk. Pemakaian tenaga listrik mencakup total kWh (*kiloWatt hours*) energi listrik yang digunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Magelang dari tahun 2020 ke tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,47 persen per tahun. Pada tahun 2020, konsumsi listrik tercatat sebesar 515,87 kWh per kapita, kemudian bertumbuh setiap tahunnya sampai dengan tahun 2024 hingga capaiannya menjadi 595,41 kWh

per kapita. Kenaikan ini mencerminkan adanya perubahan yang signifikan dalam pola konsumsi energi masyarakat setempat.

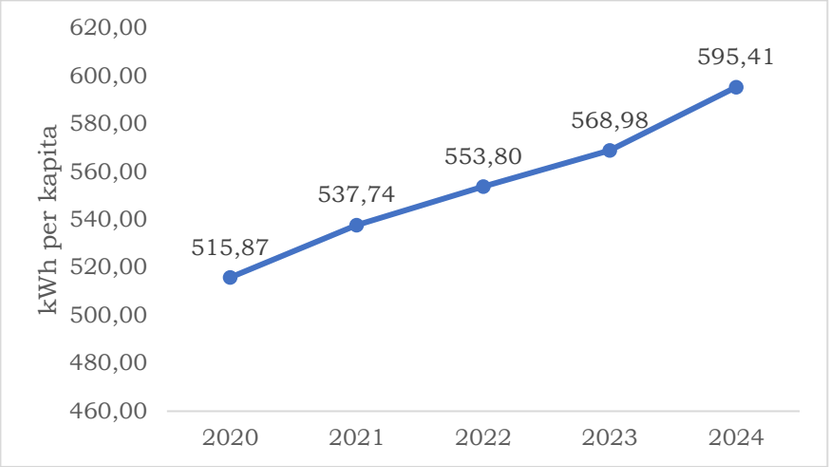

Gambar 2.1.6
Konsumsi Listrik per Kapita di Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024
Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2022–2024, Diolah

Indeks Ketahanan Air (IKA) merupakan hal yang sangat penting. Jika indeks ketahanan energi menitikberatkan pada konsumsi listrik per kapita sebagai indikator utama, maka indeks ketahanan air lebih berfokus pada kemampuan suatu wilayah untuk menjaga keberlanjutan dalam memenuhi kebutuhan air. Hal ini tidak hanya mencakup jumlah air yang cukup, tetapi juga kualitas yang dapat diterima (UN–Water 2013), serta kemampuan untuk mengelola dan mempertahankan sumber daya air yang memadai dan berkualitas.

Akses rumah tangga terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai dampak konkret dari ketahanan air suatu wilayah. Rumah tangga di wilayah perkotaan dikategorikan memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan apabila memenuhi sejumlah kriteria, yakni: 1) menggunakan sumber air minum dari jaringan perpipaan; 2) lokasi sumber air minum berada di dalam rumah atau di area halaman (*on premises*); 3) ketersediaan air setiap saat dibutuhkan; serta 4) memenuhi standar kualitas air minum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

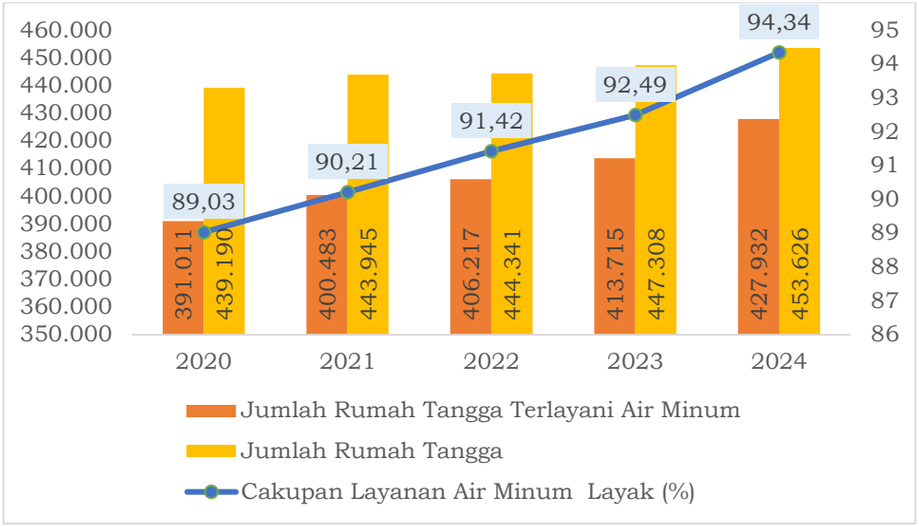

Gambar 2.1.7
Cakupan Akses Layanan Air Minum Layak di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025

Di Kabupaten Magelang, capaian indikator akses layanan air minum layak menunjukkan tren yang positif selama periode 2020 hingga 2024. Persentase rumah tangga yang terlayani air minum layak meningkat dari 89,03 persen (sekitar 391.011 rumah tangga) pada tahun 2020 menjadi 94,34 persen (sebanyak 427.932 rumah tangga) pada tahun 2024. Capaian ini juga mencerminkan peningkatan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam memperluas cakupan layanan air minum melalui berbagai intervensi program, serta didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kualitas air minum. Selain pembiayaan dari APBD, peningkatan akses air minum juga didukung oleh pendanaan alternatif seperti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), dan program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana (Rekompak).

E. Lingkungan Hidup Berkualitas

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan indikator nasional untuk menilai kondisi lingkungan hidup pada waktu tertentu. Indikator ini mencerminkan kondisi kualitas lingkungan hidup yang dilihat melalui kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Oleh karena itu, indeks kualitas lingkungan hidup dapat menunjukkan gambaran atau indikasi awal kondisi lingkungan

hidup pada periode dan wilayah tertentu. Indeks kualitas lingkungan hidup dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

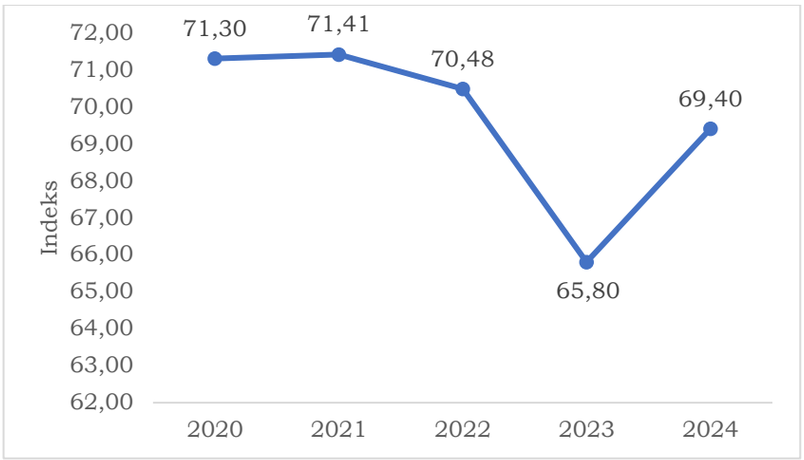

Gambar 2.1.8
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2025

Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Magelang menunjukkan fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024, dengan tren penurunan yang cukup signifikan pada 2023 sebelum mengalami sedikit pemulihan pada 2024. Pada 2020, IKLH Kabupaten Magelang tercatat sebesar 71,30 dan meningkat menjadi 71,41 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan ke angka 70,48, yang semakin memburuk pada 2023 dengan capaian terendah sebesar 65,80. Meskipun pada tahun 2024 indeks mengalami kenaikan menjadi 69,40, angka ini masih lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

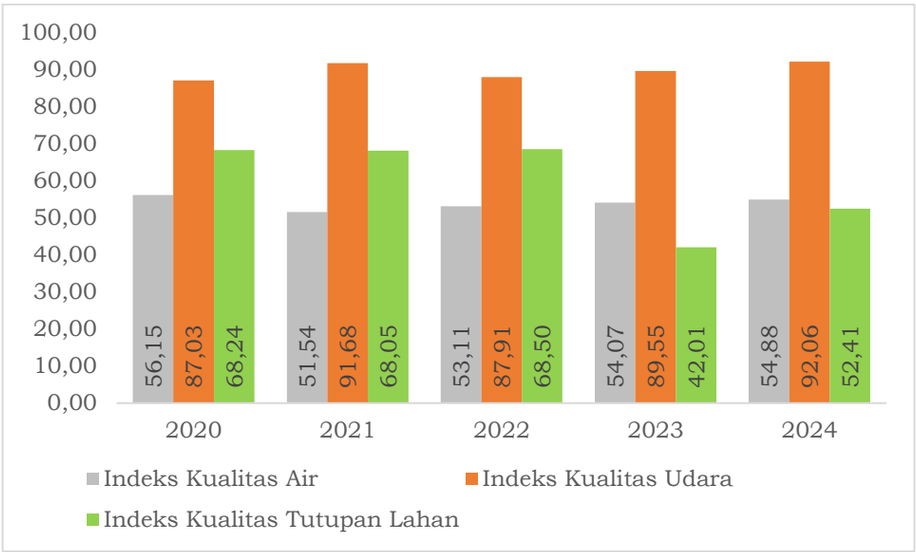

Gambar 2.1.9
Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2025

Indeks Kualitas Air menunjukkan kondisi mutu air di suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Dalam lima tahun terakhir, capaian Indeks Kualitas Air di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 0,57 persen per tahun, di mana pada tahun 2020 tercatat sebesar 56,15 dan berfluktuasi menjadi 54,88 di tahun 2024.

Selanjutnya, hasil pengukuran indeks kualitas udara dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan kesehatan. Secara umum, dalam rentang waktu yang sama, hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dan ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,41 persen per tahun. Pada tahun 2020, indikator ini tercatat sebesar 87,03 dan bertumbuh menjadi 92,06 di tahun 2024. Besaran capaian indikator tersebut mengindikasikan bahwa kualitas udara di Kabupaten Magelang sudah cukup baik dengan capaian indeks kulitas udara di atas 80 persen.

Terakhir, Indeks Kualitas Tutupan Lahan berkaitan dengan faktor luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem, dan tingkat degradasi lahan. Adapun tutupan lahan yang dihitung berupa kondisi tutupan lahan hutan dan tutupan vegetasi non hutan seperti tutupan berupa ruang terbuka hijau (hutan kota, taman kota), kebun raya, dan taman keanekaragaman hayati. Adanya indeks kualitas tutupan lahan dapat menjadi salah satu alat untuk menilai dan memantau kualitas tutupan lahan serta sebagai pertimbangan dalam menentukan tindakan dan kebijakan yang akan dibuat ke depannya. Sama halnya dengan Indeks Kualitas Air, capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Magelang ini menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020, indikator ini tercatat sebesar 68,24 dan berfluktuasi hingga tahun 2024 menjadi 51,41 atau dengan besaran rata-rata penurunan sebesar 6,39 persen per tahun.

2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Selain memastikan bahwa setiap rumah tangga memiliki akses terhadap hunian yang layak, pemenuhan kebutuhan sanitasi yang aman juga merupakan aspek krusial dalam pembangunan daerah. Sanitasi yang aman merujuk pada rumah tangga yang dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan, termasuk penggunaan kloset jenis leher angsa dan sistem pengelolaan limbah yang sesuai. Contoh dari sistem tersebut meliputi tangki

septik yang harus disedot secara berkala, setidaknya sekali dalam lima tahun, dan diolah melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), atau terhubung dengan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Ketersediaan sanitasi yang aman tidak hanya merupakan bagian dari infrastruktur dasar, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Selain itu, sanitasi yang layak juga berkontribusi pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs), khususnya dalam aspek kesehatan, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, peningkatan akses terhadap sanitasi yang aman harus dijadikan prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah guna menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

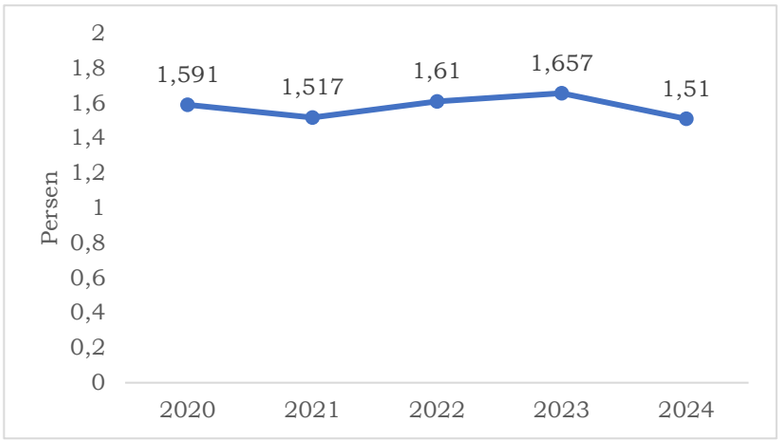

Gambar 2.1.10
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, Tahun 2025

Dalam lima tahun terakhir, indikator persentase rumah tangga dengan persentase aman di Kabupaten Magelang menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan tantangan dalam penyediaan akses sanitasi yang layak, ditandai dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -1,30 persen. Pada 2020, persentase rumah tangga dengan sanitasi aman tercatat sebesar 1,591 persen, yang sedikit menurun menjadi 1,517 persen pada 2021. Meskipun ada sedikit kenaikan pada 2022 dengan angka 1,61 persen, pada 2023 angka ini kembali meningkat menjadi 1,657 persen, namun pada 2024, angka tersebut menurun lagi menjadi 1,51 persen. Fluktuasi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih pada program-program yang berfokus pada pembangunan dan peningkatan sanitasi yang lebih merata dan berkelanjutan.

3. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Dalam konteks pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi, pentingnya pengolahan sampah menjadi perhatian yang signifikan. Keberhasilan dalam pengelolaan sampah dapat diukur melalui sejumlah indikator, di antaranya adalah timbulan (volume) sampah yang ditangani, timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah, serta persentase pengurangan jumlah sampah melalui penerapan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (3R). Timbulan sampah mengacu pada sampah yang dihasilkan dari sumber sampah, yang meliputi Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga terdiri atas sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari dalam lingkungan rumah tangga, sedangkan SSSRT berasal dari kawasan komersial, industri, kawasan khusus, serta fasilitas sosial dan umum.

Proses pengolahan sampah yang efektif harus mempertimbangkan karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, serta aspek keselamatan kerja dan kondisi sosial masyarakat. Proses ini dilaksanakan di berbagai fasilitas pengolahan sampah, seperti Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPS3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Pusat Olah Organik (POO), bank sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), serta fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola oleh pemerintah maupun operator swasta.

Namun demikian, meskipun konsep dan fasilitas pengolahan sampah telah tersedia, implementasi di tingkat daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Pelayanan persampahan di Kabupaten Magelang masih terfokus pada wilayah perkotaan, sehingga secara keseluruhan jangkauan pelayanan di tingkat kabupaten masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah pedesaan yang belum terjangkau pelayanan pengelolaan sampah secara optimal, sementara wilayah perkotaan yang telah terlayani hanya mencakup proporsi kecil dari total luas wilayah kabupaten. Kabupaten Magelang memiliki dua lokasi TPA, yakni TPA Klegen dan TPA Pasuruhan, TPA Klegen terletak di Desa Klegen, Kecamatan Grabag, dengan luas lahan 0,5 hektare dan masih menggunakan sistem *open dumping*. Sementara itu, TPA Pasuruhan berlokasi di Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, dengan luas 1,7 hektare dan telah menerapkan sistem *control landfill*. Kapasitas tampung TPA Pasuruhan tercatat sebesar 619,09 m^3, dengan volume eksisting mencapai 497,1 m^3. Namun demikian, dalam rangka mengurangi beban volume sampah di TPA Pasuruhan, sebagian aliran sampah dialihkan ke TPA Klegen. Pada bulan Januari 2023, TPA

Pasuruhan tercatat telah menerima sampah sebanyak 1.500 ton atau sekitar 115 ton per hari. Di samping pengelolaan akhir, Pemerintah Kabupaten Magelang juga telah mengupayakan pengurangan volume sampah dari sumbernya melalui pengembangan dan operasionalisasi TPS 3R.

Capaian kinerja pengelolaan sampah dapat diukur melalui persentase timbulan sampah yang berhasil diolah. Berdasarkan Catatan Hasil Reviu (CHR) Provinsi Jawa Tengah, data *cut off* Juli 2025 mencatat bahwa besaran timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah pada tahun 2024 tercatat sekitar 48,82 persen. Capaian tersebut menunjukkan proporsi atau persentase sampah yang diolah di fasilitas pengolahan sampah dari total timbulan sampah yang dihasilkan pada tahun yang sama. Dengan kata lain, dari keseluruhan sampah yang dihasilkan, baru sekitar 48,82 persen yang masuk dan diproses di fasilitas pengolahan, sementara sisanya kemungkinan masih belum terkelola dengan baik. Untuk meningkatkan angka tersebut, diperlukan peningkatan fasilitas pengolahan, optimalisasi sistem pengangkutan sampah, serta edukasi dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan dan daur ulang sampah.

F. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Merujuk pada dokumen KLHS terkait RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029, Kabupaten Magelang telah diidentifikasi sebagai wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang sangat tinggi. Kerawanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor geospasial, termasuk morfologi, geologi, hidrologi wilayah, serta keberadaan Gunung Merapi yang menjadi sumber potensi bencana vulkanik.

Berdasarkan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022, potensi bencana alam di daerah ini dikategorikan dalam tingkat risiko sedang hingga tinggi, meliputi berbagai jenis bencana seperti banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, kekeringan, gempa bumi, kebakaran hutan atau lahan, letusan Gunung Merapi, tanah longsor, dan angin puting beliung. Namun, patut dicatat bahwa potensi bencana yang disebabkan oleh letusan Gunung Sumbing masih tergolong rendah.

Tabel 2.1.21
Risiko Bencana Kabupaten Magelang

No	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1	Banjir	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
2	Banjir bandang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
3	Cuaca ekstrem	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
4	Gempa bumi	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
5	Kebakaran hutan/lahan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
6	Kekeringan	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang
7	Letusan Gunung Merapi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
8	Letusan Gunung Sumbing	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
9	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
10	Angin puting beliung				

Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2018–2022 dalam Laporan Akhir RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2024–2044

Lebih lanjut, dalam KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 disebutkan bahwa beberapa ancaman bencana alam pernah terjadi di Kabupaten Magelang, yaitu:

a. tanah longsor yang melanda 21 kecamatan;
b. banjir di aliran sungai, terutama di Sungai Progo dan Sungai Elo;
c. cuaca ekstrem yang terjadi di 21 kecamatan;
d. krisis air bersih akibat kekeringan yang melanda 21 kecamatan pada musim kemarau panjang, dan di tiga kecamatan pada musim kemarau pendek, yaitu Kecamatan Borobudur (Desa Kenalan, Desa Candirejo, Desa Kembanglimus, Desa Wringinputih, Desa Bumiharjo dan Desa Giritengah), Kecamatan Kajoran (Desa Wonogiri), serta Kecamatan Salaman (Desa Margoyoso dan Desa Ngargoretno);
e. Kebakaran hutan;
f. Kondisi geografi Kabupaten Magelang yang memiliki kemiringan lereng lebih dari 15 persen dan curah hujan yang cukup tinggi menjadi faktor penyebab meningkatnya risiko gerakan tanah, dengan wilayah ini diklasifikasikan dalam kategori rawan gerakan tanah tingkat tinggi, tingkat menengah, dan tingkat sangat rendah;
g. Letusan Gunung Merapi yang berpotensi membahayakan tiga kecamatan yang berada di KRB III, yakni wilayah dalam radius 0-10 kilometer, yang meliputi Kecamatan Srumbung (Kaliurang, Kemiren, Ngablak, Nglumut, Tegalrandu, Mranggen, Ngargosoko, dan Srumbung), Kecamatan Dukun (Sengi, Sewukan, Paten, Krinjing, Kalibening, Sumber, Ngargomulyo, dan Keningar), serta Kecamatan Sawangan (Wonolelo, Kapuhan, dan Ketep);

h. Aliran awan panas, gas beracun, lontaran batu pijar, material, aliran lava, dan lahar Gunung Merapi yang mencakup 16 desa di tiga kecamatan yang termasuk dalam Kawasan rawan bencana II;
i. Terjadinya lahar atau banjir lahar sebagai dampak sekunder dari letusan Gunung Merapi yang meliputi aliran sungai Krasak, Bebeng, Sat, Putih, Blongkeng, Pabelan, Trinsing, dan Apu yang merupakan Kawasan rawan bencana I.

Tabel 2.1.22
Kejadian Bencana di Kabupaten Magelang pada Tahun 2020-2024

No	Kejadian Bencana	2020	2021	2022	2023	2024
1	Erupsi	11	5	1	1	-
2	Banjir	3	7	11	2	11
3	Tanah longsor	264	234	301	97	215
4	Cuaca ekstrem	105	241	266	112	138
5	Kekeringan	4	26	-	62	9
6	Kebakaran rumah dan lahan	94	61	53	130	55
7	Gempa bumi	-	-	-	1	-
8	Lain-lain	-	8	39	24	29
9	Kejadian luar biasa (pandemi Covid-19)	1	1	1	-	-
Jumlah		**482**	**583**	**672**	**429**	**457**

Sumber: BPBD Kabupaten Magelang, 2024; Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2025

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, data mengenai kejadian bencana menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam frekuensinya, dengan cuaca ekstrem dan tanah longsor sebagai jenis bencana yang paling sering terjadi. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 482 kejadian bencana, yang kemudian pada tahun berikutnya terjadi lonjakan dengan tercatatnya 583 kejadian bencana, masih tetap didominasi oleh cuaca ekstrem (241 kejadian) dan tanah longsor (234 kejadian). Tahun 2022 menunjukkan peningkatan lebih lanjut, mencapai 672 kejadian, dengan pola yang serupa, yakni cuaca ekstrem dan tanah longsor tetap mendominasi. Pada tahun 2023, jumlah kejadian bencana turun menjadi 429. Namun, pada tahun 2024, jumlah kejadian bencana kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 457 kejadian, disertai dengan peningkatan yang signifikan pada beberapa bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi dalam jumlah kejadian bencana setiap tahun, cuaca ekstrem dan tanah longsor tetap menjadi ancaman utama yang berpotensi mengganggu keberlanjutan pembangunan daerah.

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan hasil pengukuran yang diperoleh melalui analisis terhadap potensi risiko bencana di suatu daerah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Dengan demikian, terdapat tiga komponen yang membentuk risiko bencana, yaitu bahaya,

kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara ketiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana dengan mempertimbangkan potensi jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Nilai IRB yang semakin rendah menunjukkan kondisi yang semakin baik. Artinya, jika nilai indeks yang dihasilkan semakin kecil, tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), sementara nilai bahaya dan kerentanan dianggap relatif konstan. Berdasarkan klasifikasi yang ada, IRB dengan nilai kurang dari 13 termasuk dalam kategori rendah, nilai antara 13 hingga 144 termasuk dalam kategori sedang, dan nilai lebih dari 144 dikategorikan sebagai risiko tinggi.

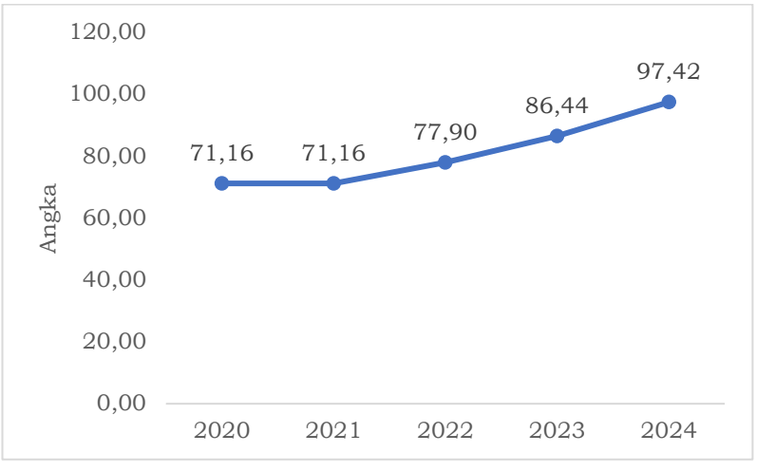

Gambar 2.1.11
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024

Selama periode 2020 hingga 2024, indeks risiko bencana berada di tingkat sedang yang berkisar antara 71,16 hingga 97,42. Kenaikan IRB ini disebabkan oleh penurunan indeks kapasitas daerah yang berkaitan dengan kadaluarsanya dokumen kebencanaan di Pemerintah Kabupaten Magelang (KRB dan RPB), serta belum adanya dokumen rencana kontinjensi untuk beberapa jenis bencana. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun usaha untuk meningkatkan kapasitas dan mitigasi risiko bencana sudah cukup baik, masih diperlukan langkah–langkah yang lebih intensif untuk menurunkan indeks risiko bencana ke kategori rendah di masa depan.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu wilayah memiliki ketahanan terhadap bencana. Indikator ini juga berkontribusi dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), mengingat bahwa hasil dari IKD menjadi salah satu komponen yang dipertimbangkan dalam penilaian IRBI. Semakin tinggi nilai IKD, semakin besar pula kapasitas yang dimiliki suatu daerah dalam menghadapi bencana sehingga secara otomatis dapat menurunkan skor IRBI.

Dengan demikian, IKD berfungsi sebagai alat untuk memperkuat ketahanan daerah dan mengurangi potensi dampak bencana, yang sejalan dengan upaya pengurangan risiko bencana pada tingkat regional.

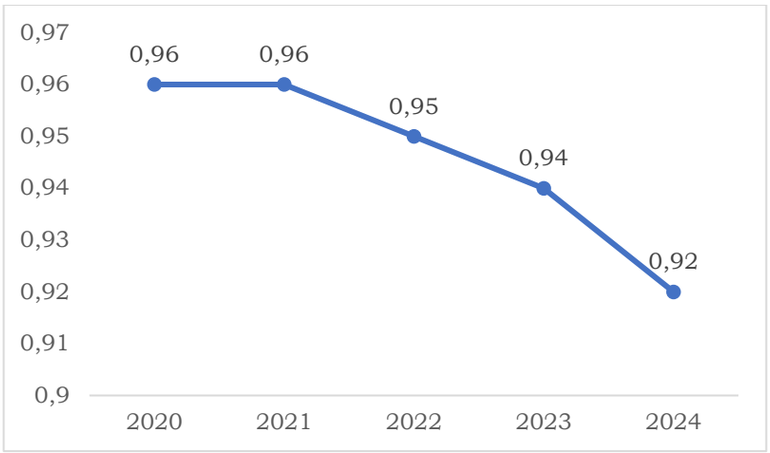

Gambar 2.1.12
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2024

Pada tahun 2020 hingga tahun 2024, capaian IKD Kabupaten Magelang menunjukkan besaran dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 1,06 persen per tahun. Pada tahun 2020 dan 2021, capaian indikator ini tercatat sebesar 0,96, yang kemudian menunjukkan kecenderungan menurun pada tahun berikutnya dan berlangsung sampai dengan tahun 2024 dengan capaian sebesar 0,92. Hal ini memperlihatkan pentingnya menjaga stabilitas dan peningkatan nilai IKD agar kapasitas daerah tetap optimal dan risiko bencana dapat diminimalkan.

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menunjukkan adanya sinergi antara upaya pengurangan emisi dengan pertumbuhan ekonomi. Intensitas emisi GRK merupakan perbandingan antara jumlah emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer dengan produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan emisi GRK dihitung berdasarkan kegiatan yang secara langsung berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dari berbagai sektor, seperti energi, pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan (AFOLU), serta pengelolaan sampah.

Selanjutnya, terdapat beberapa strategi penurunan emisi GRK untuk sektor *Forestry and Other Land Use* (FOLU) pada peternakan dan pertanian, diantaranya dilakukan melalui Peningkatan Cadangan Karbon Tanah Melalui Penggunaan Pupuk Organik Sebagai Dampak Penggunaan UPPO, Penggunaan Pupuk Organik, Sistem Pemupukan Berimbang, Penurunan Emisi CH4 dari Lahan Sawah-*System Of Rice Intensification* (SRI), Penurunan Emisi CH4 dari Lahan Sawah - Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), Penurunan Emisi CH4 dari

Lahan Sawah - Penggunaan Varietas Rendah Emisi, Mitigasi Emisi CH4 Melalui Aplikasi Biogas Kotoran Ternak (Biogas Ternak Asal Masyarakat (BATAMAS), Pengelolaan Ternak - Penggunaan *Feed Suplemen*t tntuk Bahan Pakan Sapi, termasuk strategi pada sektor FOLU melalui peningkatan jumlah serapan karbon (melalui penanaman) dan pencegahan kehilangan karbon (dari kebakaran hutan, deforestasi, dan lain-lain).

Tabel 2.1.23
Data Emisi Sektor Energi, IPPU, Pertanian, Kehutanan, dan Limbah
Kabupaten Magelang pada Tahun 2020-2023

No	Sektor	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	Energi	Gg CO2	2.839,03	3.546,56	3.600,66	4.149,50
2	IPPU		26,99	28,35	29,67	32,11
3	Pertanian		491,70	496,44	452,48	458,61
4	Kehutanan		-281,15	-271,72	-274,86	-243,78
5	Limbah		154,88	157,55	160,69	162,51
Total			**3.231,45**	**3.957,18**	**3.968,66**	**4.558,95**

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2025). SIGNSMART – Sistem Informasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Diakses dari https://signsmart.menlhk.go.id
Keterangan: data tahun 2024 belum tersedia, karena masih dalam proses penghitungan

Namun demikian, meskipun upaya mitigasi terus dilakukan, data menunjukkan bahwa emisi GRK di Kabupaten Magelang secara umum mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan tabel di atas, emisi GRK menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 3.231,45 Gg CO_2eq pada tahun 2020 menjadi 4.558,90 Gg pada tahun 2023. Sektor energi berperan sebagai kontributor utama dan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam periode tersebut. Sektor IPPU serta limbah juga mencatat peningkatan secara bertahap, yang menunjukkan bahwa diperlukan kebijakan untuk efisiensi dalam proses industri dan pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan. Meskipun sektor kehutanan memberikan kontribusi negatif terhadap total emisi yang menunjukkan fungsinya sebagai penyerap karbon, daya serapnya terus menurun, dari -281,15 Gg pada tahun 2020 menjadi -243,78 Gg pada tahun 2023. Sementara itu, sektor pertanian mengalami perubahan emisi yang fluktuatif, tetapi belum memperlihatkan tren penurunan yang konsisten. Kondisi ini menekankan pentingnya integrasi strategi pembangunan rendah karbon dalam rencana pembangunan daerah, khususnya melalui penguatan energi terbarukan, pelestarian hutan, serta reformasi pada sistem produksi dan konsumsi di sektor-sektor yang menghasilkan emisi utama.

Lebih lanjut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Utama KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029, besaran emisi GRK Kabupaten Magelang pada tahun 2018-2022 mengalami tren fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Emisi GRK mencapai puncaknya pada tahun 2022, yakni sebanyak 3.961.590 ton CO_2eq dengan tren pertumbuhan selama lima

tahun terakhir sebesar 24 persen atau setara dengan 6 persen per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi emisi GRK di Kabupaten Magelang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan analisis masing-masing sektor, pengadaan dan penggunaan energi menunjukkan peningkatan sebesar 9,35 persen, sektor *Industrial Process and Product Use* (IPPU) sebesar 21,50 persen, sedangkan sektor limbah mengalami peningkatan sebesar 12,56 persen. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat terus mendorong peningkatan emisi dari berbagai sektor, terutama energi.

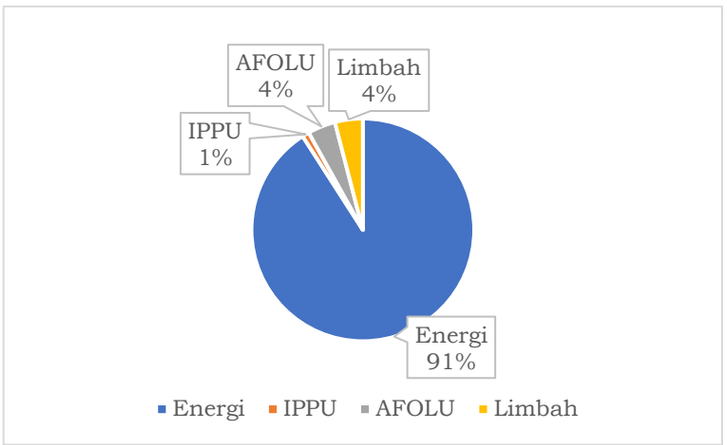

Gambar 2.1.13
Proporsi Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Magelang Tahun 2022
Sumber: Laporan Utama KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029
Keterangan: data tahun 2024 belum tersedia, karena masih dalam proses penghitungan

Kontribusi emisi terbesar di Kabupaten Magelang pada tahun 2022 berasal dari sektor energi, dengan proporsi mencapai 91 persen atau setara dengan 3.600.660 ton CO_2eq. Pada sektor ini, aktivitas transportasi merupakan penyumbang emisi tertinggi dibandingkan dengan sub-sektor lainnya. Sementara itu, kontribusi terbesar kedua berasal dari sektor penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, dan kehutanan (AFOLU) sebesar 170.570 ton CO_2eq, diikuti oleh sektor pengelolaan limbah sebesar 160.690 ton CO_2eq. Adapun sektor proses industri dan penggunaan produk atau IPPU memberikan kontribusi paling kecil, yakni sebesar 29.670 ton CO_2eq. Proporsi sumber emisi GRK di Kabupaten Magelang tahun 2022 ditampilkan pada grafik berikut.

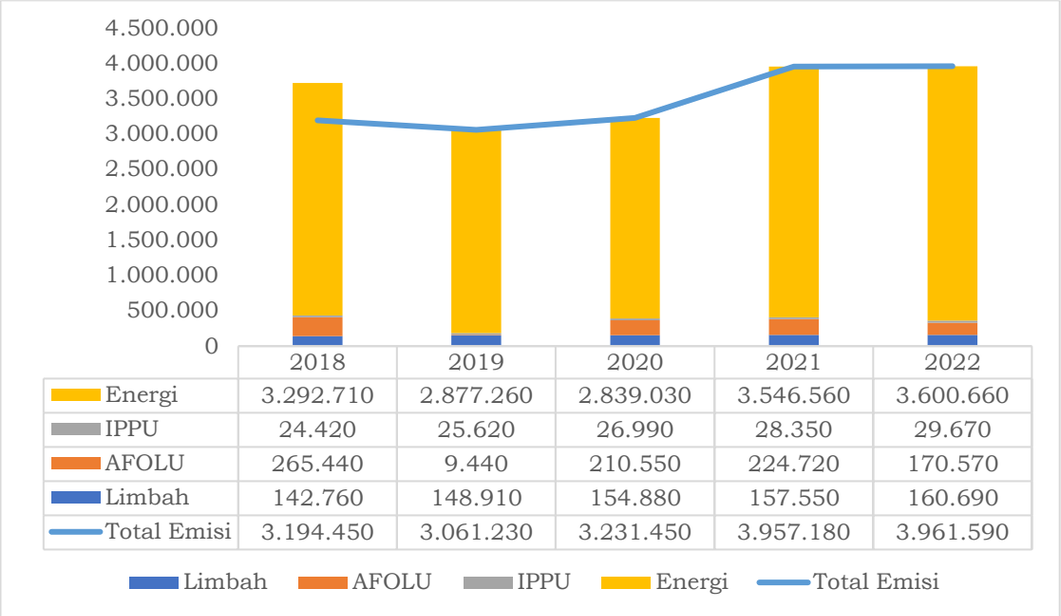

	2018	2019	2020	2021	2022
Energi	3.292.710	2.877.260	2.839.030	3.546.560	3.600.660
IPPU	24.420	25.620	26.990	28.350	29.670
AFOLU	265.440	9.440	210.550	224.720	170.570
Limbah	142.760	148.910	154.880	157.550	160.690
Total Emisi	3.194.450	3.061.230	3.231.450	3.957.180	3.961.590

Gambar 2.1.14
Tren Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022
Sumber: Laporan Utama KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029
Keterangan: data tahun 2023-2024 belum tersedia, karena masih dalam proses penghitungan

Di sisi lain, berbagai upaya mitigasi telah dilaksanakan untuk menekan laju emisi tersebut. Rincian potensi penurunan emisi GRK di Kabupaten Magelang dapat dilihat melalui data AKSARA (Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon). Berdasarkan catatan kegiatan mitigasi, tercatat sejumlah upaya penurunan emisi GRK pada sektor Energi, Limbah, dan AFOLU. Rincian dari masing-masing kegiatan tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1.24
Aksi Mitigasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Magelang

Sub Sektor Mitigasi	2020	2021	2022	2023
Air Limbah				
Pembangunan IPAL Komunal Skala Permukiman Minimal 50 KK Desa	180,65	-	-	-
Persampahan				
Operasionalisasi Bank Sampah dan TPS 3R	-	2.467,51	14.596,70	-
Transportasi				
Car Free Day	-	-	-	4,76

Sumber: AKSARA (Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon) Tahun 2023
Keterangan: data tahun 2024 belum tersedia, karena masih dalam proses penghitungan

Dari pelaksanaan berbagai upaya mitigasi tersebut, tercatat akumulasi penurunan emisi sebesar 17.444,62 ton CO_2eq, atau setara dengan 0,10 persen dari total emisi. Capaian ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan total emisi GRK yang dihasilkan dari seluruh sektor. Adapun jika dilihat berdasarkan capaian tahunan, pada tahun 2022 potensi penurunan emisi tercatat sebesar 0,368 persen terhadap total emisi tahun tersebut. Tabel berikut menyajikan data penurunan emisi GRK Kabupaten Magelang selama periode 2020 hingga 2023.

Tabel 2.1.25
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Magelang

Rincian	Emisi GRK (ton CO2eq)				Akumulasi
	2020	2021	2022	2023	
Penurunan Emisi GRK	180,65	2.467,51	14.596,70	4,76	17.444,62
Persentase Penurunan	0,006	0,062	0,368	-	0,10

Sumber: Laporan Utama KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029
Keterangan: data tahun 2024 belum tersedia, karena masih dalam proses penghitungan

Adapun pada tahun 2024, tercatat penurunan emisi GRK sebesar 33.713,26 ton CO_2eq. Capaian ini menunjukkan bahwa jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer telah berkurang sebesar angka tersebut selama periode 2024. Penurunan ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program lingkungan yang diterapkan di Kabupaten Magelang, serta kontribusi terhadap pencapaian target pengurangan emisi secara nasional maupun global.

2.1.1.2. Demografi

A. Dinamika Kependudukan

Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Pada periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Magelang mengalami tren peningkatan jumlah penduduk dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 0,79 persen per tahun. Pada tahun 2020, jumlah penduduk kabupaten ini tercatat sebanyak 1.299.859 jiwa dan bertumbuh menjadi 1.341.447 jiwa di tahun 2024.

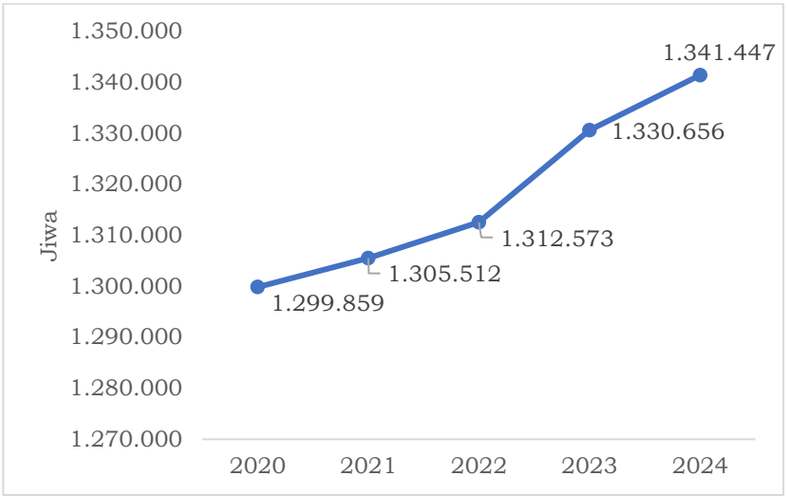

Gambar 2.1.15
Perkembangan Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2021–2025

Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan sebagainya. Dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Magelang menunjukkan

besaran yang fluktuatif. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk di kabupaten ini tercatat sebesar 0,37 persen, yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 0,43 persen pada tahun 2021. Tren peningkatan tersebut berlanjut hingga mencapai 1,38 persen pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, laju pertumbuhan penduduk kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga menjadi 0,81. Sebagian besar kecamatan di kabupaten ini memiliki besaran laju pertumbuhan kurang dari satu persen, dengan Kecamatan Tegalrejo mencatat angka terendah, yaitu 0,19 persen. Sementara itu, hanya terdapat tiga kecamatan yang menunjukkan laju pertumbuhan di atas satu persen, yakni Kecamatan Kajoran (1,24 persen), Kecamatan Grabag (1,11 persen), dan Kecamatan Kaliangkrik (1,10 persen).

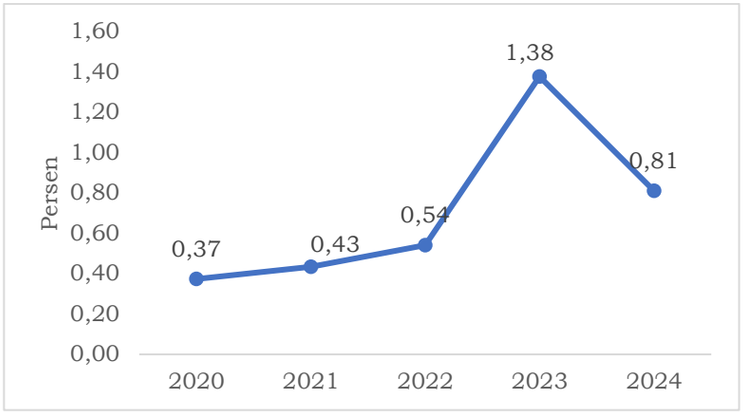

Gambar 2.1.16
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2021–2025, Diolah

Selanjutnya, sebagian besar penduduk cenderung memilih untuk bertempat tinggal di daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, sarana dan prasarana sosial yang lengkap dan mudah dijangkau, transportasi yang memadai, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Berdasarkan distribusi penduduknya, dalam kurun tahun 2020 hingga 2024, Kecamatan Mertoyudan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Magelang, yang ditunjukkan dengan dengan rata-rata distribusi penduduk sebesar 8,92 persen. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kecamatan Mertoyudan tercatat sebanyak 115.834 jiwa dan bertumbuh menjadi 119.683 jiwa di tahun 2024, atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,82 persen per tahun. Hal tersebut sejalan dengan ditetapkannya Kecamatan Mertoyudan sebagai pusat permukiman di Kabupaten Magelang dengan Skala Pelayanan Kabupaten. Sementara itu, wilayah dengan jumlah penduduk terendah tercatat di Kecamatan Ngluwar, dengan rata-rata distribusi sebesar 2,49 persen, di mana pada tahun 2020 jumlah penduduk di kecamatan ini

tercatat sebanyak 32.397 jiwa dan meningkat menjadi 33.247 jiwa di tahun 2024, atau dengan rata–rata pertumbuhan sebesar 0,65 persen per tahun.

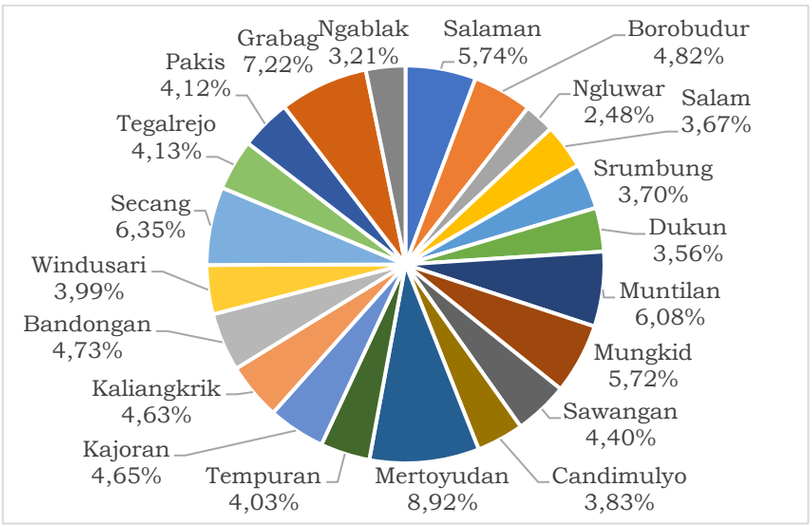

Gambar 2.1.17
Distribusi Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kecamatan
Tahun 2020–2024
Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2021–2025, Diolah

Berdasarkan kepadatan penduduknya, pada tahun 2020, Kabupaten Magelang tercatat memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.150 jiwa/km^2 dan meningkat menjadi 1.187 jiwa/km^2 di tahun 2024. Kecamatan Muntilan, Mertoyudan, dan Mungkid merupakan tiga kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Magelang. Pada tahun 2024, Kecamatan Muntilan tercatat memiliki kepadatan penduduk sebesar 2.686 jiwa/km^2, Kecamatan Mertoyudan sebesar 2.586 jiwa/km^2, dan Kecamatan Mungkid sebesar 1.909 jiwa/km^2. Sementara itu, Kecamatan Kajoran sebagai kecamatan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk tertinggi, tercatat memiliki besaran kepadatan penduduk terendah di kabupaten ini, yakni sebesar 719 jiwa/km^2. Selain itu, terdapat dua kecamatan lain yang memiliki kepadatan penduduk terendah, yakni Kecamatan Sawangan dan Srumbung yang masing-masing memiliki kepadatan penduduk sebesar 799 jiwa/km^2 dan 802 jiwa/km^2. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi penduduk di Kabupaten Magelang masih belum merata.

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki–laki dengan perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu. Indikator yang digunakan utuk mengetahui komposisi menurut jenis kelamin ini, dipengaruhi oleh besarnya angka kelahiran, kematian, dan migrasi yang didasarkan pada jenis kelaminnya. Dalam lima tahun terakhir, rasio jenis kelamin di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang cenderung tetap, dimana dalam setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 101 hingga 102

orang penduduk laki—laki. Dilihat per wilayahnya, hingga tahun 2024 terdapat sembilan kecamatan yang rasio jenis kelaminnya menunjukkan besaran di bawah 100. Keenam kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Ngluwar, Salam, Srumbung, Dukun, Muntilan, Mungkid, Mertoyudan, Secang, dan Tegalrejo.

Selanjutnya, berdasarkan penduduk menurut usia, piramida penduduk di Kabupaten Magelang tahun 2024 membentuk tipe ekspansif. Piramida tipe ekspansif ini dapat dilihat dari pola piramida yang melebar di bagian bawah dan cembung di bagian tengah yang merupakan penduduk usia muda. Sementara itu, di bagian atas cenderung meruncing, yang mana pada bagian atas menggambarkan penduduk usia tua. Komposisi penduduk menurut umur ini memperlihatkan bahwa warga usia produktif harus menanggung warga yang sudah tidak atau belum produktif. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif, maka semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.

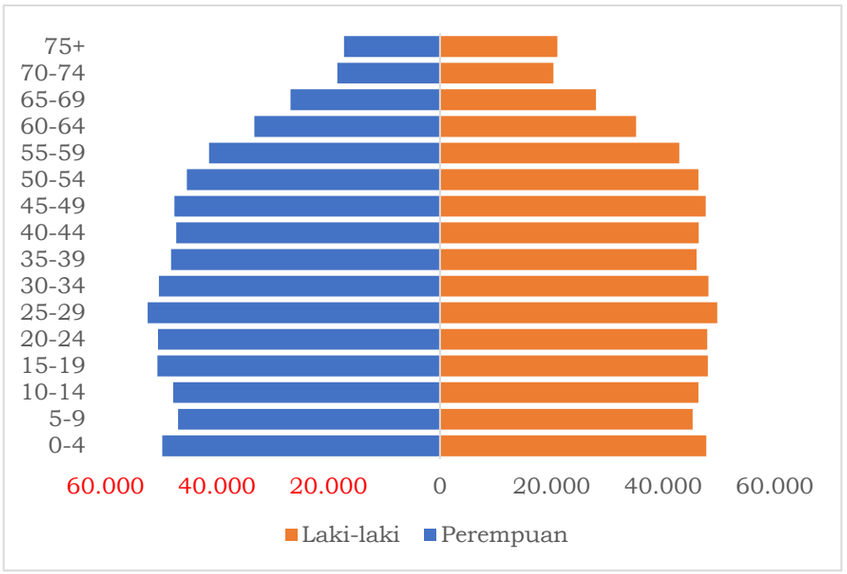

Gambar 2.1.18
Piramida Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2024
Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2025, Diolah

Saat ini, Kabupaten Magelang tengah berada pada fase bonus demografi. Hal ini ditandai dengan besarnya proporsi penduduk usia produktif (15 hingga 64 tahun) dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (0 hingga 14 tahun dan lebih dari usia 65 tahun) dengan proporsi lebih dari 60 persen dari total penduduk Kabupaten Magelang, serta besaran rasio ketergantungan kurang dari 50 persen. Kabupaten Magelang sudah mulai berada pada era bonus demografi sejak tahun 2013. Bonus demografi dapat menjadi potensi bagi Kabupaten Magelang, sekaligus dapat pula menjadi sebuah ancaman apabila tidak terkelola dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Magelang perlu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia agar dapat membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

B. Proyeksi Penduduk

1. Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi penduduk merupakan komponen penting dalam sistem perencanaan di masa yang akan datang. Proyeksi penduduk menggambarkan jumlah penduduk berdasarkan perhitungan tertentu yang didasarkan pada asumsi–asumsi tertentu pula. Proyeksi penduduk bermanfaat sebagai basis data dan target pengambilan kebijakan di berbagai sektor pembangunan.

Tabel 2.1.26
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kecamatan
Tahun 2025–2030

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2024 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Salaman	76.937	77.296	77.876	78.434	78.969	79.480	79.967
2	Borobudur	64.629	65.038	65.526	65.995	66.446	66.876	67.286
3	Ngluwar	33.247	33.728	33.982	34.225	34.459	34.682	34.894
4	Salam	49.276	49.956	50.330	50.691	51.037	51.367	51.682
5	Srumbung	49.591	50.412	50.790	51.154	51.503	51.837	52.154
6	Dukun	47.799	48.507	48.871	49.221	49.557	49.878	50.184
7	Muntilan	81.555	82.797	83.418	84.016	84.589	85.137	85.658
8	Mungkid	76.778	77.660	78.243	78.803	79.341	79.855	80.344
9	Sawangan	59.042	59.823	60.272	60.704	61.118	61.514	61.891
10	Candimulyo	51.333	51.879	52.268	52.642	53.002	53.345	53.672
11	Mertoyudan	119.683	119.347	120.243	121.105	121.931	122.721	123.472
12	Tempuran	54.055	54.297	54.704	55.096	55.472	55.831	56.173
13	Kajoran	62.385	62.309	62.777	63.227	63.658	64.071	64.463
14	Kaliangkrik	62.117	62.181	62.648	63.097	63.527	63.939	64.331
15	Bandongan	63.513	63.737	64.215	64.675	65.116	65.538	65.940
16	Windusari	53.561	53.820	54.224	54.612	54.985	55.341	55.680
17	Secang	85.248	85.565	86.207	86.825	87.417	87.983	88.522
18	Tegalrejo	55.458	56.584	57.009	57.417	57.809	58.183	58.540
19	Pakis	55.320	56.472	56.896	57.304	57.695	58.068	58.424
20	Grabag	96.879	96.966	97.693	98.393	99.064	99.706	100.317
21	Ngablak	43.041	43.579	43.906	44.220	44.522	44.810	45.085
Kabupaten Magelang		**1.341.447**	**1.351.952**	**1.362.099**	**1.371.857**	**1.381.216**	**1.390.163**	**1.398.679**

Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2024, Diolah

Hasil proyeksi penduduk ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magelang. BPS melakukan penghitungan proyeksi penduduk per tahun yang dirinci per usia, sementara itu proyeksi jumlah penduduk per kecamatan dilakukan dengan penyesuaian rata–rata distribusi penduduk dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk tersebut, laju pertumbuhan penduduk dari periode ke periode memiliki kecenderungan menurun, salah satu penyebabnya adalah dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB).

Tabel 2.1.27
Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kecamatan
Tahun 2025–2030

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Salaman	68,73	1.125	1.133	1.141	1.149	1.156	1.163
2	Borobudur	57,59	1.129	1.138	1.146	1.154	1.161	1.168
3	Ngluwar	23,96	1.407	1.418	1.428	1.438	1.447	1.456
4	Salam	31,85	1.569	1.580	1.592	1.603	1.613	1.623
5	Srumbung	61,85	815	821	827	833	838	843
6	Dukun	57,60	842	848	855	860	866	871
7	Muntilan	30,36	2.727	2.748	2.767	2.786	2.804	2.821
8	Mungkid	40,23	1.931	1.945	1.959	1.972	1.985	1.997
9	Sawangan	73,90	810	816	821	827	832	837
10	Candimulyo	51,43	1.009	1.016	1.024	1.031	1.037	1.044
11	Mertoyudan	46,28	2.579	2.598	2.617	2.635	2.652	2.668
12	Tempuran	47,39	1.146	1.154	1.163	1.171	1.178	1.185
13	Kajoran	86,78	718	723	729	734	738	743
14	Kaliangkrik	56,32	1.104	1.112	1.120	1.128	1.135	1.142
15	Bandongan	48,59	1.312	1.322	1.331	1.340	1.349	1.357
16	Windusari	62,27	864	871	877	883	889	894
17	Secang	51,43	1.664	1.676	1.688	1.700	1.711	1.721
18	Tegalrejo	38,29	1.478	1.489	1.500	1.510	1.520	1.529
19	Pakis	67,75	833	840	846	852	857	862
20	Grabag	82,63	1.174	1.182	1.191	1.199	1.207	1.214
21	Ngablak	46,86	930	937	944	950	956	962
Kabupaten Magelang		**1.129,97**	**1.196**	**1.205**	**1.214**	**1.222**	**1.230**	**1.238**

Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2024, Diolah

Selanjutnya, berdasarkan hasil proyeksi dapat diketahui pula prediksi kepadatan penduduk Kabupaten Magelang tahun 2025 hingga 2030. Pada tahun 2024, kepadatan penduduk kabupaten ini tercatat sebesar 1.187 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk di kabupaten ini kemudian menunjukkan peningkatan di tahun 2025 menjadi 1.196 jiwa/km^2 dan terus menunjukkan peningkatan hingga tahun 2030 menjadi 1.238 jiwa/km^2, dengan kepadatan penduduk terbesar tercatat di Kecamatan Muntilan, Mertoyudan, dan Mungkid.

2. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin digunakan untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, khususnya yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki–laki dan perempuan secara adil. Sama halnya dengan proyeksi jumlah penduduk, BPS Kabupaten Magelang juga telah melakukan proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelaminnya.

Tabel 2.1.28
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2025–2030

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk 2024 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laki–laki	674.347	679.189	683.830	688.259	692.470	696.463	700.221
2	Perempuan	667.100	672.763	678.269	683.598	688.746	693.700	698.458
3	Rasio jenis kelamin	101	101	101	101	101	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2024, Diolah

Dalam lima tahun terakhir, rasio jenis kelamin di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang cenderung tetap, di mana dalam setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 101 hingga 102 orang penduduk laki–laki, dan kondisi tersebut masih akan terjadi hingga tahun 2028. Pada tahun 2029 hingga 2030, jumlah penduduk perempuan dan laki–laki di kabupaten ini diproyeksikan akan seimbang, yakni di dalam setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 100 orang penduduk laki–laki.

3. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Hasil proyeksi penduduk dalam kurun waktu perencanaan RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025—2045 ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magelang. BPS melakukan penghitungan proyeksi penduduk per lima tahunan yang dirinci per usia. Komposisi penduduk menurut umur ini memperlihatkan bahwa warga usia produktif harus menanggung warga yang sudah tidak atau belum produktif. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif, maka semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Tabel 2.1.29
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Berdasarkan Kelompok Umur
Tahun 2025–2030

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk 2024 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	0–4	97.575	98.704	98.343	97.925	97.451	96.909	96.301
2	5–9	92.272	92.406	93.899	95.258	96.483	97.641	98.773
3	10–14	94.191	93.245	92.667	92.430	92.476	92.634	92.769
4	15–19	98.733	98.504	97.793	96.715	95.432	94.226	93.281
5	20–24	98.505	97.821	97.583	97.728	98.038	98.194	97.966
6	25–29	102.120	101.946	101.336	100.353	99.211	98.190	97.509
7	30–34	98.536	99.497	100.372	101.121	101.659	101.870	101.701
8	35–39	94.190	94.772	95.505	96.419	97.435	98.465	99.427
9	40–44	93.688	93.309	93.200	93.280	93.564	94.007	94.593
10	45–49	95.297	95.218	94.803	94.164	93.429	92.808	92.442
11	50–54	91.782	92.162	92.632	93.157	93.620	93.869	93.804
12	55–59	84.356	86.264	87.607	88.440	88.921	89.277	89.669
13	60–64	68.452	70.476	72.807	75.370	77.956	80.274	82.124
14	65–69	54.770	56.460	58.071	59.582	61.117	62.808	64.737
15	70–74	38.715	40.480	42.251	43.960	45.595	47.183	48.721
16	75+	38.265	40.688	43.230	45.955	48.829	51.808	54.862
	Jumlah	**1.341.447**	**1.351.952**	**1.362.099**	**1.371.857**	**1.381.216**	**1.390.163**	**1.398.679**

Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2024, Diolah

Dalam lima tahun terakhir, proporsi penduduk usia non produktif di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata–rata pertumbuhan sebesar 0,51 persen per tahun, di mana pada tahun 2024 proporsinya tercatat sebesar 31,00 persen. Sementara itu, proporsi penduduk usia produktif menunjukkan kecenderungan menurun dengan rata–rata

penurunan sebesar 0,23 persen per tahun, atau dengan besaran 69 persen di tahun 2024. Selanjutnya, hasil proyeksi menurut kelompok umur di Kabupaten Magelang menunjukkan pola yang sama dengan tahun–tahun sebelumnya, di mana proporsi penduduk usia non produktif menunjukkan kecenderungan meningkat, dan proporsi penduduk usia produktif menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2025, proporsi penduduk usia non produktif tercatat sebesar 31,21 persen, dan menunjukkan peningkatan hingga tahun 2030 menjadi 32,61 persen. Sementara itu, proporsi penduduk usia produktif tercatat sebesar 68,79 persen di tahun 2025, dan menunjukkan kecenderungan menurun menjadi 67,39 persen di tahun 2030.

Tabel 2.1.30
Proyeksi Angka Ketergantungan Kabupaten Magelang
Tahun 2025–2030

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk 2024 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	0–14 tahun	284.038	284.355	284.909	285.613	286.410	287.184	287.843
2	15–64 tahun	925.659	929.969	933.638	936.747	939.265	941.180	942.516
3	>65 tahun	131.750	137.628	143.552	149.497	155.541	161.799	168.320
4	Angka Ketergantungan	44,92	45,38	45,89	46,45	47,05	47,70	48,40

Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2024, Diolah

Saat ini, Kabupaten Magelang tengah berada pada fase bonus demografi. Hal ini ditandai dengan besarnya proporsi penduduk usia produktif (15 hingga 64 tahun) dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (0 hingga 14 tahun dan lebih dari usia 65 tahun) dengan proporsi lebih dari 60 persen dari total penduduk Kabupaten Magelang, serta besaran rasio ketergantungan kurang dari 50 persen. Kabupaten Magelang sudah mulai berada pada era bonus demografi sejak tahun 2013. Berdasarkan hasil proyeksi yang telah dilakukan oleh BPS Kabupaten Magelang, fase bonus demografi di kabupaten ini masih akan berlangsung hingga tahun 2030–an. Pada tahun 2025, rasio ketergantungan di kabupaten ini diperkirakan sebesar 45,38 persen dan bertumbuh menjadi 48,40 persen di tahun 2030. Dalam lima tahun mendatang, pemerintah daerah Kabupaten Magelang perlu memaksimalkan keuntungan fase bonus demografi ini, dengan mempersiapkan penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas penduduknya melalui pendidikan serta membekali dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri dan pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja.

2.1.2.Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Pada subaspek ini dijelaskan mengenai karakteristik kesejahteraan masyarakat berdasarkan perspektif ekonomi dengan menggunakan indikator–indikator sekurang–kurangnya seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka, indeks Gini, Indeks Pembangunan Manusia, dan indikator lainnya sesuai dengan konteks daerah.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode waktu tertentu. Konsistensi pertumbuhan Kabupaten Magelang, yang berada di atas rata-rata provinsi dan nasional, mencerminkan efektivitas kebijakan pembangunan daerah dalam mendorong sektor-sektor produktif.

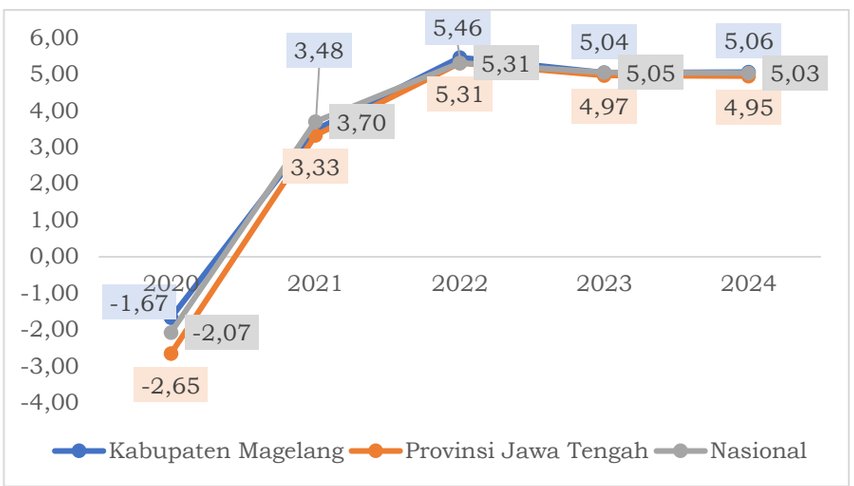

Gambar 2.1.19
Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Secara umum, capaian laju pertumbuhan ekonomi baik di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional menunjukkan pola capaian yang hampir sama. Dalam lima tahun terakhir, capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang mengalami kontraksi sebesar -1,67 persen pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021, LPE mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan mencapai 3,48 persen. Tingkat pemulihan ini lebih cepat jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, yang mengalami

perubahan dari -2,65 persen menjadi 3,33 persen, serta dengan tingkat pertumbuhan nasional yang bergerak dari -2,07 persen ke 3,70 persen. Pada tahun 2022, Kabupaten Magelang mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 5,46 persen, yang melampaui pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional. Meskipun terdapat sedikit perlambatan pada tahun 2023 dan 2024, angka LPE Kabupaten Magelang masih tetap lebih tinggi dibandingkan provinsi dan nasional.

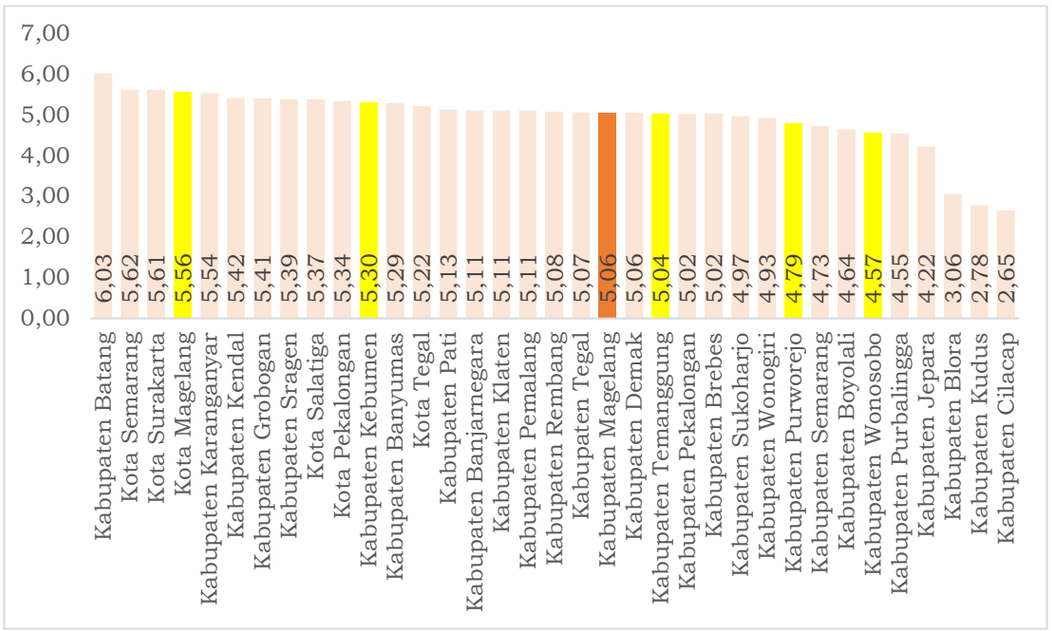

Gambar 2.1.20
Posisi Relatif Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Selanjutnya, apabila dilakukan perbandingan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, capaian Kabupaten Magelang berada pada urutan ke–20. Sementara itu, dibandingkan dengan kabupaten/kota eks Karesidenan Kedu, Kabupaten Magelang menempati posisi ketiga. Posisi ini berada di bawah Kota Magelang dan Kabupaten Kebumen, yang memiliki tingkat PDRB per kapita lebih tinggi.

Tabel 2.1.31
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (Persen)					Laju Pertumbuhan PDRB ADHB (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,16	0,98	1,04	0,99	1,37	2,48	2,49	5,67	5,67	5,42
B. Pertambangan dan Penggalian	2,15	4,30	-4,53	4,35	-8,07	4,24	4,92	-1,60	6,14	-7,86
C. Industri Pengolahan	-0,30	4,20	5,48	6,80	6,54	1,79	7,27	10,70	11,64	11,06
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,83	4,63	1,54	2,44	8,90	1,24	3,98	2,03	4,20	9,16
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,36	4,52	1,75	3,23	5,74	8,19	5,55	3,09	4,31	8,77
F. Konstruksi	-3,71	6,74	1,95	5,97	9,32	-3,36	9,85	9,00	9,27	9,67
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4,47	6,95	2,51	4,60	2,79	-3,36	8,38	6,44	8,33	4,75
H. Transportasi dan Pergudangan	-26,60	0,67	53,26	7,04	14,26	-23,80	4,14	62,28	17,06	16,36
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-8,00	5,58	17,68	9,48	6,82	-7,64	7,22	20,16	10,90	9,09
J. Informasi dan Komunikasi	15,68	3,88	2,15	6,38	7,25	15,84	3,90	2,43	7,23	8,67
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,65	1,44	2,77	3,89	2,36	1,88	5,04	10,56	7,84	3,73
L. Real Estat	-0,26	2,21	5,33	4,70	5,64	0,36	3,18	7,24	5,58	6,14
M,N. Jasa Perusahaan	-7,12	2,95	5,62	5,38	10,90	-5,10	4,16	10,10	9,38	12,99
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,22	-1,18	3,26	5,77	8,06	0,15	-2,10	6,50	7,93	9,86
P. Jasa Pendidikan	-0,20	0,13	4,22	4,44	3,75	1,55	1,50	4,60	4,62	4,81
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,20	0,20	3,21	4,33	4,73	11,21	1,34	4,93	7,82	6,84
R,S,T,U. Jasa lainnya	-6,93	1,11	28,21	6,57	8,24	-5,65	1,94	33,38	9,05	10,21
PDRB Kabupaten Magelang	-1,67	3,48	5,46	5,04	5,06	-0,11	5,28	9,53	8,68	7,51

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Dilihat dari laju pertumbuhannya, seluruh sektor lapangan usaha di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Baik dilihat dari laju pertumbuhan ADHK maupun ADHB, sektor transportasi dan pergudangan; serta sektor jasa perusahaan merupakan dua sektor yang memili laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2024. Sementara itu, di tahun yang sama, sektor pertambangan menunjukkan laju pertumbuhan yang bernilai negatif. Sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Magelang tercatat memiliki laju pertumbuhan yang relatif kecil, yakni berkisar pada angka satu persen, bahkan di tahun-tahun tertentu tercatat di bawah satu persen.

2. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin di Kabupaten Magelang memiliki ciri—ciri antara lain rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya kondisi kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya keahlian, rendahnya akses terhadap tanah dan modal, sangat rentan terhadap gejolak ekonomi, bencana alam, dan rendahnya partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan, serta masih kurangnya keamanan individu. Kabupaten Magelang menunjukkan tren penurunan tingkat kemiskinan selama beberapa tahun terakhir. Penurunan ini mencerminkan upaya yang semakin efektif dari pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi berbagai faktor penyebab kemiskinan.

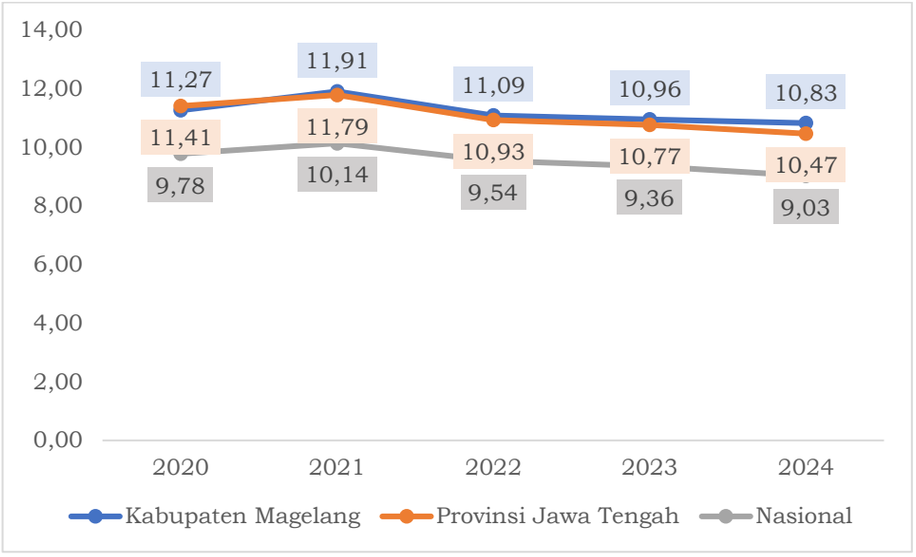

Gambar 2.1.21
Perbandingan Capaian Tingkat Kemiskinan (Persen)
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Dalam lima tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik, yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 0,44 persen per tahun, yakni sebanyak 146,34 ribu jiwa di tahun 2020 menurun menjadi 143,80 ribu jiwa di tahun 2024. Meskipun demikian, dalam periode waktu yang sama, tingkat kemiskinan Kabupaten Magelang masih berada di atas capaian provinsi dan nasional. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan kabupaten ini tercatat sebesar 11,27 persen dan menunjukkan peningkatan hingga tahun 2021 menjadi 11,91 persen, sekaligus menjadi yang tertinggi setidaknya selama lima tahun terakhir. Melalui upaya komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan menurun pada tahun 2021 hingga 2024 dengan capaian 10,83 persen. Selanjutnya, berdasarkan perbandingan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, tingkat

kemiskinan Kabupaten Magelang menempati posisi ke–21. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota yang termasuk dalam eks Karesidenan Kedu, Kabupaten Magelang berada di urutan ketiga, setelah Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung.

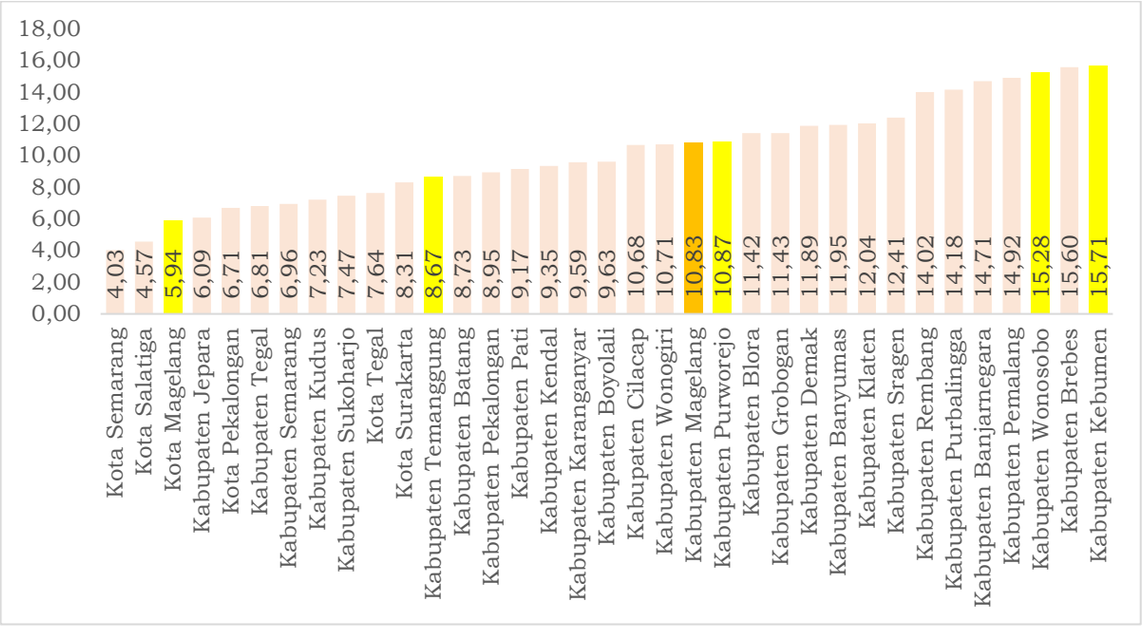

Gambar 2.1.22
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Magelang
Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Secara lebih detail, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, garis kemiskinan di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang meningkat setiap tahunnya, dan ditandai dengan rata—rata pertumbuhan sebesar 5,94 persen per tahun. Pada tahun 2020, garis kemiskinan di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 342.430,00 dan meningkat menjadi Rp 431.289,00 di tahun 2024. Meningkatnya besaran garis kemiskinan, berbanding lurus dengan meningkatnya capaian persentase penduduk di atas garis kemiskinan yang ditandai dengan besaran pertumbuhan rata—rata sebesar 0,12 persen per tahun, atau meningkat dari 88,73 persen di tahun 2020 menjadi 89,17 persen di tahun 2024.

Selanjutnya, untuk mengukur kondisi kemiskinan di daerah tidak hanya dilihat dari jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan saja. Namun perlu juga dilihat dari perspektif yang lain, seperti tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, capaian indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2020, capaian tingkat kedalaman kemiskinan di kabupaten ini tercatat sebesar 1,23 dan menunjukkan besaran yang semakin tinggi hingga tahun 2023 hingga

sebesar 1,73. Capaian indikator tersebut kemudian membaik di tahun 2024 dengan besaran 1,23 atau menurun sebesar 28,90 persen per tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, dalam rentang waktu yang sama, capaian indikator indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif atau memiliki pola yang sama dengan capaian tingkat kedalaman kemiskinan. Pada tahun 2020, capaian tingkat keparahan kemiskinan di kabupaten ini tercatat sebesar 0,20 dan menunjukkan peningkatan hingga tahun 2023 hingga menjadi 0,41. Peningkatan tersebut menginterpretasikan bahwa semakin meningkat nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada tahun 2024, capaian tingkat keparahan kemiskinan menunjukkan kondisi yang membaik, yang ditunjukkan dengan laju penurunan sebesar 43,90 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yakni menjadi 0,23.

Tabel 2.1.32
Kondisi Kemiskinan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk Kabupaten Magelang	Ribu Jiwa	1.299,86	1.305,51	1.312,57	1.330,66	1.341,45
Jumlah penduduk miskin	Ribu Jiwa	146,34	154,91	145,33	144,49	143,80
Garis kemiskinan	Rp/Kapita/Bulan	342.430	353.608	377.497	411.129	431.289
Persentase penduduk miskin (P0)	Persen	11,27	11,91	11,09	10,96	10,83
Tingkat kedalaman kemiskinan (P1)	Indeks	1,23	1,63	1,66	1,73	1,23
Tingkat keparahan kemiskinan (P2)	Indeks	0,2	0,35	0,41	0,41	0,23

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Tahun 2025

Selain melihat dinamika kemiskinan secara umum, isu kemiskinan ekstrem menjadi perhatian tersendiri karena menyangkut kelompok penduduk yang hidup dalam kondisi paling rentan dan kekurangan mendasar. kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana individu atau kelompok hidup di bawah garis kemiskinan internasional, yaitu dengan pendapatan kurang dari $1,90 per hari berdasarkan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Kondisi ini mencerminkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

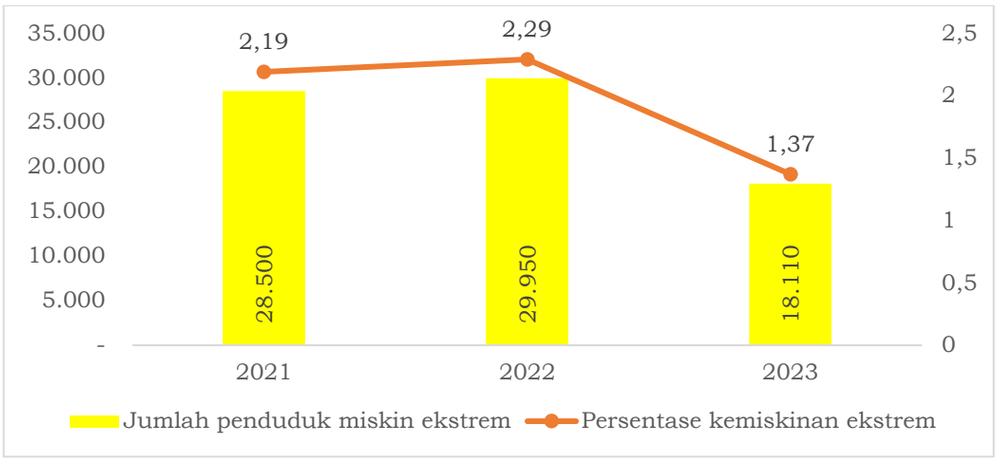

Gambar 2.1.23
Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Magelang
Tahun 2021-2023
Sumber: Satgas Pengelola Data P3KE 2024

Pada tahun 2021, dari 154,91 ribu jiwa penduduk miskin di Kabupaten Magelang, 28,50 ribu jiwa diantaranya merupakan jumlah penduduk miskin ekstrem, atau dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 2,19 persen. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan dengan laju pertumbuhan sebesar 5,09 persen di tahun 2022 menjadi 29,95 ribu jiwa penduduk dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 2,29 persen. Pada tahun 2022 Kabupaten Magelang telah ditetapkan sebagai lokus Penurunan Kemiskinan Ekstrem bersama 18 kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi menetapkan lima kecamatan dan 25 desa yang dijadikan sebagai *pilot project* untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem. Kelima kecamatan prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem Kabupaten Magelang meliputi Kecamatan Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Pakis, dan Windusari.

Guna mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem, sejumlah kebijakan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, antara lain melalui strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, yakni dengan memberikan jaminan kesehatan kepada warga miskin baik bersumber dari pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten. Selain itu, terdapat pula bantuan rumah swadaya bagi warga yang berpenghasilan rendah, pemasangan sambungan air bersih, pemberian beasiswa untuk siswa miskin, dan pemberian makanan pendamping untuk keluarga pasien miskin di rumah sakit. Upaya penting lainnya adalah memperbaiki data kemiskinan melalui verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Hal ini penting untuk memastikan sasaran penerima dari program—program perlindungan sosial yang dilaksanakan selama ini, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa akan lebih

tepat sasaran. Upaya yang dilakukan tersebut membuahkan hasil yang positif, di mana jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Magelang menunjukkan penurunan yang cukup signifikan yang ditandai dengan laju penurunan mencapai 39,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yakni menjadi 18,11 ribu jiwa dengan besaran tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1,37 persen.

Dalam rangka melaksanakan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 mengatur tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Salah satunya diamanatkan untuk pemyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Tahunan (RAT). Penyusunan RPKD dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam penanggulangan kemiskinan di daerah.. RPKD adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah.

Kabupaten Magelang saat ini sudah mempunyai Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025-2029. RPKD disusun sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari upaya sistematis untuk menurunkan angka kemiskinan, sekaligus mendukung capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya tujuan pertama: mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.

RPKD ini memuat arah kebijakan, strategi, dan prioritas program penanggulangan kemiskinan yang berbasis data, partisipatif, dan berkeadilan. Penyusunan dokumen ini didasarkan pada pemetaan kondisi kemiskinan multidimensi di Kabupaten Magelang, termasuk identifikasi kelompok rentan dan lokus desa prioritas. Dengan pendekatan integratif lintas sektor dan sinergi antar pemangku kepentingan, dokumen ini diharapkan menjadi pedoman kerja bersama dalam pelaksanaan program yang efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Selanjutnya RPKD ini manjadi pedoman oleh semua OPD dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Magelang.

Selanjutnya, pada tahun 2025 telah ditetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Peraturan tersebut menginstruksikan kepada lebih dari 40 kementerian/lembaga (K/L) agar bersinergi dalam upaya terpadu, terarah, dan terintegrasi untuk mengentaskan kemiskinan. Selain itu, peraturan tersebut juga menjadi pijakan kuat dalam mencapai target pengentasan kemiskinan secara nasional. Pemerintah Pusat menargetkan kemiskinan ekstrem turun menjadi nol persen pada 2026, dan angka kemiskinan secara umum ditekan hingga di bawah lima persen pada 2029.

Salah satu program unggulan yang diatur dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025 adalah Sekolah Rakyat, yang dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan. Saat ini, program tersebut sudah dalam tahap finalisasi, mencakup rekrutmen guru, seleksi peserta didik, persiapan kurikulum, serta revitalisasi sarana dan prasarana. Dalam upaya untuk mendukung pelaksanaan program ini, Kementerian Sosial (Kemensos) sedang merumuskan nota kesepahaman (MoU) dengan sekitar 200 kepala daerah yang telah mengajukan aset gedung dan lahan. Pada Tahun 2025, terdapat 100 sekolah rintisan sementara yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana mayoritas hasil revitalisasi aset terdapat di lahan Kemensos. Sekolah Rakyat sementara ini digunakan satu tahun ke depan sambil menunggu pembangunan 100 Sekolah Rakyat permanen.

Di Kabupaten Magelang sendiri, untuk sementara terdapat dua titik lokasi Sekolah Rakyat, yakni di Sentra Antasena Salaman, serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pamong Praja Tegalrejo. Total daya tampung siswa yang mengikuti pembelajaran pada Juli 2025 adalah sebanyak 150 siswa. Kurikulum yang digunakan pada Sekolah Rakyat adalah *tailor-made*, yakni kurikulum yang dirancang khusus dan kontekstual, menyesuaikan kebutuhan peserta didik dan dinamika sosial di lingkungan mereka.

3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator yang menggambarkan rata—rata produktivitas yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Selain itu dalam batas tertentu dapat pula digunakan sebagai indikator dalam menentukan pencapaian tingkat kemakmuran di wilayah tersebut. Besaran PDRB per kapita dipengaruhi oleh potensi sumber daya dan faktor—faktor produksi yang terangkum dalam nilai PDRB (ADHB), serta banyak sedikitnya jumlah penduduk. PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB

per satu orang penduduk, sementara PDRB per kapita ADHK berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

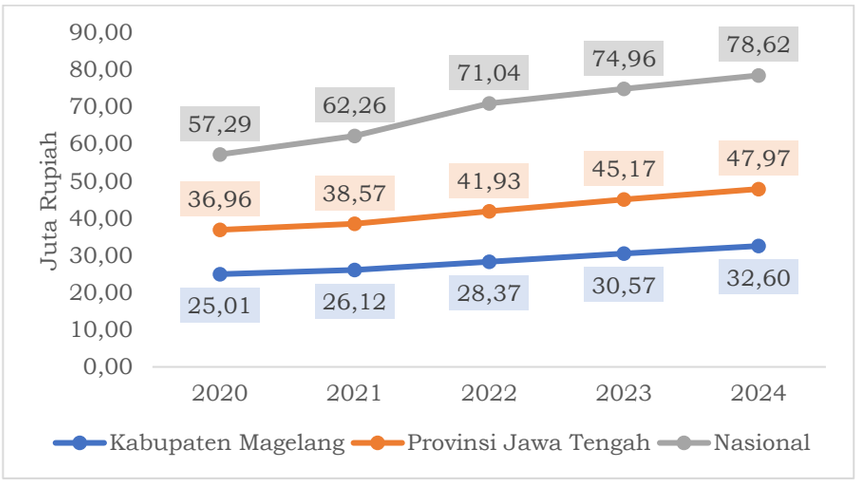

Gambar 2.1.24
Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, PDRB per kapita Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan meningkat yang ditandai dengan rata–rata pertumbuhan sebesar 6,85 persen per tahun, di mana pada tahun 2020 tercatat sebesar 25,01 juta rupiah dan bertumbuh menjadi 32,60 juta rupiah di tahun 2024. Hingga tahun 2024, capaian PDRB per kapita Kabupaten Magelang masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang berada di urutan ke–24, dan apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota eks Karesidenan Kedu, kabupaten ini menempati urutan ketiga setelah Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.1.33
Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah)					
Kabupaten Magelang	25,01	26,12	28,37	30,57	32,60
Provinsi Jawa Tengah	36,96	38,57	41,93	45,17	47,97
Nasional	57,29	62,26	71,04	74,96	78,62
PDRB per Kapita ADHK (Juta Rupiah)					
Kabupaten Magelang	17,61	18,09	18,91	19,70	20,53
Provinsi Jawa Tengah	26,48	27,09	28,25	29,37	30,53
Indonesia	39,78	40,78	42,47	44,14	45,88

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Pada PDRB per kapita ADHK, Kabupaten Magelang mencatat angka 20,53 juta rupiah pada tahun 2024, sedangkan untuk Jawa Tengah mencapai 30,53 juta rupiah dan untuk tingkat nasional mencapai 45,88 juta rupiah. Meskipun

demikian, baik ADHB maupun ADHK Kabupaten Magelang menunjukkan tren pertumbuhan yang konsistem selama lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kegiatan ekonomi meskipun laju pertumbuhannya masih tertinggal dari rata-rata provinsi dan nasional. Ketimpangan ini mencerminkan perlunya penguatan basis ekonomi lokal yang lebih produktif dan menyeluruh sehingga pertumbuhan ekonomi daerah mampu mengejar ketertinggalan dan berkontribusi lebih signifikan terhadap pembangunan wilayah.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Merujuk pada istilah 'penduduk menganggur' menurut Badan Pusat Statistik (2024), penduduk yang menganggur diartikan sebagai penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Banyaknya pengangguran di suatu wilayah merupakan masalah yang tidak hanya mencakup bidang perekonomian saja. Di sisi lain, masalah pengangguran juga mempunyai hubungan erat dengan bidang sosial dan pendidikan.

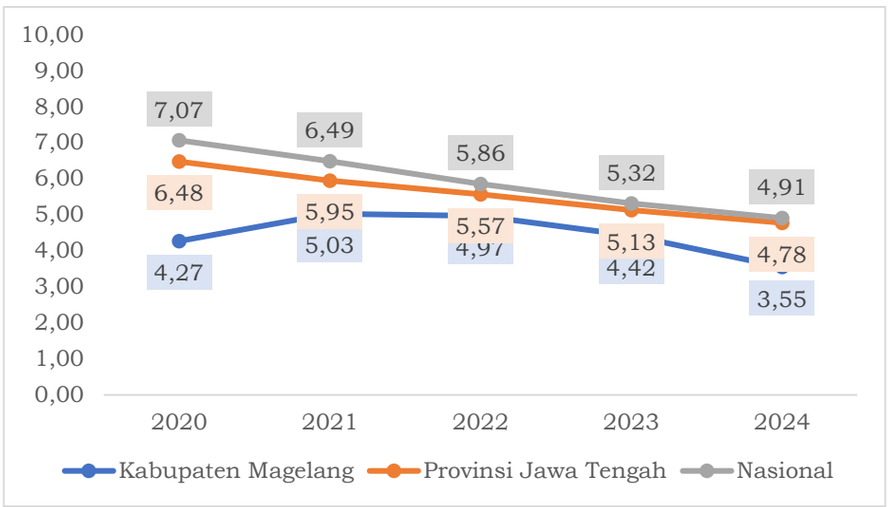

Gambar 2.1.25
Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Dalam periode 2020 hingga 2024, TPT di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif. Secara umum, capaian indikator ini berada pada posisi yang lebih baik apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2020, capaian TPT Kabupaten Magelang tercatat sebesar 4,27 persen. Capaian tersebut kemudian menunjukkan peningkatan hingga tahun 2021, yakni menjadi 5,03 persen. Peningkatan ini sebagian besar dipengaruhi pandemi Covid–19, di mana

pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah serta membatasi aktivitas di luar rumah, termasuk penerapan program bekerja dari rumah. Kebijakan tersebut menyebabkan pihak pemberi kerja melakukan efisiensi, seperti pengurangan waktu bekerja, merumahkan para pekerja, hingga melakukan pemutusan hubungan kerja, yang berkontribusi pada peningkatan angka pengangguran. Namun, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional, TPT Kabupaten Magelang menunjukkan perbaikan bertahap, dengan capaian sebesar 3,55 persen pada tahun 2024.

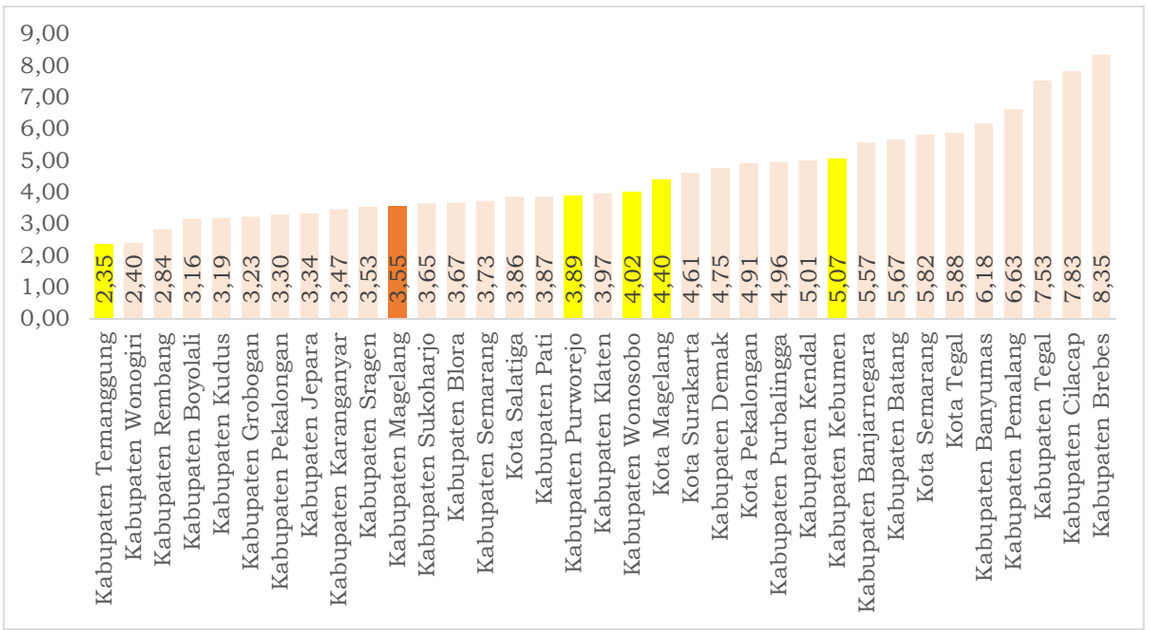

Gambar 2.1.26
Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Magelang Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, indikator TPT Kabupaten Magelang menempati posisi ke–17. Selain itu, Kabupaten Magelang menempati posisi kelima jika dibandingkan dengan kabupaten/kota eks Karesidenan Kedu. Empat daerah dengan TPT yang lebih tinggi adalah Kabupaten Kebumen, Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Purworejo, sedangkan TPT Kabupaten Temanggung berada di bawah Kabupaten Magelang.

5. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan masyarakat, yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing–masing kelompok penduduk. Secara umum, dalam rentang lima tahun terakhir, capaian Indeks

Gini Kabupaten Magelang berada pada posisi yang lebih baik apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, dengan kategori moderat.

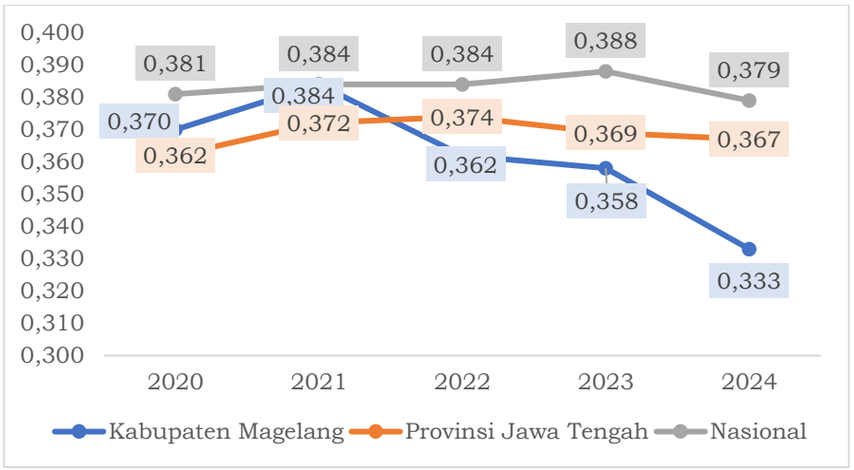

Gambar 2.1.27
Perbandingan Capaian Indeks Gini
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Pada tahun 2020, capaian Indeks Gini Kabupaten Magelang tercatat sebesar 0,370 dan menunjukkan peningkatan sampai dengan tahun 2021 dengan capaian 0,384. Capaian indikator ini kemudian menunjukkan penurunan bertahap hingga menjadi 0,333 pada tahun 2024. Besaran capaian tersebut mengindikasikan bahwa kondisi ketimpangan pendapatan di kabupaten ini semakin membaik, di mana distribusi pendapatan semakin menunjukkan pemerataan.

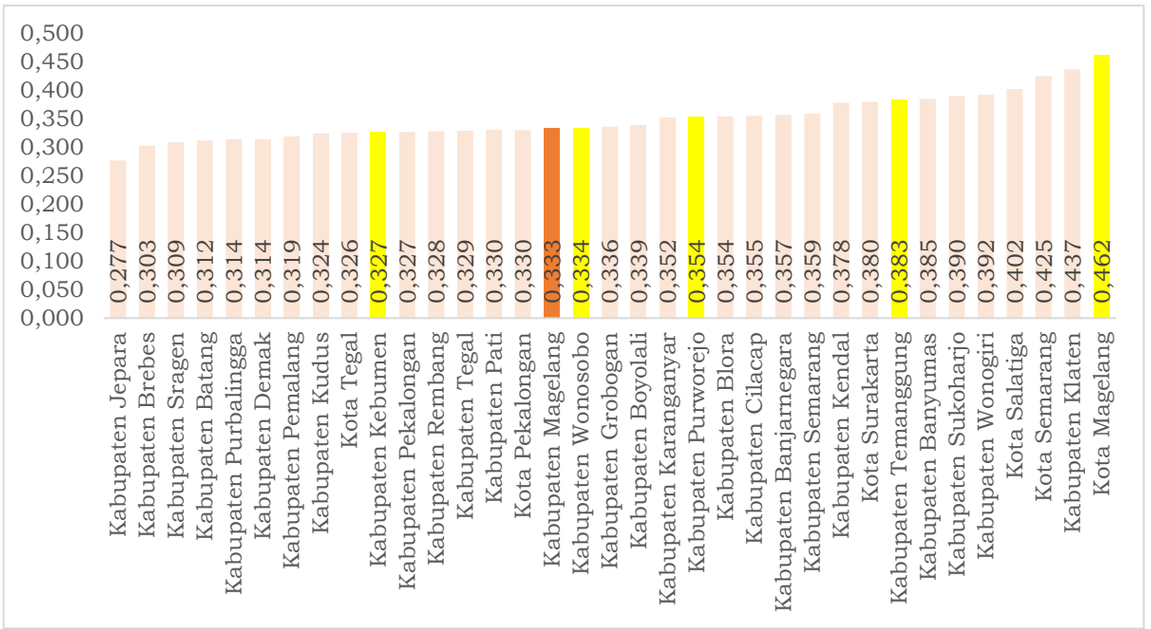

Gambar 2.1.28
Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten Magelang
Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang berada di urutan ke–19. Adapun jika dibandingkan dengan kabupaten/kota eks Karesidenan Kedu, Kabupaten Magelang berada di urutan kelima. Hal itu menunjukkan distribusi pendapatan yang relatif lebih merata dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan dari sisi sosial dan kesejahteraan manusia. Semakin tinggi tingkat pembangunan manusia, semakin besar kemampuan penduduk dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya ekonomi, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang ke arah yang lebih positif. Capaian pembangunan manusia diukur melalui tiga dimensi, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Adapun pembangunan manusia menurut standar United Natios Development Program (UNDP) terdiri atas empat kriteria, yakni Sangat Tinggi (IPM ≥ 80), Tinggi (70 ≤ IPM ≥ 80), Sedang (60 ≤ IPM ≥ 70), dan Rendah (IPM ≤ 60).

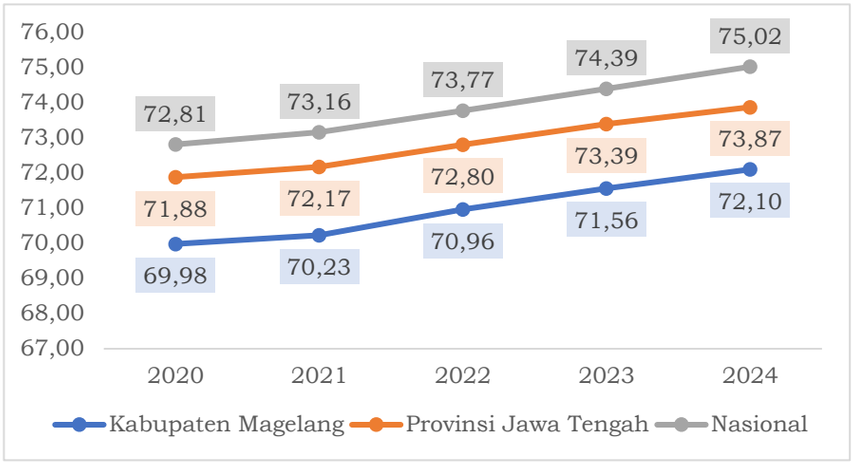

Gambar 2.1.29
Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Secara keseluruhan, IPM Kabupaten Magelang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di wilayah tersebut. Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Magelang menunjukkan peningkatan angka IPM yang konsisten, meskipun pada tingkat yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan rata-rata nasional. Pada tahun 2020, capaian IPM kabupaten ini tercatat sebesar 69,98 dengan predikat

sedang, dan menunjukkan kecenderungan meningkat hingga tahun 2024 menjadi 72,10 dengan kategori tinggi. Peningkatan ini tercatat dengan rata–rata pertumbuhan tahunan sebesar 0,63 persen.

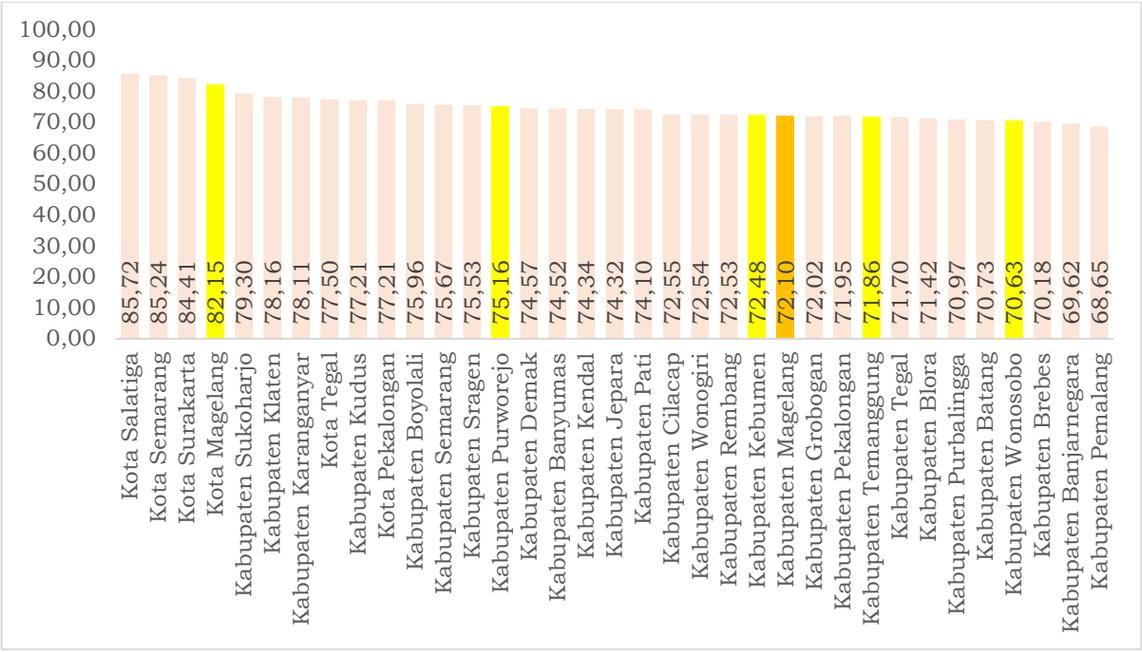

Gambar 2.1.30
Posisi Relatif Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Dalam perbandingan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, IPM Kabupaten Magelang berada pada urutan ke–24. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota eks Karesidenan Kedu, Kabupaten Magelang menempati urutan ketiga setelah Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo. Peringkat ini mencerminkan capaian pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang masih memerlukan upaya peningkatan agar dapat lebih kompetitif di tingkat regional.

Tabel 2.1.34
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,97	74,13	74,28	74,44	74,68
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,54	12,55	12,58	12,61	12,62
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,78	7,79	7,81	7,82	7,83
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Juta Rupiah/ Orang/ Tahun	9,30	9,44	10,01	10,49	10,93
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	**Indeks**	**69,98**	**70,23**	**70,96**	**71,56**	**72,10**

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Tahun 2025

Keberhasilan dan tantangan dalam upaya pembangunan daerah dapat dilihat dengan mengamati perubahan dalam usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Selama periode 2020 hingga 2024, analisis data IPM menunjukkan tren positif yang signifikan. Pada rentang waktu yang sama, keempat indikator komposit pembentuk IPM di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang direpresentasikan oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH) menunjukkan peningkatan secara bertahap dari 73,97 pada 2020 menjadi 74,68 pada 2024. Harapan Lama Sekolah (HLS) juga meningkat dari 12,54 tahun pada awal periode menjadi 12,62 tahun pada akhir periode, sementara Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan peningkatan dari 7,78 tahun menjadi 7,83 tahun. Pengeluaran Per Kapita (PPP) disesuaikan juga mengalami peningkatan dari 9,30 juta rupiah per orang per tahun menjadi 10,93 juta rupiah.

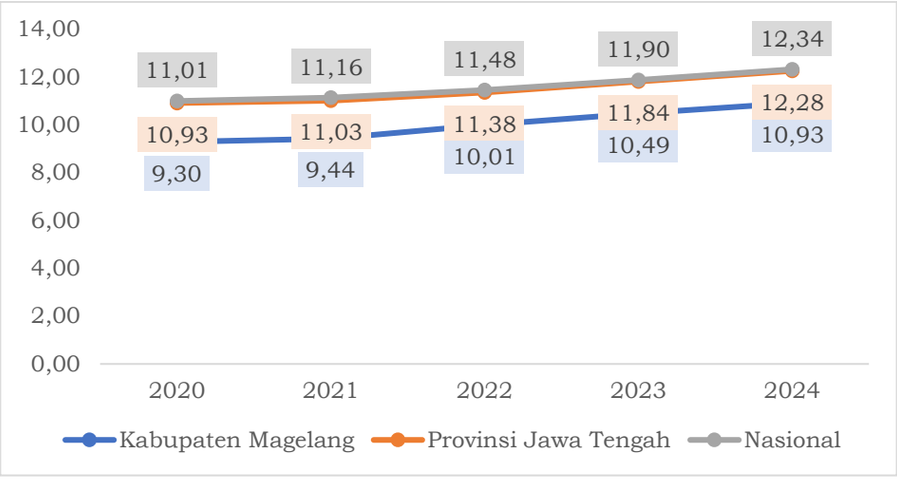

Gambar 2.1.31
Perbandingan Capaian Pengeluaran per Kapita
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Salah satu tantangan yang perlu menjadi perhatian adalah tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan dengan indikator pengeluaran per kapita di Kabupaten Magelang menunjukkan peningkatan dengan rata–rata pertumbuhan sebesar 3,03 persen per tahun. Pada tahun 2020, besaran pengeluaran riil per kapita di kabupaten ini tercatat sebesar 9,30 juta rupiah/orang/tahun dan meningkat menjadi 10,93 juta rupiah/orang/tahun. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, besaran pengeluaran riil per kapita di kabupaten ini masih tertinggal dengan gap yang cukup jauh.

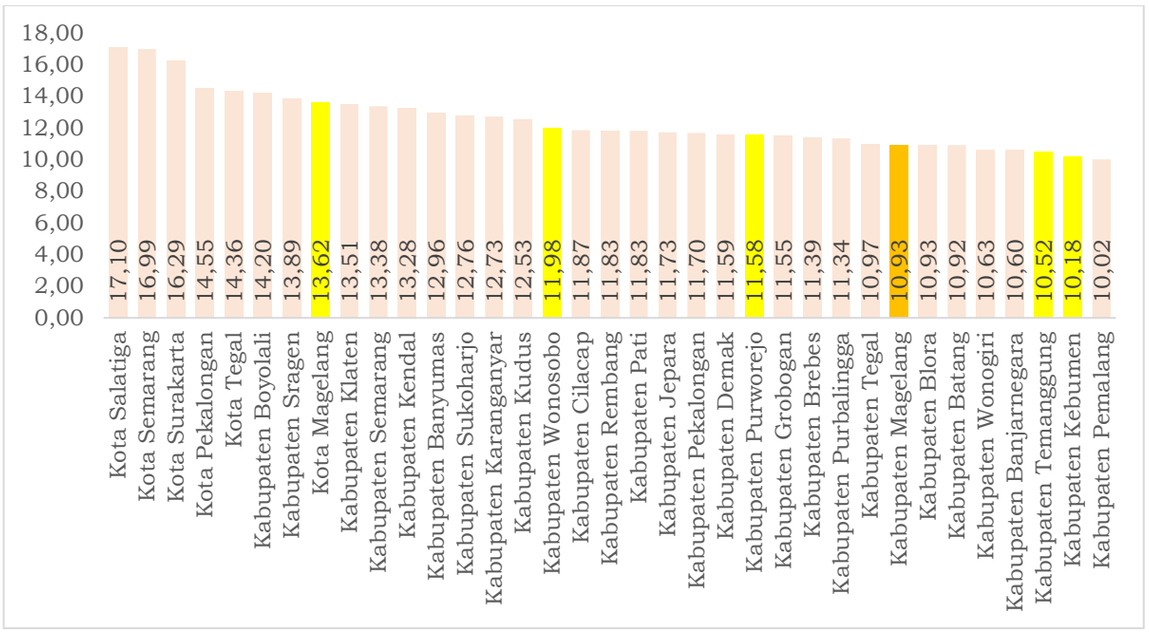

Gambar 2.1.32
Posisi Relatif Capaian Pengeluaran per Kapita Kabupaten Magelang Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, pengeluaran per kapita disesuaikan di Kabupaten Magelang pada tahun 2024 menempatkan kabupaten ini pada posisi ke– 28. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota eks Karesidenan Kedu, Kabupaten Magelang menempati urutan keempat. Peringkat tersebut berada di bawah Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Purworejo.

7. Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia

Secara umum, dalam lima tahun terakhir, distribusi pendapatan di Kabupaten Magelang menunjukkan dinamika yang mencerminkan perubahan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2020, kelompk 40 persen penduduk berpendapatan terendah memiliki pangsa pendapatan sebesar 18,57 persen, yang kemudian mengalami sedikit fluktuasi dengan penurunan pada 2021 (18,01 persen) sebelum kembali meningkat pada 2022 (18,82 persen) dan 2023 (19,03 persen) serta 2024 (20,21). Sementara itu, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan menengah menunjukkan tren kenaikan yang relatif konsisten dari 36,12 persen pada 2020 menjadi 38,13 persen pada 2024. Sebaliknya, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan tertinggi mengalami penurunan dari 45,31 persen pada 2020 menjadi 41,67 persen pada 2024.

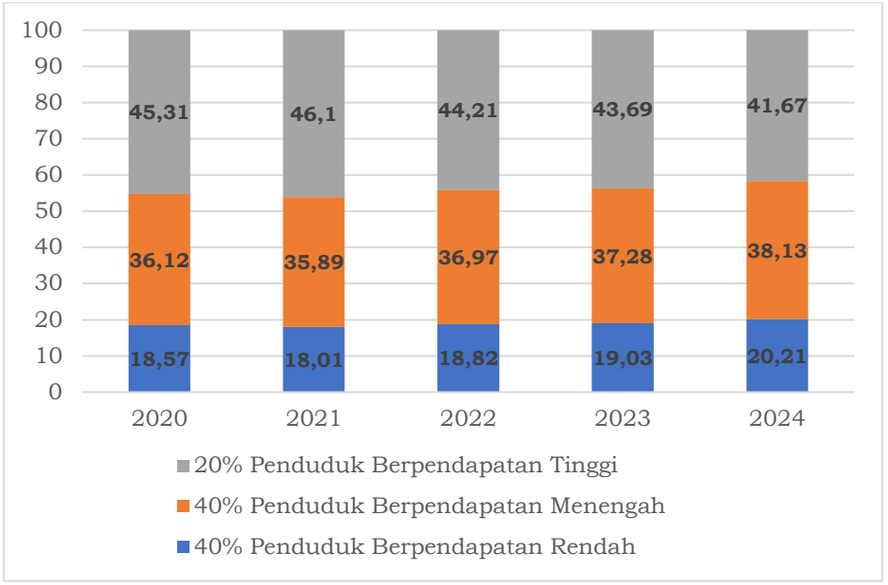

Gambar 2.1.33
Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Tahun 2024

Pola ini mengindikasikan adanya pergeseran dalam distribusi pendapatan dari kelompok tertinggi ke kelompok menengah dan rendah, yang dapat mencerminkan berbagai faktor. Tren ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa peningkatan proporsi pendapatan pada kelompok berpendapatan rendah dan menengah bukan semata-mata disebabkan oleh perlambatan ekonomi pada kelompok atas, tetapi juga merupakan hasil dari pertumbuhan inklusif yang mendorong peningkatan kesejahteraan secara merata.

2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua

Pada sub aspek kesehatan untuk semua dijelaskan kondisi kesehatan yang mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup di seluruh wilayah dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, yang sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator usia harapan hidup, indeks keluarga sehat, prevalensi stunting, dan indikator lainnya sesuai kondisi daerah.

1. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup merupakan representasi dari dimensi umur panjag dan hidup sehat pada Indeks Pembangunan Manusia. Pada tahun 2020, usia harapan hidup saat lahir di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 73,97 tahun dan menunjukkan peningkatan hingga menjadi 74,68 tahun di tahun 2024, atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,24 persen per tahun.

Selanjutnya, perbandingan dengan UHH di tingkat provinsi dan nasional memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi daerah ini dalam konteks yang lebih luas.

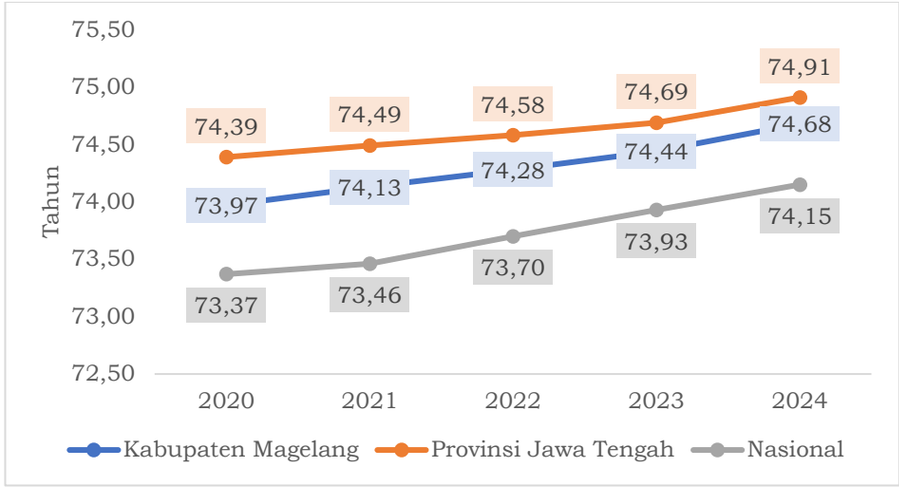

Gambar 2.1.34
Perbandingan Capaian Usia Harapan Hidup (UHH)
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Capaian Kabupaten Magelang tersebut masih sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 74,91 tahun pada 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam harapan hidup di Kabupaten Magelang, wilayah ini masih menghadapi tantangan dalam mencapai tingkat harapan hidup yang setara dengan rata-rata provinsi. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan, gizi masyarakat, dan lingkungan hidup menjadi penting untuk mendorong peningkatan usia harapan hidup di masa yang akan datang.

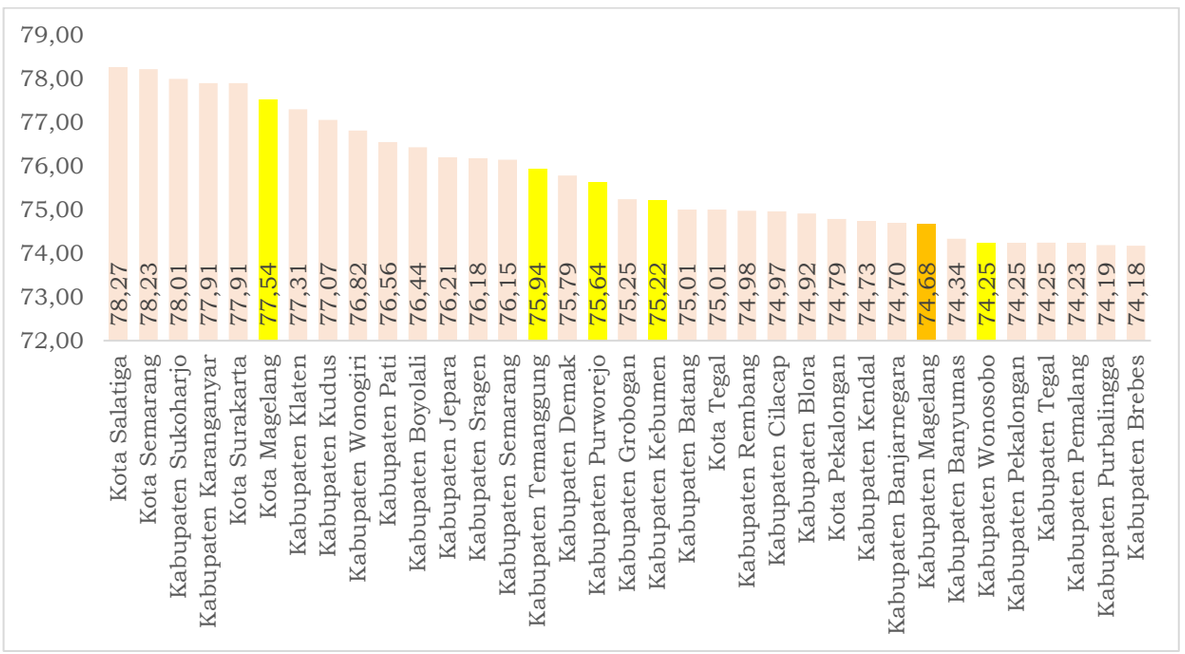

Gambar 2.1.35
Posisi Relatif Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Magelang Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Berikutnya, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, UHH Kabupaten Magelang berada pada urutan ke–28. Adapun apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota eks Karesidenan Kedu, capaian Kabupaten Magelang berada di urutan kelima setelah Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Kebumen. Meskipun perbedaan UHH antardaerah tidak terlalu signifikan, nilai yang sedikit lebih rendah pada Kabupaten Magelang mengindikasikan adanya perbedaan dalam akses terhadap layanan kesehatan, kualitas hidup, dan faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap harapan hidup penduduk.

2. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. Suatu keluarga dinyatakan sehat apabila nilai IKS lebih besar dari 0,80, dalam kategori prasehat jika memiliki nilai antara 0,50 hingga 0,80, dan dinyatakan tidak sehat jika nilainya berada di bawah 0,50. Indikator yang dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai ini terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan, yakni meliputi: (1) keluarga mengikuti program keluarga berencana (KB); (2) ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; (3) bayi mendapat imunisasi dasar lengkap; (4) bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif; (5) balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan; (6) penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar; (7) penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur; (8) penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan; (9) anggota keluarga tidak ada yang merokok; (10) keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (11) keluarga mempunyai akses sarana air bersih; serta (12) keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

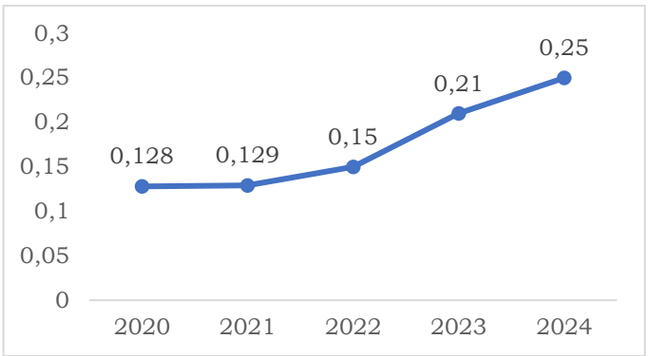

Gambar 2.1.36

Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Dalam lima tahun terakhir, capaian IKS Kabupaten Magelang masih berada pada kisaran 0,1 hingga 0,2 atau dengan kategori keluarga tidak sehat. Pada tahun 2020, IKS tercatat sebesar 0,128 dan mengalami kenaikan bertahap hingga mencapai 0,25 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek kesehatan.

3. Angka Kematian Neonatal

Angka kematian neonatal (AKN) merupakan indikator yang menunjukkan banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama atau saat bayi berusia di bawah satu bulan (usia 0 hingga 28 hari). Angka kematian neonatal dinyatakan per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu tertentu. Penyebab umum kematian pada bayi di bawah satu bulan mencakup faktor-faktor yang dibawa bayi sejak lahir, baik yang diperoleh dari orang tua pada saat konsepsi maupun selama proses kehamilan.

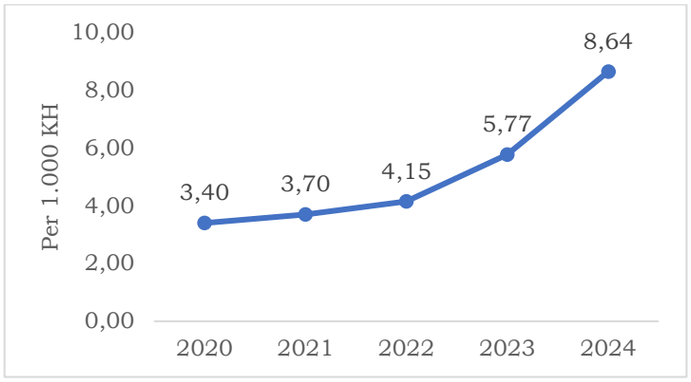

Gambar 2.1.37
Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Angka kematian neonatal di Kabupaten Magelang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2020 hingga 2024, yang mencerminkan adanya tantangan dalam upaya menurunkan angka kematian bayi baru lahir. Pada tahun 2020, AKN tercatat sebesar 3,40 per 1.000 kelahiran hidup dan mengalami kenaikan bertahap menjadi 3,70 pada tahun 2021 serta 4,15 pada tahun 2022. Angka tersebut terus meningkat pada tahun berikutnya hingga mencapai 5,77, sebelum mengalami lonjakan tajam menjadi 8,64 pada tahun 2024. Lonjakan ini menandakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang turut berkontribusi pada peningkatan AKN, seperti akses dan kualitas layanan kesehatan ibu serta bayi, tingkat gizi ibu hamil, dan efektivitas program kesehatan yang telah

diimplementasikan. Tren ini juga menunjukkan adanya kebutuhan akan intervensi yang lebih komprehensif untuk memperkuat sistem kesehatan, yang mencakup peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, optimalisasi fasilitas pelayanan neonatal, serta penguatan edukasi kesehatan bagi ibu hami dan keluarga, demi menekan angka kematian neonatal di Kabupaten Magelang.

4. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan jumlah bayi berusia satu tahun yang meninggal dunia dalam kurun waktu satu tahun per 1.000 per kelahiran hidup. Angka kematian bayi juga dapat didefinisikan sebagai probabilitas bayi untuk meninggal sebelum mencapai usia satu tahun, yang juga dinyatakan per 1.000 kelahiran hidup. Indikator ini sangat penting untuk mencerminkan derajat kesehatan masyarakat, mengingat bayi baru lahir memiliki sensitivitas tinggi terhadap kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, angka kematian bayi merupakan salah satu target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang menggambarkan kondisi kesehatan dan status gizi bayi sejak dalam kandungan hingga saat dilahirkan.

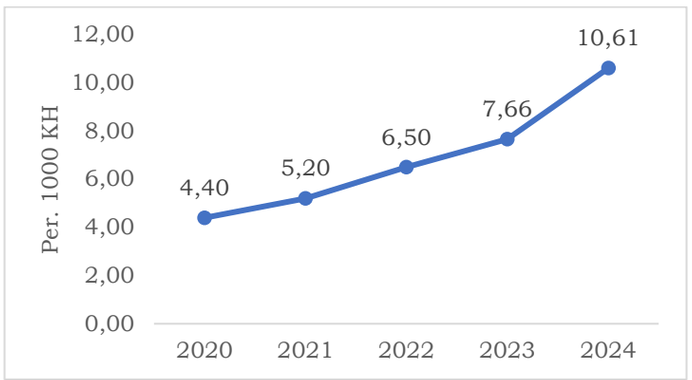

Gambar 2.1.38
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, indikator AKB di Kabupaten Magelang menunjukkan perubahan yang mengarah pada peningkatan. Pada tahun 2020, AKB tercatat sebesar 4,40 per 1.000 kelahiran hidup, yang kemudian meningkat menjadi 5,20 pada tahun 2021. Tren kenaikan ini berlanjut, dengan angka mencapai 6,50 pada tahun 2022, 7,66 pada tahun 2023, dan mengalami lonjakan signifikan menjadi 10,61 pada tahun 2024. Peningkatan AKB dalam lima tahun terakhir mencerminkan tantangan signifikan dalam upaya menurunkan angka tersebut. Berbagai faktor mungkin turut berpengaruh, seperti akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan bagi ibu dan anak, kualitas pelayanan medis yang kurang

memadai, serta kondisi sosial-ekonomi yang berdampak pada kesehatan ibu dan bayi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang berkelanjutan, seperti penguatan program kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta optimalisasi pelayanan kesehatan primer.

5. Angka Kematian Balita (AKBa)

Angka kematian balita (AKBA) didefinisikan sebagai banyaknya anak di bawah usia lima tahun yang meninggal di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, dinyatakan per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian balita merupakan indikator yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan anak balita serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti kecukupan nutrisi, prevalensi penyakit menular, pola pengasuhan ibu dalam menjaga kesehatan anak, serta sanitasi dan kondisi kesehatan lingkungan lainnya.

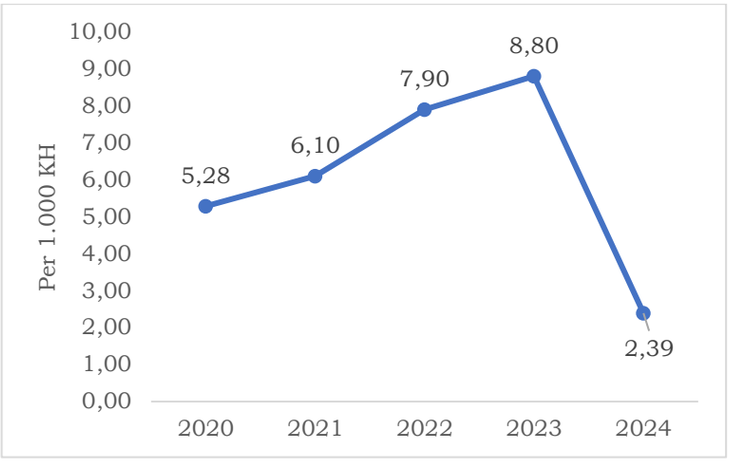

Gambar 2.1.39
Angka Kematian Balita di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Angka kematian balita di Kabupaten Magelang dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pola yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat hingga tahun 2023 sebelum mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2024. Pada tahun 2020, AKBa tercatat sebesar 5,28 per 1.000 kelahiran hidup, meningkat berturut-turut menjadi 6,10 pada tahun 2021, 7,90 pada tahun 2022, dan mencapai puncaknya di angka 8,80 pada tahun 2023. Tren peningkatan ini menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menurunkan angka kematian balita. Namun, pada tahun 2024, AKBa mengalami penurunan signifikan menjadi 2,39, yang berpotensi mencerminkan keberhasilan intervensi kebijakan atau peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan anak. Penurunan ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap

perbaikan tersebut dapat dipertahankan dan diperkuat di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi berkelanjutan dalam meningkatkan efektivitas program kesehatan balita, memperkuat sistem layanan kesehatan primer, serta mengoptimalkan edukasi dan intervensi gizi.

6. Jumlah Kasus Kematian Ibu

Jumlah kasus kematian ibu menunjukkan banyaknya perempuan yang meninggal akibat penyebab kematian yang terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya, dengan pengecualian kasus kecelakaan, bunuh diri, atau insiden lainnya, selama periode kehamilan, persalinan, dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan), tanpa memperhitungkan durasi kehamilan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah kasus kematian ibu tercatat sebanyak tujuh kasus, namun melonjak tajam menjadi 24 kasus pada 2021. Meskipun setelahnya angka ini menunjukkan tren penurunan, yaitu lima belas kasus pada 2022, tiga belas kasus pada 2023, dan dua belas kasus pada 2024, jumlahnya masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Tingginya kasus kematian ibu pada tahun 2021 sebagian besar disebabkan oleh pandemi Covid-19, dengan jumlah kasus sebanyak empat belas orang. Sementara itu, sepuluh orang lainnya meninggal dunia akibat faktor-faktor lain, seperti perdarahan, eklampsia, dan emboli air ketuban.

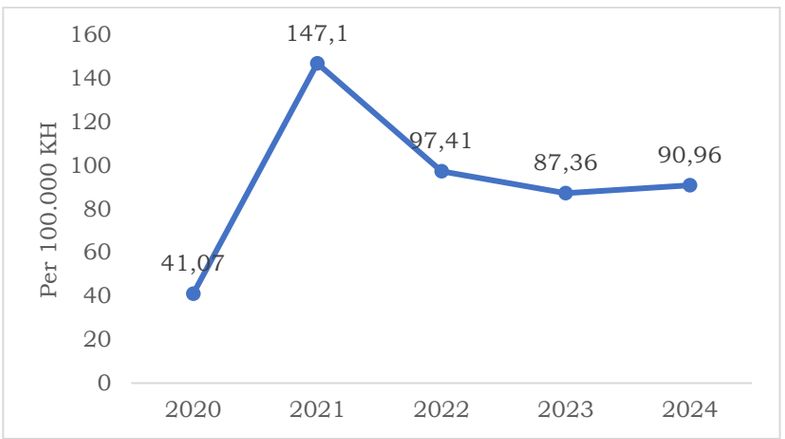

Gambar 2.1.40
Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Sama halnya dengan jumlah kasus kematian ibu, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Magelang juga mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024. Indikator ini merupakan indikator yang mencerminkan keberhasilan layanan kesehatan ibu dan persalinan dalam suatu wilayah. Angka Kematian

Ibu (AKI) di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2020 hingga 2024, dengan lonjakan tajam pada tahun 2021 sebelum mengalami penurunan bertahap hingga 2024. Pada tahun 2020, AKI tercatat sebesar 41,07 per 100.000 kelahiran hidup, namun meningkat drastis menjadi 147,1 pada 2021. Setelah pandemi mereda, AKI menunjukkan tren penurunan menjadi 97,41 pada 2022 dan 87,36 pada 2023, sebelum sedikit meningkat menjadi 90,96 pada 2024. Meskipun tren penurunan setelah 2021 mencerminkan adanya upaya perbaikan layanan kesehatan ibu dan persalinan, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, yang mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan dalam menurunkan AKI ke tingkat yang lebih aman.

7. Persentase Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk diartikan sebagai anak di bawah lima tahun dengan status gizi berdasarkan usia dan berat badan yang memiliki Z-Score ≤3 SD dan/atau menunjukkan gejala klinis seperti marasmus, kwasiorkor, serta kombinasi marasmus-kwasiorkor. Persentase balita gizi buruk menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan balita di suatu daerah. Persentase balita gizi buruk diperoleh dari perbandingan antara jumlah balita dengan status gizi buruk di suatu wilayah dalam satu tahun dengan total populasi balita pada periode yang sama di lokasi tersebut.

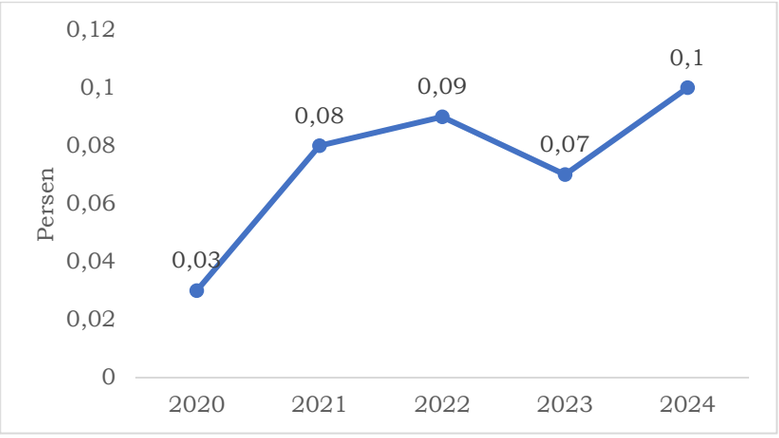

Gambar 2.1.41
Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, dengan tren kenaikan yang cukup mengkhawatirkan. Pada tahun 2020, angka ini tercatat sebesar 0,03 persen, kemudian meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 0,08 persen pada 2021, dan terus naik menjadi 0,09 persen pada 2022. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan ke 0,07 persen pada 2023, angka ini kembali melonjak

menjadi 0,1 persen pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masalah gizi buruk pada balita masih menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian lebih dalam kebijakan pembangunan daerah.

8. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Balita gizi kurang atau *underweight* adalah anak usia di bawah lima tahun dengan kondisi gizi berdasarkan berat badan (BB) dan umur (U) berada dalam rentang Z-Score antara -2 SD dan -3SD. Keadaan ini lebih rentan dialami oleh anak berusia dua hingga lima tahun, karena mereka sudah mengadopsi pola konsumsi seperti makanan keluarga dengan tingkat aktivitas fisik yang tinggi. Asupan makanan yang tidak seimbang dengan kebutuhan energi akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak, di mana kebiasaan serta pola makan yang kurang baik dapat menyebabkan rendahnya status nutrisi pada balita tersebut. Selain itu, indikator ini memiliki peran penting karena berhubungan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yakni menghilangkan gizi kurang di tahun 2030.

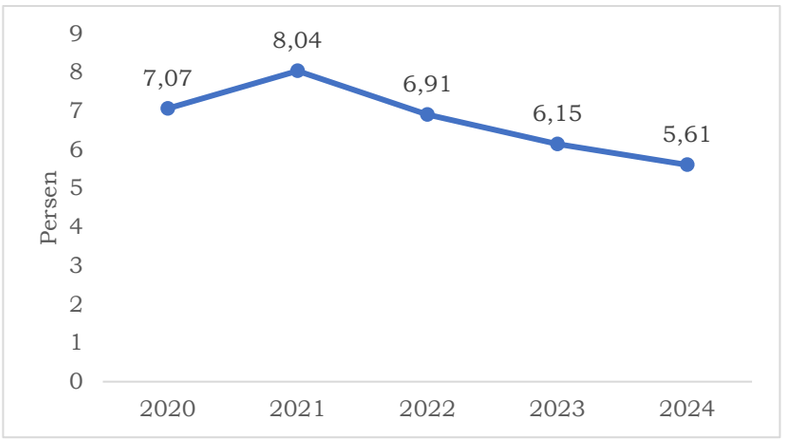

Gambar 2.1.42
Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Magelang menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, angka ini tercatat sebesar 7,07 persen dan mengalami kenaikan menjadi 8,04 persen pada 2021. Setelah tahun 2021, prevalensi balita gizi kurang mulai menurun secara konsisten, mencapai 6,91 persen pada 2022, 6,15 persen pada 2023, dan terus membaik hingga 5,61 persen pada 2024. Tren positif ini mencerminkan efektivitas program perbaikan gizi yang telah diterapkan.

9. Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita

Kasus *stunting* terindikasi oleh rendahnya rata-rata konsumsi energi, pola asuh orang tua terhadap balita, risiko akibat pernikahan anak, kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, terbatasnya akses air bersih, air minum yang layak, dan sanitasi, hingga rendahnya kapasitas dan kesadaran terhadap kesehatan keluarga. Tingginya jumlah anak yang mengalami *stunting* tidak lepas dari masalah kekurangan gizi yang juga dialami oleh ibu hamil. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakcukupan gizi pada janin yang sedang berkembang sehingga anak terlahir dalam kondisi yang kurang optimal.

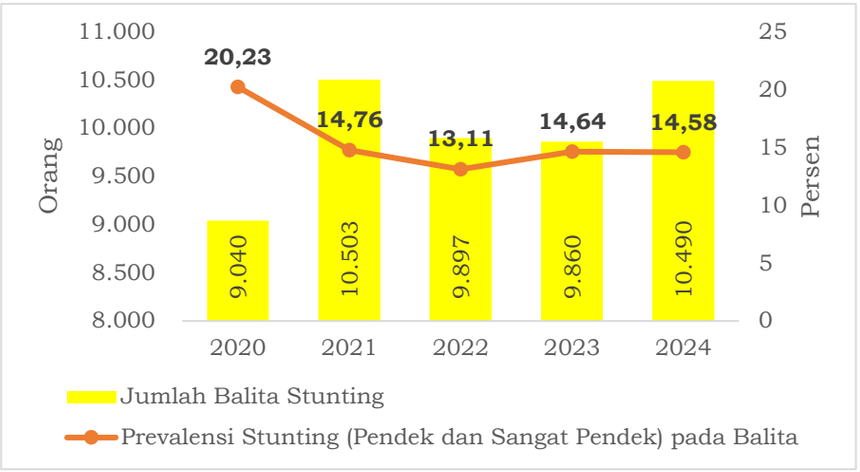

Gambar 2.1.43
Jumlah Balita *Stunting* dan Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Data Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Dalam lima tahun terakhir, berdasarkan data e-PPGBM, capaian prevalensi *stunting* pada balita di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan membaik dengan rata-rata penurunan 7,86 persen, di mana capaiannya tercatat sebesar 20,23 persen di tahun 2020 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 menjadi 14,58 persen. Selanjutnya, perhitungan prevalensi stunting dilakukan pula melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), di mana menurut hasil SSGI besaran prevalensi stunting di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 31,01 persen di tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2020 tidak dilaksanakan survei gizi, dan dilaksanakan kembali pada tahun 2021, di mana capaian prevalensi stunting di kabupaten ini tercatat sebesar 22,30 persen. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan di tahun 2022 menjadi 28,20 persen dan berangsur menunjukkan kondisi yang semakin membaik di tahun 2023 hingga 2024, yang ditandai dengan rata-rata penurunan capaian prevalensi stunting sebesar 17,27 persen per tahun hingga capaiannya menjadi 19,30 di tahun 2024. Adanya dua sumber capaian prevalensi stunting tersebut bukanlah dua data yang dapat saling

menggantikan, karena keduanya dihitung dengan metodologi yang berbeda, dan dikembangkan untuk tujuan yang berbeda pula, di mana data SSGI dilaksanakan untuk evaluasi capaian dengan metode terstandar, sedangkan e-PPGBM untuk deteksi, monitoring dan intervensi *by name by address*.

Masih relatif tingginya prevalensi stunting di kabupaten ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan capaian penurunan *stunting* secara konsisten. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan, termasuk penguatan koordinasi antarsektor, peningkatan cakupan layanan kesehatan bagi ibu dan anak, serta edukasi mengenai gizi yang lebih intensif kepada masyarakat untuk memastikan bahwa tren penurunan *stunting* dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

10. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment and Coverarage*)

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment and coverage*) merujuk pada persentase kasus tuberkulosis yang berhasil teridentifikasi dan menerima pengobatan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Indikator ini merupakan ukuran yang signifikan dalam penanggulangan tuberkulosis karena mencerminkan efektivitas upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis yang telah dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting, yakni penemuan kasus, yang berkaitan dengan kemampuan sistem kesehatan dalam mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis; serta pengobatan kasus, yang berkaitan dengan kemampuan sistem kesehatan dalam memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.

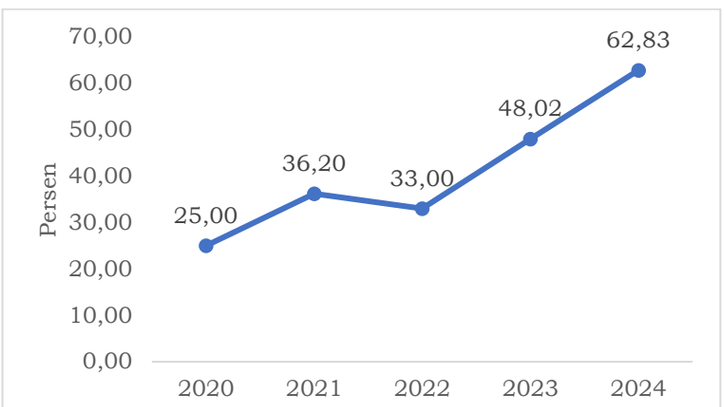

Gambar 2.1.44
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment and Coverage*) di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2024, cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dengan nilai meningkat dari 25 persen pada tahun 2020 menjadi 62,83 persen pada tahun 2024, dan ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25,91 persen per tahun. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam sistem deteksi dini dan pengobatan kasus tuberkulosis di Kabupaten Magelang, meskipun terdapat fluktuasi seperti penurunan pada tahun 2022. Ke depannya, peningkatan cakupan pengobatan tuberkulosis harus terus didukung dengan upaya peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan dan peningkatan koordinasi antarsektor terkait guna mencapai target pengendalian penyakit secara optimal.

11. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*)

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) merupakan persentase pasien tuberkulosis yang berhasil sembuh dan menyelesaikan pengobatan secara lengkap. Indikator ini memiliki peranan penting dalam evaluasi efektivitas pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.

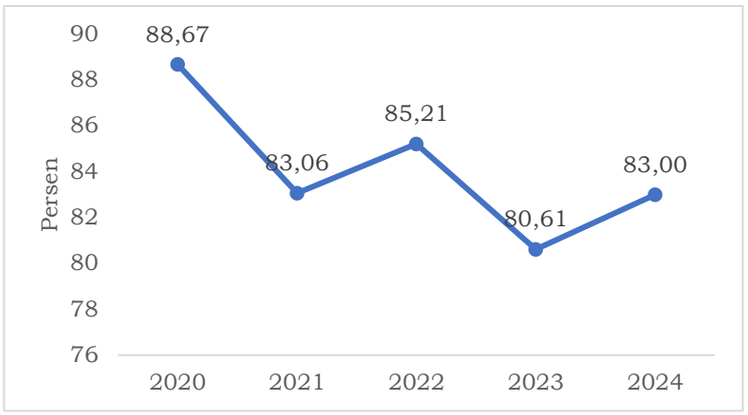

Gambar 2.1.45
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan negatif sebesar -1,64 persen per tahun. Pada tahun 2020, tingkat keberhasilan pengobatan mencapai 88,67 persen, namun kemudian menurun signifikan hingga 80,61 persen pada tahun 2023, sebelum sedikit membaik

menjadi 83,00 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam efektivitas program pengobatan tuberkulosis. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan akses terhadap layanan pengobatan tuberkulosis yang lebih efektif, penguatan sistem pemantauan kepatuhan pasien, serta optimalisasi peran tenaga kesehatan dan edukasi masyarakat dalam memastikan keberlanjutan pengobatan hingga tuntas.

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pada sub aspek pendidikan berkualitas yang merata dijelaskan kondisi masyarakat yang berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat, dan sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka literasi/numerasi, indeks pembangunan literasi masyarakat, indeks literasi digital, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal, yang merupakan representasi dimensi pengetahuan pada Indeks Pembangunan Manusia. Rata-rata lama sekolah memberikan gambaran lebih detail mengenai tingkat partisipasi serta kualitas pendidikan di suatu daerah. Indikator ini juga dapat menunjukkan keberhasilan kebijakan pendidikan jangka panjang serta akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkelanjutan.

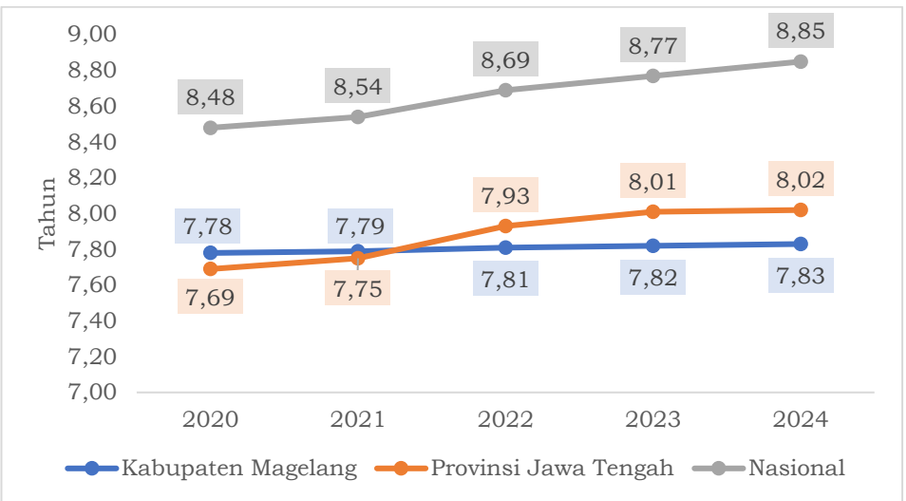

Gambar 2.1.46
Perbandingan Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Pada tahun 2020, capaian RLS di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 7,78 tahun dan bertumbuh menjadi 7,83 tahun di tahun 2024. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di kabupaten ini telah mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas delapan atau setara dengan kelas dua pada jenjang sekolah menengah pertama. Namun, hingga tahun 2024, capaian RLS Kabupaten Magelang masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

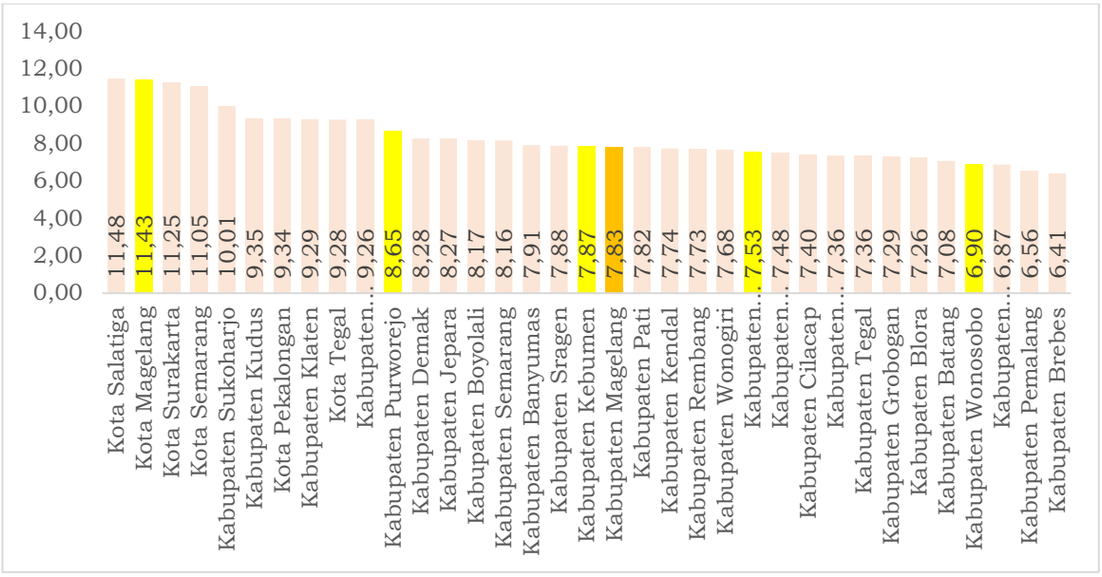

Gambar 2.1.47
Posisi Relatif Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Magelang Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, RLS Kabupaten Magelang berada pada urutan ke–19. Adapun apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota eks Karesidenan Kedu, Kabupaten Magelang berada pada posisi keempat. Peringkat tersebut berada di bawah Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Kebumen.

2. Harapan Lama Sekolah

Kualitas pendidikan memiliki peran yang signifikan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu dimensi pengetahuan yang direpresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah (HLS) menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama lima tahun terakhir. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai estimasi jumlah tahun pendidikan formal yang diperkirakan akan ditempuh oleh seorang anak pada usia tertentu di masa mendatang. Penghitungan indikator ini mengacu pada penduduk berusia 7

tahun ke atas, sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait program wajib belajar.

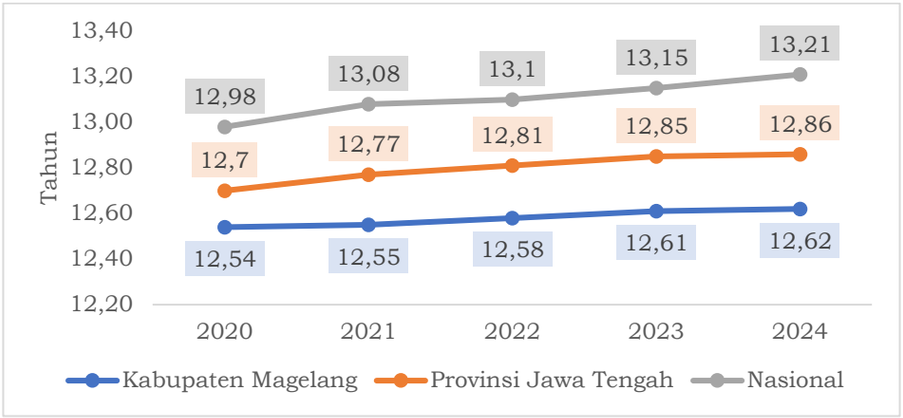

Gambar 2.1.48
Perbandingan Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020–2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Pada tahun 2020, capaian HLS di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 12,54 tahun dan bertumbuh menjadi 12,62 tahun pada 2024, atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Meskipun menunjukkan peningkatan, hingga akhir periode 2024, capaian HLS Kabupaten Magelang masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang masing-masing mencapai 12,86 tahun dan 13,21 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa akses dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Magelang dalam pendidikan formal masih harus ditingkatkan agar tidak tertinggal dari rata-rata regional dan nasional.

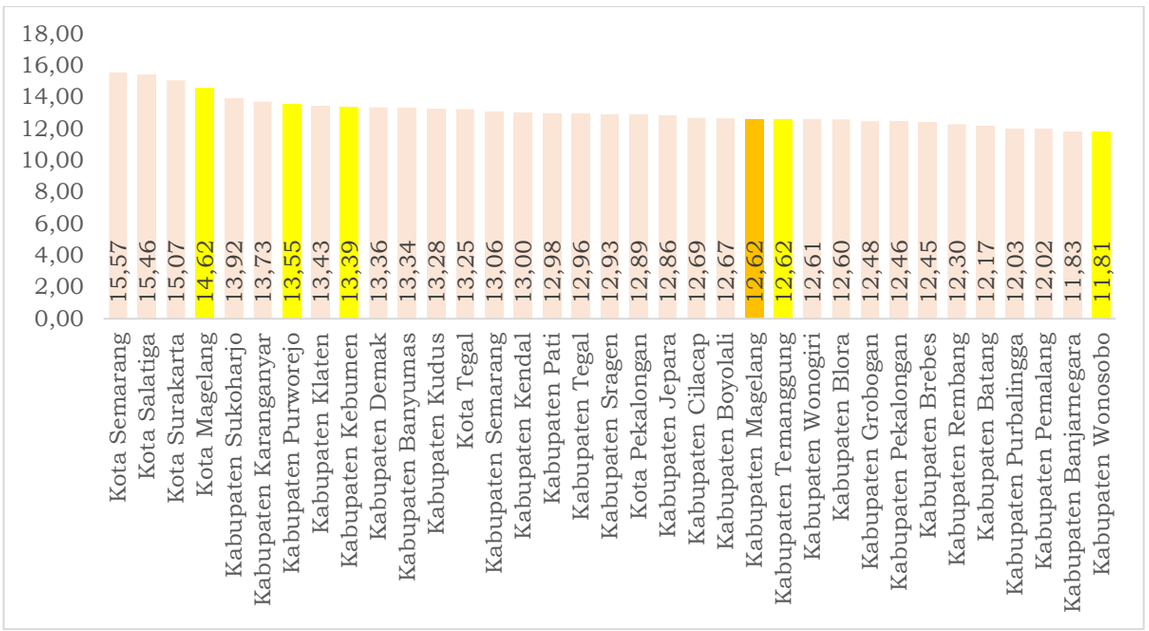

Gambar 2.1.49
Posisi Relatif Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Magelang
Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Selain perbandingan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah, penting juga untuk melihat posisi relatif capaian HLS Kabupaten Magelang dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di provinsi ini. Berdasarkan data, HLS Kabupaten Magelang berada pada urutan ke–19. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan kabupaten eks Karesidenan Kedu, kabupaten ini menempati urutan keempat setelah Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Kebumen.

3. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan, yang diukur melalui Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), merupakan indikator utama dalam menilai kualitas sumber daya manusia serta tingkat pemerataan akses pendidikan di suatu daerah. Indeks ini tidak hanya mencerminkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dengan mendorong penguatan kapasitas tenaga kerja yang lebih produktif dan kompetitif. Pengukuran indeks pendidikan bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian standar pelayanan minimal serta merumuskan kebijakan strategis guna meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pendidikan di semua jenjang.

4. Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 tahun merupakan indikator yang mengukur proporsi anak usia dini yang telah atau sedang mengakses layanan pendidikan pra-sekolah. Cakupan ini meliputi berbagai satuan pendidikan anak usia dini, seperti Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal (BA), serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) lainnya, termasuk Kelompok Bermain (KB) dan Taman Penitipan Anak (TPA). Tingkat partisipasi dalam pendidikan pra-sekolah memegang peranan strategis dalam meningkatkan daya saing daerah, karena berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

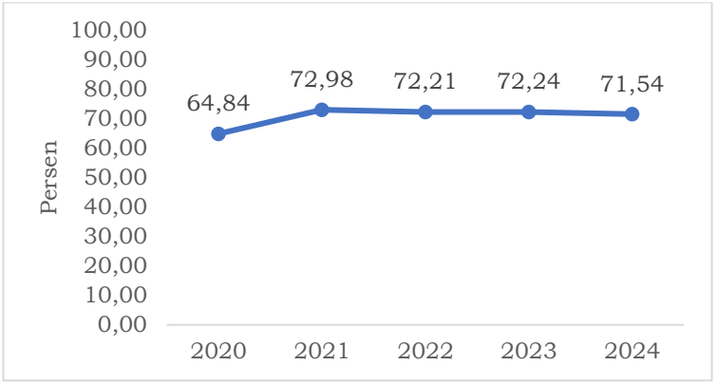

Gambar 2.1.50
Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun di Kabupaten Magelang
Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, Diolah

Selama periode 2020 hingga 2024, capaian APS usia lima sampai enam tahun di Kabupaten Magelang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, ditandai dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 7,95 persen. Pada tahun 2020, APS tercatat sebesar 64,84 persen, kemudian meningkat cukup tajam menjadi 72,98 persen pada 2021. Angka ini mengalami sedikit fluktuasi pada 2022 hingga 2024 dengan angka yang relatif stagnan di sekitar 71,54 persen hingga 72,24 persen.

Stagnasi yang terjadi pada 2022 dan 2023, kemudian menurun pada tahun 2024 menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam mempertahankan peningkatan partisipasi sekolah secara konsisten. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur pendidikan maupun kondisi sosial-ekonomi keluarga berpotensi menjadi kendala bagi peningkatan angka partisipasi. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan daerah, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk memastikan keberlanjutan tren positif ini, termasuk dengan memperkuat program pendidikan inklusif serta meningkatkan kualitas dan daya tampung pendidikan anak usia dini di seluruh wilayah Kabupaten Magelang.

5. Indeks Literasi dan Numerasi

Indeks literasi dan numerasi merupakan indikator utama dalam mengukur kualitas sumber daya manusia, yang berkontribusi terhadap peningkatan daya saing suatu daerah. Dalam konteks ini, literasi tidak hanya mencakup kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis dan memahami makna serta konsep yang terdapat dalam suatu bacaan. Sementara itu, kompetensi numerasi mencerminkan kemampuan individu dalam menganalisis menggunakan angka (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021). Tingkat literasi dan numerasi yang tinggi menjadi

landasan bagi peningkatan produktivitas tenaga kerja, inovasi, serta daya saing daerah secara keseluruhan.

6. Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional

Indikator persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional, yang mencakup literasi membaca dan numerasi pada jenjang SD/sederajat dan SMP/sederajat, memegang peranan penting dalam penilaian kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Persentase siswa yang berhasil mencapai standar kompetensi minimum dalam literasi membaca merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Untuk literasi membaca, siswa dianggap telah memenuhi kompetensi minimum apabila mencapai level "Cukup" atau "Mahir" dalam hasil asesmen sesuai dengan penilaian yang tercantum dalam rapor pendidikan.

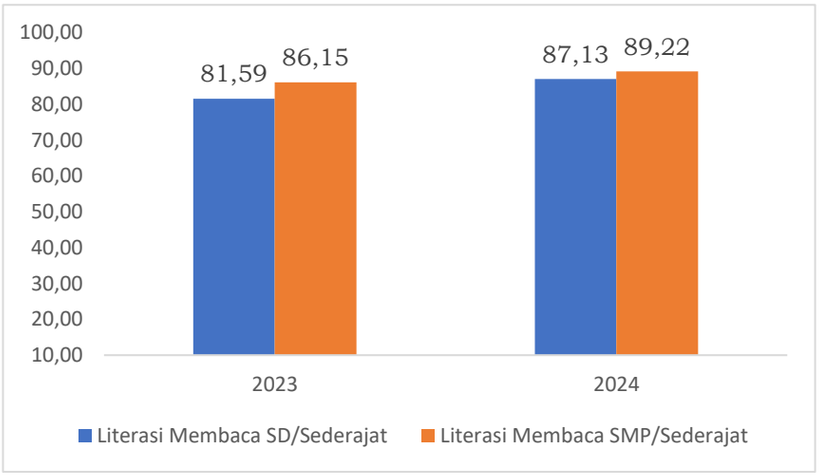

Gambar 2.1.51
Kondisi Literasi Membaca di Kabupaten Magelang Tahun 2023-2024
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Diolah

Selama periode 2023 hingga 2024, capaian indikator persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada jenjang SD/sederajat, angka ini meningkat dari 81,59 persen pada tahun 2023 menjadi 87,13 persen pada tahun 2024, dengan pertumbuhan 5,54 persen. Demikian pula, pada jenjang SMP/sederajat, terjadi peningkatan dari 86,15 persen pada tahun 2023 menjadi 89,22 persen pada tahun 2024. Meskipun menunjukkan tren positif, pencapaian ini masih mengindikasikan tantangan dalam memastikan seluruh siswa mencapai standar kompetensi minimum dan masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan seluruh siswa memiliki kemampuan literasi yang memadai.

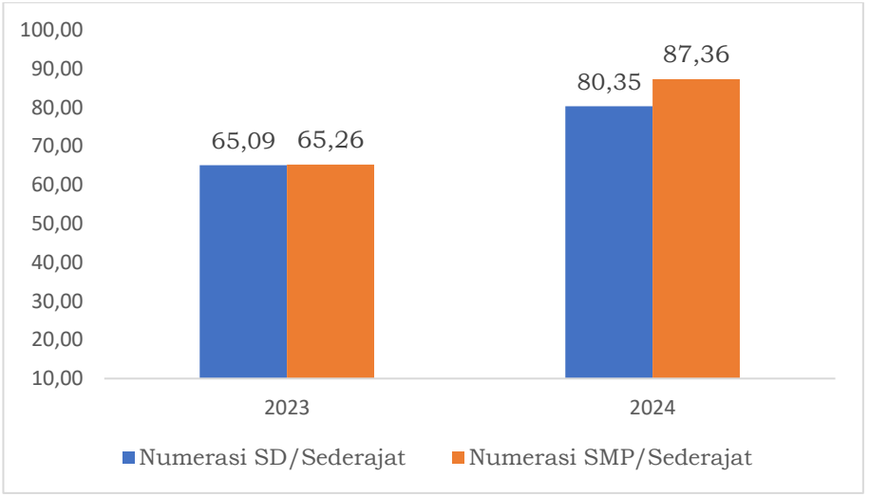

Gambar 2.1.52
Kondisi Numerasi di Kabupaten Magelang Tahun 2023-2024
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Diolah

Demikian juga, pada numerasi, diterapkan standar yang serupa, siswa dianggap telah memenuhi kompetensi minimum apabila mencapai level "Cukup" atau "Mahir" dalam hasil asesmen sesuai dengan penilaian yang tercantum dalam rapor pendidikan . Selama periode 2023 hingga 2024, persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi di Kabupaten Magelang juga menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan di seluruh jenjang pendidikan. Angka ini meningkat dari 65,09 persen pada 2023 menjadi 80,35 persen pada 2024, sedangkan pada tingkat SMP/sederajat, persentasenya mengalami kenaikan dari 65,26 persen pada 2023 menjadi 87,36 persen pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam penguasaan numerasi, terutama di jenjang pendidikan dasar. Namun demikian, meskipun trennya positif, angka tersebut menunjukkan bahwa sampai tahun 2024 masih ada 19,65 persen dari siswa SD dan sekitar 12,64 persen siswa SMP masih belum mencapai standar kompetensi minimum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam kualitas pendidikan yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Ke depannya, diperlukan strategi yang lebih intensif dan berkelanjutan, seperti penguatan metode pembelajaran berbasis teknologi, peningkatan kapasitas guru dalam pengajaran numerasi, serta dukungan bagi sekolah-sekolah dengan capaian terendah agar seluruh siswa dapat mencapai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional.

7. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator yang mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan literasi masyarakat. Angka IPLM dihitung berdasarkan beberapa unsur yang terkait dengan Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), antara lain pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, kunjungan masyarakat, pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan (SNP), partisipasi masyarakat dalam sosialisasi, serta jumlah anggota perpustakaan. Peningkatan literasi yang optimal berpotensi untuk meningkatkan kualitas individu di berbagai sektor, memperluas peluang ekonomi, dan meningkatkan produktivitas kerja, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada daya saing daerah.

Pada tahun 2022, Kabupaten Magelang mencatat prestasi yang signifikan dengan angka IPLM mencapai 96,58, menunjukkan bahwa daerah ini telah berhasl membangun infrastruktur infrastruktur literasi yang memadai. Namun, nilai tersebut menunjukkan kecenderungan pada tahun 2023 menjadi 88,031, dan bertahan pada rata-rata nilai yang sama di tahun 2024 sebesar 88,19. Hal tersebut perlu ditingkatkan dan diupayakan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif, melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk menjamin akses serta kualitas literasi yang lebih merata dan berkelanjutan. Peningkatan IPLM ini menjadi kunci dalam membangun sumber daya manusia yang siap bersaing di era globalisasi.

8. Indeks Literasi Digital

Sebagaimana tertuang dalam buku *Status Literasi Digital di Indonesia 2021*, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan indeks literasi digital merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan masyarakat dalam empat pilar utama, yaitu kecakapan digital (*digital skill*), etika digital (*digital etics*), keamanan digital (*digital safety*), dan budaya digital (*digital culture*). Pengukuran ini sangat penting dalam konteks daya saing sumber daya manusia, karena tingkat literasi digital berpengaruh terhadap kapasitas individu dan komunitas dalam memanfaatkan teknologi guna mendukung produktivitas dan inovasi. Skor literasi digital mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam memfasilitasi akses, penggunaan, dan interaksi masyarakat terhadap teknologi serta media digital, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing daerah baik di tingkat nasional maupun global.

Variasi skor antardaerah, yang dipengaruhi oleh faktor demografis, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan lokasi tempat tinggal, mencerminkan adanya kesenjangan dalam penguasaan teknologi yang perlu diatasi. Kelompok yang lebih muda, berpendidikan tinggi, dan tinggal di daerah perkotaan cenderung memiliki skor yang lebih tinggi sehingga menciptakan tantangan bagi wilayah dengan akses terbatas terhadap teknologi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

9. Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan

Tingkat pemanfaatan perpustakaan merupakan indikator yang diukur berdasarkan jumlah pemustaka yang mengunjungi serta memanfaatkan layanan perpustakaan, baik secara langsung maupun secara daring, yang kemudian dibagi dengan jumlah total penduduk pada tahun yang sama. Dalam konteks ini, definisi perpustakaan mencakup berbagai jenis perpustakaan, meliputi yang berada di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, serta lembaga pendidikan, seperti sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTs), sekolah menengah atas (SMA/MA), perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus. Pemanfaatan perpustakaan ini dapat menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan kegiatan untuk mendukung budaya literasi. Indikator yang menjadi *proxy* dalam pembentukan komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada dimensi budaya literasi ini menggambarkan sejauh mana perpustakaan dimanfaatkan oleh masyarakat.

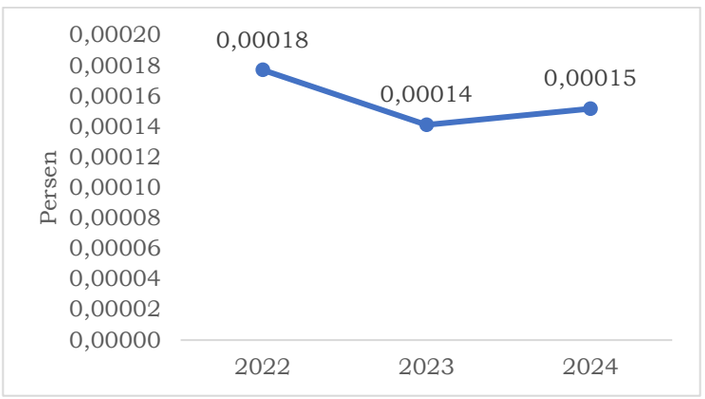

Gambar 2.1.53
Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan di Kabupaten Magelang
Tahun 2022-2024
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, Diolah

Dalam tiga tahun terakhir, capaian tingkat pemanfaatan perpustakaan di Kabupaten Magelang menunjukkan fluktuasi yang cukup rendah dengan kecenderungan menurun, ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 7,46 persen per tahun. Terdapat penurunan signifikan dari 0,00018 pada tahun 2022 menjadi 0,00014 pada tahun 2023, sebelum mengalami sedikit peningkatan

menjadi 0,00015 pada tahun 2024. Meskipun terdapat kenaikan pada tahun 2024, tingkat pemanfaatan perpustakaan tersebut masih tergolong rendah, yang mencerminkan kurang optimalnya akses dan penggunaan fasilitas perpustakaan oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia di daerah, diperlukan upaya lebih intensif dalam memperbaiki kualitas dan daya tarik layanan perpustakaan, serta memperluas akses dan keberagaman kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Pada sub aspek perlindungan sosial yang adaptif dijelaskan kondisi perlindungan sosial yang menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik, dan sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan indikator proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisi indikator ini adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja. Angka ini dihitung terhadap total populasi penduduk yang bekerja.

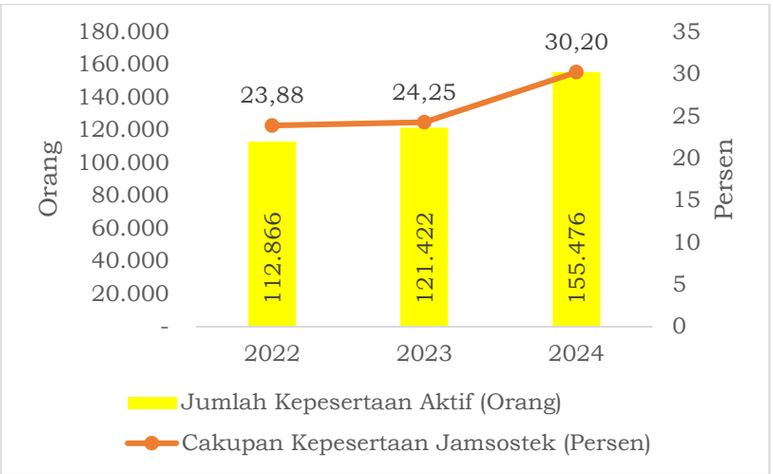

Gambar 2.1.54
Jaminan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Magelang Tahun 2022–2024
Sumber: RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2045

Dalam tiga tahun terakhir, data mengenai jumlah kepesertaan aktif dan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang

menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2022, jumlah kepesertaan aktif jamsostek tercatat 112.866 orang, dengan cakupan kepesertaan sebesar 23,88 persen. Capaian kedua indikator tersebut menunjukkan pertumbuhan sampai dengan tahun 2024. Jumlah kepesertaan aktif jamsostek bertumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,37 persen per tahun, hingga pada tahun 2024 jumlahnya tercatat sebanyak 155.476 orang. Besaran tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya capaian cakupan kepesertaan jamsostek di Kabupaten Magelang yang bertumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,46 persen per tahun, sehingga besarnya capaian cakupan kepesertaan jamsostek di kabupaten ini tercatat sebesar 30,20.

Meningkatnya jumlah dan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut mencerminkan semakin tingginya kesadaran tenaga kerja dan pemberi kerja terhadap pentingnya perlindungan sosial, serta efektivitas program perluasan kepesertaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi ini juga menunjukkan adanya kemajuan dalam penyediaan jaring pengaman sosial di bidang ketenagakerjaan yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja.

2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Indikator cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional merupakan cakupan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan. Bagi kelompok fakir miskin dan masyarakat tidak mampu, biaya kepesertaan tersebut ditanggung oleh pemerintah. Metode perhitungan yang digunakan adalah dengan membagi jumlah penduduk yang memperoleh perlindungan kesejahteraan dengan jumlah penduduk keseluruhan pada periode yang sama, dan hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Tingginya cakupan kepesertaan JKN yang tinggi di suatu wilayah mengindikasikan beberapa hal penting:

1. Akses pelayanan kesehatan: cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan;
2. Kesadaran masyarakat: cakupan kepesertaan yang tinggi mencerminkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memiliki asuransi kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas;

3. Komitmen pemerintah daerah: cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan warganya pada program JKN;
4. Pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC): tingginya cakupan kepesertaan merupakan langkah positif menuju pencapaian UHC, yaitu kondisi di mana seluruh populasi dapat mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa terhambat oleh kendala finansial.

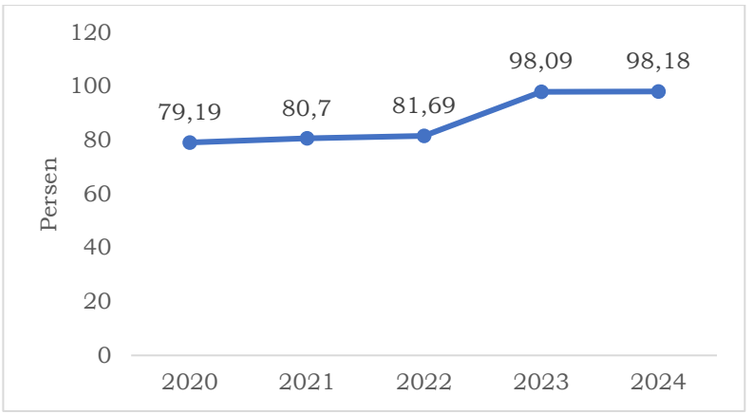

Gambar 2.1.55
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Setiap warga Kabupaten Magelang berhak memperoleh akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang memiliki mutu tinggi dengan biaya terjangkau. Prinsip tersebut diimplementasikan melalui cakupan kepesertaan jaminan kesehatan. Indikator cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Magelang menunjukkan tren positif yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada 2020, cakupan kepesertaan JKN tercatat sebesar 79,19 persen dan terus meningkat setiap tahun hingga mencapai 98,18 persen pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 5,52 persen. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya melalui program JKN, yang memungkinkan lebih banyak penduduk mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai. Meskipun telah mencapai angka yang tinggi pada 2024, pemerintah daerah tetap perlu memastikan bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN tetap terjaga dan merata.

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Pada sub aspek beragama maslahat dan berkebudayaan maju dijelaskan kondisi peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa, yang sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator indeks kerukunan umat beragama, indeks pembangunan kebudayaan, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama dibentuk berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Definisi dasar kerukunan umat beragama berdasarkan peraturan tersebut menekankan hubungan yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran tentang kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam formulasi kebijakan di bidang kebudayaan, serta sebagai acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks ini melibatkan berbagai pemangku kebijakan serta data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional. Dimensi IPK meliputi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender.

3. Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan

Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar muatan lokal (mulok) bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan, merupakan cakupan satuan pendidikan negeri dan swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan kewenangan kabupaten/kota, baik jenjang PAUD, SD, dan SMP, yang mempunyai guru mengajar mulok Bahasa Jawa dengan kualifikasi pendidikan guru S1/D4 pendidikan bahasa daerah/Sastra

Jawa dan/atau guru/tenaga pendidik yang mengajar ekstrakurikuler kesenian dan/atau kegiatan/kurikulum yang mengarusutamakan kebudayaan. Indikator ini dapat dianggap terpenuhi apabila dua dari tiga komponen yang dipersyaratkan dapat dilaksanakan, yakni (1) keberadaan guru yang mengajar mulok bahasa daerah; (2) keberadaan guru yang mengajar seni budaya; dan (3) pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan kebudayaan di sekolah (baik melalui kurikulum maupun ekstrakurikuler).

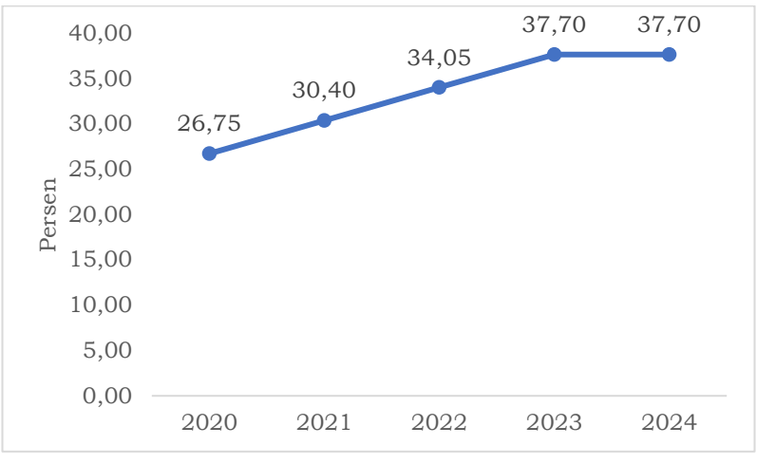

Gambar 2.1.56
Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, capaian indikator persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahas daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan di Kabupaten Magelang menunjukkan peningkatan yang konsisten, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 8,96 persen. Pada tahun 2020, hanya 26,75 persen satuan pendidikan yang memiliki guru mengajar muatan lokal bahasa daerah dan seni budaya. Angka ini terus meningkat setiap tahun, mencapai 37,70 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya usaha yang signifikan untuk mengarusutamakan kebudayaan dan bahasa daerah dalam sistem pendidikan di Kabupaten Magelang.

4. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan

Persentase cagar budaya (CB) dan warisan budaya tak benda (WBTB) yang dilestarikan mencerminkan cakupan CB dan WBTB yang memperoleh intervensi berupa perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan/atau pembinaan. Indikator yang berfungsi sebagai *proxy* dalam membentuk komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada dimensi warisan budaya ini

menggambarkan sejauh mana upaya yang dilakukan untuk melestarikan warisan budaya beserta nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya.

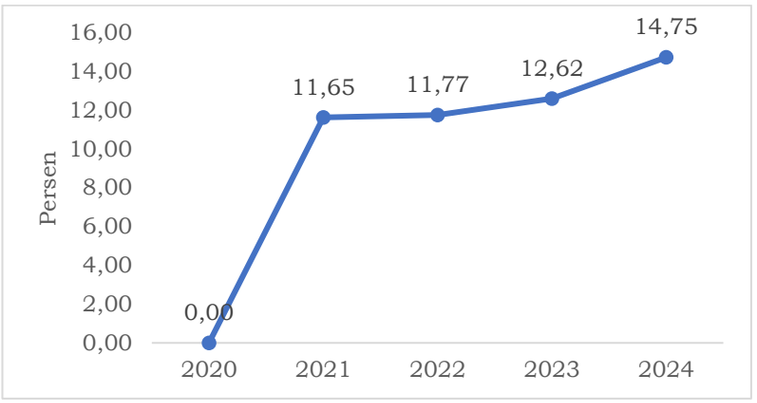

Gambar 2.1.57
Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Dalam lima tahun terakhir, capaian indikator persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan di Kabupaten Magelang menunjukkan peningkatan yang signifikan, ditandai dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 8,18 persen. Pada tahun 2021, tercatat capaian sebesar 11,65 persen yang berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dengan persentase mencapai 11,77 persen pada 2022 dan 12,62 persen pada 2023. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan angka 14,75 persen, tetapi perlu dicatat bahwa angka tersebut masih relatif rendah dan menunjukkan bahwa pelestarian warisan budaya, baik yang berbentuk cagar budaya maupun warisan budaya tak benda, masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan hasil yang lebih signifikan, diperlukan penguatan kebijakan pelestarian budaya yang lebih terencana dan berkelanjutan, dengan dukungan lebih besar dari pemerintah daerah, masyarakat, maupun sektor swasta.

5. Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah

Jumlah pengunjung pada tempat bersejarah merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kepedulian dan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya serta sejarah di Jawa Tengah. Indikator ini juga berfungsi sebagai indikator *proxy* dalam pembentukan komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada dimensi warisan budaya. Perhitungan indikator tersebut didasarkan padajumlah pengunjung yang datang ke lokasi dan/atau bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan budaya, seperti museum, bangunan bersejarah,

mesjid, klenteng, gereja, makam, monumen, candi, situs, kawasan, dan lain-lain.

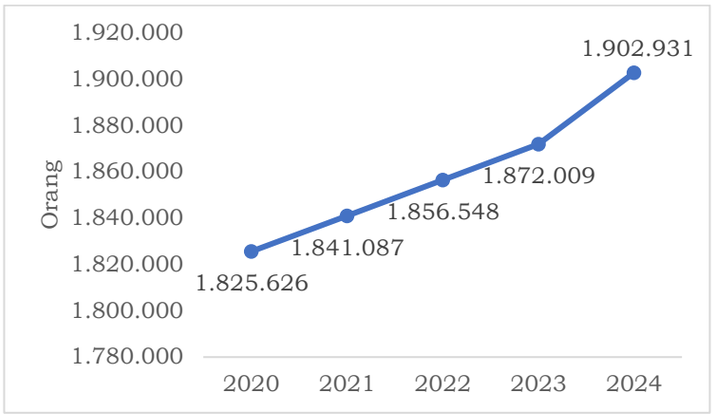

Gambar 2.1.58
Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah di Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, jumlah pengunjung tempat bersejarah di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 1,04 persen. Pada tahun 2020, jumlah pengunjung tercatat sebanyak 1.825.626 orang, yang kemudian meningkat sedikit demi sedikit setiap tahunnya, mencapai 1.902.931 pengunjung pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya ketertarikan yang terus tumbuh terhadap objek wisata sejarah di Kabupaten Magelang.

6. Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam Satu Tahun Terakhir

Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian dalam satu tahun terakhir merupakan indikator yang merefleksikan sejauh mana para pelaku seni di Kabupaten Magelang dapat menjadikan kegiatan seni budaya sebagai salah satu sumber pendapatan atau kesejahteraan. Indikator ini berfungsi sebagai *proxy* dalam membentuk komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada dimensi ekonomi budaya dan dimensi ekspresi budaya. Cakupan indikator ini mencakup kelompok kesenian yang terdaftar dan berpartisipasi aktif setiap tahunnya dalam kegiatan atau acara yang menyajikan pertunjukan atau festival kesenian berskala internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupun desa/kelurahan, selama para pelaku seni tersebut memperoleh penghasilan, pendapatan, atau honorarium.

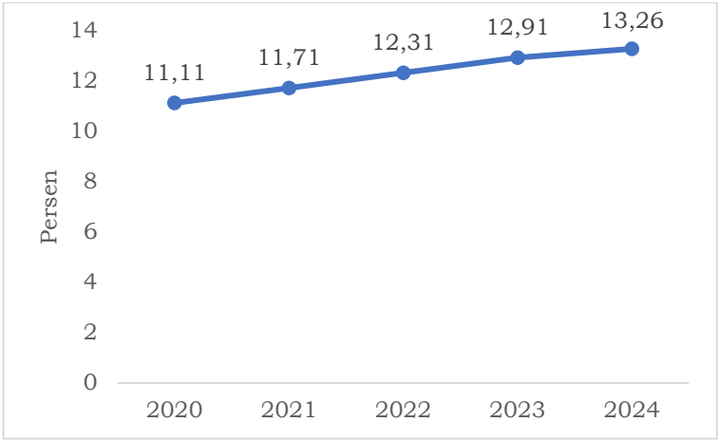

Gambar 2.1.59
Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam Satu Tahun Terakhir di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Dalam lima tahun terakhir, capaian indikator persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian dalam satu tahun terakhir di Kabupaten Magelang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Dimulai dengan angka 11,11 persen pada 2020, persentase ini terus meningkat hingga mencapai 13,26 persen pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perkembangan dalam kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap seni dan budaya lokal, dengan kelompok kesenian yang semakin aktif menyelenggarakan pertunjukan.

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Pada sub aspek keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif dijelaskan kondisi tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat, untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan, termasuk ketimpangan gender dan kondisi pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender, yang sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator indeks perlindungan anak, indeks pembangunan kualitas keluarga, indeks ketimpangan gender, indeks pembangunan gender, indeks pembangunan pemuda, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) mencerminkan kondisi perlindungan anak melalui penyajian lima klaster yang mengacu pada Konvensi Hak Anak dengan mengaplikasikan empat klaster Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan satu klaster pembentuk Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Secara

rinci, klaster pada indeks tersebut dijabarkan menjadi Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan; Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Klaster IV: Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang; serta Klaster V: Perlindungan Khusus. Berdasarkan data dari Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, nilai IPA Kabupaten Magelang pada tahun 2022 sebesar 61,99.

Adapun Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) terbagi menjadi empat klaster, yaitu Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan; Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan; Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; dan Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya. Berdasarkan *website siga.kemenpppa.go.id*, dalam rentang tahun 2021 hingga 2023, capaian IPHA Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 0,40 persen per tahun. Pada tahun 2021, capaian indikator tersebut tercatat sebesar 61,09 dan menunjukkan peningkatan di tahun 2022 menjadi 70,79. Pada tahun 2023, capaian indikator ini tercatat menurun dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 60,60. Sementara itu, data tahun 2024 belum dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selanjutnya, Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) diuraikan menjadi beberapa indikator, yaitu persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet; rasio angka partisipasi sekolah (APS) anak berusia 7-17 tahun (disabilitas/non disabilitas); persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan; serta persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlantar. Berdasarkan *website siga.kemenpppa.go.id*, capaian indikator IPKA Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2021, indikator IPKA Kabupaten Magelang tercatat sebesar 71,94. Capaian tersebut menunjukkan penurunan hingga tahun 2023 dengan rata-rata penurunan sebesar 2,26 persen per tahun, hingga capaiannya tercatat sebesar 68,72.

2. Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, serta mencerminkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Magelang. IBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah berdasarkan status

pembangunan keluarga tangguh, berkembang, atau rentan. Klasifikasi nilai IBangga adalah sebagai berikut:

1. IBangga dengan nilai kurang baik (rentan) apabila nilainya berada di bawah 40;
2. IBangga dengan nilai cukup baik (berkembang) apabila nilainya berkisar antara 40 hingga 70;
3. IBangga dengan nilai baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Tabel 2.1.35
Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga) Kabupaten Magelang Tahun 2021-2024

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Ketenteraman	58,84	61,55	60,00	62,90
2.	Indeks Kemandirian	54,68	54,34	54,48	55,39
3.	Indeks Kebahagiaan	55,29	58,83	69,99	73,20
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		**56,27**	**58,24**	**61,49**	**63,83**

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2025; RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045

Selama periode 2021 hingga 2024, capaian IBangga Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2024, Kabupaten Magelang mencapai nilai 63,38 sehingga termasuk dalam klasifikasi IBangga berkembang. Capaian tersebut menunjukkan komitmen dan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga secara signifikan.

3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks yang mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia, serupa dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan memperhatikan ketimpangan gender atau ketidakadilan dalam pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Perhitungan IPG membutuhkan data IPM yang terdiri atas tiga unsur, yaitu pengetahuan, umur panjang dan hidup sehat, serta standar hidup layak. Dengan kata lain, indikator yang digunakan untuk menghitung IPG mencakup angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, dan perkiraan pendapatan. Semakin mendekati nilai 100, maka ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki akan semakin kecil.

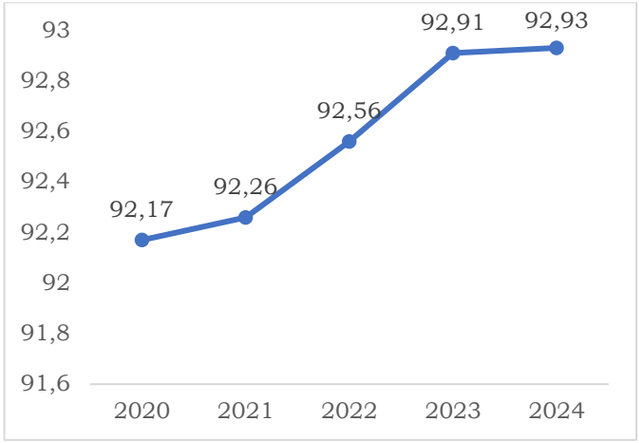

Gambar 2.1.60
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Hasil *Long Form* SP2020
Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2024

Capaian IPG yang tercatat dalam lima tahun terakhir merupakan IPG hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020, di mana dalam rentang waktu tersebut besaran indikator ini menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,21 persen per tahun. Pada tahun 2020, capaian IPG di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 92,17 dan bertumbuh menjadi 92,93 di tahun 2024. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Magelang telah berhasil mencapai tingkat kesetaraan gender yang signifikan, meskipun masih perlu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini di masa mendatang.

4. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran yang mencerminkan ketimpangan gender dan menunjukkan capaian pembangunan manusia berdasarkan perbandingan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan ekonomi. Berikut ini adalahenam variabel yang membentuk IKG:

1. Proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan pada kasus kelahiran dua tahun terakhir;
2. Proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama pada usia kurang dari 20 tahun;
3. Persentase penduduk yang berusia 25 tahun ke atas yang berijazah terakhir minimal SMA/sederajat menurut jenis kelamin;
4. Persentase anggota parlemen menurut jenis kelamin;
5. Tingkat partispasi angkatan kerja menurut jenis kelamin.

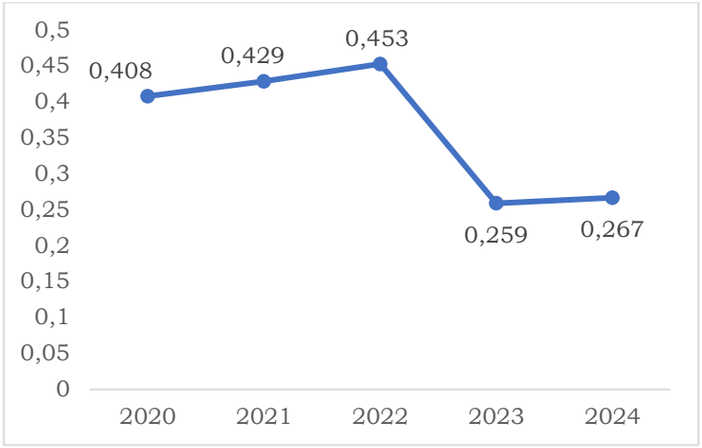

Gambar 2.1.61
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Tahun 2024

Indeks ketimpangan gender memiliki rentang nilai antara nol hingga satu, di mana semakin rendah nilainya, semakin kecil pula tingkat ketimpangan gender sehingga mencerminkan tingkat kesetaraan gender yang semakin tinggi. Dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024, capaian IKG Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020, capaian IKG Kabupaten Magelang tercatat sebesar 0,408 dan menunjukkan peningkatan sampai dengan tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,37 persen per tahun, hingga besarannya menjadi 0,453. Capaian tersebut kemudian menunjukkan penurunan sampai dengan tahun 2024, yang ditunjukkan dengan rata-rata penurunan mencapai 23,23 persen per tahun, hingga besarannya menjadi 0,267. Variasi yang cukup mencolok ini mencerminkan dinamika yang kompleks dalam upaya mengurangi kesenjangan gender. Perubahan nilai IKG yang tidak stabil dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengindikasikan perlunya strategi yang lebih konsisten dan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Magelang.

5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan aktif perempuan dalam kehidupan politik dan ekonomi. Indeks pemberdayaan gender menekankan pada partisipasi perempuan dengan mengukur ketimpangan gender dalam berbagai aspek, seperti partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, penguasaan sumber daya ekonomi, serta partisipasi berpolitik. Indikator yang digunakan untuk mengukur indeks pemberdayaan gender meliputi proporsi representasi di lembaga parlemen, proporsi kedudukan sebagai manajer, staf

administrasi, teknisi, dan pekerja profesional, serta upah buruh sektor non pertanian.

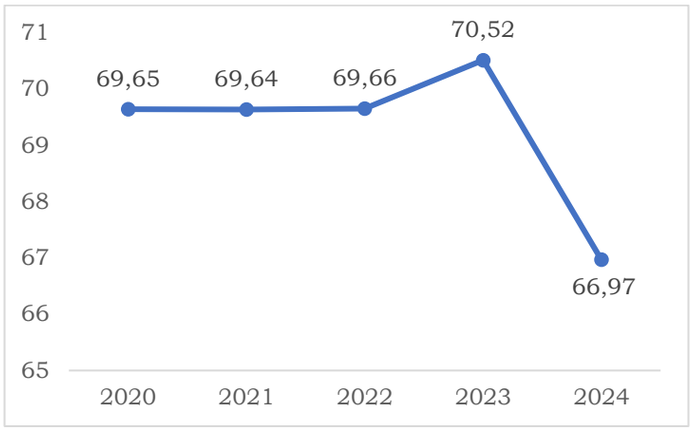

Gambar 2.1.62
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024
Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2024

Dalam lima tahun terakhir, capaian IDG Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 0,98 persen per tahun. Pada tahun 2020, capaian IDG kabupaten ini tercatat sebesar 69,65 dan menunjukkan kecenderungan meningkat hingga tahun 2023 dengan capaian sebesar 70,52, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,41 persen per tahun. Capaian tersebut kemudian menunjukkan penurunan sebesar 5,03 persen di tahun 2024 hingga besarannya tercatat sebesar 66,97. Pemerintah Kabupaten Magelang terus berupaya untuk meningkatkan pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Magelang melalui pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun demikian, laju pertumbuhan capaian ini masih tergolong lambat sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih strategis untuk memperkuat pemberdayaan perempuan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Peningkatan yang tidak terlalu signifikan ini mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam mencapai kesetaraan gender secara menyeluruh.

6. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan tolok ukur penting dalam perencanaan pembangunan yang menggambarkan kemajuan pembangunan pemuda di suatu wilayah. Indeks ini mencakup berbagai dimensi, antara lain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan

diskriminasi. Melalui indeks pembangunan pemuda, dapat diukur tingkat kesiapan pemuda dalam menghadapi tantangan baik secara global maupun lokal, serta memastikan bahwa para pemuda memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

7. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) sebagai indikator pengukuran keolahragaan merupakan salah satu amanah dalam Permenpora Nomor 1 tahun 2022 tentang pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga (IPO). Isi Permenpora tersebut berupa pedoman yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam mengorganisasikan, mengumpulkan dan memvalidasi data sampai kepada proses evaluasi, sehingga terukur IPO yang dapat dipertanggungjawabkan dan dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2024, Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengukuran IPO di kabupaten/kota di Jawa Tengah, dimana IPO Kabupaten Magelang Tahun 2024 adalah sebesar 0,363

2.1.3.Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Pada sub aspek daya saing sumber daya manusia dijelaskan kondisi sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah. Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) tidak hanya mencerminkan kapasitas individu dalam mengakses dan memanfaatkan peluang ekonomi, tetapi juga berperan sebagai faktor penentu dalam peningkatan daya saing suatu daerah secara keseluruhan. Sumber daya manusia yang berkualitas berpotensi untuk mendorong peningkatan produktivitas, inovasi, dan efisiensi di berbagai sektor sehingga dapat memperkuat posisi daerah dalam persaingan ekonomi yang semakin kompetitif. Selain itu, investasi dalam peningkatan kapasitas SDM melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan vokasi, dan pengembangan keterampilan kerja merupakan strategi penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berdaya saing serta adaptif terhadap perubahan global. Oleh karena itu, penguatan SDM perlu diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan daerah agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada sub aspek ini sekurang-

kurangnya dilengkapi dengan indikator angka ketergantungan, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

1. Angka Ketergantungan

Indikator angka ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting, yang menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk dalam kelompok usia non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk dalam kelompok usia produktif (15-64 tahun). Indikator ini memiliki peranan yang krusial, karena indikator ini digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah.

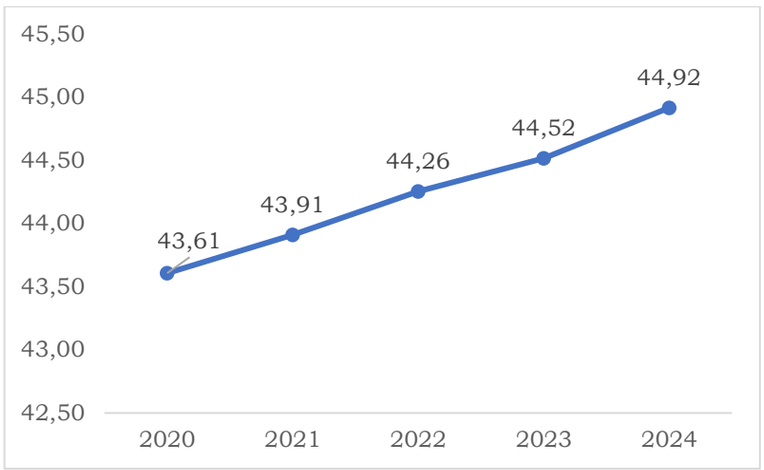

Gambar 2.1.63
Angka Ketergantungan Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2021-2025, Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Diolah 2025

Dalam lima tahun terakhir, capaian angka ketergantungan di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan yang meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,74 persen per tahun. Pada tahun 2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 44,81 persen dan meningkat menjadi 44,92 persen. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa dalam lima tahun terakhir, dalam 100 orang yang berusia produktif di Kabupaten Magelang mempunyai tanggungan sebanyak 44 hingga 45 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Pada subaspek ini dijelaskan mengenai kondisi tentang Iptek dan inovasi yang menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang, yang sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator rasio PDRB industri pengolahan, rasio

PDRB akomodasi makan dan minum, proporsi PDRB ekonomi kreatif, rasio kewirausahaan, tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks inovasi daerah, serta indikator lainnya sesuai konteks daerah.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting dalam analisis perkembangan wilayah, karena indikator ini digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Berdasarkan nominalnya, PDRB Kabupaten Magelang baik ADHB maupun ADHK menunjukkan kecenderungan meningkat dalam lima tahun terakhir. PDRB ADHB tercatat sebesar 32.462,03 miliar rupiah di tahun 2020 dan bertumbuh menjadi 43.736,00 miliar rupiah di tahun 2024, atau dengan rata–rata pertumbuhan sebesar 6,18 persen per tahun. Sementara itu, PDRB ADHK tercatat sebesar 22.865,15 miliar rupiah di tahun 2020 dan menunjukkan rata–rata pertumbuhan sebesar 3,48 persen hingga besarannya menjadi 27.538,21 miliar rupiah di tahun 2024.

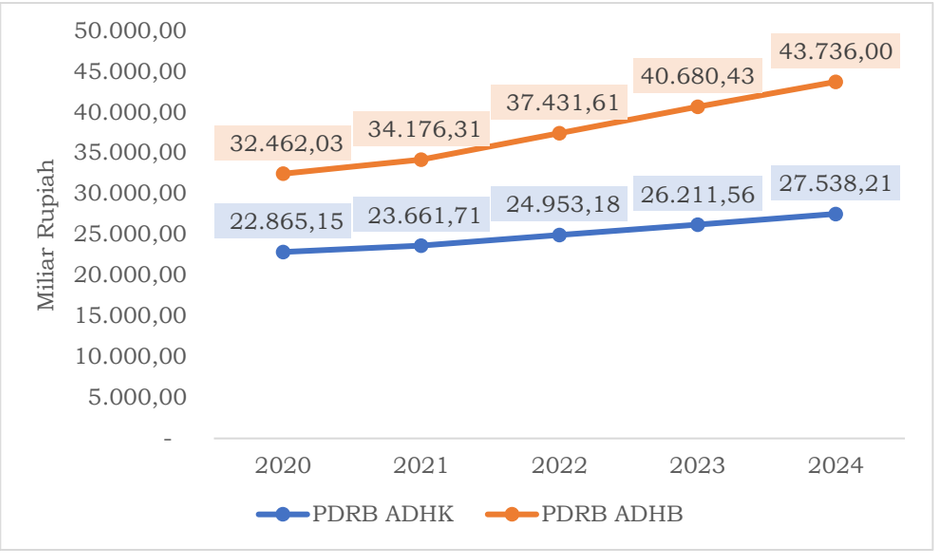

Gambar 2.1.64
PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Diolah 2025

Selanjutnya, kontribusi PDRB menurut lapangan usaha merupakan indikator yang menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah, di mana setiap kategori tersebut memiliki peran besar yang menunjukkan basis perekonomian di suatu wilayah. Dalam lima tahun terakhir, baik dilihat dari PDRB ADHB maupun ADHK, terdapat tiga sektor dengan kontribusi terbesar di kabupaten ini. Secara berturut–turut, sektor tertinggi berdasarkan kontribusinya terhadap struktur

perekonomian di Kabupaten Magelang adalah sektor industri pengolahan; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

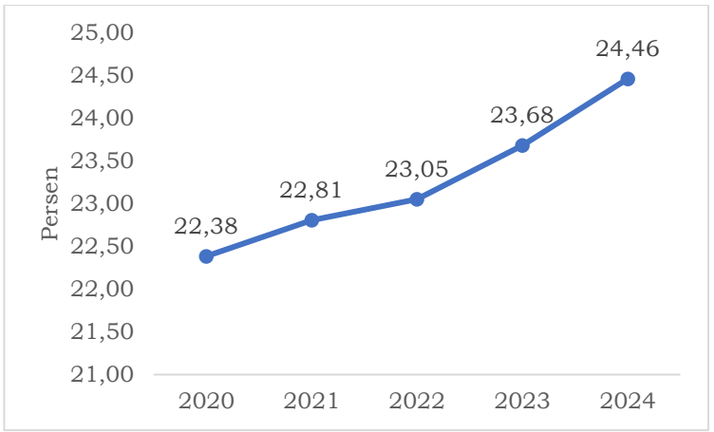

Gambar 2.1.65
Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Diolah 2025

Rasio PDRB industri pengolahan menggambarkan posisi sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian wilayah. Dalam lima tahun terakhir, rasio PDRB industri pengolahan menunjukkan kecenderungan meningkat yang ditandai dengan rata–rata pertumbuhan 8,49 persen per tahun. Sebagai kontributor terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Magelang, sektor ini tercatat memiliki kontribusi sebesar 22,38 persen di tahun 2020 dan bertumbuh menjadi 24,46 persen di tahun 2024.

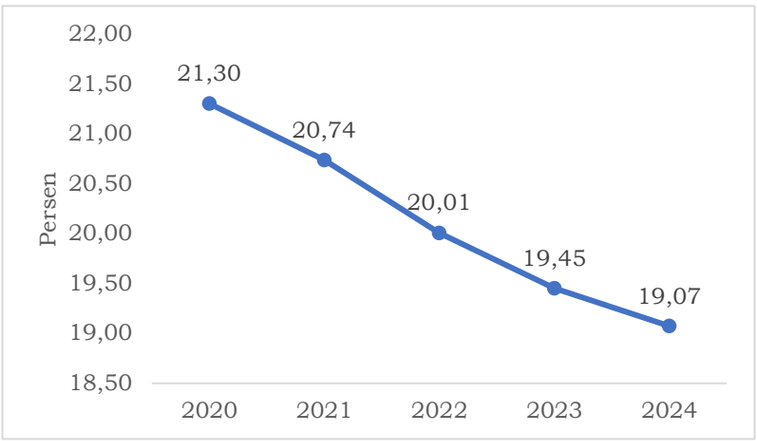

Gambar 2.1.66
Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Diolah 2025

Selanjutnya, indikator **rasio PDRB pertanian, kehutanan, dan perikanan** menggambarkan proporsi sektor pertanian dalam struktur perekonomian wilayah. Meskipun menunjukkan kecenderungan menurun dalam lima tahun terakhir, namun rasio sektor ini menempati posisi kedua terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Magelang, yakni sebesar

21,30 persen di tahun 2020 menjadi 19,07 persen di tahun 2024 dengan rata–rata pertumbuhan sebesar 4,35 persen per tahun. Relatif tingginya kontribusi sektor pertanian riil di Kabupaten Magelang mengindikasikan bahwa sektor pertanian masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di kabupaten ini. Namun, dengan kecenderungannya yang semakin menurun, pemerintah dan para pengambil kebijakan perlu mengembangkan diversifikasi ekonomi lainnya untuk menguatkan struktur perekonomian di Kabupaten Magelang di masa mendatang.

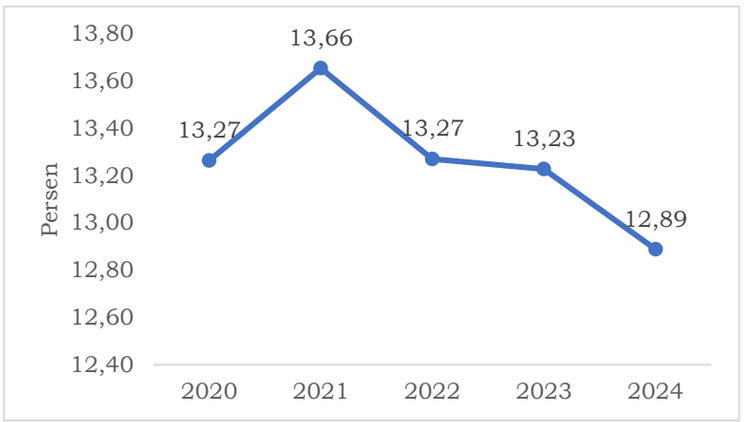

Gambar 2.1.67
Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Diolah 2025

Kontributor ketiga terbesar dalam struktur ekonomi Kabupaten Magelang adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor. **Rasio PDRB perdagangan** ini tercatat memiliki kontribusi sebesar 13,27 persen di tahun 2020. Namun, pada tahun-tahun berikutnya rasio ini menunjukkan penurunan hingga besarannya menjadi 12,89 persen di tahun 2024.

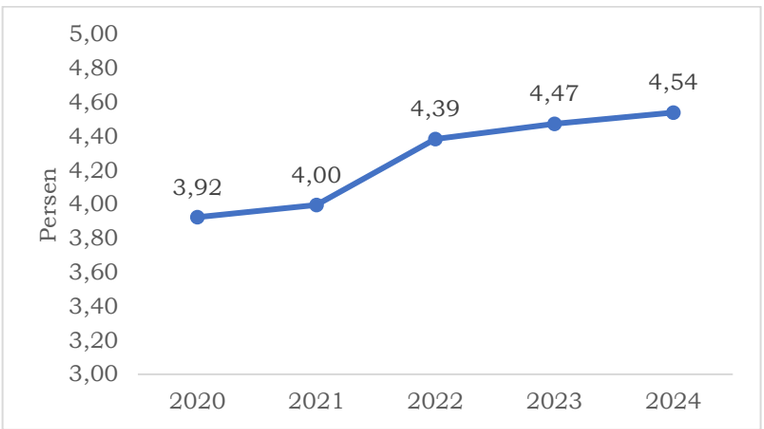

Gambar 2.1.68
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Diolah 2025

Selanjutnya, Kabupaten Magelang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, salah satunya adalah Kawasan Strategis Nasional Candi Borobudur yang juga ditetapkan sebagai destinasi wisata super prioritas. Meskipun demikian, besaran **rasio PRDB penyediaan akomodasi dan makan minum** yang merepresentasikan sektor pariwisata di kabupaten ini masih relatif kecil, di mana pada tahun 2023 kontribusi sektor ini berada di urutan kedelapan. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini tercatat sebesar 3,92 persen dan bertumbuh menjadi 4,54 persen di tahun 2024, atau dengan rata–rata pertumbuhan sebesar 7,95 persen per tahun. Ke depannya, sektor ini dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah karena adanya *multiplier effect* yang dapat ditumbuhkan melalui sektor ini, mulai dari skala mikro hingga skala besar.

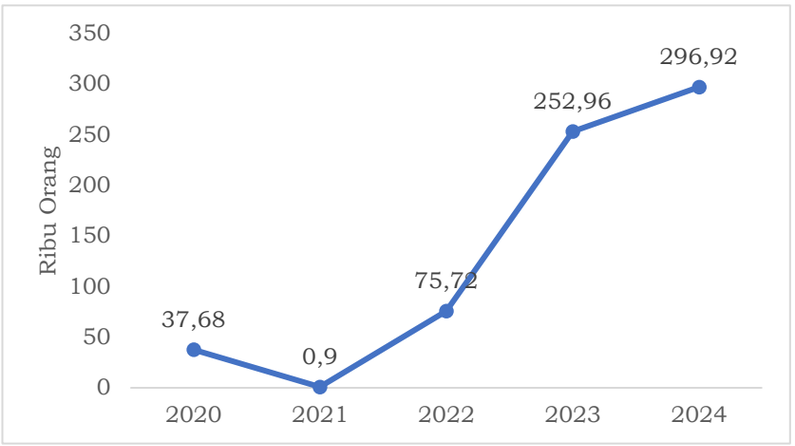

Gambar 2.1.69
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2025

Dipilihnya Candi Borobudur sebagai destinasi wisata super prioritas salah satunya karena Borobudur merupakan objek wisata tunggal tanah air yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan domestik hingga mancanegara. Dalam lima tahun terakhir, jumlah wisatawan terutama mancanegara menunjukkan jumlah yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, jumlah wisatawan tercatat hanya sebesar 37,68 ribu orang, yang kemudian mengalami penurunan drastis menjadi 0,9 ribu pada tahun 2021. Penurunan jumlah wisatawan pada tahun 2020 hingga 2021 tersebut merupakan dampak dari pemberlakukan PPKM pada masa pandemi Covid–19 di Indonesia. Adanya PPKM membuat adanya batasan dalam melakukan kunjungan wisata di Kabupaten Magelang. Pada tahun 2022, seiring dengan terus membaiknya situasi pandemi di dunia, berbanding lurus dengan peningkatan jumlah wisatawan khususnya wisatawan mancanegara, dan

kondisi tersebut berlangsung hingga tahun 2024 di mana jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kabupaten ini sebanyak 296,92 ribu orang.

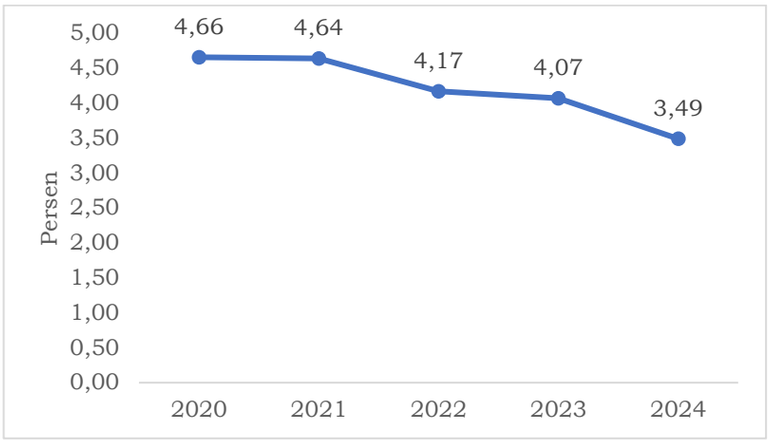

Gambar 2.1.70
Rasio PDRB Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024
Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Diolah 2025

Kabupaten Magelang memiliki potensi pertambangan dan penggalian yang cukup besar, di mana salah satu bahan tambang yang diusahakan secara besar–besaran adalah pasir dan batu (sirtu). Sirtu merupakan produk dari letusan Gunung Merapi yang mengendap di sungai–sungai yang berhulu di gunung tersebut. Meskipun demikan, rasio PDRB pertambangan dan penggalian di kabupaten ini menunjukkan kecenderungan menurun dalam lima tahun terakhir, di mana pada tahun 2020 tercatat sebesar 4,66 persen dan menurun menjadi 3,49 persen, atau dengan rata–rata penurunan sebesar 1,17 persen per tahun.

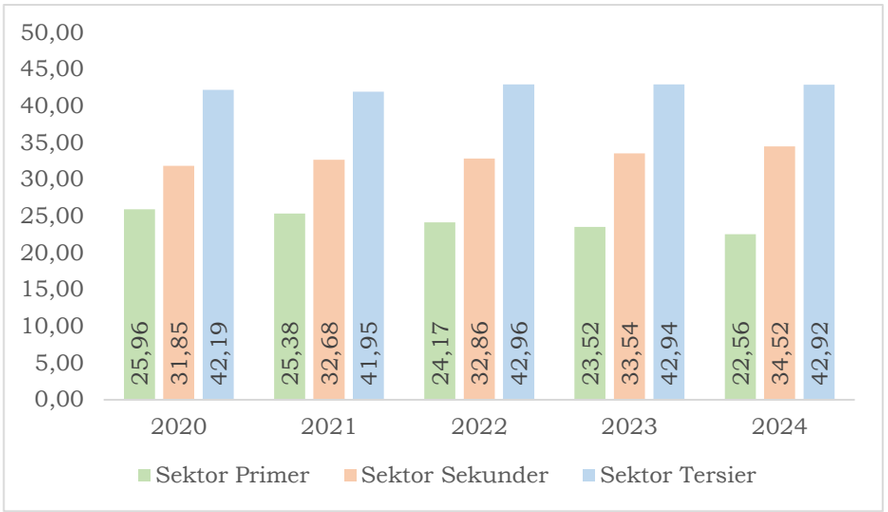

Gambar 2.1.71
Persentase Sumbangan Kelompok Sektor di Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024
Sumber: Hasil Analisis, 2025

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, struktur ekonomi di Kabupaten Magelang tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sektor tersier masih mendominasi struktur perekonomian di Kabupaten Magelang, dengan rata–rata kontribusi sebesar 42,59 persen. Sementara itu sektor sekunder memiliki rata–rata kontribusi sebesar 33,09 persen, dan sektor primer tercatat memiliki rata–rata kontribusi sebesar 24,32 persen. Apabila dilihat dari rata–rata pertumbuhannya, sektor primer menunjukkan kecenderungan menurun dengan rata–rata penurunan sebesar 3,44 persen per tahun. Sementara itu, sektor sekunder dan tersier menunjukkan kecenderungan yang meningkat, dengan rata–rata pertumbuhan sebesar 2,03 persen per tahun dan 0,43 persen per tahun.

Tabel 2.1.36
Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

Lapangan Usaha	Nilai dan Kontribusi PDRB Kabupaten Magelang ADHK									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.499,15	19,68	4.543,25	19,20	4.590,68	18,40	4.635,99	17,69	4.699,33	17,06
B. Pertambangan dan Penggalian	894,94	3,91	933,4	3,94	891,12	3,57	929,86	3,55	854,84	3,10
C. Industri Pengolahan	4.952,26	21,66	5.160,44	21,81	5.443,19	21,81	5.813,13	22,18	6.193,52	22,49
D. Pengadaan Listrik dan Gas	14,25	0,06	14,91	0,06	15,14	0,06	15,51427	0,06	16,89	0,06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22,99	0,10	24,03	0,10	24,45	0,10	25,24322	0,10	26,69	0,10
F. Konstruksi	2.169,86	9,49	2.316,11	9,79	2.361,17	9,46	2.502,20	9,55	2.735,53	9,93
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.201,37	14,00	3.423,88	14,47	3.509,69	14,07	3.671,10	14,01	3.773,48	13,70
H. Transportasi dan Pergudangan	698,51	3,05	703,17	2,97	1.077,68	4,32	1.153,51	4,40	1.317,95	4,79
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	936,02	4,09	988,28	4,18	1.163,01	4,66	1.273,24	4,86	1.360,11	4,94
J. Informasi dan Komunikasi	1.473,38	6,44	1.530,56	6,47	1.563,53	6,27	1.663,22	6,35	1.783,82	6,48
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	628,13	2,75	637,19	2,69	654,83	2,62	680,289	2,60	696,36	2,53
L. Real Estat	502,64	2,20	513,75	2,17	541,11	2,17	566,5595	2,16	598,54	2,17
M,N. Jasa Perusahaan	61,74	0,27	63,56	0,27	67,13	0,27	70,73675	0,27	78,45	0,28
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	757,22	3,31	748,27	3,16	772,68	3,1	817,24	3,12	883,09	3,21
P. Jasa Pendidikan	1.288,44	5,63	1.290,14	5,45	1.344,57	5,39	1.404,30	5,36	1.456,94	5,29
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	219,52	0,96	219,97	0,93	227,03	0,91	236,8615	0,90	248,06	0,90
R,S,T,U. Jasa lainnya	544,73	2,38	550,79	2,33	706,16	2,83	752,5654	2,87	814,6	2,96
PDRB Kabupaten Magelang ADHB	22.865,15	100,00	23.661,71	100,00	24.953,18	100,00	26.211,56	100,00	27.538,21	100,00

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Tahun 2025

Tabel 2.1.37
Nilai dan Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun Dasar 2010 Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

Lapangan Usaha	Nilai dan Kontribusi PDRB Kabupaten Magelang ADHB									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen	Miliar Rp	Persen
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.914,81	21,3	7.086,93	20,74	7.488,55	20,01	7.913,20	19,45	8.341,93	19,07
B. Pertambangan dan Penggalian	1.511,36	4,66	1.585,67	4,64	1.560,30	4,17	1.656,05	4,07	1.525,89	3,49
C. Industri Pengolahan	7.266,33	22,38	7.794,55	22,81	8.628,27	23,05	9.632,97	23,68	10.697,97	24,46
D. Pengadaan Listrik dan Gas	16,6	0,05	17,26	0,05	17,61	0,05	18,35061	0,05	20,03	0,05
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27,93	0,09	29,48	0,09	30,39	0,08	31,69753	0,08	34,48	0,08
F. Konstruksi	3.027,90	9,33	3.326,13	9,73	3.625,48	9,69	3.961,49	9,74	4.344,61	9,93
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.306,14	13,27	4.667,15	13,66	4.967,87	13,27	5.381,88	13,23	5.637,40	12,89
H. Transportasi dan Pergudangan	853,38	2,63	888,68	2,60	1.442,12	3,85	1.688,14	4,15	1.964,27	4,49
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.274,04	3,92	1.366,00	4,00	1.641,44	4,39	1.820,34	4,47	1.985,79	4,54
J. Informasi dan Komunikasi	1.425,19	4,39	1.480,74	4,33	1.516,67	4,05	1.626,27	4,00	1.767,27	4,04
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	913,54	2,81	959,56	2,81	1.060,91	2,83	1144,078	2,81	1186,7	2,71
L. Real Estat	608,64	1,87	627,97	1,84	673,44	1,80	711,0503	1,75	754,7	1,73
M,N. Jasa Perusahaan	87,26	0,27	90,89	0,27	100,07	0,27	109,4559	0,27	123,68	0,28
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.100,03	3,39	1.076,93	3,15	1.146,93	3,06	1.237,90	3,04	1.360,00	3,11
P. Jasa Pendidikan	2.118,82	6,53	2.150,59	6,29	2.249,48	6,01	2.353,42	5,79	2.466,67	5,64
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	307,86	0,95	311,99	0,91	327,37	0,87	352,9696	0,87	377,12	0,86
R,S,T,U. Jasa lainnya	702,2	2,16	715,8	2,09	954,73	2,55	1041,127	2,56	1147,48	2,62
PDRB Kabupaten Magelang ADHB	32.462,03	100,00	34.176,31	100,00	37.431,61	100,00	40.680,39	100,00	43.736,00	100,00

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Tahun 2025

Tabel 2.1.38
***Location Quotient* (LQ) Kabupaten Magelang**
Tahun 2020–2024

Lapangan Usaha	LQ ADHK Kabupaten Magelang				
	2020	2021	2022	2023	2024
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,51	1,51	1,48	1,48	1,48
B. Pertambangan dan Penggalian	1,77	1,76	1,79	1,84	1,65
C.Industri Pengolahan	0,64	0,65	0,66	0,68	0,70
D.Pengadaan Listrik dan Gas	0,54	0,54	0,52	0,50	0,51
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,38	1,36	1,37	1,36	1,40
F.Konstruksi	0,92	0,91	0,91	0,91	0,92
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,97	0,98	0,96	0,96	0,94
H.Transportasi dan Pergudangan	1,25	1,22	1,08	1,07	1,15
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,28	1,28	1,28	1,26	1,22
J.Informasi dan Komunikasi	1,06	1,04	1,03	0,99	0,97
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	0,98	0,98	1,00	1,01	1,01
L.Real Estat	1,13	1,13	1,13	1,11	1,10
M,N.Jasa Perusahaan	0,70	0,70	0,70	0,68	0,70
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,29	1,29	1,31	1,33	1,33
P.Jasa Pendidikan	1,40	1,40	1,43	1,41	1,34
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,98	0,98	0,98	0,97	0,95
R,S,T,U.Jasa lainnya	1,44	1,44	1,65	1,64	1,66

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2025

Selanjutnya, berdasarkan perhitungan *Location Quotient* (LQ), dalam lima tahun terakhir terdapat sepuluh sektor yang menjadi sektor basis di Kabupaten Magelang, di mana nilai LQ tercatat lebih dari satu. Sektor basis merupakan sektor yang memiliki potensi besar dalam menentukan pembangunan menyeluruh di daerah. Selain itu, terdapat satu sektor yang pada tahun 2023 menunjukkan penurunan dari sektor basis menjadi non basis, yakni sektor informasi dan komunikasi.

2. Indeks Ekonomi Inklusif

Indeks ekonomi inklusif merupakan pengukuran tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik dari level nasional maupun level daerah. Indeks ekonomi inklusif dihitung melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan, yang merupakan pilar utama tingkat inklusivitas. Pilar pertama, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi berfokus pada penciptaan landasan fundamental baik dari perekonomian, lapangan pekerjaan, dan infrastruktur ekonomi. Pilar kedua, berfokus pada pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Terakhir, pilar ketiga yaitu berfokus pada kapabilitas manusia, infrastruktur pasar, dan keuangan inklusif.

Dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2021, berdasarkan *website inklusif.bappenas.go.id* tercatat bahwa ketiga pilar pembentuk indeks ekonomi inklusif di Kabupaten Magelang menunjukkan capaian dengan besaran yang

fluktuatif. Pada pilar 1, yang mengukur pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, terjadi peningkatan dari 4,74 pada tahun 2020 menjadi 4,93 pada tahun 2021. Hal ini menandakan adanya perbaikan dalam stabilitas ekonomi, meskipun angka tersebut masih tergolong rendah. Pilar 2, yang berkaitan dengan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, menunjukkan nilai yang relatif stagnan, yaitu 6,12 pada tahun 2020 dan sedikit meningkat menjadi 6,15 pada tahun 2021. Ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat upaya dalam pengentasan kemiskinan, hasil yang diperoleh belum optimal dalam mengurangi kesenjangan pendapatan. Sementara itu, pilar 3 yang berfokus pada perluasan akses dan kesempatan menunjukkan peningkatan yang lebih jelas, dengan nilai 5,94 pada tahun 2020 yang naik menjadi 6,12 pada tahun 2021.

3. Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan antara jumlah individu yang menjalankan usaha dengan mempekerjakan buruh tetap di masing-masing daerah dan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Usaha yang melibatkan buruh tetap atau buruh yang dibayar merujuk pada kegiatan usaha yang dilakukan dengan risiko pribadi, di mana pengusaha mempekerjakan setidaknya satu buruh tetap yang dibayar. Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang berada dalam kelompok usia kerja (15 tahun ke atas) yang sedang bekerja, tidak bekerja sementara, atau yang menganggur. Semakin banyak pengusaha yang menjalankan usaha dengan mempekerjakan buruh tetap, semakin besar potensi penyerapan tenaga kerja tetap, yang mencerminkan adanya dorongan untuk pertumbuhan dan perkembangan.

4. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing–masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan

semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut. Pada tahun 2020, nilai rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB tercatat sebesar 0,019 (Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang Tahun 2025).

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana potensi tenaga kerja dapat terserap dalam perekonomian suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan persentase penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik yang telah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.

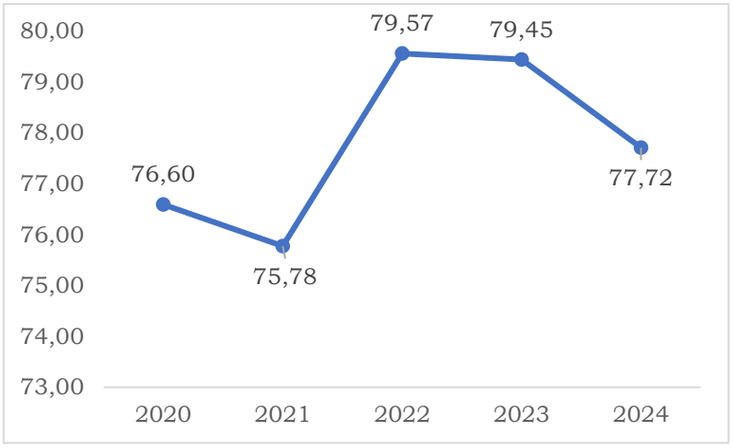

Gambar 2.1.72
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024
Sumber: Tabel Dinamis BPS Kabupaten Magelang

Dalam lima tahun terakhir, capaian indikator tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,36 persen per tahun. Pada tahun 2020, TPAK kabupaten ini tercatat sebesar 76,60 persen, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 75,78 persen pada tahun 2021. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2022 hingga besarannya menjadi 79,57 persen dan bertahan hingga tahun 2023. pada tahun 2024, capaian indikator ini menunjukkan penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 1,17 persen per tahun, hingga capaiannya menjadi 77,72 persen. Peningkatan ini mencerminkan proses pemulihan ekonomi pascapandemi serta efektivitas kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Meskipun demikian, fluktuasi yang terjadi menandakan perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, pelatihan vokasi, serta menciptakan lapangan kerja

berkualitas, agar partisipasi angkatan kerja dapat didorong secara lebih konsisten.

Adapun **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan** merupakan persentase angkatan kerja perempuan terhadap total jumlah penduduk yang berada dalam usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan mencakup individu perempuan dalam kategori usia kerja yang sedang bekerja, memiliki pekerjaan tetapi sementara waktu tidak bekerja, serta yang sedang dalam status pengganggguran. Di sisi lain, penduduk usia kerja perempuan didefinisikan sebagai perempuan berusia 15 tahun ke atas. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang lebih tinggi mencerminkan peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan dalam perekonomian, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan produksi barang dan jasa serta daya saing daerah.

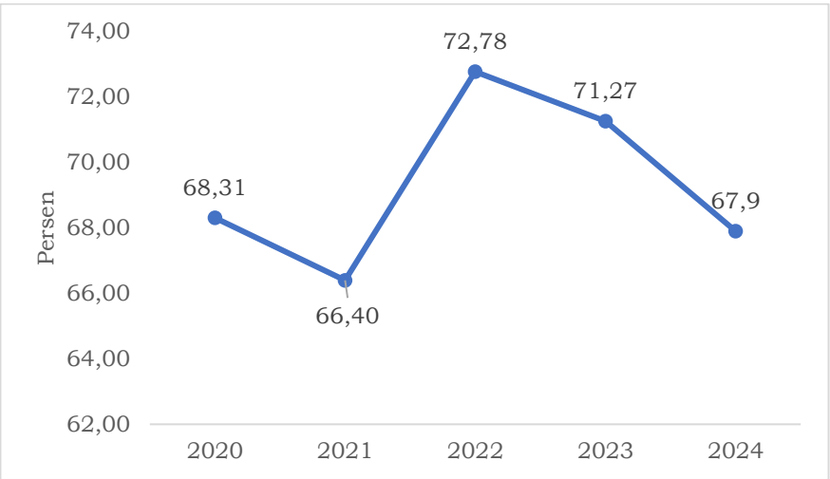

Gambar 2.1.73
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024
Sumber: Tabel Dinamis BPS Kabupaten Magelang Tahun 2025

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, TPAK perempuan mencapai 68,31 persen, tetapi mengalami penurunan menjadi 66,40 persen pada tahun 2021. Meskipun demikian, indikator ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2022, dengan mencapai 72,78 persen, yang mencerminkan peningkatan akses dan keterlibatan perempuan dalam pasar tenaga kerja. Namun, tren positif tersebut tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, di mana TPAK perempuan kembali mengalami penurunan menjadi 71,27 persen pada tahun 2023 dan selanjutnya turun menjadi 67,90 persen pada tahun 2024. Capaian tersebut mengindikasikan adanya fluktuasi dalam tingkat partisipasi angkatan kerja yang perlu dicermati lebih lanjut untuk memahami faktor penyebab dan mencari solusi yang tepat

untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di masa depan.

6. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan suatu indikator yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja secara keseluruhan. Indikator ini mencerminkan kapasitas perekonomian suatu daerah dalam menyerap tenaga kerja serta efektivitas dari kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan. Rasio yang tinggi mengindikasikan adanya peluang kerja yang lebih luas, sedangkan rasio yang rendah dapat menandakan adanya kendala dalam pasar tenaga kerja, seperti ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan industri atau adanya keterbatasan investasi pada sektor produktif. Dalam konteks daya saing daerah, rasio penduduk yang bekerja memiliki peranan penting dalam mencerminkan stabilitas ekonomi serta kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

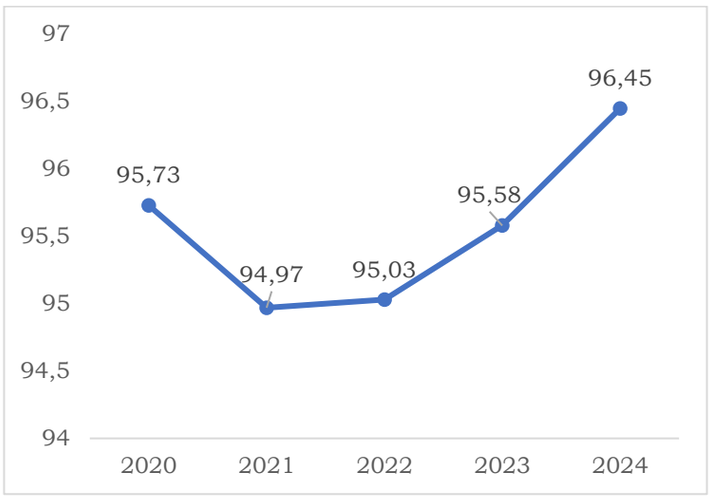

Gambar 2.1.74
Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024
Sumber: Tabel Dinamis BPS Kabupaten Magelang

Pada tahun 2020, rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Magelang tercatat mencapai 95,73 persen. Angka tersebut mengalami penurunan hingga menjadi 94,97 persen pada tahun 2021. Pada tahun berikutnya, angka tersebut kembali meningkat hingga menjadi 96,45 persen di tahun 2024, atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,19 persen per tahun. Meskipun sempat mengalami penurunan, rasio penduduk yang bekerja menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir, memperlihatkan upaya pemulihan di sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang.

7. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan kualifikasi pendidikan tinggi mencerminkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Kualifikasi ini meliputi lulusan dari jenjang Diploma I hingga Diploma IV, Sarjana (S1), Magister (S2), Magister Terapan (S2 Terapan), serta Doktor (S3). Semakin tinggi proporsi penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi, semakin besar pula potensi daerah dalam meningkatkan daya saing, baik di tingkat nasional maupun global.

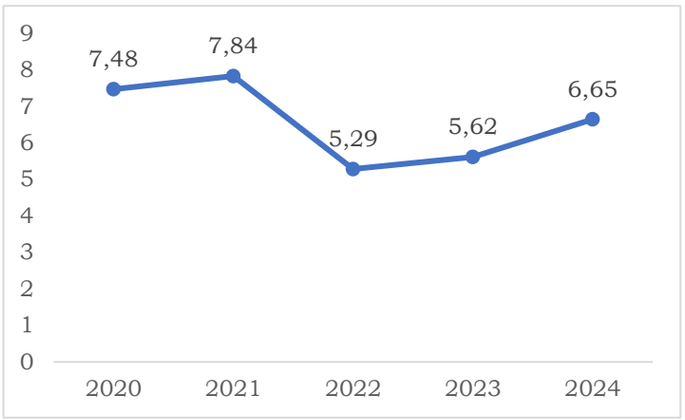

Gambar 2.1.75
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Magelang, Diolah

Dalam lima tahun terakhir, capaian proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 2,89 persen per tahun. Pada tahun 2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 7,48 persen, dan berfluktuasi hingga tahun 2024 hingga besarannya menjadi 6,65. Hal tersebut mengindikasikan bahwa akses, minat, atau kemampuan penduduk Kabupaten Magelang dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi belum terlaksana secara optimal. Penurunan ini juga dapat mencerminkan adanya hambatan struktural maupun sosial-ekonomi, seperti keterbatasan ekonomi keluarga, atau rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Jika tren ini tidak segera ditanggulangi, maka akan berdampak pada terbatasnya ketersediaan tenaga kerja terampil dan profesional di masa mendatang.

8. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah. Pencapaian IID diharapkan dapat mendorong terjadinya kompetisi yang konstruktif antar pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan pula akan terjadi perbaikan dalam pelayanan publik dan percepatan pembangunan, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

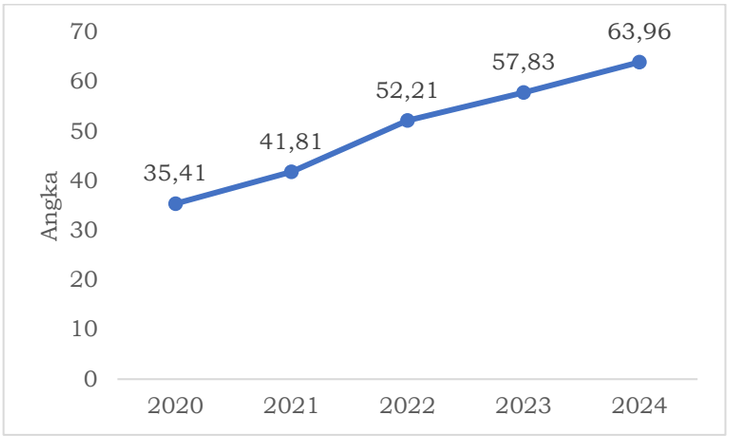

Gambar 2.1.76
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024
Sumber: Indeks Inovasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, capaian IID di Kabupaten Magelang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dari angka 35,41 pada tahun 2020 menjadi 63,96 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan Kabupaten Magelang dalam mengimplementasikan kebijakan dan program inovatif yang mendukung kemajuan pemerintah daerah serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, pencapaian ini juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan di daerah.

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Pada sub aspek penerapan ekonomi hijau dijelaskan kondisi tentang penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi yang tinggi, sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan, yang sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator indeks ekonomi hijau, dan indikator lainnya sesuai dengan konteks daerah.

1. Indeks Ekonomi Hijau

Merujuk pada Buku I Pedoman Penyelarasan Muatan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025–2045, ekonomi hijau merupakan model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks ekonomi hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau secara *tangible*, representatif, dan akurat. Indikator ini terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yakni pilar lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Pengembangan energi baru terbarukan menjadi bagian penting dalam mewujudkan ekonomi hijau, di mana salah satu sumber potensial tersebut adalah biogas dari limbah ternak, yang mampu mengurangi emisi sekaligus dapat memenuhi kebutuhan energi di perdesaan. Oleh karena itu, selain menghasilkan energi bersih, pemanfaatan biogas juga mendukung ekonomi sirkular. Sisa olahannya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan meningkatkan produktivitas lahan. Inisiatif ini tak hanya ramah lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di pedesaan.

Kabupaten Magelang telah memulai pemanfaatan energi terbarukan melalui pembangunan instalasi biogas berbasis limbah ternak yang tersebar di berbagai wilayah, terutama di kawasan sentra peternakan seperti Ngablak, Grabag, Sawangan, dan Pakis. Instalasi biogas ini umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga, terutama untuk memasak, sekaligus menghasilkan residu yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Berbagai unit biogas yang telah dibangun menunjukkan variasi dalam kondisi operasional. Sebagian masih aktif dimanfaatkan oleh peternak atau rumah tangga pengguna, sementara sebagian lainnya menunjukkan kondisi yang masih aktif tetapi tidak maksimal, dan ada pula yang sudah tidak aktif. Kondisi ini mencerminkan pentingnya aspek keberlanjutan dan pemeliharaan dalam pengelolaan infrastruktur energi skala kecil. Pembangunan sarana biogas di Kabupaten Magelang selama ini berasal dari berbagai sumber penganggaran, antara lain melalui dukungan APBD Kabupaten, dana alokasi khusus (DAK), bantuan provinsi, hingga program kerja sama dengan mitra swasta dan lembaga donor. Keberagaman sumber pembiayaan ini mencerminkan adanya kepedulian dan dukungan lintas sektor terhadap transisi energi berbasis potensi lokal.

Selanjutnya, menyadari masih besarnya potensi yang dapat dioptimalkan, Kabupaten Magelang terus mendorong pengembangan sarana biogas melalui usulan-usulan baru yang muncul dari masyarakat, kelompok tani, maupun pelaku usaha. Pada tahun 2023, terdapat 21 usulan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) biogas di Kabupaten Magelang. Kapasitas ternak tercatat bervariasi, mulai dari skala kecil (tiga hingga lima ekor) hingga skala besar. Lokasi tersebar di beberapa kecamatan, antara lain Sawangan, Grabag, Kajoran, Ngablak, Salaman, Mertoyudan, dan Borobudur. Sebagian besar lahan untuk pembangunan instalasi dimiliki secara pribadi, dengan luas lahan calon lokasi antara 3 m^2 hingga 1250 m^2. Beberapa pengusul tergabung dalam kelompok seperti “Ngudi Rejeki”, “Kompas Elinsa Mandiri”, dan “Poktan Sari Arum”, sementara lainnya bersifat perorangan. Usulan ini menunjukkan potensi besar pemanfaatan biogas berbasis limbah ternak dan limbah industri rumah tangga sebagai bagian dari transisi energi bersih di wilayah pedesaan, sekaligus mendukung pengelolaan limbah secara berkelanjutan.

2. Indeks Ekonomi Biru

Indeks Ekonomi Biru menjadi instrumen penting untuk menilai kinerja pembangunan daerah berbasis prinsip keberlanjutan, yang mencakup tiga pilar utama, yaitu pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada pilar ekonomi, sektor perikanan merupakan salah satu kontributor yang memiliki potensi signifikan. Kabupaten Magelang menunjukkan tren perkembangan positif pada berbagai subsektor perikanan, baik perikanan tangkap, budidaya, maupun pengolahan hasil perikanan. Perkembangan ini berkontribusi pada peningkatan ketersediaan pangan bergizi, penguatan daya saing produk, dan perbaikan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Meski demikian, optimalisasi sektor perikanan masih memerlukan perhatian, terutama dalam penguatan produktivitas budidaya, pengembangan diversifikasi produk olahan, peningkatan kualitas dan keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha. Penguatan ini tidak hanya berdampak pada pilar ekonomi melalui peningkatan nilai tambah, tetapi juga mendukung pilar sosial melalui pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir atau pelaku usaha terkait, serta pilar lingkungan melalui pengelolaan sumber daya perairan yang berkelanjutan.

2.1.3.4. Transformasi Digital

Pada sub aspek transformasi digital dijelaskan tentang pengarusutamaan transformasi digital meliputi pengembangan super platform, percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital, yang sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, serta indikator lainnya sesuai konteks daerah.

Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu indikator untuk mengukur perkembangan TIK suatu wilayah yang dapat diperbandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Selain itu, Indeks Pembangunan TIK mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK, dalam rangka menuju masyarakat informasi. Indeks Pembangunan TIK disusun berdasarkan sebelas indikator yang terhimpun dalam tiga subindeks, yaitu akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, serta keahlian TIK sesuai dengan standar internasional yang dikeluarkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU). Data yang digunakan merupakan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh BPS serta kompilasi produk data administrasi dari berbagai instansi terkait.

2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Pada sub aspek integrasi ekonomi domestik dan global dijelaskan tentang integrasi ekonomi domestik dan global dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global, yang sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator pembentukan modal tetap bruto, ekspor barang dan jasa, serta indikator lainnya sesuai konteks daerah.

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Badan Pusat Statistik mendefinisikan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi, yang mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pembentukan modal tetap bruto juga merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, manfaat PMTB bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan salah satunya adalah untuk meningkatkan iklim investasi.

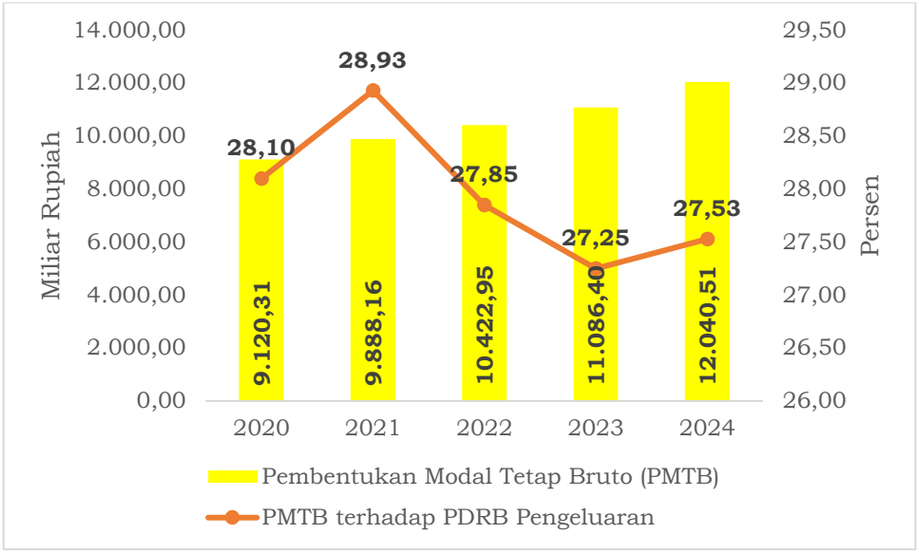

Gambar 2.1.77
Pembentukan Modal Tetap Bruto pada Struktur PDRB ADHB menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Tabel Dinamis BPS Kabupaten Magelang Tahun 2025

Pembentukan modal tetap bruto merupakan kontributor kedua terbesar dalam struktur PDRB ADHB Kabupaten Magelang berdasarkan sisi pengeluaran setelah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Apabila dilihat dari nominalnya, pada tahun 2020, PMTB di kabupaten ini tercatat sebesar 9.120,32 miliar rupiah dan menunjukkan peningkatan hingga menjadi 11.086,44 miliar rupiah pada tahun 2023. Berdasarkan nominal tersebut, maka capaian PMTB terhadap PDRB pengeluaran di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 28,10 persen dan berfluktuasi hingga menjadi 27,53 persen pada tahun 2024. Tingginya proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga di kabupaten ini menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan di wilayah Magelang sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga. Komponen rumah tangga sendiri bersifat konsumtif sehingga dalam jangka panjang tidak akan menggerakkan investasi sebagai penggerak ekonomi yang ideal, oleh karena itu capaian PMTB di Kabupaten Magelang perlu semakin ditingkatkan agar nilai investasi di daerah dapat terus meningkat.

2. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor adalah kegiatan pembelian barang dalam negeri untuk konsumen luar negeri. Dalam lima tahun terakhir, nilai ekspor non migas Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,33 persen per tahun. Pada tahun 2020, nilai ekspor non migas di kabupaten ini tercatat sebesar US$ 72.209.830,24 dan menunjukkan peningkatan hingga tahun 2024 menjadi sebesar US$ 119.114.590,35. Fluktuasi nilai ekspor non migas di

Kabupaten ini berdampak pada besaran persentase pertumbuhannya yang juga menunjukkan besaran yang fluktuatif. Terjadi penurunan ekspor non migas di tahun 2020, 2022, dan 2023 yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekspor yang negatif.

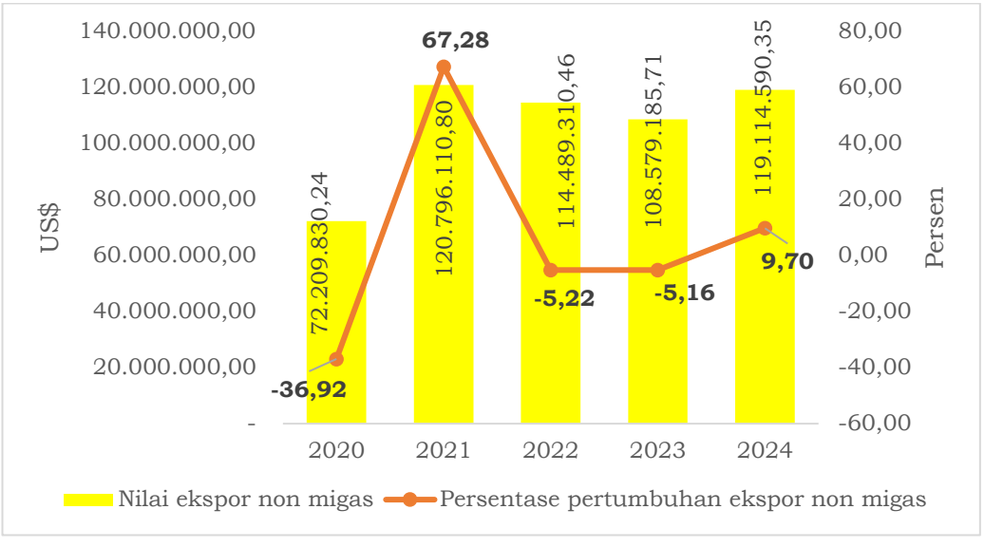

Gambar 2.1.78
Nilai dan Pertumbuhan Ekspor Non Migas Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024
Sumber: Tabel Dinamis BPS Kabupaten Magelang Tahun 2025

Besaran ekspor mulai menunjukkan penurunan ketika pandemi Covid tahun 2020, dan kemudian menunjukkan tren yang positif (meningkat) di tahun 2021 ketika perdagangan luar negri mulai dibuka. Selanjutnya, adanya krisis Rusia dan Ukraina pada tahun 2022, memberikan dampak negatif bagi kegiatan perdagangan internasional, yang mana berdampak pula bagi pertumbuhan ekspor Kabupaten Magelang yang bertumbuh negatif (menurun). Kondisi tersebut berlangsung hingga tahun 2023 dengan adanya krisis ekonomi global yang juga memberikan pengaruh terhadap perdagangan internasional.

3. Pertumbuhan Investasi

Jumlah investasi di suatu daerah seringkali menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan perekonomian secara makro. Indikator nilai investasi berskala nasional merupakan indikator yang menggambarkan besaran nilai penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal berskala nasional di wilayah Kabupaten Magelang, baik yang berstatus Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), di mana besaran nilai investasi menggambarkan lebih nyata dan spesifik perkembangan investasi di suatu wilayah.

Tabel 2.1.39
Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA) Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional, baik PMDN maupun PMA	Miliar Rp	2.490,88	2.803,76	3.706,88	4.891,00	5.423,30
2	Realisasi Investasi PMDN	Miliar Rp	2.420,46	2.729,60	3.622,21	4.747,00	5.234,19
3	Nilai investasi PMA	Miliar Rp	70,42	74,16	84,67	144,00	189,11
4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	Miliar Rp	295,27	309,15	892,6	1.124,80	487,12

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang 2025, Diolah

Data tersebut memperlihatkan adanya tren positif dalam nilai investasi berskala nasional, baik untuk PMDN maupun PMA, di Kabupaten Magelang, selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai investasi nasional tercatat sebesar 2.490,88 miliar rupiah, yang kemudian mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya hingga mencapai 5.423,30 miliar rupiah pada tahun 2024, atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 21,47 persen per tahun. Realisasi investasi PMDN juga terus meningkat, dari 2.420,46 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 5.234,19 miliar rupiah pada tahun 2024, atau yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 21,27 persen per tahun. Angka kenaikan realisasi investasi PMDN turut mencatatkan pertumbuhan yang substansial, dengan penambahan sekitar 295,27 miliar rupiah pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 487,12 miliar rupiah pada tahun 2024.

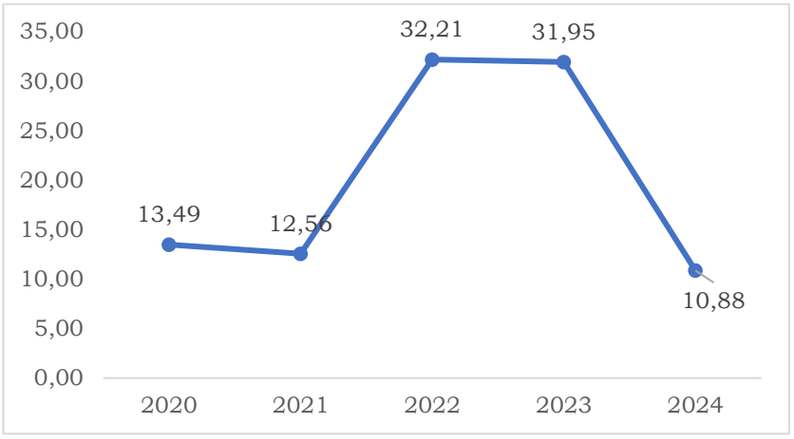

Gambar 2.1.79
Pertumbuhan Investasi Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang 2024, Diolah

Selanjutnya, dilihat dari pertumbuhannya, secara umum besaran pertumbuhan investasi di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 5,23 persen per tahun. Pada tahun 2020, pertumbuhan investasi tercatat sebesar 13,5 persen. Namun, pada tahun 2021, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 12,56 persen. Memasuki tahun 2022, pertumbuhan investasi mengalami lonjakan yang signifikan, mencapai 32,21 persen, namun menunjukkan penurunan di

tahun 2024 hingga capaiannya menjadi 10,88 persen. Hal ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang cepat pascapandemi Covid–19. Selain itu, hal ini juga didorong oleh upaya DPMPTSP Kabupaten Magelang yang melakukan sosialisasi masif terkait kewajiban LKPM bagi para pelaku usaha dengan modal di atas lima miliar rupiah dan dilaksanakannya sosialisasi OSS di tingkat kecamatan sehingga pemahaman bagi para pelaku usaha tentang investasi di Kabupaten Magelang semakin terbuka. Peningkatan penanaman modal akan berdampak positif bagi daerah. Selain memicu peningkatan perekonomian daerah, juga akan memberikan efek berganda salah satunya adalah membuka kesempatan pekerjaan bagi masyarakat.

2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pada sub aspek perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dijelaskan tentang kondisi pengembangan wilayah perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan perdesaan mandiri yang berkelanjutan, dan dilengkapi dengan indikator seperti indeks infrastruktur/indeks kepuasan layanan infrastruktur, rumah tangga dengan akses hunian layak, persentase desa mandiri, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

Infrastruktur yang memadai tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan konektivitas antarwilayah, tetapi juga memiliki peranan penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur, seperti jaringan transportasi, penyediaan energi, telekomunikasi, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi, merupakan beberapa faktor kunci dalam menarik investasi dan mendung pertumbuhan sektor-sektor produktif. Selain itu, infrastruktur yang berkualitas dapat meningkatkan efisiensi logistik dan distribusi, yang pada akhirnya akan memperkuat daya saing ekonomi daerah. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan strategis wilayah merupakan elemen krusial dalam meningkatkan daya saing daerah secara menyeluruh.

1. Indeks Infrastruktur

Indeks infrastruktur dapat diartikan sebagai indikator yang merefleksikan tingkat kemajuan dan distribusi pembangunan infrastruktur. Semakin tinggi nilai indeks infrastruktur suatu kota, dapat dikatakan bahwa tingkat pembangunan di kota tersebut semakin baik.

2. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks kualitas layanan infrastuktur merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pengukuran indeks kepuasan layanan infrastruktur menyediakan informasi yang mencerminkan perspektif masyarakat secara objektif, komprehensif, dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun manfaat yang diperoleh.

Tabel 2.1.40
Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	Persen	69,90	73,42	63,94	80,60	88,67
2	Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan	Persen	53,89	54,02	-	-	104,23
	Cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan *	Persen	-	-	61,38	72,68	98,03
3	Cakupan hunian layak dan berkualitas	Persen	65,31	67,73	68,20	94,59	97,53
4	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Persen	61,90	63,72	73,38	82,78	96,11
5	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	Persen	66,60	67,57	71,93	74,29	82,76

Sumber: RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045; Hasil Olahan, 2024

Selain indeks infrastruktur dan indeks kualitas layanan infrastruktur, terdapat indikator lain yang juga memiliki signifikansi penting, yaitu **cakupan pembangunan infrastruktur wilayah.** Ukuran terkait kemapanan infrastruktur di Kabupaten Magelang ditunjukkan oleh indikator cakupan pembangunan infrastruktur wilayah. Pada periode tahun 2020 hingga tahun 2021, infrastruktur wilayah yang diukur dalam indikator ini mencakup infrastruktur yang berhubungan dengan urusan pekerjaan umum dan perhubungan. Namun, mulai tahun 2022 hingga tahun 2023, aspek yang diukur berkembang dengan mencakup infrastruktur pada urusan perumahan dan kawasan permukiman. Selama periode lima tahun terakhir, indikator ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten hingga mencapai 82,78 persen pada tahun 2023.

3. Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menyatakan bahwa jalan merupakan bagian integral dari prasarana transportasi darat yang berperan dalam menghubungkan serta memperkuat keterpaduan wilayah di seluruh Republik Indonesia. Selain berfungsi sebagai sarana mobilitas, jaringan jalan juga memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan,

serta sebagai prasarana distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu, jaringan jalan harus memenuhi standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan, salah satunya adalah tingkat kemantapan jalan. Kemantapan jalan merujuk pada kondisi permukaan jalan yang tergolong baik dan sedang, sesuai dengan umur rencana infrastruktur serta standar teknis yang berlaku.

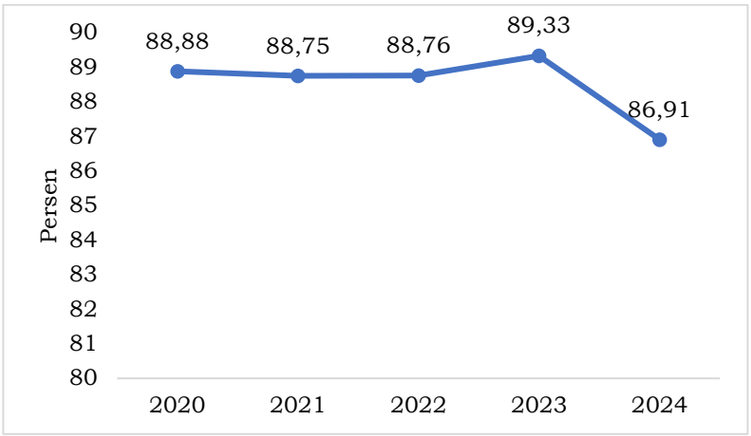

Gambar 2.1.80
Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2025

Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk angkutan dengan muatan berlebih yang menyebabkan umur konstruksi jalan lebih pendek dari yang direncanakan. Ketersediaan lahan untuk drainase juga terbatas karena badan jalan telah mencapai kapasitas maksimal. Dalam lima tahun terakhir, persentase panjang dengan jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, indikator ini berada di angka 88,88 persen, kemudian sedikit menurun menjadi 88,75 persen pada 2021, dan relatif stagnan pada 2022 di angka 88,76 persen. Peningkatan sempat terjadi pada 2023 dengan capaian 89,33 persen, namun pada 2024 justru mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 86,91 persen. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Magelang, yang berpotensi memengaruhi mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu penyebab utama kerusakan jalan adalah banyaknya kendaraan pengangkut barang dengan muatan berlebih yang melewati jalan-jalan di Kabupaten Magelang.

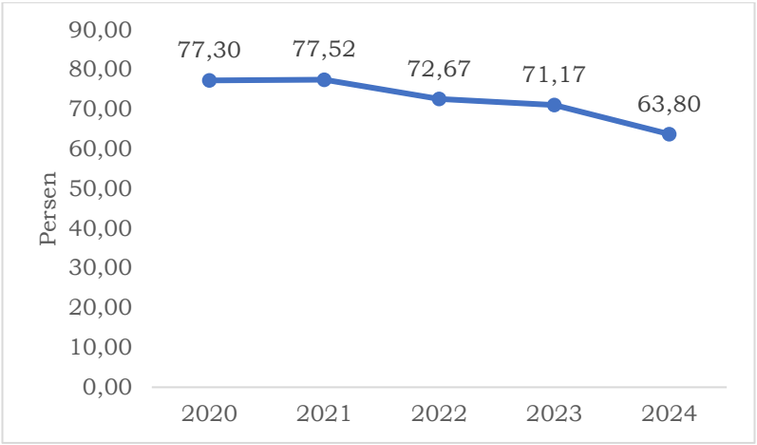

Gambar 2.1.81
Proporsi Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2025

Penurunan persentase panjang jalan dengan kondisi permukaan mantap mencerminkan tantangan dalam pemeliharaan infrastruktur jalan, yang pada akhirnya turut berkontribusi terhadap menurunnya proporsi jalan dalam kondisi baik. Dalam lima tahun terakhir, capaian proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Magelang menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 4,68 persen per tahun. Pada tahun 2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 77,30 persen dan meningkat hingga 77,52 persen pada tahun 2021. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, angka ini menurun hingga mencapai 63,80 persen, yang merupakan nilai terendah selama periode 2020 hingga 2024.

4. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten

Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten merupakan suatu indikator yang mencerminkan tingkat pemenuhan perlengkapan jalan pada ruas-ruas jalan di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Indikator ini berfungsi untuk mengukur proporsi ruas jalan kabupaten/kota yang telah dilengkapi dengan perlengkapan jalan minimal, dibandingkan dengan total ruas jalan yang berada di bawah kewenangan kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota. Standar pemenuhan minimal perlengkapan jalan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemenuhan perlengkapan jalan yang dimaksud mencakup ketersediaan berbagai elemen, antara lain rambu lalu lintas, marka jalan,

guardrail, penerangan jalan umum (PJU), serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) pada ruas jalan kabupaten/kota, dengan ketentuan bahwa minimal sebesar 60 persen dari total kebutuhan ideal untuk setiap jenis perlengkapan jalan harus tersedia pada satu ruas jalan.

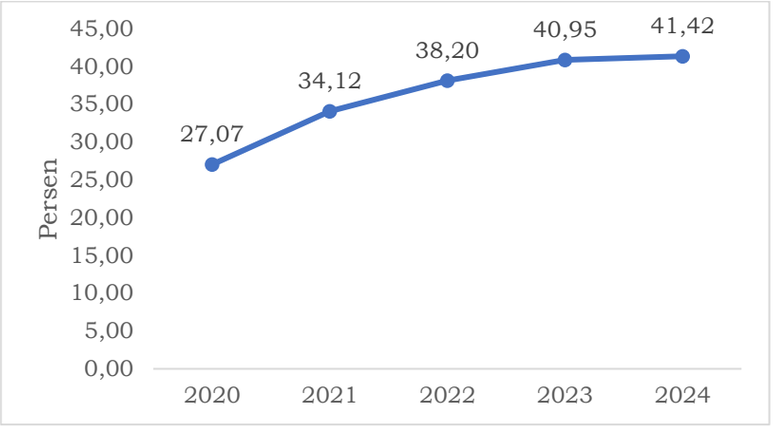

Gambar 2.1.82
Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang

Dalam lima tahun terakhir, capaian persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten di Kabupaten Magelang masih berada di bawah standar minimal yang ditetapkan atau di bawah 60 persen. Meskipun demikian, capaian indikator ini menunjukkan kecenderungan meningkat, di mana pada tahun 2020 tercatat sebesar 27,07 persen, kemudian mengalami peningkatan secara bertahap dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 11,22 persen per tahun hingga mencapai 41,42 persen pada tahun 2024.

5. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Indikator rumah tangga terhadap akses hunian layak merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa hunian yang dinilai layak, terjangkau, dan berkelanjutan harus memenuhi beberapa aspek utama, yaitu:

1. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;
2. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan hunian, serta tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

Pengukuran indikator tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Mengingat adanya variasi dalam penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota), pengukuran indikator ini dapat dilakukan dengan menggunakan proksi yang memenuhi lima kriteria sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (*durable housing*), yang mencakup kelayakan material atap, dinding dan lantai;
2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) dengan luas lantai per kapita minimal 7,2 m^2;
3. Akses terhadap sumber air minum yang layak;
4. Akses terhadap sanitasi yang layak;
5. Pencahayaan dan penghawaan yang memadai.

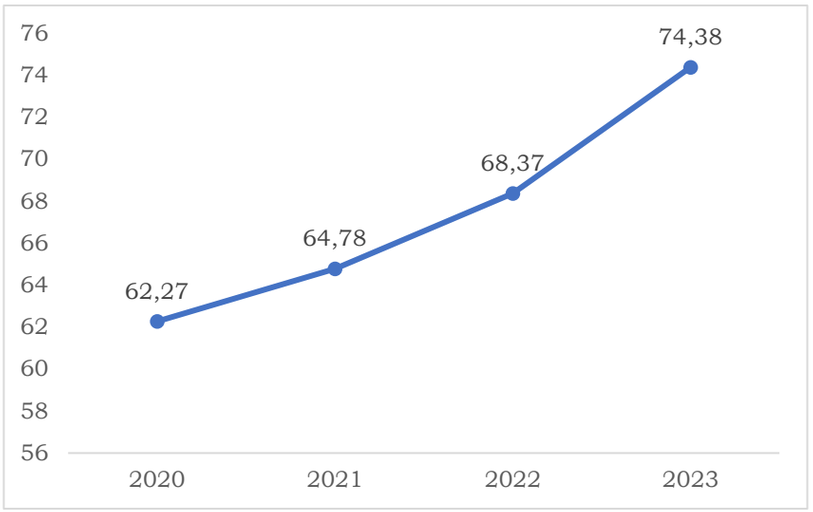

Gambar 2.1.83
Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Magelang Tahun 2020-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2025
Keterangan: data tahun 2024 masih dalam proses penghitungan

Melalui indikator proxy (persentase jumlah rumah layak huni terhadap seluruh jumlah rumah) yang diolah oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, akses hunian layak di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 67,73 persen dan meningkat menjadi 95,07 persen pada tahun 2023. Besaran capaian tersebut mengindikasikan bahwa hampir seluruh hunian di Kabupaten Magelang telah memenuhi standar layak dan berkualitas.

Sedangkan berdasarkan data dari BPS Provinsi Jateng, dari rentang tahun 2020 hingga 2023, capaian rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan meningkat, yang ditandai

dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,10 persen per tahun. Pada tahun 2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 67,27 persen dan meningkat menjadi 74,38 persen pada tahun 2023. Besaran capaian tersebut mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan kualitas hunian di Kabupaten Magelang, yang mencerminkan keberhasilan intervensi program penyediaan perumahan dan peningkatan infrastruktur permukiman. Meskipun capaian ini menunjukkan tren positif, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan seluruh rumah tangga memperoleh akses terhadap hunian yang aman, sehat, terjangkau, dan sesuai standar teknis bangunan.

6. Indeks Kinerja Sistem Irigasi dalam Konteks Kewenangan Kabupaten

Irigasi merupakan suatu metode penyediaan air untuk lahan pertanian, baik secara alami maupun buatan, dengan tujuan untuk memastikan ketersediaan kelembapan yang optimal bagi pertumbuhan tanaman. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 mengenai Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, evaluasi kinerja sitem irigasi bertujuan untuk menilai kondisi infrastruktur irigasi yang mencakup berbagai aspek, yaitu prasarana fisik, produktivitas tanaman, sarana pendukung, organisasi personalia, serta aspek kelembagaan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

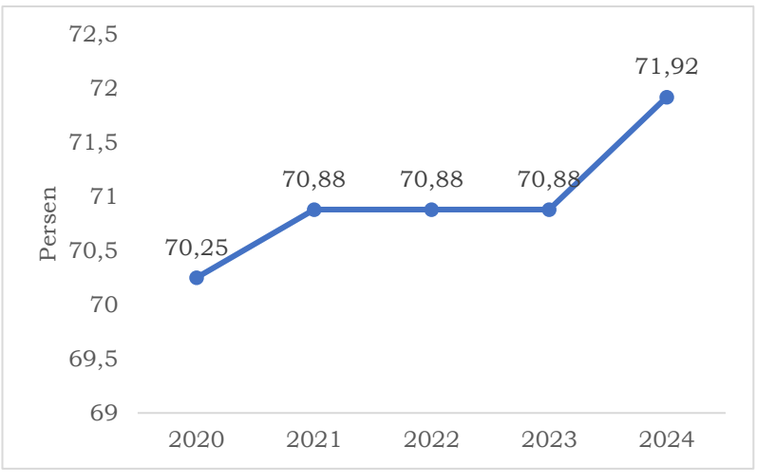

Gambar 2.1.84
Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Magelang
Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025

Penilaian kinerja sistem irigasi dilakukan dengan menggunakan indeks yang dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut: (1) nilai indeks 80–100 menunjukkan kinerja yang sangat baik; (2) nilai indeks 70–79 menunjukkan kinerja yang baik; (3) nilai indeks 55–69 menunjukkan kondisi yang kurang baik dan memerlukan perhatian; serta (4) nilai indeks di bawah 54 menunjukkan

kondisi yang buruk. Kualitas sistem irigasi memiliki hubungan yang erat dengan produktivitas sektor pertanian sehingga adanya indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dapat berfungsi sebagai parameter dalam mengukur efektivitas layanan irigasi serta mengidentifikasi tantangan yang perlu segera diatasi. Pada tahun 2024, indeks kinerja sistem irigasi memperoleh capaian sebesar 59,20 (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2025), yang termasuk dalam kategori kinerja kurang baik dan memerlukan perhatian. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam pemeliharaan serta peningkatan kualitas jaringan irigasi.

Meskipun demikian, tren pencapaian persentase jaringan irigasi yang berada dalam kondisi baik di Kabupaten Magelang selama lima tahun terakhir menunjukkan kestabilan dengan sedikit peningkatan pada akhir periode. Pada tahun 2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 70,25 persen dan mengalami kenaikan menjadi 70,88 persen di tahun 2021. Angka ini bertahan pada level yang sama hingga tahun 2023, sebelum mengalami peningkatan lebih lanjut menjadi 71,92 persen pada tahun 2024. Stabilitas ini mengindikasikan bahwa upaya pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi telah dilaksanakan secara konsisten, meskipun peningkatan yang terjadi masih tergolong kecil.

7. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet

Dalam era digital yang terus berkembang, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu faktor krusial dalam peningkatan kesejahteraan serta daya saing daerah. Indikator persentase rumah tangga dengan akses internet merujuk pada rumah tangga yang memiliki minimal satu anggota yang dapat mengakses internet, baik melalui jaringan tetap maupun seluler. Adanya akses internet di tingkat rumah tangga menunjukkan bahwa jaringan internet tersebut tersedia untuk digunakan oleh seluruh anggota rumah tangga secara fleksibel. Hal ini mendukung transformasi digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan layanan publik.

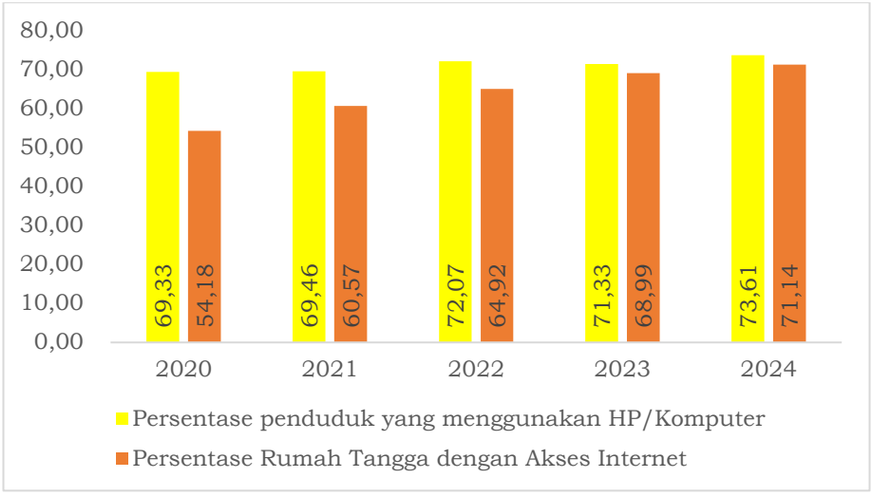

Gambar 2.1.85
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet dan Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Komputer di Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2024

Pada periode 2020 hingga 2024, terdapat peningkatan yang konsisten pada dua indikator yang mengukur akses teknologi informasi di masyarakat. Persentase rumah tangga yang memiliki akses internet menunjukkan peningkatan yang konsisten, yakni sebesar 54,18 persen di tahun 2020, dan menunjukkan peningkatan sampai dengan tahun 2024 menjadi sebesar 71,14 persen, atau meningkat dengan besaran 8,39 persen per tahun. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perkembangan positif dalam hal jangkauan teknologi informasi di tingkat rumah tangga. Selain itu, peningkatan ini juga beriringan dengan pertumbuhan persentase penduduk yang menggunakan telepon seluler atau komputer, yang menunjukkan peningkatan dari 69,33 persen pada tahun 2020 meningkat menjadi 73,61 persen pada tahun 2024, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,95 persen per tahun.

8. Persentase Desa Mandiri

Desa mandiri merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan yang sudah sangat baik. Kemandirian desa diukur berdasarkan status desa yang terbagi menjadi 5 (lima) kriteria, yaitu Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju, dan Mandiri. Desa mandiri merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan yang sudah sangat baik. Semakin tinggi jumlah desa mandiri menunjukkan tingkat pembangunan desa yang semakin baik yang didukung dengan komponen pendukung yang termuat dalam enam dimensi pengukurannya.

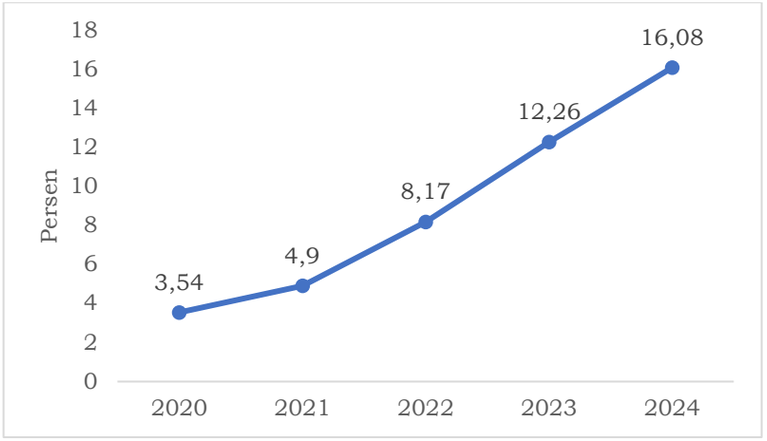

Gambar 2.1.86
Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/kabupaten/33.08 diakses Juni 2024, Diolah

Dalam lima tahun terakhir, capaian persentase desa mandiri di Kabupaten Magelang menunjukkan tren peningkatan, ditandai dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 45,97 persen. Pada tahun 2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 3,54 persen dan meningkat menjadi 16,08 persen di tahun 2024. Sebelum tahun 2025, pengukuran status desa menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) dengan 3 (tiga) dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan, sedangkan mulai tahun 2025 penghitungan status desa menggunakan Indeks Desa (ID) dengan 6 (enam) dimensi, yakni sosial, ekonomi, lingkungan, layanan dasar, aksesbilitas, dan tata kelola pemerintahan. Namun, untuk jumlah kriteria status desa masih tetap sama dengan menggunakan lima kriteria status desa.

2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

Pada sub aspek stabilitas ekonomi makro diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan, yang sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikatorseperti rasio pajak terhadap PDRB, tingkat inflasi, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Indikator tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. Dalam lima tahun terakhir, pendapatan

pajak daerah Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, pendapatan pajak daerah kabupaten ini tercatat sebesar 115,531 miliar rupiah dan berfluktuasi menjadi 208,742 miliar rupiah di tahun 2024, atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,94 persen per tahun.

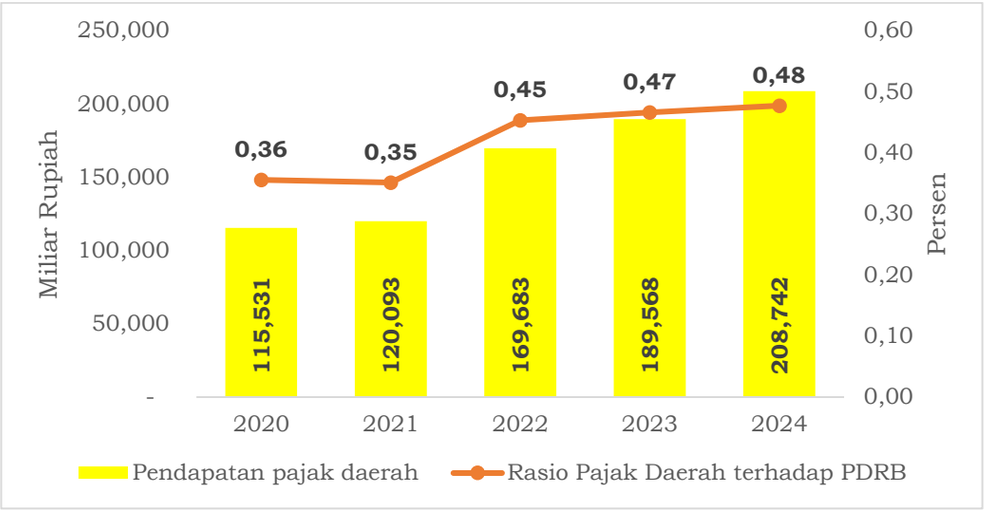

Gambar 2.1.87
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024 (Audited); Tabel Dinamis BPS Kabupaten Magelang; Diolah

Selanjutnya, besaran PDRB ADHB Kabupaten Magelang tercatat sebesar 32.462,03 miliar rupiah di tahun 2020, dan mengalami peningkatan dengan rata–rata pertumbuhan sebesar 6,18 persen per tahun hingga pada tahun 2024 besarannya menjadi 43.736,00 miliar rupiah. Berdasarkan kedua komponen tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Magelang pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,36 persen, dan bertumbuh menjadi 0,48 persen pada tahun 2024, atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,61 persen per tahun. Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang masih perlu mengoptimalkan sumber penerimaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan anggaran pendapatan daerah.

2. *Return on Asset* (RoA) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Return on Asset (RoA) BUMD adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. *Return on asset* dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan dalam ini adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). *Return on asset* merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan asset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat RoA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat

produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data RoA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.

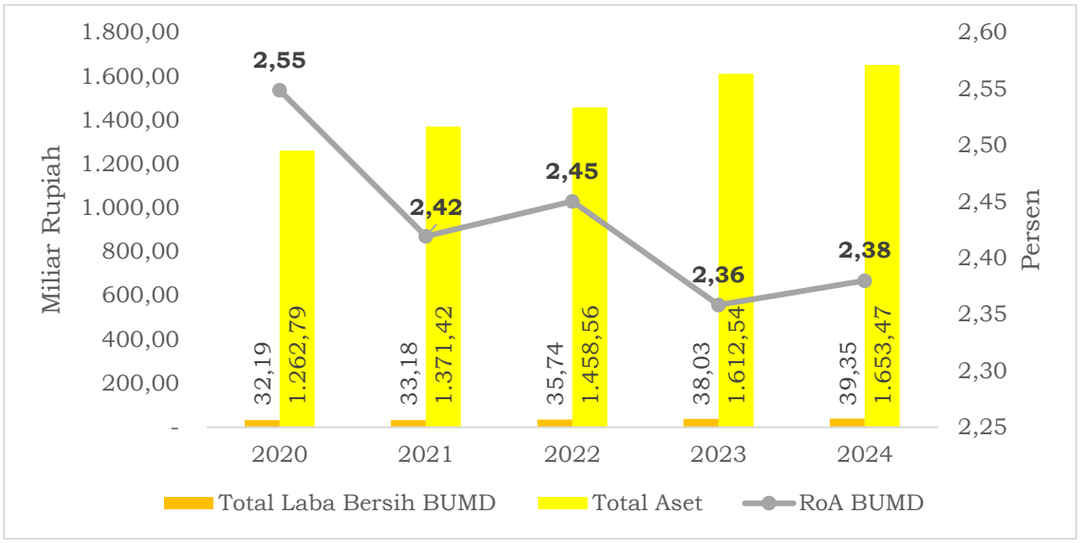

Gambar 2.1.88
***Return on Asset* (RoA) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Magelang**
Tahun 2020–2024
Sumber: Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2024

Perhitungan RoA BUMD di Kabupaten Magelang dilakukan pada tiga BUMD yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, yakni meliputi PT. BPR Bank Bapas 69 (Perseroda), PT Aneka Usaha (Perseroda), dan Perumda Air Minum Tirta Gemilang, hal ini dilakukan mengingat adanya kesulitan dalam memisahkan aset pada BUMD yang sahamnya juga dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam lima tahun terakhir, total laba bersih BUMD di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,15 persen per tahun. Pada tahun 2020, total laba bersih BUMD di kabupaten ini tercatat sebesar 32,19 miliar rupiah dan bertumbuh menjadi 39,35 miliar rupiah pada tahun 2024. Sementara itu, dalam rentang waktu yang sama, total aset BUMD tercatat sebesar 1.262,79 miliar rupiah di tahun 2020 dan meningkat menjadi 1.653,47 miliar rupiah di tahun 2024, atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,97 persen per tahun.

Perbandingan antara laba bersih dan total aset tersebut menunjukkan bahwa RoA BUMD di Kabupaten Magelang cenderung mengalami penurunan, yakni dari 2,55 persen pada tahun 2020 menjadi 2,38 persen pada tahun 2024, atau dengan rata-rata penurunan sebesar 1,70 persen per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi pertumbuhan aset dan laba, efisiensi

pemanfaatan aset dalam menghasilkan keuntungan belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan BUMD, khususnya dalam hal efisiensi pemanfaatan aset dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan.

3. Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten terhadap PDRB

Total Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank milik kabupaten kota terhadap PDRB menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai total DPK terhadap PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, di mana peningkatan angka rasio total DPK terhadap PDRB menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah. Perhitungan DPK di Kabupaten Magelang dilakukan pada satu bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, yakni PT. BPR Bank Bapas 69 (Perseroda), serta tiga bank yang sahamnya dimiliki bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda), PT. BPR BKK Jateng (Perseroda), dan PT. BPD Jawa Tengah (Perseroda).

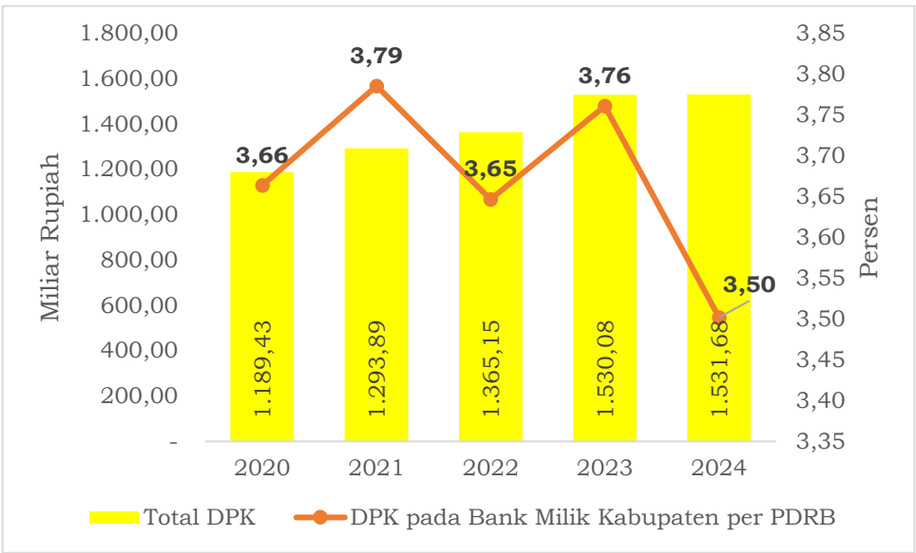

Gambar 2.1.89
Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten Magelang terhadap PDRB
Tahun 2020–2024
Sumber: Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2024

Dalam lima tahun terakhir, total DPK pada bank milik Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,53 persen per tahun. Pada tahun 2020, besaran DPK tercatat sebesar 1.189,43 miliar rupiah dan meningkat menjadi 1.531,68 miliar rupiah. Selain itu, PDRB ADHB

di kabupaten ini sebagai nilai pembanding juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,74 persen per tahun, atau dengan nominal sebesar 32.462,03 miliar rupiah di tahun 2020 meningkat menjadi 43.736,00 miliar rupiah di tahun 2024.

Berdasarkan kedua indikator pembentuknya, capaian indikator total DPK pada bank milik Kabupaten Magelang terhadap PDRB ini menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 3,66 persen dan menurun di tahun 2024 menjadi 3,50 persen. Hal ini mencerminkan bahwa fungsi penghimpunan dan penyaluran dana oleh lembaga keuangan lokal belum berjalan secara optimal, khususnya dalam mengakumulasi dana masyarakat seiring dengan peningkatan nilai tambah bruto di Kabupaten Magelang. Kondisi tersebut menjadi indikasi perlunya penguatan sistem perbankan lokal, peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta pengembangan produk dan layanan perbankan yang lebih inklusif dan mampu menjangkau sektor-sektor ekonomi produktif di daerah.

4. Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten terhadap PDRB

Total kredit pada bank milik kabupaten kota terhadap PDRB menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai total kredit pada bank milik kabupaten/kota terhadap PDRB menunjukkan semakin berfungsinya perbankan milik daerah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendana. Sama halnya dengan perhitungan DPK, total kredit yang dihitung pada indikator ini hanya dilakukan pada satu bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, yakni PT. BPR Bank Bapas 69 (Perseroda), serta tiga bank yang sahamnya dimiliki bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda), PT. BPR BKK Jateng (Perseroda), dan PT. BPD Jawa Tengah (Perseroda).

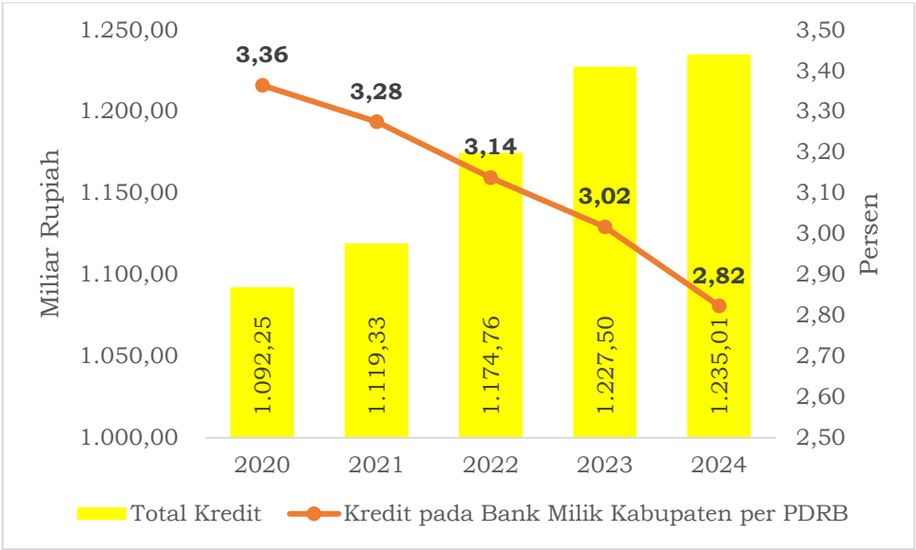

Gambar 2.1.90
Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten Magelang terhadap PDRB
Tahun 2020–2024
Sumber: Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2024

Dalam rentang tahun 2020 hingga 2024, total kredit pada bank milik Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang semakin meningkat setiap tahunnya, yakni sebesar 1.092,25 miliar rupiah di tahun 2020 meningkat menjadi 1.235,01 miliar rupiah di tahun 2024, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,12 persen per tahun. Hal tersebut berbanding lurus dengan peningkatan PDRB ADHB di kabupaten ini yang bertumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,74 persen per tahun.

Berdasarkan kedua indikator pembentuknya, capaian indikator total kredit pada bank milik Kabupaten Magelang terhadap PDRB ini menunjukkan besaran dengan kecenderungan menurun setiap tahunnya, dengan rata-rata penurunan sebesar 4,39 persen per tahun. Pada tahun 2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 3,36 persen dan menurun di tahun 2024 menjadi 2,82 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun penyaluran kredit oleh bank milik Kabupaten Magelang mengalami peningkatan secara nominal, namun pertumbuhannya masih berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi daerah. Akibatnya, proporsi kredit terhadap PDRB menunjukkan kecenderungan menurun setiap tahunnya. Kondisi ini mencerminkan bahwa kontribusi lembaga keuangan lokal dalam mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan peran bank daerah dalam menyalurkan pembiayaan secara lebih luas dan tepat sasaran, salah satunya melalui pengembangan produk kredit yang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor produktif.

5. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro daerah yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus. Inflasi dapat mengindikasikan ketidakseimbangan perekonomian di suatu wilayah. Inflasi dapat memberikan dampak buruk dalam hal pemerataan kesejahteraan dan pendapatan. Semakin tingginya nilai inflasi, maka nilai mata uang akan semakin rendah dan semakin rendah pula daya beli masyarakat. Kabupaten Magelang masuk ke dalam wilayah yang tidak terpilih menjadi sampel Survei Biaya Hidup (SBH), sehingga dalam penghitungan IHK di kabupaten ini menggunakan pendekatan metode *sister city*. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka ditetapkan bahwa Kabupaten Magelang memiliki kemiripan pola konsumsi dengan Kabupaten Banyumas atau Purwokerto.

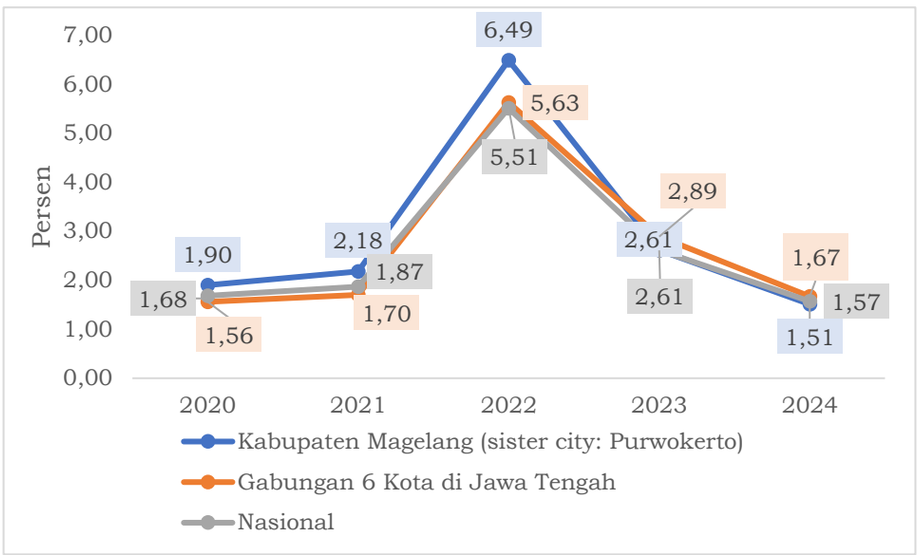

Gambar 2.1.91
Perbandingan Inflasi Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional
Tahun 2020–2024

Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025
*Keterangan: *) 2024 merupakan gabungan 9 kota di Jawa Tengah*

Secara umum, dalam lima tahun terakhir, tingkat inflasi Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan Nasional menunjukkan pola yang sama, dengan capaian yang dapat dikategorikan stabil dan terjaga karena memiliki tingkat inflasi di bawah tiga persen yang merupakan ambang batas normal bagi suatu daerah. Meskipun terjadi lonjakan pada tahun 2022 dengan besaran 6,49 persen, namun kembali stabil di tahun 2023 menjadi 2,61 persen, dan kembali membaik di tahun 2024 dengan capaian sebesar 1,51 persen.

Selanjutnya, dikarenakan Kabupaten Magelang merupakan kabupaten non IHK, sehingga untuk mengukur perubahan harga di kabupaten ini menggunakan Indeks Perkembangan Harga (IPH), dengan mengukur perubahan harga-harga 20 komoditas pangan yang memiliki bobot besar dalam IHK dan

dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah. Dengan adanya IPH, diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga-harga pangan. IPH juga dapat menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, karena pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. IPH juga dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan makroekonomi yang berdampak pada inflasi. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri, IPH Kabupaten Magelang pada triwulan I tahun 2024 tercatat sebagai berikut.

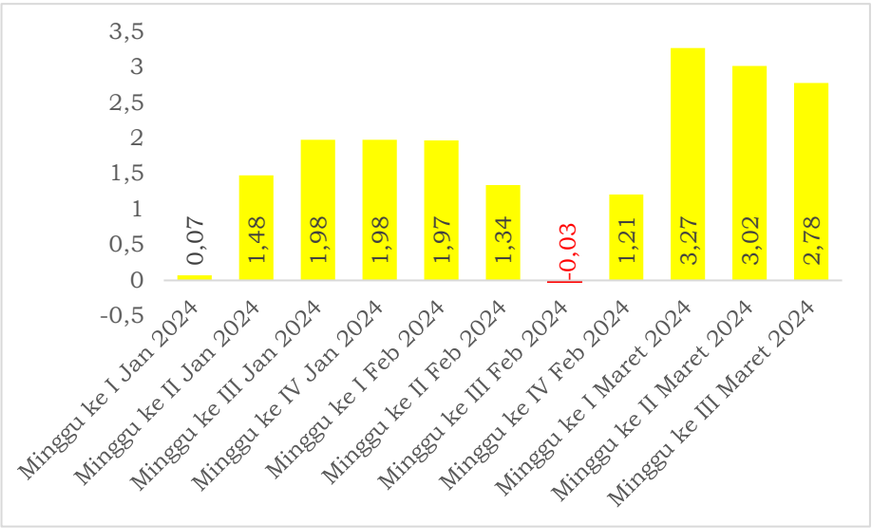

Gambar 2.1.92
Indeks Perkembangan Harga Kabupaten Magelang
Triwulan I Tahun 2024
Sumber: Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magelang, Tahun 2025

Selama triwulan I tahun 2024, nilai IPH di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada awal Januari (Minggu ke-I), IPH kabupaten ini masih sangat rendah, yakni sebesar 0,07 persen, namun menunjukkan peningkatan secara bertahap. Setelah sempat mengalami tekanan deflasi pada akhir Februari, IPH Kabupaten Magelang kembali menunjukkan peningkatan yang signifikan pada bulan Maret. Peningkatan nilai IPH yang terjadi di sepanjang bulan Maret tersebut diduga dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan menjelang bulan Ramadan, terutama untuk komoditas pangan strategis. Secara umum, kondisi ini mencerminkan tekanan inflasi yang mulai menguat dan perlu diantisipasi terutama terkait stabilitas harga bahan pokok.

Diharapkan pada tahun–tahun mendatang para pemangku kepentingan di daerah juga dapat terus menjaga stabilitas harga, agar nilai inflasi di kabupaten ini dapat tetap rendah dan stabil, agar tidak menimbulkan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian daerah. Capaian tingkat inflasi yang

rendah dan stabil tersebut dapat memberikan dampak positif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, yakni memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, besaran tingkat inflasi yang rendah dan stabil dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sementara itu tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menunjukkan ketidakstabilan perekonomian daerah yang dapat berakibat pada meningkatkan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus, sehingga dapat berakibat pada makin tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran.

6. Disparitas Harga

Disparitas harga merupakan perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antar daerah. Adapun 13 komoditas barang pokok yang digunakan dalam perhitungan indikator ini meliputi (1) beras medium; (2) gula pasir; (3) minyak goreng kemasan sederhana; (4) daging sapi paha belakang; (5) daging ayam ras; (6) telur ayam ras; (7) tepung terigu; (8) kedelai impor; (9) cabe merah keriting; (10) cabe rawit merah; (11) bawang merah; (12) bawang putih impor kating; dan (13) ikan kembung. Semakin kecil nilai disparitas berarti semakin kecil perbedaan harga komoditas di kabupaten/kota dengan harga di provinsi untuk komoditas yang sama. Kecilnya nilai disparitas dapat diartikan adanya perbaikan dan efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah dan menurunnya kesenjangan harga suatu komoditas antar wilayah. Pada tahun 2024, disparitas harga di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 8,92 (Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang Tahun 2025).

7. Rata–rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan sebagai tolok ukur kemampuan ekonomi suatu daerah yang terkait dengan daya saing. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi atau pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga, maka semakin atraktif kemampuan ekonomi daerah.

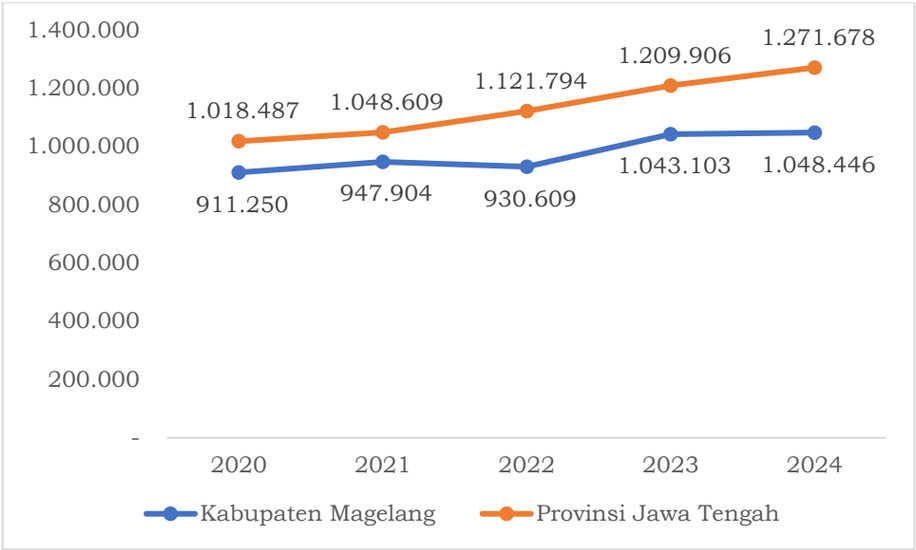

Gambar 2.1.93
Perbandingan Rata–rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024
Sumber: Tabel Dinamis BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Dalam lima tahun terakhir, rata–rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, rata–rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita ini tercatat sebesar Rp 911.250,00 dan bertumbuh menjadi Rp 1.048.446 pada tahun 2024, atau bertumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,57 persen per tahun. Capaian tersebut masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp 1.271.678,00. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di provinsi ini, Kabupaten Magelang menempati urutan ke–32 di atas capaian Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Wonosobo.

8. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi non pangan per kapita digunakan untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar kebutuhan pangan. BPS menyatakan bahwa perhitungan pengeluaran konsumsi non pangan hanya mencakup nilai pengeluaran barang yang dikonsumsi, kecuali beberapa jenis barang tertentu yang dikumpulkan kuantitasnya seperti listrik, air, gas, dan bahan bakar minyak. Melalui indikator pengeluaran konsumsi non pangan per kapita ini, dapat dilihat juga bagaimana perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk dari sisi kemampuan membeli kebutuhan non pangan atau kebutuhan sekunder–tersier.

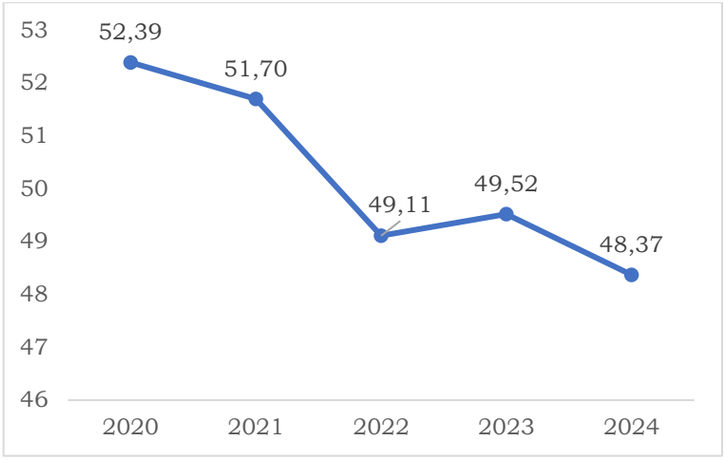

Gambar 2.1.94
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Tabel Dinamis BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024, Diolah

Dalam lima tahun terakhir, capaian indikator persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata–rata penurunan sebesar 1,98 persen per tahun, di mana pada tahun 2020 capaian indikator ini tercatat sebesar 52,39 persen dan menurun menjadi 48,37 persen pada tahun 2024. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Magelang memiliki rata–rata pengeluaran makanan dan bukan makanan yang cukup seimbang.

9. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria bank dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan ukuran bank dunia adalah sebagai berikut, apabila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat ketimpangan yang tinggi. Sementara itu, apabila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah, dan apabila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka ketimpangan yang terdapat di wilayah tersebut berada pada kategori rendah. Pada tahun 2024, distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 20,21 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah menyumbang lebih dari 17 persen terhadap total pengeluaran, yang menurut klasifikasi Bank Dunia termasuk dalam kategori

ketimpangan rendah. Hal ini mencerminkan semakin meratanya distribusi pendapatan di masyarakat serta potensi membaiknya kesejahteraan kelompok penduduk terbawah.

10. Indeks Zakat Nasional

Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah sebuah alat ukur yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Indonesia. IZN bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai pengelolaan zakat, membantu BAZNAS dalam merancang kebijakan, dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan zakat secara nasional. IZN menggunakan berbagai indikator yang terbagi dalam dua dimensi utama, yaitu dimensi makro yang mencerminkan peran pemerintah dan masyarakat, serta dimensi mikro yang berfokus pada kinerja lembaga zakat dan dampaknya terhadap mustahik. Capaian IZN Kabupaten Magelang tahun 2024 tercatat sebesar 0,58 dengan interpretasi stabil.

2.1.4.Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Pada sub aspek regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif dijelaskan tentang kondisi tata kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, dan didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum, yang sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator seperti indeks reformasi hukum, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, indeks pelayanan publik, indeks integritas nasional, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

1. Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah sistem penilaian pelaksanaan reformasi hukum pada pemerintah dan pemerintah daerah dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi, dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi IRH. Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan pada tahun 2022, 2023 dan 2024,

IRH pada Pemerintah Kabupaten Magelang tercatat sebesar 57,4 dengan kategori CC (Cukup), 76,56 dengan kategori BB (Baik), dan 98,68 dengan kategori AA (Istimewa). Dalam penilaian IRH terdapat empat variabel, yaitu:

a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi atau memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi dengan indikator:
    1) Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada:
        a) Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah
        b) Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
        c) Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah
    2) Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau *online*.
b. Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) yang berkualitas dengan indikator:
    1) Kebijakan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan
    2) Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi
    3) Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional perancang
c. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu dengan indikator:
    1) Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku (*existing*) di tingkat daerah dalam rangka re- regulasi atau deregulasi
    2) Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian

3) Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah
4) Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksiting atau yang sudah berlaku di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi

d. Penataan basis data peraturan perundang-undangan dengan indikator Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

Dalam penilaian IRH tahun 2022 sampai dengan 2024, pemenuhan indikator "tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau *online*" dan indikator "pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional perancang" belum maksimal sehingga perlu untuk ditingkatkan.

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Indeks tingkat kematangan SPBE didefinisikan sebagai suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan. Kekuatan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Magelang adalah pada "domain layanan SPBE dan domain tata kelola SPBE", di mana tata kelola SPBE secara makro didukung oleh adanya Perda TIK Nomor 3 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Ada beberapa domain yang menjadi aspek penilaian dalam SPBE yang masih harus diperbaiki, yaitu domain kebijakan SPBE dan domain manajemen SPBE.

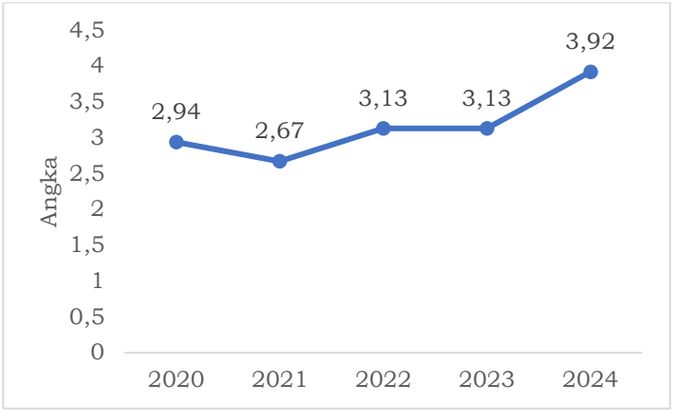

Gambar 2.1.95
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045

Secara umum, capaian indeks tingkat kematangan SPBE Kabupaten Magelang dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan yang signifikan. Indeks tersebut mengalami peningkatan dari 2,94 pada tahun 2020 menjadi 3,92 pada tahun 2024. Namun, perlu dicatat bahwa pada tahun 2021 terjadi penurunan capaian dari tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh perubahan jumlah indikator penilaian, yakni dari 35 indikator menjadi 47 indikator.

3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, seperti data primer, data sekunder, data objektif, dan persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

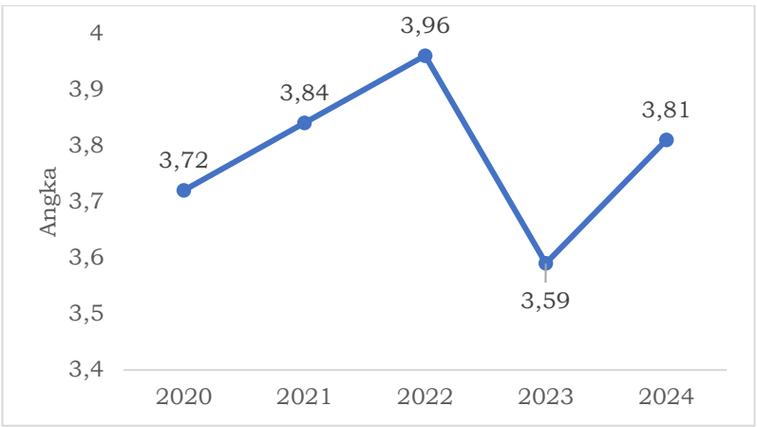

Gambar 2.1.96
Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2024

Secara umum, capaian indeks pelayanan publik di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 3,72 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarannya menjadi 3,81. Selanjutnya, pelayanan publik juga dapat dilihat kualitasnya melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

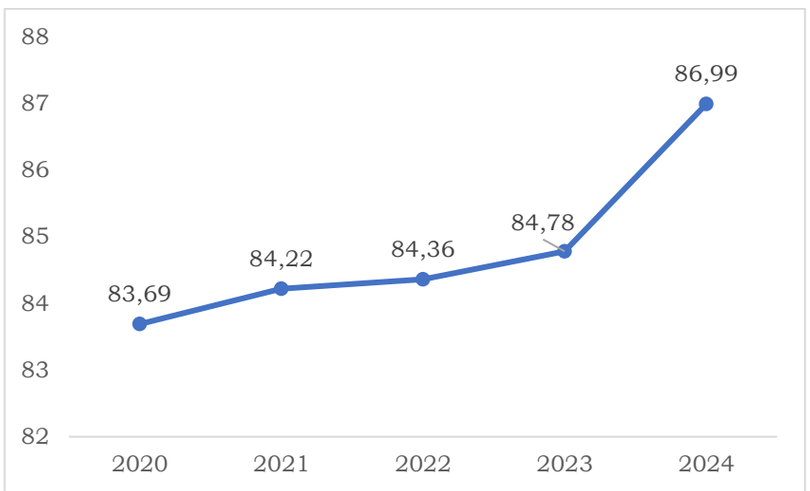

Gambar 2.1.97
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Magelang
Tahun 2020-2024
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2024

Secara umum, capaian IKM di Kabupaten Magelang menunjukkan kencenderungan yang positif. Selama lima tahun terakhir, capaian IKM

Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan, dengan pencapaian yang konsisten berada dalam kategori B. Pada tahun 2020, IKM tercatat sebesar 83,69. Angka tersebut kemudian berfluktuasi hingga menjadi 84,78 pada tahun 2023.

4. Indeks Integritas Nasional (IIN)

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Hasil dari IIN dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris. Dalam konteks ini, yang diukur merupakan hasil dari Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK.

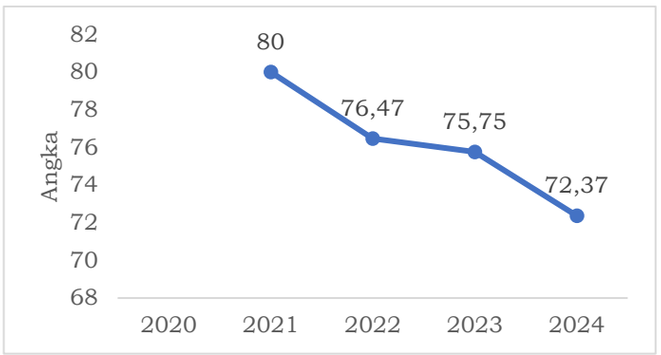

Gambar 2.1.98
Indeks Integritas Nasional (IIN) Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024
Sumber: Inspektorat Kabupaten Magelang, 2024

Pada tahun 2021, nilai SPI Kabupaten Magelang tercatat sebesar 80,00. Namun, dalam beberapa tahun berikutnya, nilai tersebut mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai 72,37 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang memerlukan perhatian serta langkah-langkah strategis dari pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang ada.

5. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) melalui proses pembaruan dan perubahan yang mendasar dalam sistem pemerintahan. Proses perubahan ini mencakup berbagai aspek, antara lain kelembagaan, tata kelola administrasi, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Tingkat keberhasilan reformasi birokrasi dievaluasi melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), yang

mencerminkan kemajuan yang dicapai oleh instansi pemerintah dalam membangun budaya anti-korupsi, mengelola anggaran secara efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

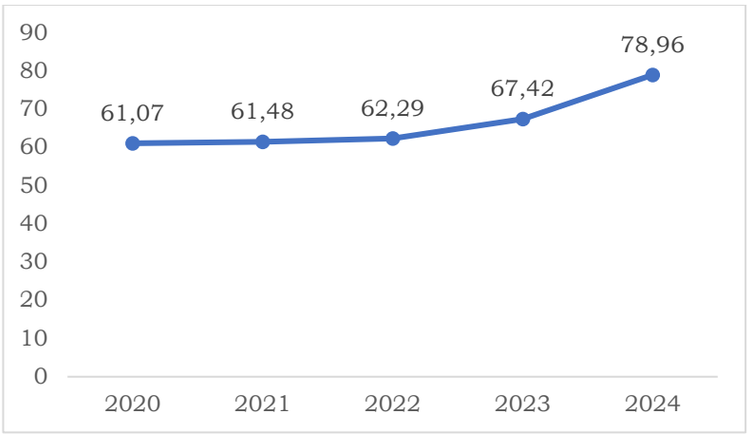

Gambar 2.1.99
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024
Sumber: RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kinerja reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,63 persen per tahun. Pada tahun 2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 61,07. Angka ini kemudian menunjukkan peningkatan menjadi 78,96 pada tahun 2024, yang mencerminkan kemajuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah tersebut.

6. Nilai AKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah wajib untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dalam bentuk pelaporan akuntabilitasinstansi pemerintah. Penilaian SAKIP Pemerintah Daerah dibagi menjadi tujuh kategori sebagai berikut: rentang nilai 0-30 kategori D; 30-50 kategori CC; 60-70 kategori B; 70-80 kategori BB; 80-90 kategori A; dan 90-100 kategori AA. Dasar penilaian tersebut mangacu pada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021, yakni meliputi empat komponen yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

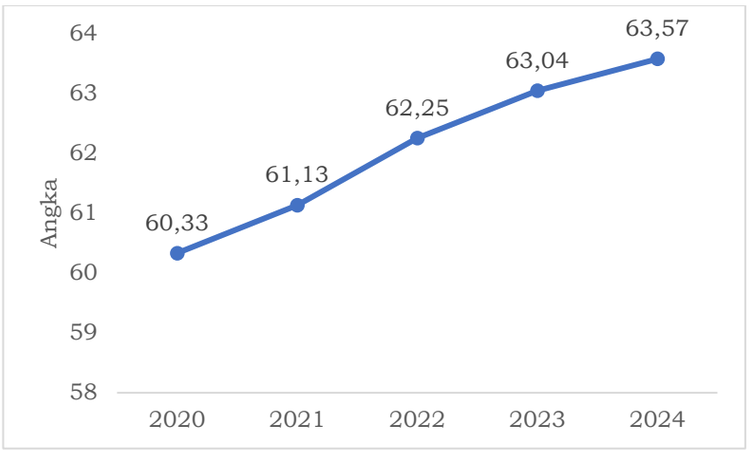

Gambar 2.1.100
Nilai AKIP Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045

Dalam rentang waktu antara tahun 2020 hingga 2024, capaian nilai AKIP Kabupaten Magelang menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Selama periode tersebut, Kabupaten Magelang berhasil mempertahankan nilai AKIP dalam kategori B. Pada tahun 2020, nilai AKIP tercatat sebesar 60,33, yang meningkat menjadi 63,57 pada tahun 2024.

7. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks profesionalitas ASN merupakan indikator statistik yang digunakan untuk mengukur kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya. Badan Kepegawaian Negara telah menetapkan rentang nilai untuk kategori penilaian tingkat profesionalitas ASN, yang terdiri atas empat kategori, yakni: (1) 91–100 (sangat tinggi); (2) 81–90 (tinggi); (3) 71– 80 (sedang); dan (4) 61 – 70 (sangat rendah).

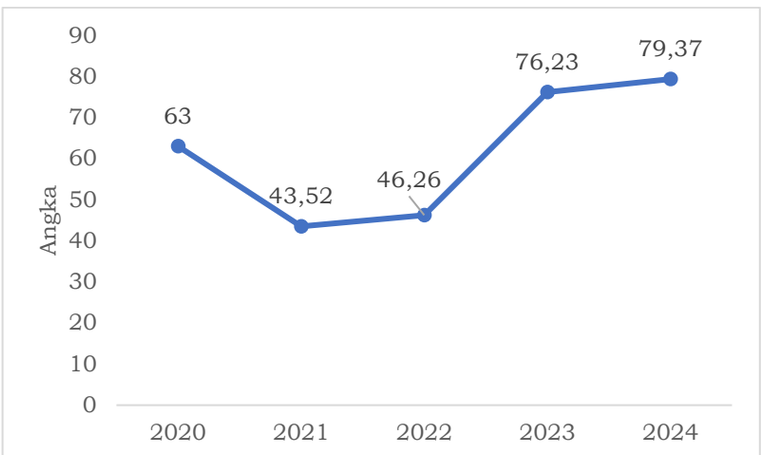

Gambar 2.1.101
Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024
Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Dalam lima tahun terakhir, indeks profesionalitas ASN di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, capaian indeks profesionalitas ASN sebesar 63,00, tetapi mengalami penurunan menjadi 43,52 pada tahun berikutnya. Kemudian, pada tahun-tahun berikutnya, nilai indeks kembali mengalami peningkatan secara bertahap hingga menjadi 79,37 pada tahun 2024. Meskipun mengalami kenaikan, nilai indeks profesionalitas ASN pada tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan karena kendala pengembangan kompetensi ASN yang tidak terfasilitasi dengan baik, terutama dalam hal rasionalisasi anggaran untuk diklat dan bintek. Data pengembangan kompetensi ASN dengan biaya non APBD juga belum diperbaharui sepenuhnya dalam database kepagawaian, mengakibatkan komponen kompetensi yang tidak terhitung dan nilai indeks profesionalitas ASN lebih rendah dari yang seharusnya. Namun, pada tahun 2023, peningkatan signifikan terjadi berkat efisiensi biaya dari penyelenggara diklat yang mendukung peningkatan jumlah peserta yang dikirim, serta integrasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (Sipgan) dengan Sistem Informasi ASN BKN yang mempercepat digitalisasi manajemen ASN dan mendukung peningkatan nilai indeks profesionalitas ASN. Selain tu, pengembangan kompetensi ASN difasilitasi secara virtual.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda disebutkan bahwa pada aspek pelayanan umum juga disajikan kinerja setiap urusan pemerintah daerah. Berikut merupakan jabaran mengenai indikator–indikator kinerja daerah berdasarkan fokus layanan urusan wajib dasar, fokus layanan urusan wajib non dasar, fokus layanan urusan pilihan, serta penunjang urusan.

8. Indeks Sistem Merit

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sementara itu, Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Dalam lima tahun terakhir, Indeks Sistem Merit di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,30 persen per tahun, yakni sebesar 0,60 di tahun 2020 meningkat menjadi 0,71 di tahun 2024. Meningkatnya capaian tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah

Kabupaten Magelang dalam memperkuat tata kelola manajemen ASN yang berbasis pada prinsip-prinsip profesionalisme dan keadilan. Peningkatan ini juga menunjukkan perbaikan berkelanjutan dalam praktik rekrutmen, pengembangan kompetensi, promosi, serta sistem evaluasi kinerja ASN yang lebih transparan dan akuntabel.

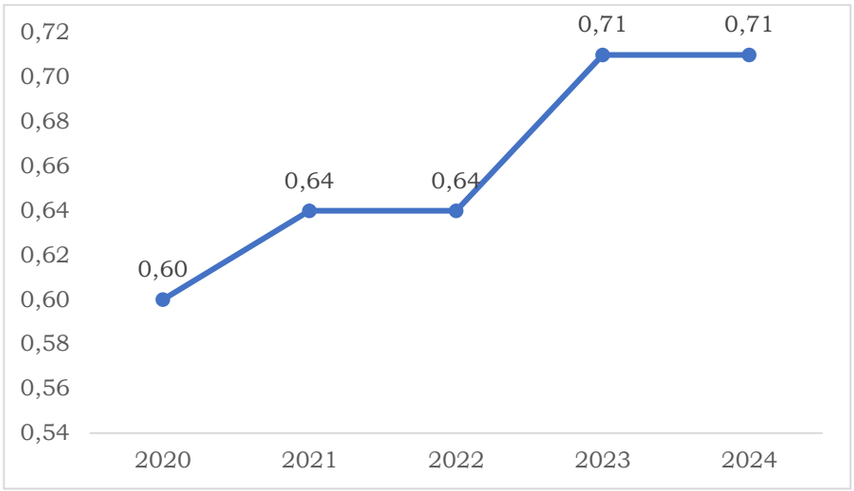

Gambar 2.1.102
Indeks Sistem Merit Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, 2025

9. Opini BPK

Berdasarkan Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bagian Penjelasan Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang—undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Magelang mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Capaian pemerintah kabupaten tersebut menunjukkan bahwa pelaporan keuangan yang dilakukan telah sesuai dan mencapai predikat yang baik. Opini WTP atas laporan keuangan tersebut merupakan rekomendasi dan tindak lanjut pemerintah daerah atas laporan keuangan BPK. Indikator ini menjadi penting karena menunjukkan bagaimana kesigapan pemerintah daerah atas temuan dan rekomendasi BPK terkait kegiatan yang dijalankan. Peningkatan dan konsistensi capaian tersebut dihasilkan dari keberhasilan pemerintah dalam merubah akuntansi pemerintahan menjadi akrual, sehingga laporan keuangan lebih transparan dan

mendukung sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya lain yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam konsistensi ketercapaian opini WTP atas laporan keuangan kabupaten/kota, yaitu melakukan perencanaan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan perundang—undangan.

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Pada sub aspek hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial dijelaskan tentang kondisi pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan hak asasi manusia. Selanjutnya, pembangunan demokrasi diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat. Pada sub aspek ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator seperti persentase penegakan Perda, cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat, cakupan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta indikator lainnya sesuai konteks daerah.

1. Persentase Penegakan Perda

Persentase penegakan Perda merupakan indikator yang dihitung melalui perbandingan antara jumlah penyelesaian penegakan Perda dengan jumlah pelanggaran Perda. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penegakan Peraturan Daerah di suatu wilayah.

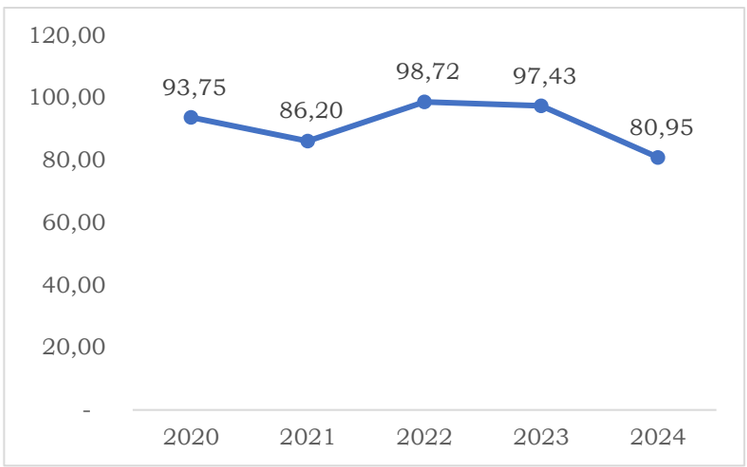

Gambar 2.1.103
Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magelang 2024, Diolah

Dalam lima tahun terakhir, capaian persentase penegakan Perda di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 3,60 persen per tahun. Pada tahun 2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 93,75 persen dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarannya menjadi 80,95 persen. Penurunan ini disebabkan oleh adanya keterbatasan personel pelaksana dan keterbatasan kewenangan dalam penindakan pelanggaran.

2. Cakupan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Cakupan ketentraman dan ketertiban umum merupakan indikator yang menggambarkan pelayanan ketentraman dan ketertiban masyarakat di suatu wilayah. Indikator ini dihitung dari rata–rata antara tiga aspek, yaitu cakupan pelayanan trantibumlinmas, cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana, serta cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat. Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat keamanan, ketertiban, serta kesiapan dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi potensi bencana dan kejadian–kejadian yang memengaruhi ketentraman umum.

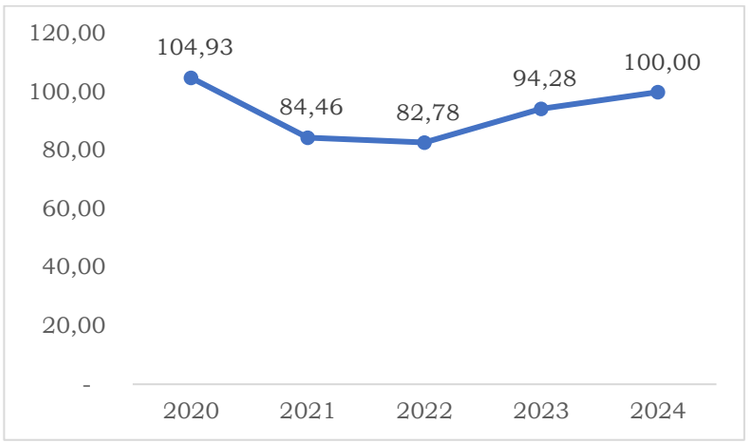

Gambar 2.1.104
Cakupan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magelang 2024, Diolah

Dalam lima tahun terakhir, capaian indikator ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif. Pada tahun 2020, nilai indikator ini tercatat sebesar 104,93 persen. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, nilai indikator tersebut mengalami penurunan yang drastis, masing-masing menjadi 84,46 persen dan 82,78 persen. Meskipun demikian, pada tahun 2024, indikator ini kembali menunjukkan peningkatan signifikan, yakni mencapai 100 persen, atau menunjukkan rata-rata

pertumbuhan sebesar 5,79 persen per tahun, yang menandakan adanya pemulihan dalam kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

3. Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Indikator cakupan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan cakupan penanganan perkara pelanggaran Peraturan Perundang–undangan Daerah. Indikator ini memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana pemerintah daerah mampu menanggapi dan menyelesaikan pelanggaran hukum yang terjadi di wilayahnya. Tingginya nilai pada indikator ini menunjukkan bahwa pelayanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berjalan efektif, sementara penurunan nilai dapat menandakan adanya tantangan atau hambatan dalam proses penegakan hukum dan penanganan pelanggaran di tingkat lokal. Adapun hambatan yang ada antara lain digitalisasi atau teknologi yang terus berkembang, belum terpenuhinya pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS), penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional dan penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019.

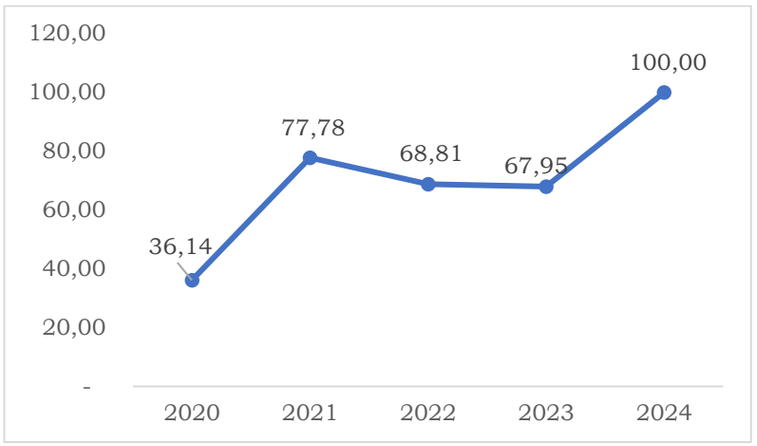

Gambar 2.1.105
Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magelang 2024, Diolah

Dalam lima tahun terakhir, capaian indikator cakupan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28,97 persen per tahun. Pada tahun 2020, capaian indikator ini tercatat sebesar 36,14 persen dan bertumbuh hingga menjadi 100 persen pada tahun 2024. Berdasarkan capaian tersebut, pemerintah daerah masih perlu untuk

meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pelayanan untuk menjaga ketertiban dan perlindungan masyarakat, khususnya untuk meningkatkan penegakan hukum dan penanganan pelanggaran di daerah.

4. Jumlah Kejadian Konflik SARA

Jumlah Kejadian Konflik SARA adalah banyaknya benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kesukuan dan golongan. Indikator jumlah kejadian Konflik SARA digunakan sebagai ukuran untuk memantau hubungan antar sesama umat beragama yang dilandasi pada toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai, sehingga dapat membentuk hubungan berbangsa dan bernegara dengan baik dan dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya tanpa adanya perbedaan. Tidak adanya kejadian konflik SARA, maka dapat diintepretasikan bahwa telah tingginya tingkat toleransi dan upaya dalam deradikalisasi telah berhasil.

5. Angka Kriminalitas

Dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan serta memberikan jaminan keamanan bagi investasi, pemerintah daerah di Kabupaten Magelang perlu mengambil langkah-langkah strategis yang efektif dalam mengendalikan tingkat kriminalitas. Angka kriminalitas ini merupakan nilai yang menunjukkan perkembangan angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Magelang dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan tabel berikut ini, terlihat bahwa jumlah tindak kriminal di Kabupaten Magelang menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2024, tercatat capaian angka kriminalitas sebesar 2,9, tertinggi dibandingkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yang meningkat secara bertahap dari 2,2 (2020); 2,46 (2021); 2,68 (2022); serta 2,71 (2023).

Tabel 2.1.41
Angka Kriminalitas Tertangani di Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kejahatan	Kasus	274	306	334	338	361
2	Penyelesaian kasus	Laporan	173	184	195	252	250
3	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.251.984	1.248.718	1.256.819	1.268.648	1.281.853
4	Rasio kriminalitas	Kasus/ 100.000 jiwa	22	24,6	26,8	27,1	29
5	Angka Kriminalitas	Kasus/ 100.000 jiwa	2,2	2,46	2,68	2,71	2,9

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Magelang, 2024

Kriminalitas yang semakin tinggi menjadi indikator belum terciptanya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan preventif dalam menanggulangi angka kriminalitas yang semakin tinggi. Selain itu, kegiatan kriminalitas erat kaitannya dengan kurang terserapnya tenaga kerja di dalam lapangan kerja. Tenaga kerja yang ada belum memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh penyedia lapangan kerja, sehingga mengakibatkan penduduk yang belum memiliki pekerjaan untuk berusaha mencari penghasilan dengan cara instan. Pemerintah diharuskan untuk berperan aktif dalam mengurangi angka kriminalitas, salah satunya dengan peningkatan kualitas penduduknya.

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Pada sub aspek ketangguhan diplomasi dan pertanahan berdaya gentar kawasan ini dijelaskan tentang ketangguhan diplomasi dan pertanahan berdaya gentar kawasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang, mengembangkan dan memelihara hubungan antardaerah yang konstruktif serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh daerah di kawasan, yang sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator seperti indeks daya saing daerah dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

1. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran IDSD mengadopsi kerangka konseptual yang sama dengan *Global Competitiveness Index* (GCI) dari *World Economic Forum* atau WEF (Schwab, 2019). Sebagai hasil adopsi dari konsep IDSD, Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) dikembangkan oleh Kemenristekdikti dan BRIN, dan telah diadopsi secara resmi di Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2020. Nilai PDSD Kabupaten Magelang dari tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi. Dari sebesar 3,259 pada tahun 2020 menjadi 3,199 pada tahun 2023. Adapun nilai IDSD pada tahun 2022 tercatat sebesar 2,97. Angka tersebut mengalami peningkatan secara bertahap hingga menjadi 3,27 pada tahun 2023 dan 3,65 pada tahun 2024.

Tabel 2.1.42
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

No	Pilar		2022	2023	2024
1	Institusi	Lingkungan Pendukung	4,28	4,48	4,74
2	Infrastruktur		1,97	2,54	3,57
3	Adopsi		3,09	4,28	4,43
4	Stabilitasi Ekonomi Makro		2,95	3,24	3,70
5	Kesehatan	Sumber Daya Manusia	4,15	4,16	4,11
6	Keterampilan		2,99	3,36	3,83
7	Pasar Produk		2,94	2,92	3,92
8	Pasar Tenaga Kerja		2,89	2,56	2,70
9	Sistem Keuangan	Pasar	2,55	2,06	1,65
10	Ukuran Pasar		1,55	4,51	4,53
11	Dinamisme Bisnis	Ekosistem Inovasi	5,00	3,08	3,96
12	Kapabilitas Inovasi		1,31	2,02	2,60
Total			**2,97**	**3,27**	**3,65**

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2024

Dari 12 pilar penyusun IDSD Kabupaten Magelang, diketahui bahwa beberapa pilar memperoleh skor tinggi (di atas 4), yakni pilar 1 (institusi) sebesar 4,74; pilar 10 (ukuran pasar) sebesar 4,53; pilar 3 (adopsi TIK) sebesar 4,43; dan pilar 5 (kesehatan) sebesar 4,11. Di sisi lain, terdapat pula beberapa pilar dengan skor rendah (di bawah 3), yaitu: pilar 9 (sistem keuangan) sebesar 1,65; pilar 12 (kapabilitas inovasi) sebesar 2,60; dan pilar 8 (pasar tenaga kerja) sebesar 2,70.

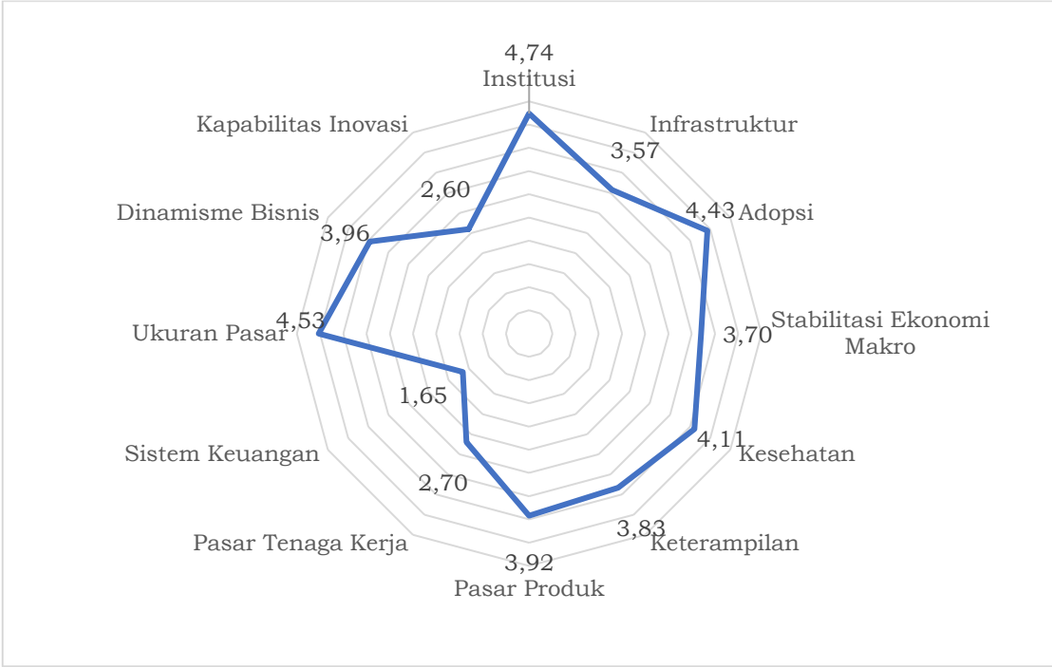

Gambar 2.1.106
Nilai Pilar IDSD Kabupaten Magelang Tahun 2024
Sumber: Rancangan Awal RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2025

Jika ditelusuri lebih lanjut berdasarkan komponen utamanya, tampak bahwa Kabupaten Magelang masih menghadapi tantangan pada komponen pasar dan ekosistem inovasi. Komponen pasar mencatat nilai sebesar 3,09, yang

merupakan hasil kombinasi dari pilar sistem keuangan (1,65) dan pilar ukuran pasar (4,53). Sementara itu, komponen ekosistem inovasi memperoleh nilai sebesar 3,28, yang ditopang oleh pilar dinamisme bisnis (3,96) dan pilar kapabilitas inovasi (2,6). Hal ini mengindikasikan bahwa tantangan utama daya saing Kabupaten Magelang terletak pada lemahnya sistem keuangan, rendahnya kapabilitas inovasi, serta belum optimalnya kondisi pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, penguatan pada aspek-aspek tersebut sangat penting untuk mendorong peningkatan daya saing daerah secara berkelnjutan.

2. Kapabilitas Inovasi

Kapabilitas inovasi menjadi salah satu komponen dari nilai IDSD. Kapabilitas inovasi mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah. Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Pilar IDSD ke–12 ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas–visi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Harapannya, akumulasi dan diversifikasi pengetahuan menawarkan peluang merekombinasi pengetahuan untuk menghasilkan ide inovatif dan model bisnis baru. Indikatornya meliputi keanekaragaman tenaga kerja, status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang.

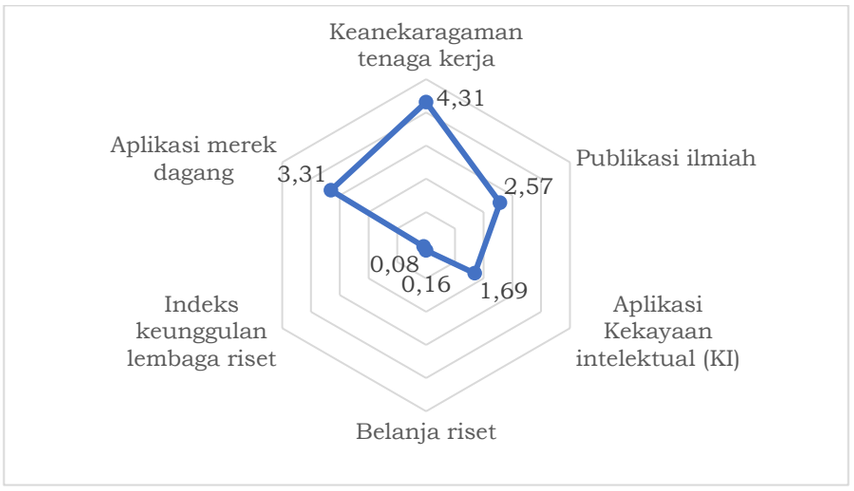

Gambar 2.1.107
Nilai Komponen Kapabilitas Inovasi Kabupaten Magelang Tahun 2023
Sumber: Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2023, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Diolah

Skor kapabilitas inovasi Kabupaten Magelang pada tahun 2022 sebesar 1,03 dan menunjukkan peningkatan secara bertahap menjadi 2,02 pada tahun 2023 dan 2,6 pada tahun 2024. Tetapi, data terakhir yang dapat dilihat komposisinya secara lebih detail adalah data pada tahun 2023. Jika dilihat dari komponen penyusunnya, dari tujuh komponen kapabilitas inovasi, terdapat empat komponen yang bukan merupakan ranah kewenangan pemerintah Kabupaten Magelang, yaitu status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, belanja riset, dan indeks keunggulan lembaga riset. Komponen pembentuk kapabilitas inovasi dengan skor tertinggi adalah keanekaragaman tenaga kerja, yakni dengan capaian 4,31. Hal tersebut mengindikasikan berarti bahwa proporsi jumlah penduduk bekerja laki–laki terhadap perempuan cukup berimbang. Indikator selanjutnya dengan nilai cukup bagus adalah aplikasi merk dagang, dengan capaian 3,31. Indikator ini dinilai dari jumlah KI merek dan indikasi geografis (IG) yang dihasilkan oleh pelaku riset (perguruan tinggi, lembaga riset daerah, dan industri) per satu juta penduduk. Capaian nilai yang cukup tinggi ini didukung oleh keberadaan Klinik Kekayaan Intelektual Kabupaten Magelang dengan *leading sector* Bappeda dan Litbangda.

Selanjutnya, indikator pembentuk kapabilitas inovasi yang nilainya masih lemah berdasarkan capaian pada tahun 2023 tersebut adalah belanja riset (0,16) dan indeks keunggulan lembaga riset (0,08). Belanja riset diukur berdasarkan total belanja riset yang dikeluarkan oleh pelaku riset (perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta industri) untuk melakukan kegiatan riset. Data belanja riset perguruan tinggi menggunakan data dana riset. Data belanja riset pemerintah daerah menggunakan anggaran fungsi penelitian dan pengembangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sementara itu, belanja riset industri menggunakan data belanja litbang hasil survei litbang industri BRIN. Indeks keunggulan Lembaga riset dihitung dari total skor indikator di klastering perguruan tinggi swasta dan negeri di Kemendikbud. Kedua indikator yang masih lemah ini sangat dipengaruhi keberadaan serta akreditasi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kabupaten Magelang.

2.1.4.4. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Merujuk pada peraturan tersebut, pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menanamkan

nilai-nilai keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia, sekaligus membangun karakter dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan evaluasi berkala terhadap berbagai indikator pendidikan guna menilai capaian serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi.

Tabel berikut menyajikan berbagai indikator utama yang digunakan untuk menilai capaian dan tantangan dalam sektor pendidikan. Data yang ditampilkan, baik dalam bentuk angka maupun persentase, memberikan gambaran tentang pencapaian dan tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan di suatu daerah, serta relevansinya dalam upaya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat. Terdapat berbagai aspek yang diukur, antara lain mulai dari tingkat partisipasi sekolah hingga kualifikasi guru, serta angka kelulusan dan literasi penduduk.

Tabel 2.1.43
Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun	Persen	64,84	72,98	72,21	72,24	71,54	2,49
2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Buah/ lembaga	844	844	836	808	808	-1,08
3	Angka melek huruf	Persen	94,53	92,53	92,86	94,38	94,84	0,08
4	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,78	7,79	7,81	7,82	7,83	0,16
5	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,54	12,55	12,58	12,61	12,62	0,16
6	Angka partisipasi kasar	angka (1-100)	85,47	87,25	85,98	87,61	86,54	0,31
7	Angka partisipasi murni	angka (1-100)	87,24	81,99	86,17	88,45	86,56	-0,20
8	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	87,67	83,89	91,47	91,23	91,03	0,94
9	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	71,66	78,29	80,88	85,67	82,09	3,46
10	Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	55,74	55,33	55,68	58,60	62,16	2,76
11	Angka partisipasi sekolah	Angka (1-100)	88,41	93,74	90,14	89,21	87,00	-0,40
12	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	99,59	99,96	99,79	99,54	99,02	-0,14
13	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	97,14	97,11	97,69	95,43	93,99	-0,82
14	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	68,50	84,15	72,95	69,87	67,97	-0,19
15	Angka putus sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,04	0,05	0,04	0,05	0,05	5,74
16	Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,23	0,10	0,10	0,20	0,20	-3,43
17	Angka kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
18	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
19	Angka Kelulusan (AL) SD Negeri/Swasta	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
20	Angka Kelulusan (AL) MI Negeri/Swasta	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
21	Angka Kelulusan (AL) SMP Negeri/Swasta	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
22	Angka Kelulusan (AL) MTs Negeri/Swasta	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
23	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	104,17	93,45	84,39	93,50	97,50	-1,64

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
24	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	100,58	86,92	72,42	86,70	97,00	-0,90
25	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI	Persen						
26	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTs	Persen						
27	Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	Persen	93,10	92,67	92,35	92,35	91,64	-0,39
28	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	99,78	100,00	99,82	94,38	94,84	-1,26
29	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	91,76	92,53	92,86	92,86	N/A	0,40
30	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	96,30	96,75	93,44	95,56	97,00	0,18
31	Guru memenuhi Kualifikasi S1/D4	Orang			7575	8179	8413	5,39
32	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	99,38	95,98	95,27	96,16	95,35	-1,03
33	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persen	92,18	92,78	90,47	94,42	92,74	0,15
34	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	81,63	67,70	68,84	72,24	81,51	-0,04
35	Jumlah Anak Tidak Sekolah	Anak		21.440	9.943	7.842	6.087	-34,28
36	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	Persen	26,75	30,40	34,05	37,70	37,70	8,96
37	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang)							
	Literasi membaca SD/sederajat	Persen				81,59	87,13	6,79
	Literasi membaca SMP/sederajat	Persen				86,15	89,22	3,56
	Numerasi SD/sederajat	Persen				65,09	80,35	23,44
	Numerasi SMP/sederajat	Persen				65,26	87,36	33,86

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025; Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024; Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2024; Badan Pusat Statistik Tahun 2024; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2024; Survei Sosial Ekonomi Nasional; Data Pokok Pendidikan

Dari data tersebut, diketahui bahwa sejumlah indikator pendidikan Kabupaten Magelang menunjukkan angka pertumbuhan yang positif. Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun, misalnya, mengalami lonjakan signifikan dari 64,84 persen pada 2020 menjadi 71,54 persen pada 2024 dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai 2,49 persen. Angka partisipasi murni pada jenjang SMP/MTs/Paket B juga meningkat pesat, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 3,46 persen, mencapai 82,09 persen pada 2024 dibandingkan dengan 71,66 persen pada 2020. Begitu juga dengan angka partisipasi murni pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C yang menunjukkan peningkatan stabil dengan angka 62,16 persen pada 2024, naik dari 55,74 persen pada 2020. Peningkatan juga terlihat pada jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4, dengan rata-rata pertumbuhan 5,39 persen per tahun. Sementara itu, angka literasi membaca di SD dan SMP menunjukkan tren positif, dengan peningkatan literasi membaca SD/sederajat mencapai 10,50 persen per tahun dari 55,74 persen pada 2022 ke 68,06 persen pada 2024.

Namun, terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan. Indikator angka partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTs/Paket B mengalami penurunan signifikan dari 97,14 persen pada 2020 menjadi 93,99 persen pada 2024. Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A juga mengalami sedikit penurunan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun tetap berada di atas 90 persen. Selain itu, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs menunjukkan penurunan dengan rata-rata tahunan 1,64 persen, yang menunjukkan penurunan jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang berikutnya.

Secara keseluruhan, Kabupaten Magelang menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa indikator pendidikan, terutama pada angka partisipasi sekolah, angka kelulusan, dan angka literasi. Namun, tantangan masih ada pada beberapa indikator, penurunan angka partisipasi sekolah SMP/MTs serta penurunan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan aspek pemerataan akses pendidikan dan kualitas pengajaran untuk memastikan pencapaian yang lebih inklusif.

B. Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan daerah, yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, kecukupan gizi, serta ketersediaan tenaga medis yang memadai memiliki peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. oleh karena itu, pemantauan terhadap indikator kesehatan sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan memastikan terwujudnya layanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tahun 2023 dan 2024 menjadi tahun penting dengan implementasi antropometri kit di seluruh posyandu untuk pemantauan pertumbuhan balita, serta peningkatan akurasi perhitungan angka kematian ibu dan bayi melalui sistem MPDN dan pencocokan data dengan domisili di Kabupaten Magelang. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada berbagai aspek layanan kesehatan, termasuk penurunan cakupan pemeriksaan penyakit menular seperti TBC, diare, dan HIV/AIDS. Namun, langkah-langkah strategis telah diterapkan untuk memitigasi dampak tersebut dan meningkatkan kembali cakupan pelayanan. Selain itu, perbedaan metode perhitungan statistik antara tahun 2018-2022 dan 2023 pada beberapa indikator, seperti rasio dokter dan tenaga medis per

penduduk, mencerminkan upaya menuju pengukuran data yang lebih akurat dan berbasis standar terbaru.

Tabel 2.1.44
Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Usia harapan hidup	Tahun	73,97	74,13	74,28	74,44	74,68	0,24
2	Persentase balita gizi buruk	Persen	0,03	0,08	0,09	0,07	0,10	35,12
3	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	7,07	8,04	6,91	6,15	5,61	-5,62
4	Cakupan desa siaga aktif*	Persen	100	100	79.11	85,75	-	-5,00
5	Persentase balita *stunting*	Persen	20,23	14,76	13,11	14,64	14,58	-7,86
6	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	4,40	5,20	6,50	7,66	10,61	24,61
7	Angka kelangsungan hidup bayi	Per 1000 KH	5,60	4,80	3,50	2,34	-	-25,24
8	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	5,28	6,10	7,90	8,80	2,39	-17,98
9	Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	3,40	3,70	4,15	5,77	8,64	26,26
10	Angka kematian Ibu per 1000 kelahiran hidup	Per 100.000 kelahiran	41,07	147,10	97,41	87,36	90,96	21,99
11	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan	Kasus	7,00	24,00	15,00	13,00	12,00	14,42
12	Rasio posyandu per satuan balita	Per 1.000 balita	35,28	40,00	35,00	32,08	32,84	-1,78
13	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per 30.000 penduduk		0,09	0,10	0,10	3,34	233,63
14	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	0,00462	0,00460	0,00455	0,00450	0,00523	3,19
15	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	11,00	13,00	15,00	0,11	0,24	-61,57
16	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	84,00	198,00	81,00	0,23	0,37	-74,24
17	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	143,70	143,70	153,48	193,87	218,08	10,99
18	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
19	Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	Persen	83,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4,77
20	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
21	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	83,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4,77
22	Non polio *AFP rate* per 100.000 penduduk	Persen	0,00	8,00	9,00	7,52	14,78	22,70
23	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	9,12	7,58	14,51	25,16	98,85	81,45
24	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis	Persen	25,00	36,20	33,00	48,02	62,83	25,91
25	Tingkar prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	50,93	42,33	70,42	76,81	93,02	16,25
26	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	1,92	1,91	2,79	2,94	2,77	9,60
27	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
28	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	Persen	88,67	83,06	85,21	80,61	83,00	-1,64
29	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
30	Penderita diare yang ditangani	Persen	28,73	21,26	32,82	40,05	97,59	35,76
31	Angka kejadian malaria	Per 100.000 penduduk	0,00	3,74	1,25	0,53	0,82	-39,70
32	Tingkat kematian akibat malaria	Per 1.000 penduduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
34	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	Persen	0,01	0,02	0,02	0,03	0,02	9,72
35	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	0,00	0,15	0,40	1,47	1,35	108,01
36	Cakupan kunjungan bayi	Persen	85,00	99,60	98,10	99,95	99,20	3,94
37	Cakupan puskesmas	Persen	138,10	138,10	138,10	138,10	138,10	0,00
38	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	16,40	16,40	16,40	17,47	16,94	0,81
39	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	Persen	94,00	94,00	100,00	94,51	95,25	0,33
40	Cakupan pelayanan nifas	Persen	98,90	98,70	96,60	99,90	99,05	0,04
41	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	109,20	108,50	238,75	146,59	168,38	11,43
42	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	54,90	82,00	94,02	97,42	99,11	15,91
43	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	17,00	87,20	97,60	95,17	98,97	55,33
44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100,00	100,00	100,00	83,33	100,00	0,00
45	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epiemiologi <24 jam	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
46	Angka kesakitan	Persen	41,19	40,87	43,85	39,78	9,12	-31,40
47	Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
48	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit	Persen	76,19	72,55	73,11	75,00	93,94	5,38
49	Persentase Kualitas Pelayanan Kesehatan	Persen	25,00	30,00	56,00	58,00	81,32	34,30
50	Predikat kelulusan akreditasi rumah sakit	Akreditasi (dasar, madya, utama, paripurna)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	Paripurna (Bintang 5)	
51	Persentase posyandu aktif	Persen	86,26	86,20	89,49	100,00	100,00	3,76
52	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,128	0,129	0,15	0,21	0,25	18,22
53	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	79,19	80,7	81,69	98,09	98,18	5,52
54	Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit	Unit	286	551	478	661	735	
55	Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit	Unit	N/A	N/A	N/A	118	43	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025; Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025; Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2019-2024; PMK 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas; Aplikasi SISDMK
*Keterangan: *) Capaian untuk indikator Cakupan Desa Siaga Aktif tidak tersedia pada tahun 2024 karena Program Desa Siaga telah dihapus*

Pada periode 2020 hingga 2024, sejumlah indikator kesehatan di Kabupaten Magelang menunjukkan perkembangan positif yang signifikan. Usia Harapan Hidup (UHH) terus meningkat secara bertahap, mencerminkan perbaikan kualitas hidup dan layanan kesehatan dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 0,24 persen. Cakupan balita pneumonia

mengalami lonjakan drastis hingga mencapai 98,85 persen pada 2024, yang menandakan keberhasilan program penanganan penyakit pneumonia pada balita. Persentase kualitas pelayanan kesehatan juga meningkat signifikan, tercatat mencapai 81,32 persen pada tahun 2024, mencerminkan perbaikan dalam kualitas layanan medis yang disediakan. Selain itu, indeks keluarga sehat juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari 0,128 pada 2020 menjadi 0,25 pada 2024, menunjukkan perbaikan dalam kesehatan keluarga secara keseluruhan.

Meskipun demikian, tidak semua indikator kesehatan menunjukkan tren yang membaik. Angka Kematian Bayi (AKB) meningkat drastis dari 4,40 pada 2020 menjadi 10,61 pada 2024. Angka kematian neonatal juga meningkat tajam dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 26,26 persen, yang menunjukkan tantangan cukup besar dalam penanganan kematian bayi baru lahir. Selain itu, rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan penurunan yang sangat tajam, dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -74,24 persen, mencerminkan kekurangan tenaga medis yang signifikan. Angka kesakitan juga menunjukkan penurunan drastis, dengan penurunan yang cukup besar hingga mencapai 31,40 persen.

Untuk memahami kondisi tersebut secara lebih utuh, perlu ditinjau pula dari aspek ketersediaan infrastruktur dan layanan kesehatan. Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Magelang yang mencapai 1.341.447 jiwa, kebutuhan minimal puskesmas sesuai standar satu unit per 30.000 jiwa (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024) adalah sebanyak 45 unit. Saat ini terdapat 29 puskesmas utama yang tersebar di 21 kecamatan sehingga seluruh kecamatan setidaknya memiliki satu puskesmas. Namun, dari segi kuantitatif, rasio antara puskesmas dan penduduk masih belum ideal, yaitu satu puskesmas untuk sekitar 46.256 jiwa. Selisih kebutuhan ini akan diperkuat dengan fungsi 25 puskesmas pembantu melalui skema Integrasi Layanan Primer (ILP). Masih mengacu pada referensi yang sama, untuk layanan kesehatan dasar anak, Kabupaten Magelang memiliki 2.487 posyandu dan 75.470 balita. Dengan standar satu posyandu per 1.000 balita, maka kebutuhan minimal adalah 75 unit. Rasio posyandu terhadap balita di Kabupaten Magelang pada tahun 2024 adalah 32,84 posyandu per 1.000 balita, yang menunjukkan bahwa jumlah posyandu sudah memenuhi bahkan jauh melampaui standar pelayanan dasar bagi balita.

Namun demikian, tantangan masih terlihat pada layanan kesehatan rujukan dan ketersediaan tenaga medis. Terdapat tujuh rumah sakit di

Kabupaten Magelang dengan rincian empat rumah sakit milik pemerintah daerah (dua unit kelas C dan dua unit kelas D) serta tiga rumah sakit swasta (dua unit kelas C dan satu unit kelas D), menghasilkan rasio 0,005 rumah sakit per 1.000 penduduk, masih jauh di bawah standar satu per 1.000. Lebih lanjut, daya tampung rumah sakit di Kabupaten Magelang adalah 735 tempat tidur. Jika dibandingkan dengan rasio penduduk menurut *World Health Organization* (WHO), yang menetapkan 1:1.000 (satu berbanding seribu) untuk jumlah penduduk, dengan total populasi di Kabupaten Magelang sebanyak 1.341.477 jiwa, menunjukkan bahwa kebutuhan tempat tidur di Kabupaten Magelang seharusnya sebanyak 1.342 tempat tidur. Kesenjangan kebutuhan tempat tidur akan dioptimalkan melalui penambahan tempat tidur pada rumah sakit eksisting serta penambahan rumah sakit baru, baik rumah sakit milik pemerintah maupun rumah sakit swasta.

Secara keseluruhan, analisis indikator ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian dan tantangan sektor kesehatan di Kabupaten Magelang. Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan pada beberapa indikator, masih terdapat tantangan besar pada indikator lainnya yang memerlukan perhatian serius terkait kematian bayi dan neonatal, kekurangan tenaga medis, serta keterbatasan rumah sakit dan fasilitas rujukan lainnya. Perbaikan dalam indikator-indikator tersebut sangat penting untuk mencapai kesehatan yang lebih merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Magelang.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas infrastruktur serta tata kelola ruang yang berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai tidak hanya mendukung konektivitas dan aksesibilitas suatu wilayah, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta mitigasi risiko bencana. Pada umumnya, hambatan pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Magelang pada periode ini meliputi: (1) belum optimalnya penyelenggaraan jalan; (2) belum optimalnya pengelolaan sumberdaya air; (3) belum optimalnya penataan bangunan gedung; (4) belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan; (5) belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum; (6) belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik; (7) belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase; (8) belum

optimalnya pengembangan permukiman; (9) belum optimalnya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan TPA, TPST, SPA, TPS3R, TPS; (10) belum optimalnya pengembangan jasa konstruksi; (11) belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang; serta (12) belum optimalnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Namun demikian, dalam konteks infrastruktur dan pelayanan publik, Kabupaten Magelang tidak hanya menghadapi berbagai hambatan dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, tetapi juga menghadapi tantangan yang signifikan terkait kondisi jalan, sumber daya air, dan pengelolaan infrastruktur vital lainnya.

Tabel 2.1.45
Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	Persen	77,30	77,30	72,67	71,17	63,80	-4,68
2	Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota	Persen	88,88	88,75	88,76	89,33	86,91	-0,56
3	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Km/jiwa	0,00077	0,00077	0,00077	0,00077	0,00077	0,00
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen	N/A	N/A	42,43	41,84	41,84	-0,70
5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	100,00	90,36	91,19	91,52	92,28	-1,99
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	1,591	1,517	1,61	1,657	1,51	-1,30
7	Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik	Persen	100,00	90,36	91,19	91,52	92,28	-1,99
8	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	15,60	15,60	15,60	74,19	75,89	48,51
9	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	Persen	50,37	50,37	50,37	51,00	51,00	0,31
10	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Persen	70,25	70,88	70,88	70,88	71,92	0,59
11	Luas jaringan irigasi	Hektare	35.662,45	35.662,45	35.662,45	35.662,45	35.662,45	-
12	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	59,20	
13	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	89,03	90,21	91,42	92,49	94,34	1,46
14	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan, dan perdesaan	Persen	89,03	90,21	91,42	92,49	94,34	1,46
15	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	17,10	
16	Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	Persen	69,90	73,42	63,94	80,60	88,67	6,13
17	Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah	Persen	61,90	63,72	73,38	82,78	96,11	11,63
18	Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah berkelanjutan	Persen	66,60	67,57	71,93	74,29	82,76	5,58

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2024

Terdapat beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Akses penduduk terhadap air minum meningkat dari 89,03 persen pada 2020 menjadi 94,34 persen pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 1,46 persen. Persentase drainase dalam kondisi baik atau pembuangan aliran air tidak tersumbat juga menunjukkan lonjakan yang cukup drastis dari sebesar 15,60 persen pada tahun 2022 menjadi 75,89 persen pada tahun 2024 atau dengan rata-rata pertumbuhan 48,51 persen. Selain itu, cakupan pembangunan infrastruktur wilayah menunjukkan tren positif yang signifikan, meningkat dari 61,90 persen pada 2020 menjadi 96,11 persen pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 11,63 persen. Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang juga mengalami peningkatan yang solid, dari 69,90 persen pada 2020 menjadi 88,67 persen pada 2024.

Namun, beberapa indikator menunjukkan penurunan yang perlu mendapatkan perhatian serius, terutama pada kondisi jalan dan sanitasi. Prporsi panjang jalan dalam kondisi baik, yang pada 2020 mencapai 77,30 persen, menurun menjadi 63,80 persen pada 2024, dengan penurunan rata-rata tahunan sebesar 4,68 persen. Selain itu, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman mengalami penurunan, dari 100 persen pada 2020 menjadi 92,28 persen pada 2024. Secara menyeluruh, meskipun terdapat pencapaian positif pada beberapa indikator, penurunan pada sektor lain yang mengalami penurunan memerlukan perhatian lebih dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.1.46
Capaian Indikator Urusan Penataan Ruang Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Persen	39,27	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	Luasan RTH publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota/kawasan perkotan	Persen	39,59	39,59	39,59	N/A	N/A	
3	Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	Persen	39,59	39,59	39,59	N/A	N/A	
4	Jumlah IMB yang dikeluarkan	Buah	432	324	76	169	256	-12,26

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2024

Dalam konteks penataan ruang, dari indikator rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, luasan RTH publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota/kawasan perkotan, serta persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan yang masing-masing memperoleh capaian sebesar 39,27 persen, 39,59 persen, dan 39,59 persen menunjukkan stagnasi dalam perluasan

RTH serta banyaknya alih fungsi lahan pertanian teknis ke non pertanian tidak berizin, yakni hanya menunjukkan capaian kurang dari 50 persen selama lima tahun terakhir. Jumlah IMB yang dikeluarkan juga mengalami penurunan signifikan dari 432 pada tahun 2020 menjadi 256 pada tahun 2024. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi perencanaan dan pengawasan yang lebih ketat guna memastikan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel di bawah ini menyajikan beberapa indikator terkait ketersediaan dan kelayakan hunian di Kabupaten Magelang selama periode lima tahun terakhir. Beberapa permasalahan yang memengaruhi besaran persentase rumah layak huni di antaranya yaitu: (1) belum optimalnya pengembangan perumahan; (2) belum optimalnya pencegahan permukiman kumuh; (3) belum optimalnya penanganan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan; (4) belum optimalnya layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman; serta (5) belum optimalnya pengembangan kawasan permukiman layak.

Tabel 2.1.47
Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Rasio rumah layak huni	Persen	88,57	27,50	27,64	27,65	27,09	-15,37
2	Persentase rumah layak huni	Persen	88,57	94,91	95,39	95,92	97,87	2,325
3	Rasio permukiman layak huni	Persen	N/A	N/A	98,59	98,63	98,65	0,03
4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	88,57	94,91	95,39	95,92	97,87	2,325
5	a. Persentase lingkungan pemukiman kumuh (Luasan kumuh berdasarkan RP2KPKP 2017)	Persen	0,07	0,00				0,07
	b. Persentase lingkungan pemukiman kumuh (Luasan kumuh berdasarkan SK Bupati Tahun 2022)	Persen	-	-	0,22	0,22	0,21	0,005
6	a. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (Luasan kumuh berdasarkan RP2KPKP 2017)	Persen	79,98	100,00	-	-	-	20,02
	b. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (Luasan kumuh berdasarkan SK Bupati Tahun 2022)	Persen			0,00	2,89	4,13	2,065
7	Persentase luasan kawasan kumuh dibawah 10 Ha (Luasan kumuh berdasarkan SK Bupati Tahun 2022)	Persen			0,00	0,00	3,20	1,6
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	N/A	N/A	2,31	2,22	2,22	-0,045

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
9	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
10	Cakupan hunian layak dan berkualitas	Persen	67,73	73,11	94,82	95,09	95,43	6,925
11	Rumah tangga dengan akses hunian layak	Persen	N/A	N/A	N/A	96,22	96,47	0,25

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang, 2025; SK Kumuh Nomor 180.182/217/KEP/07/ 2022 Tanggal 2 November 2022; Hasil Olahan, 2024

Selama periode 2020 hingga 2024, sejumlah indikator yang berkaitan dengan permukiman menunjukkan peningkatan yang signifikan. Salah satu pencapaian paling mencolok terlihat pada persentase rumah yang memenuhi syarat layak huni, yang naik dari 88,57 persen pada tahun 2020 menjadi 97,87 persen pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 2,53 persen. Tren serupa juga terlihat pada indikator cakupan hunian layak dan berkualitas, yang meningkat tajam dari 67,73 persen pada 2020 menjadi 95,43 persen pada 2024, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 8,95 persen, menjadikannya sebagai indikator dengan pertumbuhan positif tertinggi. Adapun cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) tetap konsisten pada capaian 100 persen selama lima tahun terakhir.

Di sisi lain, terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan signifikan dan memerlukan perhatian lebih dalam perencanaan ke depan. Rasio rumah layak huni menurun drastis dari 88,57 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 27,09 persen pada tahun 2024, dengan rata-rata penurunan tahunan sebesar -25,63 persen. Penurunan tajam ini sebagian besar disebabkan oleh perubahan metodologi penghitungan dari yang berbasis jumlah rumah (2020) menjadi berbasis jumlah penduduk (2021 hingga 2024; Permendagri 86/2017)

Secara umum, capaian indikator permukiman di Kabupaten Magelang menunjukkan arah perbaikan, terutama dalam aspek peningkatan kualitas hunian dan lingkungan permukiman. Namun demikian, keberhasilan ini masih menghadapi tantangan metodologis dan konsistensi data, seperti yang tercermin dari perbedaan formula penghitungan antartahun dan antara dokumen pusat dan daerah. Hal ini berimplikasi pada kebutuhan harmonisasi indikator antarregulasi serta penguatan sistem pencatatan dan pelaporan di tingkat daerah.

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Persoalan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan aspek penting yang dihadapi oleh Kabupaten Magelang, yang mencerminkan upaya pemerintah dalam memastikan keamanan serta memberikan perlindungan kepada warga. Dalam konteks manajemen ketertiban umum, kebijakan yang adaptif dan berbasis data berperan penting dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks, yang dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi serta urbanisasi yang pesat. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat dalam menegakkan peraturan dan memaksimalkan kerja sama antarlembaga sangat krusial untuk mempertahankan stabilitas sosial.

Tabel 2.1.48
Capaian Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	10,00	10,76	9,66	98,01	98,01	76,94
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	Persen	80,00	66,67	79,31	148,04	100,00	5,74
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	31,88	31,88	31,88	31,88	92,35	30,46
4	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	79,12	78,70	85,22	81,69	88,82	2,93
5	Persentase Penegakan PERDA	Persen	93,75	86,20	98,72	97,43	80,95	-3,60
6	Cakupan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	persen	104,93	84,46	82,78	94,28	100,00	-1,20
7	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja	Per 10.000 Penduduk	129,99	130,55	131,26	133,07	57,89	-18,31
8	Cakupan penegakan hukum	Persen	93,75	94,40	83,94	81,69	80,95	-3,60
9	Cakupan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persen	36,14	77,78	68,81	67,95	100,00	28,97
10	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
11	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
12	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
13	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana	Persen	100,00	97,75	98,50	100,00	100,00	-
14	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	Persen	122,09	104,98	127,98	103,14	114,92	-1,50
15	Indeks Risiko Bencana	Angka	71,16	71,16	77,90	86,44	97,42	8,17
16	Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat	Persen	98,95	98,00	98,50	99,00	99,50	0,14
17	Persentase pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat	Persen	N/A	N/A	98,50	99,00	99,50	0,51
18	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kegiatan	9	9	9	9	9	-

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
19	Persentase pembinaan partai politik dan koordinasi kelembagaan pemerintah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
20	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kegiatan	9	9	9	9	9	-
21	Persentase pembinaan partai politik dan koordinasi kelembagaan pemerintah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
22	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	12	12	0	12	12	-
23	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kasus	0	0	0	0		

Sumber: Badan Pusat Statistik; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang; Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional; Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025; Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Selama periode 2020 hingga 2024, sejumlah indikator menunjukkan peningkatan yang signifikan, yang mencerminkan efektivitas kebijakan serta koordinasi lintas sektor. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) mengalami peningkatan drastis dari 9,66 persen pada tahun 2022 menjadi 98,01 persen pada tahun 2023 dan 2024. Sementara itu, cakupan pelayanan bencana kebakaran mengalami lonjakan dari 31,88 persen pada tahun 2022 menjadi 92,35 persen pada tahun 2024. Peningkatan signifikan juga terlihat dalam cakupan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum yang mencapai 100 persen pada tahun 2024, hal ini menandakan efektivitas sinergi antarinstansi. Dalam ranah kebangsaan dan politik, cakupan peningkatan wawasan kebangsaan meningkat dari 98 persen pada tahun 2021 menjadi 99,50 persen pada tahun 2024. Selain itu, persentase pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat juga meningkat dari 98,50 persen pada tahun 2022 menjadi 99,50 persen pada tahun 2024.

Di sisi lain, terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan yang mengkhawatirkan. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk mengalami penurunan tajam dari 133,07 pada tahun 2023 menjadi 57,89 pada tahun 2024. Penurunan capaian kinerja juga tampak pada indikator persentase penegakan peraturan daerah, yang menurun dari 98,72 persen pada tahun 2022 menjadi 80,95 persen pada tahun 2024. Demikian pula, cakupan penegakan hukum mengalami penurunan dari 94,40 persen pada tahun 2021 menjadi 80,95 persen pada tahun 2024, yang mengindikasikan tantangan dalam kapasitas penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Adapun ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana mengalami fluktuasi, dengan penurunan dari 127,98 persen pada tahun 2022 menjadi 103,14 persen pada tahun 2023, sebelum kembali mengalami peningkatan menjadi 114,92 persen pada tahun 2024. Sementara itu, Indeks Risiko Bencana (IRB) meningkat dari

71,16 pada tahun 2020 menjadi 86,44 pada tahun 2023, yang menunjukkan peningkatan risiko bencana akibat kapasitas daerah yang belum optimal.

Berdasarkan evaluasi terhadap tren pencapaian indikator dalam lima tahun terakhir, peningkatan pada beberapa indikator mencerminkan keberhasilan kebijakan daerah dalam membangun sistem perlindungan masyarakat, ketertiban umum, serta edukasi kebangsaan. Namun, penurunan pada beberapa indikator yang lain menandakan perlunya langkah-langkah strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur dan meningkatkan efektivitas kebijakan mitigasi serta penegakan hukum. Optimalisasi perencanaan dan sinergi antarinstansi merupakan kunci dalam memastikan keberlanjutan peningkatan capaian indikator-indikator tersebut di masa mendatang.

F. Sosial

Aspek sosial merupakan salah satu indikator utama dalam pembangunan yang mencakup elemen-elemen kemasyarakatan, meliputi sistem kehidupan individu maupun kelompok dalam masyarakat, serta struktur sosial, organisasi, nilai-nilai, dan tujuan sosial yang hendak dicapai. Pembangunan sosial dirancang sebagai kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pembangunan sosial memfokuskan perhatian pada pemenuhan kebutuhan fisik dan sosial masyarakat, dengan orientasi pada keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan secara merata. Kualitas kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera dapat diukur melalui berbagai pendekatan yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Tabel 2.1.49
Capaian Indikator Urusan Sosial Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	78,24	78,65	81,63	75,32	78,57	0,11
2	Persentase PPKS yang tertangani	Persen	104,52	86,22	88,54	88,59	85,89	-4,79
3	Persentase penurunan PPKS	Persen	0,63	0,62	0,57	0,58	1,15	16,24
4	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	78,24	78,65	81,57	75,22	78,57	0,11
5	Persentase PPKS lainnya di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	104,52	37,36	0,05	0,17	0,05	-85,21
6	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
7	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial*	Persen	N/A	N/A	100,00	100,00	N/A	

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
8	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
9	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100,00	0,00	5,00	8,20	N/A	-100,00
10	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	6,97	0,00	1,09	5,17	5,34	-6,44
11	Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi	Unit	39,00	42,00	44,00	44,00	43,00	2,47

Sumber: Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2024; Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025
*Keterangan : *) Data WKSBM sudah tidak tersedia*

Pada periode 2020 hingga 2024, beberapa indikator yang terkait dengan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Magelang menunjukkan adanya perkembangan yang cukup positif. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tetap stabil, dengan sedikit peningkatan dari 78,24 persen pada 2020 menjadi 78,57 persen pada 2024. Persentase penurunan PPKS juga menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai 1,15 persen pada 2024, yang menandakan adanya keberhasilan dalam penurunan jumlah PPKS. Begitu pula dengan persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial, yang tetap konsisten di angka 100 persen sepanjang periode tersebut, menunjukkan kualitas pelayanan sosial yang tinggi di panti-panti sosial. Selain itu, persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial mencapai 100 persen pada 2023 dan 2024.

Namun, sejumlah indikator lainnya menunjukkan penurunan yang signifikan. Persentase PPKS yang tertangani mengalami penurunan drastis dari 104,52 persen pada 2020 menjadi 85,89 persen pada 2024. Persentase PPKS lainnya di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar juga mengalami penurunan yang sangat tajam, dari 104,52 persen pada 2020 menjadi hanya 0,05 persen pada 2024. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan negatif -6,44 persen per tahun. Selain itu, persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap mengalami penurunan tajam, turun dari 100 persen pada 2020 menjadi 8,20 persen pada 2023.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan, namun sejumlah indikator penting yang berkaitan dengan penanganan dan pemberdayaan PPKS serta kelompok rentan menunjukkan penurunan yang memprihatinkan. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus pada peningkatan efektivitas penanganan PPKS, distribusi sosial yang lebih merata, serta peningkatan jaminan sosial bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Kebijakan yang mendukung penguatan infrastruktur sosial dan kesiapan tanggap darurat juga harus diperkuat untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih inklusif dan merata.

2.1.4.5. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

A. Tenaga Kerja

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang Perlindungan Tenaga Kerja, tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap individu yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Magelang, aspek ketenagakerjaan menjadi fokus penting dalam perencanaan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui perencanaan yang terintegrasi, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja yang produktif dan berkualitas, serta meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja lokal.

Tabel 2.1.50
Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persen	2,19	2,07	0,99	0,017	0,02	-69,13
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	14,72	39,16	59,00	69,00	41,33	29,45
3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	N/A	N/A	40,00	46,19		15,48
4	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
8	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	95,73	94,97	95,03	95,58	96,45	0,19

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persen	83,37	95,87	84,90	77,05		-2,59

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025; Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2024

Pada periode 2020 hingga 2024, indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang menunjukkan perkembangan yang positif. Angka sengketa antara pengusaha dan pekerja mengalami penurunan signifikan, dari 2,19 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 0,02 persen pada tahun 2024. Persentase pencari kerja yang berhasil ditempatkan meningkat secara konsisten, dari 14,72 persen pada tahun 2020 menjadi 41,33 persen pada tahun 2024, yang menandakan semakin terbukanya peluang kerja di daerah ini. Program jamsostek juga mengalami pertumbuhan yang pesat, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 15,48 persen. Sementara itu, perselisihan antara buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat, serta kewirausahaan mencapai 100 persen, menegaskan komitmen daerah dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Tingkat kesempatan kerja juga mendekati capaian optimal, yaitu sebesar 96,45 persen pada tahun 2024. Adapun cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan tren fluktuatif dengan penurunan signifikan dari 95,87 persen pada tahun 2021 menjadi 77,05 persen pada 2023, mengindikasikan potensi ketidakstabilan dalam perlindungan tenaga kerja. Secara keseluruhan, upaya peningkatan kesempatan kerja dan pengelolaan hubungan industrial di Kabupaten Magelang telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam lima tahun terakhir.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan elemen krusial dalam pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak kelompok rentan. Kabupaten Magelang telah mengupayakan berbagai program untuk meningkatkan partisipasi perempuan di berbagai sektor serta memperkuat layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Berbagai indikator menunjukkan capaian yang memuaskan, terutama dalam penyediaan layanan bagi korban kekerasan serta pemenuhan hak-hak perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi, terutama dalam meningkatkan representasi

perempuan dalam pemerintahan dan memastikan pemberdayaan perempuan yang lebih merata di seluruh aspek kehidupan.

Tabel 2.1.51
Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	1,60	1,38	1,86	1,69	1,71	1,68
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Persen	14,00	14,00	14,00	14,00	10,00	-8,07
3	Rasio KDRT	Persen	0,03	0,01	0,02	0,02	0,04	7,46
4	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	68,31	66,40	72,78	71,27	67,90	-0,15
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen	N/A	75,00	80,00	80,00	100,00	10,06
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
13	Persentase Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas	Persen	89,57					
14	Cakupan Pemberdayaan perempuan	Persen	66,45	67,54				1,64
15	Cakupan pemberdayaan perempuan dan gender	Persen			20,54	23,46	20,35	-0,46
16	Indeks Pembangunan Gender	angka (0-100)	92,17	92,26	92,56	92,91	92,93	0,21
17	Indeks Pemberdayaan Gender	angka (0-100)	69,65	69,64	69,66	70,52	66,97	-0,98
18	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,408	0,429	0,453	0,259	0,267	-10,06
19	Kategori Kabupaten Layak Anak	Indeks	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	

Sumber: Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2024; Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Beberapa indikator menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 1,68 persen selama lima tahun terakhir. Partisipasi angkatan kerja perempuan memperoleh capaian sebesar 68,31 persen pada tahun 2020, kemudian berfluktuasi menjadi 71,27 persen pada tahun 2023. Cakupan layanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan juga mengalami kenaikan signifikan, dari 75 persen pada tahun 2021 menjadi 100 persen pada tahun 2024. Selain itu, indeks pemberdayaan gender mengalami peningkatan dari 69,65 pada tahun 2020 menjadi 66,97 pada tahun 2024, serta indeks pembangunan gender yang terus menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan 0,21 persen per tahun.

Di sisi lain, beberapa indikator mengalami penurunan yang perlu menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan ke depan. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD mengalami penurunan dari 14 persen selama periode 2020-2023 menjadi 10 persen pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -8,07 persen per tahun. Cakupan pemberdayaan perempuan dan gender juga mengalami fluktuasi, dengan kecenderungan menurun dari 23,46 persen pada tahun 2023 menjadi 20,35 persen pada tahun 2024. Indeks ketimpangan gender memperlihatkan tren yang tidak stabil, dengan fluktuasi yang cukup signifikan dari 0,408 pada tahun 2020 menjadi 0,267 di tahun 2024.

Secara keseluruhan, upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Magelang telah menunjukkan capaian positif, terutama dalam layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang telah mencapai 100 persen dalam berbagai aspek. Namun, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan representasi perempuan di lembaga pemerintahan serta memperluas cakupan pemberdayaan perempuan agar lebih merata di berbagai sektor.

C. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu. Pemenuhan pangan tidak hanya mempertimbangkan aspek mutu dan kuantitas, tetapi juga harus memperhatikan aspek keamanan pangan. Pangan yang cukup dan bergizi menjadi tidak bermakna apabila pangan tersebut tidak aman untuk dikonsumsi dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya keamanan pangan secara terpadu di setiap rantai distribusi pangan. Pengawasan keamanan dan mutu pangan memerlukan dukungan sumber daya yang meliputi kelembagaan, sumber daya manusia, regulasi, serta sumber daya pendukung lainnya. Keterpaduan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aspek keamanan serta mutu pangan.

Tabel 2.1.52
Capaian Indikator Urusan Pangan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Ketersediaan pangan utama	Kg/jiwa/ tahun	205,82	214,32	157,89	148,59	148,27	-7,87
2	Stabilitas harga dan pasokan pangan	Persen	93,20	94,04	93,30	93,30	93,93	0,20
3	Indeks Ketahanan Pangan	Angka (1-100)	79,51	79,92	79,44	79,91	80,20	0,22
4	Skor Pola Pangan Harapan (PPH konsumsi)	Indeks (1-100)	87,90	87,90	86,40	92,10	88,00	0,03
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Indeks (1-100)	73,85	78,45	81,26	81,83	83,45	3,10
6	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	Persen	13,75	15,23	15,84	11,23	11,24	-4,91
7	Persentase cadangan pangan	Persen	30,84	56,86	55,92	89,08	79,45	26,69
8	Ketersediaan energi per kapita	Kkal	2673	2413	2439	2440	2452	-2,13
9	Ketersediaan protein per kapita	Gram	71,59	66,76	72,81	75,74	70,82	-0,27
10	Ketersediaan informasi pasokan. harga dan akses pangan di daerah	Persen	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00
11	Persentase daerah rentan rawan pangan	Persen	18,30	15,30	12,60	11,03	8,07	-18,51
12	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	51,00	90,00	100,00	90,00	88,70	14,84

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2024; Buku Saku PoU 2024; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota; Analisa Neraca Bahan Makanan; Panel Harga Pangan; Peta FSVA 2024
Keterangan: Data disajikan sesuai ketersediaan pada sumber resmi. Tahun yang tidak tercantum menandakan data belum tersedia hingga saat ini.

Beberapa indikator menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Stabilitas harga dan pasokan pangan mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 93,20 persen menjadi 93,93 persen pada tahun 2024. Indeks ketahanan pangan juga mengalami sedikit peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,22 persen per tahun. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,10 persen per tahun, menandakan semakin beragamnya komposisi pangan yang tersedia. Selain itu, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mengalami penurunan sebesar 4,91 persen per tahun, yang menunjukkan

adanya perbaikan dalam akses masyarakat terhadap pangan yang cukup dan bergizi.

Selanjutnya, persentase cadangan pangan juga menunjukkan kondisi yang semakin membaik, yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 26,69 persen per tahun, atau sebesar 30,84 persen di tahun 2020 meningkat menjadi 79,45 persen di tahun 2024. Persentase daerah rentan rawan pangan juga menunjukkan tren menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 18,51 persen per tahun, yang mencerminkan efektivitas upaya penanggulangan kerawanan pangan di wilayah tersebut. Selain itu, persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,84 persen per tahun.

Di sisi lain, terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan dan memerlukan perhatian khusus. Ketersediaan pangan utama mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 7,87 persen per tahun. Ketersediaan energi dan protein per kapita juga mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,13 persen dan 0,27 persen per tahun, yang dapat berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa indikator yang menunjukkan perbaikan dalam ketahanan pangan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam hal ketersediaan pangan utama, serta pemenuhan kebutuhan energi dan protein. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan pada sektor produksi pangan, peningkatan efektivitas distribusi, serta optimalisasi cadangan pangan guna memastikan ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan. Penguatan pengawasan keamanan pangan dan perbaikan sistem informasi pasokan dan harga pangan juga dapat menjadi langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Magelang.

D. Pertanahan

Dalam konteks pembangunan, tanah memegang peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan tanah memiliki potensi moneter dan sosial, serta statusnya sebagai aset yang penting dan utama, mengingat kaitannya dengan kebutuhan hidup masyarakat yang bersifat fundamental. Pengelolaan pertanahan harus dilakukan dalam rangka mendukung terlaksananya seluruh komponen pembangunan daerah yang berkelanjutan. Di Kabupaten Magelang, terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pada urusan pertanahan, antara lain: persentase penetapan lokasi dan sengketa

pertanahan, persentase kegiatan tanah objek reformasi agraria, persentase penatagunaan tanah, dan cakupan layanan kinerja pertanahan.

Tabel 2.1.53
Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Persentase penetapan lokasi dan sengketa pertanahan	Persen	N/A	50,00	100,00	80,00	100,00	25,99
2	Persentase kegiatan tanah objek reformasi agraria	Persen	N/A	0,00	100,00	80,00	100,00	0,00
3	Persentase penatagunaan tanah	Persen	N/A	145,00	100,00	80,00	100,00	-11,65
4	Cakupan layanan kinerja pertanahan	Persen	N/A	65,00	100,00	80,00	100,00	15,44

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2025

Indikator-indikator terkait pertanahan menunjukkan perkembangan yang bervariasi sepanjang periode 2020 hingga 2024. Persentase penetapan lokasi dan sengketa pertanahan, kegiatan tanah objek reformasi agraria, serta cakupan layanan kinerja pertanahan menunjukkan peningkatan yang signifikan, masing-masing mencapai 100 persen pada 2022 dan 2024. Namun, indikator penatagunaan tanah mengalami penurunan, dengan penurunan signifikan dari 145 persen pada 2021 menjadi 100 persen pada tahun berikutnya, dan seterusnya. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan penggunaan tanah yang perlu ditangani secara lebih efektif, mengingat angka yang melebihi 100 persen pada tahun 2021 menunjukkan ketidaksesuaian dalam pengelolaan yang lebih efisien dan terukur.

E. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diartikan sebagai kesatuan ruang yang melibatkan semua unsur, baik benda, daya, keadaan, maupun makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya, yang berpengaruh terhadap alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam kerangka pembangunan daerah, evaluasi terhadap indikator lingkungan hidup Kabupaten Magelang pada periode 2020 hingga 2024 mencerminkan dinamika kebijakan daerah yang telah diterapkan serta tantangan yang dihadapi. Analisis data tersebut merupakan landasan bagi perumusan strategi yang lebih efektif dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Tabel 2.1.54
Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ketersediaan	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ketersediaan	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ketersediaan	N/A	N/A	Ada	Ada	Ada	
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Angka	56,15	51,54	53,11	54,07	54,88	-0,57
5	Pengendalian potensi sumber pencemaran air	Persen	28,00	36,00	38,00	33,33	38,57	8,34
6	Sampling pemantauan kualitas air sungai dan/ danau secara berkala pada periode musim hujan dan kemarau	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
7	Pelaksanaan penetapan status mutu air	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
8	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Angka	87,03	91,68	87,91	89,55	92,06	1,41
9	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Angka	68,24	68,05	68,50	42,01	52,41	-6,39
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	71,30	71,41	70,48	65,80	69,40	-0,67
11	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat		110,00	135,00	160,00	204,00	224,00	19,46
13	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Persen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
14	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
15	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	17,21	17,32	22,62	27,06	35,80	20,10
16	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	36,36	
17	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persen	21,14	18,43	25,13	24,15	27,83	7,12
18	Persentase jumlah sampah yang tertangani	M^3	17,21	17,32	22,62	27,06	35,80	20,10
19	Persentase penanganan sampah	Persen	17,21	17,32	22,62	27,06	35,80	20,10

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
20	Persentase pengelolaan sampah	Persen	34,29	36,34	47,75	51,20	63,63	16,71
21	Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS)	Persen	N/A	41,47	42,43	41,64	58,20	11,96
22	Persentase pengelolaan sampah rumah tangga memenuhi syarat	Persen	34,29	36,34	47,75	51,20	63,63	16,71
23	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Persen	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	-
24	Jumlah Daya Tampung TPS (M^3)	Persen	297.475	297.475	297.475	297.475	297.475	-
25	Pengelolaan limbah B3	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
26	Penegakan hukum lingkungan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
27	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air	Persen	2,56	2,86	3,05	3,28	3,40	7,35
28	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	Persen	15,82	15,76	19,00	20,45	25,00	12,12
29	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim	Persen	39,35	39,81	45,77	60,22	62,80	12,40
30	Presentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru	Persen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
31	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	N/A	4,65	6,98	33,33	38,57	102,43
32	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	ton CO_2eq	N/A	N/A	N/A	N/A	33.713,26	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2024

Dalam lima tahun terakhir, pemerintah kabupaten/kota telah berhasil menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), meskipun dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain belum optimalnya penaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan terhadap izin lingkungan, belum optimalnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3, belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH, minimnya ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup yang berkualitas, kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait lingkungan belum bisa ditangani secara maksimal, belum optimalnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, belum optimalnya konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim, serta kompetensi dan penghargaan masyarakat di bidang

lingkungan hidup masih kurang. Meskipun demikian, dokumen RPPLH berhasil diintegrasikan dengan rencana pembangunan kabupaten/kota. Pemberian penghargaan lingkungan hidup juga terlaksana dengan optimal selama periode tersebut. Namun, indikator terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi tidak dapat diidentifikasi, karena adanya kebijakan urusan lingkungan hidup yang diarahkan pada meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan.

Beberapa indikator kualitas lingkungan menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pengendalian potensi sumber pencemaran air mengalami pertumbuhan rata-rata 8,34 persen per tahun, yang mencerminkan adanya upaya pengurangan dampak pencemaran pada sumber daya air. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air meningkat sebesar 7,35 persen per tahun, serta konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim yang tumbuh sebesar 12,40 persen per tahun. Selain itu, persentase pengelolaan sampah mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 16,71 persen per tahun, dengan timbulan sampah yang ditangani meningkat 20,10 persen per tahun. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) juga bertumbuh sebesar 11,96 persen. Sementara itu, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL meningkat sebesar 12,12 persen, yang menunjukkan perbaikan dalam penegakan regulasi lingkungan. Adapun konsistensi capaian sebesar 100 persen selama periode tersebut berhasil dipertahankan oleh beberapa indikator, seperti pemantauan kualitas air sungai dan/atau danau secara berkala, pelaksanaan penetapan status mutu air, pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, serta pengelolaan limbah B3, penegakan hukum lingkungan.

Di sisi lain, beberapa indikator lingkungan mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Indeks kualitas air mengalami penurunan rata-rata 0,57 persen per tahun, menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pengendalian pencemaran, kualitas air masih mengalami fluktuasi. Indeks kualitas tutupan lahan mengalami penurunan signifikan sebesar 6,39 persen per tahun, begitu pula dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang menurun sebesar 0,67 persen per tahun. Tantangan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi degradasi lingkungan yang terjadi.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan yang signifikan, penurunan pada beberapa aspek krusial mengindikasikan kebutuhan akan strategi yang lebih efektif dan

terpadu. Peningkatan dalam pengelolaan sampah, konservasi lingkungan, dan pengawasan perizinan adalah langkah-langkah positif, tetapi harus diimbangi dengan penerapan kebijakan yang lebih ketat untuk mencegah degradasi lingkungan, terutama dalam konteks kualitas air dan tutupan lahan. Oleh karena itu, upaya mitigasi pencemaran, penguatan tata kelola lingkungan, serta implementasi kebijakan berbasis data menjadi hal yang perlu dilakukan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang yang mencakup berbagai aspek penting, antara lain penyelenggaraan administrasi kependudukan, koordinasi, pembentukan instansi pelaksana, pengaturan teknis, pembinaan, pelayanan masyarakat, penugasan kepada desa, penyajian data kependudukan, serta koordinasi pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Administrasi kependudukan berperan sebagai elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks yang lebih luas, administrasi kependudukan mencakup dua aspek utama, yaitu peningkatan kualitas layanan yang profesional serta peningkatan kesadaran masyakarat mengenai pentingnya dokumen kependudukan. Dokumen yang diterbitkan tidak hanya berperan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penduduk, tetapi juga sebagai bukti resmi mengenai status pribadi dan status hukum individu dalam setiap peristiwa kehidupan. Proses penerbitan dokumen ini mencakup serangkaian tahapan, meliputi pelaporan, verifikasi, validasi data, hingga pendokumentasian secara sistematis. Selain itu, data kependudukan juga berperan strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan, penguatan demokrasi, penegakan hukum, serta pencegahan tindak kriminalitas.

Tabel 2.1.55
Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	97,87	98,52	97,34	97,80	99,99	0,54
2	Rasio bayi berakta kelahiran	Persen	96,81	97,97	98,97	99,45	99,68	0,73
3	Rasio pasangan berakta nikah	Persen	55,18	61,73	67,73	72,22	76,44	8,49
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi*			Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	
5	Penerapan KTP nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	13,97	9,10	6,49	7,61	8,87	-10,73
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	89,53	92,75	97,41	97,95	98,34	2,37
8	Persentase kepemilikan KTP	Persen	97,87	98,52	97,34	97,80	99,99	0,54
9	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Persen	41,05	42,90	44,90	47,02	48,67	4,35
10	Rasio anak (0-18) yang berakta kelahiran, pasangan berakta perkawinan, penduduk meninggal berakta kematian	Angka (0-100)	68,40	73,80	85,41	90,05	91,66	7,59
11	Rasio pengelolaan informasi dan pemanfaatan data	Angka (0-100)	75,00	83,33	86,66	103,33	100,00	7,46
12	Rasio Perekaman KTP elektronik dan keluarga yang Ber KK	Angka (0-100)	97,87	90,89	91,63	90,60	98,95	0,27
13	Rasio Perekaman KTP elektronik, keluarga yang Ber-KK, dan Penerbitan KIA	Angka (0-100)	97,87	90,89	91,63	90,60	91,58	-1,65

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2024; Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025
*Keterangan : *) Database telah dialihkan ke pusat, dan daerah tidak diperkenankan lagi untuk menyimpan database tersebut*

Beberapa indikator administrasi kependudukan menunjukkan tren peningkatan yang positif dalam lima tahun terakhir. Rasio penduduk yang memiliki KTP per satuan penduduk meningkat dari 97,87 persen pada 2020 menjadi 99,99 persen pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 0,54 persen per tahun. Demikian pula, rasio bayi yang memiliki akta kelahiran terus meningkat, mencapai 99,68 persen pada 2024 dengan pertumbuhan rata-rata 0,73 persen per tahun. Peningkatan signifikan juga terlihat pada rasio pasangan yang memiliki akta nikah, yang tumbuh dari 55,18 persen pada 2020 menjadi 76,44 persen pada 2024, dengan pertumbuhan rata-rata tertinggi sebesar 8,49 persen per tahun. Selain itu, cakupan penerbitan akta kelahiran meningkat hingga 98,34 persen, dan kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk naik dengan rata-rata pertumbuhan 4,35 persen per tahun. Indikator lain yang mencerminkan perbaikan adalah rasio anak, pasangan berakta perkawinan, dan penduduk meninggal berakta kematian, yang meningkat dari 68,40 pada 2020 menjadi 91,66 pada 2024. Rasio pengelolaan informasi dan pemanfaatan data juga mengalami pertumbuhan signifikan.

Di sisi lain, terdapat beberapa indikator yang mengalami tren penurunan dan perlu mendapatkan perhatian lebih dalam upaya perbaikan layanan administrasi kependudukan. Cakupan penerbitan KTP mengalami penurunan signifikan dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -10,73 persen per tahun. Selain itu, rasio perekaman KTP elektronik, keluarga yang ber-KK, dan penerbitan KIA juga mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan -1,65 persen per tahun. Meskipun sebagian besar indikator menunjukkan tren positif, penurunan dalam cakupan penerbitan KTP dan perekaman identitas elektronik perlu segera diatasi agar tidak menghambat efektivitas sistem administrasi kependudukan di masa mendatang.

Secara keseluruhan, capaian administrasi kependudukan di daerah menunjukkan kemajuan yang cukup baik, terutama dalam hal kepemilikan dokumen resmi seperti akta kelahiran dan akta nikah. Namun, masih ada tantangan dalam optimalisasi cakupan penerbitan KTP dan perekaman identitas elektronik, yang berpotensi memengaruhi efektivitas sistem pencatatan kependudukan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas pelayanan, digitalisasi sistem, dan sosialisasi kepada masyarakat harus terus diperkuat untuk memastikan akurasi data kependudukan yang dapat mendukung perencanaan pembangunan daerah secara lebih efektif.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, desa didefinisikan sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Lebih dari itu, tujuan dari pemberdayaan masyarakat desa tidak hanya terbatas pada peningkatan kapasitas individu dan kelompok, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan ini perlu didukung oleh sinergi antara

pemerintah, lembaga desa, serta berbagai pemangku kepentingan guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan selaras dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.1.56
Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	52,00	54,00	75,00	76,84	77,66	10,55
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persen	N/A	N/A	N/A	1,13	1,44	27,40
3	Persentase LPM Berprestasi	Persen	0,15	0,15	0,15	0,15	0,05	-24,04
4	Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Persen	N/A	N/A	N/A	0,93	1,24	33,33
5	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	4,03	33,81	36,93	99,43	100,00	123,19
6	Cakupan Kelompok Binaan PKK	Persen	4,03	33,81	36,93	99,43	100,00	123,19
7	Persentase PKK aktif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
8	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
9	Persentase status desa maju, mandiri dan berkembang	Persen	95,37	97,27	99,18	100,00	100,00	1,19
10	Persentase posyandu aktif	Persen	86,26	86,2	89,49	98,34	100,00	3,76
11	Persentase Desa Mandiri	Persen	3,54	4,90	8,17	12,26	16,08	45,97
12	Indeks Desa Membangun	Angka (0-1)	0,68	0,69	0,71	0,72	0,73	1,79

Sumber: Bidang Administrasi Pemerintahan Desa; Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; Bidang Penataan dan Kerjasama Desa; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Magelang, 2025

Hampir seluruh indikator pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menunjukkan capaian yang variatif dengan kecenderungan meningkat. Indikator pemberdayaan masyarakat desa menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa aspek. Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa terus membaik dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 10,55 persen, didorong oleh peningkatan alokasi dana transfer sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Indikator lainnya yang mengalami peningkatan pertumbuhan pesat adalah cakupan kelompok binaan PKK dan persentase desa mandiri, yang masing-masing meningkat sebesar 123,19 persen dan 45,97 persen per tahun. Selain itu, persentase desa yang berstatus maju, mandiri, dan berkembang mencapai 100 persen pada tahun 2023 dan 2024. Partisipasi masyarakat yang semakin tinggi juga berkontribusi terhadap meningkatnya persentase posyandu aktif yang mencapai 100 persen pada tahun 2024. Namun, terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan, seperti persentase LPM berprestasi yang terus stagnan di angka 0,15 persen selama beberapa tahun sebelum akhirnya

menurun drastis pada tahun 2024. Begitu pula dengan cakupan pembinaan LPM yang walaupun mengalami pertumbuhan positif, tetapi baik dari segi personel maupun anggaran belum mampu mengimbangi jumlah LPM yang semakin banyak.

Berkaitan dengan kemandirian desa, sebelum tahun 2025, tingkat kemandirian desa diukur berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), yang dihitung dengan formula IDM = 1/3 (IKS+IKL+IKE). Namun, mulai tahun 2025, pengukuran kemandirian desa mengalami perubahan dengan diterapkannya indeks desa, yang mencakup enam dimensi pengukuran, yaitu: sosial, ekonomi, lingkungan, layanan dasar, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Desa, desa mandiri didefinisikan sebagai desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, kemudahan aksesibilitas atau transportasi, serta pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan yang sangat baik. Pada tahun 2024, Kabupaten Magelang mencatatkan 59 desa berstatus Mandiri, 144 desa berstatus Maju, dan 164 desa berstatus Berkembang. Tidak terdapat desa berstatus Tertinggal maupun Sangat Tertinggal. Sebagai bagian dari pencapaian sasaran pembangunan nasional, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 menetapkan persentase desa mandiri sebagai salah satu dari 45 Indikator Utama Nasional, dengan metode penghitungan berbasis indeks desa sebagai indikator tunggal pembangunan desa. Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, Kabupaten Magelang telah menetapkan target persentase desa mandiri untuk lima tahun ke depan sebesar 22,64 persen (2025); 24,52 persen (2026); 26,16 persen (2027); 27,25 persen (2028); dan 28,61 persen (2029). Penetapan target ini merujuk pada surat resmi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas).

Secara keseluruhan, indikator-indikator pemberdayaan masyarakat desa menunjukkan arah perkembangan yang positif. Meskipun demikian, masih diperlukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pembinaan LPM agar mampu mendorong lebih banyak LPM yang berprestasi. Keberlanjutan program pemberdayaan juga harus diperkuat dengan optimalisasi sumber daya, baik dalam bentuk personel maupun pendanaan, agar manfaat pembangunan desa dapat lebih merata.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan kependudukan, yang dijadikan sebagai titik sentral dari seluruh kegiatan pembangunan dan diupayakan mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang. Undang-undang tersebut juga menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian penduduk serta penyelenggaraan program keluarga berencana. Dalam implementasinya, pengendalian penduduk tidak hanya mencakup upaya menekan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga memastikan distribusi penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah.

Tabel 2.1.57
Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	0,93	0,93	0,91	0,91		-0,72
2	*Total Fertility Rate* (TFR)		2,15	2,13	2,11	2,06		-1,42
3	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	Persen	N/A	100,00	96,04	85,71	85,71	-5,01
4	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	0,00
5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Peraturan	N/A	N/A	N/A	0,00	0,00	
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	N/A	N/A	N/A	14,00	14,00	0,00
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerja sama	N/A	N/A	3,00	3,00	3,00	0,00
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	-	N/A	1,19	1,17	1,10	1,16	-0,85
9	Ratio Akseptor KB	Persen	74,93	64,68	68,43	71,85	74,48	-0,15
10	Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	74,93	74,91	68,57	72,05	74,48	-0,15
11	Persentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (CPR)	Persen	74,93	64,68	68,60	71,85	74,48	-0,15
12	Tingkat Prevalensi Kesertaan KB Pria	Persen	N/A	5,74	N/A	7,44	9,75	19,32
13	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Persen	74,93	74,91	68,57	72,05	67,21	-2,68
14	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per	Persen	N/A	41,00	24,40	26,00		-20,37

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
	1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)							
15	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	N/A	19,74	19,70	19,69	18,71	-1,77
16	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*)	Persen	12,33	17,96	13,40	11,71	10,28	-4,44
17	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	35,00	N/A	35,96	36,70	38,78	2,60
18	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	N/A	N/A	45,85	38,44	74,48	27,45
19	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
20	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	81,88	-4,88
21	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	77,38	-6,21
22	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	Persen	19,04	19,04	19,04	57,14	76,19	41,44
23	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
24	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
25	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	N/A	N/A	59,87	67,87	76,46	13,01
26	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
27	Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	N/A	N/A	90,32	73,01	81,25	-5,15
28	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
29	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	N/A	21,00	22,70	22,70	22,40	2,17
31	Persentase keluarga Pra Sejahtera	Persen	20,15	13,80	12,41	12,11	N/A	-15,61
32	Keluarga Sejahtera I	Persen	14,18	N/A	N/A	N/A	N/A	
33	Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja	Persen	28,23	28,23	34,40	37,09	40,32	9,32
34	Bina Keluarga Balita	Persen	92,47	78,76	83,60	89,25	96,77	1,14
35	Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)	Indeks	N/A	56,27	58,24	61,49	63,83	4,29

Sumber: Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2024; Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Peningkatan beberapa indikator pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga menunjukkan adanya kemajuan dalam beberapa aspek strategis. Salah satu capaian positif yang signifikan adalah peningkatan

cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan, yang melonjak dari 19,04 persen pada tahun 2022 menjadi 76,19 persen pada tahun 2024. Selain itu, terdapat peningkatan dalam persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP), yang mencapai 38,78 persen pada tahun 2024. Rasio tingkat prevalensi kesertaan KB pria juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari 5,74 persen pada tahun 2021 menjadi 9,75 persen pada tahun 2024, mengindikasikan meningkatnya partisipasi pria dalam program KB. Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga) juga mengalami kenaikan yang konsisten dari 56,27 pada tahun 2021 menjadi 61,49 pada tahun 2023.

Namun, dari seluruh indikator yang datanya tersedia, mayoritas mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan tahunan negatif. Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan melalui kampung KB mengalami penurunan dari 100 persen pada tahun 2021 menjadi 85,71 persen pada tahun 2023-2024. Selain itu, angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun menurun dari 74,93 persen pada tahun 2020 menjadi 67,21 persen pada tahun 2024, di mana hal ini dapat berpotensi meningkatkan angka kelahiran yang tidak direncanakan. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ber-KB juga mengalami penurunan signifikan, masing-masing sebesar 4,88 persen dan 6,21 persen per tahun. Angka kelahiran remaja (ASFR 15-19) mengalami fluktuasi, dengan penurunan tajam dari 41 pada tahun 2021 menjadi 24,4 pada tahun 2022, namun kembali naik menjadi 26 pada tahun 2023.

Di antara berbagai indikator yang mencerminkan keberhasilan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Magelang, masih terdapat beberapa data yang belum tercatat pada periode tertentu, seperti indikator jumlah kebijakan yang mengatur pengendalian penduduk. Selain itu, tidak tersedia data yang lengkap pada indikator persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dan jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Masing-masing disebabkan oleh belum adanya kebijakan pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk di Kabupaten Magelang, yang baru akan disusun pada tahun 2025, serta *grand design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) untuk periode 2020-2045 baru selesai disusun pada tahun 2023.

I. Perhubungan

Sektor perhubungan yang efisien dan terintegrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan serta memfasilitasi pemerataan pembangunan wilayah. Infrastruktur perhubungan yang memadai berkontribusi terhadap peningkatan konektivitas antarwilayah sehingga mempercepat akses masyarakat menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, sistem perhubungan atau transportasi yang baik juga mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Tabel 2.1.58
Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	105.129	655.344	582.853	816.202	467.785	45,24
2	Rasio ijin trayek		0,90	0,74	0,48	0,40	0,60	-9,60
3	Jumlah uji berkala kendaraan bermotor (angkutan umum)	Unit	1.713	1.829	1.832	1.296	1.870	2,22
4	Jumlah terminal bus	Unit	6	6	7	7	7	3,93
5	Persentase layanan angkutan darat	Persen	0,17	0,2	0,25	0,22	0,11	-10,31
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	60,96	61,85	57,59	51,54	47,14	-6,23
7	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota	Persen	27,07	34,12	38,20	40,95	41,42	11,22
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Persen	0,0022	0,0021	0,0020	0,0017	0,0018	-5,43
9	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	1.303.220	652.836	582.853	816.202	467.785	-22,60
10	Jumlah orang melalui terminal per tahun	Orang	1.303.220	652.836	582.853	816.202	467.785	-22,60
11	Jumlah izin trayek	Ijin	726	215	314	277	439	-11,82
12	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	32	32	32	32	32	0,00
13	Rasio uji berkala kendaraan bermotor	Persen	61	61,9	57,7	51,54	47,14	-6,24
14	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
15	Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang	Persen	0,17	0,2	0,25	0,22	0,11	-10,31
16	Cakupan pembangunan Infrastruktur perhubungan	Persen	53,89	54,02	N/A	N/A	104,23	0,24
17	Cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan	Persen	N/A	N/A	61,38	72,68	98,03	26,38

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, 2024; Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang Tahun 2024

Selama periode 2020 hingga 2024, beberapa indikator pada sektor perhubungan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Cakupan

penyelenggaraan layanan perhubungan mengalami pertumbuhan yang pesat, meningkat dari 61,38 persen pada tahun 2022 menjadi 98,03 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini dipicu oleh perbaikan prasarana jalan, pemeliharaan, rehabilitasi terminal, serta pengadaan perlengkapan jalan. Selain itu, cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan meningkat dari 54,02 persen pada tahun 2021 menjadi 104,23 persen pada tahun 2024, yang menandakan adanya percepatan pembangunan sarana transportasi di wilayah tersebut. Peningkatan ini juga tercermin dalam jumlah terminal bus yang bertambah dari enam unit pada 2020 menjadi tujuh unit sejak tahun 2022, yang menunjukkan adanya usaha untuk menyediakan fasilitas trasnportasi yang lebih baik. Sementara itu, jumlah uji KIR juga mengalami tren positif dengan rata-rata pertumbuhan 2,22 persen per tahun.

Namun, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan penurunan yang mengkhawatirkan, terutama terkait dengan penggunaan angkutan umum. Jumlah pengguna angkutan umum mengalami penurunan drastis, dari 1.303.220 orang pada tahun 2020 menjadi hanya 467.785 orang pada tahun 2024, dengan rata-rata penurunan tahunan sebesar 22,60 persen. Tren ini sejalan dengan pengurangan jumlah izin trayek yang turun dari 726 izin pada tahun 2020 menjadi 439 izin pada tahun 2024, yang sebagian besar disebabkan oleh kendaraan yang berusia lebih dari 25 tahun dan tidak diperpanjang izinnya. Selain itu, persentase layanan angkutan darat mengalami penurunan tajam dari 0,25 persen pada tahun 2022 menjadi hanya 0,11 persen pada tahun 2024 karena rendahnya minat masyarakat dalam memanfaatkan transportasi umum. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan juga menunjukkan tren negati, menurun dari 0,0022 persen pada tahun 2020 menjadi 0,0018 persen pada tahun 2024.

Tabel 2.1.59
Data Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kecelakaan	781	819	1.080	1.016	940
2	Meninggal Dunia	138	163	167	155	139
3	Luka Berat	2	2	-	-	-
4	Luka Ringan	936	904	1.234	1.195	1.069
5	Jumlah Korban	1.076	1.069	1.401	1.350	1.208

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, 2024

Data mengenai kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Magelang untuk periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren fluktuatif yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam aspek keselamatan transportasi. Jumlah kecelakaan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dengan total 1.080

kasus, jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebanyak 781 kasus. Namun, jumlah tersebut kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 940 kasus. Jumlah korban yang meninggal menunjukkan pola yang serupa, dengan angka tertinggi pada tahun 2022 mencapai 167 orang, kemudian mengalami penurunan menjadi 139 orang pada tahun 2024.

Walaupun telah terjadi penurunan dalam dua tahun terakhir, jumlah korban yang mengalami luka ringan tetap tergolong besar, yaitu mencapai 1.069 orang pada tahun 2024. Jumlah korban kecelakaan yang selalu melebihi 1.000 orang setiap tahun menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas masih merupakan masalah mendasar yang belum sepenuhnya diselesaikan. Oleh karena itu, identifikasi lokasi rawan kecelakaan menjadi sangat penting sebagai dasar dalam merancang tindakan yang lebih efisien dan tepat sasaran. Data mengenai lokasi rawan kecelakaan berikut ini memberikan gambaran secara spasial mengenai sejumlah titik prioritas yang perlu mendapatkan penanganan melalui perbaikan infrastruktur, penambahan rambu-rambu keselataman, serta pengawasan lalu lintas yang lebih ketat.

Tabel 2.1.60
Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Ruas Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sambung – Simpang Tiga Secang	Pasar Secang	Gimblah Kricing Secang	Gimblah Kricing Secang	Gimblah Kricing Secang	Gimblah Kricing Secang
2	Magelang - Yogyakarta	Jembatan Blondo – SPBU Pare	Jembatan Blondo – SPBU Pare	Jembatan Blondo – SPBU Pare	Jembatan Blondo – SPBU Pare	Jembatan Blondo – SPBU Pare
3	Jl Magelang - Purworejo	Pasar Krasak, Pasar Salaman, Tagulrejo Tempuran.	Pasar Krasak, Pasar Salaman, Tagulrejo Tempuran.	Pasar Krasak, Pasar Salaman, Tagulrejo Tempuran.	Pasar Krasak, Pasar Salaman, Tagulrejo Tempuran.	Pasar Krasak, Pasar Salaman, Tagulrejo Tempuran.
4	Jl. Muntilan - Salam		Gremeng Pasar Salak	Gremeng Pasar Salak	Gremeng Pasar Salak	Gremeng Pasar Salak
5	JL Soekarno - Hatta	Dusun Pedak, Simpang 3 Pangenan, Simpang 4 Banar	Dusun Pedak, Simpang 3 Pangenan, Simpang 4 Banar	Dusun Pedak, Simpang 3 Pangenan, Simpang 4 Banar	Dusun Pedak, Simpang 3 Pangenan, Simpang 4 Banar	Dusun Pedak, Simpang 3 Pangenan, Simpang 4 Banar
6	JL Magelang - Salatiga	Slumut Pakis	Plalar Silumut Pakis	Plalar Silumut Pakis	Plalar Silumut Pakis	Plalar Silumut Pakis
7	Jl Magelang - Boyolali	Ketep dan Kapuhan	Ketep dan Kapuhan	Ketep dan Kapuhan	Ketep dan Kapuhan	Ketep dan Kapuhan
8	Jl. Raya Borobudur-Salaman		Simpang 3 Brojonalan, Simpang 4 Kujon, Simpang 4 Koramil Brbdr	Simpang 3 Brojonalan, Simpang 4 Kujon, Simpang 4 Koramil Brbdr	Simpang 3 Brojonalan, Simpang 4 Kujon, Simpang 4 Koramil Brbdr	Simpang 3 Brojonalan, Simpang 4 Kujon, Simpang 4 Koramil Brbdr
9	Jl. Raya Secang			Jl. Nasional 14 56 Secang Magelang	Jl. Nasional 14 56 Secang Magelang	Jl. Nasional 14 56 Secang Magelang

No	Ruas Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
10	Jl. Raya Soekarno Hatta Mertoyudan			Jl. Nasional 14 45-430 Bayanan Mertoyudan Magelang	Jl. Nasional 14 45-430 Bayanan Mertoyudan Magelang	Jl. Nasional 14 45-430 Bayanan Mertoyudan Magelang

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, 2024

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja sektor perhubungan dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, terdapat peningkatan infrastruktur dan penyelenggaraan layanan perhubungan yang mencerminkan adanya investasi serta perbaikan sistem transportasi secara signifikan. Di sisi lain, terjadinya penurunan yang drastis dalam penggunaan angkutan umum dan layanan trayek mengindikasikan adanya pergeseran preferensi masyarakat, yang cenderung lebih memilih kendaraan pribadi dan layanan transportasi berbasis daring. Adapun informasi mengenai kecelakaan lalu lintas memperlihatkan perubahan yang signifikan dengan puncaknya terjadi pada tahun 2022 dan penurunan di tahun 2024. Meskipun demikian, angka korban akibat kecelakaan tetap tinggi, yang menunjukkan bahwa perhatian serius terhadap aspek keselamatan transportasi sangat dibutuhkan. Tidak hanya berfokus pada jumlah infrastruktur yang ada, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan, keselamatan, serta perubahan pola mobilitas masyarakat.

J. Komunikasi dan Informatika

Pada era globalisasi ini, masyarakat dituntut untuk memiliki akses terhadap informasi yang terbuka agar dapat bersaing di tingkat global. Perkembangan teknologi, yang memfasilitasi pertukaran informasi dan komunikasi, memegang peranan penting dalam mencapai hal tersebut. Dengan pesatnya kemajuan teknologi, akses terhadap informasi menjadi semakin mudah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menekankan pentingnya hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan transparan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan yang terbuka dan berbasis informasi menjadi landasan dalam merencanakan pembangunan daerah yang partisipatif. Seiring dengan hal tersebut, masyarakat yang terinformasi dengan baik akan mampu beradaptasi terhadap perubahan dan berperan aktif dalam proses pembangunan.

Tabel 2.1.61
Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Persen	114,29	176,19	247,62	252,38	252,38	21,90
2	Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	89,50	91,00	93,00	95,00	N/A	2,01
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	69,33	69,46	72,07	71,33	73,61	0,95
4	Persentase rumah tangga dengan akses internet	Persen	54,18	60,57	64,92	68,99	71,14	8,39
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	22,80	24,30	25,70	27,10		5,93
6	Cakupan layanan dan diseminasi informasi publik	Persen	80,18	81,94	81,94	100,00	100,00	5,68
7	Cakupan pemanfaatan dan pengelolaan TI	Persen	82,02	82,70	96,00	96,00	100,00	5,08
8	*Website* milik pemerintah daerah	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
9	Cakupan ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi	Persen	57,63	58,10	61,70	100,00	100,00	14,77
10	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,94	2,67	3,13	3,13	3,92	7,46

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang, 2024; Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024

Secara garis besar, seluruh indikator menunjukkan tren pertumbuhan positif. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan mengalami peningkatan yang signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir sebesar 21,90 persen. Sementara itu, cakupan layanan telekomunikasi dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon terus meningkat, masing-masing dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 2,01 persen dan 0,95 persen per tahun, menunjukkan peningkatan aksesibilitas teknologi di kalangan masyarakat. Indikator lainnya adalah proporsi rumah tangga yang memiliki akses internet dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 8,39 persen, serta cakupan layanan dan diseminasi informasi publik yang meningkat pesat hingga 100 persen pada tahun 2023 dan 2024. Selain itu, cakupan pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi juga menunjukkan capaian sangat tinggi, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 5,08 persen. Adapun ketersediaan prasarana dan sarana TIK yang memenuhi standar keamanan informasi meningkat secara signidikan dengan capaian 100 persen pada 2023 dan 2024, serta indeks SPBE yang terus mengalami peningkatan, mencapai angka 3,92 pada 2024 dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 7,46. Dengan menjaga momentum pertumbuhan ini, Kabupaten Magelang dapat

semakin memperkuat infrastruktur digital yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

K. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi, yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi serta berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Dalam konteks desentralisasi daerah, koperasi memiliki peran strategis sebagai lembaga keuangan yang berdaya tahan tinggi, terutama dalam mendukung sektor ekonomi rakyat di wilayah pedesaan. Untuk semakin memperkuat peran koperasi, diperlukan kebijakan yang mendorong akses terhadap modal serta peningkatan kapasitas manajerial bagi para anggotanya.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencakup usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang UMKM. Kriteria penentuan usaha mikro dan kecil dapat didasarkan pada berbagai faktor, seperti modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, nilai investasi, insentif dan disinsentif, penggunaan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, serta jumlah tenaga kerja, yang disesuaikan dengan sektor usaha masing-masing. Adapun persentase usaha mikro dan kecil dihitung dengan membandingkan jumlah usaha mikro dan kecil terhadap total usaha kecil dan menengah yang ada.

Tabel 2.1.62
Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Persentase koperasi aktif	Persen	66,21	68,66	45,44	46,64	35,77	-14,27
2	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	Unit	106.200	87.287	87.287	87.287	65.757	-11,29
3	Persentase usaha mikro dan kecil	Persen	96,95	96,95	96,95	96,95	96,95	0,00
4	Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina	Persen	0,07	0,47	0,60	0,63	0,46	60,11
5	Peningkatan omzet usaha mikro	Persen	3,75	5,3	5,19	5,29	5,65	10,79
6	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB		N/A	N/A	N/A	N/A	0,019	
7	Disparitas Harga		N/A	N/A	N/A	N/A	8,92	

Sumber: Bidang Koperasi; Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Bidang Perdagangan; Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang, 2024; Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Persentase koperasi aktif menunjukkan penurunan signifikan dari 66,21 persen pada tahun 2020 menjadi 35,77 persen pada tahun 2024, faktor dampak

pandemi Covid-19 bisa menjadi salah satu penyebab utama penurunan ini, terutama pada tahun 2020 dan 2021. Indikator jumlah UKM non BPR/LKM aktif berhasil menjaga konsistensinya pada angka 87.287 unit pada tahun 2021 hingga 2023, tetapi mengalami penurunan menjadi 65.757 unit pada tahun 2024. Capaian tersebut mengindikasikan tantangan dalam mempertahankan usaha kecil dan menengah. Demikian pula persentase usaha mikro dan kecil tetap stabil pada 96,95 persen selama periode 2020 hingga 2024. Konsistensi tersebut mencerminkan bahwa sektor usaha mikro dan kecil memiliki dasar yang kokoh serta terus berperan sebagai pilar utama dalam mendukung perekonomian daerah. Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina memperlihatkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari 0,07 persen pada tahun 2020 menjadi 0,46 persen pada tahun 2024. Fluktuasi dalam indikator ini menyiratkan adanya ketidakstabilan dalam program pembinaan usaha mikro dan kecil. Omzet usaha mikro menunjukkan pertumbuhan positif dari tahun 2020 hingga 2024 dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 10,79 persen. Di sisi lain, masih terdapat beberapa indikator yang belum tersedia datanya pada periode tertentu, yakni indikator rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB dan indikator disparitas harga yang masing-masing capaiannya sebesar 0,019 dan 8,92 di tahun 2024.

Secara keseluruhan, data tersebut mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh koperasi dan UKM di Kabupaten Magelang. Penurunan pada beberapa indikator mengindikasikan perlunya penguatan dukungan dan intervensi yang lebih optimal untuk menjaga keberlanjutan pada sektor ini. Sementara itu, tren peningkatan dan stabilitas pada indikator lainnya menunjukkan adanya potensi pertumbuhan yang dapat dimaksimalkan melalui kebijakan serta program yang terarah dan berkelanjutan.

L. Penanaman Modal

Penanaman modal, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, diartikan sebagai segala jenis aktivitas investasi yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA) dalam rangka menjalankan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan menyediakan sumber pendanaan yang signifikan untuk pembangunan di berbagai daerah, kegiatan ini memberikan kontribusi yang substansial terhadap percepatan ekonomi. Selain itu, diharapkan investasi ini akan menciptakan

lapangan kerja baru, mentransfer teknologi, serta meningkatkan daya saing nasional. Oleh karena itu, penanaman modal menjadi elemen kunci dalam upaya perbaikan ekonomi secara berkelanjutan.

Tabel 2.1.63
Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Unit	73	169	159	139	176	24,61
2	Nilai investasi PMA	Miliar Rupiah	70,418	74,157	84,671	144,02	189,11	28,01
3	Nilai investasi PMDN	Miliar Rupiah	2.420,46	2.729,60	3.622,21	4.747,08	5.234,19	21,27
4	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rupiah	2.490,88	2.803,76	3.706,88	4.891,09	5.423,30	21,47
5	Rasio daya serap tenaga kerja	Persen	33,7	11,25	3,47	5,18	2,37	11,194
6	Kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN (miliar rupiah)	Miliar Rupiah	295,268	309,145	892,603	1.124,80	487,12	13,33
7	Pertumbuhan investasi	Persen	13,49	12,56	32,21	31,95	10,88	-5,23
8	Nilai survei kepuasan pelayanan perizinan	Angka	87,15	88,90	87,25	87,70	90,15	0,85

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Pada periode 2020 hingga 2024, sejumlah indikator menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam sektor investasi. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) mengalami peningkatan yang cukup tinggi, tercatat meningkat 24,61 persen per tahun, dari 73 unit pada 2020 menjadi 176 unit pada 2024. Hal ini didorong oleh kemudahan akses sistem seperti SPIPISE, OSS, dan OSS RBA yang semakin ramah pengguna, serta perubahan regulasi yang mendukung. Nilai investasi PMA juga mengalami pertumbuhan yang stabil dengan rata-rata tahunan mencapai 28,01 persen, naik dari 70,418 miliar rupiah pada 2020 menjadi 189,11 miliar rupiah pada 2024. Begitu pula, nilai investasi PMDN naik 21,27 persen, dari 2.420,26 miliar rupiah menjadi 5.234,19 miliar rupiah, sedangkan total nilai investasi PMDN/PMA mencapai 5.423,30 miliar rupiah pada 2024.

Namun, beberapa indikator menunjukkan penurunan yang perlu mendapat perhatian. Rasio daya serap tenaga kerja, yang pada 2020 tercatat sebesar 33,7 persen, mengalami penurunan drastis menjadi 3,47 persen pada 2022. Penurunan ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah investasi yang masuk dan penyerapannya dalam bentuk tenaga kerja. Selain itu, kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN yang tercatat lebih rendah pada 2024, yaitu sebesar 487,12 miliar rupiah dibandingkan dengan 2023, yaitu sebesar 1.124,80 miliar rupiah, menunjukkan adanya fluktuasi dalam

pencapaian target investasi. Sementara itu, pertumbuhan investasi yang sebelumnya menunjukkan angka positif pada 2020 hingga 2022, mulai menurun signifikan pada 2024, dengan rata-rata penurunan sebesar 5,23 persen per tahun.

Adapun penyusunan nilai survei kepuasan pelayanan perizinan yang menjadi salah satu indikator sasaran urusan penanaman modal mendasarkan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi penyelenggara pelayanan publik untuk melibatkan masyarakat dalam memberikan penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan 9 (sembilan) unsur, yaitu: 1) persyaratan; 2) sistem, mekanisme, dan prosedur; 3) waktu penyelesaian; 4) biaya atau tarif; 5) produk spesifikasi jenis pelayanan; 6) kompetensi pelaksana; 7) perilaku pelaksana; 8) penanganan pengaduan, saran, dan masukan; serta 9) sarana dan prasarana. Dalam lima tahun terakhir, nilai survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan meningkat, yakni sebesar 87,15 di tahun 2020 meningkat menjadi 90,15 di tahun 2024. Besaran nilai tersebut menunjukkan capaian yang sangat baik, berintegritas tinggi, dan transparan. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Magelang.

Secara keseluruhan, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan investasi belum sepenuhnya memberikan hasil yang maksimal terhadap pembentukan lapangan kerja di Kabupaten Magelang. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sinergis antara kebijakan investasi dan pengembangan tenaga kerja lokal. Di sisi lain, peningkatan kepuasan publik terhadap layanan perizinan memperlihatkan adanya perbaikan tata kelola yang dapat menjadi dasar bagi iklim investasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

M. Kepemudaan dan Olahraga

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009, kepemudaan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, serta aktualisasi diri pemuda dalam mencapai cita-citanya. Para pemuda diharapkan dapat berperan aktif sebagai agen perubahan, salah satunya melalui pengembangan olahraga, seni,

dan budaya. Keolahragaan, sebagai salah satu komponen dalam pengembangan kepemudaan, tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membangun karakter, disiplin, serta solidaritas sosial di kalangan generasi muda.

Untuk mendukung peran strategis pemuda, dalam undang-undang tersebut, pemerintah daerah diamanatkan untuk melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya. Di samping itu, pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam mengoordinasikan berbagai layanan kepemudaan guna menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan potensi dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah.

Tabel 2.1.64
Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	33,33	33,33	33,33	33,33	87,80	27,40
2	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	41,00	44,94	48,67	55,34	54,22	7,24
3	Jumlah atlet berprestasi	Orang	90	103	98	1.780	2.119	120,28
4	Rasio lapangan olahraga	Per 1.000 penduduk	0,20	0,20	0,20	0,20	1,94	76,48
5	Jumlah organisasi pemuda	Buah	27	27	27	27	36	7,46
6	Jumlah organisasi olahraga	Buah	41	41	32	32	37	-2,53
7	Jumlah kegiatan kepemudaan	Buah	4	4	6	13	21	51,37
8	Jumlah kegiatan olahraga	Buah	15	16	17	15	19	6,09
9	Lapangan olahraga	Unit	266	266	266	2456	2456	74,32
10	Cakupan prestasi generasi muda	Persen	53,63	44,07	55,32	46,44	45,83	-3,85

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2024; Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Selama periode 2020 hingga 2024, terdapat beberapa tren menarik dalam indikator kepemudaan dan olahraga. Persentase organisasi pemuda yang aktif konsisten di angka 33,33 persen selama empat tahun pertama, tetapi kemudian meningkat secara signifikan hingga mencapai angka 87,80 persen pada tahun 2024. Cakupan pembinaan olahraga menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 7,24 persen. Jumlah atlet berprestasi juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 120,28 persen per tahun. Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk juga menunjukkan peningkatan dari 0,20 pada 2020 menjadi 1,94 per 1.000 penduduk pada 2024, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 76,48 persen per tahun. Sementara itu, jumlah organisasi pemuda mengalami kenaikan dari sebanyak 27 organisasi dari tahun 2020 hingga 2023, menjadi 36

organisasi pada tahun 2024. Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2020 sebanyak empat kegiatan mengalami peningkatan secara bertahap hingga menjadi 21 kegiatan pada tahun 2024. Bertambahnya organisasi dan kegiatan kepemudaan menunjukkan meningkatnya inisiatif pemuda dalam berbagai aktivitas sosial.

Di sisi lain, beberapa indikator mengalami stagnansi atau penurunan menjelang tahun-tahun terakhir di periode tersebut. Jumlah organisasi olahraga mengalami penurunan dari 41 organisasi pada rentang tahun 2020 hingga 2021, turun menjadi 37 organisasi pada tahun 2024. Jumlah kegiatan olahraga juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun akibat perubahan minat masyarakat serta faktor eksternal seperti pandemi Covid-19 yang memengaruhi penyelenggaraan acara dan kegiatan sosial pada tahun 2020. Cakupan prestasi generasi muda menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun, dari 55,32 persen pada tahun 2022 menjadi 45,83 persen pada tahun 2024. Kurangnya kepedulian pemuda terhadap lingkungan sekitar juga menjadi salah satu permasalahan yang memengaruhi penurunan jumlah kegiatan kepemudaan.

Secara keseluruhan, terdapat perkembangan positif dalam partisipasi pemuda, pembinaan olahraga, dan penyediaan infrastruktur olahraga di Kabupaten Magelang. Namun, tantangan masih terlihat pada aspek kelembagaan organisasi olahraga serta penurunan cakupan prestasi generasi muda. Ke depannya, diperlukan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan pemuda dalam organisasi serta kegiatan olahraga. Penguatan tata kelola organisasi pemuda dan olahraga juga menjadi prioritas agar lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam mendukung pengembangan infrastruktur olahraga, Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga akan berfokus kepada penyempurnaan GOR Pakubumi dan penambahan fasilitas di Stadion Amerta sehingga diharapkan dapat menunjang penyelenggaraan *event* olahraga skala regional maupun nasional.

N. Statistik

Penguatan infrastruktur statistik yang terintegrasi merupakan elemen yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Dalam konteks ini, ketersediaan sistem data dan statistik yang andal, serta publikasi buku, seperti ‘Kabupaten Dalam Angka’ dan ‘PDRB’, berfungsi sebagai instrumen utama dalam menyediakan informasi

yang akurat, valid, dan komprehensif untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan. Selain itu, perluasan cakupan layanan informasi bagi desa dan perangkat daerah menjadi strategi yang signifikan untuk meningkatkan aksesibilitas data, memperkuat transparansi, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan.

Tabel 2.1.65
Capaian Indikator Urusan Statistik Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Buku "PDRB"	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4	Cakupan layanan informasi bagi desa dan PD	Persen	96,70	100,00	100,00	100,00	100,00	0,84

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang, 2024

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, seluruh indikator urusan statistik menunjukkan capaian yang memuaskan. Sistem data dan statistik yang terintegrasi telah tersedia sejak tahun 2020 hingga 2024. Demikian pula ketersediaan buku ‘Kabupaten Dalam Angka’ dan ‘PDRB’. Adapun cakupan layanan informasi bagi desa dan PD mengalami peningkatan yang signifikan dari 96,70 persen pada tahun 2020, menjadi kemudian terus meningkat hingga 100 persen pada tahun-tahun berikutnya. Di masa mendatang, perlu terus dioptimalkan pengelolaan data statistik daerah serta pemanfaatan sarana dan prasarana statistik dengan baik.

Selanjutnya, terdapat indikator baru yang dihitung pada urusan statistik ini, yakni Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang merupakan keluaran dari Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). IPS merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Adapun kegatan statistik sektoral yang dinilai pada Pemerintah Kabupaten Magelang meliputi (1) penyusunan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan (food security and vulnerability atlas/FSVA) tahun 2022; serta (2) pendataan rumah di kawasan rawan bencana tanah longsor tahun 2022. Berikut merupakan hasil penilaian IPS dan nilai indeks domain di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.1.66
Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2023
Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
Domain Prinsip SDI	2,60	1,81	2,00
Domain Kualitas Data	2,60	1,70	2,00
Domain Proses Bisnis Statistik	2,60	1,82	1,90
Domain Kelembagaan	2,60	1,85	2,26
Domain Statistik Nasional	2,60	1,74	1,79
Indeks Pembangunan Statistik	**2,60**	**1,78**	**2,00**

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2023, Pemerintah Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik

Berdasarkan hasil penilaian IPS tersebut, Kabupaten Magelang memiliki predikat cukup dengan capaian sebesar 2,00. Sementara itu, dilihat dari tingkat kematangannya, sebagian besar indikator pada setiap domain memiliki tingkat kematangan level 2 terkelola, yakni di mana proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri. Pada domain prinsip Satu Data Indonesia, seluruh indikator pada keempat aspek memiliki tingkat kematangan level 2. Demikian pula pada domain kualitas data, yang seluruh indikator pada kelima aspek memiliki tingkat kematangan level 2.

O. Persandian

Persandian memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan dan perlindungan data pemerintah, baik yang bersifat rahasia maupun yang dapat diakses oleh publik. Kinerja Kabupaten Magelang dalam bidang persandian diukur melalui indikator persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah. Capaian indikator ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem keamanan informasi, meningkatkan integritas data, dan mengoptimalkan efisensi komunikasi antarperangkat daerah. Upaya tersebut merupakan bagian integral dari pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang andal, yang bertujuan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel 2.1.67
Capaian Indikator Urusan Persandian Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persen	20,83	41,67	62,50	100,00	100,00	48,02

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang, 2024

Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah di Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah hanya 20,83 persen. Angka ini meningkat secara signifikan hingga pada tahun 2023 dan 2024 capaiannya menjadi 100 persen. Hal ini menunjukkan kondisi yang positif bagi Kabupaten Magelang, khususnya pada urusan persandian karena dapat mendorong peningkatan keamanan data pemerintah daerah.

P. Kebudayaan

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 disebutkan bahwa kebudayaan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Adapun pemajuan kebudayaan dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan; di mana pedoman utama yang diacu adalah pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan daerah, kebudayaan tidak hanya berperan dalam pelestarian nilai-nilai tradisional, tetapi juga menjadi elemen strategis dalam memperkuat identitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan seni dan budaya.

Sebagai bagian dari pembangunan daerah, kebudayaan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat identitas lokal serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu bentuk konkret dari upaya ini adalah penyelenggaraan festival seni dan budaya, yang tidak hanya berfungsi sebagai wadah ekspresi bagi pelaku seni, tetapi juga berperan dalam memperkuat interaksi sosial serta memperkenalkan warisan budaya kepada masyarakat yang lebih luas. Selain itu, revitalisasi dan inventarisasi karya budaya dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam menjaga dan menghidupkan kembali tradisi yang mulai tergerus oleh perkembangan zaman. Pengelolaan cagar budaya secara terpadu juga menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan pelestarian warisan budaya. Di sisi lain, luasnya cakupan pengelolaan kebudayaan serta ketersediaan fasilitas seni dan budaya yang memadai menjadi faktor penting dalam mendorong aktivitas seni yang berkelanjutan, termasuk memastikan keterlibatan kelompok kesenian dalam berbagai pertunjukan yang memperkaya dinamika budaya di daerah.

Tabel 2.1.68
Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	0	25	25	25	25	-
2	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	Persen	0,00	11,65	11,77	12,62	14,75	8,18
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya Budaya	943	1.030	1.074	1.030	1.019	1,96
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	90	90	90	90	90	-
5	Cakupan pengelolaan kebudayaan	Persen	32,26	33,67	34,98	36,76	34,64	1,80
6	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Buah	0	25	25	25	25	-
7	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	1.825.626	1.841.087	1.856.548	1.872.009	1.902.931	1,04
8	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	Persen	11,11	11,71	12,31	12,91	13,26	4,52

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang; Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Selama periode 2020-2024, beberapa indikator kebudayaan di Kabupaten Magelang mengalami tren peningkatan yang positif. Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan meningkat dari 0 persen pada tahun 2020 menjadi 14,75 persen pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 8,18 persen. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi juga menunjukkan tren positif, meskipun fluktuatif, dengan peningkatan dari 943 karya pada tahun 2020 menjadi 1.019 karya pada tahun 2024. Demikian pula, cakupan pengelolaan kebudayaan mengalami kenaikan dari 32,26 persen pada tahun 2020 menjadi 34,64 persen pada tahun 2024, meskipun dengan pertumbuhan yang relatif rendah, yaitu 1,80 persen per tahun. Selain itu, jumlah pengunjung tempat bersejarah terus meningkat setiap tahunnya, dari 1.825.626 orang pada tahun 2020 menjadi 1.902.931 orang pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 1,04 persen per tahun. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat dalam pertunjukan seni juga mengalami peningkatan dari 11,11 persen pada tahun 2020 menjadi 13,26 persen pada tahun 2024.

Adapun indikator lainnya menunjukkan kecenderungan tidak mengalami perkembangan atau stagnan. Penyelenggaraan festival seni dan budaya serta jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya hanya mulai tercatat sejak tahun 2021 dengan jumlah yang tetap, yaitu 25 kegiatan atau fasilitas per tahun hingga 2024. Hal yang sama terjadi pada jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu, yang tetap berada pada angka 90 unit sejak tahun 2020 hingga

2024. Secara keseluruhan, meskipun terdapat peningkatan dalam beberapa aspek kebudayaan, masih terdapat tantangan dalam upaya meningkatkan capaian indikator yang menunjukkan stagnansi. Ke depannya, diperlukan kebijakan yang lebih strategis agar urusan kebudayaan dapat berjalan lebih optimal dan berdampak luas bagi masyarakat.

Q. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan institusi yang mengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan menggunakan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007). Layanan perpustakaan termasuk dalam sektor pendidikan, mengingat perannya yang penting dalam menyediakan referensi dan bahan bacaan yang mendukung proses pembelajaran serta pengembangan individu dan komunitas. Dengan memastikan akses informasi yang merata, perpustakaan berkontribusi pada pencapaian ilmiah, penguatan kapasitas intelektual masyarakat, peningkatan inovasi, serta mendorong inklusi sosial. Oleh karena itu, pengembangan layanan perpustakaan tidak hanya bertujuan untuk memperluas akses informasi, tetapi juga memperkaya aspek budaya dan sosial masyarakat.

Dalam undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab memastikan penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan yang merata sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Selain itu, pemerintah berperan aktif dalam mendorong minat baca melalui promosi dan fasilitasi layanan perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan juga diarahkan untuk mendukung penelitian serta pelestarian kekayaan budaya daerah.

Tabel 2.1.69
Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	22.690	53.093	62.360	63.889	67.615	31,39
2	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	59.328	57.249	58.527	59.599	60.935	0,67
3	Rasio jumlah pengunjung perpustakaan	Persen	0,87	2,04	2,38	2,40	2,53	30,45
4	Jumlah perpustakaan	Unit	858	884	890	998	1.069	5,65
5	Rasio perpustakaan persatuan penduduk		0,660	0,680	0,678	0,750	0,799	4,90
6	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan daerah	Judul	26.365	26.931	27.923	26.824	28.252	1,74
7	Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah		0,35	0,82	0,95	0,71	0,70	19,12

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
8	Rasio pengunjung perpustakaan di perpustakaan kabupaten	Persen	0,018	0,041	0,048	0,048	0,051	30,40
9	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	44.990	45.648	46.974	47.275	46.997	1,10
10	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Persen	0	0	0,20	0,33	0,33	28,45
11	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		N/A	N/A	96,58	88,031		-8,85
12	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan		-	-	0,00018	0,00014	0,00015	-7,46

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024; Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Berbagai indikator terkait layanan perpusatakaan di Kabupaten Magelang menunjukkan peningkatan. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun mengalami tren positif dengan pertumbuhan rata-rata 31,39 per tahun sejak 2020, didukung oleh strategi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, pelaksanaan bazar buku, dan inovasi layanan alat peraga edukatif. Rasio jumlah pengunjung perpusatakaan juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 30,45 persen per tahun. Selain itu, jumlah perpustakaan meningkat dari 858 unit pada 2020 menjadi 1.069 unit pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 5,65 persen per tahun. Hal ini mencerminkan komitmen kebijakan daerah dalam regulasi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang literasi. Rasio perpustakaan per satuan penduduk pun menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 4,90 persen per tahun. Ketersediaan koleksi buku juga mengalami peningkatan, dengan jumlah koleksi judul buku tumbuh sebesar 1,74 persen per tahun, berkat fasilitasi APBD dan bantuan dari Perpustakaan Nasional. Jumlah pustakawan bersertifikat juga meningkat sejak 2022, mencapai 0,33 persen pada 2024, seiring dengan komitmen peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan fasilitasi dari institusi penyelenggara sertifikasi.

Di sisi lain, beberapa indikator mengalami penurunan. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menunjukkan penurunan dari 96,58 pada 2022 menjadi 88,031 pada 2023, dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -8,85 persen. Begitu pula, tingkat pemanfaatan perpustakaan mengalami penurunan sebesar 7,46 persen per tahun sejak 2022. Selain itu, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah mengalami stagnansi, dengan pertumbuhan hanya 1,10 persen per tahun, bahkan sempat menurun pada 2023 sebelum sedikit meningkat kembali pada 2024. Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah juga menunjukkan tren fluktuatif, dengan rata-

rata pertumbuhan 19,12 persen per tahun, tetapi masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan yang dihadapi akibat penurunan pada beberapa indikator, upaya dalam meningkatkan capaian pada indikator yang lainnya menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan peran perpustakaan sebagai pusat pengetahuan di Kabupaten Magelang. Ke depannya, diperlukan langkah-langkah yang lebih strategis dalam penguatan konten literasi, peningkatan akses terhadap koleksi buku yang relevan, serta optimalisasi peran pustakawan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi.

R. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan yang optimal menjadi elemen krusial dalam memastikan keberlanjutan pembangunan, terutama dalam menjaga integritas data dan dokumentasi perangkat daerah. Di Kabupaten Magelang, standar pengelolaan arsip diterapkan melalui indikator-indikator seperti persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan, jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola kearsipan, dan persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku. Selain memperkuat transparansi administrasi, sistem kearsipan yang terstandardisasi juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi, teknologi informasi, dan kapasitas kelembagaan perlu terus ditingkatkan guna memastikan pengelolaan arsip yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Tabel 2.1.70
Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	38,46	69,23	100,00	126,92	153,85	41,42
2	Peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan	Orang	56	25	367	153	83	10,34
3	Jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan	Kegiatan (realisasi) - lokasi (target)	56	1	30	3	2	-56,53
4	Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku	Persen	30,76	61,54	100,00	126,92	153,85	49,55

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024; Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 38,46 persen menjadi 153,85 persen pada tahun 2024. Adapun peningkatan tersebut salah satunya didorong oleh adanya kegiatan pengawasan kearsipan, di mana pada awal penyusunan dokumen RPJMD, targetnya adalah 26 OPD yang menerapkan standar arsip baku. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kearsipan juga tercermin melalui peningkatan kegiatan pembinaan petugas pengarsipan, seperti *workshop* untuk OPD, peningkatan kompetensi arsiparis, dan pelatihan SRIKANDI. Sementara itu, jumlah kegiatan pembinaan petugas arsip mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2020 sebanyak 56 kegiatan menjadi hanya dua kegiatan pada tahun 2024.

2.1.4.6. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pariwisata

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, wisata didefinisikan sebagai suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh pelaku wisata, baik secara individu maupun kelompok, dengan mengunjungi tempat tertentu untuk rekreasi, melakukan pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjunginya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara. Sementara itu, pariwisata merupakan beragam aktivitas wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, serta pemerintah pusat dan daerah.

Sektor pariwisata di Kabupaten Magelang berperan sebagai sektor unggulan utama yang berfungsi sebagai wadah bagi pemasaran produk lokal. Pengembangan sektor ini tidak hanya berdampak langsung pada perekonomian masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan sektor lainnya, seperti perdagangan, jasa, dan industri. Pengelolaan destinasi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan promosi digital diperlukan untuk meningkatkan daya saing serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Penguatan ekosistem pariwisata melalui kolaborasi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pengalaman wisata berkualitas dan berdaya saing.

Tabel 2.1.71
Capaian Indikator Urusan Pariwisata Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Kunjungan wisata	Persen	100	57	176	205	205,65	19,75
2	Lama kunjungan wisata	Hari	1,77	1,44	1,5	1,59	1,63	-2,04
3	PAD sektor pariwisata	Rupiah	1.844.587.646	1.196.863.960	3.783.318.920	5.829.430.670	5.206.275.060	29,62
4	Jumlah Kunjungan wisata	Orang	1.456.289	872.052	2.830.263	3.454.778	3.640.199	25,74
5	Jumlah tamu wisatawan mancanegara	Ribu Orang	37,68	0,90	75,72	252,96	296,92	67,54
6	Kunjungan Wisata: Nusantara	Ribu Orang	1.419	871	2.755	3.202	3.343	23,90
7	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	persen	-81,39	-76,95	5401,01	157,83	12,85	-
8	Persentase peningkatan lama tinggal wisatawan	persen	16,90	6,21	22,39	3,80	0,63	-56,06

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang

Setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat pandemi Covid-19 pada 2020-2021, sektor pariwisata di Kabupaten Magelang menunjukkan pemulihan yang positif dan terus menunjukan tren meningkat. Jumlah kunjungan wisata mengalami peningkatan dari 872.052 orang pada 2021 menjadi 3.640.199 orang pada 2024, dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 61,01 persen per tahun. Kunjungan wisatawan mancanegara juga meningkat pesat dari hanya 0,90 ribu orang pada 2021 menjadi 296,92 ribu orang pada 2024, menandakan pemulihan kepercayaan wisatawan asing. Lama kunjungan wisatawan menunjukkan tren positif, dari 1,44 hari pada 2021 menjadi 1,63 hari pada 2024.

Selanjutnya, PAD sektor pariwisata di Kabupaten Magelang juga menunjukkan hal yang positif, meskipun di awal pandemi Covid-19 juga menunjukkan penurunan. Pada tahun 2020, besarannya pendapatan daerah dari sektor pariwisata ini tercatat sebesar Rp 1.844.587.646,00 dan menunjukkan penurunan hingga 35,11 persen pada tahun 2021, hingga besarannya tercatat sebesar Rp 1.196.863.960,00. Seiring dengan peningkatan jumlah wisata sejak tahun 2023, besaran PAD sektor pariwisata ini juga menunjukkan pertumbuhan yang positif hingga tahun 2024 atau ditandai dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 63,24 persen per tahun, di mana pada tahun 2024 besaran pendapatan daerah dari sektor pariwisata ini tercatat sebesar Rp 5.206.275.060,00.

Kendati demikian, tingkat pertumbuhan peningkatan lama tinggal wisatawan cenderung menurun, dari 22,39 persen pada 2022 menjadi hanya

0,63 persen pada 2024. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi lebih lanjut untuk meningkatkan daya tarik dan fasilitas yang dapat memperpanjang durasi kunjung wisatawan. Secara keseluruhan, pemulihan sektor pariwisata di Kabupaten Magelang pascapandemi berjalan dengan baik, ditandai dengan meningkatnya jumlah wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Namun, optimalisasi pendapatan daerah serta upaya meningkatkan lama tinggal wisatawan perlu mendapat perhatian lebih. Strategi pengembangan destinasi dan peningkatan kualitas layanan dapat menjadi langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan yang lebih berkelanjutan di sektor ini.

B. Pertanian

Capaian kinerja sektor pertanian di Kabupaten Magelang menunjukkan tren yang beragam, dengan beberapa indikator mengalami peningkatan dan yang lainnya mengalami penurunan. Produksi padi, yang dibudidayakan secara intensif dengan dukungan program bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah, mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, rata-rata sebesar 0,75 persen per tahun. Penurunan ini dipengaruhi oleh fenomena El Nino serta penurunan luas baku sawah dari 28.690 hektare (berdasarkan SK Menteri ATR BPN No. 686-SK-PG-03-03-XII-2019 tentang Luas Baku Sawah) menjadi 25.268,72 hektare (berdasarkan SK Bupati Magelang Nomor 180.182/353/KEP/20/2021 tentang LP2B). Produksi jagung juga menunjukkan penurunan signifikan, dari 44.040 ton pada tahun 2020 menjadi hanya 22.064 ton pada tahun 2024, akibat peralihan sebagian petani ke komoditas lain serta adanya serangan hama dan penyakit, terutama penyakit bulai jagung. Produksi jeruk mengalami penurunan paling tajam, dari 3.007 kuintal pada tahun 2020 menjadi hanya 82 kuintal pada tahun 2024, dengan rata-rata penurunan mencapai 59,33 persen akibat serangan organisme pengganggu tanaman.

Sementara itu, beberapa komoditas menunjukkan tren yang lebih positif. Produksi bawang putih, yang sempat menurun akibat serangan hama dan persaingan dengan impor sebelum 2017, kembali meningkat setelah adanya intervensi pemerintah melalui program APBN yang mendukung pengembangan kawasan budidaya bawang putih. Di sektor cabai, pemerintah pusat bekerja sama dengan petani lokal dalam program Champion, yang berperan dalam menstabilkan harga dan mendorong peningkatan produksi. Adapun kelengkeng tumbuh pesat dengan rata-rata pertumbuhan 38,40 persen per tahun akibat pengembangan kawasan dan dukungan dari kegiatan Agro Edu Wisata di

Kecamatan Borobudur. Selain itu, produksi kopi meningkat dari 1.490 ton pada tahun 2020 menjadi 2.118,9 ton pada tahun 2024, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 9,20 persen, menunjukkan stabilitas produksi yang baik meskipun tetap dipengaruhi oleh faktor iklim. Produksi salak juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 5,08 persen per tahun sebagai hasil dari peremajaan pascaerupsi Merapi tahun 2010. Produktivitas jagung pun meningkat dari 66,10 kuintal per hektare pada tahun 2020 menjadi 80,90 kuintal per hektare pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, kinerja sektor pertanian di Kabupaten Magelang memperlihatkan dinamika yang kompleks. Beberapa komoditas mengalami penurunan akibat perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan serangan hama, sementara komoditas lain menunjukkan pertumbuhan karena intervensi pemerintah dan penguatan kelembagaan petani.

Tabel 2.1.72
Capaian Indikator Urusan Pertanian Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Cakupan bina kelompok petani	Persen	36,22	39,00	40,01	42,15	45,64	5,95
2	Persentase produk pertanian yang terstandardisasi	Persen	1,12	1,54	N/A	N/A	N/A	37,50
3	Persentase kenaikan luas lahan pertanian unggulan	Persen	N/A	N/A	4,92	1,70	1,70	-41,22
4	Persentase kenaikan produksi pertanian/perkebunan	Persen	N/A	5,13	1,58	0,61	0,38	-58,00
5	Produksi padi	Ton (GKP)	419.010,00	431.123,00	407.149,00	410.437,50	406.576,50	-0,75
6	Produksi jagung	Ton/th	44.040,00	31.468,00	31.238,00	19.031,17	22.064,00	-15,87
7	Produksi bawang putih	Ton (askip)	4753,90	4327,00	4861,00	3061,90	3748,40	-5,77
8	Produksi cabai	Ton (segar)	78.324,00	93.648,00	100.369,00	110.630,40	88.098,30	2,98
9	Produksi cengkeh	Ton (bunga kering)	167,70	168,25	170,27	137,80	187,00	2,76
10	Produksi jeruk	Kuintal (segar)	3.007	3.073	2.525	206	82	-59,33
11	Produksi kelapa dalam	Ton (kopra)	7.531	7.556	7.743	6.656,66	7.683,10	0,50
12	Produksi kelengkeng	Ton (segar)	359,2	728	735	1399,8	1318	38,40
13	Produksi kopi	Ton (ose kering)	1.490,00	1.561	1.665	1.808,6	2.118,9	9,20
14	Produksi salak	Ton (segar)	68.689,30	73.523,00	80.264,00	69.410,00	83.734,10	5,08
15	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kw/Ha (gkg)	62,50	N/A	65,80	64,20	62,90	0,16
		Kw/Ha (gkp)	N/A	73,81	79,00	72,20	76,20	1,07
16	Produktivitas jagung	Kw/Ha	66,10	67,07	71,47	65,20	80,90	5,18

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2024

Dalam sub bahasan pertanian ini, juga akan dibahas mengenai sub urusan peternakan. Kabupaten Magelang memiliki potensi peternakan yang

cukup besar, baik pada ternak ruminansia maupun non ruminansia. Dalam lima tahun terakhir, produksi daging secara keseluruhan di Kabupaten Magelang mengalami tren peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 1,34 persen per tahun, mencapai 17.382,73 ton pada 2024. Sektor unggas menunjukkan perkembangan pesat, terutama produksi ayam pedaging yang tumbuh signifikan dengan rata-rata 4,21 persen per tahun, mencapai 12.056,65 ton pada 2024. Selain itu, produksi telur juga mengalami peningkatan yang stabil, mencapai 18.419,71 ton pada 2024.

Sebaliknya, produksi sapi potong mengalami penurunan signifikan, dari 1.949.255 kilogram pada 2023 menjadi 1.392.567 kilogram pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -7,63 persen per tahun. Produksi ayam ras petelur juga mengalami kontraksi tajam, turun drastis pada 2022 dan belum menunjukkan pemulihan penuh hingga 2024. Produksi itik turut mengalami penurunan, dari 100.050 kilogram pada 2022 menjadi 87.433 kilogram pada 2024.

Tabel 2.1.73
Capaian Indikator Sub Urusan Peternakan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%/Tahun)
1	Produksi daging (Ruminansia dan Non Ruminansia)	Ton	16.484,37	16.680,61	16.972,22	17.091,81	17.382,73	1,34
2	Produksi Kerbau	Kg	17.040	865	867	-	173,30	-36,11
3	Produksi Kambing	Kg	797.242	786.433	800.189	787.390	780.079	-0,54
4	Produksi Domba	Kg	1.121.236	1.113.734	1.133.069	1.115.118	1.219.967	2,13
5	Produksi Sapi potong	Kg	1.912.619	1.946.061	1.946.061	1.949.255	1.392.567	-7,63
6	Produksi Sapi Perah (susu)	liter	818.461	833.813	618.851	888.750	915.964	2,85
7	Produksi Ayam Buras	Ton	1.246,58	1.244,88	1.266,63	1.246,26	1.061.123,00	440,15
8	Produksi Ayam Pedaging	Ton	10.224,15	10.403,03	11.694,31	11.728,76	12.056,65	4,21
9	Produksi Ayam Ras Petelur	Ton	1.069,53	1.056,75	135,30	135,00	761,87	-8,13
10	Produksi Telur	Ton	17.071,88	17.359,82	17.280,07	17.951,50	18.419,71	1,92
11	Produksi Itik	Kg	96.689	98.340	100.050	98.441	87.433	-2,48

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka, BPS 2024

Secara keseluruhan, meskipun beberapa indikator mengalami pertumbuhan positif, penurunan produksi pada beberapa komoditas utama, terutama sapi potong dan ayam ras petelur, perlu mendapatkan perhatian serius. Diperlukan kebijakan strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi ternak, seperti peningkatan efisiensi produksi serta mitigasi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan hasil ternak.

C. Perdagangan

Perdagangan merupakan suatu aktivitas pertukaran barang dan jasa antarwilayah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing wilayah. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014, perdagangan dalam negeri didefinisikan sebagai kegiatan jual belid yang berlangsung alam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sedangkan perdagangan internasional meliputi transaksi antara penduduk dari negara yang berbeda, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Di Kabupaten Magelang, kinerja sektor perdagangan diukur melalui berbagai indikator, antara lain nilai ekspor bersih, cakupan bina kelompok pedagang atau usaha informal, cakupan pelayanan perdagangan, serta jumlah pasar yang memperoleh penghargaan Pasar Tertib Ukur.

Tabel 2.1.74
Capaian Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Ekspor bersih perdagangan	Juta US$	58,28	88,07	85,97	78,38	N/A	10,38
2	Cakupan pelayanan perdagangan	Persen	48,29	71,82	N/A	N/A	N/A	
3	Jumlah pasar yang mendapat penghargaan Pasar Tertib Ukur	Unit	7	7	7	8	N/A	
4	Nilai ekspor non migas	US$	72.209.830,24	120.796.110,80	114.489.310,46	108.579.185,71	119.114.590,35	13,33
5	Persentase pertumbuhan ekspor non migas	Persen	-0,60	0,40	-0,06	-0,05	9,70	

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025; Bidang Metrologi; Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang, 2024

Selama periode 2020 hingga 2024, sejumlah indikator menunjukkan tren peningkatan yang mencerminkan kemajuan sektor perdagangan di daerah. Nilai ekspor non migas mencatat pertumbuhan yang cukup stabil dengan rata-rata peningkatan sebesar 13,33 persen per tahun, meningkat dari US$72,2 juta pada tahun 2020 menjadi US$119,1 juta pada tahun 2024. Selain itu, jumlah pasar yang meraih penghargaan Pasar Tertib Ukur juga mengalami peningkatan dari 7 unit pada tahun 2020 hingga 2020 menjadi delapan unit pada tahun 2023, yang menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan terhadap standar pengukuran dan perlindungan konsumen. Ekspor bersih perdagangan juga mengalami pertumbuhan dengan rata-rata tahunan sebesar 10,38 persen, meskipun terdapat sedikit fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir.

Di sisi lain, beberapa indikator menunjukkan stagnasi atau penurunan yang memerlukan perhatian lebih lanjut, cakupan pelayanan perdagangan

mengalami ketidakjelasan data setelah tahun 2021, yang berpotensi mencerminkan tantangan dalam perluasan akses layanan perdagangan. Persentase pertumbuhan ekspor non migas juga menunjukkan tren yang tidak konsisten, dengan nilai yang mengalami fluktuasi, bahkan mencatat pertumbuhan negatif sebesar -0,60 persen pada tahun 2020 dan -0,06 persen pada tahun 2022.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat peningkatan pada nilai ekspor dan indikator lainnya, fluktuasi dalam pertumbuhan ekspor non migas dan ketidakstabilan dalam cakupan pelayanan perdagangan menunjukkan bahwa sektor perdagangan masih menghadapi tantangan struktural. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terarah dalam memperkuat daya saing produk ekspor, meningkatkan diversifikasi pasar, serta memastikan keberlanjutan peningkatan cakupan layanan perdagangan guna menjaga agar pertumbuhan sektor ini tetap berkelanjutan.

D. Perindustrian

Perindustrian adalah tatanan dan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian). Adapun industri dapat didefinisikan sebagai seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk jasa industri. Sektor ini memainkan peran yang krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, serta penguatan struktur ekonomi di daerah. Beberapa indikator kunci yang digunakan untuk mengukur perkembangan sektor ini Di Kabupaten Magelang meliputi jumlah industri kecil dan menengah, persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah, serta indeks industri yang terbina.

Tabel 2.1.75
Capaian Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Jumlah industri kecil dan menengah	Unit	22.054	23.827	24.131	24.045	24.045	2,18
2	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persen	-8,57	8,04	1,28	-0,36	0,00	
3	Indeks industri yang terbina	Indeks	N/A	N/A	1,26	3,01	1,30	

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025; Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2024

Indikator jumlah industri kecil dan menengah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, terdapat sebanyak 22.054 unit industri kecil dan menengah, yang kemudian meningkat secara bertahap hingga menjadi 24.045 unit pada tahun 2024. Persentase pertumbuhan industri kecil dan menegah menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, tercatat penurunan sebesar 8,57 persen, diikuti dengan kenaikan pada tahun 2021 menjadi 8,04 persen. Namun, setelah itu, pertumbuhannya menurun secara bertahap hingga menjadi 0,00 persen pada tahun 2024. Indeks industri yang terbina meningkat dari 1,26 pada tahun 2022 menjadi 3,01 pada tahun 2023, tetapi kemudian mengalami penurunan menjadi 1,30 pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam pengembangan sektor industri kecil dan menengah yang perlu perhatian lebih lanjut, terutama terkait dengan fluktuasi pertumbuhan pada persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih efektif dalam mendukung perkembangan industri kecil dan menengah agar mampu mengatasi tantangan dan mencapai hasil yang lebih optimal.

E. Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatur bahwa perikanan merupakan seluruh aktivitas yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dalam sistem bisnis perikanan, yang mencakup tahap praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Hal ini menegaskan bahwa sektor perikanan memiliki peran yang luas dan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. sektor perikanan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga merupakan komponen esensial dari perekonomian daerah. Untuk mengoptimalkan potensi ekonomi sektor ini tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem perairan, diperlukan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Tabel 2.1.76
Capaian Indikator Urusan Perikanan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Produksi perikanan	Persen	73,90	107,58	100,27	100,02	100,01	7,86
2	Angka konsumsi ikan	Kg/Kap/ Tahun	18,70	21,23	21,67	26,91	26,91	9,53
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen	1,23	1,51	1,59	1,50	1,47	4,58
4	Produksi benih ikan	ekor (x1000)	1.719.206, 10	2.207.858, 24	1.790.791, 00	1.842.161, 00	1.897.670, 07	2,50
5	Produksi ikan konsumsi	Ton	18.476,00	20.275,27	19.276,47	19.808,00	20.401,82	2,51
6	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	18.476,00	20.275,27	19.276,00	19.808,00	20.401,82	2,51
7	Produksi perikanan tangkap	Ton	230,63	310,12	311,00	301,71	305,38	7,27
8	Produksi ikan hias	ekor	2.316.200	2.590.690	2.460.811	2.527.520	2.607.529	3,01

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025; Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, 2024

Sektor perikanan di Kabupaten Magelang menunjukkan pertumbuhan positif, terutama dalam konsumsi ikan yang meningkat dari 18,70 kilogram per kapita pada 2020 menjadi 26,91 kilogram per kapita pada 2024 (rata-rata pertumbuhan 9,53 persen per tahun) serta produksi perikanan tangkap yang tumbuh 7,27 persen per tahun. Produksi ikan hias juga meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 3,01 persen per tahun. Namun, beberapa indikator menunjukkan perlambatan, seperti produksi perikanan kelompok nelayan yang menurun dari tahun 2023 ke 2024 menjadi sebesar 1,47 persen pada 2024 dan produksi benih ikan yang hanya tumbuh 2,5 persen per tahun. Meskipun secara umum sektor perikanan mengalami peningkatan, optimalisasi produksi budidaya dan pemberdayaan nelayan masih perlu diperkuat untuk mendukung pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

2.1.4.7. Penunjang Urusan

A. Perencanaan Pembangunan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan pedoman utama dalam perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun. Dokumen ini memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan mengarahkan pembangunan daerah sesuai dengan visi, tujuan, dan prioritas yang telah ditetapkan secara resmi. Sejalan dengan RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang juga ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, berperan sebagai dokumen strategis yang menerjemahkan visi jangka panjang ke dalam sasaran pembangunan lima tahunan. Sementara itu, Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) menjadi dokumen tahunan yang merinci program dan kegiatan pembangunan, termasuk alokasi anggaran, agar selaras dengan tujuan RPJMD dan RPJPD. Selain ketiga dokumen tersebut, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga memiliki peran krusial dalam mengarahkan pembangunan wilayah. Dokumen ini mengatur pola pemanfaatan ruang, sistem perkotaan, infrastruktur, serta jaringan wilayah untuk memastikan keserasian antara aspek pembangunan fisik dan kebijakan ekonomi, sosial, serta lingkungan.

Tabel 2.1.77
Capaian Indikator Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025; Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang Tahun 2024

Selama periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Magelang secara konsistem memastikan tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Konsistensi ini tercermin dalam penyusunan dan penetapan berbagai dokumen perencanaan, seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, serta RTRW, yang diatur melalui peraturan daerah. Secara khusus, RPJPD tetap berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang RPJPD Tahun 2005-2025, sedangkan RPJMD mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 yang merevisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD 2019-2024.

Pada tingkat tahunan, penyusunan RKPD juga berjalan selaras dengan kebijakan jangka menengah, sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Salah satunya adalah RKPD tahun 2024, yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2023. Sejalan dengan pembaruan kebijakan pembangunan, aspek tata ruang juga mengalami penyesuaian dengan dicabutnya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW 2010-2030 dan digantikan oleh Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW 2024-2044. Keberadaan dasar hukum yang mengikat ini memberikan landasan kokoh bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan yang sejalan dengan visi serta arah kebijakan jangka panjang.

Selanjutnya, konsistensi antara RPJMD dan RKPD Kabupaten Magelang selama periode 2020 hingga 2024 mencapai 100 persen, yang mengindikasikan bahwa seluruh program yang dirumuskan dalam RPJMD telah diimplementasikan secara utuh dalam pelaksanaan tahunan melalui RKPD. Tingginya tingkat konsistensi ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan rencana pembangunan jangka menengah ke dalam langkah-langkah konkret di setiap tahun anggaran. Tidak hanya itu, keterpaduan antara RKPD dan APBD juga menunjukkan capaian 100 persen, menandakan bahwa sebagian besar program yang dirancang dalam RKPD dapat direalisasikan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, kesesuaian antara rencana pembangunan dan RTRW Kabupaten Magelang dalam lima tahun terakhir juga tetap stabil di angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang diterapkan telah mempertimbangkan aspek tata ruang secara optimal sehingga mampu menciptakan keterpaduan antara perencanaan wilayah dan pelaksanaan program pembangunan. Sebagai bentuk kesinambungan kebijakan, dokumen RPJMD dalam periode 2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024 yang sebelumnya telah diselaraskan dengan RTRW 2010-2030, yang semakin menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Kabupaten Magelang dilakukan secara sistematis dan terintegrasi.

B. Keuangan

Aspek keuangan dalam pengelolaan daerah merupakan cerminan dari kinerja fiskal dan efektivitas pemanfaatan anggaran dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilan pengelolaan keuangan Kabupaten Magelang diukur melalui berbagai indikator utama, antara lain opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan, persentase Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta persentase program dan kegiatan yang tidak terlaksana. Selain itu, pemenuhan alokasi belanja wajib, seperti sekurang-kurangnya 20 persen untuk sektor pendidikan dan 10 persen untuk sektor kesehatan, serta mekanisme distribusi dana bagi hasil pada kabupaten/kota dan desa, menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan

fiskal daerah. Kinerja fiskal juga dievaluasi berdasarkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penetapan APBD, persentase ketepatan waktu dalam penetapan APBD, serta rasio pajak daerah terhadap PDRB, yang semuanya berkontribusi pada keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2.1.78
Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	12,48	13,62	11,16	5,86	3,51	-27,19
3	Persentase program yang tidak terlaksana	Persen	0	0	0	0	0	
4	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	0	0	0	0	0	
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	27,58	39,68	26,30	29,42	29,84	1,99
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	14,40	25,55	17,33	18,02	21,60	10,67
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	25,97	36,22	26,58	24,29	22,70	-3,31
8	Persentase Peningkatan PAD	Persen	-20,95	13,83	15,27	7,58	11,89	
9	Penetapan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
10	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
11	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,36	0,35	0,45	0,47	0,48	7,77

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024 (Audited)

Selama periode 2020 hingga 2024, opini BPK terhadap laporan keuangan menunjukkan konsistensi yang positif dengan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahunnya. Rasio pajak daerah terhadap PDRB juga meningkat dari 0,36 persen pada 2020 menjadi 0,48 persen pada 2024. Selain itu, persentase belanja kesehatan turut mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni dari 14,40 persen pada 2020 menjadi 21,60 persen pada 2024, atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,67 persen per tahun. Sementara itu, belanja pendidikan meningkat dengan rata-rata 1,99 persen per tahun, yakni tercatat sebear 27,58 persen di tahun 2020 meningkat menjadi 29,84 persen di tahun 2024. Peningkatan lainnya juga terlihat pada persentase peningkatan PAD yang meskipun sempat terkontraksi di tahun 2020 yakni sebesar 20,95 persen, berhasil menunjukkan peningkatan di tahun-tahun berikutnya, hingga mencapai 11,89 persen pada tahun 2024.

Selanjutnya, terdapat beberapa indikator yang tercatat menunjukkan kecenderungan menurun, diantaranya adalah persentase SILPA terhadap APBD yang sempat yang tercatat sebesar 12,48 persen di tahun 2020, menurun signifikan menjadi 3,51 persen di tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan

adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran, namun hal ini juga bisa mencerminkan keterbatasan dalam pengalokasian anggaran yang tidak tercapai sepenuhnya. Selain itu, bagi hasil kabupaten/kota dan desa menunjukkan tren penurunan dari 25,97 persen pada 2020 menjadi 22,70 persen pada 2024, yang menunjukkan adanya ketimpangan dalam alokasi bagi hasil.

Secara umum, kinerja keuangan Kabupaten Magelang tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang positif, terutama dalam peningkatan pendapatan daerah dan alokasi belanja untuk sektor prioritas seperti kesehatan dan pendidikan. Meski demikian, penurunan pada beberapa indikator, seperti SILPA dan bagi hasil untuk kabupaten/kota dan desa, menjadi perhatian yang perlu ditindaklanjuti agar pengelolaan keuangan daerah ke depan dapat berjalan lebih optimal.

C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kapasitas dan efektivitas instansi pemerintah dapat diupayakan melalui penguatan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yang berkelanjutan. Di Kabupaten Magelang, upaya tersebut tercermin dalam berbagai indikator utama, seperti rata-rata lama pegawai dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan, serta persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang aktif berpartisipasi dalam program pendidikan dan pelatihan formal maupun struktural. Adapun jumlah jabatan pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional tertentu juga menjadi aspek krusial dalam memastikan efektivitas tata kelola pemerintahan. Sebagai bagian dari penguatan manajemen ASN, indeks profesionalitas ASN dan indeks sistem merit juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja serta kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.

Tabel 2.1.79
Capaian Indikator Urusan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
Kabupaten Magelang Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	5	5	5	5	5	-
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	15,23	18,04	15,57	32,55	41,04	28,12
3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	0,30	0,30	0,54	2,11	1,08	37,63
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	16	23	27	32	32	18,92
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	2.235	2.014	1.846	1.495	931	-19,66
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan	6.025	5.584	5.788	5.704	8.265	8,22
7	Indeks profesionalitas ASN	Angka (1-100)	63,00	43,52	46,26	76,23	79,37	5,94

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
8	Indeks sistem merit	Angka	0,60	0,64	0,64	0,71	0,71	4,30
9	Persentase pelanggaran pegawai	Persen		0,236	0,117			

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang; Evaluasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025; Laporan Pengembangan Kompetensi; LAKIP.LPPD.LKJIP, sipgan; Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang, Indeks Inovasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri

Dalam periode 2020 hingga 2024, beberapa indikator terkait pengelolaan ASN di Kabupaten Magelang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal mengalami lonjakan dari 15,23 persen pada tahun 2020 menjadi 41,04 persen pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 28,12 persen. Peningkatan serupa juga terjadi pada persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, yang melonjak dari hanya sebesar 0,30 persen pada tahun 2020 menjadi 2,11 persen pada tahun 2023, meskipun mengalami sedikit penurunan ke 1,08 persen pada tahun 2024. Dari sisi kelembagaan, jumlah jabatan pimpinan tinggi di instansi pemerintah meningkat dari 16 jabatan pada tahun 2020 menjadi 32 jabatan pada tahun 2024. Selain itu, jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu juga bertambah dari 6.025 pada tahun 2020 menjadi 8.265 pada tahun 2024. Sejalan dengan peningkatan tersebut, Indeks Profesionalitas ASN juga meningkat dari 63,00 pada tahun 2020 menjadi 79,37 pada tahun 2024, sementara Indeks Sistem Merit juga menunjukkan pertumbuhan positif dari 0,60 menjadi 0,71 dalam periode yang sama.

Di sisi lain, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan tren penurunan. Jumlah jabatan administrasi mengalami penurunan signifikan dari 2.235 jabatan pada tahun 2020 menjadi hanya 931 jabatan pada tahun 2024, dengan rata-rata penurunan sebesar 19,66 persen per tahun. Selain itu, rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan stagnan pada angka lima hari per tahun sepanjang periode 2020 hingga 2024.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang telah mencapai kemajuan signifikan dalam peningkatan profesionalitas ASN dan penguatan sistem merit. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah jabatan pimpinan tinggi dan pemangku jabatan fungsional. Namun, tantangan masih tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa pengurangan jabatan administrasi tidak mengganggu efektivitas pelayanan publik. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan durasi pelatihan ASN guna memastikan peningkatan kompetensi yang lebih optimal.

D. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (litbang) merupakan aspek fundamental dalam mendorong inovasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan di sektor publik. Di Kabupaten Magelang, berbagai indikator seperti persentase implementasi rencana kelitbangan, pemanfaatan hasil litbang, fasilitasi perangkat daerah dalam menerapkan inovasi, adopsi kebijakan inovasi di tingkat daerah, kapabilitas indovasi, dan indeks inovasi daerah berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan adaptabilitas terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Dengan mengedepankan pengembangan dan implementasi solusi inovatif, upaya ini tidak hanya mendorong efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan perubahan-perubahan dinamis dalam lingkungan sosial, ekonomi, politik, maupun teknologi saat ini.

Tabel 2.1.80
Capaian Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
	Penerapan SIDa							
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	-
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
5	Kapabilitas Inovasi	Nilai	N/A	N/A	1,03	2,02	N/A	96,12
6	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	35,41	41,81	52,21	57,83	63,96	10,76

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang Tahun 2024; RPJMD Perubahan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024; Badan Riset dan Inovasi Nasional; Kementerian Dalam Negeri

Dalam periode 2020-2024, berbagai indikator penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah di Kabupaten Magelang menunjukkan tren positif. Persentase implementasi rencana kelitbangan, pemanfaatan hasil kelitbangan, serta kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah secara konsisten mencapai 100 persen setiap tahun, mencerminkan komitmen kuat dalam mengoptimalkan hasil peenlitian untuk mendukung kebijakan pembangunan. Selain itu, sejak 2021, persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah berhasil dipertahankan pada angka 100 persen, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong inovasi di tingkat organisasi perangkat daerah. Tren positif juga terlihat pada indeks inovasi daerah yang

mengalami peningkatan signifikan, dari 35,41 pada 2020 menjadi 63,96 pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,76 persen per tahun. Namun, indikator kapabilitas inovasi masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Pada 2022, nilai kapabilitas inovasi tercatat sebesar 1,03 dan meningkat menjadi 2,02 pada 2023. Sementara itu, data untuk tahun 2024 tidak tersedia.

Secara keseluruhan, Kabupaten Magelang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah, sebagaimana tercermin dalam berbagai indikator yang mengalami tren positif sepanjang 2020-2024. Konsistensi implementasi kebijakan inovasi serta peningkatan indeks inovasi daerah mengindikasikan kemajuan dalam optimalisasi hasil penelitian dan inovasi untuk mendukung pembangunan. Namun, kapabilitas inovasi masih memerlukan perhatian lebih lanjut agar pertumbuhan inovasi dapat lebih stabil dan terukur.

E. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu pilar penting dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Magelang, yang tercermin melalui pencapaian sejumlah indikator, seperti maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), persentase tindak lanjut temuan APIP, persentase tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Indeks Integritas Nasional (IIN). Maturitas SPIP merefleksikan efektivitas sistem pengendalian intern; kapabilitas APIP menunjukkan kapabilitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas; sementara persentase tindak lanjut temuan APIP dan BPK mencerminkan responsivitas instansi yang diaudit terhadap rekomendasi hasil audit. Adapun IIN diukur berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh KPK RI, dengan menggabungkan penilaian dari responden internal, eksternal, dan ahli, serta disesuaikan dengan faktor koreksi prevalensi korupsi dan integritas pelaksanaan SPI.

Tabel 2.1.81
Capaian Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Maturitas SPIP	Nilai	3	3	3,16	3,26	3,27	
2	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	
3	Persentase tindak lanjut temuan APIP	Persen	94,76	96,22	96,30	96,10	87,35	-2,02
4	Persentase tindak lanjut temuan BPK	Persen	83,74	85,28	89,86	84,38	94,01	2,93
5	Indeks Integritas Nasional (IIN)	Angka	NA	80,00	76,47	75,75	72,37	-3,29

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2023; Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK; Sistem Pengawasan Kabupaten Magelang

Indikator maturitas SPIP memperlihatkan kenaikan selama periode 2020-2024, dari bernilai 3 menjadi 3,27 pada tahun 2024. Sementara itu, peningkatan kapabilitas APIP masih konsisten berada di level yang sama, yakni di level 3. Lebih lanjut, persentase tindak lanjut temuan APIP menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, indikator ini mencatat capaian yang relatif memuaskan sebesar 94,76 persen dan tetap berada pada tingkat sangat tinggi hingga tahun 2023. Namun, terdapat sedikit penurunan pada tahun 2024, yakni menjadi 87,35 persen karena LHP baru selesai di akhir tahun.

Di sisi lain, persentase tindak lanjut temuan BPK menunjukkan tren peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,93 persen per tahun, yang mencapai 94,01 persen pada tahun 2024. Tingkat pencapaian persentase tindak lanjut temuan APIP dan temuan BPK dipengaruhi oleh tingkat kesadaran auditan dan keterlibatan auditan dalam menanggapi temuan selama proses audit, reviu, evaluasi. Fluktuasi tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam efektivitas pengawasan internal dan penguatan integritas di lingkungan pemerintahan. Meskipun tindak lanjut terhadap temuan BPK menunjukkan perbaikan, tren negatif pada indikator lainnya menuntut perlunya penguatan sistem pengawasan serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas aparatur untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Inspektorat terus mengupayakan pemantauan tindak lanjut temuan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) bersama auditan serta melakukan kunjungan langsung ke instansi terkait guna mendorong percepatan penyelesaian temuan. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan persentase capaian penyelesaian tindak lanjut temuan APIP dapat terus meningkat. Selanjutnya, capaian IIN menunjukkan penurunan sejak tahun 2021, dari sebesar 80,00 menjadi 72,37 pada tahun 2024, dengan rata-

rata penurunan tahunan sebesar 3,29 persen. Penurunan ini disebabkan oleh belum optimalnya sosialisasi anti korupsi dan upaya pencegahan korupsi.

F. Sekretariat Dewan

Sekretariat dewan berperan krusial dalam mendukung penyelenggaraan serta pengembangan tata kelola pemerintahan yang efisien di Kabupaten Magelang. Capaian indikator urusan sekretariat dewan diukur berdasarkan tiga indikator kunci, yaitu: 1) tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD, yang menunjukkan tingkat persiapan dan perencanaan yang matang; 2) tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD); serta 3) terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanan fungsi pengawasan, pembentukan perda, dan anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

Tabel 2.1.82
Capaian Indikator Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Magelang
Tahun 2020–2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	dokumen (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	dokumen (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanan fungsi pengawasan, pembentukan perda, dan anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	dokumen (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Magelang Tahun 2024

Data tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa seluruh indikator terkait perencanaan dan integrasi program DPRD Kabupaten Magelang telah konsisten terpenuhi. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD secara berkelanjutan mencerminkan kepatuhan terhadap Pasal 89 Peraturan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD. Program-program kerja DPRD juga sudah tersusun dan terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD sejak tahun 2020, mencerminkan komitmen dan keseriusan DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Demikian pula, integrasi program pengawasan, pembentukan perda, dan fungsi anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD menunjukkan konsistensi keselarasan kebijakan legislatif dan eksekutif.

2.2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

2.2.1. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

2.2.1.1. Kinerja Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah meliputi:

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan daerah;
d. Pengeluaran daerah;
e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Dalam upaya mengatur keuangan daerah agar tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, maka dibutuhkan suatu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang diwujudkan dengan APBD. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam hal pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah (anggaran defisit), sumber-sumber pembiayaan untuk menutupnya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sementara itu, jika pendapatan lebih besar dari belanja daerah (anggaran surplus), maka penggunaan surplus diutamakan untuk pembayaran pokok utang, investasi, pemberian pinjaman dan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

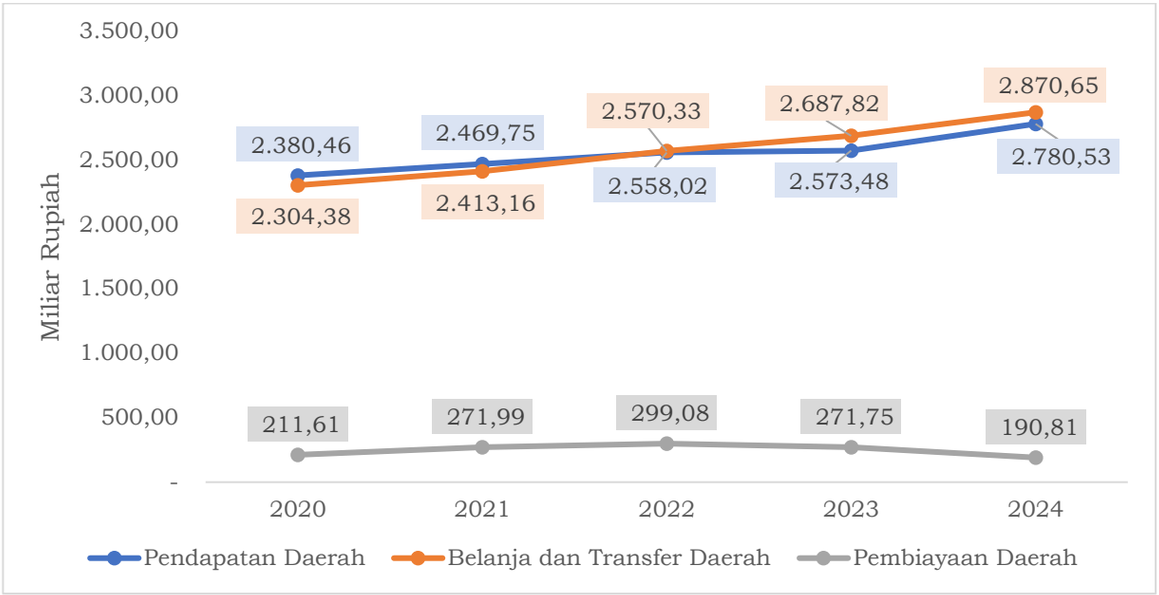

Gambar 2.2.1
Perkembangan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024 (Audited), Diolah

Berdasarkan realisasi pendapatannya, total pendapatan daerah di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,96 persen per tahun. Pada tahun 2020, total pendapatan daerah di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 2.380.457.680.604,00 dan berfluktuasi hingga tahun 2024, hingga besarannya menjadi Rp 2.780.530.841.435,00. Dalam rentang waktu yang sama, total belanja dan transfer daerah di kabupaten ini juga menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,65 persen per tahun, di mana besaran belanja ini tercatat sebesar Rp 2.304.375.917.161,00 di tahun 2020 dan meningkat menjadi Rp 2.870.648.052.727,00 di tahun 2024. Selanjutnya, dilihat dari besaran pembiayaan daerah, besaran pembiayaan netto di kabupaten ini menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditunjukkan dengan rata-rata penurunan sebesar 2,55 persen per tahun. Pada tahun 2020, besaran pembiayaan netto di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 211.610.092.659,00, yang kemudian menunjukkan besaran yang fluktuatif hingga tahun 2024, hingga capaiannya menjadi Rp 190.808.309.305,00.

A. Kinerja Pelaksanaan Pendapatan Daerah

Mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sumber pendapatan daerah meliputi (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; (2) Pendapatan transfer, yang terdiri dari transfer pemerintah pusat yang mencakup dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa; serta transfer antar daerah yang mencakup pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan; (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber-sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut, digunakan untuk membiayai penyelenggaran urusan pemerintah daerah.

Dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024, komponen pendapatan transfer memiliki komposisi yang paling besar dibandingkan dengan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan rata-rata kontribusinya, pendapatan transfer memiliki rata-rata kontribusi sebesar 81,20 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Magelang. Sementara itu, rata-rata kontribusi PAD tercatat sebesar 16,56 persen, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 2,24 persen. Selanjutnya, berdasarkan rata-rata pertumbuhannya, komponen PAD memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan dua komponen lainnya, yakni mencapai 12,11 persen per tahun. Sama halnya dengan komponen PAD, komponen pendapatan transfer juga menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,76 persen per tahun. Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan yang sah tercatat menunjukkan kecenderungan menurun yang ditandai dengan rata-rata penurunan mencapai 44,47 persen per tahun.

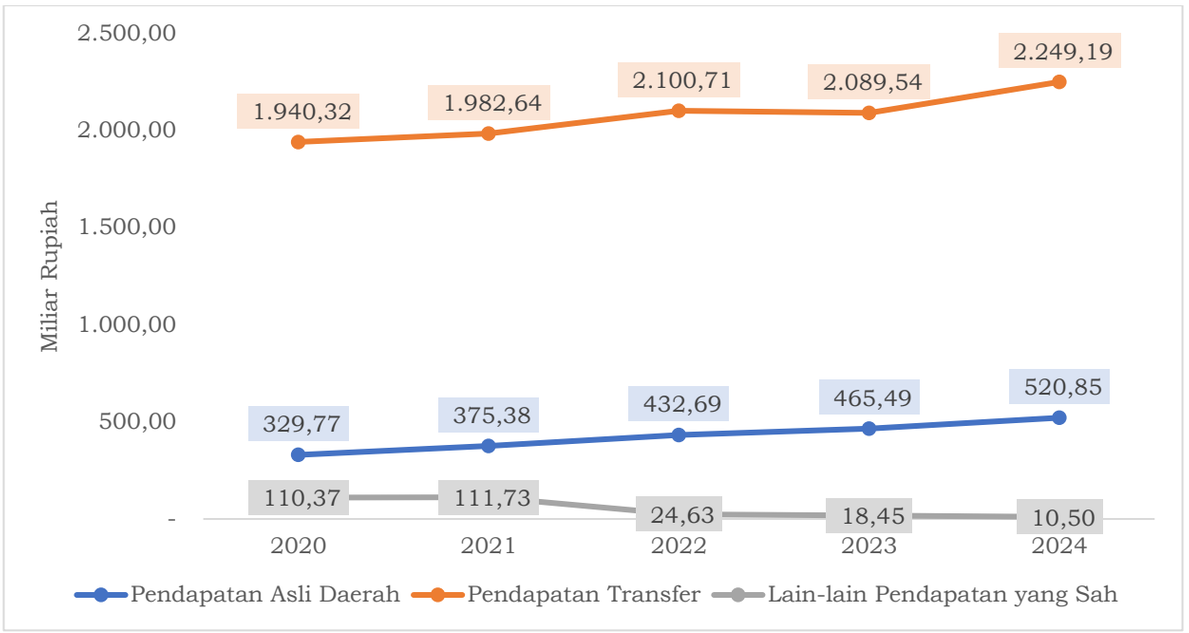

Gambar 2.2.2
Perkembangan Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2020-2024
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024 (Audited), Diolah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Oleh karena itu, PAD merupakan salah satu komponen yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan daerah. Semakin tinggi capaian PAD pada suatu daerah mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal, dan semakin kecil ketergantungan dan/atau tidak bergantung lagi pada pemerintah pusat. Kemampuan daerah untuk memperoleh PAD mencerminkan kemampuan daerah tersebut dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerahnya, juga menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik.

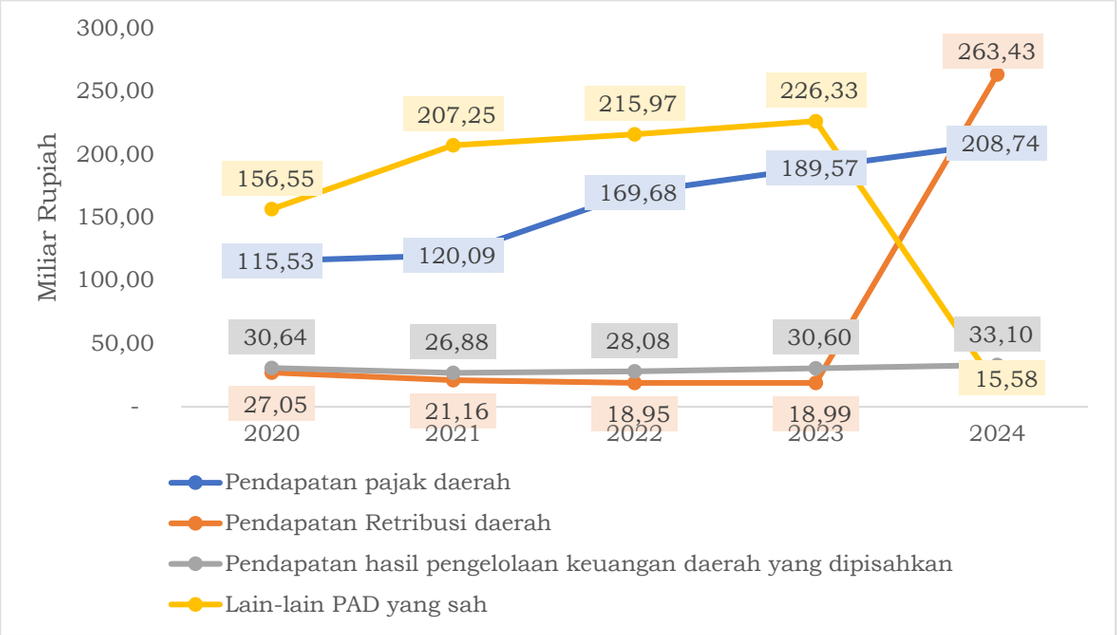

Gambar 2.2.3
Perkembangan Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024 (Audited), Diolah

Pada tahun 2020 besaran PAD Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp 329.769.193.224,00, yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarannya menjadi Rp 520.847.740.395,00. Dilihat dari komponen pembentuknya, komponen pendapatan pajak daerah tercatat menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,94 persen per tahun. Pada tahun 2020, komponen pendapatan ini tercatat sebesar Rp 115.530.759.532,00 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 menjadi sebesar Rp 208.742.000.202,00. Komponen pendapatan retribusi daerah tercatat menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata kenaikan mencapai 76,65 persen per tahun, di mana pada tahun 2020 komponen pendapatan ini tercatat sebesar Rp 27.049.700.014,00 dan berfluktuasi menjadi Rp 263.428.712.999,00 di tahun 2024. Mendasari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, terdapat perubahan pencatatan pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan yang berasal dari BLUD yang semula dicatatat pada rekening Lain-lain PAD yang Sah menjadi dicatat pada rekening Retribusi Jasa Usaha. Hal ini mengakibatkan terjadi lonjakan rata-rata pertumbuhan pada komponen Retribusi Daerah.

Selanjutnya, komponen pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan menunjukkan besaran dengan kecenderungan meningkat yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,95 persen per tahun. Komponen pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan

tercatat sebesar Rp 30.637.364.531,00 di tahun 2020 dan bertumbuh menjadi Rp 33.095.080.432,00 di tahun 2024. Terakhir, komponen lain-lain PAD yang sah tercatat sebesar Rp 156.551.369.147,00 di tahun 2020 dan menunjukkan kecenderungan menurun sampai dengan tahun 2024 menjadi Rp 15.581.946.762,00 di tahun 2024, atau dengan rata-rata penurunan sebesar 43,83 persen per tahun. Penurunan yang signifikan ini dikarenakan perubahan nomenklatur rekening pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan yang semula pada rekening Lain-lain PAD yang sah menjadi rekening Retribusi Daerah. Berdasarkan proporsinya selama tahun 2020 hingga 2024, lain-lain PAD yang sah memiliki rata-rata kontribusi paling tinggi diantara tiga komponen pembentuk PAD yang lainnya meskipun tahun 2024 mengalami penurunan, yakni dengan besaran 40,84 persen, yang diikuti oleh pendapatan pajak daerah sebesar 37,41 persen, pendapatan retribusi daerah sebesar 14,58 persen, dan pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dengan besaran rata-rata kontribusi sebesar 7,17 persen.

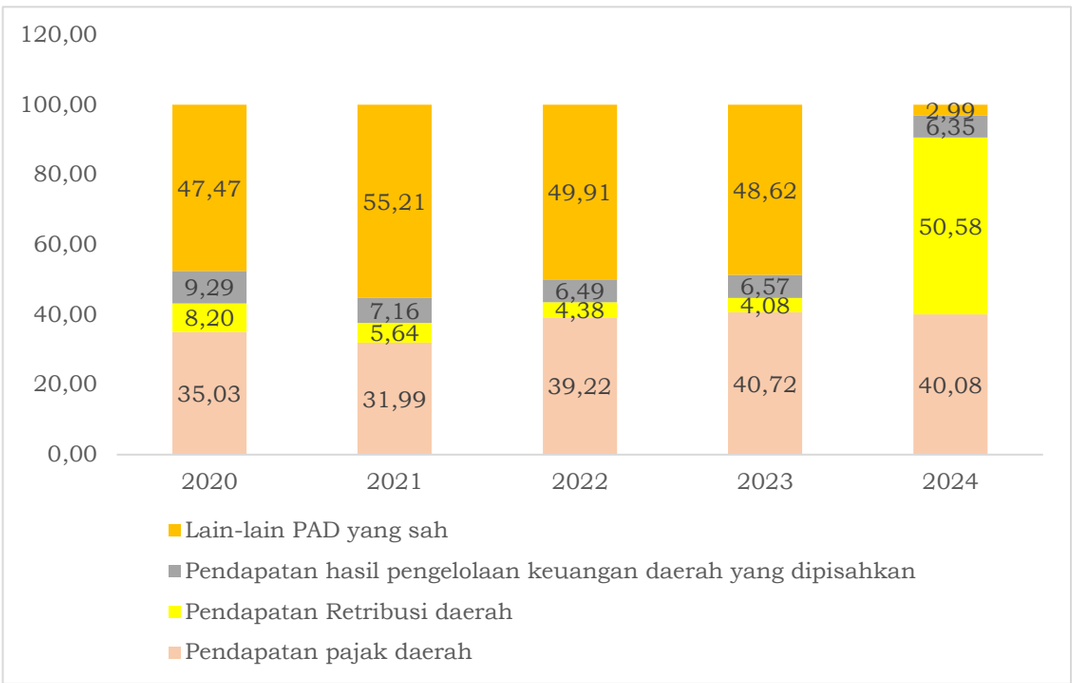

Gambar 2.2.4
Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024 (Audited), Diolah

Selanjutnya, kebijakan transfer ke daerah dilakukan melalui kebijakan transfer pemerintah pusat yang merupakan dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan transfer antar daerah. Hingga tahun 2024, pendapatan transfer masih menjadi kontributor utama dalam penerimaan daerah di Kabupaten Magelang atau dengan rata-rata kontribusi dalam lima tahun terakhir yang tercatat sebesar 81,20 persen. Besaran tersebut

mengindikasikan bahwa ketergantungan pemerintah Kabupaten Magelang terhadap transfer pemerintah pusat masih tinggi. Berdasarkan nominalnya, dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024, komponen transfer pemerintah pusat (dana perimbangan) dan komponen transfer antar daerah menunjukkan kecenderungan yang meningkat, sementara komponen transfer pemerintah pusat lainnya menunjukkan kecenderungan menurun.

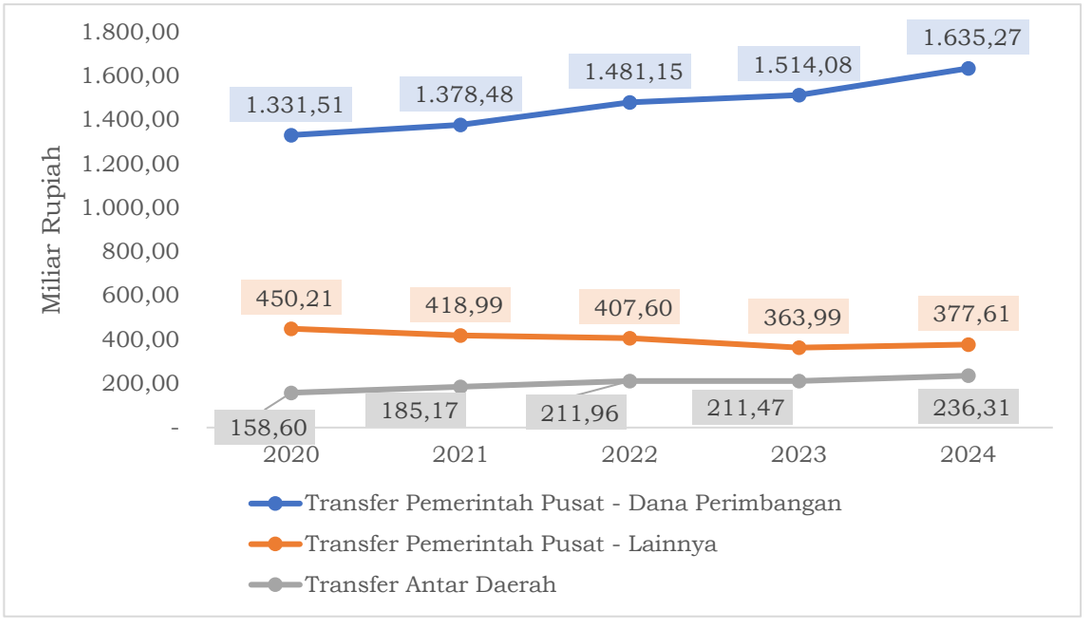

Gambar 2.2.5
Perkembangan Komponen Pendapatan Transfer Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024 (Audited), Diolah

Komponen transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari APBN yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, dana perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintahan pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar pemerintahan daerah. Pada tahun 2020, besaran pendapatan transfer pemerintah pusat (dana perimbangan) di Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp 1.331.514.071.778,00 dan bertumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,27 persen per tahun hingga besarannya menjadi Rp 1.635.271.546.012,00 di tahun 2024. Berdasarkan nominal komponen pembentuknya, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, alokasi DBH, DAU, dan DAK menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat.

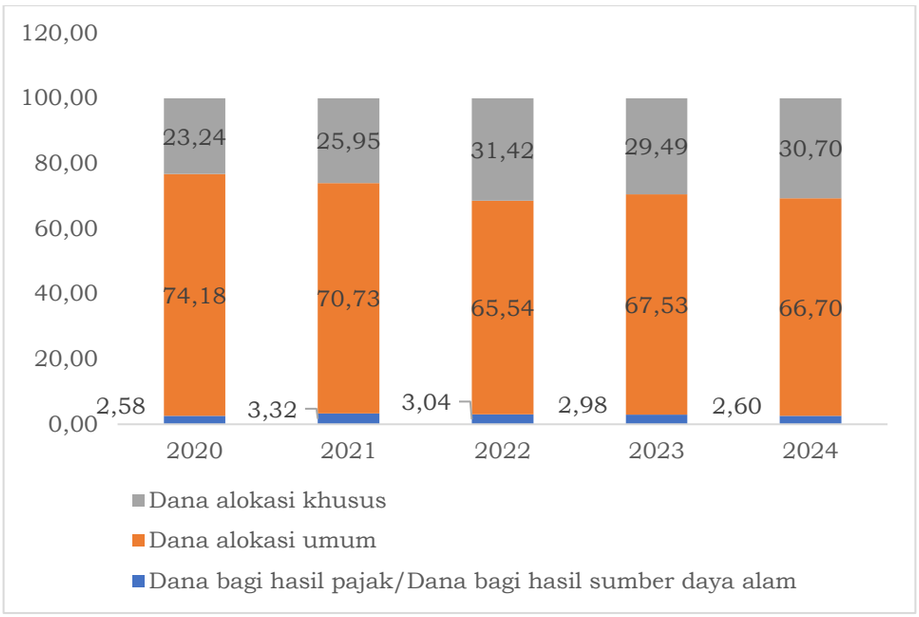

Gambar 2.2.6
Proporsi Komponen Pendapatan Transfer Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024 (Audited), Diolah

Terkait dengan komposisi dana perimbangan, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, DAU merupakan komponen terbesar dari dana perimbangan di Kabupaten Magelang, dengan rata-rata kontribusi sebesar 68,94 persen. Dana alokasi umum merupakan dana yang digulirkan pemerintah pusat untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perhitungan DAU diperoleh dari alokasi dasar dan celah fiskal. Alokasi dasar dihitung dari kebutuhan belanja pegawai, sementara celah fiskal yang diperoleh dari selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Pada tahun 2020 sampai tahun 2021 DAU merupakan dana yang paling elastis pemanfaatannya, hal tersebut dikarenakan pemanfaatan DAU sesuai dengan kebutuhan daerah dan tanpa syarat apapun. Selanjutnya untuk tahun 2022 sampai 2024 berdasarkan PMK Nomor 211/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, DAU dibagi menjadi DAU *earmark* dan DAU *Non earmark*. Pada tahun 2020, besaran DAU yang diterima oleh Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp 987.675.947.000,00, dan berfluktuasi hingga tahun 2024 menjadi sebesar Rp 1.090.739.282.000,00, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,51 persen per tahun.

Setelah DAU, proporsi terbesar kedua dari struktur dana perimbangan di Kabupaten Magelang adalah DAK. Dalam rentang waktu yang sama, komponen pendapatan ini memiliki rata-rata kontribusi sebesar 28,16 persen. DAK merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) yang

dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus. DAK terdiri dari dua komponen, yakni DAK fisik dan non fisik. DAK fisik diberikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sementara DAK non fisik dialokasikan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah. Pada tahun 2020, besaran DAK di Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp 309.473.831.783,00 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarannya menjadi Rp 501.953.705.012,00 atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,85 persen per tahun. Selanjutnya, DBH baik pajak maupun sumber daya alam yang dialokasikan untuk Kabupaten Magelang memiliki proporsi 2,91 persen, atau dengan besaran Rp 34.364.292.995,00 di tahun 2020, dan berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,50 persen per tahun menjadi Rp 42.578.559.000,00 di tahun 2024.

Selanjutnya, komponen pendapatan transfer lainnya yang tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang adalah transfer pemerintah pusat lainnya, yakni penerimaan dana insentif daerah (DID) dan dana desa. Pada tahun 2020, pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya di Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp 450.209.569.982,00, dan berfluktuasi hingga tahun 2024 menjadi Rp 377.607.599.500,00 atau dengan rata-rata penurunan sebesar 4,30 persen per tahun. Pada tahun 2020, penerimaan dana insentif daerah (DID) di Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp 59.165.462.000,00, dan berfluktuasi hingga tahun 2024 menjadi Rp10.493.738.500,00 atau dengan rata-rata penurunan sebesar 35,10 persen per tahun. Selanjutnya, komponen dana desa di Kabupaten Magelang pada Tahun 2020 tercatat sebesar Rp 391.044.107.982,00, dan berfluktuasi hingga tahun 2024 menjadi Rp 367.113.861.000,00 atau dengan rata-rata penurunan sebesar 1,57 persen per tahun. Pada tahun 2024, seluruh pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya di kabupaten ini berupa insentif daerah dan dana desa. Dana desa tersebut diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Komponen selanjutnya yang menjadi komponen dari pendapatan transfer daerah adalah pendapatan transfer antar daerah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, besaran transfer pemerintah provinsi yang diterima oleh Kabupaten Magelang

berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,48 persen per tahun. Pada tahun 2020, pemerintah Kabupaten Magelang menerima Rp 158.599.832.045,00 dari pemerintah provinsi dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 di mana besarannya menjadi Rp 236.308.408.284,00. Terakhir, komponen lain-lain pendapatan yang sah di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 44,47 persen per tahun. Pada tahun 2020, besaran komponen pendapatan ini tercatat sebesar Rp 110.365.013.575,00 dan berfluktuasi menjadi Rp 10.495.547.244,00 di tahun 2024.

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat adalah indeks kemandirian fiskal. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang kondisi kemandirian fiskal daerahnya menunjukkan predikat belum mandiri dengan capaian di bawah 0,25. Pada tahun 2024, Kabupaten Magelang memiliki indeks kemandirian fiskal sebesar 0,19, di mana capaian tersebut memiliki arti bahwa baru sebesar 19 persen belanja daerah di kabupaten ini yang dapat dibiayai oleh PAD.

Tabel 2.2.1
Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Magelang
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Komponen A	**1.881.158.011.805,00**	**1.954.698.634.547,00**	**2.086.342.675.495,00**	**2.089.541.001.808,00**	**2.238.693.815.296,00**
DAU	987.675.947.000,00	975.017.297.000,00	970.712.969.712,00	1.022.451.050.283,00	1.090.739.282.000,00
Dana Desa	391.044.107.982,00	391.044.109.000,00	393.231.309.000,00	363.989.464.000,00	367.113.861.000,00
Pendapatan Transfer antar Daerah	158.599.832.045,00	185.172.991.852,00	211.961.197.034,00	211.473.176.918,00	236.308.408.284,00
DAK	309.473.831.783,00	357.749.118.469,00	465.360.935.694,00	446.465.132.371,00	501.953.705.012,00
Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	
DBH	34.364.292.995,00	45.715.118.226,00	45.076.264.055,00	45.162.178.236,00	42.578.559.000,00
Komponen B	**2.210.927.205.029,00**	**2.330.077.099.920,00**	**2.519.030.710.836,00**	**2.555.027.055.325,00**	**2.759.541.555.691,00**
PAD	329.769.193.224,00	375.378.465.373,00	432.688.035.341,00	465.486.053.517,00	520.847.740.395,00
DAU	987.675.947.000,00	975.017.297.000,00	970.712.969.712,00	1.022.451.050.283,00	1.090.739.282.000,00
Dana Desa	391.044.107.982,00	391.044.109.000,00	393.231.309.000,00	363.989.464.000,00	367.113.861.000,00
Pendapatan Transfer antar Daerah	158.599.832.045,00	185.172.991.852,00	211.961.197.034,00	211.473.176.918,00	236.308.408.284,00
DAK	309.473.831.783,00	357.749.118.469,00	465.360.935.694,00	446.465.132.371,00	501.953.705.012,00
Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	
DBH	34.364.292.995,00	45.715.118.226,00	45.076.264.055,00	45.162.178.236,00	42.578.559.000,00
A/B	**0,85**	**0,84**	**0,83**	**0,82**	**0,81**
Indeks Kemandirian Fiskal	**0,15**	**0,16**	**0,17**	**0,18**	**0,19**
Kondisi Kemandirian Fiskal	Belum Mandiri	Belum Mandiri	Belum Mandiri	Belum Mandiri	Belum Mandiri

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024 (Audited), Diolah

B. Kinerja Pelaksanaan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan baik urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Analisis belanja daerah digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam menggunakan APBD, apakah telah digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, dimana hal tersebut dilakukan untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran.

Berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi belanja daerah teridiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Selanjutnya, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang dirinci atas jenis belanja modal. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, yang dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

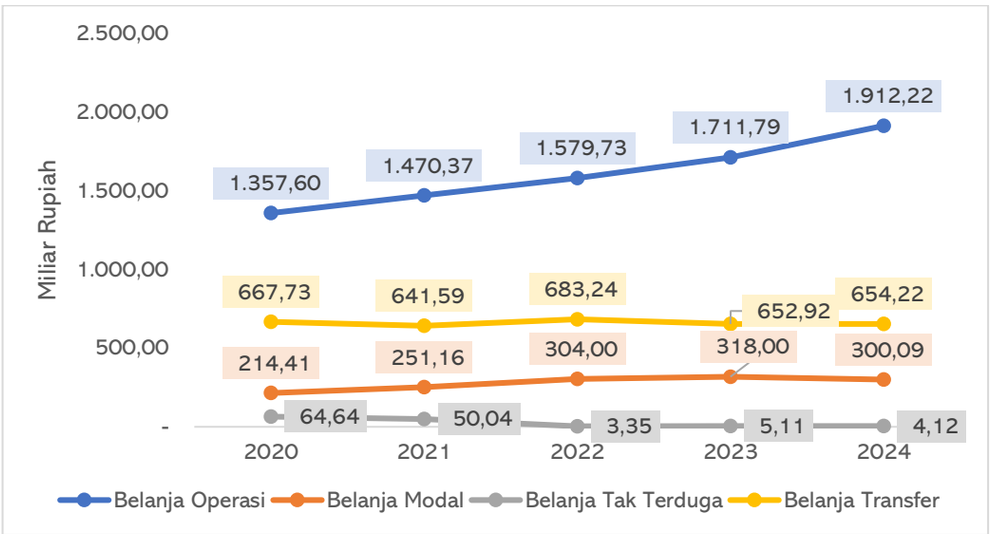

Gambar 2.2.7
Perkembangan Struktur Belanja Daerah dalam Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024 (Audited), Diolah

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, besaran belanja daerah Kabupaten Magelang tercatat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yang ditandai dengan besaran rata-rata pertumbuhan sebesar 5,65 persen per tahun. Pada tahun 2020, besaran belanja daerah kabupaten ini tercatat sebesar Rp 2.304.375.917.161,00 yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarannya menjadi Rp 2.870.648.052.727,00. Perhitungan pertumbuhan belanja daerah tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan komponen-komponen belanja dari tahun ke tahun, di mana pada umumnya besaran nilai belanja daerah memiliki kecenderungan meningkat. Peningkatan tersebut biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap tingkat inflasi, perubahan kurs, penyesuaian kondisi makro ekonomi, dan lainnya. Meskipun umumnya besarannya meningkat, namun berkaitan dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja, dan penghematan anggaran.

Berdasarkan proporsinya, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, belanja operasi merupakan komponen belanja dengan kontribusi terbesar dalam struktur belanja daerah, dengan rata-rata kontribusi mencapai 62,32 persen, yang kemudian diikuti oleh komponen belanja transfer 25,85 persen, belanja modal 10,76 persen, dan belanja tak terduga 1,07 persen. Sementara berdasarkan rata-rata pertumbuhannya, komponen belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer memiliki rata-rata pertumbuhan yang positif, sementara komponen belanja tak terduga memiliki rata-rata pertumbuhan yang negatif (menurun).

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, komponen belanja operasi dalam struktur belanja daerah di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,94 persen per tahun, di mana pada tahun 2020 besaran komponen belanja tersebut tercatat sebesar Rp 1.357.596.932.757,00 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarannya menjadi Rp 1.912.219.026.392,00. Secara lebih detail, komponen belanja pegawai menunjukkan rata-rata kontribusi tertinggi dalam struktur belanja operasi di kabupaten ini, yakni dengan besaran 58,54 persen. Capaian tersebut menandakan bahwa porsi belanja pegawai dalam APBD Kabupaten Magelang hingga tahun 2024 masih tergolong tinggi. Komponen belanja operasi dengan kontribusi terbesar selanjutnya adalah komponen belanja barang dan jasa dengan rata-rata kontribusi sebesar 33,15

persen, yang diikuti oleh komponen belanja hibah dengan besaran 7,77 persen, dan komponen belanja bantuan sosial sebesar 0,54 persen.

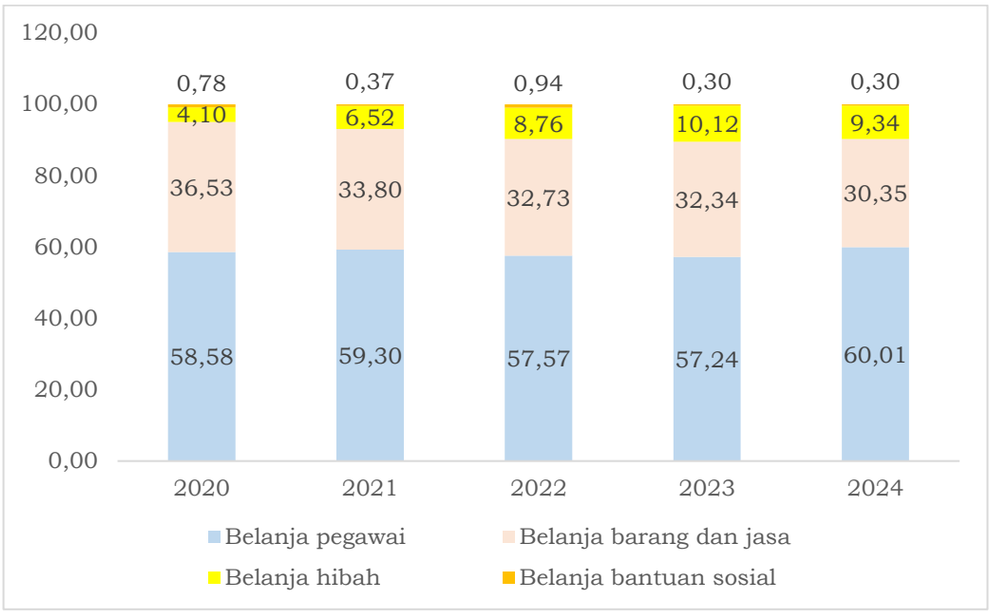

Gambar 2.2.8
Proporsi Belanja Operasi Kabupaten Magelang
Tahun 2020-2024
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024 (Audited), Diolah

Belanja pegawai merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk menghitung rasio belanja pegawai, di mana rasio tersebut digunakan untuk mengukur porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Semakin turunnya porsi belanja pegawai dalam APBD mengindikasikan semakin membaiknya kualitas belanja daerah, hal tersebut terjadi karena semakin sedikit porsi belanja APBD yang digunakan untuk belanja aparatur maka APBD dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik, seperti belanja modal untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, begitu pula sebaliknya. Pada tahun 2020, komponen belanja pegawai di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 795.312.940.429,00 yang kemudian berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,60 persen per tahun, hingga besarannya menjadi Rp 1.147.555.914.649,00 di tahun 2024. Alokasi belanja pegawai ini diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN–tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN, belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, belanja pegawai BOS, serta belanja pegawai BLUD.

Selanjutnya, proporsi terbesar kedua dalam struktur belanja operasi di Kabupaten Magelang adalah belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja barang dan jasa terdiri dari belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, belanja barang dan jasa BOS, serta belanja barang dan jasa BLUD. Berdasarkan nominalnya, komponen belanja barang dan jasa di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 495.959.581.668,00 di tahun 2020, dan menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,00 persen per tahun, hingga pada tahun 2024 komponen belanja ini tercatat sebesar Rp 580.308.946.970,00.

Belanja hibah sebagai komponen belanja operasi dengan rata-rata proporsi terbesar ketiga ini digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang dan barang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2020, komponen belanja hibah di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 55.687.000.660,00, dan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 33,84 persen per tahun, hingga besarannya menjadi Rp 178.695.982.973,00 di tahun 2024. Pada tahun 2024, alokasi belanja hibah Kabupaten Magelang dialokasikan untuk belanja hibah kepada pemerintah pusat, belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, belanja hibah dana BOS– belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Setdikdas Swasta, serta belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Belanja bantuan sosial merupakan salah satu komponen belanja operasi yang kontinyu tercatat hingga tahun 2024. Realisasi belanja bantuan sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2020, komponen belanja bantuan sosial di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 10.637.410.000,00, dan menunjukkan besaran yang fluktuatif

dengan kecenderungan menurun yang ditunjukkan dengan rata-rata penurunan sebesar 14,60 persen per tahun, hingga besarannya menjadi Rp 5.658.181.800,00 di tahun 2024.

Selanjutnya, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, komponen belanja modal di Kabupaten Magelang yang merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi ini menunjukkan besaran yang fluktuatif mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2020, komponen belanja modal di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 214.407.058.402,00, dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarannya menjadi Rp 300.087.089.964,00, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,77 persen per tahun. Sementara itu, berdasarkan rata-rata proporsinya, dalam kurun waktu yang sama, struktur pembentuk belanja modal terbesar di Kabupaten Magelang adalah belanja modal peralatan dan mesin, yakni sebesar 39,17 persen; yang diikuti oleh komponen belanja modal gedung dan bangunan 31,88 persen; belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan 22,35 persen; belanja aset tetap lainnya 3,33 persen; belanja modal tanah 2,64 persen; dan belanja aset lainnya/aset tak berwujud 0,63 persen.

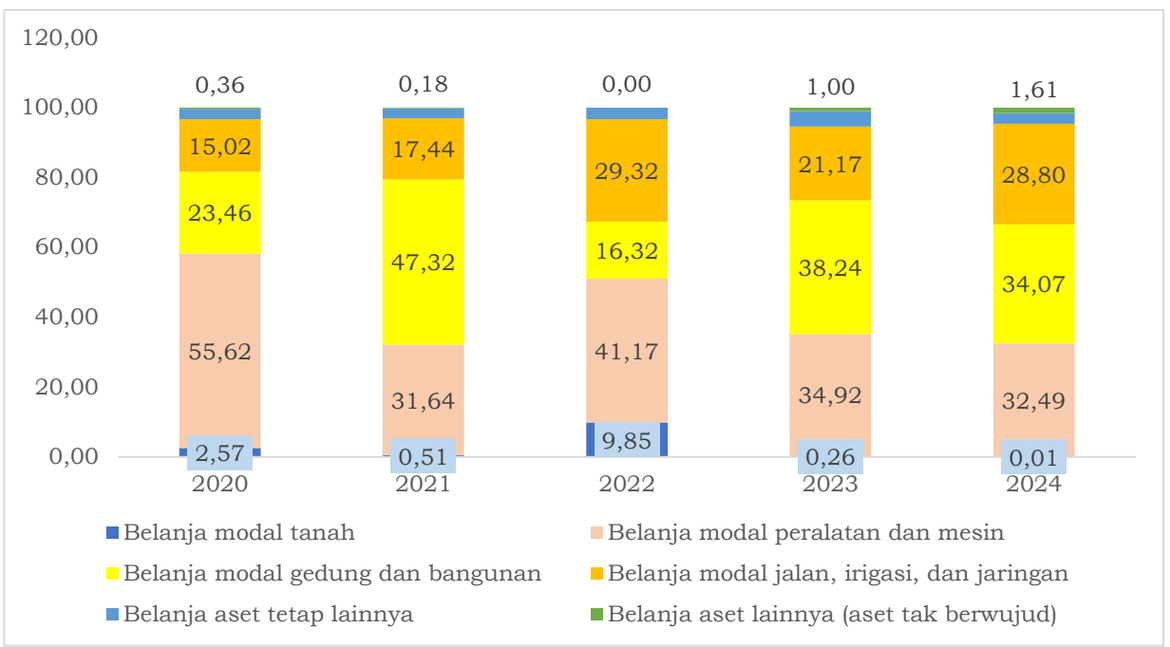

Gambar 2.2.9
Proporsi Belanja Modal Kabupaten Magelang
Tahun 2020-2024
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024 (Audited), Diolah

Secara lebih detail, komponen belanja tanah dalam struktur belanja modal di Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp 5.507.345.948,00 di tahun 2020 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 dengan penurunan yang cukup signifikan mencapai 76,93 persen per tahun, hingga besarannya menjadi Rp 15.601.780,00. Selanjutnya, komponen belanja peralatan dan mesin yang

dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 4,91 persen per tahun, di mana pada tahun 2020 komponen belanja modal peralatan dan mesin tercatat sebesar Rp 119.261.429.185,00 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarannya menjadi Rp 97.491.373.887,00.

Komponen belanja selanjutnya dalam struktur belanja modal Kabupaten Magelang adalah komponen belanja gedung dan bangunan. Pada tahun 2020, komponen belanja modal tersebut tercatat sebesar Rp 50.299.523.649,00, dan menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19,40 persen per tahun, hingga besarannya menjadi Rp 102.238.004.134,00 di tahun 2024. Komponen belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 32.195.982.259,00 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarannya menjadi Rp 86.415.388.168,00, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28,00 persen per tahun.

Belanja aset tetap lainnya tercatat menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,31 persen per tahun, di mana pada tahun 2020 komponen belanja modal ini tercatat sebesar Rp 6.365.747.356,00 dan berfluktuasi menjadi Rp 9.087.588.995,00 di tahun 2024. Komponen terakhir dalam struktur belanja modal Kabupaten Magelang adalah belanja aset tetap lainnya (aset tak berwujud), di mana besarannya memiliki kecenderungan meningkat dalam lima tahun terakhir atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 57,97 persen per tahun. Pada tahun 2020, komponen belanja modal ini tercatat sebesar Rp 777.030.005,00 dan berfluktuasi menjadi Rp 4.839.133.000,00 di tahun 2024.

Komponen belanja selanjutnya adalah belanja tak terduga, di mana pada tahun 2020, komponen belanja ini tercatat sebesar Rp 64.637.965.303,00, dan berfluktuasi hingga tahun 2024 menjadi sebesar Rp 4.120.214.822,00, atau dengan rata-rata penurunan sebesar 49,75 persen per tahun. Pada tahun 2024, realisasi belanja tak terduga digunakan untuk pengembalian beberapa komponen belanja serta pemberian bantuan sosial tidak terencana.

Selanjutnya, komponen belanja yang terakhir yakni belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Berdasarkan nominalnya, pada tahun 2020 besaran belanja transfer di Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp 667.733.960.699,00, dan berfluktuasi hingga tahun 2024 dengan kecenderungan menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 0,54

persen per tahun, hingga besarannya menjadi Rp 632.207.385.042,00. Komposisi belanja transfer bantuan keuangan memiliki proporsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan komponen belanja transfer/bagi hasil pendapatan. Besarnya komponen belanja transfer bantuan keuangan di Kabupaten Magelang paling besar dialokasikan untuk belanja transfer bantuan keuangan ke desa.

Selanjutnya, beberapa urusan yang dapat dihitung proporsinya diantaranya adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan *mandatory spending* atau belanja wajib. Belanja pendidikan merupakan satu dari empat *mandatory spending* yang ditetapkan oleh pemerintah. *Mandatory spending* adalah belanja atau pengeluaran daerah yang sudah diatur oleh undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Adapun alokasi belanja pendidikan sebesar 20 persen dari APBD didasarkan pada amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan alokasi anggarannya, berdasarkan data yang ditemukan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2024, anggaran belanja pendidikan di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,86 persen per tahun. Pada tahun 2021, realisasi belanja urusan pendidikan di Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp 740.100.325.466,00, dan berfluktuasi hingga tahun 2024 menjadi Rp 829.073.780.640,00. Berdasarakan nominal tersebut, alokasi belanja pendidikan di kabupaten ini telah mampu melampaui 20 persen dari APBD Kabupaten Magelang, dan mencapai 29,84 persen di tahun 2024.

Sama dengan belanja pendidikan, sebelumnya belanja kesehatan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 juga merupakan *mandatory spending* yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar sepuluh persen, dimana anggaran tersebut diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar. Namun setelah ditetapkannya UU Nomor 17 Tahun 2023 tenang Kesehatan, belanja kesehatan sudah tidak termasuk ke dalam *mandatory spending*. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan kesehatan daerah yang mengacu pada program kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja.

Berdasarkan alokasi anggarannya, dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2024, anggaran belanja kesehatan di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2021,

realisasi belanja urusan kesehatan di Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp 627.125.458.023,00, dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 dengan rata-rata penurunan sebesar 0,51 persen per tahun hingga besarannya menjadi Rp 592.623.866.988,00. Berdasarakan nominal tersebut, dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2024, besaran alokasi belanja kesehatan di Kabupaten Magelang telah mampu melampaui target 10 persen yang ditetapkan, di mana dalam lima tahun terakhir besaran alokasi belanja tersebut menunjukkan kecenderungan meningkat, dan mencapai 21,60 persen di tahun 2024.

C. Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Daerah

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD, dimana dalam kondisi surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah, sementara ketika APBD dalam kondisi defisit, maka APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari dua komponen, yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang perlu dibayar kembali, sementara pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara yang akan diterima kembali. Dalam hal pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah (anggaran defisit), sumber-sumber pembiayaan untuk menutup APBD Kabupaten Magelang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Sementara itu, dalam hal pendapatan lebih besar dari belanja daerah (anggaran surplus), maka penggunaan surplus diutamakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2021, realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Magelang menunjukkan anggaran surplus. Sementara itu, pada tahun anggaran 2022 hingga 2024 realisasi anggaran di kabupaten ini mengalami defisit atau dalam hal pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan dengan besarnya komponen belanja daerah, yakni sebesar -Rp 12.301.824.587,00, -Rp114.343.248.417,00, dan -Rp90.117.211.292,00. Rasio surplus terhadap total pendapatan daerah menunjukkan besaran yang semakin

membaik, hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar belanja daerah dapat ditutup dari pendapatan daerah. Selanjutnya, dilihat dari besaran defisit anggaran dan pembiayaannya maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan daerah telah mampu menutup defisit anggaran, dikarenakan nilai pembiayaan lebih besar dibandingkan dengan defisitnya.

Selanjutnya, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, total pembiayaan daerah di Kabupaten Magelang tercatat menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, atau ditandai dengan besaran rata-rata penurunan sebesar 2,55 persen per tahun. Pada tahun 2020, komponen pembiayaan netto di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 211.610.092.659,00 dan dalam perkembangannya menunjukkan kecenderungan menurun hingga besarannya menjadi Rp 190.808.309.305,00 di tahun 2024.

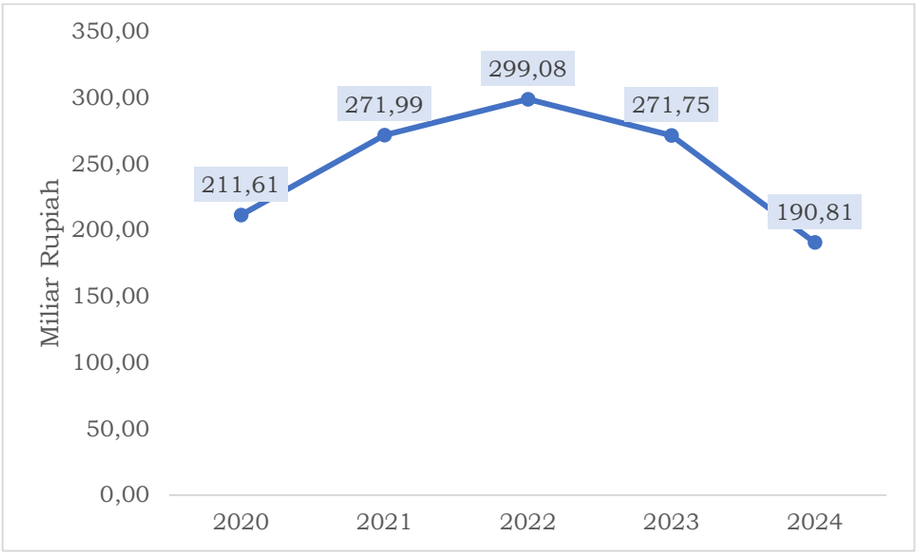

Gambar 2.2.10
Realisasi Pembiayaan Daerah Netto Kabupaten Magelang
Tahun 2020-2024
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024 (Audited), Diolah

Secara lebih detail, pelampauan pendapatan ataupun penghematan belanja pada realisasi APBD sebelumnya akan menghasilkan sisa dana yang disebut dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA. Semakin besar SiLPA menunjukkan kekurangcermatan dalam penganggaran (perencanaan yang kurang baik) atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, rasio SiLPA terhadap belanja menunjukkan porsi belanja yang tertunda atau anggaran yang tidak terserap. Secara umum, kondisi SiLPA Kabupaten Magelang dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditunjukkan dengan rata-rata penurunan sebesar 7,90 persen per tahun. Pada tahun 2020, besaran SiLPA di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 218.814.092.659,00, yang kemudian

berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarannya menjadi Rp 157.408.613.305,00.

Fluktuatifnya besaran komponen SiLPA dan belanja daerah Kabupaten Magelang menghasilkan capaian persentase SiLPA terhadap total belanja dengan besaran yang fluktuatif pula. Dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024, capaian persentase SiLPA terhadap total belanja daerah menunjukkan besaran yang fluktuatif. Pada tahun 2020, capaian persentase SiLPA terhadap total belanja daerah di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 9,50 persen. Secara ideal, capaian persentase SiLPA terhadap total belanja memiliki kinerja yang baik apabila menunjukkan kecenderungan yang menurun, di mana kecenderungan yang menurun mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah dalam pelaksanaan dan penyerapan anggaran semakin membaik. Pada tahun 2024, capaian rasio SiLPA terhadap total belanja Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni tercatat sebesar 5,48 persen. Relatif menurunnya besaran capaian persentase SiLPA terhadap total belanja dalam kurun waktu tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan dan penyerapan anggaran semakin membaik. Namun pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Oleh karena itu, besaran SiLPA di kabupaten ini masih perlu mendapatkan perhatian untuk ke depannya.

Selanjutnya, dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024, selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA) di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 23,08 persen per tahun. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol, artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Pada tahun 2020, besaran SILPA di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 287.691.856.102,00 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 hingga besarannya menjadi Rp 100.691.098.013,00. Besaran SILPA tersebut menunjukkan SILPA Positif, yang diartikan bahwa secara anggaran masih terdapat dana dari penerimaan pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk pembiayaan belanja daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan daerah. Besaran SILPA pada akhir tahun akan menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah, khususnya dialokasikan untuk belanja modal.

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diketahui besaran kemampuan keuangan daerah untuk mendanai belanja daerah. Kemampuan keuangan daerah berasal dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan. Kedua komponen tersebut seharusnya bisa mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka semakin besar pula kemampuan untuk mendanai belanja daerah. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, besaran kemampuan mendanai belanja daerah di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun atau masih pada besaran di sekitar rata-ratanya. Pada tahun 2020, kondisi kemampuan mendanai belanja daerah di kabupaten ini tercatat sebesar 1,12 dan menunjukkan besaran yang fluktuatif hingga tahun 2024 hingga capaiannya menjadi 1,04. Berdasarkan capaian rasio kemampuan mendanai belanja daerah tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Magelang masih perlu mencari sumber penerimaan maupun pembiayaan lainnya, misalnya dengan melakukan pinjaman/obligasi, maupun melakukan kerjasama dengan badan usaha/swasta.

Tabel 2.2.2
Kemampuan Mendanai Belanja Daerah di Kabupaten Magelang
Tahun 2020-2024

Tahun	Pendapatan	Penerimaan Pembiayaan	Belanja	Pengeluaran Pembiayaan	Jumlah		Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
	(a)	(b)	(c)	(d)	(a)+(b)	(c)+(d)	
2020	2.380.457.680.604,00	218.814.092.659,00	2.304.375.917.161,00	7.204.000.000,00	2.599.271.773.263,00	2.311.579.917.161,00	1,12
2021	2.469.754.315.099,00	287.691.856.102,00	2.413.163.788.892,00	15.704.000.000,00	2.757.446.171.201,00	2.428.867.788.892,00	1,14
2022	2.558.024.177.090,00	328.578.382.309,00	2.570.326.001.677,00	29.500.000.000,00	2.886.602.559.399,00	2.599.826.001.677,00	1,11
2023	2.573.481.690.623,00	315.907.861.722,00	2.687.824.939.040,00	44.156.000.000,00	2.889.389.552.345,00	2.731.980.939.040,00	1,06
2024	2.780.530.841.435,00	193.277.309.305,00	2.870.648.052.727,00	2.469.000.000,00	2.973.808.150.740,00	2.873.117.052.727,00	1,04

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024 (Audited), Diolah

Tabel 2.2.3
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang
Tahun Anggaran 2020-2024

No.	Uraian	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024 (persen per tahun)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**PENDAPATAN**						
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**329.769.193.224,00**	**375.378.465.373,00**	**432.688.035.341,00**	**465.486.053.517,00**	**520.847.740.395,00**	**12,11**
1.1.1.	Pendapatan pajak daerah	115.530.759.532,00	120.093.411.768,00	169.682.578.756,00	189.568.476.778,00	208.742.000.202,00	15,94
1.1.2.	Pendapatan Retribusi daerah	27.049.700.014,00	21.156.190.869,00	18.953.321.094,00	18.992.881.583,00	263.428.712.999,00	76,65
1.1.3.	Pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	30.637.364.531,00	26.880.782.928,00	28.082.640.133,00	30.598.215.796,00	33.095.080.432,00	1,95
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	156.551.369.147,00	207.248.079.808,00	215.969.495.358,00	226.326.479.360,00	15.581.946.762,00	-43,83
1.2.	**Pendapatan Transfer**	**1.940.323.473.805,00**	**1.982.641.210.547,00**	**2.100.710.656.495,00**	**2.089.541.001.808,00**	**2.249.187.553.796,00**	**3,76**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**1.331.514.071.778,00**	**1.378.481.533.695,00**	**1.481.150.169.461,00**	**1.514.078.360.890,00**	**1.635.271.546.012,00**	**5,27**
1.2.1.1	Dana bagi hasil pajak/Dana bagi hasil sumber daya alam	34.364.292.995,00	45.715.118.226,00	45.076.264.055,00	45.162.178.236,00	42.578.559.000,00	5,5
1.2.2.2	Dana alokasi umum	987.675.947.000,00	975.017.297.000,00	970.712.969.712,00	1.022.451.050.283,00	1.090.739.282.000,00	2,51
1.2.2.3	Dana alokasi khusus	309.473.831.783,00	357.749.118.469,00	465.360.935.694,00	446.465.132.371,00	501.953.705.012,00	12,85
1.2.2.4	Dana insentif daerah						
1.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**450.209.569.982,00**	**418.986.685.000,00**	**407.599.290.000,00**	**363.989.464.000,00**	**377.607.599.500,00**	**-4,3**
1.2.2.1	Dana penyesuaian/Dana Insentif Daerah	59.165.462.000,00	27.942.576.000,00	14.367.981.000,00	-	10.493.738.500,00	-35,1
1.2.2.2	Dana Desa	391.044.107.982,00	391.044.109.000,00	393.231.309.000,00	363.989.464.000,00	367.113.861.000,00	-1,57
1.2.3	**Transfer Antar Daerah**	**158.599.832.045,00**	**185.172.991.852,00**	**211.961.197.034,00**	**211.473.176.918,00**	**236.308.408.284,00**	**10,48**
1.2.3.1	Pendapatan bagi hasil pajak	147.910.429.045,00	169.742.571.852,00	192.799.361.034,00	197.843.915.918,00	198.413.893.632,00	7,62
1.2.3.2	Pendapatan bagi hasil lainnya						
1.2.3.3	Bantuan keuangan	10.689.403.000,00	15.430.420.000,00	19.161.836.000,00	13.629.261.000,00	37.894.514.652,00	37,22

No.	Uraian	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024 (persen per tahun)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**110.365.013.575,00**	**111.734.639.179,00**	**24.625.485.254,00**	**18.454.635.298,00**	**10.495.547.244,00**	**-44,47**
1.3.1	Pendapatan hibah	110.365.013.575,00	111.734.639.179,00	24.625.485.254,00	18.454.635.298,00	10.495.547.244,00	-44,47
1.3.2	Pendapatan dana darurat						
1.3.3	Pendapatan Lainnya						
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.380.457.680.604,00**	**2.469.754.315.099,00**	**2.558.024.177.090,00**	**2.573.481.690.623,00**	**2.780.530.841.435,00**	**3,96**
2	**BELANJA**						
2.1	**Belanja Operasi**	**1.357.596.932.757,00**	**1.470.374.919.809,00**	**1.579.734.196.385,00**	**1.711.794.748.890,00**	**1.912.219.026.392,00**	**8,94**
2.1.1	Belanja pegawai	795.312.940.429,00	872.000.973.628,00	909.490.218.457,00	979.808.617.479,00	1.147.555.914.649,00	9,6
2.1.2	Belanja barang dan jasa	495.959.581.668,00	497.012.849.640,00	517.021.760.709,00	553.587.132.203,00	580.308.946.970,00	4
2.1.3	Belanja hibah	55.687.000.660,00	95.879.446.541,00	138.442.265.179,00	173.254.489.708,00	178.695.982.973,00	33,84
2.1.4	Belanja bantuan sosial	10.637.410.000,00	5.481.650.000,00	14.779.952.040,00	5.144.509.500,00	5.658.181.800,00	-14,6
2.2	**Belanja Modal**	**214.407.058.402,00**	**251.160.713.253,00**	**304.002.891.493,00**	**318.001.060.309,00**	**300.087.089.964,00**	**8,77**
2.2.1	Belanja modal tanah	5.507.345.948,00	1.282.719.408,00	29.958.753.449,00	837.573.180,00	15.601.780,00	-76,93
2.2.2	Belanja modal peralatan dan mesin	119.261.429.185,00	79.475.721.306,00	125.167.670.997,00	111.034.686.354,00	97.491.373.887,00	-4,91
2.2.3	Belanja modal gedung dan bangunan	50.299.523.649,00	118.861.327.368,00	49.618.052.297,00	121.599.150.695,00	102.238.004.134,00	19,4
2.2.4	Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan	32.195.982.259,00	43.812.356.370,00	89.144.512.113,00	67.330.738.100,00	86.415.388.168,00	28
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	6.365.747.356,00	7.286.258.061,00	10.113.902.637,00	14.017.171.980,00	9.087.588.995,00	9,31
2.2.6	Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)	777.030.005,00	442.330.740,00		3.181.740.000,00	4.839.133.000,00	57,97
2.3	**Belanja Tak Terduga**	**64.637.965.303,00**	**50.039.581.363,00**	**3.345.921.800,00**	**5.106.915.740,00**	**4.120.214.822,00**	**-49,75**
2.3.1	Belanja tak terduga	64.637.965.303,00	50.039.581.363,00	3.345.921.800,00	5.106.915.740,00	4.120.214.822,00	-49,75
	JUMLAH BELANJA	**1.636.641.956.462,00**	**1.771.575.214.425,00**	**1.887.083.009.678,00**	**2.034.902.724.939,00**	**2.216.426.331.178,00**	**7,88**
3	**TRANSFER**						
3.1	**Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa**	**21.634.541.500,00**	**13.628.409.596,00**	**18.398.958.004,00**	**19.923.238.867,00**	**22.014.336.507,00**	**0,44**
3.1.1	Transfer bagi hasil pajak	15.683.755.000,00	11.247.057.467,00		17.932.290.887,00	20.108.235.625,00	6,41

No.	Uraian	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024 (persen per tahun)
		2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.2	Transfer bagi hasil pendapatan lainnya	5.950.786.500,00	2.381.352.129,00		1.990.947.980,00	1.906.100.882,00	-24,77
3.2	**Transfer Bantuan Keuangan**	**646.099.419.199,00**	**627.960.164.871,00**	**664.844.033.995,00**	**632.998.975.234,00**	**632.207.385.042,00**	**-0,54**
3.2.1	Transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya						
3.2.2	Transfer bantuan keuangan ke desa	643.799.688.199,00	627.960.164.871,00				
3.2.3	Transfer bantuan keuangan lainnya	2.299.731.000,00					
	JUMLAH TRANSFER	**667.733.960.699,00**	**641.588.574.467,00**	**683.242.991.999,00**	**652.922.214.101,00**	**654.221.721.549,00**	**-0,51**
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**2.304.375.917.161,00**	**2.413.163.788.892,00**	**2.570.326.001.677,00**	**2.687.824.939.040,00**	**2.870.648.052.727,00**	**5,65**
	SURPLUS/DEFISIT	**76.081.763.443,00**	**56.590.526.207,00**	**-12.301.824.587,00**	**-114.343.248.417,00**	**-90.117.211.292,00**	
4	**PEMBIAYAAN**						
4.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**218.814.092.659,00**	**287.691.856.102,00**	**328.578.382.309,00**	**315.907.861.722,00**	**193.277.309.305,00**	**-3,05**
4.1.1	Penggunaan SiLPA	218.814.092.659,00	287.691.856.102,00	328.578.382.309,00	286.776.557.722,00	157.408.613.305,00	-7,9
4.1.2	Pencairan dana cadangan				29.131.304.000,00	35.868.696.000,00	23,13
4.1.3	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah						
4.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**7.204.000.000,00**	**15.704.000.000,00**	**29.500.000.000,00**	**44.156.000.000,00**	**2.469.000.000,00**	**-23,49**
4.2.1	Pembentukan dana cadangan		10.000.000.000,00	25.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	73,21
4.2.2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	7.204.000.000,00	5.704.000.000,00	4.500.000.000,00	14.156.000.000,00	2.469.000.000,00	-23,49
	PEMBIAYAAN NETTO	**211.610.092.659,00**	**271.987.856.102,00**	**299.078.382.309,00**	**271.751.861.722,00**	**190.808.309.305,00**	**-2,55**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**287.691.856.102,00**	**328.578.382.309,00**	**286.776.557.722,00**	**157.408.613.305,00**	**100.691.098.013,00**	**-23,08**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024 (Audited), Diolah

2.2.1.2. Analisis Neraca Daerah

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2019, dijelaskan bahwa neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, total aset Kabupaten Magelang bertumbuh positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,97 persen per tahun, atau dengan total aset sebesar Rp 3.429.577.837.888,45 di tahun 2020 dan bertumbuh menjadi Rp 3.707.988.142.548,73 di tahun 2024.

Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, secara umum aset lancar Kabupaten Magelang memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun atau dengan besaran rata-rata penurunan sebesar 12,13 persen per tahun. Pada tahun 2020, besaran aset lancar di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 368.852.667.274,60 dan menunjukkan penurunan menjadi Rp 219.860.741.456,81 di tahun 2024. Sementara itu, besaran aset non lancar di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan meningkat yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,32 persen per tahun. Pada tahun 2020, jumlah aset non lancar di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 3.060.725.170.613,85 dan bertumbuh menjadi Rp 3.488.127.401.091,92 di tahun 2024.

Selanjutnya, kewajiban menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2019 adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiaannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Berdasarkan laporan neraca daerah, secara umum total kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Magelang memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,09 persen per tahun. Total kewajiban yang merupakan kewajiban jangka pendek

ini tercatat sebesar Rp 21.102.659.627,22 di tahun 2020 dan menunjukkan peningkatan menjadi sebesar Rp 26.732.784.782,32 di tahun 2024.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan dalam ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Dalam laporan neraca, jumlah total ekuitas tidak dirinci secara mendetail mengenai besaran ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, maupun ekuitas dana cadangan. Besaran ekuitas dana di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,94 persen per tahun, di mana pada tahun 2020 ekuitas dana tersebut tercatat sebesar Rp 3.408.475.178.261,23 dan meningkat menjadi Rp 3.681.255.357.766,41 di tahun 2024.

Tabel 2.2.4
Neraca Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Realisasi Neraca Daerah (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (persen per tahun)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**ASET**						
1.1	**Aset Lancar**	**368.852.667.274,60**	**434.949.246.968,59**	**378.213.389.731,15**	**249.895.232.340,77**	**219.860.741.456,81**	-12,13
1.1.1	Kas di Kas Daerah	243.633.990.241,00	259.650.897.763,00	235.054.907.127,00	128.504.791.904,00	84.200.992.642,00	-23,33
1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	5.273.326.030,00	159.867,00	55.015.709,00	144.592.450,00	31.860.274,00	-72,12
1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	49.617.182,00	50.170.345,00	10.803.947,00		-	-53,34
1.1.4	Kas di BLUD	36.624.484.899,00	68.550.085.220,00	51.532.515.089,00	26.223.856.108,00	14.787.511.672,00	-20,29
1.1.5	Setara Kas/Kas Lainnya				2.221.378.029,00	-	
1.1.6	Kas BOS	2.175.397.305,00	441.286.502,00	344.539.160,00	335.699.770,00	-	-46,36
1.1.7	Kas Dana BOSP					107.653.608,00	
1.1.8	Kas Dana BOK Puskesmas					1.607.952.433,00	
1.1.9	Investasi jangka pendek						
1.1.10	Piutang pendapatan	63.349.903.363,48					
1.1.11	Piutang Pajak		39.238.587.125,48	34.908.261.633,48	37.591.682.015,48	40.279.846.351,48	0,88
1.1.12	Piutang Retribusi		4.079.812.308,00	3.707.741.598,00	3.517.910.652,65	29.730.399.506,65	93,87
1.1.13	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		54.830.552.833,50	14.969.174.690,12	20.250.624.104,50	4.832.438.334,50	-55,5
1.1.14	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		5.244.567.273,00				
1.1.15	Piutang Transfer Antar Daerah		2.061.704.229,00	2.692.928.545,00	6.829.784.343,00	11.453.643.762,00	77,11
1.1.16	Piutang Lainnya	15.887.390.463,50	1.391.058.000,00				-91,24
1.1.17	Penyisihan Piutang	-25.218.911.053,79	-28.384.317.241,39	-22.391.682.790,09	-24.947.862.868,73	-27.121.515.794,03	1,83
1.1.18	Beban Dibayar Dimuka	200.637.083,00	151.359.583,00	4.135.356.061,00	77.095.083,33	34.530.225,00	-35,59
1.1.19	Persediaan	26.876.831.761,41	27.643.323.161,00	53.193.828.961,64	49.145.680.749,54	59.915.428.442,21	22,19
1.2	**Investasi Jangka Panjang**	**283.363.261.640,94**	**296.272.614.677,54**	**309.177.015.206,48**	**340.589.994.077,76**	**344.594.015.165,92**	5,01
1.2.1	**Investasi Non Permanen**	**-**	**-**	**-**	**15.050.401.387,00**	**-**	

No.	Uraian	Realisasi Neraca Daerah (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (persen per tahun)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1	Investasi non permanen				15.050.401.387,00		
1.2.1.2	Investasi non permanen Lainnya						
1.2.2	**Investasi Permanen**	**283.363.261.640,94**	**296.272.614.677,54**	**309.177.015.206,48**	**325.539.592.690,76**	**344.594.015.165,92**	5,01
1.2.2.1	Investasi permanen lainnya						
1.2.2.2	Penyertaan modal pemerintah daerah	283.363.261.640,94	296.272.614.677,54	309.177.015.206,48	325.539.592.690,76	344.594.015.165,92	5,01
1.3	**Aset Tetap**	**2.742.546.446.841,50**	**2.815.352.725.141,39**	**2.910.794.609.807,34**	**2.972.439.308.400,98**	**3.070.699.064.729,02**	2,87
1.3.1	Tanah	654.874.141.646,00	650.993.188.376,00	683.164.024.140,00	685.560.820.718,00	724.776.592.221,00	2,57
1.3.2	Peralatan dan mesin	806.067.100.577,00	913.640.024.098,00	1.066.984.512.370,00	1.171.542.761.890,00	1.273.082.440.363,00	12,1
1.3.3	Gedung dan bangunan	1.495.901.164.662,00	1.766.836.199.780,00	1.814.142.616.411,00	1.900.600.631.706,00	1.992.742.968.449,00	7,43
1.3.4	Jalan, irigasi, dan jaringan	1.544.043.850.715,00	1.598.870.007.823,00	1.694.527.483.679,00	1.775.101.534.896,00	1.871.065.942.058,00	4,92
1.3.5	Aset tetap lainnya	136.719.506.916,00	142.944.513.213,00	151.341.675.304,00	160.465.769.500,00	169.338.161.612,00	5,49
1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	139.582.295.866,00	6.820.345.889,00	4.697.274.759,00	39.775.748.561,00	47.342.552.683,00	-23,69
1.3.7	Akumulasi penyusutan	-2.034.641.613.540,50	-2.264.751.554.037,61	-2.504.062.976.855,66	-2.760.607.958.870,02	-3.007.649.592.656,98	10,26
1.4	**Dana Cadangan**	**-**	**10.000.000.000,00**	**35.000.000.000,00**	**35.868.696.000,00**	-	89,39
1.4.1	Dana cadangan		10.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.868.696.000,00	-	89,39
1.5	**Aset Lainnya**	**34.815.462.131,41**	**40.815.743.092,76**	**51.670.907.867,61**	**54.719.539.670,29**	**57.665.770.799,98**	13,45
1.5.1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.964.640.000,00	1.964.640.000,00	1.964.640.000,00	1.964.640.000,00	1.964.640.000,00	-
1.5.2	Aset Tak Berwujud	15.844.033.482,00	15.901.909.922,00	12.887.742.586,00	19.562.639.969,00	18.570.541.320,00	4,05
1.5.3	Aset Lain-Lain	29.441.364.065,66	36.621.902.013,51	43.087.999.600,36	44.284.294.286,39	48.458.684.010,18	13,27
1.5.4	Akumulasi Amortisasi	-12.434.575.416,25	-13.672.708.842,75	-11.274.024.554,75	-13.908.551.585,10	-11.328.094.530,20	-2,3
1.5.5	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	5.004.550.236,00	2.816.517.000,00	-	-43,72
1.6	**Properti Investasi**	**-**	**-**	**-**	-	**15.168.550.397,00**	
1.6.1	Properti investasi - tanah				-	14.046.123.587,00	

No.	Uraian	Realisasi Neraca Daerah (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (persen per tahun)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.6.2	Properti investasi - gedung dan bangunan				-	2.797.714.000,00	
1.6.3	Akumulasi penyusutan properti investasi				-	-1.675.287.190,00	
	TOTAL ASET	**3.429.577.837.888,45**	**3.597.390.329.880,28**	**3.684.855.922.612,58**	**3.653.512.770.489,80**	**3.707.988.142.548,73**	1,97
2	**KEWAJIBAN**						
2.1	**Kewajiban Jangka Pendek**	**21.102.659.627,22**	**37.025.724.121,75**	**21.169.133.931,27**	**16.640.666.924,82**	**26.732.784.782,32**	6,09
2.1.1	Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	325.903.478,00	112.344.560,00	219.350.482,00	21.704.956,00	44.872.616,00	-39,09
2.1.2	Pendapatan diterima dimuka	893.708.599,22	7.714.775.159,34	10.324.100.128,27	6.534.318.572,82	3.012.072.560,32	35,49
2.1.3	Utang belanja/utang beban	17.318.697.534,00	27.063.398.085,41	10.623.810.493,00	10.084.643.396,00	23.675.839.606,00	8,13
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.564.350.016,00	2.135.206.317,00	1.872.828,00			-97,3
2.2	**Kewajiban Jangka Panjang**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
2.2.1	Utang Jangka Panjang Lainnya						
	TOTAL KEWAJIBAN	**21.102.659.627,22**	**37.025.724.121,75**	**21.169.133.931,27**	**16.640.666.924,82**	**26.732.784.782,32**	6,09
3	**TOTAL EKUITAS (TOTAL ASET-TOTAL KEWAJIBAN)**	**3.408.475.178.261,23**	**3.560.364.605.758,53**	**3.663.686.788.681,31**	**3.636.872.103.564,98**	**3.681.255.357.766,41**	1,94
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**3.429.577.837.888,45**	**3.597.390.329.880,28**	**3.684.855.922.612,58**	**3.653.512.770.489,80**	**3.707.988.142.548,73**	1,97

Sumber: Neraca-Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024 (Audited), Diolah

Mengutip pernyataan dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan, analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Tabel 2.2.5
Rasio Keuangan Daerah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Rasio Likuiditas					
1.	Rasio Lancar	17,48	11,75	17,87	15,02	8,22
2.	Rasio Quick	16,21	11,00	15,35	12,06	5,98
	Rasio Solvabilitas					
3.	Rasio total hutang terhadap total aset	0,008	0,013	0,007	0,006	0,007
4.	Rasio hutang terhadap modal	0,006	0,010	0,006	0,005	0,007

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024 (Audited), Diolah

Rasio likuiditas menunjukkan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Meskipun pemerintah daerah sudah membuat anggaran kas, namun perlu ditunjang oleh analisis likuiditas, di mana untuk dapat memenuhi kewajibannya maka pemerintah daerah harus mempunyai alat-alat yang dapat digunakan untuk membayar yang berupa aktiva-aktiva lancar yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan. Analisis rasio likuiditas meliputi rasio lancar (*current ratio*) dan rasio *quick*.

Rasio lancar menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang segera harus dibayar dengan aktiva lancarnya. Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan antara aktiva lancar dengan utang lancar yang datanya diperoleh dari neraca. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi, baik organisasi bisnis maupun pemerintahan daerah. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya, oleh karena itu kondisi keuangan daerah dapat dikatakan sehat apabila rasio lancarnya berada di atas 1, atau dengan kata lain jumlah aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar. Berdasarkan hasil perhitungan rasio lancarnya, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 rasio lancar Kabupaten Magelang menunjukkan besaran lebih dari ukuran baku yang ditetapkan, di mana hal tersebut mengindikasikan bahwa kabupaten ini memiliki aset yang cukup untuk menyelesaikan/melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Selanjutnya, rasio *quick* merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik, dimana indikator ini mengindikasikan pemerintah daerah dapat membayarkan utangnya dengan cepat. Rasio *quick* merupakan rasio yang menunjukkan

kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (*inventory*), dengan kata lain dalam perhitungan rasio ini mengabaikan nilai sediaan dengan cara dikurangi dari total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan. Standar nilai untuk rasio *quick* adalah sebesar >1, semakin tinggi besaran nilai rasio ini maka semakin tinggi likuiditasnya, namun tidak boleh terlalu besar karena menunjukkan besarnya aset yang tidak tersalurkan sehingga terjadi kelebihan likuiditas. Secara umum dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, capaian rasio *quick* di kabupaten ini dapat dikatakan sehat karena memiliki besaran nilai >1, hal tersebut mengindikasikan bahwa kondisi aktiva lancar di kabupaten ini masih mampu menutupi utang lancarnya.

Rasio solvabilitas merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk pemerintah daerah yakni rasio total utang terhadap total aset. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva, maka semakin kecil rasionya maka semakin aman (*solvable*), sementara itu apabila semakin besar rasionya maka semakin besar pula pengaruh utang terhadap pembiayaan yang menandakan semakin besar risiko yang akan dihadapi oleh pemerintah, dengan kata lain porsi utang terhadap aktiva harus lebih kecil. Berdasarkan hasil perhitungan rasio solvabilitas Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 diketahui bahwa proporsi utang daerah lebih kecil dibandingkan dengan aktivanya, sehingga dapat dikatakan bahwa utang pemerintah dapat ditutupi oleh aktivanya (*solvable*) yang berarti pengaruh utang terhadap aktiva adalah sangat kecil.

Rasio utang terhadap aset modal digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Aset modal diproksikan dengan aset tetap. Rasio ini didapatkan dari perbandingan antara total utang dengan total aset modal. Kinerja pemerintah daerah dikatakan baik apabila rasio utang terhadap total aset modal yang dicapai kurang dari atau sama dengan 0,45. Berdasarkan hasil perhitungan rasio utang terhadap aset modal, dapat diketahui bahwa besaran rasio utang terhadap total aset modal atau aset tetap pemerintah Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan besaran di bawah standar yang

ditetapkan (≤0,45). Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah kabupaten ini dalam menjamin keseluruhan utang melalui aset tetapnya sudah baik.

Selanjutnya, rasio utang terhadap modal digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Indikator rasio utang terhadap modal merupakan perbandingan antara total utang dengan jumlah ekuitas dana. Rasio ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemerintah daerah kemungkinan berada pada fase kelebihan utang (*over leverage*), sehingga perlu mencari upaya untuk mengurangi dan/atau melunasi utang tersebut. Semakin besar rasio ini menunjukkan risiko pemberian utang yang semakin besar, atau dengan kata lain kinerja pemerintah daerah dikatakan baik apabila rasio utang terhadap modal yang dicapai ini kurang dari satu. Berdasarkan hasil perhitungan rasio utang terhadap ekuitas, dapat diketahui bahwa besaran rasio utang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan besaran kurang dari satu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah kabupaten ini dalam menjamin keseluruhan utang melalui setiap rupiah ekuitas dana sudah baik, atau dengan kata lain rasio tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah kabupaten ini mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua utang-utangnya dengan modal yang dimilikinya.

2.2.2.Proyeksi Pendapatan dan Belanja Tahun 2025-2030

Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki keterkaitan yang erat dengan kapasitas fiskal daerah dalam melaksanakan pembangunan serta penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam upaya untuk mewujudkan pemerataan wilayah, kegiatan pembangunan di kabupaten ini masih dilakukan secara masif di berbagai bidang, di mana pelaksanaan pembangunan tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan penganggaran daerah. Perhitungan proyeksi APBD Kabupaten Magelang disusun berdasarkan histori penerimaan daerah dan belanja daerah dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2024. Pada komponen penerimaan, proyeksi disusun dengan memperhatikan kebijakan penganggaran daerah maupun nasional, serta dengan memedomani perubahan regulasi dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Pendapatan daerah di tahun 2025 mendasari Penetapan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025, sehingga untuk penerimaan TA 2026 hingga 2030 diperkirakan memiliki kecenderungan yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada periode tahun perencanaan lima tahun mendatang, penerimaan daerah Kabupaten Magelang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,16 persen per tahun, di mana pada tahun 2025 pendapatan daerah Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp 2.741.635.308.944,19. Besaran tersebut kemudian menunjukkan peningkatan di tahun 2026 menjadi Rp 2.752.096.617.365,31 dan terus menunjukkan peningkatan hingga tahun 2030 hingga besarannya tercatat menjadi Rp 3.116.483.844.177,48.

Secara lebih detail, komponen PAD dalam pos penerimaan daerah diproyeksikan menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,24 persen per tahun. Pada tahun 2025, komponen PAD Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp 646.523.027.279,19 dan meningkat menjadi Rp 685.625.310.343,21, dan kemudian bertumbuh setiap tahunnya hingga menjadi Rp 1.050.012.537.155,38 di tahun 2030. Komponen tersebut diharapkan akan semakin meningkat dengan menggali dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaannya yang potensial untuk memperbesar keuangan daerah. Salah satu hal yang dilakukan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Magelang adalah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Komponen pajak daerah Kabupaten Magelang diproyeksikan akan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,43 persen per tahun, sementara komponen retribusi daerah menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,39 persen per tahun, di mana kenaikan yang signifikan tersebut terjadi karena adanya pendapatan retribusi pelayanan kesehatan yang berasal dari BLUD.

Selanjutnya, peningkatan penerimaan daerah di Kabupaten Magelang juga memperhitungkan perubahan besaran penerimaan daerah yang dipengaruhi oleh besaran pendapatan transfer. Komponen pendapatan transfer di kabupaten ini menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang tetap dikarenakan pada tahun 2026 hingga tahun 2030 proyeksi pendapatan transfer diasumsikan sama, kecuali untuk insentif fiskal dan pendapatan hibah dari pemerintah pusat. Pada tahun 2025, besaran pendapatan transfer Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp 2.082.608.081.665,00 dan menurun menjadi Rp 2.066.471.307.022,10 di tahun 2026 hingga 2030. Sementara itu, komponen transfer pemerintahan pusat berupa dana perimbangan diasumsikan sama

dalam kurun waktu perencanaan atau pada rentang tahun 2026 hingga 2030, yakni sebesar Rp 1.932.346.284.000,00, di mana besaran tersebut meningkat sebesar 0,07 persen dibandingkan dengan tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp 1.931.015.349.888,00. Besaran dana perimbangan tersebut merupakan kewenangan pusat, dan sumber-sumber pendapatan daerah yang berubah karena adanya perubahan kebijakan pajak dan retribusi yang sifatnya dinamis.

Berdasarkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi, pemerintah daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan pajak dan retribusi yang meliputi koorsinasi, jejaring kerja, kemitraan, dan kerjasama daerah antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan, dan pihak lainnya. Adapun sinergitas pengelolaan pajak dan retribusi tersebut diarahkan untuk:

1. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi;
2. Penanganan piutang pajak dan retribusi;
3. Melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi pajak dan retribusi;
4. Optimalisasi pelaksanaan opsen pajak;
5. Pengembangan data potensi pajak dan retribusi;
6. Penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
7. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
8. Pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektivitas pemungutan pajak dan retribusi;
9. Pelaksanaan kerjasama teknis;
10. Pertukaran data informasi; dan/atau
11. Digitalisasi Sistem melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam rangka optimalisasi pendapataan daerah.
12. Hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai tindak lanjut PKS mengenai Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyusun rencana strategi terkait penerimaan dari opsen PKB-BBNKB. Strategi tersebut meliputi beberapa upaya, antara lain: pemberian *reward* kepada lembaga atau perorangan yang berkontribusi dalam optimalisasi pendapatan; pelaksanaan operasi gabungan untuk penegakan kepatuhan wajib pajak; serta kegiatan sosialisasi terkait

program-program penagihan piutang maupun pembayaran pajak pada tahun berjalan.

Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memberikan dampak signifikan terhadap belanja Kementerian/Lembaga, termasuk belanja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Kriteria pembatasan dan efisiensi belanja sebagaimana diatur dalam Inpres tersebut diperkirakan akan terus diterapkan dalam pola belanja pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini akan memengaruhi proyeksi belanja daerah pada periode 2025 hingga 2030. Selain itu, alokasi belanja daerah yang mendukung masifnya pembangunan diharapkan akan mendorong percepatan peningkatan perekonomian daerah. Kegiatan ekonomi yang semakin maju berdampak positif pada pendapatan daerah. Oleh karena itu, pendapatan daerah diproyeksikan semakin meningkat.

Selanjutnya, rencana belanja daerah diproyeksikan dengan menggunakan tren proporsi belanja tahun 2019 hingga 2024. Tren belanja daerah di Kabupaten Magelang juga menyesuaikan besaran penerimaan daerah yang juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan masifnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, yang salah satunya bertujuan untuk pemerataan wilayah. Pada tahun 2025, besaran komponen belanja daerah Kabupaten Magelang tercatat sebesar Rp 2.842.326.406.957,00 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2030 hingga besarannya menjadi Rp 3.161.180.394.847,48 atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,24 persen per tahun. Meskipun demikian, proporsi belanja pegawai di Kabupaten Magelang masih tercatat di atas 30 persen, di mana pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan pembatasan alokasi belanja pegawai di daerah maksimal sebesar 30 persen dari total belanja daerah sehingga daerah akan dilakukan penyesuaian secara bertahap.

Belanja daerah Kabupaten Magelang tahun 2025-2030 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, yakni terwujudnya “Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera” atau yang disingkat Magelang Anyar Gress. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, struktur belanja daerah Kabupaten Magelang tahun 2025-2029 disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut.

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
   a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja perangkat daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja pegawai termasuk belanja pegawai untuk PPPK dan CPNS, memperhitungkan jumlah pegawai yang pensiun serta penyesuaian tambahan penghasilan pegawai.
   b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk operasional pelayanan dan dukungan pelaksanaan kegiatan;
   c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah antara lain digunakan untuk dukungan pelaksanaan pilkada serentak; partai politik; instansi vertikal dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah; pembinaan kepemudaan dan olahraga, organisasi kemasyarakatan;
   d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas

minimal kapitalisasi aset. Belanja Modal diantaranya untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana.

3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
   a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
      1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
      2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
      3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
      4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Provinsi dan Desa), meliputi:
   a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa, atau pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah Desa atau pemerintah daerah tertentu dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peratuan perundang-undangan.

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayarkan dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada dasarnya, pembiayaan daerah meliputi seluruh transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan komponen pembiayaan yang dianggarkan untuk mencatat setiap penerimaan yang akan dibayarkan kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan merupakan komponen pembiayaan yang dianggarkan untuk mencatat setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam kerangka RPJMD Tahun 2025-2030, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya serta pencairan dana cadangan Pilkada pada tahun 2028 dan 2029. Adapun pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada hingga tahun 2028 serta penyertaan modal daerah yang dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential) dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tersebut, maka diperoleh hasil bahwa dalam lima tahun kedepan pendapatan daerah Kabupaten Magelang tercatat lebih kecil dari belanja daerah, sehingga menghasilkan defisit anggaran. Dalam hal defisit anggaran tersebut, maka sumber pembiayaan yang digunakan untuk menutupnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, besaran penggunaan SiLPA di kabupaten ini tercatat sebesar Rp 100.691.098.012,81 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2030 hingga besarannya menjadi Rp 44.696.550.670,00, atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,77 persen per tahun. Selanjutnya, berdasarkan komponen tersebut, besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran nol rupiah.

Tabel 2.2.6
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2025-2030

No.	Uraian	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah (Rupiah)					
		2025*	2026	2027	2028	2029	2030
1	**PENDAPATAN**						
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**646.523.027.279,19**	**685.625.310.343,21**	**750.759.714.825,81**	**833.343.283.456,65**	**933.344.477.471,45**	**1.050.012.537.155,38**
1.1.1.	Pendapatan pajak daerah	319.684.057.443,19	333.296.594.138,21	362.650.418.985,09	404.279.722.933,47	461.766.736.778,25	532.617.423.474,74
1.1.2.	Pendapatan retribusi daerah**	274.954.046.879,00	303.659.226.634,60	334.654.683.268,28	370.674.706.110,20	409.873.103.818,62	450.903.047.529,69
1.1.3.	Pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	31.402.467.248,00	36.356.051.347,00	39.456.051.347,00	42.656.051.347,00	45.956.051.347,00	49.956.051.347,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	20.482.455.709,00	12.313.438.223,40	13.998.561.225,44	15.732.803.065,98	15.748.585.527,58	16.536.014.803,96
1.2.	**Pendapatan Transfer**	**2.082.608.081.665,00**	**2.066.471.307.022,10**	**2.066.471.307.022,10**	**2.066.471.307.022,10**	**2.066.471.307.022,10**	**2.066.471.307.022,10**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**1.931.015.349.888,00**	**1.932.346.284.000,00**	**1.932.346.284.000,00**	**1.932.346.284.000,00**	**1.932.346.284.000,00**	**1.932.346.284.000,00**
1.2.1.1	Dana Desa	358.811.715.000,00	358.811.715.000,00	358.811.715.000,00	358.811.715.000,00	358.811.715.000,00	358.811.715.000,00
1.2.2.2	Insentif Fiskal	14.017.060.000,00					
1.2.2.3	Dana Bagi Hasil (DBH)	46.653.627.000,00	46.653.627.000,00	46.653.627.000,00	46.653.627.000,00	46.653.627.000,00	46.653.627.000,00
1.2.2.4	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.079.672.806.901,00	1.092.767.941.000,00	1.092.767.941.000,00	1.092.767.941.000,00	1.092.767.941.000,00	1.092.767.941.000,00
1.2.2.5	Dana Alokasi Khusus (DAK)	431.860.140.987,00	434.113.001.000,00	434.113.001.000,00	434.113.001.000,00	434.113.001.000,00	434.113.001.000,00
1.2.2.5.1	DAK Fisik	51.538.832.000,00	52.336.882.000,00	52.336.882.000,00	52.336.882.000,00	52.336.882.000,00	52.336.882.000,00
1.2.2.5.2	DAK Non Fisik	380.321.308.987,00	381.776.119.000,00	381.776.119.000,00	381.776.119.000,00	381.776.119.000,00	381.776.119.000,00
1.2.3	**Transfer Antar Daerah**	**151.592.731.777,00**	**134.125.023.022,10**	**134.125.023.022,10**	**134.125.023.022,10**	**134.125.023.022,10**	**134.125.023.022,10**
1.2.3.1	Pendapatan bagi hasil	146.978.731.777,00	134.125.023.022,10	134.125.023.022,10	134.125.023.022,10	134.125.023.022,10	134.125.023.022,10
1.2.3.2	Bantuan keuangan	4.614.000.000,00			0	0	0
1.3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**12.504.200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1	Pendapatan hibah	12.504.200.000,00	0		0	0	0
1.3.2	Pendapatan dana darurat	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.741.635.308.944,19**	**2.752.096.617.365,31**	**2.817.231.021.847,91**	**2.899.814.590.478,75**	**2.999.815.784.493,55**	**3.116.483.844.177,48**

No.	Uraian	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah (Rupiah)					
		2025*	2026	2027	2028	2029	2030
2	**BELANJA**						
2.1	**Belanja Operasi**	**1.958.233.883.955,45**	**1.834.395.681.378,81**	**1.878.416.971.648,24**	**1.973.613.572.660,74**	**2.095.847.345.250,56**	**2.169.884.611.869,58**
2.1.1	Belanja pegawai	1.192.250.043.020,00	1.242.804.019.023,43	1.199.347.472.072,61	1.201.804.005.507,76	1.206.920.831.102,31	1.202.858.410.083,89
2.1.2	Belanja barang dan jasa	643.758.475.628,17	527.697.261.435,38	596.736.591.335,63	657.345.354.911,98	770.724.909.906,25	881.693.293.543,69
2.1.3	Belanja bunga	0					
2.1.4	Belanja subsidi	0					
2.1.5	Belanja hibah	109.680.429.317,28	59.947.725.920,00	77.915.372.250,00	110.046.676.251,00	113.784.068.252,00	80.915.372.252,00
2.1.6	Belanja bantuan sosial	12.544.935.990,00	3.946.675.000,00	4.417.535.990,00	4.417.535.990,00	4.417.535.990,00	4.417.535.990,00
2.2	**Belanja Modal**	**209.406.759.509,18**	**278.217.067.163,83**	**283.253.217.147,49**	**293.971.355.915,88**	**307.751.003.601,66**	**316.118.039.484,75**
2.2.1	Belanja modal tanah	2.498.663.335,00					
2.2.2	Belanja modal peralatan dan mesin	100.966.443.411,16					
2.2.3	Belanja modal gedung dan bangunan	57.999.103.440,33					
2.2.4	Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan	32.982.589.801,00					
2.2.5	Belanja modal aset tetap lainnya	8.917.517.320,69					
2.2.6	Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)	6.042.442.201,00					
2.3	**Belanja Tak Terduga**	**12.148.131.960,87**	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**	**20.000.000.000,00**
2.3.1	Belanja tak terduga	12.148.131.960,87	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
2.4	**Belanja Transfer**	**662.537.631.531,50**	**649.557.923.095,67**	**650.861.982.679,18**	**652.128.630.582,14**	**653.911.687.164,34**	**655.177.743.493,15**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	35.037.221.444,50	33.310.396.382,67	34.614.455.966,18	35.881.103.869,14	37.664.160.451,34	38.930.216.780,15
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	627.500.410.087,00	616.247.526.713,00	616.247.526.713,00	616.247.526.713,00	616.247.526.713,00	616.247.526.713,00
	JUMLAH BELANJA	**2.842.326.406.957,00**	**2.782.170.671.638,31**	**2.832.532.171.474,91**	**2.939.713.559.158,75**	**3.077.510.036.016,55**	**3.161.180.394.847,48**
	SURPLUS/DEFISIT	**-100.691.098.012,81**	**-30.074.054.273,00**	**-15.301.149.627,00**	**-39.898.968.680,00**	**-77.694.251.523,00**	**-44.696.550.670,00**
4	**PEMBIAYAAN**						
4.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**100.691.098.012,81**	**40.074.054.273,00**	**40.301.149.627,00**	**69.898.968.680,00**	**77.694.251.523,00**	**44.696.550.670,00**
4.1.1	Penggunaan SiLPA	100.691.098.012,81	40.074.054.273,00	40.301.149.627,00	40.767.664.680,00	41.825.555.523,00	44.696.550.670,00
4.1.2	Pencairan dana cadangan	0	0	0	29.131.304.000,00	35.868.696.000,00	0
4.1.3	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0	0	0

No.	Uraian	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah (Rupiah)					
		2025*	2026	2027	2028	2029	2030
4.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**-**	**10.000.000.000,00**	**25.000.000.000,00**	**30.000.000.000,00**	**-**	**-**
4.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	10.000.000.000,00	25.000.000.000,00	30.000.000.000,00	**-**	**-**
4.2.2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	-	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**100.691.098.012,81**	**30.074.054.273,00**	**15.301.149.627,00**	**39.898.968.680,00**	**77.694.251.523,00**	**44.696.550.670,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Keterangan:

**) Proyeksi 2025 sesuai MoU kUA PPAS Perubahan 2025*

***) Pendapatan retribusi daerah sebagian besar (sekitar 90 persen) merupakan in-out retribusi BLUD*

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah maka dapat dihitung pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Magelang tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.

Kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Magelang saat ini masih relatif terbatas untuk membiayai keseluruhan program prioritas pembangunan daerah, termasuk untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Kondisi ini menuntut adanya terobosan dalam pendekatan pendanaan agar target pembangunan tetap dapat tercapai tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD. Salah satu strategi yang dapat dikembangkan adalah mendorong skema *creative financing* atau pembiayaan kreatif, yang memanfaatkan berbagai sumber pendanaan alternatif di luar anggaran pemerintah daerah. Adapun beberapa skema pendanaan yang dapat dimanfaatkan diantaranya *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), Pembiayaan Utang Daerah dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah konsep dimana perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. CSR diarahkan untuk mendukung kegiatan pembangunan sesuai prioritas daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang mengamanatkan implementasi Sinergi Pendanaan serta Pembiayaan Utang Daerah melalui pemanfaatan pinjaman daerah, obligasi daerah dan sukuk daerah, untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam penyediaan infrastruktur.

Pinjaman daerah merupakan alternatif pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit APBD, kekurangan kas, atau membiayai program prioritas pembangunan daerah. Sumber pinjaman daerah berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank (LKB), atau lembaga keuangan bukan bank (LKBB), dan harus diikat dalam perjanjian pinjaman. Pinjaman ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu opsi strategis yang dapat menjembatani keterbatasan pembiayaan pemerintah

dengan kapasitas investasi swasta. Melalui KPBU, pemerintah daerah dapat menggandeng pihak swasta untuk merancang, membangun, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur publik dengan prinsip saling menguntungkan, efisien, dan berbagi risiko secara proporsional.

Skema KPBU diatur dengan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko. Adapun infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial, yang mencakup infrastruktur transportasi, jalan, sumber daya air dan irigasi, air minum, sistem pengelolaan air limbah terpusat, sistem pengelolaan air limbah setempat, sistem pengelolaan persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi dan energi terbarukan, konservasi energi, fasilitas perkotaan, fasilitas pendidikan, fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, infrastruktur kawasan, pariwisata, kesehatan, lembaga permasyarakatan, serta infrastruktur perumahan rakyat.

Terdapat beberapa pertimbangan digunakannya skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur, yakni fokus pada pengadaan pada penyediaan layanan infrastruktur; pihak badan usaha/swasta dapat memberikan pembiayaan terhadap penyediaan infrastruktur terlebih dahulu, sehingga dapat mengatasi keterbatasan anggaran daerah; badan usaha memiliki ruang untuk melakukan inovasi, baik pada pembangunan infrastruktur maupun inovasi untuk mendorong efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan; adanya pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha; kontrak tunggal dengan badan usaha untuk seluruh kegiatan penyediaan infrastruktur; serta pemerintah memberikan dukungan pada tahap persiapan proyek. Sementara itu, setidaknya terdapat empat keuntungan dari skema KPBU, yakni (1) *transfer of knowledge;* (2) *project delivery*, (3) *risk sharing*, serta (4) potensi investasi.

Berdasarkan pernyataan yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa KPBU merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Magelang. KPBU dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.2.7
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2025-2030

No.	Uraian	Kapasitas riil kemampuan keuangan (Rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	2.741.635.308.944,19	2.752.096.617.365,31	2.817.231.021.847,91	2.899.814.590.478,75	2.999.815.784.493,55	3.116.483.844.177,48
2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	29.131.304.000,00	35.868.696.000,00	-
3	Sisa lebih riil perhitungan anggaran	100.691.098.012,81	40.074.054.273,00	40.301.149.627,00	40.767.664.680,00	41.825.555.523,00	44.696.550.670,00
	Total penerimaan	2.842.326.406.957,00	2.792.170.671.638,31	2.857.532.171.474,91	2.969.713.559.158,75	3.077.510.036.016,55	3.161.180.394.847,48
	Dikurangi:						
1	Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama (belanja pegawai)	1.192.250.043.020,00	1.242.804.019.023,43	1.199.347.472.072,61	1.201.804.005.507,76	1.206.920.831.102,31	1.202.858.410.083,89
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	**1.650.076.363.937,00**	**1.549.366.652.614,88**	**1.658.184.699.402,30**	**1.767.909.553.650,99**	**1.870.589.204.914,24**	**1.958.321.984.763,59**

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.3.1. Permasalahan

Mengutip pernyataan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang akan dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau adanya kesenjangan antara yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi serta akar masalahnya. Hal ini menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah.

2.3.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada aspek geografi dan demografi, terdapat sembilan permasalahan pokok terkait dengan geografi demografi di Kabupaten, yang diantaranya terkait dengan kualitas lingkungan hidup, ketahanan pangan daerah, pengelolaan dan penanganan limbah, persampahan, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, dan beberapa permasalahan lainnya terkait dengan aspek ini. Berikut penjabaran kesembilan permasalahan tersebut.

1. **Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup**, yang disebabkan oleh **(1) belum optimalnya pengendalian kuantitas dan pencemaran air** karena degradasi lingkungan hidup sebagai akibat dari adanya aktivitas pertambangan, penebangan liar, serta kebakaran hutan, juga karena masih terdapat polusi air sebagai akibat dari adanya aktivitas/kegiatan yang menghasilkan limbah industri, limbah rumah tangga, kegiatan pertambangan, pembuangan sampah, perubahan alam, dan penggunaan bahan kimia; **(2) belum optimalnya pengendalian pencemaran udara** karena terjadinya polusi udara dan laboratorium lingkungan milik DLH belum bisa mengukur emisi udara dari sumber pencemar; serta **(3) belum optimalnya pengendalian pencemaran tanah/tutupan lahan** karena masih terdapat polusi tanah yang bersumber dari limbah pertanian, kebakaran hutan, serta bencana alam hidrometeorologi.
2. **Belum optimalnya ketahanan pangan daerah**, yang disebabkan oleh **belum optimalnya kemandirian pangan daerah** karena belum optimalnya ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam; masih adanya masyarakat rentan pangan dan gizi; serta masih adanya susut pangan (*food loss*) dan limbah pangan (*food waste*).

3. **Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan limbah**, yang disebabkan oleh **belum optimalnya pengelolaan limbah non B3 dan limbah B3**, karena masih banyak limbah cair UKM industri yang belum tertangani; kurangnya pemahaman usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat mengenai limbah B3; terbatasnya pengelolaan limbah B3 yang mempunyai perijinan lengkap dari KLHK; belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3 khususnya limbah B3 yang dihasilkan oleh masyarakat; serta perubahan pola hidup dan pertumbuhan ekonomi meningkatkan timbulan sampah anorganik dan bahan berbahaya beracun (B3) yang makin besar.
4. **Belum optimalnya penanganan persampahan**, yang disebabkan oleh **(1) tingginya timbulan sampah di masyarakat** karena belum optimalnya jumlah sampah yang terkurangi melalui kegiatan *reduce, reuse, recycle* (3R); **(2) belum optimalnya cakupan area layanan pengelolaan sampah** karena layanan pengelolaan sampah cenderung masih diutamakan di wilayah perkotaan dan tempat wisata; **(3) kurang laiknya kondisi sarana dan prasarana persampahan** karena umur sarana dan prasarana pengolahan sampah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sehingga perlu peremajaan, seperti alat berat, kendaraan pengangkut, dan mesin-mesin pengolahan sampah; serta **(4) belum optimalnya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan TPA, TPST, SPA, TPS3R, dan TPS**, karena teknologi penanganan pengelolaan sampah yang tidak ideal sehingga mengakibatkan meningkatnya kapasitas sampah yang membusuk, serta bangunan dan fasilitas pengolahan sampah yang tidak memadai (luas yang tidak sesuai dengan volume sampah).
5. **Kurangnya ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan Kabupaten Magelang**, yang disebabkan oleh **menurunnya lahan terbuka hijau (hutan, sawah, dan sebagainya**) karena adanya pembukaan lahan untuk aktivitas industri, kawasan permukiman, dan lain-lain.
6. **Belum optimalnya ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan**, yang disebabkan oleh **masih adanya usaha dan/atau kegiatan yang belum mempunyai perizinan lingkungan** karena kurangnya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengurus perijinan lingkungan.
7. **Kurangnya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim**, yang disebabkan oleh (**1) belum optimalnya adaptasi akibat perubahan iklim** (sejak dini dipetakan adaptasi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dan

seluruh pemangku kepentingan); **(2) kurangnya konservasi keanekaragaman hayati**; **(3) kurangnya konservasi kearifan lokal dan inovasi terkait lingkungan hidup**; **(4) kurangnya penggunaan energi baru terbarukan**; **(5) kurangnya pendidikan dan pelatihan terkait lingkungan hidup**; serta **(6) kurangnya penggunaan transportasi umum berbahan bakar EBT**.

8. **Belum optimalnya upaya peningkatan mitigasi bencana**, yang disebabkan oleh **(1) belum sinerginya regulasi terkait penanggulangan bencana antara pemerintah pusat dan daerah** karena SOP penanggulangan bencana belum terstandar dengan baik; **(2) masalah kesiapsiagaan belum efektif** karena relatif banyaknya bencana; **(3) belum optimalnya pemenuhan kebutuhan peralatan PB dan peningkatan kapasitas petugas penanganan darurat bencana** karena belum semua pemerintah desa menganggarkan untuk penanggulangan bencana pada APBDes; **(4) kawasan tangkapan air hujan (*catchment area*) mengalami kerusakan/penurunan fungsi**; **(5) tingginya tingkat risiko bencana** karena tingginya tingkat kejadian/ancaman bencana, tingginya tingkat kerentanan bencana, serta rendahnya tingkat kapasitas bencana masyarakat/lembaga pemerintah; **(6) belum optimalnya penyelesaian perbaikan/pembangunan infrastruktur terdampak bencana** karena hunian tetap (lahan dan bangunan) warga terdampak Merapi belum bersertifikat, serta perbaikan/pembangunan infrastruktur terdampak bencana lebih dominan menggunakan pendekatan *civil engineering*; serta **(7) belum optimalnya penanganan bencana kebakaran** karena minimnya intervensi pemda dalam penanggulangan bencana kebakaran, belum optimalnya *response time* damkar, belum optimalnya pembentukan Wilayah Manajemen Kebakaran/WMK di mana baru terbentuk enam WMK dari 13 WMK yang direncanakan, akses jalan lingkungan yang sempit menyulitkan kendaraan damkar untuk cepat sampai ke lokasi kejadian, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran, serta kurangnya peningkatan kompetensi anggota damkar.

9. **Tingginya jumlah penduduk produktif berpeluang menambah angka pengangguran daerah**, yang disebabkan oleh belum optimalnya penciptaan lapangan kerja, serta belum optimalnya peningkatan kualitas tenaga kerja di mana kualitas dan kualifikasi sumber daya manusia tidak lagi seimbang.

2.3.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, setidaknya terdapat 12 rumusan masalah pokok di Kabupaten Magelang, yang diantaranya terkait dengan tingkat kemiskinan, pengangguran, kesehatan masyarakat, pendidikan, literasi masyarakat, pengelolaan budaya, pembinaan keagamaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, serta daya saing pemuda dan olahraga. Berikut merupakan rumusan masalah pokok pada aspek kesejahteraan masyarakat.

1. **Belum optimalnya pendapatan masyarakat**, yang disebabkan oleh **belum optimalnya akses pada sumber ekonomi** karena relatif meningkatnya tingkat pengangguran.
2. **Belum optimalnya akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar**, yang disebabkan oleh **(1) belum optimalnya akses masyarakat terhadap hunian berkualitas**, yakni sebagai akibat dari belum optimalnya dukungan terhadap pemenuhan rumah layak huni karena kurangnya keterjangkauan pembiayaan rumah, belum adanya kebijakan yang mengatur tentang penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh; belum optimalnya akses terhadap air bersih, belum optimalnya akses terhadap sanitasi layak, serta belum optimalnya akses terhadap sumber penerangan PLN; **(2) belum optimalnya akses pada layanan pendidikan** sebagai akibat dari masih lemahnya regulasi yang mengakomodir peserta didik miskin, belum optimalnya tata kelola pembiayaan penyelenggaraan pendidikan (baik yang bersumber dari CSR maupun dana partisipasi masyarakat), kondisi lingkungan pergaulan mempengaruhi motivasi dan minat belajar anak, masih terdapat orang tua yang belum memiliki kesadaran untuk pendidikan anak, masih terdapat anak usia sekolah yang terpaksa menjadi tulang punggung keluarga, kurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan anak untuk mengikuti pendidikan, masih terdapat penduduk usia tujuh hingga 12 tahun dengan motivasi belajar/sekolah yang rendah karena faktor budaya, kesadaran masyarakat yang buta huruf untuk mengikuti penyelenggaraan pemberantasan buta aksara masih rendah; serta **(3) belum optimalnya akses pada layanan kesehatan** karena belum semua fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) memiliki sarana prasarana dan pelayanan dasar lengkap, belum meratanya upaya

kesehatan masyarakat dan perorangan, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penerapan PHBS, dan belum optimalnya penerapan pola perilaku kesehatan keluarga serta pola asuh anak.

3. **Belum optimalnya strategi tata kelola dan kebijakan penanganan kemiskinan**, yang disebabkan oleh **belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat rentan** karena belum optimalnya akses terhadap jaminan dan perlindungan sosial.
4. **Relatif tingginya tingkat pengangguran**, yang disebabkan oleh **(1) belum optimalnya penyerapan tenaga kerja** karena belum optimalnya program *link and match*, *oversupply* tenaga kerja yang tidak terserap, laju pertumbuhan lapangan pekerjaan baru dinilai cukup lambat, dan terbatasnya informasi lowongan kerja; **(2) belum optimalnya produktivitas tenaga kerja** karena tingkat employabilitas (kemampuan untuk memperoleh pekerjaan, mempertahankan pekerjaan, serta meraih kesuksesan dalam kehidupan karier) lulusan yang lemah, serta attitude dan mental pencari kerja yang kurang siap; **(3) belum optimalnya fasilitasi oleh pemerintah daerah untuk menciptakan tenaga kerja yang berkompeten** karena belum optimalnya peran Balai Latihan Kerja, serta pendidikan vokasi yang dilaksanakan belum menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan siap kerja; **(4) belum optimalnya hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja** karena belum maksimalnya pemberian upah (pengupahan) dan perlindungan pada pekerja perempuan, belum semua perusahaan mempunyai peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, serta masih sedikitnya pengukuran produktivitas perusahaan dan tenaga kerja di perusahaan; **(5) belum optimalnya pelaksanaan program transmigrasi** sebagai dampak dari kurangnya daya tarik di daerah tujuan transmigrasi, juga karena kurangnya motivasi masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi.
5. **Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat**, yang disebabkan oleh **(1) belum optimalnya pelayanan kesehatan** sebagai dampak dari belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga medis dan tenaga kesehatan, belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin, serta masih banyak masyarakat yang belum menjadi peserta program jaminan kesehatan nasional; **(2) masih tingginya angka kesakitan** sebagai dampak akibat dari tingginya penyakit menular dan tidak menular, tingginya kasus kematian ibu dan anak, tingginya kasus

stunting baik pada anak maupun remaja, meningkatnya kasus bayi dengan komplikasi, munculnya penyakit re-emerging dan penyakit infeksi baru (PIB), masih rendahnya kunjungan pasien untuk melakukan pencegahan penyakit baik melalui vaksinasi/imunisasi maupun *medical check up* (MCU).

6. **Belum optimalnya layanan pendidikan serta kebudayaan yg berkelanjutan**, yang disebabkan oleh **(1) belum optimalnya penyediaan fasilitas pendidikan** sebagai dampak dari belum meratanya fasilitas pendidikan, juga karena kualitas prasarana pendidikan yang belum memadai; (**2) belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan** sebagai dampak dari belum optimalnya kuantitas sumber daya manusia kependidikan di mana pemerataan guru masih kurang karena adanya keterbatasan jumlah tenaga pendidik fungsional; juga karena belum optimalnya kualitas sumber daya manusia kependidikan karena belum optimalnya tenaga pendidik bersertifikasi dan belum optimalnya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi pendidikan tinggi; **(3) belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang tinggi** yang disebabkan oleh tingginya anak tidak sekolah karena keterbatasan ekonomi keluarga, masih terdapat budaya menikah usia muda, kurangnya motivasi dari diri anak sendiri, adanya anak usia sekolah yang melanjutkan sekolah ke pendidikan non formal, serta jauhnya akses menuju sekolah; serta **(4) ketebatasan anggaran daerah untuk biaya operasional sekolah (BOSDA)**; **(5) belum optimalnya pemajuan kebudayaan** sebagai dampak dari belum dipandangnya kebudayaan sebagai potensi pembangunan oleh pemerintah, berkurangnya pemakaian Bahasa Jawa di masyarakat, belum optimalnya regenerasi dalam pelestarian dan penerusan budaya, serta terjadinya perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern; **(6) belum optimalnya pengembangan seni dan perlindungan bangunan cagar budaya** sebagai dampak dari belum optimalnya sarana dan prasarana pengembangan seni dan budaya, masih minimnya layanan untuk kelompok kesenian dan kelompok tradisi, belum optimalnya pelestarian cagar budaya, serta banyaknya bangunan cagar budaya yang tidak diperbolehkan untuk diubah bentuknya oleh pemilik dan/atau yang menempati bangunan tersebut saat ini.
7. **Belum optimalnya literasi masyarakat**, yang disebabkan oleh **(1) kurangnya minat baca masyarakat** karena rendahnya kesadaran

masyarakat untuk membaca, dan belum adanya inovasi kegiatan dari perpustakaan untuk memantik semangat minat baca kembali; serta **(2) belum optimalnya layanan perpustakaan** karena ketersediaan fasilitas perpustakaan masih kurang dan belum memenuhi kebutuhan setiap kecamatan, fasilitas perpustakaan keliling belum beroperasi secara rutin karena adanya keterbatasan ketersediaan mobil keliling, koleksi bahan pustaka yang tidak *update*, adanya perpustakaan *online* (e-Pusda Kabupaten Magelang) yang belum dimanfaatkan secara maksimal, juga karena jumlah sumber daya manusis tenaga pustakawan kurang memadai.

8. **Belum optimalnya pembinaan keagamaan di masyarakat,** yang disebabkan oleh **belum optimalnya pemahaman dan pengamalan agama di masyarakat**, sebagai akibat dari belum optimalnya peran pemuka agama yang aktif dalam pembinaan keagamaan, belum optimalnya pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan fasilitas keagamaan.
9. **Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**, yang disebabkan oleh **(1) belum optimalnya implementasi kesetaraan dan pengarusutamaan gender** karena belum optimalnya keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan; serta **(2) belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak** karena terjadinya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum optimalnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga karena belum optimalnya pemenuhan hak anak.
10. **Belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarg**a yang disebabkan oleh belum optimalnya layanan program keluarga berencana, tingginya rasio ketergantungan karena terjadinya fase pergeseran struktur penduduk yang semula lebih banyak didominasi oleh penduduk muda bergeser menjadi lebih banyak penduduk usia tua (*ageing population*), belum optimalnya kualitas pembangunan keluarga karena relatif tingginya angka perceraian, masih tingginya kekerasan perempuan dan anak, maraknya pernikahan usia dini, serta adanya ancaman peningkatan penyakit menular seksual.
11. **Belum optimalnya daya saing pemuda dan olahraga**, yang disebabkan oleh **(1) belum optimalnya pembangunan karakter kepemudaan** sebagai dampak dari masih tingginya kasus kenakalan remaja dan kekerasan antar pemuda (tawuran dan klitih), serta belum optimalnya

fungsi kelembagaan pemuda; **(2) belum optimalnya prestasi olahraga** sebagai dampak dari belum optimalnya pengembangan olahraga karena belum optimalnya penyediaan infrastruktur olahraga, penerapan *sport science* olahraga di Kabupaten Magelang masih rendah, belum optimalnya upaya pembinaan terhadap atlet, penghargaan kepada insan olahraga yang berprestasi belum sesuai harapan, serta daya saing olahraga Kabupaten Magelang terhadap kabupaten/kota lainnya masih rendah.

2.3.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Pada aspek daya saing daerah, setidaknya terdapat 14 rumusan masalah pokok di Kabupaten Magelang, yakni terkait dengan kinerja sektor ekonomi, investasi, lembaga ekonomi daerah, kinerja layanan infrastruktur dan penataan ruang, perumahan rakyat dan keawan permukiman, serta beberapapermasalahan lainnya terkait aspek daya saing daerah. Berikut merupakan rumusan masalah pokok pada aspek daya saing daerah.

1. **Belum optimalnya kinerja sektor pertanian dalam arti luas**, disebabkan oleh **(1) belum optimalnya tingkat produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas** karena belum optimalnya dukungan terhadap subsistem hulu pertanian/budidaya pertanian dalam arti luas, masih tingginya angka kehilangan dan/atau penurunan produksi pertanian dalam luas, kurang optimalnya pengaturan pola tanam, belum optimalnya kinerja subsistem usaha tani; **(2) masih rendahnya daya saing produk olahan hasil pertanian dalam arti luas**, sebagai akibat dari belum optimalnya pengembangan pengolahan dan diversifikasi hasil pertanian, baik olahan tanaman pangan, peternakan, maupun perikanan; belum optimalnya pemasaran produk olahan hasil pertanian; masih rendahnya kesadaran pelaku usaha pengolahan hasil perikanan terhadap peningkatan mutu olahan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan yang aman dan sehat; serta belum optimalnya penyediaan pangan asal hewan (PAH), yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).
2. **Belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif**, yang disebabkan oleh **(1) lambatnya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan** karena belum optimalnya penawaran dan permintaan pariwisata sebagai dampak dari belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata, belum optimalnya diversifikasi objek dan daya tarik wisata, belum optimalnya penyediaan infrastruktur pendukung

kepariwisataan, belum optimalnya promosi potensi pariwisata daerah, belum optimalnya ketersediaan dan kopetensi sumber daya manusia bidang pariwisata; serta **(2) belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif** karena belum optimalnya pengelolaan produk ekonomi kreatif sebagai dampak dari belum optimalnya dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif, masih kurangnya inovasi untuk pengembangan produk ekonomi kreatif, juga belum optimalnya sinergitas antara pelaku ekonomi kreatif, investor, dan instansi terkait.

3. **Belum optimalnya pengembangan industri kecil dan menengah (IKM)**, yang disebabkan oleh **(1) terbatasnya akses IKM pada pasar dan sumber pembiayaan** karena masih adanya pelaku usaha yang belum memiliki Nomor izin Berusaha (NIB) sehingga tidak bisa mendapatkan KUR, dan belum adanya kolaborasi antara investor dengan pelaku usaha; **(2) sumberdaya manusia IKM belum sepenuhnya mampu mengikuti dinamika yang terjadi** karena pelaku usaha masih menggunakan cara yang konvensional untuk melakukan promosi, belum optimalnya pengelolaan manajemen bisnis, serta kualitas produk lokal kurang memiliki daya saing; serta **(3) adanya produk-produk impor yang lebih murah dan lebih berkualitas yang semakin menggerus pasar industri dalam negeri**.
4. **Belum optimalnya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)**, yang disebakan oleh **(1) belum optimalnya penyediaan bahan baku, baik untuk usaha makanan dan minuman, maupun kerajinan** sebagai dampak dari terjadinya kelangkaan bahan baku, dan harga bahan baku yang relatif tinggi; **(2) keterbatasan permodalan** karena masih adanya pelaku usaha yang belum memiliki NIB sehingga tidak bisa mendapatkan KUR dan belum adanya kolaborasi antara investor dengan pelaku UMKM; **(3) keterbatasan pemasaran produk** sebagai dampak dari UMKM Center yang ada saat ini belum dapat menjadi sarana promosi yang optimal, pusat penjualan cenderamata masih terpusat di tempat, lokasi pusat kuliner yang ada kurang reprentatif, pelaku usaha masih menggunakan cara yang konvensional untuk melakukan promosi, serta masih terdapat pelaku usaha yang mengandalkan pengepul; **(4) pelaku dan kualitas produk lokal kurang memiliki daya saing** karena adanya kekhawatiran tersendiri jika ada investor masuk, rendahnya inovasi produk, serta rendahnya literasi digital pelaku usaha dan kurangnya penerapan teknologi; **(5) belum optimalnya kualitas SDM pelaku usaha**

sebagai dampak dari belum optimalnya pengelolaan manajemen usaha, rendahnya tingkat pendidikan, belum optimalnya penerapan hasil pelatihan, serta ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi usaha mikro sangat terbatas; **(6) terjadinya persaingan tidak sehat antar pelaku usaha produk sejenis** yang disebabkan oleh adanya alternatif harga yang lebih rendah dari produk yang sejenis (terjadinya perang harga), ada persaingan dengan produk sejenis dari perusahaan besar dan produk impor; serta **(7) pembinaan dan pendampingan usaha mikro kurang optimal**, karena jumlah tenaga pendamping dinas tidak sesuai dengan jumlah usaha mikro di Kabupaten Magelang, serta data pelaku usaha tidak terekam dengan baik dan benar.

5. **Belum optimalnya pengembangan sektor perdagangan**, yang disebabkan oleh **(1) belum optimalnya peningkatan kinerja ekspor daerah** sebagai dampak dari belum optimalnya dorongan kepada pelaku usaha (UMKM) untuk melakukan kegiatan ekspor, adanya produk ekspor yang tidak tercatat, belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekspor, serta melemahnya perekonomian daerah; **(2) belum optimalnya kegiatan perdagangan** sebagai akibat dari rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan (khususnya pasar), masih banyak pelaku perdagangan yang belum memiliki izin, maraknya pendirian toko modern dan semakin banyaknya fasilitas *e-commerce* sehingga masyarakat lebih memilih berbelanja di swalayanan dan toko *online*; **(3) belum stabilnya harga barang pokok yang beredar** karena belum optimalnya pemerataan distribusi barang, adanya produk yang diproduksi dengan kuantitas besar dan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, adanya kelangkaan stok barang pokok dan barang penting, khususnya produk pertanian; **(4) masih adanya produk yang beredar di pasaran yang belum memenuhi persyaratan yang berlaku** karena belum optimalnya pengawasan terhadap keamanan barang beredar, kurangnya pemahaman masyarakat akan barang yang beredar di masyarakat; **serta (5) belum optimalnya pelaksanaan kegiatan kemetrologian legal** sebagai dampak dari kurangnya SDM pelaksana kegiatan metrologi legal, kurangnya sarana prasarana pendukung kegiatan metrologi legal, belum konsistennya regulasi terkait metrologi legal sebagai *mandatory*, juga masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan tera/tera ulang UTTP.

6. **Belum optimalnya investasi di daerah**, yang disebabkan oleh **belum optimalnya realisasi nilai investasi** yang juga ditandai dengan menurunnya pertumbuhan investasi dalam tiga tahun terakhir, karena kurang optimalnya iklim investasi di daerah, belum seluruh nilai investasi dapat terdeteksi, fluktuatifnya nilai investasi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi perekonomian global dan situasi politik, belum optimalnya insentif investasi, belum optimalnya promosi investasi, dan belum optimalnya layanan perizinan.
7. **Belum optimalnya peran koperasi** yang disebabkan oleh **relatif rendahnya koperasi aktif**, karena kurangnya kemampuan untuk mengelola koperasi; terbatasnya akses permodalan; serta rendahnya minat/kesadaran masyarakat untuk berkoperasi.
8. **Belum optimalnya lembaga ekonomi desa** yang disebabkan oleh **(1) belum optimalnya pengelolaan BUMDes** karena belum dikelola oleh orang-orang yang profesional, anggaran yang digunakan untuk BUMDes sangat kecil, dan kurangnya sinergi antara pemerintah desa dengan pengelola BUMDes, serta **(2) belum adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat**.
9. **Belum optimalnya layanan infrastruktur wilayah**, yang disebabkan oleh **(1) belum mantapnya kondisi jalan kabupaten** karena masih terdapatnya jalan kabupaten dalam kondisi rusak hingga rusak berat, belum optimalnya kinerja jalan kabupaten, **(2) belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum layak dan aman** karena terjadinya alih fungsi lahan yang mengakibatkan hilangnya/penurunan debit mata air, peraturan yang menaungi SPAM masih kurang terutama dalam hal pengelolaan, pola penggunaan air bersih yang belum teratur dan tertib; kesadaran pengelolaan air berbasis lingkungan masih rendah, keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mengelola air bersih, serta keterbatasan pendanaan untuk mencukupi layanan air minum layak dan aman; **(3) belum optimalnya layanan sanitasi aman** karena belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, serta belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik; **(4) belum optimalnya jaringan irigasi** karena adanya krisis air untuk pemenuhan irigasi pertanian yang disebabkan oleh terbatasnya air baku untuk irigasi karena adanya konflik kebutuhan dengan peruntukan air minum dan air bersih untuk pemenuhan rumah tangga, serta banyak air irigasi yang mengalami

kebocoran; **(5) belum optimalnya penataan bangunan gedung** karena belum adanya master plan bangunan gedung pemerintah yang dapat dijadikan acuan dalam pembangunan/rehabilitasi bangunan gedung pemerintah; dalam pembangunan bangunan gedung, sebagian masyarakat masih mengabaikan aturan yang berlaku; perhatian pemerintah terhadap bangunan cagar budaya masih belum optimal; serta belum adanya pendataan seluruh bangunan di Kabupaten Magelang, baik yang sudah berizin maupun yang belum berizin; **(6) belum optimalnya penyelenggaraan jasa konstruksi** karena belum semua penyedia jasa konstruksi tertib dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, tertib usaha, tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi, dan tertib kinerja.

10. **Belum optimalnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak**, yang disebabkan oleh (1) masih tingginya rumah yang tidak layak huni karena keterbatasan akses terhadap pemenuhan rumah layak huni, belum optimalnya penyediaan rumah layak huni oleh pemerintah; (2) masih adanya kawasan permukiman kumuh karena kepadatan bangunan yang tinggi dan tidak tertata; serta (3) belum optimalnya pengelolaan PSU perumahan dan kawasan permukiman secara lengkap karena sebagian besar PSU perumahan belum menjadi aset pemerintah daerah, masih dalam proses serah terima dari pengembang ke pemerintah daerah, juga disebabkan oleh tempat pemakaman umum milik pemerintah daerah luasnya masih terbatas dan jangkauan masih terbatas di wilayah beberapa kecamatan.
11. **Belum optimalnya layanan perhubungan darat**, yang disebabkan oleh **(1) belum optimalnya layanan lalu lintas dan angkutan jalan** karena belum optimalnya kualitas layanan angkutan umum, berkurangnya jumlah angkutan umum, peningkatan kepadatan lalu lintas, meningkatnya jumlah layanan transportasi *online*; **(2) menurunnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan** karena jumlah kecelakaan kendaraan bermotor fluktuatif setiap tahun, serta rendahnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor wajib uji kendaraan bermotor secara berkala; **(3) belum optimalnya ketersediaan perlengkapan jalan** karena belum lengkapnya ketersediaan rambu lalu lintas, marka, penerangan jalan, APILL, dan lain-lain.
12. **Belum optimalnya layanan komunikasi dan informatika**, yang disebabkan oleh **(1) belum meratanya jaringan telekomunikasi** karena masih terdapat wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan

telekomunikasi (*blank spot*); serta **(2) belum optimalnya penyebaran informasi melalui laman/situs *website* dan media sosial pemerintah daerah** karena kurangnya promosi publikasi.

13. **Belum optimalnya penataan ruang wilayah**, yang disebabkan oleh **(1) belum optimalnya perencanaan tata ruang** karena penyusunan regulasi terkait tata ruang membutuhkan waktu dan proses yang panjang di mana beberapa wilayah strategis di Kabupaten Magelang belum semuanya memiliki RTBL, juga belum tersusunnya peraturan tentang RDTR, serta insentif dan disinsentif; **(2) belum optimalnya pemanfaatan ruang** karena tumpang tindih pemanfaatan ruang, dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya; serta **(3) belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang** karena belum optimalnya ketaatan terhadap rencana tata ruang sebagai akibat dari masih terjadinya pelanggaran terhadap rencana tata ruang.
14. **Belum optimalnya administrasi kepemilikan tanah**, yang disebabkan oleh **(1) masih rendahnya jumlah bidang tanah yang terlegalisasi** karena belum optimalnya sosialisasi terkait tata cara dan regulasi terkait legalisasi pertanahan, juga karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah; serta **(2) keterbatasan lahan yang memenuhi standar teknis permukiman**.
15. **Belum optimalnya daya saing daerah**, yang disebabkan karena belum optimalnya budaya inovasi; masih terbatasnya kesadaran akan branding dan hak kekayaan intelektual, di mana branding tidak hanya yang melekat secara individu, namun juga branding komunal dan branding yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Magelang; juga belum optimalnya pelaksanaan sinergi *pentahelix* yang melibatkan lima aktor, yaitu akademisi, bisnis, masyarakat, pemerintah, dan media.

2.3.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum, terdapat empat rumusan masalah pokok di Kabupaten Magelang, yakni terkait dengan tata kelola pemerintahan, yang meliputi pelaksanaan pelayanan publik, manajemen pembangunan di daerah, pemberdayaan dan kelembagaan pemerintahan desa, serta kondisi wilayah. Berikut merupakan faktor penyebab permasalahan pokok tersebut pada aspek pelayanan umum.

1. **Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik**, yang disebabkan oleh (1) **Belum optimalnya pengelolaan administrasi kependudukan**

dan pencatatan sipil, karena belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan; belum optimalnya pemutakhiran data penduduk dan sinkronisasi lintas sektor; serta kebijakan/aplikasi administrasi kependudukan yang belum optimal; (2) **Belum optimalnya pengelolaan data secara terpadu dan terintegrasi**, yang disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan data statistik daerah; serta belum optimalnya pengelolaan persandian dan keamanan informasi; (3) **Belum optimalnya layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik**, yang disebabkan karena belum optimalnya jangkauan jaringan intra pemerintah daerah; belum optimalnya pengelolaan data center; belum optimalnya pengelolaan domain-subdomain; belum optimalnya penatalaksanaan dan pengawasan *e-Government* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah; serta belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan ekosistem *smart city*; (4) **Belum optimalnya pengelolaan kearsipan secara baku**, yang disebabkan karena rendahnya komitmen pemerintah dalam pengeolaan arsip; pengelolaan arsip terkesan berjalan lambat; serta pengelolaan arsip masih berfokus pada tatanan arsip fisik; (5) **Belum optimalnya fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah**, yang disebabkan oleh belum optimalnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; belum optimalnya kualitas kebijakan ekonomi dan pembangunan; serta belum optimalnya kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah; (6) **Belum optimalnya dukungan terhadap tugas dan fungsi perwakilan rakyat**, yang disebabkan karena belum optimalnya kinerja sekretariat dewan.

2. **Belum optimalnya kualitas manajemen pembangunan di daerah**, yang disebabkan oleh (1) **Belum optimalnya kinerja perencanaan daerah**, sebagai akibat dari belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dan implementasi; belum optimalnya koordinasi lintas sektor; serta belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan; (2) **Belum optimalnya pelaksanaan riset dan inovasi daerah**, yang disebabkan karena kurang tersedianya dokumen perencanaan teknis/sektoral/urusan; belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan; masih terbatasnya kerjasama kelitbangan; serta belum optimalnya penerapan inovasi daerah; (3) **Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah**, yang disebabkan karena ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi;

kurang optimalnya pengelolaan aset daerah (kurang optimalnya perencanaan, penatausahaan, pengamanan dan pemanfaatan aset daerah); diperlukan kecermatan dan koordinasi secara insentif antar OPD terkait dalam pengelolaan keuangan sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam APBD; regulasi pusat atas suatu kebijakan yang menjadi pedoman daerah dalam mengelola keuangan daerah tidak segera ditetapkan, serta adanya kebijakan dari pusat yang selalu berubah-ubah namun tidak disertai dengan pengaturan yang jelas; (4) **Belum optimalnya pengelolaan pegawai ASN dan non ASN di pemerintah daerah**, yang disebabkan karena belum optimalnya komitmen atas implementasi manajemen ASN; keterbatasan sarana dan prasarana pendukung digitalisasi manajemen ASN (sarpras fisik, SDM, maupun pendanaan); serta belum optimalnya pengembangan pegawai ASN dan non ASN karena pada beberapa diklat teknis, fungsional, kepemimpinan dan sertifikasi Jabatan Fungsional belum dapat terfasilitasi dengan maksimal.

3. **Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pemerintahan desa**, yang disebabkan oleh belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa; belum optimalnya kinerja aparatur pemerintahan desa; belum optimalnya pengelolaan potensi desa; sinergitas antar desa belum terbentuk; serta belum optimalnya pemberdayaan masyarakat.
4. **Kurang terciptanya kondisi wilayah yang aman, nyaman, tenteram, dan tertib**, yang disebabkan oleh **belum optimalnya kondusifitas sosial politik di masyarakat** karena masih adanya kejadian kriminalitas; masih rentannya terjadi konflik sosial di masyarakat yang ditunggangi oleh kepentingan politik, isu-isu agama, maupun sentimen antar kelompok masyarakat; serta belum optimalnya pelaksanaan penegakan Perda.

2.3.2.ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah ataupun panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dalam perumusannya isu strategis daerah dianalisis berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah. Informasi ini

tergambar pada subbab sebelumnya tentang kondisi daerah dan keuangan daerah, yang dikerucutkan menjadi permasalahan pembangunan daerah pada butir 2.6.1. dari Bab II tentang permasalahan pembangunan daerah.

Isu strategis daerah dirumuskan berdasarkan pada permasalahan pembangunan yang perumusannya mempertimbangkan permasalahan masing-masing perangkat daerah, termasuk di dalamnya telaah tentang norma dan standar, juga proses dan prosedur yang harus diikuti, serta kriteria (terutama mengacu dalam lampiran Permendagri 86 tahun 2017), serta memperhatikan dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dan isu strategis satuan kerja perangkat daerah. Dengan demikian analisis dan perumusan isu strategis juga sudah memperhatikan Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ada dan berlaku.

Hasil rumusan isu strategis daerah diupayakan dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Isu strategis daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah mulai dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebiijakan berikut program-program pembangunannya.

2.3.2.1. Telaah Dokumen Perencanaan

A. Global Megatren

Megatrend dapat diartikan sebagai transformasi global dalam periode jangka panjang yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Berdasarkan dokumen Visi Indonesia 2045, megatren meliputi sepuluh komponen, yaitu:

1. Demografi global

   Penduduk dunia pada tahun 2045 diprediksi mencapai 9,45 miliar jiwa dan penduduk asia masih menjadi yang terbesar (55 persen). Adanya tren demografi global akan mendorong peningkatan urbanisasi, arus imigrasi, dan penduduk usia lanjut. Jika dikaitkan dengan persebaran usia penduduk maka pada negara maju terjadi persaingan antara populasi penduduk usia produktif dan penduduk lanjut usia yang menjadi hambatan dalam hal pendapatan pajak. Adapun pada negara berkembang, proporsi penduduk usia produktif diprediksi akan lebih dominan sehingga memunculkan tuntutan dalam hal pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan sumber daya. Hal ini agar peluang tingginya jumlah penduduk usia dapat dimanfaatkan dengan baik

sehingga tidak menimbulkan peningkatan pengangguran yang menjadi beban pada aspek kependudukan.

2. Urbanisasi Dunia

   Peningkatan sebesar 65 persen penduduk dunia diperkirakan terjadi di perkotaan dengan 95 persen pertambahan terdapat di *emerging economies*. Pembangunan perkotaan akan berperan dalam meningkatkan daya saing, kualitas hidup masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi implikasibahwa perlu adanya perencanaan perkotaan yang efektif dan berkelanjutan sehingga kawasan perkotaan menjadi layak huni dalam jangka waktu lama untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penduduk perkotaan yang meningkat.

3. Peranan *Emerging Economies*

   Output negara berkembang tahun 2050 diperkirakan mencapai 71 persen dari total output dunia dengan Asia sebagai pendorong utama (54 persen). Adanya investasi Sumber Daya Manusia dan infrastruktur serta reformasi structural dan iklim usaha mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berdaya saing, dan berkesinambungan.

4. Perdagangan Internasional

   Perdagangan global diperkirakan tumbuh 3,4 persen per tahun hingga tahun 2045. Poros perdagangan dan investasi dunia terletak di negara berkembang dengan pertumbuhan 6 persen per tahun. Diprediksikan perdagangan intra Asia akan meningkat dan investasi asing langsung ke dan antar negara berkembang berlanjut.

5. Keuangan Internasional

   Terjadinya pergeseran dominasi mata uang dunia dari dolar AS menjadi multi *currencies*. Diperikarakan pada tahun 2050, aset keuangan *emerging economies* akan melebihi negara maju. Negara Cina menjadi salah satu sumber keuangan bagi Pembangunan mendatang.

6. Kelas Menengah

   Jumlah *middle* dan *upper income class* pada tahun 2050 diprediksi mencapai lebih dari 84 persen atau sekitar 8,1 miliar orang dengan Asia dan Amerika Latin sebagai negara dengan jumlah *middle* dan *upper income class* terbesar.

7. Persaingan Sumber Daya Alam

   Persaingan memperebutkan sumber daya alam akan meningkat seiring dengan peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika. Akan tetapi, diperkirakan ketersediaan sumber daya alam tidak dapat

memenuhi kebutuhan permintaan yang semakin bertambah meskipun dengan adanya teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya yang diiringi dengan peningkatan kebutuhan akan berdapak pada peningkatan harga komoditas sumber daya. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi untuk mengurangi penggunaan sumber daya, meningkatkan *reuse, recycle*, dan mencari alternatif sumber daya pengganti.

8. Teknologi

   Tren perubahan teknologi ke depan akan didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi dan rekayasa genetik, Kesehatan dan pengobatan, energi terbarukan, *wearable devices*, otomatisasi dan robotik serta *artificial intelligence*. *Rockefeller Foundation and Global Business Network* (RF and GBN, 2010) menjelaskan bahwa tantangan utama bukan hanya tentang pengembangan teknologi, melainkan juga berkaitan dengan penyediaan akses teknologi yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia seperti pada urusan pendidikan, kesehatan, energi, dan pengaturan terhadap teknologi yang berpotensi mengancam kemanan negara seperti terorisme global atau perdagangan ilegal.

9. Perubahan Iklim

   Seiring waktu, tantangan pemanasan global semakin meningkat, baik berupa kejadian ekstrim maupun perubahan iklim jangka Panjang. Perubahan iklim berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Jika tidak ada upaya untuk menurunkan emisi, maka rata-rata suhu global diprediksi meningkat 3–3,5 derajat celsius pada akhir abad ini. Pemanasan global berpotensi memicu bahaya perubahan iklim yang cepat dan parah, mengganggu *supply chains,* hingga menenggelamkan beberapa kota besar di seluruh dunia. Selain itu, keanekaragaman hayati akan terus berkurang dan mengancam kestabilan pasokan pangan dan sumber daya air. Upaya mengatasi perubahan iklim harus dilakukan oleh seluruh pihak, khususnya merubah gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan, dapat melakukan beberapa upaya, khususnya terhadap sektor industri yang menyumbang emisi besar seperti melalui penyusunan regulasi terkait perubahan iklim serta pemberian insentif dan disinsentif.

10. Perubahan Geopolitik

    Perubahan geopolitik akan terus berlanjut di masa mendatang seiring dengan meningkatnya peranan Cina, kerentanan di Kawasan Timur Tengah serta meningkatnya kelas baru dan kelompok penentu.

B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

Terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan diwujudkan melalui delapan misi pembangunan yang terdiri dari tiga misi transformasi, dua landasan transformasi, dan tiga kerangka implementasi transformasi. Delapan misi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial
2. Mewujudkan transformasi ekonomi
3. Mewujudkan transformasi tata kelola
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Kesinambungan Pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia emas.

Arah pembangunan yang ditetapkan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan, sebagai berikut:

1. Kesehatan untuk semua
2. Pendidikan berkualitas yang merata
3. Perlindungan sosial yang adaptif
4. IPTEK, inovasi, dan produktivitas ekonomi
5. Penerapan ekonomi hijau
6. Transformasi digital
7. Integrasi ekonomi domestik dan global
8. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
9. Regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif
10. Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial
11. Stabilitas ekonomi makro

12. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan
13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
15. Lingkungan hidup berkualitas
16. Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan
17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

C. Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Isu strategis kewilayahan pada wilayah Pulau Jawa-Bali sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 antara lain masih tingginya kesenjangan pembangunan antar wilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara utara dan selatan, barat dan timur (Bali), serta daerah kepulauan; masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti banjir rob di daerah pesisir utara Pulau Jawa, gempa bumi, dan tsunami di daerah pesisir selatan Pulau Jawa; degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan polusi udara akibat aktivitas industri; belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian; belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya *mismatch* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri; serta belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta *scarring effect* akibat pandemi Covid-19.

Selanjutnya, risiko global jangka menengah sebagaimana yang dikutip dari dokumen yang sama antara lain risiko kegagalan *climate action*, cuaca ekstrem seiring perubahan iklim, deglobalisasi, krisis lapangan pekerjaan, krisis utang, konfrontasi geoekonomi, risiko kegagalan *cybersecurity*, *biodiversity loss*, serta *asset bubble burst*. Selain itu, isu jangka menengah yang dirumuskan antara lain dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi Indonesia, oleh karena itu hilirisasi perlu dilanjutkan untuk nilai tambah yang lebih besar; sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral, di mana sinkronisasi kebijakan ini perlu didorong dengan memperhatikan kepentingan nasional; penerapan standar *sustainability* yang tinggi di level global, di mana produk Indonesia harus berorientasi ramah lingkungan agar tetap dapat bersaing di pasar global; tantangan transisi energi, namun ada peluang untuk pemerataan, di mana diperlukan *national grid* yang mampu mendistribusikan pasokan listrik ke luar pulau, serta perlunya pembangunan PLT EBT di luar Pulau Jawa untuk mendorong pemerataan; serta

aging population negara maju, di mana usia produktif negara maju mulai menunjukkan penurunan, serta adanya potensi bagi Indonesia untuk mendorong penyediaan pariwisata kesehatan untuk lansia.

Selanjutnya sesuai dengan aturan perundangan, RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden. Visi Presiden periode 2O25-2029 yaitu 'Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045', yang dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru,
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan dibcrbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau *Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam

menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Adapun ke-17 program prioritas Presiden tersebut adalah:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5. Pemberantasan kemiskinan.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
7. Menjamin tersedianya pelayanan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. Penguatan Pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersaitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKN serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya.
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan SDA, termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Sementara itu, delapan PHTC Presiden meliputi:

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit legkap berkualitas di kabupaten.

3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23 persen.

Pemerintah juga telah menetapkan target indikator kinerja makro pembangunan Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.3.1
Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Indikator	Satuan	Target	
		2025	2029
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,7 (Rata-rata 2025-2029)	7,7
PDRB per Kapita	Rp Juta	51,1	71,8
Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	8,2	7,9
Tingkat Kemiskinan	Persen	9,00 – 9,66	5,21 – 6,21
Indeks Gini	Angka	0,362 – 0,367	0,355 – 0,360
Indeks Modal Manusia	Angka	0,62	0,65
Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	0,32	27,57
IKLH Daerah	Angka	75,68	75,87
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,42 – 4,81	3,73 – 4,49

Sumber: Lampiran IV RPJMN Tahun 2025-2029

Selanjutnya, Kabupaten Magelang diarahkan sebagai Kawasan Pertumbuhan, yakni Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Borobudur-Dataran Tinggi Dieng, serta Kawasan Konservasi/Rawan Bencana yakni Taman Nasional Merbabu-Merapi. Sementara itu, *highlight* arah kebijakan untuk Kabupaten Magelang sesuai dengan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif Borobudur-Dataran Tinggi Dieng dan kawasan konservasi Taman Nasional Merbabu-Merapi adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3.2
***Highlight* Indikasi Intervensi Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah**

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Borobudur-Dataran Tinggi Dieng (bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan)	— Peningkatan 6A Pariwisata Candi Borobudur sebagai *The World's Largest Buddhist Pilgrimage Destination* — *Urban Renewal* Kota Wisata Magelang, Wonosobo, dan Temanggung — Pembangunan Jalan Tol Bawen-Magelang-Yogyakarta — Preservasi jalan ruas Borobudur-Wonosobo-Banjarnegara-Purbalingga-Purwokerto — Preservasi jalan ruas Wonosobo-Parakan-Temanggung-Secang
Kawasan Konservasi Taman Nasional Merbabu-Merapi	— Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi — Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi — Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik — Pengembangan produk bioekonomi hutan menjadi agroforestri — Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan — Perlindungan dan pengamanan hutan — Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi — Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana — Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana
Kabupaten Magelang	— Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHCT)

Provinsi Jawa Tengah	— Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
	— Percepatan wajib belajar 13 tahun (satu tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain:
	  — Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
	  — Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas
	  — Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran
	  — Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah
	  — Revitalisasi pendidikan nonformal
	  — Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas
	— Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui:
	  — Penurunan kematian ibu dan anak
	  — Pencegahan dan penurunan stunting
	  — Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro
	  — Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
	— Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui:
	  — Penuntasan TBC
	  — Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa
	  — Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM
	— Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui:
	  — Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan
	  — Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan
	— Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, antara lain melalui:
	  — Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia
	  — Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan
	— Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, antara lain melalui:
	  — Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan
	  — Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
	— Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui:
	  — Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan
	  — Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	— Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik — Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real time* — Perluasan penggunaan kendaraan listrik — Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: — Perluasan infrastruktur digital — Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital — Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok — Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: — Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital — Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN — Digitalisasi layanan publik prioritas — Pengembangan ekosistem layanan publik digital — Memperkuat reformasi hukum, terutama di Jawa Tengah, antara lain melalui: — Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) — Penanggulangan judi dan penyelundupan — Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) — Pendalaman sektor keuangan, antara lain melalui: — Penguatan peran perbankan — Penguatan peran sektor keuangan nonbank — Peningkatan inklusi dan literasi keuangan — Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Jawa Tengah, antara lain melalui: — Perlindungan dan pelestarian warisan budaya — Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan — Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat

Sumber: Lampiran IV RPJMN Tahun 2025-2029

D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Berdasarkan dokumen Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, dirumuskan delapan isu strategis Jawa Tengah lima tahun kedepan, yakni meliputi perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan; penurunan tingkat kemiskinan; ketahanan pangan yang berkelanjutan; penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana; kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia; kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat; serta tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Selanjutnya, Rencana pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 atau RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pengejawantahan dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2025-2030. Penjabaran visi dan misi daerah mendasarkan pada filosofi cita-cita Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk “NGOPENI. NGLAKONI. Jateng”, yang dengan filosofis tersebut, maka ditetapkan visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah: “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”.

Adapun pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui enam misi pembangunan daerah, yakni:

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Selanjutnya, Implementasi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dilaksanakan dengan tiga fokus kerja yaitu:

JATENG SIGAP!

Merupakan upaya Pemerintah dalam menghadrikan Pemerintahan yang Responsif dalam menjawab kebutuhan Masyarakat Jawa Tengah. Melalui Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang dapat diwujudkan dengan Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat.

JATENG MAKMUR!

Merupakan langkah Pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah melalui Transformasi Ekonomi yang tidak hanya berfokus pada Perekonomian Perkotaan juga Pedesaan, Perencanaan Tata Ruang yang responsif, dengan mengoptimalkan Pemerintahan Partisipatif, Kolaboratif dan Integratif serta dukungan Iklim Investasi.

JATENG NYAMAN!

Menjadi komitmen Pemerintah dalam menghadirkan Transformasi Sosial yang tercermin melalui terwujudnya Stabilitas, Kondusivitas, serta Kenyamanan dalam berkehidupan melalui peningkatan kualitas layanan dasar yang inklusif, pengembangan budaya lokal, aman dan nyaman dalam beribadah serta

perlindungan terhadap HAM untuk Kualitas SDM Jawa Tengah yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global.

Dalam rangka menetapkan prioritas dan fokus pelaksanaan strategi dan kebijakan setiap tahunnya dalam lima tahun, ditetapkan penahapan kebijakan pembangunan. Penahapan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Fokus kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah pada tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut.

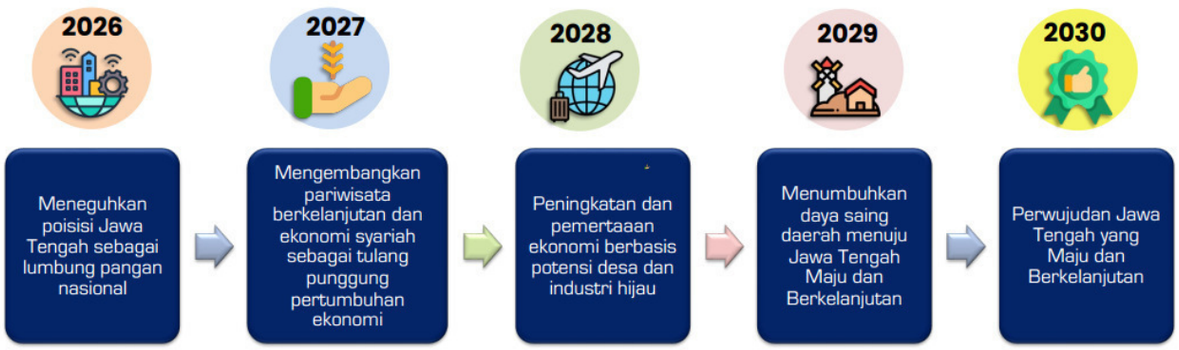

Gambar 2.3.1
Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2029
Sumber: Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Secara lebih detail, arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 fokus diarahkan pada kebijakan "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional", yang dilakukan dengan upaya (1) peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan; (2) penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan; (3) pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; (4) penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal; (5) pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan; (6) penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan; (7) peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF); (8) pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*).

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 fokus diarahkan pada kebijakan "Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi", yang dilakukan dengan

upaya (1) pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan; (2) penguatan promosi pariwisata berbasis digital; (3) peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan sarana prasarana destinasi wisata; (4) penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital; (5) peningkatan infrastruktur konektivitas antardestinasi wisata, (6) penguatan integrasi antardestinasi wisata; (7) penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata; (8) penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata; (9) *city beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan; (10) pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary services*, aktivitas, *available packages*) pada kawasan megapolitan/metropolitan (*urban tourism*), serta kawasan strategis pariwisata danekonomi kreatif Magelang-Yogyakarta-Surakarta; (11) penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan *halal value chain*, penguatan keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan penguatan ekonomi digital.

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2028 fokus diarahkan pada kebijakan “Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau”, yang dilakukan dengan upaya (1) peningkatan dan percepatan kinerja produksi dan produktivitas sektor-sektor unggulan Jawa Tengah yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa, koperasi dan UMKM, pertanian dalam arti luas secara merata; (2) peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan; (3) penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru; (4) penerapan sirkular ekonomi dan dekarbonisasi industri melalui penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan; (5) penerapan standar industri hijau dan produk ramah lingkungan; (6) peningkatan produktivitas perekonomian berbasis potensi unggulan lokal desa dengan upaya diversifikasi produk berbasis riset dan inovasi dan ekonomi kreatif; (7) penguatan peran BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa; (8) peningkatan kerja sama desa dengan pihak ketiga dan kerja sama antardesa.

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2029 fokus diarahkan pada kebijakan “Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan

Berkelanjutan", yang dilakukan dengan upaya (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter melalui peningkatan akses layanan pendidikan berkualitas, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kebugaran dan daya saing olahraga, peningkatan budaya literasi masyarakat, peningkatan daya saing pemuda; (2) peningkatan pemerataan layanan dan perlindungan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial; (3) peningkatan pembangunan berbasis gender dan ketahanan keluarga; (4) peningkatan kualitas, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja; (5) pemantapan birokrasi yang berintegritas dan dinamis; (6) peningkatan kondusivitas wilayah dan demokrasi substansial.

Terakhir, arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2030 diarahkan pada tema "Perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan", yang diarahkan untuk fokus pada perwujudan kinerja pembangunan daerah dengan prioritas daerah meliputi (1) perwujudan tata kelola pemerintahan berintegritas dan dinamis; (2) perwujudan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan; (3) perwujudan pembentukan sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter.

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah, maka pada lima tahun mendatang, arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada kebijakan berikut.

Tabel 2.3.3
Arah Kebijakan Tahunan Dalam Rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026-2030

Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Daerah Tahunan				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
PENGUATAN LANDASAN PEMBANGUNAN DAERAH (Penguatan landasan tata kelola pemerintahan berintegritas dan dinamis; penguatan landasan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan; penguatan landasan pembentukan sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter)	**PENINGKATAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH** (Peningkatan tata kelola pemerintahan berintegritas dan dinamis; peningkatan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan; peningkatan sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter)	**AKSELERASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH** (Akselerasi tata kelola pemerintahan berintegritas dan dinamis; akselerasi perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan; akselerasi pembentukan sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter)	**PEMANTAPAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH** (Pemantapan tata kelola pemerintahan berintegritas dan dinamis; pemantapan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan; pemantapan pembentukan sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter)	**PERWUJUDAN JAWA TENGAH YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN** (Perwujudan tata kelola pemerintahan berintegritas dan dinamis; perwujudan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan; perwujudan pembentukan sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter)

Sumber: Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Selanjutnya, dalam dokumen Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 juga dijabarkan terkait 35 program delegasi kepada pemerintah kabupaten/kota, yakni meliputi:

1. Pembentukan kecamatan berdaya (pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan *sport center*).
2. Pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan pusat rekreasi dan promosi pembangunan, dan gelanggang olah raga internasional.
3. Pelatihan dan pendidikan anti korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah desa bekerjasama dengan aparat penegak hukum, Ombudsman, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK, dan KPK.
4. Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa.
5. Pemberdayaan masyarakat pesisir tambak ikan nila.
6. Mendorong pengembangan SMA/SMK unggulan di setiap kecamatan bekerjasama dengan pihak sekolah swasta.
7. Mendorong pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di setiap kecamatan.
8. Membangun 1.000 desa/kampung wisata baru.
9. BUMDES Berdaya (kepastian hukum dan bantuan modal usaha setiap Bumdes di Jawa Tengah).
10. Penguatan BPBD dan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat.
11. Cek kesehatan gratis.
12. Mendorong penyediaan 1 dokter, 1 bidan setiap Puskesmas Pembantu.
13. Melahirkan pemerintahan yang *good clear government* dan *collaborative governance* melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan perangkat desa.
14. Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak.
15. Mengembangkan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru.
16. Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin.
17. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim.
18. Pendampingan sertifikasi halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara gratis.

19. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan.
20. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan *go internasional*, Sistem Informasi Desa (SID), dan tim tanggap bencana.
21. Peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya.
22. Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan.
23. Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata.
24. Subsidi modal dan pendampingan UMKM (1 RT 1 kelompok UMKM).
25. Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang ekonomi hijau.
26. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa.
27. Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan.
28. Mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan.
29. Peningkatan operasional kader Posyandu.
30. Peningkatan kualitas hidup lansia.
31. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja.
32. Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa.
33. Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga.
34. Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan.
35. Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana.

E. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045

Berdasarkan dokumen RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045, terdapat lima isu strategis pembangunan jangka panjang daerah, yakni meliputi belum optimalnya struktur ekonomi yang menjamin pertumbuhan berkualitas dan pemerataan; belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia; belum optimalnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung

pelayanan dasar dan penguatan ekonomi; belum optimalnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang didukung oleh transformasi digital. Selanjutnya, Merujuk pada visi rencana pembangunan nasional melalui visi Indonesia Emas 2045, serta memperhatikan permasalahan pokok, isu strategis serta potensi daerah maka visi Kabupaten Magelang tahun 2045 adalah Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.

Adapun sasaran Visi Kabupaten Magelang di Tahun 2045, meliputi (1) pertumbuhan ekonomi berkualitas, dengan indikator PDRB per kapita sebesar 164,03-192,65 juta rupiah; (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator tingkat kemiskinan sebesar 0,00-0,53 persen; (3) tata kelola pemerintahan yang baik, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80; (4) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia sebesar 84,67; serta kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan indikator penurunan emisi GRK sebesar 741.691,687 ton CO2eq.

Sebagai upaya mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan lima misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang maju, berkarakter, dan berdaya saing;
2. Memajukan perekonomian daerah berbasis potensi lokal unggulan yang berkelanjutan;
3. Mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang andal dan berkualitas untuk mendukung perkembangan wilayah;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta responsif terhadap bencana;
5. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Pencapaian visi daerah dituangkan pada pentahapan pembangunan, di mana pada periode lima tahun pertama (2025-2029) berfokus pada Penguatan Fondasi Kabupaten Magelang Maju Sejahtera dan Berkelanjutan, lima tahun kedua (2030-2034) berfokus pada Percepatan Pencapaian Kabupaten Magelang Maju Sejahtera dan Berkelanjutan, pada lima tahun ketiga (2035-2039) berfokus pada Pemantapan Pencapaian Kabupaten Magelang Maju Sejahtera dan Berkelanjutan, serta pada lima tahun terakhir (2040-2045) tahapan

pembangunan di kabupaten ini berfokus pada Berwujudan Kabupaten Magelang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.

Periode pertama pembangunan Kabupaten Magelang diarahkan pada tahapan Penguatan Pondasi Kabupaten Magelang Maju Sejahtera dan Berkelanjutan, dengan arah kebijakan meliputi:

1. **Mewujudkan Masyarakat yang Maju, Berkarakter, dan Berdaya Saing**, melalui arah kebijakan sebagai berikut :
   a. Meningkatkan penyelenggaraan layanan pendidikan
   b. Meningkatkan literasi masyarakat
   c. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
   d. Meningkatkan pelaksanaan keluarga berencana dan pembangunan keluarga
   e. Meningkatkan partisipasi perempuan dan perlindungan anak
   f. Meningkatkan pelestarian budaya
   g. Meningkatkan pembentukan karakter kepemudaan
   h. Meningkatkan prestasi olahraga
   i. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja

2. **Memajukan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal Unggulan yang Berkelanjutan**, melalui arah kebijakan sebagai berikut:
   a. Meningkatkan pendapatan masyarakat
   b. Meningkatkan kinerja sektor pertanian dalam arti luas
   c. Mengembangkan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pelestarian kebudayaan
   d. Mengembangkan usaha masyarakat
   e. Menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif
   f. Meningkatkan peran lembaga ekonomi daerah

3. **Mempercepat Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur yang Andal dan Berkualitas untuk Mendukung Perkembangan Wilayah**, melalui arah kebijakan sebagai berikut:
   a. Mendorong pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan merata
   b. Meningkatkan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak
   c. Meningkatkan layanan perhubungan darat
   d. Meningkatkan layanan komunikasi dan informatika
   e. Meningkatkan penataan ruang wilayah

f. Meningkatkan legalitas kepemilikan tanah

4. **Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan serta Responsif terhadap Bencana**, melalui arah kebijakan sebagai berikut:
   a. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian lingkungan hidup
   b. Meningkatkan pengelolaan dan penanganan limbah
   c. Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau dan keanekaragaman hayati
   d. Meningkatkan ketaatan penangggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan
   e. Meningkatkan upaya mitigasi bencana

5. **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih**, melalui arah kebijakan sebagai berikut:
   a. Meningkatkan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik
   b. Meningkatkan pengelolaan data secara terpadu dan terintegrasi
   c. Meningkatkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pemerintahan
   d. Meningkatkan kualitas aparatur
   e. Meningkatkan rasa aman

F. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah

Penataan ruang di Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang maju, aman, nyaman, produktif, dan bekelanjutan berbasis pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata dalam keterpaduan pengelolaan alam darat dan laut pesisir. Tata ruang adalah perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Provinsi Jawa Tengah memiliki arahan penataan ruang yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai berikut.

1. Arahan Pengembangan Wilayah (WP)

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah, pembagian WP di Jawa Tengah dibagi dalam 10 WP, dimana Kabupaten Magelang masuk dalam WP Gelangmanggung yang meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung.

Arahan pengembangan WP Gelangmanggung meliputi:

1. mengembangkan koridor kawasan pekotaan Muntilan – Mungkid - Kota Magelang – Secang – Temanggung;
2. pengembangan wilayah berbasis wisata yang memperhatikan kesesuaian KSPN Borobudur dan risiko bencana erupsi gunung api dan gempa bumi;
3. melestarikan kawasan Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia dan mengembangkan sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia dipadukan dengan wisata alam Gunung Merapi – Merbabu -Telomoyo dan Gunung Sindoro – Sumbing;
4. menyelaraskan pembangunan perbatasan Kabupaten Magelang dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo;
5. meningkatkan produksi hasil pertanian dan kehutanan sebagai penyangga kebutuhan pengembangan wilayah sekitarnya dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;
6. pengembangan industri ekonomi kreatif dan industri pengolah hasil pertanian dan kehutanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; dan
7. mengendalikan alih fungsi lahan sawah.

2. Rencana Kawasan Strategis

Kawasan strategis di wilayah provinsi terdiri dari Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Kawasan Strategis Nasional wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Sementara itu, Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi. Kabupaten Magelang masuk dalam dua Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yaitu KSP Agropolitan dan KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

G. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang

Penataan ruang wilayah Kabupaten Magelang bertujuan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berdaya saing berbasis pada pertanian, pariwisata, dan UKM, dengan mengutamakan pemanfaatan potensi lokal melalui sinergitas pembangunan perdesaan-perkotaan yang berkelanjutan. Penataan ruang tersebut terdiri atas perwujudan struktur ruang dan pola ruang. Adapun arahan penataan ruang yang termuat dalam RTRW Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut.

1. Konsep Pengembangan Wilayah.

Konsep Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang dengan mendasarkan pada sektor unggulan daerah yaitu pertanian, pariwisata dan UMK. Pengembangan wilayah dilakukan melalui pengoptimalan koridor utama jalan arteri di Kabupaten Magelang. Rencana sistem perkotaan Kabupaten Magelang meliputi penetapan pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kawasan, dan pusat pelayanan lingkungan. Kabupaten Magelang memiliki sistem perkotaan yang terdiri atas 4 PKL, 4 PPK, dan 12 PPL. Pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanan untuk meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan perdesaan, meningkatkan keterhubungan wilayah, dan meningkatkan kualitas pelayanan dan ketersediaan prasarana dalam rangka mendukung akses layanan antar kawasan.

Tabel 2.3.4
Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Magelang

Sistem Pusat Permukiman	Kawasan	Lingkup Kecamatan
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kawasan Perkotaan Mungkid	Kecamatan Mungkid, Kecamatan Sawangan
	Kawasan Pekotaan Muntilan	Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung
	Kawasan Perkotaan Mertoyudan	Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Candimulyo
	Kawasan Pekotaan Secang	Kecamatan Secang, Kecamatan Windusari
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Kawasan Perkotaan Salaman	Kecamatan Salaman, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Borobudur
	Kawasan Perkotangan Bandongan	Kecamatan Badongan, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Kajoran
	Kawasan Perkotaan Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Pakis, Kecamatan Ngablak
	Kawasan Perkotaan Grabag	Kecamatan Grabag
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	PPL Ngluwar	Kecamatan Ngluwar
	PPL Salam	Kecamatan Salam
	PPL Srumbung	Kecamatan Srumbung
	PPL Banyudono	Kecamatan Dukun
	PPL Sawangan	Kecamatan Sawangan
	PPL Tempurejo	Kecamatan Tempuran
	PPL Kajoran	Kecamatan Kajoran
	PPL Kaliangkrik	Kecamatan Kaliangkrik
	PPL Kembaran	Kecamatan Candimulyo
	PPL Pogalan	Kecamatan Pakis
	PPL Pandean	Kecamatan Ngablak
	PPL Tanjungsari	Kecamatan Windusari

Sumber: Raperda RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2023-2043

Salah isu strategis dalam struktur ruang di Kabupaten Magelang adalah sistem jaringan jalan, jalan tol, terminal penumpang, terminal barang, dan jaringan kereta api. Sistem jaringan kereta api yang dimaksud berupa pengembangan jaringan jalur kereta api. Rencana sistem jaringan jalur kereta api meliputi:

1. Jaringan jalur kereta api antarkota (Semarang-Magelang-Yogyakarta) yang melalui Kecamatan Grabag, Kecamatan Secang, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, dan Kecamatan Salam.
2. Jaringan jalur kereta api perkotaan (Borobudur dan sekitarnya) yang melalui Kecamatan Mungkid, Kecamatan Mertoyudan, dan Kecamatan Borobudur.

2. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis kabupaten terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan untuk mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan, menciptakan iklim investasi yang kondusif, mengintensifkan promosi peluang investasi, dan meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi. Rencana kawasan strategis Kabupaten Magelang dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:

i) Kawasan Perkotaan Mungkid dengan tujuan pengembangan sebagai pusat pemerintahan kabupaten yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata yang berkelanjutan. Arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Mungkid meliputi pengembangan perkantoran, perdagangan dan jasa, transportasi, permukiman, dan fasilitas pendukung pariwisata.
ii) Kawasan Perkotaan Muntilan dengan tujuan pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan dan budaya. Arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Muntilan meliputi pengembangan perdagangan dan jasa, transportasi, permukiman, dan pelestarian alam.
iii) Kawasan Perkotaan Mertoyudan dengan tujuan pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa yang berdaya saing. Arahan

pengembangan Kawasan Perkotaan Mertoyudan meliputi pengembangan perdagangan dan jasa, dan permukiman.

iv) Kawasan Perkotaan Secang dengan tujuan pengembangan sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang berkelanjutan dengan tetap melestarikan budaya lokal. Arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Secang meliputi pengembangan industri, perdagangan dan jasa, transportasi, pelestarian budaya, dan permukiman.

v) Kawasan Perkotaan Salaman dengan tujuan pengembangan sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang berdaya saing. Arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Salaman meliputi pengembangan perdagangan, jasa, transportasi, industri, permukiman dan pariwisata.

vi) Kawasan Perkotaan Bandongan dengan tujuan pengembangan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan. Arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Bandongan meliputi pengembangan perdagangan, jasa, transportasi, permukiman dan fasilitas pendukung pariwisata.

vii) Kawasan Perkotaan Tegalrejo dengan tujuan pengembangan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan dengan tetap melestarikan budaya lokal. Arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Tegalrejo meliputi pengembangan perdagangan dan jasa, transportasi, pelestarian budaya, dan permukiman.

viii) Kawasan Perkotaan Grabag dengan tujuan pengembangan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang berdaya saing dengan tetap mempertahankan budaya lokal. Arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Grabag meliputi pengembangan perdagangan dan jasa, transportasi, pelestarian budaya, dan permukiman.

H. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029

Isu strategis pembangunan KLHS RPJMD Kabupaten Magelang mempertimbangkan isu pembangunan berkelanjutan, juga mempertimbangkan skenario kondisi lingkungan terutama daya dukung dan daya tampung serta kondisi lingkungan hidup strategis lainnya yang dapat mempengaruhi pencapaian TPB. Selain itu, dalam merumuskan isu strategis daerah juga mempertimbangkan isu strategis KLHS RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2022-2042 (RPPLH), RTR Kawasan Borobudur (Perpres Nomor 58 Tahun 2014),

evaluasi RPJMD Kabupaten Magelang dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, serta hasil konsultasi publik, maka didapatkan tujuh isu strategis pembangunan daerah KLHS RPJMD Kabupaten Magelang, yakni meliputi:

1. Masih rendahnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
2. Belum optimalnya kualitas air, akses sanitasi, dan persampahan.
3. Ancaman kerusakan hutan dan lahan.
4. Peningkatan intensitas bencana dan perubahan iklim.
5. Belum optimalnya daya saing, produktivitas, dan keberlanjutan ekonomi daerah.
6. Belum optimalnya tata kelola pemerintah dalam keamanan dan pelayanan publik serta keuangan daerah.

I. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi agenda global 2030 setelah disepakati dalam sidang PBB pada bulan September 2015. SDGs yang berisikan 17 tujuan dan 169 target, adalah sebuah dokumen yang akan menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Selain itu juga dikenal sebagai kerangka kerja untuk 15 tahun ke depan hingga tahun 2030. Butir-butir SDGs bersifat inklusif, melibatkan banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil atau *Civil Society Organization* (CSO).

Pembangunan global ini merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs juga menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ditetapkan pula sarana pelaksanaan (*Means of Implementation*).

Keberhasilan pencapaian SDGs tidak dapat dilepaskan dari peranan penting pemerintah daerah. Oleh karena pemerintah kota dan kabupaten berada lebih dekat dengan warganya, memiliki wewenang dan dana, dapat melakukan berbagai inovasi, serta ujung tombak penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan serta program pemerintah. Hal ini didorong oleh kenyataan

bahwa sejak pemberlakuan desentralisasi di Indonesia, dua pertiga nasib dan kualitas hidup masyarakat dalam praktiknya sangat ditentukan oleh baik buruknya kinerja pemerintah daerah. Mulai dari soal kebersihan lingkungan, seperti pengelolaan sampah, kualitas sekolah, dan pelayanan kesehatan. Pada intinya kondisi masyarakat tergantung pada tinggi rendahnya mutu pelayanan publik di daerah.

J. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029. Dokumen ini memuat peran ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah sehingga menjadi bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil analisis dalam RIPJPID, terdapat 8 (delapan) usulan Produk Unggulan Daerah mencakup:

1. Kawasan Strategis Pariwisata

Kabupaten Magelang merupakan destinasi wisata andalan dan unggulan di Indonesia. Keberadaan Candi Borobudur sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan predikat Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Potensi destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten Magelang tidak hanya Candi Borobudur, tetapi juga kawasan yang ditopang oleh keindahan alam dengan lima gunung yang mengitarinya. Menurut Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2015 bahwa kawasan strategis pariwisata Kabupaten Magelang dibagi menjadi:

a. Kawasan Strategis Pariwisata A dengan tema pembangunan adalah Pengembangan Wisata Alam dan Budaya Gunung Sumbing;
b. Kawasan Strategis Pariwisata B dengan tema pembangunan adalah Pengembangan Saujana Alam Lembah Merapi dan Merbabu;
c. Kawasan Strategis Pariwisata C dengan tema pembangunan adalah Pengembangan Wisata Vulkanologi dan Budaya Merapi; dan
d. Kawasan Strategis Pariwisata D dengan tema pembangunan adalah Borobudur dalam Bayangan Merapi.

2. Kopi

Kopi Magelang dikenal akan kualitasnya yang unggul, dihasilkan dari lahan seluas 3.012 hektare dengan total produksi mencapai 2.118,80 ton wose kering, yang tersebar di 16 Kecamatan yaitu Kecamatan Salaman, Borobudur, Srumbung, Dukun, Sawangan, Candimulyo, Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik, Bandongan, Windusari, Secang, Tegalrejo, Pakis, Grabag, dan Ngablak. Para petani kopi di daerah ini memanfaatkan teknik pertanian yang baik dan ramah lingkungan, sehingga menghasilkan biji kopi dengan cita rasa khas yang diminati.

3. Padi Organik

Padi organik di Kabupaten Magelang dihasilkan dari praktik pertanian yang berkelanjutan. Pada tahun 2024, produksi padi organik yang dihasilkan dari *Upland Project* Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Kabupaten Magelang mencapai 14.722 ton GKP atau 7.280 ton beras yang berasal dari lahan seluas 2.114 hektare. Sementara itu, potensi lahan untuk pertanian organik di Kabupaten Magelang sendiri mencapai 25.268 hektare. Hal tersebut memberikan peluang bagi petani untuk meningkatkan pendapatan dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

4. Herbal Farmaka

Herbal farmaka di Magelang terdiri dari berbagai tanaman yang memiliki manfaat kesehatan, dengan total produksi mencapai 7.538.725 kg bahan baku mentah. Terdapat 447 pelaku usaha yang terlibat dalam pengembangan produk herbal ini, dengan dukungan produksi dari lahan seluas 343,51 hektar untuk budidaya tanaman herbal. Dengan meningkatnya permintaan akan produk alami dan sehat, sektor herbal farmaka berpotensi tumbuh pesat dan memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal, dengan estimasi nilai ekonomi mencapai Rp 188,47 miliar per tahun saat ini.

5. Olahan Buah dan Sayur

Sektor olahan buah dan sayur di Kabupaten Magelang menghasilkan produk olahan yang cukup besar, dengan pasokan bahan baku sayuran dan buah mencapai 378.622,93 ton yang dihasilkan dari luasan lahan produktif seluas 18,900 hektare. Varietas produk olahan yang dihasilkan terutama makanan ringan. Oleh karena itu, prospek pengembangan olahan buah dan sayur sebagai upaya hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah

sektor pertanian, sekaligus memberikan alternatif pendapatan bagi petani dan pelaku usaha lokal.

6. Kepala Upat-Upat

Kelapa Upat-Upat merupakan varietas lokal baru di Kabupaten Magelang dicatatkan sebagai varietas Kelapa Lokal dengan nama Upas Upat SA bernomor tanda daftar varietas tanaman 036/A.9/05/2024. Kelapa Upat Upat Kabupaten Magelang telah diteliti dengan miliki beberapa kelebihan antara lain pada jumlah tandan, jumlah buah, dan kopra yang lebih banyak per tahunnya jika dibandingkan dengan kelapa varietas lain.

7. Domba dan Kambing

Peternakan domba dan kambing di Kabupaten Magelang mencatatkan produksi mencapai 88.603 ekor domba dan 130.400 ekor kambing, dengan total daging yang dihasilkan mencapai 1.133.068 kg. Sektor peternakan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan daging lokal, tetapi juga berperan penting dalam tradisi dan budaya masyarakat. Dengan estimasi nilai ekonomi sebesar Rp192,63 miliar, peternakan domba dan kambing menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pelaku usaha di daerah.

8. Ikan Beong

Mangut Beong adalah masakan khas Magelang yang terbuat dari ikan Beong, dengan produksi mencapai 41.244 kg dari hasil tangkapan. Cita rasa khas dari Mangut Beong menjadikannya favorit di kalangan masyarakat dan wisatawan, memberikan kontribusi ekonomi yang penting dengan estimasi nilai mencapai Rp 2,27 miliar. Ikan Beong merupakan varietas endemik Kali Elo dan sekitarnya, sehingga belum masif dikembangbiakkan dalam budidaya modern yang sistematis. Oleh karena itu, pengembangan Mangut Beong perlu mengngintegrasikan secara vertikal rantai nilai dari budidaya hingga pengolahan dan pemasaran.

Selanjutnya, dalam pengembangan PUD Kabupaten Magelang diterapkan beberapa inovasi sebagai berikut:

a. Jelajah Magelang;
b. Laba Litbang (Laboratorium Alam Penelitian dan Pengembangan);
c. *Arabika Magelang Excellence*;
d. *Magelang Go Organic* Pengembangan Kawasan Padi Organik;

e. SINAKKAN (Sistem Informasi Peternakan dan Perikanan);
f. Menghubungkan Hulu Ke Hilir, Upaya Pemberdayaan Klaster Kopi Di Kabupaten Magelang;
g. MEET MAYA (*Metaverse Ecotourism Manunggal Jaya*);
h. Desa Wisata Wonolelo "Negeri Kahyangan";
i. *Sudhana Manohara: The Eternal Love Story* Desa Wisata Tuksongo;
j. Ketep Summit Festival;
k. Melanglang Magelang (Desain Logo dan *Tagline*) Pariwisata.

2.3.2.2. Penetapan Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah merupakan suatu kondisi yang berpotensial menjadi masalah maupun peluang dari suatu daerah dimasa mendatang, di mana isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Dengan kata lain, isu strategis merupakan suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi menjadi masalah daerah pada suatu saat, serta dapat pula dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola oleh daerah dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis rencana jangka menengah Kabupaten Magelang merupakan rumusan yang didasarkan dari permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, hasil telaah dokumen perencanaan baik di level kabupaten, Provinsi Jawa Tengah, Nasional, serta hasil penelaahan isu strategis di level regional, nasional, maupun internasional. Berdasarkan pernyataan tersebut, berikut merupakan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Magelang.

1. **Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia**

Pembangunan sumber daya manusia ini merupakan agenda global dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yakni mengacu pada tujuan 3 (menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia), serta tujuan 4 (menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua). Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Magelang diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berkarakter, produktif, inovatif, berbudaya, yang dilandasi dengan nilai-nilai religi.

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Magelang diarahkan untuk meningkatkan rata-rata jenjang pendidikan masyarakat agar masyarakat menjadi produktif dan berdaya saing. Sistem pendidikan yang baik akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan menjadikan suatu daerah

semakin maju, begitu pula sebaliknya. Kebijakan pendidikan perlu diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, dan perluasan kesempatan belajar. Oleh karena itu, merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Magelang untuk memastikan bahwa sistem pendidikan yang ada dapat diakses oleh setiap penduduk usia sekolah tanpa terkecuali, mulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, bahkan sampai pendidikan tinggi, dan/atau baik pendidikan forman maupun pendidikan non formal. Pemerataan pendidikan dilakukan untuk mendorong partisipasi sekolah serta memperkuat pendidikan karakter dan budaya.

Berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan saat ini telah mampu mendorong terselenggaranya layanan pendidikan yang lebih berkualitas, tetapi belum mampu memberikan dampak lebih luas dan merata ke lebih banyak sekolah dan daerah. Saat ini, sebagian masyarakat memilih untuk menempuh pendidikan ke luar Kabupaten Magelang dengan berbagai alasan, salah satunya adalah untuk mendapatkan mutu pendidikan yang lebih baik, di mana seharusnya pendidikan yang baik dapat disediakan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Baiknya jika masyarakat yang menempuh pendidikan di luar kabupaten dapat kembali ke Kabupaten Magelang untuk membangun dan memajukan daerahnya. Selanjutnya, untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, masyarakat Kabupaten Magelang juga perlu disiapkan dan diarahkan untuk dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital, salah satunya agar masyarakat mendapatkan kemudahan untuk dapat mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan diri untuk menghadapi tantangan jaman.

Kesehatan juga berperan penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya kesehatan yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan, pengembangan sistem jaminan kesehatan, peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat, serta peningkatan layanan kesehatan. Paradigma kesehatan yang selama ini mengarah pada tindakan kuratif juga harus mulai bergeser pada tindakan preventif dan promotif dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu diwujudkan lingkungan sehat, perilaku sehat, dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Selain itu, Pemerintah juga memiliki tugas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini terjadi di Kabupaten Magelang, seperti masih adanya anak tidak sekolah, *stunting*, kesetaraan dan pengarusutamaan gender, perlindungan

perempuan dan anak, kenakalan remaja, dan mulai hilangnya karakter kepemudaan.

2. **Percepatan penanggulangan kemiskinan**

Kemiskinan merupakan tujuan pertama dan utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yakni “tanpa kemiskinan atau mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun”. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, Presiden menginstruksikan agar capaian tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen dapat dicapai pada tahun 2024 atau enam tahun lebih cepat dari SDGs, oleh karena itu penghapusan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan global. Menindaklanjuti hal tersebut, dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Magelang juga mendasarkan langkahnya pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam rangka mengimplementasikan strategi penanggulangan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Magelang akan melaksanakan serangkaian intervensi terarah dan nyata yang mencakup aspek kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan, penguatan akses layanan, dan pendekatan berbasis wilayah. Intervensi kebutuhan dasar diarahkan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, antara lain melalui pemberian dan perluasan program bantuan sosial yang terintegrasi dan berbasis data, perluasan akses terhadap layanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional, serta penyediaan bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Upaya peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi layak juga menjadi bagian integral dari strategi ini, termasuk melalui program infrastruktur padat karya.

Di sisi peningkatan pendapatan, intervensi dilakukan dengan menyediakan pelatihan keterampilan dan sertifikasi bagi angkatan kerja dari rumah tangga miskin, memperluas program padat karya tunai di desa-desa, serta memfasilitasi dan mempermudah akses permodalan, pengembangan usaha mikro dan kecil (UMKM), juga mendorong pengembangan usaha ekonomi

produktif berbasis potensi lokal lainnya untuk menciptakan sumber penghidupan berkelanjutan.

Selanjutnya, peningkatan akses dan kepastian hukum bagi penduduk miskin akan dilakukan melalui percepatan penerbitan dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga, KTP, dan akta kelahiran, untuk memastikan keterjangkauan terhadap layanan dasar. Di samping itu, penyelesaian permasalahan legalisasi aset juga menjadi fokus melalui percepatan program sertifikasi tanah, khususnya melalui skema Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Intervensi ini didukung pendekatan berbasis wilayah prioritas, melalui penetapan klaster kantong kemiskinan serta pengintegrasian berbagai program lintas sektor di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi.

Seluruh intervensi tersebut akan dilaksanakan secara terkoordinasi melalui penguatan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), serta didukung dengan sistem pemantauan dan evaluasi yang berbasis data dan berorientasi pada hasil. Dalam upaya percepatan penanggulangan atau pengentasan kemiskinan tersebut membutuhkan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, karena permasalahan kemiskinan perlu ditempatkan dalam kerangka multidimensi. Terakhir, yang tidak kalah penting, penguatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa seluruh bentuk bantuan dan intervensi penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, efektif, dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

3. **Memajukan perekonomian daerah berbasis sektor unggulan daerah dan mendorong penyerapan tenaga kerja lokal yang terdidik dan terlatih**

Sektor pertanian, sektor industri, dan sektor perdagangan merupakan tiga kontributor terbesar dalam struktur ekonomi Kabupaten Magelang. Dalam beberapa waktu terakhir, kontribusi sektor pertanian menunjukkan penurunan, sementara kontribusi sektor industri menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan melampaui sektor pertanian. Penurunan kontribusi sektor pertanian disebabkan oleh kurang optimalnya kinerja hulu hingga hilirnya. Menurunnya kinerja sektor pertanian dapat berimbas pada ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan pangan di

masyarakat. Nantinya pembangunan pertanian dapat diarahkan pada modernisasi pertanian maupun pengembangan agroindustri dengan tetap memperhatikan prinsip pertanian berkelanjutan.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Magelang yang mempunyai peranan penting untuk memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, serta menjadi sumber pendapatan masyarakat dan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Magelang memiliki berbagai potensi wisata. Selain Candi Borobudur yang telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas, masih cukup banyak obyek wisata lain yang dapat dikembangkan. Sektor pariwisata di kabupaten ini dapat dijadikan sebagai prioritas yang menjadi *leading sector* pembangunan Kabupaten Magelang ke depan, di mana sektor ini dianggap dapat menjadi daya ungkit bagi sektor lainnya.

Belum optimalnya pengembangan pariwisata di kabupaten ini disebabkan karena belum optimalnya penawaran dan permintaan pariwisata, setidaknya dari sisi pengelolaan potensi pariwisata, diversifikasi objek dan daya tarik wisata, penyediaan infrastruktur pendukung kepariwisataan, promosi wisata, sinergitas antar pemangku kepentingan, dan sumber daya manusia bidang pariwisata itu sendiri. Sebagai wilayah yang memiliki basis pertanian, maka wisata agro dapat menjadi peluang pariwisata baru. Pengembangan sektor pariwisata juga tidak terlepas dengan pengembangan usaha ekonomi kreatif dan juga pengembangan budaya. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah diharapkan dapat mendorong produk ekonomi kreatif dan UMKM untuk disandingkan bersama objek wisata yang dikembangkan. Terkait dengan pengembangan budaya, Kabupaten Magelang dikenal luas sebagai daerah dengan adat dan budaya yang mengakar kuat, oleh karena itu diperlukan perlindungan dan pelestarian budaya.

Kabupaten Magelang juga perlu mengantisipasi fase bonus demografi, yang salah satunya ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Kondisi perekonomian daerah dan nasional yang cenderung membaik akan membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berwirausaha. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyiapan tenaga kerja yang berkualitas melalui peningkatan keterampilan untuk para tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar kerja. Selanjutnya, dampak positif dari bonus demografi pada sektor ekonomi diantaranya adalah dapat memicu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan permintaan terhadap barang konsumsi yang memicu skala

ekonomi dalam produksi, serta meningkatkan produksi yang akan membuat usaha semakin luas dan meningkatkan usaha baru. Pengembangan sektor industri juga dapat didukung dengan adanya investasi dari dalam maupun luar daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Selanjutnya, pengembangan UMKM juga menjadi hal yang penting karena melibatkan banyak rumah tangga dan tenaga kerja. Pengembangan usaha dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku, sarana dan prasarana, permodalan, perijinan, serta kemampuan inovasi produk, dan pemasaran. Dalam upaya pengembangan UMKM tersebut perlu adanya peningkatan layanan pengembangan usaha serta peningkatan daya saing produk.

4. **Pembangunan dan pemerataan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan, dan daya saing daerah**

Pembangunan dan pemerataan infrastruktur wilayah dilakukan untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas masyarakat; memperlancar arus barang dan jasa; mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; serta meningkatkan daya saing daerah. Infrastruktur yang berkualitas berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk dan mendukung perkembangan ekonomi. Infrastruktur yang baik, seperti jalan raya, air bersih, sanitasi, jaringan listrik, dan layanan transportasi darat yang andal, menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas ekonomi dan investasi. Adapun isu pembangunan dan pemerataan infrastruktur ini berkenaan dengan agenda pembangunan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya tujuan 6 (air bersih dan sanitasi layak–menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua), tujuan 7 (energi bersih dan terjangkau–menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua), serta tujuan 11 (kota dan permukiman berkelanjutan–menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan).

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga fokus pada pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Hal ini dilakukan agar semua masyarakat di kabupaten ini dapat menikmati akses yang sama terhadap infrastruktur yang berkualitas. Pemerataan infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, selain mengarahkan pembangunan

infrastruktur untuk memperkuat konektivitas antar wilayah di Kabupaten Magelang, pemerataan infrastruktur juga diarahkan untuk mencapai keseimbangan pembangunan, serta untuk mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman guna mewujudkan penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau.

5. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim**

Isu lingkungan merupakan salah satu isu penting yang diangkat dalam agenda global, yakni yang tercantum pada tujuan tujuan 13 (penanganan perubahan iklim–mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya) dan tujuan 15 (ekosistem daratan-melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati). Agenda pembangunan tersebut menyatakan bahwa dalam pembangunan perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Kerusakan lingkungan juga merupakan salah satu isu yang banyak disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Magelang, salah satunya berkaitan dengan banyaknya penambangan ilegal yang dilakukan di dalam kawasan konservasi. Hasil dari kegiatan penambangan tidak berijin tersebut bukan hanya berakibat pada kerusakan lingkungan yang dapat meningkatkan risiko bencana alam, namun juga berdampak pada kerusakan infrastruktur, hingga hilangnya potensi pendapatan daerah yang berasal dari penambangan pasir dan batu tersebut. Dalam lima tahun mendatang, pemerintah daerah hendaknya dapat melakukan penertiban aktivitas penambangan ilegal yang selama ini telah terjadi, agar kelestarian hutan dan lingkungan di kabupaten dapat terjaga.

Selanjutnya, permasalahan pengelolaan sampah menjadi salah satu isu strategis dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Magelang. Volume timbulan sampah yang terus meningkat, rendahnya tingkat pemilahan dan daur ulang di sumber, serta keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah menyebabkan beban terhadap daya tampung lingkungan semakin besar. Penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R) perlu didorong secara terintegrasi dengan partisipasi aktif masyarakat, serta penguatan kelembagaan dan regulasi yang mendukung. Hal

ini menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kabupaten Magelang.

Lebih lanjut, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim juga menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan Kabupaten Magelang, di mana wilayah Kabupaten Magelang terletak pada kondisi geografis yang rawan terhadap bencana alam, seperti gunung meletus, gempa bumi, longsor, dan bahaya kebakaran. Mitigasi bencana sendiri merupakan salah satu upaya untuk mengurangi risiko bencana. Sementara itu, Kabupaten Magelang juga dihadapkan pada ancaman perubahan iklim yang sudah semakin nyata. Kondisi tersebut dapat menyebabkan bencana ekologis dan dapat mengganggu keseimbangan alam. Dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti terjadinya kelangkaan air bersih akibat dari kekeringan yang berkepanjangan, atau banjir yang disebabkan karena intensitas curah hujan yang tinggi. Adaptasi perubahan iklim membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, di mana adaptasi perubahan iklim merupakan salah satu investasi penting untuk Kabupaten Magelang karena dengan meningkatkan adaptasi maka Kabupaten Magelang dapat mengurangi dampak negatif perubahan iklim, meningkatkan ketahanan daerah, dan mampu mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

6. **Reformasi birokrasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui SDM yang profesional**

Pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan sebagaimana yang tertuang dalam Roadmap Reformasi Birokrasi, Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Reformasi Birokrasi, Visi Indonesia Emas 2045, hingga RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045. Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, yang didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam meningkatkan pelayanan publik. Dalam upaya mewujudkan reformasi dan digitalisasi tersebut, maka dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional. SDM yang profesional merupakan kunci utama dalam mewujudkan reformasi dan digitalisasi tersebut, di mana SDM tersebut harus memiliki kompetensi, keterampilan, dan nilai-nilai yang sesuai dengan tuntutan zaman. Adapun beberapa kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan oleh SDM profesional

tersebut antara lain kemampuan untuk memahami dan menggunakan TIK, kemampuan untuk berpikir kritis dan analitis, hingga kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan.

Pemanfaatan teknologi sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, seperti sistem pengaduan, sistem pelayanan perijinan, dan sistem pelayanan kependudukan, juga menjadi penting sehingga pelayanan publik semakin berkembang. Selain itu, penerapan teknologi digital memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih baik dan responsif. Aplikasi dan situs *website* pemerintah dapat memberikan akses mudah ke layanan dan informasi, dan pemerintah dapat berinteraksi dengan masyarakat secara *online*, mengurangi birokrasi yang memperlambat respons terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi digital memungkinkan pemerintah untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik, yang mencakup penggunaan kecerdasan buatan (AI), analitik data, dan teknologi terbaru untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui SDM yang profesional merupakan proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen serta kerjasama dari semua pihak baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan komitmen yang baik dari seluruh pemangku kepentingan, maka reformasi birokrasi dapat terwujud dan Kabupaten Magelang dapat memiliki birokrasi yang berkinerja tinggi, berintegritas, serta mampu melayani masyarakat dengan baik. Selanjutnya, salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan mewujudkan supremasi hukum, di mana salah satu fungsi pemerintah adalah memelihara dan memulihkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

3.1.1. Visi

Secara umum visi adalah gambaran keadaan yang akan dituju atau diciptakan di masa yang akan datang. Sementara itu, sesuai dengan ketentuan, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Magelang dan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka visi pembangunan Kabupaten Magelang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 adalah:

"Magelang **A**man, **Ny**aman, **R**eligius, Ung**g**ul dan **S**ejahtera"

atau ***Magelang Anyar Gress***

Adapun penjelasan Visi adalah sebagai berikut:

Aman adalah kondisi ideal dalam pembangunan daerah untuk menuju masyarakat adil makmur. Kondisi aman dalam hal ini menunjuk pada stabilitas politik dan keamanan yang menjadi prasyarat berkembangnya Kabupaten Magelang untuk meningkatkan daya saing daerah. Stabilitas politik tercermin dalam mekanisme *check and balance* antara legislatif dan eksekutif, sedangkan stabilitas keamanan didukung oleh mekanisme perumusan regulasi dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Nyaman mengandung makna ketenteraman dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Magelang dalam kehidupan sehari-hari dan menjalankan aktivitas. Nyaman juga mempunyai arti berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Pencapaian Magelang Nyaman dalam lima tahun ke depan dilaksanakan dengan mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan serta responsif terhadap bencana.

Religius menjadi salah satu fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan manusia di Kabupaten Magelang. Sebagaimana termaktub dalam dasar negara yaitu Pancasila sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa menjadi acuan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Unggul mempunyai makna multidimensi yaitu tujuan untuk menjadi masyarakat yang berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing sehingga masyarakat Kabupaten Magelang menjadi Sumber Daya Manusia yang unggul. Maka dari itu, pendidikan harus berkualitas dan merata untuk semua lapisan masyarakat. Pemantapan nilai-nilai karakter bangsa dalam dunia pendidikan menjadi sangat krusial untuk menjaga keadaban dan mewujudkan masyarakat yang berbudaya.

Selain itu untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul diperlukan masyarakat yang sehat. Kesehatan publik menjadi pilar penting dalam membangun Kabupaten Magelang. Kesehatan publik dalam konteks ini dapat dilihat dari dua konteks yaitu perspektif preventif dan kuratif. Dalam lima tahun ke depan untuk dapat mewujudkan layanan kesehatan preventif dan kuratif yang merata untuk semua. Muara dari dimensi-dimensi tersebut adalah terwujudnya daya saing daerah yang tinggi.

Makna unggul tidak hanya untuk masyarakatnya, namun juga penyelenggara pemerintahannya. Birokrasi yang unggul ditandai dengan birokrasi yang kompeten, melayani, dan bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejahtera dalam hal ini adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan meningkatnya kemakmuran setiap warga Kabupaten Magelang. Kondisi ini mengacu pada semakin turunnya angka kemiskinan, peningkatan pendapatan perkapita, pemerataan pendapatan masyarakat yang ditandai dengan indeks gini yang semakin rendah, menurunnya tingkat pengangguran, dan tumbuhnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yaitu pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, dan UMKM.

Kesejahteraan masyarakat harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Magelang. Prinsip keadilan dan pemerataan harus diberlakukan

untuk semua bidang pembangunan dan seluruh wilayah di Kabupaten Magelang.

3.1.2.Misi

Misi secara umum merupakan garis besar upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi dalam suatu rumusan rencana. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kata kunci yang termaktub dalam visi dijabarkan dalam lima misi utama (**Panca Dharma**) sebagai berikut.

Misi:

1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah.
5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana.

Kelima misi tersebut selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat untuk mengakses pendidikan berkualitas. Saat ini, masih terdapat anak-anak usia sekolah di Kabupaten Magelang belum mendapatkan akses pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi yang memadai. Peningkatkan pendidikan yang berkualitas

dilakukan dengan revitalisasi fasilitas pendidikan. Dengan semakin meningkatnya pendidikan masyarakat di Kabupaten Magelang diharapkan dapat memberikan dampak langsung pada penurunan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan. Dengan implementasi yang tepat, diharapkan angka pengangguran dapat ditekan hingga mencapai target 2-3 persen. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing.

Dukungan sosial keagamaan melalui fasilitasi kegiatan keagamaan berbasis pada tempat ibadah, pemberdayaan masyarakat serta pembangunan di bidang kesehatan berperan penting dalam peningkatan SDM. Pembangunan kesehatan antara lain dengan memberikan layanan kesehatan untuk masyarakat melalui pembangunan rumah sakit serta optimalisasi sarana prasarana dan pelayanan rumah sakit serta memberikan dukungan gizi dan layanan akses kesehatan selama kehamilan, melahirkan dan menyusui.

Misi 2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

Misi ini menunjukkan adanya keinginan kuat Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Berdasarkan data tahun 2024 nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebesar 78,96; Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,81 dan Indeks Integritas Nasional (IIN) sebesar 72,37. Pada tahun 2029 diharapkan dapat dicapai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebesar 80,29; Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,17; dan Indeks Integritas Nasional (IIN) sebesar 78,00. Sehubungan dengan hal tersebut perlu kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang melayani rakyat.

Kebijakan dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani dilaksanakan secara konsekuen dengan beberapa agenda yang mengarah pada upaya perwujudan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Dalam rangka mendukung agenda ini, diwujudkan dengan penguatan program digitalisasi proses bisnis

dalam pelayanan publik, serta mengoptimalkan mekanisme pengaduan masyarakat terkait dengan kualitas layanan publik bagi masyarakat umum.

Misi 3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat perlu didorong dengan perekonomian berbasis potensi lokal. Kabupaten Magelang memiliki potensi lokal yang besar di sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM, namun tantangan yang ada saat ini memerlukan intervensi tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor pertanian, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah, menunjukkan penurunan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan menurun, yakni tercatat sebesar 13,27 persen di tahun 2020 dan menurun menjadi 12,89 persen di tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan tantangan dalam produktivitas dan daya saing sektor pertanian yang harus segera diatasi.

Sektor pariwisata di Kabupaten Magelang juga memiliki potensi besar, namun saat ini belum dikelola dengan optimal. Pada tahun 2024, sebagaimana yang disebutkan dalam Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2025, terdapat 43 objek wisata buatan, 38 objek wisata budaya, dan 99 objek wisata alam yang tersebar di berbagai wilayah. Keberagaman ini mampu menarik kunjungan wisatawan dalam jumlah yang signifikan. Data kunjungan tertinggi pada tahun 2024 adalah Candi Borobudur, sebanyak 1.286.029 wisatawan, diikuti oleh Ketep Pass dengan jumlah pengunjung 243.510 wisatawan, serta Candi Mendut-Pawon sebanyak 49.166 pengunjung. Selain itu, lama tinggal wisatawan di Kabupaten Magelang masih sangat singkat, hanya 1,59 hari untuk hotel berbintang dan 1,02 hari untuk hotel non-bintang. Kurangnya fasilitas dan aksesibilitas yang merata, serta keterbatasan akses pada pembiayaan formal yang hanya menjangkau 40 persen dari sekitar 500 pelaku wisata, menjadi kendala yang harus diatasi.

Berdasarkan data base Kementerian Koperasi dan UMKM, Jumlah UMKM di Kabupaten Magelang Tahun 2022 sebanyak 65.757 unit, menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal akses pembiayaan dan proses perizinan. Data dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM, dan menunjukkan bahwa hanya sekitar 35 persen dari UMKM yang memiliki akses ke pembiayaan formal, sementara sebagian besar masih mengandalkan modal pribadi atau pinjaman informal dengan bunga tinggi. Tantangan ini menghambat pertumbuhan dan daya saing UMKM, yang seharusnya menjadi motor penggerak perekonomian lokal. Selain itu, tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang masih cukup tinggi, yaitu 10,83 persen pada tahun 2024, dengan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan yang baru mencapai 30,2 persen pada tahun 2024. Tingginya angka kemiskinan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui kebijakan yang mendorong ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan keluarga.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan penguatan sektor pertanian melalui integrasi dengan industri pengolahan dan pariwisata untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, serta peluncuran subsidi untuk menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida yang terjangkau. Selain itu, kebijakan ekonomi kerakyatan akan diimplementasikan melalui berbagai program pemberdayaan UMKM dan peningkatan kesejahteraan keluarga, termasuk peningkatan kapasitas UMKM, fasilitasi akses pembiayaan dan perizinan, serta penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

Selanjutnya, untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial yang komprehensif perlu komitmen untuk mengambil langkah-langkah tegas dan progresif guna mendorong transformasi signifikan di Kabupaten Magelang. Berdasarkan kondisi eksisting tingkat pengangguran Kabupaten Magelang di angka 3,55 persen dan tingkat kemiskinan yang mencapai 10,83 persen pada tahun 2024. Target utama yang ingin dicapai adalah menurunkan angka pengangguran hingga 2-3 persen dan mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 6-7 persen melalui kebijakan yang tepat serta

program-program yang fokus pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Saat ini, cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang baru mencapai 18,1 persen, yang masih jauh dari kondisi ideal. Sehingga diharapkan ada peningkatan cakupan hingga 22 persen, guna memastikan para pekerja di Magelang memiliki perlindungan yang memadai terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi. Di sisi lain, dengan mayoritas penduduk Kabupaten Magelang yang beragama Islam, yaitu sekitar 1,31 juta jiwa atau 97,5 persen dari total populasi, menjaga hubungan antar agama yang harmonis tetap menjadi prioritas utama. Upaya ini penting untuk mempertahankan kohesivitas sosial dan membangun masyarakat yang inklusif serta toleran, sehingga Kabupaten Magelang dapat berkembang menjadi daerah yang sejahtera dan harmonis dalam segala aspek kehidupan. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang dapat meningkat secara signifikan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperkuat perekonomian lokal.

Misi 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah

Misi keempat ini akan mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan diseluruh wilayah Kabupaten Magelang. Pembangunan infrastruktur sangat penting, terutama mengingat cakupan panjang jalan dengan kondisi mantap saat ini mencapai 89,20 persen, namun masih perlu ditingkatkan hingga target 91,52 persen untuk memastikan konektivitas yang merata dan mendukung mobilitas serta distribusi ekonomi di seluruh daerah. Kualitas dan kuantitas perumahan juga menjadi perhatian, dengan 378.533 unit rumah yang tersedia saat ini, namun masih ada kesenjangan yang signifikan untuk mencapai target 466.266 unit pada tahun 2029, yang menunjukkan masih banyak warga yang belum mendapatkan akses ke hunian layak. Selain itu, akses sanitasi aman di Kabupaten Magelang masih sangat rendah, hanya 1,51 persen, dengan target peningkatan menjadi 19,52 persen pada tahun 2029. Sanitasi yang aman sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Peningkatan infrastruktur, penyediaan perumahan layak, dan akses sanitasi aman adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magelang. Dengan memperbaiki dan memperluas jaringan jalan serta konektivitas digital, dipastikan bahwa semua wilayah terhubung secara merata, mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, percepatan pembangunan perumahan berkualitas melalui inovasi desain dan material ramah lingkungan akan mengatasi kesenjangan hunian, menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Akses sanitasi yang lebih baik dan edukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan akan meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup, membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih sejahtera.

Misi 5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana

Misi ini menunjukkan adanya keinginan kuat Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pengelolaan lingkungan hidup dan SDA dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut, diwujudkan dengan optimalisasi pengelolaan lingkungan, pengolahan limbah dan sampah, serta manajemen bencana berbasis masyarakat. Data menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Magelang masih perlu peningkatan. Angka IKLH sebesar 69,40 dan Indeks Risiko Bencana/IRB: 97,42 akan kami tingkatkan menjadi 75,13 dan 92,53 - 88,49 pada akhir 2029.

Pengelolaan lingkungan hidup berbasis komunitas lokal akan menjadi platform kebijakan dalam rangka perwujudan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang lestari. Eksplorasi dan eksploitasi SDA yang berlebihan akan membayakan kelangsungan dan keberlanjutan kehidupan manusia serta krisis perubahan iklim merupakan sebuah ancaman yang nyata. Untuk itu, perlu kearifan dan kecermatan dalam aktivitas pembangunan. Selain itu, potensi bencana masih menjadi salah satu perhatian khusus mengingat secara geografis beberapa wilayah Kabupaten Magelang terletak di jalur bencana. Upaya penanggulangan bencana

dilakukan dengan cara mengoptimalkan manajemen kebencanaan berbasis komunitas lokal.

3.1.3.Tujuan Dan Sasaran

Visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 perlu dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran sehingga program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dapat dilaksanakan ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama lima tahun. Sementara sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD disusun dengan kalimat kondisi; dapat diukur untuk jangka waktu lima tahun; disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; bersifat makro dan lintas urusan serta merupakan ultimate *outcome*; serta tidak menurunkan indikator tetapi kinerjanya.

Tabel 3.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029
Visi: "Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera atau Magelang Anyar Gress"

Pokok Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Unggul	Misi 1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia	Tujuan 1.1. Meningkatnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing		**1. Indeks Pembangunan Manusia**	Indeks	72,10	72,57	73,01	73,41	73,81	74,22	74,62
			Sasaran 1.1.1. Meningkatnya masyarakat Kabupaten Magelang yang cerdas, sehat, dan berdaya	1. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,83	8,74	8,86	8,98	9,10	9,22	9,32
				2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,62	13,04	13,23	13,43	13,62	13,81	13,96
				3. Usia Harapan Hidup	Tahun	74,68	74,92	75,16	75,38	75,6	75,81	76,19
Religius			Sasaran 1.1.3. Meningkatnya pembinaan keagamaan di masyarakat	4. Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	79,60	80,10	80,60	81,10	81,60	82,10	82,60
Unggul	Misi 2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani	Tujuan 2.1. Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih yang didukung dengan aparatur yang profesional		**2. Indeks Reformasi Birokrasi**	Indeks	78,96	79,21	79,48	79,75	80,02	80,29	80,56
			Sasaran 2.1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	5. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,81	3,88	3,96	4,04	4,10	4,17	4,23
				6. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,99	87,42	87,86	88,30	88,74	89,18	89,62
			Sasaran 2.1.2. Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan di daerah	7. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				8. Nilai AKIP	Nilai	63,57	64,31	65,03	67,02	69,01	71,00	72,99

Pokok Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Sejahtera	Misi 3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Tujuan 3.1. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat		**3. Laju Pertumbuhan Ekonomi**	Persen	5,06	5,20 - 5,90	5,20 - 5,65	6,50 – 7,12	6,90 – 7,76	7,40 – 8,21	7,90 – 8,50
				4. Tingkat Kemiskinan	Persen	10,83	9,67 - 10,55	9,07 - 9,93	8,47 - 9,30	7,86 - 8,68	7,26 - 8,05	6,78 - 7,55
			Sasaran 3.1.1. Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan	9. PDRB per kapita	Juta Rupiah	32,60	36,10	39,60	43,10	46,60	50,10	53,60
				10. Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Persen	20,21	20,59	20,98	21,49	22,09	22,51	23,18
Aman			Sasaran 3.1.2. Meningkatnya kondisi wilayah yang aman, nyaman, tertib, dan tenteram	11. Cakupan ketentraman & ketertiban masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sejahtera	Misi 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah	Tujuan 4.1. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang tangguh		**5. Indeks Kinerja Pembangunan Infrastruktur Wilayah**	Indeks	57,40	61,20	62,81	64,93	67,03	69,08	70,38
			Sasaran 4.1.1. Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur dasar	12. Indeks Kinerja Pembangunan Infrastruktur Dasar	Indeks	60,47	65,73	67,76	70,48	73,18	75,89	77,58
			Sasaran 4.1.2. Meningkatnya	13. Indeks Kinerja	Indeks	50,22	50,65	51,26	51,96	52,67	53,17	53,57

Pokok Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pemenuhan hunian layak dan berkualitas bagi seluruh masyarakat	Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman								
Nyaman	Misi 5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana	Tujuan 5.1. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan daerah		**6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	Indeks	69,40	75,07	75,09	75,10	75,12	75,13	75,14
				7. Indeks Risiko Bencana	Indeks	97,42	95,58 - 94,07	94,82 – 92,67	94,06 – 91,28	93,30 – 89,80	92,53 – 88,49	91,77 – 87,09
			Sasaran 5.1.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam	14. Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	54,88	73,8	73,82	73,84	73,86	73,88	73,9
				15. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	92,06	86,62	86,63	86,64	86,65	86,66	86,67
				16. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	52,41	55,91	55,92	55,93	55,94	55,95	55,96
			Sasaran 5.1.2. Meningkatnya kapasitas daerah dan pelayanan kebencanaan yang berkualitas	17. Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,92	0,94	0,95	0,95	0,96	0,97	0,97

3.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Visi pembangunan daerah “Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera atau Magelang Anyar Gress” dapat terwujud secara efektif tepat guna dan efisien selama lima tahun ke depan apabila strategi dan arah kebijakan terumuskan secara komprehensif. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan cara tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan arah kebijakan. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Sementara itu, arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan arah kebijakan akan menjadikan pilihan strategi menjadi rasional dan konkret sehingga pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan.

Tabel 3.2
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029

Pokok Visi	Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Strategi Daerah	Arah Kebijakan Daerah
Unggul	Misi 1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing	Meningkatnya masyarakat Kabupaten Magelang yang cerdas, sehat, dan berdaya	Meningkatkan layanan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan penyediaan fasilitas pendidikan
					Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
					Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi
					Meningkatkan mutu layanan pendidikan
					Menguatkan pendidikan karakter
					Meningkatkan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan aset budaya daerah
					Meningkatkan integrasi nilai-nilai budaya dalam sistem pendidikan untuk memperkuat kesadaran dan identitas generasi muda
				Meningkatkan literasi masyarakat	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membaca
					Menciptakan inovasi kegiatan pada perpustakaan untuk memantik semangat minat baca masyarakat
					Meningkatkan penyediaan fasilitas perpustakaan secara lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
					Meningkatkan koleksi bahan pustaka baik secara cetak maupun digital
					Meningkatkan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan
				Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan

Pokok Visi	Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Strategi Daerah	Arah Kebijakan Daerah
					Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan tenaga kesehatan
					Meningkatkan layanan pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular
					Penguatan program gizi seimbang
					Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
				Meningkatkan kualitas keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Meningkatkan keikutsertaan pasangan usia subur untuk ber-KB
					Meningkatkan ketersediaan tenaga pelayanan keluarga berencana
					Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
				Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda
					Meningkatkan pengembangan olahraga secara terarah dan berkelanjutan
				Meningkatkan partisipasi perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan peran aktif dan/atau keterlibatan perempuan dalam pembangunan
					Meningkatkan perlindungan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan
					Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak
Religius			Meningkatnya pembinaan keagamaan di masyarakat	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama di masyarakat	Meningkatkan peran pemuka agama yang aktif dalam pembinaan keagamaan dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat
					Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan fasiltas keagamaan
Unggul	Misi 2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih yang didukung	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan pengelolaan administrasi	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan melalui layanan yang lebih mudah dan aksesibel

Pokok Visi	Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Strategi Daerah	Arah Kebijakan Daerah
	yang bersih dan melayani	dengan aparatur yang profesional		kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatkan pemutakhiran data kependudukan secara berkala dan terintegrasi
				Meningkatkan pengelolaan data secara terpadu dan terintegrasi	Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan dan pemanfaatan data statistik sektoral daerah
				Meningkatkan keamanan informasi melalui penguatan sistem persandian	Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan persandian dan keamanan informasi
				Meningkatkan pengelolaan kearsipan secara baku	Meningkatkan pengelolaan arsip yang sistematis, modern, dan berbasis digital
				Meningkatkan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
					Meningkatkan kualitas kebijakan ekonomi, pembangunan, serta administrasi umum kesekretariatan daerah
				Meningkatkan fasilitasi layanan lembaga legislatif	Meningkatkan dukungan terhadap tugas dan fungsi lembaga perwakilan rakyat
				Meningkatkan pelaksanaan teknis kewilayahan	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
				Meningkatkan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	Meningkatkan layanan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi
					Meningkatkan implementasi *e-Government* dan ekosistem *smart city*
			Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan di daerah	Meningkatkan kinerja perencanaan daerah	Meningkatkan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi lintas sektor
					Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah yang lebih terarah, berbasis data, dan selaras antar sektor, yang diperkuat dengan

Pokok Visi	Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Strategi Daerah	Arah Kebijakan Daerah
					pengendalian dan evaluasi yang efektif
				Meningkatkan pelaksanaan riset dan inovasi daerah	Meningkatkan kegiatan penelitian hingga pemanfataan hasil kelitbangan untuk mendukung perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga pengawasan pembangunan daerah
					Meningkatkan penerapan IPTEK dalam riset dan inovasi berbasis bukti untuk mendukung efektivitas kebijakan pembangunan daerah
				Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan penyusunan kebijakan dan koordinasi secara intensif dalam pengelolaan keuangan daerah
					Meningkatkan pengelolaan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, dan pemanfaatan aset daerah
					Meningkatkan kemandirian keuangan daerah
				Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah yang efektif	Meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat perangkat daerah dan pemerintah daerah
					Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
				Meningkatkan pengelolaan pegawai ASN dan non ASN di lingkup pemerintahan daerah	Meningkatkan manajemen ASN yang berkompetensi, profesional, dan berintegritas melalui sistem rekrutmen, pengembangan kapasitas, serta evaluasi kinerja yang berbasis merit

Pokok Visi	Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Strategi Daerah	Arah Kebijakan Daerah
					Mengoptimalkan pengembangan karier aparatur
					Mengoptimalkan pengembangan kapasitas sumber daya ASN
					Mengoptimalkan peningkatan penilaian kinerja, pembinaan, dan layanan kesejahteraan aparatur
				Meningkatkan peran desa dalam mengembangkan potensi desa secara mandiri	Meningkatkan penataan desa
					Meningkatkan sinergi dan/atau kerja sama antar desa
					Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan sumber daya desa yang berkelanjutan
					Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa serta lembaga ekonomi desa
Sejahtera	Misi 3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan	Meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah	Meningkatkan kinerja sektor pertanian dalam arti luas
					Meningkatkan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan
					Meningkatkan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)
					Meningkatkan pengembangan sektor perdagangan
					Meningkatkan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
					Meningkatkan peran koperasi untuk mendukung perekonomian lokal
					Meningkatkan pengembangan ekonomi syariah
				Meningkatkan pertumbuhan investasi di daerah	Meningkatkan investasi di daerah

Pokok Visi	Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Strategi Daerah	Arah Kebijakan Daerah
				Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatkan cakupan masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
				Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Meningkatkan kemandirian pangan daerah
				Meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas dan berkompeten	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
					Meningkatkan kompetensi tenaga kerja
					Meningkatkan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja
					Meningkatkan pelaksanaan program transmigrasi
Aman			Meningkatnya kondisi wilayah yang aman, nyaman, tertib, dan tenteram	Meningkatkan kondusifitas wilayah	Meningkatkan kualitas pelayanan keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
					Meningkatkan penguatan wawasan kebangsaan guna memperkokoh persatuan, toleransi, dan ketahanan sosial dalam menghadapi dinamika politik, isu keagamaan, serta perbedaan antar kelompok masyarakat
Sejahtera	Misi 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang tangguh	Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur dasar	Meningkatkan kinerja layanan infrastruktur pekerjaan umum dan perhubungan	Meningkatkan konektivitas wilayah dengan kondisi mantap
					Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air minum layak dan aman
					Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi
					Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan layanan sanitasi aman
					Meningkatkan penataan dan penyelenggaraan bangunan gedung
					Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungannya

Pokok Visi	Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Strategi Daerah	Arah Kebijakan Daerah
					Meningkatkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang efektif dan efisien
				Meningkatkan penataan ruang wilayah	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
				Meningkatkan administrasi kepemilikan tanah	Meningkatkan keteraturan dan kepastian administrasi kepemilikan tanah
				Meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas	Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas dan ketersediaan infrastruktur perlengkapan jalan pendukung keselamatan berlalu lintas
					Meningkatkan kelaikan kendaraan untuk mengurangi kecelakaan
				Meningkatkan layanan lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatkan sistem layanan transportasi publik yang berkualitas, efisien, dan terjangkau
			Meningkatnya pemenuhan hunian layak dan berkualitas bagi seluruh masyarakat	Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni	Meningkatkan akses dan penyediaan rumah layak huni
				Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan PSU perumahan dan permukiman	Meningkatkan pengelolaan dan ketersediaan prasarana sarana utilitas umum
				Meningkatkan penanganan kawasan permukiman kumuh	Meningkatkan keteraturan bangunan dan kualitas permukiman
Nyaman	Misi 5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan daerah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam	Meningkatkan kualitas air, udara, dan tutupan lahan	Meningkatkan ketaatan dan konservasi lingkungan hidup
					Mengoptimalkan kinerja pengelolaan sampah
				Meningkatkan adaptasi akibat perubahan iklim	Meningkatkan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk mengurangi risiko dan dampak lingkungan serta meningkatkan ketahanan wilayah

Pokok Visi	Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Strategi Daerah	Arah Kebijakan Daerah
			Meningkatnya kapasitas daerah dan pelayanan kebencanaan yang berkualitas	Meningkatkan upaya pelaksanaan manajemen kebencanaan	Meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, respons, dan pemulihan bencana

3.2.2.Penahapan Kebijakan Pembangunan Daerah Tahunan

Penahapan kebijakan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dalam implementasi RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045, di mana tema RPJPD Kabupaten Magelang pada periode I atau tahun 2025-2029 adalah "Penguatan Fondasi Kabupaten Magelang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan". Fokus kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Magelang ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 3.3
Penahapan Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2026-2030

Penahapan Kebijakan Pembangunan Daerah Tahunan				
2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
PENGUATAN FONDASI PEMBANGUNAN MAGELANG AMAN, NYAMAN, RELIGIUS, UNGGUL, DAN SEJAHTERA (Memperkuat kualitas dan daya saing sumber daya manusia, serta pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal daerah, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan lingkungan, serta transformasi digital dan perbaikan tata kelola pemerintahan)	**KONSOLIDASI FONDASI PEMBANGUNAN MAGELANG AMAN, NYAMAN, RELIGIUS, UNGGUL, DAN SEJAHTERA** (Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui penguatan keterampilan, inovasi, dan digitalisasi layanan)	**AKSELERASI PEMBANGUNAN MAGELANG AMAN, NYAMAN, RELIGIUS, UNGGUL, DAN SEJAHTERA** (Mempercepat transformasi kualitas dan daya saing sumber daya manusia, serta pembangunan perekonomian daerah, yang didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan, serta mempercepat reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan responsif)	**PEMANTAPAN PEMBANGUNAN MAGELANG AMAN, NYAMAN, RELIGIUS, UNGGUL, DAN SEJAHTERA** (Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata melalui peningkatan kapasitas saing sumber daya manusia dan pemantapan perekonoman daerah, dengan memantapkan pembangunan berkelanjutan dan menjaga keseimbangan sumber daya alam, serta mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif)	**MEWUJUDKAN MAGELANG AMAN, NYAMAN, RELIGIUS, UNGGUL, DAN SEJAHTERA** (Mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang unggul, religius, dan sejahtera, dengan memantapkan perekonomian daerah yang tangguh dan berdaya saing, serta didukung oleh pemantapan pembangunan berkelanjutan, dan memantapkan tata kelola pemerintahan yang modern, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat)

Secara lebih detail, dalam rangka mewujudkan visi jangka menengah "Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera" atau Magelang

Anyar Gress, penahapan pembangunan daerah Kabupaten Magelang pada periode 2025–2029 difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia unggul, penguatan struktur ekonomi berbasis potensi lokal, percepatan infrastruktur yang inklusif dan ramah lingkungan, pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, modern, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Pada tahun pertama atau tahun 2026, dengan tema Penguatan Fondasi Pembangunan Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera, kebijakan diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan kerja; mendorong kinerja sektor pertanian sebagai basis ketahanan pangan dalam rangka mendukung posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional; memperkuat ekonomi lokal melalui pemberdayaan usaha masyarakat; serta membangun infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas wilayah dan pelayanan publik. Seluruh upaya ini sejalan dengan strategi penanggulangan kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin, yang dilaksanakan secara kolaboratif dan multisektor, diiringi peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan.

Tahun kedua atau tahun 2027, tema pembangunan yang diusung adalah Konsolidasi Fondasi Pembangunan Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera. Kebijakan difokuskan pada peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui inovasi dan literasi digital; pengembangan pariwisata berkelanjutan yang terintegrasi dengan pelestarian budaya; penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi syariah; peningkatan peran UMKM; optimalisasi investasi daerah; serta pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat miskin dan optimalisasi kantong-kantong kemiskinan. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada layanan yang inklusif dan ramah lingkungan, sementara tata kelola pemerintahan terus diperbaiki melalui penguatan sistem layanan publik berbasis elektronik dan integrasi data.

Tahun ketiga atau tahun 2028, melalui tema Akselerasi Pembangunan Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera, pembangunan menekankan percepatan transformasi ekonomi berbasis potensi desa dan industri ramah lingkungan (industri hijau); peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menghadapi era digital; perluasan jaringan infrastruktur yang

inklusif; percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan responsif; serta pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup difokuskan pada pengendalian pencemaran, penguatan ruang terbuka hijau, serta mitigasi risiko bencana secara terpadu.

Pada tahun keempat atau tahun 2029, tema pembangunan adalah Pemantapan Pembangunan Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera. Kebijakan diarahkan pada pemerataan hasil pembangunan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemantapan perekonomian yang tangguh, penguatan konektivitas wilayah, serta pengentasan kemiskinan melalui pemantapan program pengurangan beban dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin untuk mewujudkan masyarakat yang maju. Keberlanjutan lingkungan semakin diperkuat dengan menjaga keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Tata kelola pemerintahan diarahkan untuk adaptif terhadap dinamika global, inovatif dalam pelayanan publik, dan transparan dalam pengambilan keputusan.

Pada tahun terakhir di periode ini atau tahun 2030, tema pembangunan adalah Mewujudkan Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera. Kebijakan diarahkan untuk memantapkan seluruh capaian periode sebelumnya, memastikan masyarakat yang unggul, religius, dan sejahtera, dengan perekonomian yang berdaya saing tinggi, pembangunan yang ramah lingkungan, tata kelola pemerintahan modern, serta pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan sebagai bagian dari kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 3.4
Keterkaitan Tema Pembangunan, Misi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Magelang
Tahun 2026-2030

Tema	Misi	Arah Kebijakan Daerah
Tahun 2026 PENGUATAN FONDASI PEMBANGUNAN MAGELANG AMAN, NYAMAN, RELIGIUS, UNGGUL, DAN SEJAHTERA (Memperkuat kualitas dan daya saing sumber daya manusia, serta pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal daerah, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan lingkungan, serta transformasi digital dan perbaikan tata kelola pemerintahan)	Misi 1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan penyediaan fasilitas pendidikan
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
		Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi
		Meningkatkan mutu layanan pendidikan
		Menguatkan pendidikan karakter
		Meningkatkan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan aset budaya daerah
		Meningkatkan integrasi nilai-nilai budaya dalam sistem pendidikan untuk memperkuat kesadaran dan identitas generasi muda
		Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membaca
		Menciptakan inovasi kegiatan pada perpustakaan untuk memantik semangat minat baca masyarakat
		Meningkatkan penyediaan fasilitas perpustakaan secara lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
		Meningkatkan koleksi bahan pustaka baik secara cetak maupun digital
		Meningkatkan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan tenaga kesehatan
		Meningkatkan layanan pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular
		Penguatan program gizi seimbang
		Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
		Meningkatkan keikutsertaan pasangan usia subur untuk ber-KB
		Meningkatkan ketersediaan tenaga pelayanan keluarga berencana
		Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
		Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda
		Meningkatkan pengembangan olahraga secara terarah dan berkelanjutan
		Meningkatkan peran aktif dan/atau keterlibatan perempuan dalam pembangunan
		Meningkatkan perlindungan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan
		Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak
		Meningkatkan peran pemuka agama yang aktif dalam pembinaan keagamaan dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat

Tema	Misi	Arah Kebijakan Daerah
		Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan fasiltas keagamaan
	Misi 2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan melalui layanan yang lebih mudah dan aksesibel
		Meningkatkan pemutakhiran data kependudukan secara berkala dan terintegrasi
		Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan dan pemanfaatan data statistik sektoral daerah
		Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan persandian dan keamanan informasi
		Meningkatkan pengelolaan arsip yang sistematis, modern, dan berbasis digital
		Meningkatkan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
		Meningkatkan kualitas kebijakan ekonomi, pembangunan, serta administrasi umum kesekretariatan daerah
		Meningkatkan dukungan terhadap tugas dan fungsi lembaga perwakilan rakyat
		Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
		Meningkatkan layanan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi
		Meningkatkan implementasi e-Government dan ekosistem smart city
		Meningkatkan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi lintas sektor
		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah yang lebih terarah, berbasis data, dan selaras antar sektor, yang diperkuat dengan pengendalian dan evaluasi yang efektif
		Meningkatkan kegiatan penelitian hingga pemanfataan hasil kelitbangan untuk mendukung perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga pengawasan pembangunan daerah
		Meningkatkan penerapan IPTEK dalam riset dan inovasi berbasis bukti untuk mendukung efektivitas kebijakan pembangunan daerah
		Meningkatkan penyusunan kebijakan dan koordinasi secara intensif dalam pengelolaan keuangan daerah
		Meningkatkan pengelolaan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, dan pemanfaatan aset daerah
		Meningkatkan kemandirian keuangan daerah
		Meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat perangkat daerah dan pemerintah daerah
		Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tema	Misi	Arah Kebijakan Daerah
		Meningkatkan manajemen ASN yang berkompetensi, profesional, dan berintegritas melalui sistem rekrutmen, pengembangan kapasitas, serta evaluasi kinerja yang berbasis merit
		Meningkatkan pengembangan karier aparatur
		Meningkatkan pengembangan kapasitas sumber daya ASN
		Meningkatkan peningkatan penilaian kinerja, pembinaan, dan layanan kesejahteraan aparatur
		Meningkatkan penataan desa
		Meningkatkan sinergi dan/atau kerja sama antar desa
		Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan sumber daya desa yang berkelanjutan
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa serta lembaga ekonomi desa
	Misi 3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan kinerja sektor pertanian dalam arti luas
		Meningkatkan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan
		Meningkatkan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)
		Meningkatkan pengembangan sektor perdagangan
		Meningkatkan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
		Meningkatkan peran koperasi untuk mendukung perekonomian lokal
		Meningkatkan pengembangan ekonomi syariah
		Meningkatkan investasi di daerah
		Meningkatkan cakupan masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
		Meningkatkan kemandirian pangan daerah
		Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
		Meningkatkan kompetensi tenaga kerja
		Meningkatkan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja
		Meningkatkan pelaksanaan program transmigrasi
		Meningkatkan kualitas pelayanan keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
		Meningkatkan penguatan wawasan kebangsaan guna memperkokoh persatuan, toleransi, dan ketahanan sosial dalam menghadapi dinamika politik, isu keagamaan, serta perbedaan antar kelompok masyarakat
	Misi 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah	Meningkatkan konektivitas wilayah dengan kondisi mantap
		Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air minum layak dan aman
		Maningkatkan pengelolaan jaringan irigasi

Tema	Misi	Arah Kebijakan Daerah
		Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan layanan sanitasi aman
		Meningkatkan penataan dan penyelenggaraan bangunan gedung
		Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungannya
		Meningkatkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang efektif dan efisien
		Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
		Meningkatkan keteraturan dan kepastian administrasi kepemilikan tanah
		Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas dan ketersediaan infrastruktur perlengkapan jalan pendukung keselamatan berlalu lintas
		Meningkatkan kelaikan kendaraan untuk mengurangi kecelakaan
		Meningkatkan sistem layanan transportasi publik yang berkualitas, efisien, dan terjangkau
		Meningkatkan akses dan penyediaan rumah layak huni
		Meningkatkan pengelolaan dan ketersediaan prasarana sarana utilitas umum
		Meningkatkan keteraturan bangunan dan kualitas permukiman
	Misi 5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana	Meningkatkan ketaatan dan konservasi lingkungan hidup
		Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah
		Meningkatkan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk mengurangi risiko dan dampak lingkungan serta meningkatkan ketahanan wilayah
		Meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, respons, dan pemulihan bencana
Tahun 2027 KONSOLIDASI FONDASI PEMBANGUNAN MAGELANG AMAN, NYAMAN, RELIGIUS, UNGGUL, DAN SEJAHTERA (Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui penguatan keterampilan, inovasi, dan digitalisasi layanan)	Misi 1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia	Mengembangkan penyediaan fasilitas pendidikan
		Mengembangkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
		Mengembangkan kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi
		Mengembangkan mutu layanan pendidikan
		Mengembangkan pendidikan karakter
		Mengembangkan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan aset budaya daerah
		Mengembangkan integrasi nilai-nilai budaya dalam sistem pendidikan untuk memperkuat kesadaran dan identitas generasi muda
		Mengembangkan kesadaran masyarakat untuk membaca
		Mengembangkan inovasi kegiatan pada perpustakaan untuk memantik semangat minat baca masyarakat
		Mengembangkan penyediaan fasilitas perpustakaan secara lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
		Mengembangkan koleksi bahan pustaka baik secara cetak maupun digital
		Mengembangkan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan
		Mengembangkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan

Tema	Misi	Arah Kebijakan Daerah
		Mengembangkan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan tenaga kesehatan
		Mengembangkan layanan pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular
		Mengembangkan program gizi seimbang
		Memperkuat kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
		Memperkuat keikutsertaan pasangan usia subur untuk ber-KB
		Memperkuat ketersediaan tenaga pelayanan keluarga berencana
		Memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga
		Mengembangkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda
		Memperkuat pengembangan olahraga secara terarah dan berkelanjutan
		Mengembangkan peran aktif dan/atau keterlibatan perempuan dalam pembangunan
		Mengembangkan perlindungan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan
		Mengembangkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak
		Memperkuat peran pemuka agama yang aktif dalam pembinaan keagamaan dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat
		Mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan fasiltas keagamaan
	Misi 2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani	Mengoptimalkan kepemilikan dokumen kependudukan melalui layanan yang lebih mudah dan aksesibel
		Mengoptimalkan pemutakhiran data kependudukan secara berkala dan terintegrasi
		Memperkuat koordinasi antar instansi dalam pengelolaan dan pemanfaatan data statistik sektoral daerah
		Memperkuat koordinasi antar instansi dalam pengelolaan persandian dan keamanan informasi
		Mengembangkan pengelolaan arsip yang sistematis, modern, dan berbasis digital
		Mengembangkan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
		Mengembangkan kualitas kebijakan ekonomi, pembangunan, serta administrasi umum kesekretariatan daerah
		Memperkuat dukungan terhadap tugas dan fungsi lembaga perwakilan rakyat
		Mengembangkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
		Mengembangkan layanan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi
		Mengembangkan implementasi e-Government dan ekosistem smart city

Tema	Misi	Arah Kebijakan Daerah
		Mengembangkan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi lintas sektor
		Mengembangkan kualitas dokumen perencanaan daerah yang lebih terarah, berbasis data, dan selaras antar sektor, yang diperkuat dengan pengendalian dan evaluasi yang efektif
		Mengembangkan kegiatan penelitian hingga pemanfataan hasil kelitbangan untuk mendukung perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga pengawasan pembangunan daerah
		Mengembangkan penerapan IPTEK dalam riset dan inovasi berbasis bukti untuk mendukung efektivitas kebijakan pembangunan daerah
		Mengembangkan penyusunan kebijakan dan koordinasi secara intensif dalam pengelolaan keuangan daerah
		Mengembangkan pengelolaan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, dan pemanfaatan aset daerah
		Mengembangkan kemandirian keuangan daerah
		Mengembangkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat perangkat daerah dan pemerintah daerah
		Mengembangkan kualitas perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Mengembangkan manajemen ASN yang berkompetensi, profesional, dan berintegritas melalui sistem rekrutmen, pengembangan kapasitas, serta evaluasi kinerja yang berbasis merit
		Optimalisasi pengembangan karier aparatur
		Optimalisasi pengembangan kapasitas sumber daya ASN
		Optimalisasi peningkatan penilaian kinerja, pembinaan, dan layanan kesejahteraan aparatur
		Mengembangkan penataan desa
		Mengembangkan sinergi dan/atau kerja sama antar desa
		Mengembangkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan sumber daya desa yang berkelanjutan
		Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa serta lembaga ekonomi desa
	Misi 3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Mengembangkan kinerja sektor pertanian dalam arti luas
		Memperkuat pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan
		Memperkuat pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)
		Memperkuat pengembangan sektor perdagangan
		Memperkuat pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Tema	Misi	Arah Kebijakan Daerah
		Mengembangkan peran koperasi untuk mendukung perekonomian lokal
		Meningkatkan ekonomi syariah
		Mengembangkan investasi di daerah
		Mengembangkan cakupan masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
		Mengembangkan kemandirian pangan daerah
		Mengembangkan penyerapan tenaga kerja
		Mengembangkan kompetensi tenaga kerja
		Mengembangkan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja
		Mengembangkan pelaksanaan program transmigrasi
		Mengembangkan kualitas pelayanan keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
		Mengembangkanketahanan sosial dalam menghadapi dinamika politik, isu keagamaan, serta perbedaan antar kelompok masyarakat
	Misi 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah	Mengembangkan konektivitas wilayah dengan kondisi mantap
		Mengembangkan pengelolaan dan pengembangan sistem air minum layak dan aman
		Mengembangkan pengelolaan jaringan irigasi
		Mengembangkan pengelolaan dan pengembangan layanan sanitasi aman
		Mengembangkan penataan dan penyelenggaraan bangunan gedung
		Mengoptimalkan penataan bangunan dan lingkungannya
		Mengembangkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang efektif dan efisien
		Mengembangkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
		Mengoptimalkan keteraturan dan kepastian administrasi kepemilikan tanah
		Mengembangkan manajemen rekayasa lalu lintas dan ketersediaan infrastruktur perlengkapan jalan pendukung keselamatan berlalu lintas
		Mengembangkan kelaikan kendaraan untuk mengurangi kecelakaan
		Mengembangkan sistem layanan transportasi publik yang berkualitas, efisien, dan terjangkau
		Mengembangkan akses dan penyediaan rumah layak huni
		Mengembangkan pengelolaan dan ketersediaan prasarana sarana utilitas umum
		Mengembangkan keteraturan bangunan dan kualitas permukiman
	Misi 5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam	Mengembangkan ketaatan dan konservasi lingkungan hidup
		Mengembangkan kinerja pengelolaan sampah
		Memperkuat mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk mengurangi risiko dan dampak lingkungan serta meningkatkan ketahanan wilayah

Tema	Misi	Arah Kebijakan Daerah
	(SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana	Memperkuat kesiapsiagaan, mitigasi, respons, dan pemulihan bencana
Tahun 2028 AKSELERASI PEMBANGUNAN MAGELANG AMAN, NYAMAN, RELIGIUS, UNGGUL, DAN SEJAHTERA (Mempercepat transformasi kualitas dan daya saing sumber daya manusia, serta pembangunan perekonomian daerah, yang didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan, serta mempercepat reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan responsif)	Misi 1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia	Mendorong peningkatan penyediaan fasilitas pendidikan
		Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
		Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi
		Mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan
		Mendorong peningkatan pendidikan karakter
		Mendorong peningkatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan aset budaya daerah
		Mendorong peningkatan integrasi nilai-nilai budaya dalam sistem pendidikan untuk memperkuat kesadaran dan identitas generasi muda
		Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk membaca
		Mendorong peningkatan inovasi kegiatan pada perpustakaan untuk memantik semangat minat baca masyarakat
		Mendorong peningkatan penyediaan fasilitas perpustakaan secara lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
		Mendorong peningkatan koleksi bahan pustaka baik secara cetak maupun digital
		Mendorong peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan
		Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
		Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan tenaga kesehatan
		Mendorong peningkatan layanan pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular
		Mendorong peningkatan program gizi seimbang
		Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
		Mendorong peningkatan keikutsertaan pasangan usia subur untuk ber-KB
		Mendorong peningkatan ketersediaan tenaga pelayanan keluarga berencana
		Mendorong peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
		Mendorong peningkatan pembinaan dan pemberdayaan pemuda
		Mendorong peningkatan pengembangan olahraga secara terarah dan berkelanjutan
		Mendorong peningkatan peran aktif dan/atau keterlibatan perempuan dalam pembangunan

Tema	Misi	Arah Kebijakan Daerah
		Mendorong peningkatan perlindungan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan
		Mendorong peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak
		Mendorong peningkatan peran pemuka agama yang aktif dalam pembinaan keagamaan dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat
		Mendorong peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan fasiltas keagamaan
	Misi 2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani	Mendorong peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan melalui layanan yang lebih mudah dan aksesibel
		Mendorong peningkatan pemutakhiran data kependudukan secara berkala dan terintegrasi
		Mendorong peningkatan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan dan pemanfaatan data statistik sektoral daerah
		Mendorong peningkatan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan persandian dan keamanan informasi
		Mendorong peningkatan pengelolaan arsip yang sistematis, modern, dan berbasis digital
		Mendorong peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
		Mendorong peningkatan kualitas kebijakan ekonomi, pembangunan, serta administrasi umum kesekretariatan daerah
		Mendorong peningkatan dukungan terhadap tugas dan fungsi lembaga perwakilan rakyat
		Mendorong peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
		Mendorong peningkatan layanan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi
		Mendorong peningkatan implementasi e-Government dan ekosistem smart city
		Mendorong peningkatan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi lintas sektor
		Mendorong peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah yang lebih terarah, berbasis data, dan selaras antar sektor, yang diperkuat dengan pengendalian dan evaluasi yang efektif
		Mendorong peningkatan kegiatan penelitian hingga pemanfataan hasil kelitbangan untuk mendukung perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga pengawasan pembangunan daerah
		Mendorong peningkatan penerapan IPTEK dalam riset dan inovasi berbasis bukti untuk mendukung efektivitas kebijakan pembangunan daerah
		Mendorong peningkatan penyusunan kebijakan dan koordinasi secara intensif dalam pengelolaan keuangan daerah

Tema	Misi	Arah Kebijakan Daerah
		Mendorong peningkatan pengelolaan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, dan pemanfaatan aset daerah
		Mendorong peningkatan kemandirian keuangan daerah
		Mendorong peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat perangkat daerah dan pemerintah daerah
		Mendorong peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Mendorong peningkatan manajemen ASN yang berkompetensi, profesional, dan berintegritas melalui sistem rekrutmen, pengembangan kapasitas, serta evaluasi kinerja yang berbasis merit
		Mendorong peningkatan pengembangan karier aparatur
		Mendorong peningkatan pengembangan kapasitas sumber daya ASN
		Mendorong peningkatan peningkatan penilaian kinerja, pembinaan, dan layanan kesejahteraan aparatur
		Mendorong peningkatan penataan desa
		Mendorong peningkatan sinergi dan/atau kerja sama antar desa
		Mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan sumber daya desa yang berkelanjutan
		Mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa serta lembaga ekonomi desa
	Misi 3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Mendorong peningkatan kinerja sektor pertanian dalam arti luas
		Mendorong peningkatan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan
		Mendorong peningkatan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)
		Mendorong peningkatan pengembangan sektor perdagangan
		Mendorong peningkatan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
		Mendorong peningkatan peran koperasi untuk mendukung perekonomian lokal
		Mendorong pengembangan ekonomi syariah
		Mendorong peningkatan investasi di daerah
		Mendorong peningkatan cakupan masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
		Mendorong peningkatan kemandirian pangan daerah
		Mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja
		Mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja
		Mendorong peningkatan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja
		Mendorong peningkatan pelaksanaan program transmigrasi

Tema	Misi	Arah Kebijakan Daerah
		Mendorong peningkatan kualitas pelayanan keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
		Mendorong peningkatan penguatan wawasan kebangsaan guna memperkokoh persatuan, toleransi, dan ketahanan sosial dalam menghadapi dinamika politik, isu keagamaan, serta perbedaan antar kelompok masyarakat
	Misi 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah	Mendorong peningkatan konektivitas wilayah dengan kondisi mantap
		Mendorong peningkatan pengelolaan dan pengembangan sistem air minum layak dan aman
		Mendorong peningkatan pengelolaan jaringan irigasi
		Mendorong peningkatan pengelolaan dan pengembangan layanan sanitasi aman
		Mendorong peningkatan penataan dan penyelenggaraan bangunan gedung
		Mendorong peningkatan penataan bangunan dan lingkungannya
		Mendorong peningkatan penyelenggaraan jasa konstruksi yang efektif dan efisien
		Mendorong peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
		Mendorong peningkatan keteraturan dan kepastian administrasi kepemilikan tanah
		Mendorong peningkatan manajemen rekayasa lalu lintas dan ketersediaan infrastruktur perlengkapan jalan pendukung keselamatan berlalu lintas
		Mendorong peningkatan kelaikan kendaraan untuk mengurangi kecelakaan
		Mendorong peningkatan sistem layanan transportasi publik yang berkualitas, efisien, dan terjangkau
		Mendorong peningkatan akses dan penyediaan rumah layak huni
		Mendorong peningkatan pengelolaan dan ketersediaan prasarana sarana utilitas umum
		Mendorong peningkatan keteraturan bangunan dan kualitas permukiman
	Misi 5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana	Mendorong peningkatan ketaatan dan konservasi lingkungan hidup
		Mendorong peningkatan kinerja pengelolaan sampah
		Mendorong peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk mengurangi risiko dan dampak lingkungan serta meningkatkan ketahanan wilayah
		Mendorong peningkatan kesiapsiagaan, mitigasi, respons, dan pemulihan bencana
Tahun 2029 PEMANTAPAN PEMBANGUNAN MAGELANG AMAN, NYAMAN, RELIGIUS, UNGGUL, DAN	Misi 1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada	Memantapkan penyediaan fasilitas pendidikan
		Memantapkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
		Memperkuat kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi

Tema	Misi	Arah Kebijakan Daerah
SEJAHTERA (Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata melalui peningkatan kapasitas saing sumber daya manusia dan pemantapan perekonoman daerah, dengan memantapkan pembangunan berkelanjutan dan menjaga keseimbangan sumber daya alam, serta mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif)	pembangunan Sumber Daya Manusia	Memantapkan mutu layanan pendidikan
		Memperkuat pendidikan karakter
		Memperkuat perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan aset budaya daerah
		Memperkuat integrasi nilai-nilai budaya dalam sistem pendidikan untuk memperkuat kesadaran dan identitas generasi muda
		Memperkuat kesadaran masyarakat untuk membaca
		Memperkuat inovasi kegiatan pada perpustakaan untuk memantik semangat minat baca masyarakat
		Memperkuat penyediaan fasilitas perpustakaan secara lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
		Memperkaya koleksi bahan pustaka baik secara cetak maupun digital
		Memperkuat kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan
		Memperkuat kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
		Memperkuat kuantitas dan kualitas tenaga medis dan tenaga kesehatan
		Memperkuat layanan pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular
		Memperkuat program gizi seimbang
		Memperkuat kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
		Memperkuat keikutsertaan pasangan usia subur untuk ber-KB
		Memperkuat ketersediaan tenaga pelayanan keluarga berencana
		Memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga
		Memantapkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda
		Memantapkan pengembangan olahraga secara terarah dan berkelanjutan
		Memperkuat peran aktif dan/atau keterlibatan perempuan dalam pembangunan
		Memperkuat perlindungan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan
		Memperkuat pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak
		Memperkuat peran pemuka agama yang aktif dalam pembinaan keagamaan dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat
		Memantapkan pemanfaatan dan pengelolaan fasiltas keagamaan
	Misi 2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani	Memperkuat kepemilikan dokumen kependudukan melalui layanan yang lebih mudah dan aksesibel
		Memperkuat pemutakhiran data kependudukan secara berkala dan terintegrasi
		Memantapkan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan dan pemanfaatan data statistik sektoral daerah

Tema	Misi	Arah Kebijakan Daerah
		Menantapkan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan persandian dan keamanan informasi
		Memantapkan pengelolaan arsip yang sistematis, modern, dan berbasis digital
		Memantapkan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
		Memantapkan kualitas kebijakan ekonomi, pembangunan, serta administrasi umum kesekretariatan daerah
		Memantapkan dukungan terhadap tugas dan fungsi lembaga perwakilan rakyat
		Memantapkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
		Memantapkan layanan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi
		Memantapkan implementasi e-Government dan ekosistem smart city
		Memantapkan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi lintas sektor
		Memantapkan kualitas dokumen perencanaan daerah yang lebih terarah, berbasis data, dan selaras antar sektor, yang diperkuat dengan pengendalian dan evaluasi yang efektif
		Memantapkan kegiatan penelitian hingga pemanfataan hasil kelitbangan untuk mendukung perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga pengawasan pembangunan daerah
		Memantapkan penerapan IPTEK dalam riset dan inovasi berbasis bukti untuk mendukung efektivitas kebijakan pembangunan daerah
		Memantapkan penyusunan kebijakan dan koordinasi secara intensif dalam pengelolaan keuangan daerah
		Memantapkan pengelolaan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, dan pemanfaatan aset daerah
		Memantapkan kemandirian keuangan daerah
		Memantapkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat perangkat daerah dan pemerintah daerah
		Memantapkan kualitas perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Memantapkan manajemen ASN yang berkompetensi, profesional, dan berintegritas melalui sistem rekrutmen, pengembangan kapasitas, serta evaluasi kinerja yang berbasis merit
		Memantapkan pengembangan karier aparatur
		Memantapkan pengembangan kapasitas sumber daya ASN
		Memantapkan peningkatan penilaian kinerja, pembinaan, dan layanan kesejahteraan aparatur

Tema	Misi	Arah Kebijakan Daerah
		Memantapkan penataan desa
		Memantapkan sinergi dan/atau kerja sama antar desa
		Memantapkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan sumber daya desa yang berkelanjutan
		Memantapkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa serta lembaga ekonomi desa
	Misi 3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Memantapkan kinerja sektor pertanian dalam arti luas
		Memantapkan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan
		Memantapkan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)
		Memantapkan pengembangan sektor perdagangan
		Memantapkan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
		Memantapkan peran koperasi untuk mendukung perekonomian lokal
		Memantapkan pengembangan ekonomi syariah
		Memantapkan investasi di daerah
		Memantapkan cakupan masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
		Memantapkan kemandirian pangan daerah
		Memantapkan penyerapan tenaga kerja
		Memantapkan kompetensi tenaga kerja
		Memantapkan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja
		Memantapkan pelaksanaan program transmigrasi
		Memantapkan kualitas pelayanan keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
		Memantapkan penguatan wawasan kebangsaan guna memperkokoh persatuan, toleransi, dan ketahanan sosial dalam menghadapi dinamika politik, isu keagamaan, serta perbedaan antar kelompok masyarakat
	Misi 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah	Memantapkan konektivitas wilayah dengan kondisi mantap
		Memantapkan pengelolaan dan pengembangan sistem air minum layak dan aman
		Memantapkan pengelolaan jaringan irigasi
		Memantapkan pengelolaan dan pengembangan layanan sanitasi aman
		Memantapkan penataan dan penyelenggaraan bangunan gedung
		Memantapkan penataan bangunan dan lingkungannya
		Memantapkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang efektif dan efisien
		Memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
		Memantapkan keteraturan dan kepastian administrasi kepemilikan tanah

Tema	Misi	Arah Kebijakan Daerah
		Memantapkan manajemen rekayasa lalu lintas dan ketersediaan infrastruktur perlengkapan jalan pendukung keselamatan berlalu lintas
		Memantapkan kelaikan kendaraan untuk mengurangi kecelakaan
		Memantapkan sistem layanan transportasi publik yang berkualitas, efisien, dan terjangkau
		Memantapkan akses dan penyediaan rumah layak huni
		Memantapkan pengelolaan dan ketersediaan prasarana sarana utilitas umum
		Memantapkan keteraturan bangunan dan kualitas permukiman
	Misi 5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana	Memantapkan ketaatan dan konservasi lingkungan hidup
		Memantapkan kinerja pengelolaan sampah
		Memantapkan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk mengurangi risiko dan dampak lingkungan serta meningkatkan ketahanan wilayah
		Memantapkan kesiapsiagaan, mitigasi, respons, dan pemulihan bencana
Tahun 2030 MEWUJUDKAN MAGELANG AMAN, NYAMAN, RELIGIUS, UNGGUL, DAN SEJAHTERA (Mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang unggul, religius, dan sejahtera, dengan memantapkan perekonomian daerah yang tangguh dan berdaya saing, serta didukung oleh pemantapan pembangunan berkelanjutan, dan memantapkan tata kelola pemerintahan yang modern, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat)	Misi 1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia	Terwujudnya penyediaan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan merata
		Terwujudnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
		Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi
		Terwujudnya mutu layanan pendidikan
		Terwujudnya pendidikan karakter
		Terwujudnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan aset budaya daerah
		Terwujudnya integrasi nilai-nilai budaya dalam sistem pendidikan untuk memperkuat kesadaran dan identitas generasi muda
		Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk membaca
		Terwujudnya inovasi kegiatan pada perpustakaan untuk memantik semangat minat baca masyarakat
		Terwujudnya penyediaan fasilitas perpustakaan secara lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
		Terwujudnya peningkatan koleksi bahan pustaka baik secara cetak maupun digital
		Terwujudnya kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan
		Terwujudnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
		Terwujudnya kuantitas dan kualitas tenaga medis dan tenaga kesehatan
		Terwujudnya layanan pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular
		Terwujudnya program gizi seimbang
		Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat

Tema	Misi	Arah Kebijakan Daerah
		Terwujudnya keikutsertaan pasangan usia subur untuk ber-KB
		Terwujudnya ketersediaan tenaga pelayanan keluarga berencana
		Terwujudnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga
		Terwujudnya pembinaan dan pemberdayaan pemuda
		Terwujudnya pengembangan olahraga secara terarah dan berkelanjutan
		Terwujudnya peran aktif dan/atau keterlibatan perempuan dalam pembangunan
		Terwujudnya perlindungan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan
		Terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak
		Terwujudnya peran pemuka agama yang aktif dalam pembinaan keagamaan dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat
		Terwujudnya pemanfaatan dan pengelolaan fasiltas keagamaan
	Misi 2. Akselerasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani	Terwujudnya kepemilikan dokumen kependudukan melalui layanan yang lebih mudah dan aksesibel
		Terwujudnya pemutakhiran data kependudukan secara berkala dan terintegrasi
		Terwujudnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan dan pemanfaatan data statistik sektoral daerah
		Terwujudnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan persandian dan keamanan informasi
		Terwujudnya pengelolaan arsip yang sistematis, modern, dan berbasis digital
		Terwujudnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
		Terwujudnya kualitas kebijakan ekonomi, pembangunan, serta administrasi umum kesekretariatan daerah
		Terwujudnya dukungan terhadap tugas dan fungsi lembaga perwakilan rakyat
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
		Terwujudnya layanan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi
		Terwujudnya implementasi e-Government dan ekosistem smart city
		Terwujudnya sinkronisasi dan efektivitas koordinasi lintas sektor
		Terwujudnya kualitas dokumen perencanaan daerah yang lebih terarah, berbasis data, dan selaras antar sektor, yang diperkuat dengan pengendalian dan evaluasi yang efektif
		Terwujudnya kegiatan penelitian hingga pemanfataan hasil kelitbangan untuk mendukung perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga pengawasan pembangunan daerah

Tema	Misi	Arah Kebijakan Daerah
		Terwujudnya penerapan IPTEK dalam riset dan inovasi berbasis bukti untuk mendukung efektivitas kebijakan pembangunan daerah
		Terwujudnya penyusunan kebijakan dan koordinasi secara intensif dalam pengelolaan keuangan daerah
		Terwujudnya pengelolaan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, dan pemanfaatan aset daerah
		Terwujudnya kemandirian keuangan daerah
		Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat perangkat daerah dan pemerintah daerah
		Terwujudnya kualitas perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Terwujudnya manajemen ASN yang berkompetensi, profesional, dan berintegritas melalui sistem rekrutmen, pengembangan kapasitas, serta evaluasi kinerja yang berbasis merit
		Terwujudnya pengembangan karier aparatur
		Terwujudnya pengembangan kapasitas sumber daya ASN
		Terwujudnya peningkatan penilaian kinerja, pembinaan, dan layanan kesejahteraan aparatur
		Terwujudnya penataan desa
		Terwujudnya sinergi dan/atau kerja sama antar desa
		Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan sumber daya desa yang berkelanjutan
		Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa serta lembaga ekonomi desa
	Misi 3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya kinerja sektor pertanian dalam arti luas
		Terwujudnya pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan
		Terwujudnya pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)
		Terwujudnya pengembangan sektor perdagangan
		Terwujudnya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
		Terwujudnya peran koperasi untuk mendukung perekonomian lokal
		Terwujudnya pengembangan ekonomi syariah
		Terwujudnya investasi di daerah
		Terwujudnya cakupan masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
		Terwujudnya kemandirian pangan daerah
		Terwujudnya penyerapan tenaga kerja

Tema	Misi	Arah Kebijakan Daerah
		Terwujudnya kompetensi tenaga kerja
		Terwujudnya hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja
		Terwujudnya pelaksanaan program transmigrasi
		Terwujudnya kualitas pelayanan keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
		Terwujudnya penguatan wawasan kebangsaan guna memperkokoh persatuan, toleransi, dan ketahanan sosial dalam menghadapi dinamika politik, isu keagamaan, serta perbedaan antar kelompok masyarakat
	Misi 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah	Terwujudnya konektivitas wilayah dengan kondisi mantap
		Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan sistem air minum layak dan aman
		Terwujudnya pengelolaan jaringan irigasi
		Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan layanan sanitasi aman
		Terwujudnya penataan dan penyelenggaraan bangunan gedung
		Terwujudnya penataan bangunan dan lingkungannya
		Terwujudnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang efektif dan efisien
		Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
		Terwujudnya keteraturan dan kepastian administrasi kepemilikan tanah
		Terwujudnya manajemen rekayasa lalu lintas dan ketersediaan infrastruktur perlengkapan jalan pendukung keselamatan berlalu lintas
		Terwujudnya kelaikan kendaraan untuk mengurangi kecelakaan
		Terwujudnya sistem layanan transportasi publik yang berkualitas, efisien, dan terjangkau
		Terwujudnya akses dan penyediaan rumah layak huni
		Terwujudnya pengelolaan dan ketersediaan prasarana sarana utilitas umum
		Terwujudnya keteraturan bangunan dan kualitas permukiman
	Misi 5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana	Terwujudnya ketaatan dan konservasi lingkungan hidup
		Terwujudnya kinerja pengelolaan sampah
		Terwujudnya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk mengurangi risiko dan dampak lingkungan serta meningkatkan ketahanan wilayah
		Terwujudnya kesiapsiagaan, mitigasi, respons, dan pemulihan bencana

3.2.3.Program Prioritas Daerah

Program prioritas dihasilkan dari *cascading* kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan *outcome* serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya. Program prioritas disusun untuk mengarahkan dan memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirumuskan tidak hanya bersifat kualitatif/konseptual, namun dapat diimplementasikan secara nyata dengan perangkat daerah penanggungjawab yang melekat pada program tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah terkait. Program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 mengacu pada tujuh Program Unggulan Kepala Daerah terpilih yang disebut dengan Sapta Cipta. Ketujuh Program Unggulan yang dilakukan mulai dari tahun pertama dan diprioritaskan tersebut meliputi:

1. ***Pinter Ngaji, Pinter Sekolah Bocahe*** (misi 1)
    a. Revitalisasi Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Umum.
    b. Revitalisasi Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Agama.
    c. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar hingga menengah (penambahan SMA/SMK/SLB).
    d. Fasilitasi bakat minat anak untuk meraih prestasi Akademik dan Non Akademik.
    e. Program bantuan beasiswa jenjang sarjana untuk pemuda berprestasi berbasis desa.
    f. Meningkatkan kualitas pembelajaran.
    g. Jaminan Kesehatan bagi tenaga kependidikan Agama.
2. ***Sehat Wargane*** (misi 1)
    a. Pembangunan Rumah Sakit tipe D.
    b. Optimalisasi sarana pra sarana dan pelayanan Rumah Sakit.
    c. Bebas biaya perawatan RS bagi warga ber-KTP Magelang.
    d. Dukungan gizi dan layanan akses kesehatan selama kehamilan, melahirkan dan menyusui.
    e. Peningkatan kesejahteraan sopir ambulance desa.
3. ***Makmur Rakyate*** (misi 3 dan misi 4)
    a. Program Sabuk Gunung Magelang (konektivitas antar daerah menuju wilayah pusat pertumbuhan ekonomi).
    b. Rekonstruksi jalan tambang.
    c. Program rumah layak.
    d. Program pemenuhan air bersih dan Sanitasi Aman Magelang (SAM).

e. Pengentasan kemiskinan secara terpadu.
f. Penyediaan rumah bagi masyarakat miskin ekstrem.

4. ***Gemilang Potensine*** (misi 3)
   a. Program Agroindustri dan Agrotourism (*Agro-Twin*).
   b. Revitalisasi Balai Pertanian, Perikanan dan Peternakan.
   c. Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Pertanian, Peternakan, dan Perikanan yang Produktif.
   d. Membangun Kawasan lumbung pangan: Pertanian, Perternakan, Perikanan berbasis riset dan potensi wilayah.
   e. Program peningkatan daya saing UMKM, ekonomi kreatif, *e-commerce*, dan pelaku wisata.
   f. Fasilitasi potensi dan destinasi wisata berbasis budaya.
   g. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi desa.
   h. Mendorong pasar tradisional menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah.
   i. Program Magelang Investasi: Menciptakan iklim investasi yang bertanggungjawab, berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, tata kelola dan sektor unggulan.

5. ***Ngelayani Birokrasine*** (misi 2)
   a. Akselerasi reformasi birokrasi dan realisasi tunjangan kinerja daerah berbasis merit sistem.
   b. Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat desa.
   c. Peningkatan mutu pelayanan publik.
   d. Fasilitasi hukum bagi aparatur pemerintah desa.
   e. Pembangunan database berbasis desa.
   f. Jaminan Kesehatan pasca purna tugas bagi Kepala Desa dan perangkat Desa.
   g. Jaminan Kesehatan bagi BPD, RT, RW.
   h. Penyelenggaraan ruang aspirasi Bupati di kantor kecamatan.

6. ***Gumregrah Wargane*** (misi 3)
   a. Fasilitasi kegiatan keagamaan.
   b. Fasilitasi kegiatan kebudayaan.
   c. Fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan.
   d. Pembentukan Unit Trauma Center Kabupaten Magelang.
   e. Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah.
   f. Pembangunan Taman Budaya Rakyat (TBR).

g. Fasilitasi sarana dan prasarana olahraga.
h. Fasilitasi kegiatan olahraga.
i. Fasilitasi atlet olahraga berprestasi.

7. ***Lestari Alame*** (misi 5)
a. Pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi.
b. Konservasi lingkungan hidup dan sumber air.
c. Fasilitasi pembentukan Desa tangguh bencana.
d. Optimalisasi Kelompok Relawan Tanggap Bencana.

Penjabaran program prioritas daerah yang mengarah langsung pada perwujudan cita-cita daerah yang tertuang dalam visi dan misi tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Implementasi Program Prioritas Pembangunan Daerah "Sapta Cipta"

No.	Program Sapta Cipta	Rencana Implementasi	Program Perangkat Daerah	OPD Penanggungjawab
1	***Pinter Ngaji Pinter Sekolah Bocahe (Misi 1)***			
a	Revitalisasi Fasilitas Pendidikan dan tenaga Kependidikan Umum	1. Revitalisasi Fasilitas Sekolah di bawah kewenangan Kabupaten (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) 2. Pemberian Seragam Sekolah kepada siswa baru kelas 1 SD dan kelas 7 SMP	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikbud
		3. Fasilitasi penyediaan transportasi untuk anak sekolah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	Dishub
b	Revitalisasi Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Agama	1. Hibah untuk sarana pendidikan dan tenaga kependidikan Keagamaan berbasis desa.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra
		2. Pemberian Insentif guru Keagamaan berbasis desa		
c	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar hingga menengah (penambahan SMA/SMK/SLB)	1. Fasilitasi Pembangunan SMA/SMK/SLB Negeri 2. Penyediaan Lahan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Disdikbud
d	Fasilitasi bakat minat anak untuk meraih prestasi Akademik dan Non Akademik	Fasilitasi Lomba-lomba bakat minat siswa	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pembinaan Perpustakaan	Disdikbud Dispuspa
e	Program bantuan beasiswa jenjang sarjana untuk pemuda berprestasi berbasis desa	Pemberian biaya bantuan pendidikan perguruan tinggi bagi pemuda berprestasi berbasis desa,	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disparpora
f	Meningkatkan kualitas pembelajaran	Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Disdikbud
g	Jaminan Kesehatan bagi tenaga kependidikan Agama	Pemberian Jaminan Kesehatan bagi guru keagamaan berbasis desa	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes

No.	Program Sapta Cipta	Rencana Implementasi	Program Perangkat Daerah	OPD Penanggungjawab
2	***Sehat Wargane (Misi 1)***			
a	Pembangunan Rumah Sakit tipe D	Pembangunan Rumah Sakit tipe D	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
b	Optimalisasi sarana pra sarana dan pelayanan Rumah Sakit	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD dan fasilitasi pengembangan rumah sakit swasta	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes, RSUD
c	Bebas biaya perawatan RS bagi warga ber-KTP Magelang	Bebas biaya perawatan RS kelas 3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
d	Dukungan gizi dan layanan akses kesehatan selama kehamilan, melahirkan dan menyusui	1. Dukungan gizi dan akses layanan kesehatan selama masa kehamilan dan menyusui (1000 Hari Emas) : Pengeloaan pelayanan Kesehatan ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		2. Pencegahan dan Percepatan Penurunan stunting	Program Pembinaan Keluarga Berencana; Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinsos PPKB PPPA Bappeda dan Litbangda
e	Peningkatan kesejahteraan sopir ambulan desa	Peningkatan kesejahteraan supir ambulance desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
3	***Makmur Rakyate (Misi 3 dan 4)***			
a	Program Sabuk Gunung Magelang (konektivitas antar daerah menuju wilayah pusat pertumbuhan ekonomi)	1. Penyusunan Rencana Induk Jalan 2. Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi/ rekonstruksi / pemeliharaan jalan dan jembatan 3. Penyediaan perlengkapan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DPUPR

No.	Program Sapta Cipta	Rencana Implementasi	Program Perangkat Daerah	OPD Penanggungjawab
b	Rekonstruksi jalan tambang	1. Penyiapan *Readiness Criteria* (RC) jalan tambang	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
		2. Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi/ rekonstruksi / pemeliharaan jalan dan jembatan 3. Penyediaan perlengkapan jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
c	Program rumah layak	1. Penyusunan dokumen sektoral PKP	Program Kawasan Permukiman	DPRKP
		2. Peningkatan rumah tidak layak huni melalui bantuan sosial penanganan RTLH	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Program Kawasan Permukiman Kumuh	
		3. Pembangunan/Rehabilitasi rumah untuk korban bencana	Program Pengembangan Perumahan	
		4. Pembangunan/peningkatan/pemeliharaan PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
d	Program pemenuhan air bersih dan Sanitasi Aman Magelang (SAM)	1. Penyusunan dokumen sektoral sanitasi dan air minum 2. Penyusunan RPAM (Rencana Pengamanan Air Minum) 3. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Perdesaan dan perkotaan 4. Peningkatan kapasitas KPSPAM	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPUPR
		5. Penyediaan dan Pembangunan sarana prasarana layanan air limbah domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
e	Pengentasan kemiskinan secara terpadu	1. Penguatan Operator Desa dalam Pengisian Progres Data; pendataan Anak Tidak Sekolah	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dispermades
		2. Pelaksanaan TMMD Sengkuyung dan Karya Bhakti	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	

No.	Program Sapta Cipta	Rencana Implementasi	Program Perangkat Daerah	OPD Penanggungjawab
		3. Verifikasi dan validasi basis data kemiskinan	Program perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos PPKB PPPA
		4. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk kelompok rentan	Program Rehabilitasi Sosial	
		5. Pemenuhan perlindungan sosial korban bencana alam	Program Penanganan Bencana	
		6. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Penguatan TKPK Kabupaten, TPK Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda dan Litbangda
		7. Penurunan pengangguran, melalui: a. Penguatan mental dalam memasuki dunia kerja dan ketahanan dalam bekerja b. Penyediaan pelayanan antar kerja c. Perluasan jaringan layanan informasi antar kerja dan penempatan tenaga kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Disperinnaker
		8. Pemberian Beasiswa Pendidikan SD-SMP	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikbud
		9. Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		10. Pemenuhan Sambungan Air Bersih untuk Masyarakat Miskin	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	DPUPR
		11. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana dan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		12. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Distan dan Pangan

No.	Program Sapta Cipta	Rencana Implementasi	Program Perangkat Daerah	OPD Penanggungjawab
		13. Penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Distan dan Pangan
		14. Pemenuhan Dokumen Kependudukan bagi Masyarakat Miskin	Program Pencatatan Sipil	Disdukcapil
		15. Sosialisasi dan Kegiatan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dispeterikan
		16. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berbasis desa	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	DPRKP
			Program Kawasan Permukiman kumuh	
f	Penyediaan rumah bagi masyarakat miskin ekstrem	Pembangunan rumah untuk masyarakat miskin ekstrim yang tidak punya rumah dan tanah	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Pengembangan Perumahan	DPRKP
4	***Gemilang Potensine (Misi 3)***			
a	Program Agroindustri dan Agrotourism (Agro-Twin)	1. Fasilitasi dan dukungan bagi pengembangan sentra agroindustri	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dispeterikan; Distan dan Pangan
		2. Peningkatan agroindustri dan agrotourism berbasis Kawasan pertanian	Program Penyuluhan Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		3. Fasilitasi paket wisata dan promosi wisata berbasis pertanian potensial	Program Pemasaran Pariwisata	Disparpora
		4. Pengembangan dan pembinaan desa wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disparpora
		5. Pengembangan dan Penataan Pengelolaan DTW di Kabupaten Magelang	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disparpora
		6. Peningkatan sentra industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Disperinnaker

No.	Program Sapta Cipta	Rencana Implementasi	Program Perangkat Daerah	OPD Penanggungjawab
b	Revitalisasi Balai Pertanian, Perikanan dan Peternakan	1. Revitalisasi Unit Perbenihan Ikan Air Tawar dan pasar ikan Magelang	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dispeterikan
		2. Pembinaan pelaku usaha perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		3. Revitalisasi Pasar Hewan Magelang	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		4. Revitalisasi Puskeswan sebagai ujung tombak pelaksana pelayanan kesehatan hewan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		5. Revitalisasi BPP menjadi pusat informasi, pembelajaran petani dan klinik pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distan dan Pangan
		6. Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	
c	Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Pertanian, Peternakan, dan Perikanan yang Produktif	1. Subsidi pakan untuk pembudidaya ikan yang bersertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dispeterikan
		2. Fasilitasi dan Pengembangan kawasan perikanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		3. Rehabilitasi Taman ikan, pendukung wisata Taman Ikan dan Aquatic Studio	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		4. Pengembangan laboratorium pengujian kesehatan ikan dan lingkungan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		5. Peningkatan ketersediaan hijauan pakan Ternak	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
		6. Penyediaan sarana dan prasarana dukungan pengendalian serangan organisme	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Distan dan Pangan

No.	Program Sapta Cipta	Rencana Implementasi	Program Perangkat Daerah	OPD Penanggungjawab
		pengganggu tanaman (OPT) dan hama tikus pada lahan usaha 7. Pengembangan padi menthik wangi susu	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
		8. Pengembangan sistem jaringan irigasi, jalan usaha tani, dam parit, embung, dan prasarana pertanian lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DPU PR Distan dan Pangan
d	Membangun Kawasan lumbung pangan: Pertanian, Perternakan, Perikanan berbasis riset dan potensi wilayah	1. Pengembangan Perikanan budidaya benih ikan, ikan konsumsi dan ikan hias berbasis kawasan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dispeterikan
		2. Pengembangan kawasan lumbung pangan komoditas pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Distan dan Pangan
		3. Pengembangan budidaya ternak unggulan dan hasil ternak berbasis kawasan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
		4. Peningkatan surveilans terhadap penyakit hewan, terutama pada kawasan sentra peternakan susu (sapi, kambing)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dispeterikan
		5. Peningkatan Kapasitas SDM Pembudidaya Ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
e	Program peningkatan daya saing UMKM, ekonomi kreatif, *e-commerce*, dan pelaku wisata	1. Membangun kemitraan, jejaring distribusi dan akses permodalan bagi pelaku usaha	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dispeterikan
		2. Pembangunan ekosistem ekonomi kreatif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Disparpora

No.	Program Sapta Cipta	Rencana Implementasi	Program Perangkat Daerah	OPD Penanggungjawab
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		3. Promosi wisata Kabupaten Magelang	Program Pemasaran Pariwisata	Disparpora
		4. Peningkatan kapasitas UKM pengolahan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dispeterikan
		5. Pemberdayaan & Pengembangan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); Program Pengembangan UMKM	Disdagkop dan UKM
		6. Peningkatan Promosi Produk IKM	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Disperinnaker
		7. Penyusunan Peta Potensi berbasis produk unggulan, strategis kawasan atau Kelayakan proyek investasi aset daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
f	Fasilitasi potensi dan destinasi wisata berbasis budaya	1. Pengembangan desa wisata berbasis budaya	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disparpora
		2. Penyelenggaran even pariwisata dan pentas kesenian berbasis budaya	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
g	Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi desa	1. Peningkatan Kapasitas BUMDes	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dispermasdes
		2. Peningkatan Kapasitas Bumdesma dan Fasilitasi Pengembangan serta pembentukan kawasan perdesaan	Program Peningkatan Kerjasama Desa	
		3. Fasilitasi pembentukan kerja sama antar desa		
		4. Peningkatan kapasitas bagi pengurus pasar desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	

No.	Program Sapta Cipta	Rencana Implementasi	Program Perangkat Daerah	OPD Penanggungjawab
		5. Penguatan Kapasitas SDM dan kelembagaan sentra IKM	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Disperinnaker
		6. Pengembangan Koperasi berbasis potensi desa	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;	Disdagkop dan UKM
		7. Pengembangan perekonomian desa berdasarkan potensi desa 8. Pemetaan potensi desa	Program Peningkatan Kerjasama desa	Dispermasdes
i	Mendorong pasar tradisional menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah	1. Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Pasar; Penyediaan Sarana Prasarana pendukung kebersihan dan keamanan Pasar; Pembinaan dan Pengelolaan Pasar 2. Pengelolaan pasar dengan berorientasi pedagang dan komoditas perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Disdagkop dan UKM
j	Program Magelang Investasi: Menciptakan iklim investasi yang bertanggung-jawab, berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, tata kelola dan sektor unggulan	1. Fasilitasi monitoring kepada para pelaku usaha yang mengalami kendala dalam merealisasikan kegiatan usaha;	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
		2. Penyelenggaraan Forum Bisnis dan mengikuti kegiatan pameran investasi; Peningkatan kapasitas SDM terkait Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	
		3. Penyusunan kajian peta potensi investasi Kab. Magelang	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
		4. Penyampaian informasi dan regulasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal kepada para pelaku usaha	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	

No.	Program Sapta Cipta	Rencana Implementasi	Program Perangkat Daerah	OPD Penanggungjawab
		5. Pembinaan dan pemantauan terhadap industri terkait perijinan dan penyampaian data ke SIINas	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Disperinnaker
5	***Ngelayani Birokrasine (Misi 2)***			
a	Akselerasi reformasi birokrasi dan realisasi Tunjangan Kinerja Daerah berbasis merit sistem	1. Penerapan Aplikasi Aktivitas Harian ASN sebagai komponen dalam pemberian tunjangan kinerja	Program Kepegawaian Daerah	BKPPD
		2. Pencanangan, Pembangunan dan Pengusulan Zona Integritas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bag. Organisasi Setda
		3. Mendampingi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan akselerasi Reformasi Birokrasi	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi; Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inpektorat
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah; Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPPKAD
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
		4. Layanan perizinan keliling dan layanan investasi	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
		5. Digitalisasi Perizinan dan Penyelenggaraan Layanan MPP;	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP
		6. Pengembangan Pusat Data Terintegrasi *(Integrated Data Center)*	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo
		7. Pembinaan Startup Digital dan Peningkatan Literasi Digital Masyarakat	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo
		8. Penguatan tata kelola digital; Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo

No.	Program Sapta Cipta	Rencana Implementasi	Program Perangkat Daerah	OPD Penanggungjawab
		(SPLP); Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) Daerah		
b	Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat desa	Penyusunan Regulasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kades, Sekdes dan perangkat desa lainnya	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dispermasdes
c	Peningkatan mutu pelayanan publik	1. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bag. Organisasi Setda
		2. Peningkatan Kapasitas bagi aparatur pemerintah desa dan anggota BPD	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dispermasdes
		3. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan	Program Pencatatan Sipil Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
d	Fasilitasi hukum bagi aparatur pemerintah desa	1. Pembuatan kajian dan penyusunan regulasi dalam hal pendampingan dan bantuan hukum bagi Kades, perangkat desa dan anggota BPD yang mengalami persoalan hukum	Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Dispermasdes
		2. Penciptaan ruang penganggaran desa untuk mengakomodir kebutuhan klinik hukum melalui Raperbup APBDes dan SE Pedoman APBDes		
		3. Membuat KLINIK DESA dengan fungsi untuk pendampingan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan; mendampingi desa dalam segala permasalahan desa; menerima konsultasi 4 bidang kewenangan desa; dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan desa.		
		4. Optimalisasi klinik hukum	Program Pemerintahan dan Kesra	Bag. Hukum Setda

No.	Program Sapta Cipta	Rencana Implementasi	Program Perangkat Daerah	OPD Penanggungjawab
e	Pembangunan Database Berbasis Desa	1. Pengembangan Sistem Informasi berbasis Desa (Progress Data)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo
		2. Penguatan Operator Desa dalam Pengisian Data Informasi Desa melalui Pelatihan Sistem Informasi Desa/ Progres Data	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dispermasdes
f	Penyediaan Jaminan Kesehatan pasca purna tugas bagi Kepala Desa dan perangkat Desa	1. Penyediaan regulasi Jaminan Kesehatan pasca purna tugas bagi Kades dan perangkat Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dispermasdes
		2. Pendataan berbasis desa untuk mantan kades dan perangkat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
g	Jaminan Kesehatan bagi BPD, RT, RW	1. Penyusunan Regulasi/Pedoman Penyusunan APBDes dan SE penyusunan APBDes yang mengakomodir penganggaran Jaminan Kesehatan bagi BPD, RT dan RW; pendataan berbasis desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dispermasdes
		2. Pemenuhan Jaminan Kesehatan Bagi BPD, RT, RW	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
h	Penyelenggaraan Ruang Aspirasi Bupati di Kantor Kecamatan	1. Melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan Ruang Aspirasi Bupati di Kantor Kecamatan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraaan Rakyat	Bagian Pemerintahan Setda
		2. Menyelenggarakan Ruang Aspirasi Bupati di kantor kecamatan sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Bakesbangpol
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan

No.	Program Sapta Cipta	Rencana Implementasi	Program Perangkat Daerah	OPD Penanggungjawab
6	***Gumregah Wargane (Misi 3)***			
a	Fasilitasi kegiatan keagamaan	Fasilitasi peringatan hari besar keagamaan; fasilitasi kegiatan haji; fasilitasi hibah bidang keagamaan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bag. Kesra Setda
b	Fasilitasi kegiatan kebudayaan	Gebyar Seni/Parade Seni; Festival Kesenian Tradisional/Festifal Gunungan/ Festival Dalang Anak/Remaja/Pertunjukkan Wayang Orang/ wayangkulit/ kethoprak/ sendratari/ dramatari; meningkatkan Kerjasama dengan biro wisata	Program Pengembangan Kesenian Tradisional; Program Pengembangan Kebudayaan	Disdikbud
c	Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan sosial	Dinsos PPKB PPPA
		2. Fasilitasi pembinaan Lembaga sosial di desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dispermades
		3. Pelaksanaan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4. Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan, Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat, Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP dan PK
d	Pembentukan Unit Trauma Center Kabupaten Magelang	Optimalisasi TRC, pendampingan psikis, fasilitasi perlindungan sosial,	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
e	Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah	1. Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinsos PPKB PPPA

No.	Program Sapta Cipta	Rencana Implementasi	Program Perangkat Daerah	OPD Penanggungjawab
		2. Layanan komprehensif bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO	Program Perlindungan Perempuan	
f	Pembangunan Taman Budaya Rakyat (TBR)	Revitalisasi Kawasan TIC Borobudur sebagai Taman Budaya Rakyat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual Program Pengembangan Kebudayaan	Disparpora Disparpora Disdikbud
g	Fasilitasi sarana dan prasarana olahraga	Pengembangan dan pengelolaan Kompleks Gelora Nusantara	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Disparpora
h	Fasilitasi kegiatan olahraga	Fasilitasi bantuan terhadap KONI, KORMI dan Organisasi Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Disparpora
i	Fasilitasi Atlet olahraga berprestasi	1. Penyelenggaraan dan pengiriman POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) dan Kompetisi Olahraga lainnya; 2. Apresiasi terhadap atlet dan pelatih berprestasi; 3. Pengembangan prestasi atlit melalui PPOPD (Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Daerah)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Disparpora
7	***Lestari Alame (Misi 5)***			
a	Pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi	1. Pelatihan Instalasi pengolahan Air Limbah menjadi biogas 2. Peningkatan fungsi TPS3R, 3. Pengembangan Rumah Maggot dan Rumah Kompos 4. Operasional TPST Pasuruhan, 5. Peningkatan kapasitas bagi pengelola Sampah, 6. Pengelolaan sampah tuntas desa	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup Program Pengelolaan Persampahan	DLH

No.	Program Sapta Cipta	Rencana Implementasi	Program Perangkat Daerah	OPD Penanggungjawab
		7. Pengelolaan sampah terpadu di pasar	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Disdagkop dan UKM
b	Konservasi lingkungan hidup dan sumber air	1. Program Pemanen Air Hujan, Profiling Mata Air, Kajian Hidrogeologi dan Kerentanan Kawasan Mata Air 2. Konservasi mata air dan sungai	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH; Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DLH DPUPR
		3. Pengukuran IKA & IKU (uji air & Udara), Pengendalian emisi gas rumah kaca (inventarisasi GRK dan Pemantauan Evaluasi & Pelaporan (PEP), Peningkatan kapasitas laboratorium dalam Pengujian kualitas air dan Udara	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup	DLH
		4. Penyusunan dokumen perencanaan tentang lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan hidup	
		5. Pengendalian limbah B3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
		6. Gerakan Penanaman Pohon	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	
		7. Saber Sampah	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
		8. Penghargaan De'Gemes, pembentukan Sekolah Adiwiyata, fasilitasi dan pembentukan proklim	Program peningkatan Pendidikan, pelatihan Dan penyuluhan Lingkungan hidup Untuk masyarakat	
c	Fasilitasi pembentukan desa Tangguh bencana	1. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)	Program Penanggulangan Bencana	BPBD

No.	Program Sapta Cipta	Rencana Implementasi	Program Perangkat Daerah	OPD Penanggungjawab
		2. Penguatan kapasitas Kampung Siaga Bencana, Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Program Penanganan Bencana	Dinsos PPKB PPPA
d	Optimalisasi Kelompok Relawan Tanggap Bencana	1. Harmonisasi BPBD dengan Komunitas Relawan melalui rapat evaluasi pelaksanaan tugas dalam pengananan kebencanaan	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		2. Peningkatan kapasitas kepada satgas, TRC dan komunitas relawan dengan mengadakan pelatihan penanganan kebencanaan (penanganan di air, hutan, penangangan khusus (laka lalulintas, gempa bumi, dll).		

Selanjutnya, untuk menjaga keselarasan antar dokumen perencanaan di tingkat daerah hingga perangkat daerah, khususnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2026-2030, maka dirumuskan program prioritas pembangunan daerah yang didasarkan pada pohon kinerja dan *cascading*. Adapun penjabaran program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Magelang dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 3.6
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome				
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan 1.1. Meningkatnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks						
Sasaran 1.1.1. Meningkatnya masyarakat Kabupaten Magelang yang cerdas, sehat, dan berdaya saing	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun						
	Harapan Lama Sekolah	Tahun						
	Usia Harapan Hidup	Tahun						
			(1) Meningkatkan layanan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan, melalui: Meningkatkan penyediaan fasilitas pendidikan; Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan; Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan					

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			hingga ke jenjang yang lebih tinggi; Meningkatkan mutu layanan pendidikan; Meningkatkan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan aset budaya daerah; Meningkatkan integrasi nilai-nilai budaya dalam sistem pendidikan untuk memperkuat kesadaran dan identitas generasi muda. (2) Meningkatkan literasi masyarakat, melalui: Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membaca; Menciptakan inovasi kegiatan pada perpustakaan untuk memantik semangat minat baca masyarakat; Meningkatkan penyediaan fasilitas perpustakaan secara lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; Meningkatkan koleksi bahan pustaka baik secara cetak maupun digital Meningkatkan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan. (3) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan; Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan tenaga					

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			kesehatan; Meningkatkan layanan pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular; Penguatan program gizi seimbang; Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. (4) Meningkatkan kualitas keluarga berencana dan pembangunan keluarga, melalui: Meningkatkan keikutsertaan pasangan usia subur untuk ber-KB; Meningkatkan ketersediaan tenaga pelayanan keluarga berencana; Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. (5) Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga, melalui: Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda; Meningkatkan pengembangan olahraga secara terarah dan berkelanjutan. (6) Meningkatkan partisipasi perempuan dan perlindungan anak, melalui: Meningkatkan peran aktif dan/atau keterlibatan perempuan dalam pembangunan; Meningkatkan perlindungan					

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan; Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak					
				Meningkatnya masyarakat Kabupaten Magelang yang cerdas, berbudaya dan berdaya saing		Rata-rata Lama Sekolah		Disdikbud
						Harapan lama sekolah		
						Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi*		
					Meningkatnya penyelenggaraan layanan pendidikan	Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun*	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikbud
						Angka partisipasi sekolah (APS) 7-12 tahun		
						Angka partisipasi sekolah (APS) 13-15 tahun		
						Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan 7-18 Tahun		
					Meningkatnya Mutu Pendidikan	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional:		
						a.Literasi Membaca SD/sederajat; *	Program Pengembangan Kurikulum	Disdikbud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						b. Literasi Membaca SMP/sederajat; *	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Disdikbud
						c. Numerasi SD/sederajat *		
						d. Numerasi SMP/sederajat *		
					Meningkatnya pengelolaan budaya yang dilakukan secara terpadu	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan *	Program Pengembangan Kebudayaan	Disdikbud
							Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Disdikbud
						Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir *	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Disdikbud
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
					Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Jumlah kasus kematian ibu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
						Angka kematian Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Meningkatnya Penemuan, Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	Persentase Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
					Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Fasilitas Kesehatan sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
					Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	Rasio daya tampung RS Rujukan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
					Meningkatnya Jaminan Pembiayaan Kesehatan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
					Menurunnya prevalensi stunting	Prevalensi Stunting*	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
				Meningkatnya indeks literasi masyarakat dan pengelolaan arsip yang tertib dan sesuai standar nasional kearsipan		1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM))	Program Pembinaan Perpustakaan	Dispuspa
						2. Indeks Pengawasan Kearsipan)***	Program Pengelolaan Kearsipan	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Meningkatnya layanan perpustakaan dan minat baca masyarakat	1. Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) 2. Angka Kepuasan Pemustaka		
					Meningkatnya mutu pengelolaan kearsipan dan layanan kearsipan	Persentase Pengolah Arsip yang Melaksanakan Pengolahan Arsip Secara Baku		
				Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, meningkatnya pembangunan berbasis gender dan perlindungan anak, serta meningkatnya kualitas keluarga berencana dan pembangunan keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)		Dinsos PPKB PPPA
					Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga.	Indeks Kebahagiaan	Program Pengendalian Penduduk	
							Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
							Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
				Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga serta Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah melalui sektor pariwisata		Indeks Pembangunan Pemuda		Disparpora
						Indeks Pembangunan Olahraga		Disparpora
					Meningkatnya pembangunan karakter kepemudaan	Cakupan prestasi kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disparpora
							Program Pengembangan	Disparpora

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Kapasitas Kepramukaan	
					Meningkatnya prestasi olahraga	Cakupan prestasi olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Disparpora
				Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, meningkatnya pembangunan berbasis gender dan perlindungan anak, serta meningkatnya kualitas keluarga berencana dan pembangunan keluarga		Indeks Pembangunan Gender		Dinsos PPKB PPPA
					Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Ketimpangan Gender*	Program Pengarusutamaan Gender dan Permberdayaan Perempuan	
							Program Perlindungan Perempuan	
						Indeks Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak	
							Program Perlindungan Khusus Anak	
Sasaran 1.1.2. Meningkatnya pembinaan keagamaan di masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama di masyarakat melalui :1. Peningkatan peran pemuka agama yang aktif dalam pembinaan keagamaan dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat; 2. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan fasiltas keagamaan					
					Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan	Nilai indeks kesalehan sosial dimensi relasi antar	Program Pemerintahan dan	Setda

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	manusia	Kesejahteraan Rakyat	
Tujuan 2.1. Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih yang didukung dengan aparatur yang profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks						
Sasaran 2.1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks						
			(1) Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, melalui: Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan melalui layanan yang lebih mudah dan aksesibel; Meningkatkan pemutakhiran data kependudukan secara berkala dan terintegrasi. (2) Meningkatkan pengelolaan data secara terpadu dan terintegrasi, melalui: Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan dan pemanfaatan data statistik sektoral daerah. (3) Meningkatkan keamanan informasi melalui penguatan					

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			sistem persandian, melalui: Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan persandian dan keamanan informasi. (4) Meningkatkan pengelolaan kearsipan secara baku, melalui: Meningkatkan pengelolaan arsip yang sistematis, modern, dan berbasis digital. (5) Meningkatkan kualitas administrasi umum kesekertariatan daerah (6) Meningkatkan fasilitasi layanan lembaga legislatif, melalui: Meningkatkan dukungan terhadap tugas dan fungsi lembaga perwakilan rakyat. 7) Meningkatkan pelaksanaan teknis kewilayahan, melalui: Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. (8) Meningkatkan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik, melalui: Meningkatkan layanan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi; Meningkatkan implementasi e-Government dan ekosistem smart city					

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Meningkatnya kualitas Kebijakan daerah dan pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
					Meningkatnya kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota	Setda
				Meningkatnya fasilitasi layanan lembaga DPRD		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat DPRD		Setwan
					Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah	Program Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Setwan
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan		Kecamatan
					Meningkatnya kualitas pelayanan kewilayahan	Persentase pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi kewilayahan yang ditindaklanjuti oleh kecamatan	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Program Pembinaan dan Pengawasan	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Pemerintahan Desa	
				Meningkatnya tata kelola pemerintah berbasis teknologi informasi		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*		Diskominfo
					Meningkatnya pelaksanaan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
							Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
						Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
						Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	
				Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Disdukcapil
					Meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase layanan Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
						Persentase layanan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Disdukcapil
						Persentase pengelolaan informasi dan pemanfaatan data	1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							2. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
Sasaran 2.1.2. Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan di daerah	7. Opini BPK	Opini		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah		Opini BPK		BPPKAD
					Meningkatnya penyusunan kebijakan dan koordinasi secara intensif dalam pengelolaan keuangan daerah	Persentase penetapan APBD tepat waktu	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPPKAD
					Meningkatnya pengelolaan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, dan pemanfaatan aset daerah	Persentase kejelasan status aset daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPPKAD
					Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase kenaikan PAD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPPKAD
	8. Nilai AKIP	Angka						
			(1) Meningkatkan kinerja perencanaan daerah, melalui: peningkatan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi lintas sektor; peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah yang lebih terarah, berbasis data, dan selaras antar sektor, yang diperkuat dengan pengendalian dan evaluasi yang efektif. (2) Meningkatkan pelaksanaan riset dan					

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			inovasi daerah, melalui: peningkatan kegiatan penelitian hingga pemanfataan hasil kelitbangan untuk mendukung perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga pengawasan pembangunan daerah; peningkatan penerapan IPTEK dalam riset dan inovasi berbasis bukti untuk mendukung efektivitas kebijakan pembangunan daerah. (3) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, melalui: Meningkatkan penyusunan kebijakan dan koordinasi secara intensif dalam pengelolaan keuangan daerah; Meningkatkan pengelolaan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, dan pemanfaatan aset daerah; Meningkatkan kemandirian keuangan daerah. (4) Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah yang efektif, melalui: Meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat					

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			perangkat daerah dan pemerintah daerah; Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (5) Meningkatkan pengelolaan pegawai ASN dan non ASN di lingkup pemerintahan daerah, melalui: Meningkatkan manajemen ASN yang berkompetensi, profesional, dan berintegritas melalui sistem rekrutmen, pengembangan kapasitas, serta evaluasi kinerja yang berbasis merit; Optimalisasi pengembangan karier aparatur; Optimalisasi pengembangan kapasitas sumber daya ASN; Optimalisasi peningkatan penilaian kinerja, pembinaan, dan layanan kesejahteraan aparatur. (6) Meningkatkan peran desa dalam mengembangkan potensi desa secara mandiri, melalui: Meningkatkan penataan desa; Meningkatkan sinergi dan/atau kerja sama antar desa; Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan					

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			sumber daya desa yang berkelanjutan; Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa serta lembaga ekonomi desa. (7) Meningkatkan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah, melalui: Peningkatkan kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; Meningkatkan kualitas kebijakan ekonomi, pembangunan, serta administrasi umum kesekretariatan daerah.					
				Meningkatnya kualitas Kebijakan daerah dan pelayanan publik		Nilai AKIP Setda		
					Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraa Rakyat	Setda
					Meningkatnya kualitas kebijakan perkonomian dan Pembangunan	Cakupan kebijakan Perekonomian dan pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Setda
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan		Nilai Perencanaan Kinerja dalam Hasil Evaluasi AKIP		Bappeda dan Litbangda
						Indeks Inovasi Daerah		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				penerapan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah	Nilai AKIP Bappeda dan Litbangda	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda dan Litbangda
							Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda dan Litbangda
					Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Nilai Satuan Inovasi Daerah pada Indeks Inovasi Daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	Bappeda dan Litbangda
				Meningkatnya kualitas sistem manajemen kepegawaian		Indeks Sistem Merit	Program Kepegawaian Daerah	BKPPD
					Meningkatnya kualitas aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Program Kepegawaian Daerah	BKPPD
				Meningkatnya kemandirian desa		Indeks Desa		Dispermasdes
					Meningkatnya status desa mandiri	Persentase Desa Mandiri*	Program Penatan Desa	Dispermasdes
							Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dispermasdes
							Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dispermasdes
							Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dispermasdes

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan di daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi		Inspektorat
					Meningkatnya kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
					Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pengelolaan Risiko Korupsi dan Penerapan Strategi Pencegahan Korupsi di Perangkat Daerah	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
Tujuan 3.1. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen						
	Tingkat Kemiskinan	Persen						
Sasaran 3.1.1. Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan	PDRB per kapita	Juta Rp						
	Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Persen						
			(1) Meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah, melalui: Meningkatkan					

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			kinerja sektor pertanian dalam arti luas; Meningkatkan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan; Meningkatkan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM); Meningkatkan pengembangan sektor perdagangan; Meningkatkan pengembangan UMKM; Meningkatkan peran koperasi untuk mendukung perekonomian lokal. (2) Meningkatkan pertumbuhan investasi di daerah, melalui: Meningkatkan investasi di daerah. (3) Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, melalui: Meningkatkan cakupan masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial. (4) Meningkatkan ketahanan pangan daerah, melalui: Meningkatkan kemandirian pangan daerah. (5) Meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas dan berkompeten, melalui: Meningkatkan penyerapan tenaga kerja; Meningkatkan produktivitas tenaga kerja;					

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Meningkatkan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja; Meningkatkan pelaksanaan program transmigrasi					
				Meningkatnya pertumbuhan investasi di daerah		Pembentukan Modal Tetap Bruto (persen PDRB)*		DPMPTSP
					Meningkatnya realisasi investasi di daerah	Persentase Peningkatan investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
						Nilai Investasi	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
					Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Pelayanan Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Pelayanan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
							Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
							Program Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP
				Meningkatnya Ketahanan Pangan dan nilai tambah ekonomi daerah		Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan		Distan dan Pangan
					Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi, Jagung dan Ubi Jalar)		Distan dan Pangan
						Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura		Distan dan Pangan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						(Cabai, Kelengkeng, Salak, Durian)		
						Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Kopi, Kelapa, cengkeh, rempah)		Distan dan Pangan
							Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distan dan Pangan
							Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distan dan Pangan
							Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Distan dan Pangan
							Program Penyuluhan Pertanian	Distan dan Pangan
				Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah melalui peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan		Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan		Dispeterikan
					Meningkatnya produktivitas perikanan	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dispeterikan
							Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dispeterikan
							Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dispeterikan
					Meningkatnya produktivitas peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dispeterikan
							Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dispeterikan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dispeterikan
							Program Perizinan Usaha Pertanian	Dispeterikan
							Program Penyuluhan Pertanian	Dispeterikan
				Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga serta Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah melalui sektor pariwisata		Rasio PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minum*		Disparpora
					Meningkatnya pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan	Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disparpora
							Program Pemasaran Pariwisata	Disparpora
							Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Disparpora
							Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Disparpora
				Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berkompeten serta meningkatnya		Rasio PDRB industri pengolahan		Disperinnaker
					Meningkatnya kapasitas industri	Pertumbuhan sentra industri		Disperinnaker
							Program Perencanaan dan	Disperinnaker

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				industri yang berdaya saing			Pembangunan Industri	
							Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Disperinnaker
				Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah sektor perdagangan		Rasio PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil sisdan sepeda motor)		Disdagkop dan UKM
					Meningkatnya pengembangan sektor perdagangan	Persentase Pertumbuhan Ekspor Non Migas		Disdagkop dan UKM
							Program Pengembangan Ekspor	Disdagkop dan UKM
							Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	
							Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
							Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	
							Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
							Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
					Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM terhadap	Persentase Omzet usaha Mikro terhadap PDRB		Disdagkop dan UKM
							Program Pengembangan UMKM	Disdagkop dan UKM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					perekonomian daerah		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Disdagkop dan UKM
						Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB*		Disdagkop dan UKM
							Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.	Disdagkop dan UKM
							Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Disdagkop dan UKM
							Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Disdagkop dan UKM
							Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Disdagkop dan UKM
				Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berkompeten serta meningkatnya industri yang berdaya saing		Tingkat Pengangguran Terbuka*		Disperinnaker
						Tingkat Kesempatan Kerja		Disperinnaker
					meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja*		Disperinnaker
						TPAK Perempuan		Disperinnaker
							Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disperinnaker
							Program Penempatan Tenaga Kerja	Disperinnaker
							Program Pembangunan	Disperinnaker

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Kawasan Transmigrasi	
						Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Program Hubungan Industrial	Disperinnaker
				Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, meningkatnya pembangunan berbasis gender dan perlindungan anak, serta meningkatnya kualitas keluarga berencana dan pembangunan keluarga		Persentase penurunan PPKS		Dinsos PPKB PPPA
					Meningkatnya akses terhadap perlindungan dan jaminan sosial	Cakupan penanganan PPKS	Program Pemberdayaan Sosial	
							Program Rehabilitasi Sosial	
							Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
							Program Penanganan Bencana	
							Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	
				Meningkatnya Ketahanan Pangan dan nilai tambah ekonomi daerah		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)*		
					Meningkatnya ketersediaan, akses distribusi, keamanan, penguatan cadangan pangan serta konsumsi pangan yang beragam	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)*		
							Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Distan Pangan
							Program Penanganan Kerawanan pangan	Distan Pangan
							Program Pengawasan Keamanan Pangan	Distan Pangan
Sasaran 3.1.2. Meningkatnya kondisi wilayah	Cakupan ketentraman	persen	Meningkatkan kualitas pelayanan keamanan, ketenteraman, ketertiban	Meningkatnya kondisi wilayah yang aman,		Cakupan pelayanan ketentraman dan		Satpol PP dan PK

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
yang aman, nyaman, tertib, dan tenteram	dan ketertiban masyarakat		umum, dan perlindungan masyarakat	nyaman, tertib dan tenteram.		ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas)		
					Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Tantibumlinmas)	Indeks Penyelenggaraan Tibumtranmas	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP dan PK
							Program Pencegahan, Penanggualangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Satpol PP dan PK
			Meningkatkan kondusifitas wilayah Meningkatkan penguatan wawasan kebangsaan guna memperkokoh persatuan, toleransi, dan ketahanan sosial dalam menghadapi dinamika politik, isu keagamaan, serta perbedaan antar kelompok masyarakat	Meningkatnya kondisi wilayah yang aman, nyaman, tertib, dan tenteram		Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan pemahaman politik masyarakat di Kabupaten Magelang		Bakesbangpol
					Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam memperkuat penyelarasan kehidupan harmoni, dan Pemahaman Politik Masyarakat di Kabupaten Magelang	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol
							Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol
							Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Bakesbangpol
							Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan	Bakesbangpol

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
						Persentase Pembinaan Partai Politik Masyarakat dan Koordinasi Kelembagaan Pemerintah	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Bakesbangpol
Tujuan 4.1. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur	Indeks Kinerja Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks						
Sasaran 4.1.1. Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur dasar	Indeks Kinerja Pembangunan Infrastruktur Dasar	Indeks						
			(1) Meningkatkan kinerja infrastruktur pekerjaan umum, melalui: Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi; meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air minum layak dan aman; Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan layanan sanitasi aman; Meningkatkan penataan dan penyelenggaraan bangunan gedung; Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungannya;					

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Meningkatkan konektivitas wilayah dengan kondisi mantap; Meningkatkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang efektif dan efisien. (2) Meningkatkan penataan ruang wilayah, melalui: Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. (3) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, melalui: Meningkatkan keteraturan dan kepastian administrasi kepemilikan tanah Meningkatkan kinerja infrastruktur perhubungan melalui : Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas dan ketersediaan infrastruktur perlengkapan jalan pendukung keselamatan berlalu lintas, Meningkatkan kelaikan kendaraan untuk mengurangi kecelakaan, Meningkatkan sistem layanan transportasi publik yang berkualitas, efisien, dan terjangkau					
				Meningkatnya kinerja infrastruktur		Indeks kinerja infrastruktur pekerjaaan umum		DPUPR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				pekerjaan umum dan penataan ruang		dan penataan ruang		
					Meningkatnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	1. Indeks pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	DPUPR
							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR
							Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPUPR
							Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
							Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR
							Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
						2. Indeks layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
							Program Pengembangan Jasa Konstruksi	DPUPR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUPR
							Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	DPUPR
				Meningkatnya kinerja infrastruktur perhubungan		Indeks kinerja infrastruktur perhubungan yang berkeselamatan		
					Meningkatnya pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkeselamatan	Indeks pembangunan infrastruktur perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
						Indeks layanan infrastruktur perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
Sasaran 4.1.2. Meningkatnya pemenuhan hunian layak dan berkualitas bagi seluruh Masyarakat	Indeks Kinerja Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks	(1) Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni, melalui: Meningkatkan akses dan penyediaan rumah layak huni. (2) Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan PSU perumahan,					

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			melalui: Meningkatkan pengelolaan dan ketersediaan prasarana sarana utilitas umum. (3) Meningkatkan penanganan kawasan permukiman kumuh, melalui: Meningkatkan keteraturan bangunan dan kualitas permukiman.					
				Meningkatnya pemenuhan hunian layak dan berkualitas bagi seluruh masyarakat		Indeks Kinerja Pembangunan Infrastuktur perumahan dan permukiman		DPRKP
					Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Rumah Tangga dengan akses hunian layak*	Program Pengembangan Perumahan	DPRKP
							Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	DPRKP
							Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	DPRKP
					Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh perkotaan yang ditangani	Program Kawasan Permukiman	DPRKP
							Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	DPRKP
Tujuan 5.1.		Indeks						

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan daerah	1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		(1) Meningkatkan kualitas air, udara, dan tutupan lahan, melalui: Meningkatkan ketaatan dan konservasi lingkungan hidup; Mengoptimalkan kinerja pengelolaan sampah. (2) Meningkatkan adaptasi akibat perubahan iklim, melalui: Meningkatkan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk mengurangi risiko dan dampak lingkungan serta meningkatkan ketahanan wilayah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam		1. Indeks Kualitas Air (IKA) 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		
Sasaran 5.1.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks			Meningkatnya kinerja pengendalian pengawasan, dan konservasi lingkungan hidup	1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
							Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLH
							Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	DLH
	2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks				2. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLH
							Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
							Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DLH
							Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	DLH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	DLH
							Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DLH
	3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks				3. Persentase Luas Tutupan Lahan Kabupaten Magelang	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	DLH
							Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPPLH	DLH
	2) Indeks Risiko Bencana	Indeks						
Sasaran 5.1.2. Meningkatnya kapasitas daerah dan pelayanan kebencanaan yang berkualitas	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks						
			Meningkatkan upaya pelaksanaan manajemen	Meningkatnya Kapasitas Daerah		Indeks Ketahanan Daerah		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				Rencana Strategis Perangkat Daerah				
				Outcome		Indikator	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Strategi dan Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			kebencanaan, melalui: Meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, respons, dan pemulihan bencana.	dan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas	Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Cakupan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD

Program-program prioritas yang disusun Kabupaten Magelang tidak hanya ditujukan untuk menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan di tingkat lokal, tetapi juga dirancang agar sejalan dengan arah kebijakan nasional melalui Asta Cita serta mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sinkronisasi ini diwujudkan melalui berbagai bidang strategis, antara lain peningkatan akses dan kualitas layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan daerah, pemberdayaan desa sebagai pusat pertumbuhan, serta penguatan sistem perlindungan sosial dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Berikut merupakan jabaran terkait dukungan Kabupaten Magelang terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Asta Cita dan Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.7
Dukungan Kabupaten Magelang terhadap Asta Cita, PP, PHTC

No	PHTC	Program Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Magelang
1	Memberikan makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	Percepatan penanganan stunting melalui pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil	Dukungan gizi dan akses layanan kesehatan selama masa kehamilan dan menyusui (1000 Hari Emas Magelang)
2	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten	Pap smear gratis	Bebas biaya perawatan RS kelas 3
		Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin	Pembangunan Rumah Sakit Tipe D
		Puskesmas keliling, puskesmas pembantu, dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Optimalisasi sarana prasarana dan pelayanan RS
		Mendorong penyediaan 1 Puskesmas Pembantu setiap 1 Desa/Kelurahan	Bebas biaya perawatan RS bagi warga ber-KTP Magelang
			Jaminan kesehatan bagi tenaga kependidikan agama
			Jaminan kesehatan pasca purna tugas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Jaminan kesehatan bagi BPD, RT, RW
3	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional	Mendorong pembangunan desa berdaya (lumbung kesejahteraan, produk unggulan *go internasional*, dan Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana)	Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi desa
			Database pembangunan berbasis desa
			Desa tangguh bencana
			Optimalisasi kelompok relawan tanggap bencana
		Pengembangan pertanian yang terintegrasi	Program SMART TANI (Subsidi Murah Terjangkau untuk Tani)
			Program agroindustri dan *agrotourism* (*agro-twin*)
			Revitalisasi Balai Pertanian, Perikanan, dan Peternakan
			Infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan yang produktif
			Membangun kawasan lumbung pangan: pertanian, peternakan, perikanan berbasis riset dan potensi wilayah

No	PHTC	Program Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Magelang
4	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi	Mendorong pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap kecamatan bekerjasama dengan pihak sekolah swasta	Revitalisasi fasilitas pendidikan dan dukungan wajib belajar 13 tahun
			Revitalisasi fasilitas pendidikan dan tenaga kependidikan umum
			Revitalisasi fasilitas pendidikan dan tenaga kependidikan agama
			Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar hingga menengah (penambahan SMA/ SMK/SLB), termasuk dukungan terhadap Sekolah Rakyat
			Meningkatkan kualitas pembelajaran
5	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Program Magelang Keluarga Sejahtera dan sinkronisasi data bantuan sosial
			Pengentasan kemiskinan secara terpadu
			Program bantuan beasiswa jenjang sarjana untuk pemuda berprestasi berbasis desa
6	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh) TNI/POLRI, dan pejabat negara	Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, guru, santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi	Akselerasi reformasi birokrasi dan realisasi tunjangan kinerja daerah berbasis merit system
			Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa
			Fasilitasi bakat minat anak untuk meraih prestasi Akademik dan Non Akademik
7	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generas milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Infrastruktur dan permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni	Program rumah layak
		Subsidi pangan murah	Program pemenuhan air bersih dan sanitasi aman Magelang (SAM)
		Fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerjasama dengan BUMN, BUMD, dan swasta	Penyediaan rumah bagi masyarakat miskin ekstrem
		Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	
8	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23 persen	Membentuk Biro Pembinaan BUMD dan pemanfaatan aset daerah, membentuk UPTD pengelolaan aset, restrukturisasi probis dan tata kelola BUMD, riset potensi daerah secara berkala	Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi desa
		Transformasi tata kelola tambang galian C	Membangun Kawasan lumbung pangan: Pertanian, Perternakan, Perikanan berbasis riset dan potensi wilayah
		Penguatan tata kelola CSR untuk pembangunan daerah	

Tabel 3.8
Dukungan Kegiatan Kabupaten Magelang pada Program Prioritas Delegasi Provinsi Jawa Tengah ke Kabupaten/Kota

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten Magelang
1	Pembentukan kecamatan berdaya (pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan *sport center*)	Program peningkatan daya saing UMKM, ekonomi kreatif, e-commerce, dan pelaku wisata
		Fasilitasi sarana dan prasarana olahraga
2	Pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan pusat rekreasi dan promosi pembangunan, dan gelanggang olah raga internasional	Program rumah layak
		Penyediaan rumah bagi masyarakat miskin ekstrem
3	Pelatihan dan pendidikan anti korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah desa bekerjasama dengan aparat penegak hukum, Ombudsman, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK, dan KPK	Klinik hukum bagi aparatur penyelenggara pemerintahan sampai tingkat desa
		Pendampingan dan bantuan hukum bagi kepala desa dan perangkat desa yang mengalami persoalan hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan
4	Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Pembangunan Rumah Sakit Tipe D
5	Pemberdayaan masyarakat pesisir tambak ikan nila	Membangun Kawasan lumbung pangan: Pertanian, Perternakan, Perikanan berbasis riset dan potensi wilayah
6	Mendorong pengembangan SMA/SMK unggulan di setiap kecamatan bekerjasama dengan pihak sekolah swasta	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar hingga menengah (penambahan SMA/SMK/SLB)
7	Mendorong pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di setiap kecamatan	Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah
8	Membangun 1.000 desa/kampung wisata baru	Program Agroindustri dan *Agrotourism* (*Agro-Twin*)
9	BUMDES Berdaya (kepastian hukum dan bantuan modal usaha setiap Bumdes di Jawa Tengah)	Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi desa
10	Penguatan BPBD dan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat	Desa tangguh bencana
		Optimalisasi Kelompok Relawan Tanggap Bencana
11	Cek kesehatan gratis	Bebas biaya perawatan RS kelas 3 bagi warga ber-KTP Magelang
12	Mendorong penyediaan 1 dokter, 1 bidan setiap Puskesmas Pembantu	
13	Melahirkan pemerintahan yang *good clear government* dan *collaborative governance* melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan perangkat desa	Akselerasi reformasi birokrasi dan realisasi tunjangan kinerja daerah berbasis merit sistem
		Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa
14	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah
15	Mengembangkan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru	Program Sabuk Gunung Magelang (konektivitas antar daerah menuju wilayah pusat pertumbuhan ekonomi)
16	Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Pengentasan kemiskinan secara terpadu
17	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Program peningkatan daya saing UMKM, ekonomi kreatif, *e-commerce*, dan pelaku wisata
18	Pendampingan sertifikasi halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara gratis	Program Agroindustri dan Agrotourism (*Agro-Twin*)
19	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Membangun kawasan lumbung pangan: pertanian, perternakan, perikanan berbasis riset dan potensi wilayah
20	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan *go internasional*, Sistem Informasi Desa (SID), dan tim tanggap bencana	Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi desa
		Database pembangunan berbasis desa
		Desa tangguh bencana
		Optimalisasi kelompok relawan tanggap bencana

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten Magelang
		Program SMART TANI (Subsidi Murah Terjangkau untuk Tani)
		Program agroindustri dan *agrotourism* (*agro-twin*)
		Revitalisasi Balai Pertanian, Perikanan, dan Peternakan
		Infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan yang produktif
		Membangun kawasan lumbung pangan: pertanian, peternakan, perikanan berbasis riset dan potensi wilayah
21	Peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya	Pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi
22	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani di seluruh kecamatan
23	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Program peningkatan daya saing UMKM, ekonomi kreatif, e-commerce, dan pelaku wisata; Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
24	Subsidi modal dan pendampingan UMKM (1 RT 1 kelompok UMKM)	Program peningkatan daya saing UMKM, ekonomi kreatif, e-commerce, dan pelaku wisata
25	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang ekonomi hijau	Pengelolaan sampah terpadu berbasis teknologi
26	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa	Konservasi lingkungan hidup dan sumber air
27	Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Fasilitasi kegiatan keagamaan
28	Mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan	Fasilitasi kegiatan keagamaan
29	Peningkatan operasional kader Posyandu	Bantuan Keuangan Khusus Operasional Posyandu
30	Peningkatan kualitas hidup lansia	
31	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Pengentasan kemiskinan secara terpadu
32	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Program peningkatan daya saing UMKM, ekonomi kreatif, e-commerce, dan pelaku wisata Pengembangan koperasi desa/kelurahan Merah Putih
33	Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga	Fasilitasi Atlet olahraga berprestasi
34	Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan	Revitalisasi Fasilitas Pendidikan dan tenaga Kependidikan Umum
		Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar hingga menengah (penambahan SMA/SMK/SLB)
35	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Desa tangguh bencana
		Optimalisasi kelompok relawan tanggap bencana

3.3. ARAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044, Wilayah Pengembangan (WP) adalah pengelompokan Kabupaten/Kota yang memiliki keterkaitan pengembangan dari aspek fisik alam, sosial, ekonomi dan/atau budaya sebagai dasar koordinasi pembangunan dan keterpaduan pengembangan wilayah antar Kabupaten/Kota. Kabupaten Magelang masuk ke dalam WP Gelangmanggung yang meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan

Kabupaten Temanggung. Adapun program unggulan dan program strategis penggerak pertumbuhan ekonomi di WP Gelangmanggung meliputi:

1. Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur (*Cultural Heritage Tourism*) yang terintegrasi dengan Kawasan Dieng dan Terpadu dengan Pariwisata DIY.
2. Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi, meliputi:
   a. Pengembangan Ekonomi Kreatif (Kriya);
   b. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: kopi, tembakau, aren, tanaman perkebunan, telur dan perikanan budidaya).

Selain program unggulan dan program strategis penggerak pertumbuhan ekonomi tersebut, juga terdapat beberapa indikasi rencana program yang bersifat kewilayahan dalam menjawab isu permasalahan strategis di WP Gelangmanggung. Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Gelangmanggung, berikut adalah indikasi kebutuhan rencana program selama lima tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan, yakni sebagai berikut.

1. Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur (*Cultural Heritage Tourism*) yang Terintegrasi dengan Kawasan Dieng dan Terpadu dengan Pariwisata DIY
   a. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:
      i) Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan Trans Jateng Koridor Borobudur - Kutoarjo yang terhubung dengan moda transportasi kereta api Prameks rute Kutoarjo - Yogyakarta dan inisiasi proses rencana pengembangan koridor baru Trans Jateng Koridor Temanggung - Borobudur dengan peningkatan peran dan keterlibatan Pemerintahan Kabupaten/Kota di WP Gelangmanggung;
      ii) Fasilitasi dan pendorongan reaktivasi jalur rel kereta api nonaktif lintas Semarang – Borobudur – Yogyakarta;
      iii) Mendorong inisiasi rencana pengembangan simpul *Transport Oriented Development* (TOD) di Kabupaten Temanggung yang mendukung pengembangan pariwisata Borobudur (*Cultural*

Heritage Tourism) yang terintegrasi dengan Kawasan Dieng dan terpadu dengan Pengembangan Pariwisata DIY

iv) Peningkatan dan standarisasi ruas jalan provinsi diantaranya: ruas Magelang-Kaliangkrik dan Wonotunggal-Surjo;

v) Penyediaan perlengkapan jalan diantaranya pada ruas Borobudur-Salaman.

b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui:

i) Pengembangan karakteristik warisan budaya WP Gelangmanggung pada potensi desa-desa wisata baru;

ii) Pengelolaan dan pengembangan sekolah unggulan untuk mendukung hilirisasi agro industri sebagai pemasok kawasan wisata WP Gelangmanggung.

2. Pengembangan ekonomi kreatif (kriya)

a. Pengembangan inovasi pada desa-desa wisata melalui pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas BUMDes dan UMKM guna mendukung ekosistem ekonomi kreatif WP Gelangmanggung

b. Mendorong kerjasama UMKM dan/atau BUMDes dengan IKM unggulan di WP Gelangmanggung

3. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan seperti kopi, tembakau, aren, tanaman perkebunan, susu, telur dan perikanan budidaya)

a. Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas) melalui:

i) Fasilitasi sarpras pertanian (alsintan) pada daerah potensi produksi pertanian; penyediaan benih/bibit berkualitas; penjaminan kualitas pakan ternak; pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); dan pengembangan ternak lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa; sedangkan pada sektor perikanan melalui pengembangan *broodstock* ikan lele dan gurami serta domestikasi ikan endemik lokal (ikan beong) di Magelang;

ii) Peningkatan sistem jaringan irigasi (DI Soropadan);

iii) Peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, diantaranya melalui rehabilitasi Embung Geblok dan mendorong pembangunan Bendungan Pasuruhan.

b. Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), pada sektor pertanian melalui:
    i) Penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian, penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan, pemasaran dan branding produk pertanian; sedangkan pada sektor perikanan melalui fasilitasi diversifikasi, kemasan, dan jejaring pemasaran produk olahan ikan;
    ii) Pengembangan industri hortikultura dan perkebunan yang terintegrasi;
    iii) Perluasan tujuan ekspor antar wilayah pengembangan dengan meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor unggulan.

Selain indikasi kebutuhan rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru dimaksud, terdapat beberapa indikasi rencana program kewilayahan selama lima tahun kedepan yang juga merupakan lintas kewenangan untuk menjawab isu permasalahan strategis di WP Gelangmanggung, antara lain sebagai berikut:

1. Lingkup Sosial dan Kependudukan
    a. Pengelolaan dan revitalisasi sekolah unggulan untuk mendukung hilirisasi agroindustri dan sektor pendukung pariwisata sebagai pemasok kawasan wisata WP Gelangmanggung;
    b. Mendorong pengembangan layanan kesehatan pada kawasan pariwisata (*wellness and health tourism*);
    c. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di tingkat Kecamatan.
2. Lingkup Perekonomian
    a. Mendorong peningkatan produktivitas komoditas unggulan di seluruh Kabupaten/Kota WP Gelangmanggung;
    b. Mendorong perluasan tujuan ekspor antar wilayah pengembangan dengan meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor, utamanya pada komoditas agro WP Gelangmanggung;
    c. Mendorong pengembangan inovasi pada desa-desa wisata melalui pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas BUMDes dan UMKM guna mendukung ekosistem ekonomi kreatif

WP Gelangmanggung, sekaligus kerjasama dengan IKM unggulan di WP Gelangmanggung;

d. Pengembangan potensi destinasi wisata baru (alam, budaya (termasuk religi), buatan) di WP Gelangmanggung.

3. Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan

a. Mendorong optimalisasi konektivitas antar wilayah dalam WP Gelangmanggung dengan memperhatikan risiko bencana erupsi gunung api dan gempa bumi;
b. Penyediaan perlengkapan jalan Parakan-Secang;
c. Pembangunan TPST Regional Magelang;
d. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;
e. Mendorong sinergisitas pengelolaan Cagar Biosfer Merapi-Merbabu-Menoreh.

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya mencapai visi misi pembangunan di Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 yang telah dirumuskan dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan, perlu didukung dengan program Perangkat Daerah. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030, di mana program Perangkat Daerah tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah pada periode 2030-2034. Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam Bab IV Renstra Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah.

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan Kabupaten Magelang tahun 2026-2030 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 4 (empat) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum. Rencana program perangkat daerah tersebut dirumuskan dengan mengacu pada permasalahan dan isu strategis daerah yang telah diidentifikasi melalui proses perencanaan partisipatif dan analisis mendalam terhadap kondisi aktual Kabupaten Magelang. Pendekatan ini dimaksudkan agar setiap program yang dirancang tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu merespons tantangan pembangunan, memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mengatasi kesenjangan yang ada. Selanjutnya, program-program tersebut diturunkan menjadi kegiatan dan subkegiatan yang disusun untuk menjawab permasalahan dan isu strategis di tingkat perangkat daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih terarah, terukur, dan selaras dengan pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029.

4.1.1. Program Perangkat Daerah Berdasar Bidang Urusan

4.1.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Program Perangkat Daerah urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan melalui kegiatan pengelolaan PAUD, pengelolaan pendidikan SD, pengelolaan pendidikan SMP, dan pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan.
b. Program Pengembangan Kurikulum yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan melalui Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal.
c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/kesetaraan.

2. Kesehatan

Program Perangkat Daerah urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, dan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang diarahkan untuk peningkatan mutu dan distribusi tenaga kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar dan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan.
c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang diarahkan untuk peningkatan kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman melalui pemberian Izin Apotek,

Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan diarahkan untuk peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program perangkat daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air diarahkan untuk meningkatkan indeks kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten, antara lain melalui Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi.
b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang diarahkan untuk meningkatkan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan melalui Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional yang diarahkan untuk meningkatkan persentase pembangunan infrastuktur persampahan melalui Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan.
d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah diarahkan untuk meningkatkan rumah tangga dengan akses sanitasi aman melalui Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik.
e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase diarahkan untuk meningkatkan persentase layanan drainase perkotaan melalui Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
f. Program Penataan Bangunan Gedung diarahkan untuk meningkatkan persentase penataan bangunan gedung melalui Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan diarahkan untuk meningkatkan persentase penataan bangunan dan lingkungannya melalui Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya.

h. Program Penyelenggaraan Jalan diarahkan untuk meningkatkan Jalan Kondisi Permukaan Mantap melalui rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, pemeliharaan rutin jalan, rehabilitasi jembatan dan penggantian jembatan.
i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi diarahkan untuk meningkatkan layanan pengembangan konstruksi melalui pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi, serta penyusunan data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang diarahkan untuk meningkatkan persentase layanan penyelenggaraan penataan ruang melalui penetapan RTRW, penetapan Rencana Rinci Tata Ruang, Koordinasi dan sinkronisasi perencanaa, pemanfaatan dan pengenalian tata ruang daerah.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Perangkat Daerah urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan diarahkan untuk meningkatkan layanan pengembangan perumahan, antara lain meliputi pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru (PB), peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana, bantuan pembangunan baru rumah sederhana layak huni utamanya bagi masyarakat miskin dalam rangka mendukung program tiga juta rumah.
b. Program Kawasan Permukiman diarahkan untuk meningkatkan penanganan kawasan kumuh perkotaan melalui penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha.
c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diarahkan untuk meningkatkan layanan pencegahan perumahan dan kawasan kumuh pada perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan baru rumah layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Hektare.
d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) diarahkan untuk meningkatkan PSU perumahan melalui penyelenggaraan PSU perumahan.

e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan penyediaan rumah layak huni melalui Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Program Perangkat Daerah urusan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum diarahkan untuk meningkatkan layanan kegiatan trantibumlinmas melalui penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati dan pembinaan PPNS.
b. Program Penanggulangan Bencana diarahkan untuk meningkatkan cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana, penanganan tanggap darurat bencana dan penanganan pasca bencana melalui pelayanan informasi rawan bencana, penataan sistem dasar penanggulangan bencana serta pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran diarahkan untuk meningkatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran pada layanan pencegahan kebakaran, pemadaman dan pengendalian kebakaran, dan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran.

6. Sosial

Program Perangkat Daerah urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial diarahkan untuk meningkatkan layanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial melalui pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah.
b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, diarahkan untuk meningkatkan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan melalui pemulangan warga negara migran korban

tindak kekerasan dari titik debarkasi untuk dipulangkan ke desa/kelurahan.

c. Program Rehabilitasi Sosial diarahkan untuk meningkatkan layanan rehabilitasi sosial melalui rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial dan rehabilitasi sosial PMKS.
d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang diarahkan untuk meningkatkan keluarga miskin dan rentan yang tergraduasi dari kemiskinan melalui pemeliharaan anak-anak terlantar dan pengelolaan data fakir miskin.
e. Progam Penanganan Bencana diarahkan untuk layanan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana melalui kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.

4.1.1.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Program Perangkat Daerah urusan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, perijinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultansi produktifitas pada perusahaan kecil, pengukuran produktifitas tingkat daerah kabupaten.
b. Program penempatan tenaga kerja diarahkan untuk meningkatkan layanan penempatan tenaga kerja melalui pelayanan antar kerja di daerah, pengelolaan informasi pasar kerja, dan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan).
c. Program hubungan industrial diarahkan untuk meningkatkan cakupan pembinaan hubungan industrial melalui Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten dan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Perangkat Daerah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan pada pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.
b. Program Perlindungan Perempuan diarahkan untuk meningkatkan layanan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO melalui Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan.
c. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) diarahkan untuk menjamin pemenuhan hak semua anak secara komprehensif melalui pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha.
d. Program Perlindungan Khusus Anak diarahkan untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah terhadap anak melalui pencegahan kekerasan terhadap anak dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

3. Pangan

Program Perangkat Daerah urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat diarahkan untuk meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan melalui penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan, dan pelaksanaan konsumsi pangan sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG).
b. Program Penanganan Kerawanan Pangan diarahkan untuk meningkatkan penanganan kerawanan pangan melalui Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan.
c. Program Pengawasan Keamanan Pangan diarahkan untuk meningkatkan

pengawasan mutu dan keamanan pangan melalui Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar.

4. Pertanahan

Program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan layanan fasilitasi penyelesaian ganti kerugian tanah dan santunan tanah untuk pembangunan dengan fokus kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

5. Lingkungan Hidup

Program Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup diarahkan untuk meningkatkan efektifitas kajian lingkungan untuk mitigasi dampak KRP melalui Penyelenggaraan KLHS.
b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup diarahkan untuk peningkatan cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) diarahkan untuk meningkatkan luas keanekaragaman hayati yang dikelola dan luas RTH yang dikelola melalui pengelolaan RTH publik.
d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) diarahkan untuk meningkatkan cakupan usaha yang mengelola limbah B3 sesuai peraturan melalui Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 daerah kabupaten.
e. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan melalui Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan.

f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak yang terkait PPLH melalui Pengakuan dan peningkatan kapasitas MHA, dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH.
g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup.
h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten.
i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, diarahkan untuk penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup melalui penyelesaian pengaduan masyarakat.
j. Program Pengelolaan Persampahan diarahkan untuk meningkatkan tata kelola persampahan melalui peningkatan pengelolaan sampah.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Perangkat Daerah urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendaftaran penduduk melalui pelayanan pendaftaran penduduk, seperti perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP), penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Keluarga (KK).
b. Program Pencatatan Sipil diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan pencatatan sipil melalui penyelenggaraan pencatatan sipil.
c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan informasi kependudukan melalui peningkatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan profil kependudukan melalui penyusunan profil kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Perangkat Daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa diarahkan untuk meningkatnya kualitas penataan desa melalui penyelenggaraan penataan desa.
b. Program Peningkatan Kerjasama Desa diarahkan untuk meningkatkan efektifitas kerjasama desa melalui fasilitasi kerja sama antar desa.
c. Program Administrasi Pemerintahan Desa diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat diarahkan untuk meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Perangkat Daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk diarahkan untuk mengendalikan pertambahan jumlah penduduk melalui pemetaan perkiraan pengendalian penduduk melalui Usia Kawin Pertama (UKP).
b. Program Pembinaan Keluarga Berencana diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana melalui pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB, pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB, Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB dan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan.
c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) melalui pelaksanaan pembangunan keluarga melalui promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

9. Perhubungan

Program Perangkat Daerah urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi darat melalui Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, pengujian berkala kendaraan bermotor, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota.

10. Komunikasi dan Informatika

Program Perangkat Daerah urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, diarahkan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah melalui pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah.
b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi informatika melalui pengelolaan nama domain, sub domain, dan *e-government* di lingkup pemerintah daerah.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program Perangkat Daerah urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi diarahkan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi melalui pemeriksaan dan pengawasan koperasi.
b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM perkoperasian melalui Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.
c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi diarahkan untuk meningkatkan produktifitas koperasi melalui Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

d. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi diarahkan untuk menilai tingkat kesehatan KSP/USP dalam tata laksana koperasi dan mendeteksi sedini mungkin indikasi adanya *froud* dalam pengelolaan koperasi.
e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri, melalui pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
f. Program Pengembangan UMKM diarahkan untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

12. Penanaman Modal

Program Perangkat Daerah urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal diarahkan untuk meningkatkan kemudahan berinvestasi melalui penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal dan pembuatan peta potensi investasi kabupaten.
b. Program Promosi Penanaman Modal diarahkan untuk meningkatnya upaya promosi penanaman modal melalui penyelenggaraan promosi penanaman modal.
c. Program Pelayanan Penanaman Modal diarahkan untuk meningkatkan pelayanan penanaman modal terutama kepatuhan terhadap SP dan SOP perizinan dan nonperizinan serta pengembangan perizinan berbasis IT, melalui Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal.
d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, diarahkan untuk mengendalikan pelaksanaan penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Magelang.
e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, melalui pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Program Perangkat Daerah urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan diarahkan untuk meningkatkan daya saing kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan, dan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.
b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan diarahkan untuk meningkatkan pembudayaan dan prestasi olahraga, melalui pembinaan dan pengembangan olahraga, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kepramukaan melalui pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.

14. Statistik

Program Perangkat Daerah urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan data secara terpadu dan terintegrasi, melalui penyelenggaraan statistik sektoral.

15. Persandian

Program Perangkat Daerah urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi diarahkan untuk meningkatkan keamanan siber dan sandi pemerintah daerah melalui penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah.

16. Kebudayaan

Program Perangkat Daerah urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan melalui pelestarian kesenian tradisional.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional melalui pembinaan kesenian.
c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang diarahkan untuk pelestarian warisan budaya, melalui pengelolaan cagar budaya.

17. Perpustakaan

Program Perangkat Daerah urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah Program Pembinaan Perpustakaan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan melalui pengelolaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca.

18. Kearsipan

Program Perangkat Daerah urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Arsip yang diarahkan untuk meningkatkan tata kelola arsip dinamis dan statis melalui pengelolaan arsip daerah.

4.1.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Program Perangkat Daerah urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya diarahkan untuk menigkatkan produksi perikanan budidaya melalui pemberdayaan pembudi daya ikan kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan.
b. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk menjaga kelestarian sungai dan genangan air lainya, melalui pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, dan genangan air lainnya.
c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan diarahkan untuk meningkatkan konsumsi ikan oleh masyarakat melalui Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil dan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan.

2. Pariwisata

Program Perangkat Daerah urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata dan industri wisata melalui pengelolaan destinasi pariwisata.
b. Program Pemasaran Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan jangkauan pemasaran pariwisata melalui Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata.
c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual diarahkan untuk meningkatkan kualitas ekosistem kreatif melalui Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diarahkan untuk meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif melalui Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3. Pertanian

Program Perangkat Daerah urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian diarahkan untuk peningkatan distribusi dan kualitas sarana pertanian melalui pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengelolaan sumber daya genetik hewan, tumbuhan, dan mikro organisme, serta pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak
b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian diarahkan untuk peningkatan distribusi dan kualitas prasarana pertanian melalui pengembangan prasarana pertanian, pembangunan prasarana pertanian, dan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak.
c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner diarahkan untuk meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner melalui penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan

menular, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner, serta penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian diarahkan untuk meningkatkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian melalui pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
e. Program Perizinan Usaha Pertanian diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian melalui penerbitan izin usaha pertanian dan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.
f. Program Penyuluhan Pertanian diarahkan untuk meningkatkan kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian melalui pelaksanaan penyuluhan pertanian.

4. Perdagangan

Program Perangkat Daerah urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan diarahkan untuk meningkatkan kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha melalui penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan, penerbitan tanda daftar gudang, penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri, penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat, dan pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, serta pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya.
b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi melalui pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diarahkan untuk meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui pengendalian

harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi.

d. Program Pengembangan Ekspor diarahkan untuk meningkatkan pelaku usaha yang berorientasi ekspor melalui penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan.
e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen diarahkan untuk meningkatkan tertib niaga dan mutu produk melalui Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.
f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri diarahkan untuk meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri melalui pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

5. Perindustrian

Program Perangkat Daerah urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pengembangan Industri diarahkan untuk meningkatkan realisasi pembangunan industri melalui penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri.
b. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan informasi industri melalui penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI.

6. Transmigrasi

Program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan kawasan transmigrasi melalui penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten.

4.1.1.4. Urusan Pendukung

1. Sekretariat Daerah

Program Perangkat Daerah Sekretariat Daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat diarahkan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat melalui administrasi tata pemerintahan, fasilitasi kerjasama daerah,

fasilitasi dan koordinasi hukum, dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan melalui pemantauan kebijakan sumber daya alam, pelaksanaan kebijakan perekonomian, pemantauan kebijakan sumber daya alam, pelaksanaan administrasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

2. Sekretariat DPRD

Program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan kode etik DPRD, kualitas penganggaran dan pengawasan, kualitas peningkatan kapasitas DPRD, kualitas penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarat, kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan, kualitas rekomendasi DPRD, kualitas tugas DPRD. Program ini difokuskan pada pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, peningkatan kapasitas DPRD, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, dan fasilitasi tugas DPRD.

4.1.1.5. Unsur Penunjang

1. Perencanaan

Program Perangkat Daerah unsur penunjang perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi pemerintahan daerah dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dan bidang perekonomian dan SDA, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan. Program ini dilaksanakan melalui koordinasi perencanaan bidang

pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan.

2. Keuangan

Program Perangkat Daerah unsur penunjang keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah diarahkan untuk meningkatkan tata kelola anggaran melalui koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.
b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah diarahkan untuk meningkatkan tata kelola aset daerah melalui pengelolaan barang milik daerah (BMD).
c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah diarahkan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui pengelolaan pendapatan daerah.

3. Kepegawaian

Program Perangkat Daerah unsur penunjang kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah Program Kepegawaian Daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian, kompetensi ASN, tata kelola pengembangan karir ASN dan kualitas penilaian kinerja ASN melalui pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN, serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.

4. Penelitian dan Pengembangan

Program Perangkat Daerah unsur penunjang penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah Program Riset dan Inovasi Daerah yang diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan kajian sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah dan meningkatkan pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi

4.1.1.6. Unsur Pengawas

1. Inspektorat

Program Perangkat Daerah unsur pengawas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan diarahkan untuk meningkatkan kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan melalui penyelenggaraan pengawasan internal dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.
b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi diarahkan untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan nilai SPI terjaga di perangkat daerah melalui pendampingan dan asistensi perangkat daerah, serta perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.

4.1.1.7. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Program Perangkat Daerah unsur kewilayahan yang akan dilaksanakan kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan melalui pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan melalui koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan.
c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum diarahkan untuk meningkatkan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan melalui koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum.
d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang diarahkan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan melalui fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

4.1.1.8. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Perangkat Daerah unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan melalui Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang diarahkan untuk meningkatkan etika dan budaya politik melalui Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan diarahkan untuk meningkatkan ketertiban organisasi kemasyarakatan melalui Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya diarahkan peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial diarahkan untuk meningkatkan penyelesaian konflik sosial melalui perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

4.1.2.Indikasi Program, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam Bab IV Renstra Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah. Sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, program pembangunan tahun 2030 memiliki posisi strategis dalam kerangka RPJMD Tahun 2025–2029. Tahun tersebut bukan sekadar menjadi penutup dari periode lima tahunan RPJMD, melainkan juga memainkan peran penting sebagai titik awal perencanaan bagi pemerintahan daerah berikutnya. Dalam konteks tersebut, program-program yang dirancang untuk tahun 2030 perlu disusun secara cermat agar selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Tahun 2025–2045.

Program tahun 2030 menjadi fondasi awal atau pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang nantinya akan disusun dan dijalankan oleh Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan tahun 2029, untuk masa jabatan periode 2030–2034. Karena itu, pemikiran dan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029 tidak berhenti pada lima tahun masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati pada periode tersebut, melainkan perlu mempertimbangkan kesinambungan pembangunan lintas periode. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa capaian pembangunan yang telah dirintis dan dilaksanakan tidak terputus, tetapi dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan pada periode pemerintahan berikutnya. Pendekatan ini menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang bersifat lintas waktu, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan daya saing dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan demikian, penyusunan program tahun 2030 harus diarahkan sebagai bagian integral dari strategi transisi yang mendukung kesinambungan kebijakan, menjaga konsistensi prioritas, dan menjamin efektivitas pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang di daerah.

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	665.699.899.252	100	665.699.899.252	100	657.199.899.252	100	657.199.899.252	100	657.199.899.252	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan					153.663.230.960		153.205.275.180		156.905.768.034		177.482.267.929		183.969.530.869	
Meningkatnya pengelolaan pendidikan di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan Pendidikan Formal/kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	95,35	95,4		95,6		95,8		96		96,2		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persen	92,74	93,05		93,2		93,35		94,5		94,65		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
	Persentase PAUD Terakreditasi Minimal B	Persen	82,71	83,13		83,54		83,95		84,36		84,77		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
Program Pengembangan Kurikulum														
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pemdidikan	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	Persen	45	45,76	400.000.000	46,51	400.000.000	47,27	400.000.000	50,85	400.000.000	53,46	400.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
Meningkatnya Mutu dan distribusi Pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	58,23	61,76	18.400.000.000	65,29	18.400.000.000	68,82	18.400.000.000	72,35	18.400.000.000	75,88	18.400.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi siswa	Skor kemampuan literasi SD	Persen	68,57	73,57		76,07		78,57		81,07		83,57		
	Skor kemampuan literasi SMP	Persen	79,76	81,96		83,06		84,16		85,26		86,36		
	Skor Kemampuan Numerasi SD	Persen	58,96	64,76		67,66		70,56		73,46		76,36		
	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Persen	68,95	71,95		73,45		74,95		76,45		77,95		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	99.982.779.247	100	99.900.917.700	100	99.734.161.800	100	99.116.506.900	100	98.437.031.800	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan														
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Rasio Nakes dan Named terhadap populasi	per 1.000 penduduk	NA	0,46	772.096.160	0,47	750.496.000	0,49	750.496.000	0,5	750.496.000	0,5	750.496.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	Persen	NA	100		100		100		100		100		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase sarana farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai ketentuan yang berlaku	Persen	NA	45	571.242.038	50	469.185.000	55	484.185.000	60	499.185.000	60	499.185.000	
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Persen	NA	100		100		100		100		100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	74.853.129.339	80	75.771.025.791	84	85.658.649.493	95	115.921.395.734	95	131.109.662.947	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	283.739.980	100	300.000.000	100	315.000.000	100	330.000.000	100	330.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
Puskesmas Salaman I														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	3.579.176.694	100	3.941.739.569	100	4.334.190.444	100	4.765.016.938	100	5.165.833.921	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	545.670.600	80	545.670.600	84	545.670.600	95	545.670.600	95	545.670.600	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	6.470.200	100	6.470.200	100	6.470.200	100	6.470.200	100	6.470.200	
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
Puskesmas Salaman II														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	1.804.039.510	100	2.031.225.324	100	2.280.595.810	100	2.560.237.874	100	2.942.838.052	Puskesmas Salaman II
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	470.760.800	80	470.760.800	84	470.760.800	95	470.760.800	95	470.760.800	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	7.528.400	100	7.528.400	100	7.528.400	100	7.528.400	100	7.528.400	
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
Puskesmas Borobudur														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	3.975.702.453	100	4.352.787.215	100	4.664.215.669	100	5.051.401.111	100	5.321.144.897	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	771.716.700	80	771.716.700	84	771.716.700	95	771.716.700	95	771.716.700	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	7.635.400	100	7.635.400	100	7.635.400	100	7.635.400	100	7.635.400	
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Puskesmas Ngluwar														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	1.780.448.433	100	2.021.353.445	100	2.348.372.513	100	2.610.778.111	100	3.003.145.094	Puskesmas Ngluwar
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	499.798.000	80	499.798.000	84	499.798.000	95	499.798.000	95	499.798.000	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	6.470.200	100	6.470.200	100	6.470.200	100	6.470.200	100	6.470.200	
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
Puskesmas Salam														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.525.583.220	100	2.835.467.422	100	3.172.603.639	100	3.545.350.793	100	4.026.681.409	Puskesmas Salam
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	748.500.300	80	748.500.300	84	748.500.300	95	748.500.300	95	748.500.300	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	12.290.200	100	12.290.200	100	12.290.200	100	12.290.200	100	12.290.200	
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
Puskesmas Srumbung														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.102.971.878	100	2.299.076.890	100	2.567.744.199	100	2.866.049.038	100	3.265.815.641	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	595.780.000	80	595.780.000	84	595.780.000	95	595.780.000	95	595.780.000	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	6.270.200	100	6.270.200	100	6.270.200	100	6.270.200	100	6.270.200	
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
Puskesmas Dukun														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.583.806.875	100	2.838.257.073	100	3.115.728.957	100	3.424.333.466	100	3.836.781.544	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	600.865.600	80	600.865.600	84	600.865.600	95	600.865.600	95	600.865.600	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	6.500.000	100	6.500.000	100	6.500.000	100	6.500.000	100	6.500.000	
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
Puskesmas Sawangan I														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.082.625.688	100	2.324.421.356	100	2.588.921.097	100	2.884.227.909	100	3.283.173.637	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	472.276.300	80	472.276.300	84	472.276.300	95	472.276.300	95	472.276.300	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	5.462.400	100	5.462.400	100	5.462.400	100	5.462.400	100	5.462.400	
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
Puskesmas Sawangan II														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	1.802.886.486	100	2.030.049.239	100	2.279.406.203	100	2.559.014.274	100	2.941.476.980	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	668.655.800	80	668.655.800	84	668.655.800	95	668.655.800	95	668.655.800	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	8.293.600	100	8.293.600	100	8.293.600	100	8.293.600	100	8.293.600	
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
Puskesmas Muntilan I														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	1.988.192.283	100	2.357.899.375	100	2.766.885.858	100	3.223.302.811	100	3.630.925.412	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	521.995.600	80	521.995.600	84	521.995.600	95	521.995.600	95	521.995.600	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	5.700.000	100	5.700.000	100	5.700.000	100	5.700.000	100	5.700.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
Puskesmas Muntilan II														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.505.812.008	100	2.815.357.649	100	3.152.088.377	100	3.524.359.768	100	4.135.304.917	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	502.279.900	80	502.279.900	84	502.279.900	95	502.279.900	95	502.279.900	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	4.632.500	100	4.632.500	100	4.632.500	100	4.632.500	100	4.632.500	
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
Puskesmas Mungkid														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.947.553.512	100	3.211.139.875	100	3.497.973.828	100	3.816.171.959	100	4.238.451.288	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	775.382.400	80	775.382.400	84	775.382.400	95	775.382.400	95	775.382.400	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	6.455.800	100	6.455.800	100	6.455.800	100	6.455.800	100	6.455.800	
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
Puskesmas Mertoyudan I														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	1.966.670.480	100	2.205.692.268	100	2.467.350.032	100	2.759.745.068	100	3.109.362.051	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	448.728.700	80	448.728.700	84	448.728.700	95	448.728.700	95	448.728.700	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	5.500.000	100	5.500.000	100	5.500.000	100	5.500.000	100	5.500.000	
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
Puskesmas Mertoyudan II														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.317.589.062	100	2.565.383.815	100	2.836.033.867	100	3.137.645.999	100	3.542.927.179	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	582.635.248	80	582.635.248	84	582.635.248	95	582.635.248	95	582.635.248	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	2.309.752	100	2.309.752	100	2.309.752	100	2.309.752	100	2.309.752	
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
Puskesmas Tempuran														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.894.599.433	100	3.119.529.445	100	3.365.322.513	100	3.635.253.111	100	3.996.971.094	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	608.821.000	80	608.821.000	84	608.821.000	95	608.821.000	95	608.821.000	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	6.470.200	100	6.470.200	100	6.470.200	100	6.470.200	100	6.470.200	
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
Puskesmas Kajoran I														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.561.804.806	100	2.792.496.899	100	3.045.570.854	100	3.328.508.926	100	3.750.622.126	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	536.324.600	80	536.324.600	84	536.324.600	95	536.324.600	95	536.324.600	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	6.705.900	100	6.705.900	100	6.705.900	100	6.705.900	100	6.705.900	
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
Puskesmas Kajoran II														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	1.943.780.892	100	2.165.292.626	100	2.408.748.517	100	2.682.228.755	100	3.058.412.998	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	459.828.000	80	459.828.000	84	459.828.000	95	459.828.000	95	459.828.000	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	7.770.200	100	7.770.200	100	7.770.200	100	7.770.200	100	7.770.200	
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
Puskesmas Kaliangkrik														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	4.230.666.254	100	4.546.191.271	100	4.886.861.944	100	5.260.860.225	100	5.740.970.668	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	865.982.100	80	865.982.100	84	865.982.100	95	865.982.100	95	865.982.100	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	9.081.600	100	9.081.600	100	9.081.600	100	9.081.600	100	9.081.600	
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
Puskesmas Bandongan														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	3.564.532.552	100	3.826.903.383	100	4.112.162.337	100	4.428.410.388	100	4.848.348.419	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	660.287.200	80	660.287.200	84	660.287.200	95	660.287.200	95	660.287.200	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	6.670.200	100	6.670.200	100	6.670.200	100	6.670.200	100	6.670.200	
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
Puskesmas Candimulyo														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.677.633.665	100	2.898.159.020	100	3.140.489.134	100	3.412.700.898	100	3.802.707.258	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	717.546.100	80	717.546.100	84	717.546.100	95	717.546.100	95	717.546.100	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	6.524.500	100	6.524.500	100	6.524.500	100	6.524.500	100	6.524.500	
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
Puskesmas Pakis														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	3.524.632.089	100	3.819.032.081	100	4.137.937.978	100	4.489.512.540	100	4.946.520.556	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	774.566.000	80	774.566.000	84	774.566.000	95	774.566.000	95	774.566.000	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	6.370.200	100	6.370.200	100	6.370.200	100	6.370.200	100	6.370.200	
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
Puskesmas Ngablak														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.582.182.620	100	2.848.253.126	100	3.137.985.654	100	3.459.517.645	100	3.885.522.954	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	737.835.500	80	737.835.500	84	737.835.500	95	737.835.500	95	737.835.500	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	11.801.600	100	11.801.600	100	11.801.600	100	11.801.600	100	11.801.600	
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
Puskesmas Grabag I														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	4.805.309.307	100	5.046.883.418	100	5.310.475.275	100	5.604.163.902	100	6.000.627.742	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	903.849.000	80	903.849.000	84	903.849.000	95	903.849.000	95	903.849.000	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	6.660.700	100	6.660.700	100	6.660.700	100	6.660.700	100	6.660.700	
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
Puskesmas Grabag II														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	1.682.979.081	100	1.929.084.093	100	2.201.752.161	100	2.509.057.759	100	2.923.674.742	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	548.337.800	80	548.337.800	84	548.337.800	95	548.337.800	95	548.337.800	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	6.484.000	100	6.484.000	100	6.484.000	100	6.484.000	100	6.484.000	
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
Puskesmas Tegalrejo														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.625.610.924	100	2.881.106.224	100	3.159.649.336	100	3.469.570.902	100	3.883.150.204	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	836.421.900	80	836.421.900	84	836.421.900	95	836.421.900	95	836.421.900	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	10.197.700	100	10.197.700	100	10.197.700	100	10.197.700	100	10.197.700	
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
Puskesmas Secang I														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.706.211.660	100	2.963.721.978	100	3.243.118.925	100	3.554.650.031	100	3.979.796.664	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	594.342.300	80	594.342.300	84	594.342.300	95	594.342.300	95	594.342.300	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	6.514.300	100	6.514.300	100	6.514.300	100	6.514.300	100	6.514.300	
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
Puskesmas Secang II														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.140.325.488	100	2.383.597.025	100	2.649.608.720	100	2.945.257.945	100	3.343.600.655	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	744.789.300	80	744.789.300	84	744.789.300	95	744.789.300	95	744.789.300	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	6.443.000	100	6.443.000	100	6.443.000	100	6.443.000	100	6.443.000	
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
Puskesmas Windusari														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.935.698.149	100	3.198.945.629	100	3.485.434.727	100	3.803.281.880	100	4.225.203.957	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	785.702.800	80	785.702.800	84	785.702.800	95	785.702.800	95	785.702.800	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	6.470.200	100	6.470.200	100	6.470.200	100	6.470.200	100	6.470.200	
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
Puskesmas Kota Mungkid														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	1.377.729.205	100	1.607.666.109	100	1.860.181.028	100	2.143.378.881	100	2.529.964.887	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	62,83	75	375.209.000	80	375.209.000	84	375.209.000	95	375.209.000	95	375.209.000	
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	83	87		89		91		93		95		
	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Prevalensi obesitas	Persen	NA	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
	Persentase penderita hipertensi dalam pengendalian	Persen	NA	35		37		39		41		43		
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persen	81,89	82,5		82,75		83		83,25		83,5		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persen	100	100	6.469.000	100	6.469.000	100	6.469.000	100	6.469.000	100	6.469.000	
	Persentase puskesmas dengan peningkatan aktivitas fisik	Persen	NA	41,38		62,07		82,76		100		100		
RSUD Muntilan														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	135.601.832.560	100	146.051.832.560	100	157.546.832.560	100	170.191.332.560	100	184.100.282.560	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Net Death Rate (NDR) RSUD Muntilan	per 1.000	17,78	17,58		17,48		17,38		17,28		17,18		
	Capaian SPM RSUD Muntilan	Persen	93,7	79		81		83		85		87		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase nilai kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan RS	Persen	91,05	82	25.898.632.173	82,5	27.605.632.173	83,5	27.605.632.173	83,5	27.605.632.173	84	37.415.516.743	
RSUD Merah Putih														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	114.475.099.205	100	126.713.767.570	100	139.387.415.024	100	153.326.156.527	100	179.092.066.294	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Net Death Rate (NDR) RSUD Merah Putih	per 1.000	9,8	9,6		9,5		9,4		9,3		9,2		
	Capaian SPM RSUD Merah Putih	Persen	99	93		94		96		97		98		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase nilai kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan RS	Persen	90,1	86	8.843.067.000	87	8.843.067.000	88	8.843.067.000	89	8.843.067.000	90	8.843.067.000	
RSUD Bukit Menoreh														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	17.141.657.798	100	18.220.829.627	100	21.289.552.844	100	24.122.143.952	100	25.151.591.727	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Net Death Rate (NDR) RSUD Bukit Menoreh	per 1.000	25	25		25		25		25		25		
	Capaian SPM RSUD Bukit Menoreh	Persen	62,51	70		75		75		80		85		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase nilai kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan RS	Persen	95,87	72,5	27.103.682.542	74,5	27.112.940.395	76,5	25.876.709.386	78,5	25.876.709.386	80	25.876.709.386	
RSUD Candi Umbul														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	11.563.603.013	100	13.775.083.616	100	14.762.123.013	100	17.433.613.974	100	17.565.382.974	
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Net Death Rate (NDR) RSUD Candi Umbul	per 1.000	NA	25		25		25		25		25		
	Capaian SPM RSUD Bukit Menoreh	Persen	92,58	93,25		93,5		93,75		94		94,25		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase nilai kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan RS	Persen	81,13	81,75	30.543.543.400	82	29.007.497.797	82,25	28.128.458.400	82,5	25.573.657.439	85	25.573.657.439	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan PUPR
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	19.949.927.207	100	19.949.927.207	100	19.949.927.207	100	19.949.927.207	100	19.949.927.207	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)														Perangkat Daerah Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	59,19	63,67	5.704.432.599	64,65	5.704.432.599	65,63	5.704.432.599	66,62	7.704.432.599	67,6	9.704.432.599	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum														Perangkat Daerah Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	17,1	23,46	16.724.367.872	28,56	16.724.367.872	33,66	16.724.367.872	38,77	16.724.367.872	43,87	16.724.367.872	
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional														Perangkat Daerah Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya layanan persampahan	Persentase infrastruktur persampahan kondisi baik	Persen	69,12	75	500.000.000	77,94	500.000.000	80,88	500.000.000	83,82	500.000.000	86,76	500.000.000	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah														Perangkat Daerah Pengampu Urusan PUPR

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	1,51	6,9	9.684.807.912	11,11	9.684.807.912	15,32	9.684.807.912	19,52	9.684.807.912	23,73	11.684.807.912	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase														Perangkat Daerah Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase drainase jalan kabupaten kondisi baik	Persen	76,98	78,06	405.000.000	78,61	405.000.000	79,15	405.000.000	79,69	405.000.000	80,23	405.000.000	DPUPR
Program Penataan Bangunan Gedung														Perangkat Daerah Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	1. Persentase penataan bangunan gedung	Persen	88,12	88,84	4.835.816.713	89,2	4.835.816.713	89,56	9.835.816.713	89,92	9.835.816.713	90,28	9.835.816.713	DPUPR
	2. persentase layanan perizinan dalam pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya														Perangkat Daerah Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	Persen	100	100	295.300.687	100	295.300.687	100	295.300.687	100	295.300.687	100	295.300.687	DPUPR
Program Penyelenggaraan Jalan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	89,198	91,38	23.253.832.574	91,43	13.060.526.250	91,47	32.545.013.272	91,52	44.481.721.393	91,57	48.442.229.126	DPUPR
Program Pengembangan Jasa Konstruksi														Perangkat Daerah Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase layanan pengembangan jasa konstruksi	Persen	100	100	136.526.500	100	136.526.500	100	136.526.500	100	136.526.500	100	136.526.500	DPUPR
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang														Perangkat Daerah Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata ruang	Persentase layanan penyelenggaraan penataan ruang	Persen	100	100	494.324.433	100	494.324.433	100	494.324.433	100	494.324.433	100	494.324.433	DPUPR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan PRKP
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	4.848.439.000	100	4.976.439.000	100	4.976.439.000	100	4.976.439.000	100	4.976.439.000	DPRKP
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pengembangan Perumahan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan PRKP
Terpenuhinya rumah layak huni bagi (MBR, masyarakat miskin, Korban Bencana, dan yang terkena bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah)	Persentase Layanan Pengembangan Perumahan	Persen	100	100	685.000.000	100	1.045.000.000	100	1.045.000.000	100	1.045.000.000	100	1.045.000.000	DPRKP
Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum														Perangkat Daerah Pengampu Urusan PRKP
Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan permukiman	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	NA	100	235.000.000	100	297.000.000	100	297.000.000	100	297.000.000	100	297.000.000	DPRKP
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman														Perangkat Daerah Pengampu Urusan PRKP
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum psu tingkat kemampuan menengah	Persentase Layanan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Persen	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	DPRKP
Program Kawasan Permukiman														Perangkat Daerah Pengampu Urusan PRKP
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Persentase luasan kawasan kumuh perkotaan dibawah 10 Ha yang ditangani	Persen	3,2	6,85	305.000.000	9,41	405.000.000	11,98	405.000.000	13,69	405.000.000	14,56	405.000.000	DPRKP
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh														Perangkat Daerah Pengampu Urusan PRKP
Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah	Persentase layanan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persen	NA	33,33	3.357.996.865	50	19.081.544.249	66,67	19.068.222.842	83,33	21.178.870.606	100	23.966.176.500	DPRKP
URUSAN BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	99,31	100	5.572.249.433	100	5.121.870.000	100	5.119.620.000	100	5.321.913.357	100	5.366.820.000	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Penanggulangan Bencana														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana,	Persen	100	100	2.206.590.461	100	1.693.964.519	100	2.050.302.522	100	2.395.720.668	100	2.412.019.894	
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana,	Persen	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana,	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	13.804.139.007	100	13.543.111.728	100	13.643.111.728	100	14.422.053.053	100	15.717.449.709	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah													
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.	Persentase Wilayah Terlayani Kegiatan Trantibumlinmas	Angka	100	100	5.733.270.665	100	4.288.999.900	100	4.729.590.033	100	4.878.000.000	100	4.913.000.000	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran dan penyelamatan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Persen		75	6.151.319.869	100	5.008.279.832	100	5.511.319.869	100	6.208.279.832	100	5.058.279.832	
URUSAN BIDANG SOSIAL														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	7.746.257.423	100	7.475.487.399	100	7.764.194.193	100	7.975.693.940	100	7.746.257.423	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemberdayaan Sosial														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial	Persen	85	90	447.000.000	92	429.000.000	92	430.000.000	95	460.000.000	95	447.000.000	
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani***	Persen	NA	100	30.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	50.000.000	100	30.000.000	
Program Rehabilitasi Sosial														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
Meningkatnya rehabilitasi sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya **/***	Persen	100	100	2.526.701.658	100	2.500.701.658	100	2.520.701.658	100	2.575.701.658	100	2.526.701.658	
	2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya **/***	Persen	100	100		100		100		100		100		
	3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya **/***	Persen	100	100		100		100		100		100		
	4. Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya **/***	Persen	100	100		100		100		100		100		
	5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ***	Persen	0,63	0,63		0,63		0,63		0,63		0,63		
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan***	Persen	NA	2,18	8.677.088.412	2,2	8.402.088.412	2,2	8.375.088.412	2,21	10.441.088.412	2,21	13.677.088.412	
Program Penanganan Bencana														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana **/***	Persen	100	100	509.896.614	100	473.000.000	100	488.000.000	100	491.000.000	100	509.896.614	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	9.623.673.857	100	9.152.887.632	100	9.238.163.857	100	9.486.004.424	100	9.543.163.857	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenga Kerja														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Persen	0,65	1,5	1.612.430.000	1,5	1.577.430.000	1,5	1.587.430.000	1,5	1.587.430.000	1,5	1.587.430.000	
Program Penempatan Tenaga Kerja														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri dan luar negeri	Persen	41,13	45,57	443.719.612	47,84	308.212.300	50,24	432.640.749	52,75	487.640.749	55,39	454.229.612	
Program Hubungan Industrial														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	1. Cakupan pembinaan, penyelesaian perselisihan, pengembangan hubungan industrial	Persen	82,74	82,74	320.000.000	82,74	246.880.000	82,74	278.020.000	82,74	348.660.000	82,74	370.000.000	
	2. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persen	28,11	35,71		37,55		39,48		41,51		43,59		
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)***	Persen	25,46	25,5	205.000.000	26	165.000.000	26,5	165.000.000	26,5	180.000.000	26,5	205.000.000	
Program Perlindungan Perempuan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif***	Persen	100	100	252.206.968	100	252.206.968	100	252.206.968	100	252.206.968	100	252.206.968	
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)***	Angka	60,6	60,7	390.000.000	60,7	350.000.000	60,8	350.000.000	60,8	380.000.000	60,8	390.000.000	
Program Perlindungan Khusus Anak														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif***	Persen	100	100	278.385.633	100	278.385.633	100	278.385.633	100	278.385.633	100	278.385.633	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	a. Skor Pola Pangan Harapan	Indeks	88	86	1.084.487.880	88	676.032.055	88,5	676.032.055	89	955.988.939	89,5	1.084.487.880	
	b. Ketersediaan Informasi Pasokan harga dan akses pangan di daerah	Persen	91	95		95,5		96		96,5		97		
	c. Persentase cadangan pangan	Persen	65	88,5		89		90		90		90		
Program Penanganan Kerawanan Pangan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	Persen	8,07	8	327.321.122	8	227.321.122	8	227.321.122	8	327.321.122	8	327.321.122	
Program Pengawasan Keamanan Pangan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pangan
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persen	88,7	90	61.424.368	90	61.424.368	90	61.424.368	90	61.424.368	90	61.424.368	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanahan
Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase layanan fasilitasi penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persen	100	100	49.473.717	100	49.473.717	100	49.473.717	100	49.473.717	100	49.473.717	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	16.660.230.000	100	14.605.230.000	100	14.605.230.000	100	15.608.230.000	100	16.605.230.000	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Perencanaan Lingkungan Hidup														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	249.000.000	100	149.000.000	100	149.000.000	100	149.000.000	100	149.000.000	
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persen	38.57	40	1.325.000.000	41.43	555.000.000	42,86	655.000.000	44,28	755.000.000	45,71	855.000.000	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase luas keanekaragaman hayati yang dikelola	Persen	100	100	2.815.000.000	100	2.380.000.000	100	2.400.000.000	100	2.500.000.000	100	2.815.000.000	
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha yang mengelola limbah B3 sesuai peraturan	Persen	75	77	315.000.000	79	245.000.000	80	245.000.000	82	315.000.000	83	315.000.000	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)														
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan	Persen	63	65	53.500.000	66	53.500.000	67	53.500.000	68	53.500.000	69	53.500.000	
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kapasitas kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak yang terkait dengan PPLH	Persentase komunitas kearifan lokal yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	100	100	385.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Cakupan Sekolah Adiwiyata dan Desa Proklim	Persen	100	100	145.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	145.000.000	
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan	Persen	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup														
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persen	100	100	28.500.000	100	28.500.000	100	28.500.000	100	28.500.000	100	28.500.000	
Program Pengelolaan Persampahan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase pengelolaan sampah	Persen	63,63	67	12.522.653.327	69	7.470.318.216	71	10.068.018.822	73	13.369.456.279	75	17.342.653.327	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	6.275.102.890	100	5.251.012.218	100	5.634.454.908	100	6.216.402.281	100	6.275.852.890	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pendaftaran Penduduk														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Kualitas layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	5,43	6,8	782.201.534	7,3	782.201.534	7,8	782.201.534	8,3	782.201.534	8,8	782.201.534	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	76,84	77,84		78,29		78,69		79,04		79,34		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pencatatan Sipil														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100	645.844.990	100	640.844.990	100	640.844.990	100	640.844.990	100	645.844.990	
	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	Persen	NA	97,6	277.439.024	97,9	205.689.024	98,2	205.689.024	98,5	216.689.024	98,8	217.189.024	
Program Pengelolaan Profil Kependudukan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Pegelolaan Profil Kependudukan	Persen	NA	0	0	100	58.000.000	100	58.000.000	100	58.170.637	100	59.500.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	5.024.639.021	100	5.670.462.260	100	5.685.112.260	100	5.831.662.260	100	5.831.662.260	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Penataan Desa														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persen	18,53	100	130.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	70.000.000	100	85.000.000	
Program Peningkatan Kerja Sama Desa														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persen	100	100	153.000.000	100	67.000.000	100	75.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
Program Administrasi Pemerintahan Desa														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	6,48	5,18	5.677.222.673	40,48	3.593.637.401	6,59	4.196.858.034	6,59	5.499.414.310	5,38	5.595.876.867	
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persen	51,70	59,55		62,89		72,52		60,75		64,04		
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyaratan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Ekonomi Desa	Persen	62,71	50,2	2.387.677.433	50,31	1.210.000.000	50,36	1.605.000.000	50,36	1.695.000.000	50,27	1.760.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
Program Pengendalian Penduduk														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)***	Orang	2,03	2,03	793.800.000	2,03	717.800.000	2,03	717.800.000	2,03	742.800.000		793.800.000	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)***	Persen	74,21	72,15	11.068.575.973	72,2	11.068.575.973	72,25	11.068.575.973	72,3	11.068.575.973	72,35	11.068.575.973	
	2. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi***	Persen	10,76	10,5		10,3		10,1		10		10		
	3. Persentase Kampung KB Mandiri	Persen	36,8	39,1		40,1		41		41,9		42,6		
	4. Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat / cara KB modern	Persen	84	84,4		84,6		84,7		84,9		85,1		
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga***	Persen	NA	62,5	6.886.600.000	62,5	6.849.600.000	62,75	6.849.600.000	63	6.864.600.000	63	6.886.600.000	
	2. Indeks Lansia Berdaya	Indeks	58,9	59,8		60,2		60,6		61		61,4		
	3. Indeks Pengasuhan Remaja	Indeks	87,1	88,8		89,6		90,3		91		91,6		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	7.803.064.849	100	6.803.064.849	100	6.803.064.849	100	6.803.064.849	100	6.803.064.849	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota	Persen	41,04	48,21	25.875.059.379	50,17	19.795.975.281	52,13	23.134.268.962	54,25	28.656.548.945	56,21	31.375.059.379	
	V/C ratio Kabupaten	Angka	0,15	0,14		0,14		0,13		0,13		0,125		
	Persentase pelayanan uji kendaraan berdasarkan jumlah KBWU	Persen	51,38	58,43		59,71		60,56		61,20		61,84		
	Persentase Ketersediaan fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang jalan tipe C	Persen	54,9	58,82		60,78		62,75		64,71		66,67		
	Persentase konektivitas jaringan transportasi darat	Persen	64,41	66,1		66,1		67,8		67,8		69,49		
	Persentase fasilitasi penyelenggaraan angkutan pelajar aman	Persen	0	41,38		58,62		75,86		93,1		100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	8.435.227.906	100	8.179.970.633	100	8.354.604.800	100	8.344.604.800	100	8.334.601.443	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi public pemerintah daerah (survei)	Persen	NA	55	1.094.320.576	60	785.000.000	65	940.000.000	70	1.395.000.000	75	1.375.000.000	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Persen	NA	85	5.158.469.970	85	4.014.000.000	85	4.690.000.000	85	5.450.000.000	85	5.450.000.000	
	Persentase rumah tangga dengan akses internet	Persen	71,14	78,71		80,13		81,55		82,97		84,11		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	10.671.619.079	100	9.888.600.383	100	10.161.237.351	100	10.536.619.079	100	10.569.100.351	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	NA	63	113.550.000	63	90.000.000	63	113.550.000	63	113.550.000	63	113.550.000	
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase koperasi aktif	Persen	NA	27	40.000.000	27	10.000.000	27	20.000.000	27	40.000.000	27	40.000.000	
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persen	NA	27	150.000.000	27	150.000.000	27	150.000.000	27	150.000.000	27	150.000.000	
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya produktifitas koperasi	Persentase kenaikan volume usaha koperasi	Persen	NA	20	37.500.000	20	5.000.000	20	20.000.000	20	37.500.000	20	37.500.000	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio kewirausahaan daerah	Persen	NA	3,63	772.000.000	3,91	759.000.000	4,19	791.000.000	4,47	807.000.000	4,69	807.000.000	
Program Pengembangan UMKM														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase peningkatan omzet usaha mikro	Persen	5,65	5,65	223.340.000	5,65	206.563.000	5,65	216.563.000	5,65	243.340.000	5,65	233.340.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	5.053.896.296	100	5.083.448.296	100	5.121.763.106	100	5.184.699.905	100	5.257.751.109	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase realisasi total terhadap target investasi	Persen	NA	100	91.125.000	100	112.000.000	100	64.477.140	100	81.362.621	100	105.708.513	
Program Promosi Penanaman Modal														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya upaya promosi Penanaman Modal	persentase investor yang berinvestasi	Persen	NA	50	104.118.711	50	20.000.000	50	20.000.000	50	30.123.004	50	32.135.305	
Program Pelayanan Penanaman Modal														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya pelayanan penanaman modal terutama kepatuhan terhadap SP dan SOP perizinan dan nonperizinan serta pengembangan perizinan berbasis IT	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen	60	70	225.000.000	70	152.000.000	70	160.000.000	70	160.000.000	70	160.000.000	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
Tekendalinya pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian penanaman modal	Persen	24,92	25	255.430.039	25	242.430.039	25	280.973.043	25	339.977.382	25	373.975.120	
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengolahan Data	Persen	38,46	51	23.652.000	51	17.720.107	51	23.652.000	51	23.652.000	51	23.652.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	7.349.890.055	100	7.546.992.815	100	7.555.233.115	100	7.687.882.815	100	7.797.992.815	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Cakupan pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan	Persen	NA	32,06	4.260.000.000	34,83	5.535.000.000	37,61	6.435.000.000	40,41	10.235.000.000	43,19	12.235.000.000	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Cakupan pembinaan keolahragaan	Persen	NA	37,47	5.775.000.000	39,93	24.085.000.000	42,4	10.925.000.000	44,87	14.165.000.000	47,33	17.870.000.000	
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Cakupan pembinaan kepramukaan	Persen	33,33	41,67	320.000.000	44,05	320.000.000	46,43	320.000.000	48,81	330.000.000	51,19	340.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Statistik
Meningkatnya pengelolaan data secara terpadu dan terintegrasi	Persentase data statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data Indonesia	Persen	NA	100	311.570.000	100	295.000.000	100	310.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Persandian
Meningkatnya keamanan siber dan sandi pemerintah daerah	Persentase tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Persen	NA	15	960.012.991	15	751.995.663	15	799.724.326	15	1.002.610.321	15	1.000.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pengembangan Kebudayaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	Persen	3,23	4,03	200.000.000	4,84	3.700.000.000	5,65	200.000.000	6,47	200.000.000	7,26	200.000.000	
Program Pengembangan Kesenian Tradisional														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kelompok Seni Budaya yang Aktif	Persen	61,45	61,72	2.358.128.347	62	2.358.128.347	62,27	2.358.128.347	62,54	2.358.128.347	62,82	2.358.128.347	
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, situs dan Kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	Persen	7,68	7,77	300.000.000	7,85	300.000.000	7,93	300.000.000	8,02	300.000.000	8,1	300.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perpustakaan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	5.948.087.192	100	5.948.087.192	100	5.962.466.877	100	6.026.747.222	100	6.047.087.192	
Tercapainya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pembinaan Perpustakaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perpustakaan
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Persen	N/A	1,816	919.959.639	1,838	522.737.416	1,86	602.737.416	1,881	799.959.639	1,894	799.959.639	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
Program Pengelolaan Arsip														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kearsipan
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	95.99	96.09	178.952.346	96.01	97.809.330	96.29	178.952.346	96.39	178.952.346	96.49	198.952.346	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	9.334.486.302	100	9.334.486.302	100	9.334.486.302	100	9.334.486.302	100	9.334.486.302	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi benih ikan	Persen	3,01	5,97	561.892.000	9,08	216.884.217	12,29	385.993.560	15,59	566.892.000	18,99	566.892.000	
	Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi	Persen	2,99	5,82		8,86		11,98		15,2		18,5		
	Persentase peningkatan produksi ikan hias	Persen	3,17	5,97		9,08		12,29		15,59		18,99		
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Terjaganya Kelestarian Sungai dan Genangan Air Lainnya	Persentase Sungai dan Genangan Air Lainnya Yang Menjadi Kawasan Konservasi	Persen	100	100	38.558.830	100	9.558.830	100	25.558.830	100	38.558.830	100	38.558.830	
Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi ikan	kg/kapita/ tahun	27,11	27,51	377.150.380	27,71	149.738.309	27,91	199.538.309	28,11	351.308.309	28,31	372.150.380	
URUSAN PARIWISATA														
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Cakupan peningkatan Daya Tarik Wisata/ destinasi pariwisata dan industri pariwisata	Persen	47,6	56,55	4.098.808.080	57,47	5.124.845.856	58,4	4.255.863.089	59,32	9.843.154.460	60,24	10.500.705.320	
Program Pemasaran Pariwisata														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Cakupan efektivitas promosi/pemasaran pariwisata	Persen	30,67	35,25	800.000.000	43,27	1.200.000.000	51,3	1.400.000.000	59,33	1.800.000.000	63,49	2.000.000.000	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Cakupan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Persen	NA	21,85	834.000.000	27,17	284.000.000	32,49	284.000.000	37,82	289.000.000	43,14	294.000.000	
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pariwisata
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Cakupan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif	Persen	6,27	29,41	200.000.000	35,29	200.000.000	41,18	350.000.000	47,06	550.000.000	52,94	700.000.000	
URUSAN PERTANIAN														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
Meningkatkan distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Persentase Peningkatan Produksi daging (ruminansia dan non ruminansia)	Persen	1,7	2,8	188.490.063	4,23	66.490.063	5,68	76.490.063	7,15	158.490.063	8,64	188.490.063	
	2. Persentase peningkatan produksi telur	Persen	2,61	4,02		6,09		8,2		10,35		12,55		
	3. Persentase peningkatan produksi susu	Persen	3,06	6,48		9,88		13,38		17		20,73		
	4. Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persen	3,67	28,28	3.562.465.800	23,48	3.247.965.800	38,67	3.362.465.800	43,87	3.562.465.800	49,00	3.562.465.800	
	5. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Kw/Ha	79,11	79,15		79,22		79,22		79,34		79,4		
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	1. Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Hektar	25268	25268	2.483.920.725	25268	1.454.387.035	25268	1.913.982.196	25268	2.483.920.725	25268	2.483.920.725	
	2. Cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persen	1,89	7,2		7,4		7,7		8,1		8,3		
Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan prasarana sektor pertanian sub sektor peternakan	3. Cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana produksi peternakan	Persen	100	100	282.853.428	100	159.353.428	100	229.853.428	100	282.853.428	100	282.853.428	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1. Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen	100	100	345.559.565	100	237.528.636	100	282.028.636	100	345.559.565	100	345.559.565	
	2. Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen	1	1		1		1		1		1		
Program Perizinan Usaha Pertanian														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Cakupan pengawasan peredaran obat hewan	Persen	100	100	34.940.417	100	32.940.417	100	34.940.417	100	34.940.417	100	34.940.417	
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1.Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persen	3,5	3,8	339.296.512	4,1	280.000.000	4,2	339.296.512	4,5	339.296.512	4,6	339.296.512	
	2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persen	6,69	8		8,5		9		10		10,5		
Program Penyuluhan Pertanian														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	Persen	100	100	673.768.897	100	563.768.897	100	673.768.897	100	673.768.897	100	673.768.897	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan Beroperasi	Persen	55	65		70		75		80		80		
	3. Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	Persen	45,64	47		48		49		49,5		49,5		
Meningkatnya penyuluhan sektor pertanian sub sektor peternakan	4. Persentase pembinaan kelompok ternak	Persen	3	3	63.060.000	3	15.660.000	3	27.060.000	3	54.060.000	3	63.060.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanian
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	26.411.379.192	100	26.411.379.192	100	26.411.379.192	100	26.411.379.192	100	26.411.379.192	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persen	NA	80	25.000.000	80	13.000.000	80	27.000.000	80	50.000.000	80	50.000.000	
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persen	86	26,47	5.126.882.271	26,47	3.466.000.000	32,35	3.800.882.271	32,35	6.686.751.806	38,24	7.526.882.271	
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Disparitas harga	Persen	NA	±10	159.885.800	±10	45.000.000	±10	72.175.295	±10	149.885.800	±10	159.885.800	
Program Pengembangan Ekspor														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai ekspor barang non migas	Jt US $	119,1	123,2	234.310.000	123,2	222.310.000	135,5	237.310.000	149	294.310.000	154,9	251.828.728	
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi atau Dilaksanakan	Persen	NA	0		70	13.000.000	70	13.000.000	70	15.000.000	70	15.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perdagangan
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku	Persen	36,01	51,18	163.000.000	51,76	122.488.193	52,35	150.000.000	54,12	158.000.000	54,71	163.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN														
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase industri terbina	Persen	1,44	1,44	459.000.000	1,54	474.000.000	1,64	474.000.000	1,74	504.000.000	1,84	504.000.000	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perindustrian
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase industri yang terfasilitasi lewat SIINas	Persen	82,47	82,47	30.000.000	83,5	30.000.000	84,7	30.000.000	85,2	30.000.000	86,5	30.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI														
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Transmigrasi
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Cakupan pelayanan transmigrasi	Persen	80	80	76.287.000	80	66.287.000	80	76.287.000	80	76.287.000	80	76.287.000	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
SEKRETARIAT DAERAH														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	94.491.196	100	74.491.196	100	74.491.196	100	74.491.196	100	94.491.196	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (nilai EPPD)	Angka	3,39	3,4	400.000.000	3,41	380.000.000	3,42	380.000.000	3,43	380.000.000	3,44	370.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	95.000.000	100	90.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya efektivitas pelayanan publik dan kesekertariatan daerah	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	39,17	40,87	231.600.000	41,72	231.600.000	42,57	231.600.000	43,42	231.600.000	44,27	231.600.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	157.000.000	100	137.000.000	100	157.000.000	100	137.000.000	100	157.000.000	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Cakupan penyusunan produk hukum daerah, penanganan permasalahan hukum dan pendokumentasian produk hukum daerah	Persen	103	100	407.400.000	100	322.434.662	100	407.400.000	100	322.434.662	100	457.400.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	117.284.521	100	107.284.521	100	94.964.240	100	84.964.240	100	117.284.521	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Perekonomian dan Pembangunan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaaan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi	Persen	100	100	460.315.051	100	414.851.976	100	460.315.051	100	414.851.976	100	460.315.051	
	Return on Asset (ROA) BUMD	Persen	2,38*	2,8		2,94		3,09		3,23		3,38		
	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	Persen	4,96*	5,77		5,87		5,96		6,05		6,14		
	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	Persen	3,83*	5,34		5,41		5,49		5,56		5,64		
	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,85	3,96		4,00		4,04		4,08		4,10		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	121.657.656	100	91.082.656	100	121.082.656	100	91.082.656	100	121.657.656	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Perekonomian dan Pembangunan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaaan perekonomian dan pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Persen	99,66	98,6	310.470.000	98,63	276.470.000	98,66	276.470.000	98,69	276.470.000	98,72	310.470.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	130.500.000	100	130.500.000	100	130.500.000	100	130.500.000	100	130.500.000	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	100	4.157.238.649	100	3.011.238.649	100	3.335.238.649	100	3.011.238.649	100	4.157.238.649	
	Indeks Zakat Nasional	Nilai	0,58	0,64		0,67		0,7		0,73		0,76		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	170.734.000	100	140.734.000	100	170.734.000	100	140.734.000	100	170.734.000	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya efektivitas pelayanan publik dan kesekertariatan daerah	Cakupan kinerja layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Persen	100	100	333.700.000	100	323.700.000	100	333.700.000	100	323.700.000	100	333.700.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	26.219.578.196	100	24.296.672.762	100	25.124.030.849	100	27.457.047.131	100	26.199.578.196	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya efektivitas pelayanan publik dan kesekertariatan daerah	Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	Persen	83,33	100	1.948.700.000	100	1.616.700.000	100	1.616.700.000	100	1.948.700.000	100	1.948.700.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	99.434.662	100	99.434.662	100	99.434.662	100	99.434.662	100	99.434.662	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Perekonomian dan Pembangunan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaaan perekonomian dan pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Angka	88,66	89	360.000.000	89,25	360.000.000	89,5	360.000.000	89,75	360.000.000	90	360.000.000	
SEKRETARIAT DPRD														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat DPRD
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	91	100	40.865.260.816	100	41.722.316.316	100	42.632.791.816	100	42.632.791.816	100	42.632.791.816	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	97	100		100		100		100		100		
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sekretariat DPRD
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persen	100	100	14.216.046.289	100	8.062.152.783	100	9.227.735.714	100	12.439.030.853	100	12.797.887.859	
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan pengawasan	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran	Persen	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya Kualitas Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	133	100		100		100		100		100		
Meningkatnya Kualitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarat	Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persen	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan fasilitasi Raperda	Persen	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya Kualitas Rekomendasi DPRD	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rekomendasi DPRD	Persen	135	100		100		100		100		100		
Meningkatnya Kualitas Tugas DPRD	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD	Persen	117	85		85		85		85		85		
PERENCANAAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perencanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	7.603.678.896	100	6.754.026.115	100	7.088.698.341	100	7.506.889.010	100	7.259.511.253	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perencanaan
Meningkatnya kualitas rencana pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100	417.000.000	100	889.646.998	100	933.729.227	100	1.101.408.000	100	1.414.254.643	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	1.178.000.000	100	1.206.989.000	100	1.266.800.000	100	1.359.310.744	100	1.369.649.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	100		100		100		100		100		
KEUANGAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keuangan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	30.773.672.369	100	31.741.222.816	100	32.017.396.853	100	32.361.528.454	100	30.773.672.369	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pengelolaan Keuangan Daerah														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keuangan
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Tahapan Penganggaran yang dilakukan tepat waktu	Persen	100	100	654.155.792.506	100	675.083.363.735	100	680.957.129.193	100	688.276.239.742	100	694.505.164.400	
	Persentase Serapan APBD	Persen	92,6	100		100		100		100		100		
	Persentase penerimaan pendapatan di RKUD	Persen	91,34	100		100		100		100		100		
	Penerapan SAP berbasis akrual yang baik dan benar	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keuangan
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase PD tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	2.520.387.790	100	2.599.630.927	100	2.622.249.796	100	2.650.434.443	100	2.520.387.790	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Keuangan
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase kenaikan pajak daerah	Persen	9,99	4,26	3.330.917.387	8,81	3.435.644.264	11,48	3.465.537.118	14,22	3.502.785.644	15,34	3.330.917.387	
	Persentase penyelesaian penagihan atas target penetapan pajak daerah	Persen	105	100		100		100		100		100		
	Cakupan transaksi elektronik pengelolaan pendapatan daerah	Persen	NA	95		96		96,5		97		98		
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	NA	0,76		0,83		0,90		0,97		1,02		
KEPEGAWAIAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepegawaian
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	26.044.949.914	100	22.546.213.694	100	22.912.785.719	100	23.969.004.199	100	24.058.776.897	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Kepegawaian Daerah														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kepegawaian
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, kompetensi ASN, tata kelola pengembangan karir ASN dan kualitas penilaian kinerja ASN.	1. Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian	Persen	85	85	5.219.249.375	85	6.823.146.507	87	7.153.288.962	87	7.174.764.534	87	7.205.442.392	
	2. Persentase keterisian Jabatan	Persen	85	85		85		86		86		86		
	3. Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	Persen	NA	14		14,5		14,5		15		15		
	4. Persentase ASN dengan SKP minimal bernilai Baik	Persen	NA	95		95		95		95		95		
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
Program Riset dan Inovasi Daerah														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persen	15,38	53,85	1.922.000.000	69,23	949.329.000	84,62	996.368.000	92,31	1.069.132.000	100	1.077.264.000	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,6	2,63		2,66		2,69		2,73		2,77		
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
INSPEKTORAT DAERAH														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengawasan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	10.366.950.218	100	9.993.950.218	100	10.101.950.218	100	10.166.950.218	100	10.166.950.218	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pengawasan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengawasan
Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan	1. Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan APIP	Persen	100	100	618.000.000	100	578.000.000	100	556.000.000	100	618.000.000	100	618.000.000	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pengawasan
Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Kapabilitas APIP	Angka	3,21	3,27	1.981.605.556	3,3	1.460.767.930	3,33	1.718.131.227	3,36	2.122.253.506	3,36	2.181.605.556	
Meningkatnya nilai SPI terjaga di perangkat daerah	2. Indeks Integritas Nasional (IIN)	Angka	72,37	77,5		78		79		80		80		
UNSUR KEWILAYAHAN														
KECAMATAN SALAMAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.360.331.000	100	2.260.430.630	100	2.370.766.000	100	2.421.881.000	100	2.399.881.000	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	Persen	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100	1.500.000	100	1.500.000	100	1.500.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan	persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/ atau kelurahan	Persen	100	100	57.710.000	100	45.906.000	100	43.000.000	100	49.500.000	100	54.500.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persen	100	100	35.149.000	100	21.269.000	100	20.000.000	100	34.500.000	100	35.000.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	Persen	100	100	81.935.086	100	78.070.000	100	23.506.976	100	24.516.649	100	49.244.086	
KECAMATAN BOROBUDUR														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.144.899.519	100	2.012.468.182	100	2.061.161.937	100	2.136.482.562	100	2.144.899.519	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	Persen	100	100	29.138.060	100	29.138.060	100	29.138.060	100	29.138.060	100	29.138.060	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan	persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/atau kelurahan	Persen	83,33	90	22.000.000	95	22.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persen	90	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	Persen	100	100	12.500.000	100	12.500.000	100	12.500.000	100	12.500.000	100	12.500.000	
KECAMATAN NGLUWAR														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.151.234.432	100	2.107.609.052	100	2.128.968.807	100	2.144.171.620	100	2.151.234.432	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	Persen	100	100	34.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	34.000.000	100	34.000.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan	persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/atau kelurahan	Persen	100	100	35.500.000	100	19.000.000	100	35.500.000	100	35.500.000	100	35.500.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persen	100	100	20.000.000	100	1.000.000	100	4.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	Persen	100	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	
KECAMATAN SALAM														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.275.406.445	100	2.179.466.568	100	2.253.912.723	100	2.228.569.416	100	2.306.906.445	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	Persen	100	100	32.000.000	100	32.000.000	100	32.000.000	100	32.000.000	100	32.000.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan	persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam	Persen	83,33	100	28.500.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pembangunan desa dan/atau kelurahan													
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persen	100	100	25.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	Persen	100	100	65.000.000	100	65.000.000	100	33.000.000	100	103.000.000	100	32.000.000	
KECAMATAN SRUMBUNG														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	1.961.320.610	100	1.877.770.001	100	1.929.411.479	100	1.961.320.610	100	1.960.820.610	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	Persen	100	100	33.500.000	100	33.500.000	100	33.500.000	100	33.500.000	100	33.500.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan	persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/atau kelurahan	Persen	83,33	100	28.000.000	100	17.500.000	100	7.500.000	100	28.000.000	100	28.000.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persen	100	100	30.000.000	100	12.000.000	100	15.000.000	100	30.369.927	100	30.000.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	Persen	87	100	37.500.000	100	29.500.000	100	29.000.000	100	29.500.000	100	38.000.000	
KECAMATAN DUKUN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	1.788.570.973	100	1.705.973.534	100	1.745.118.280	100	1.831.136.510	100	1.844.631.424	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	Persen	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan	persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/atau kelurahan	Persen	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persen	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	Persen	100	100	112.060.451	100	61.000.000	100	71.000.000	100	61.000.000	100	61.000.000	
KECAMATAN SAWANGAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.536.665.222	100	2.470.150.410	100	2.511.749.540	100	2.552.689.683	100	2.554.726.009	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	Persen	100	100	29.982.596	100	9.000.000	100	9.000.000	100	13.000.000	100	13.500.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan	Persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/atau kelurahan	Persen	100	100	40.849.866	100	17.000.000	100	17.000.000	100	25.000.000	100	26.500.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persen	100	100	12.333.890	100	10.000.000	100	12.000.000	100	15.000.000	100	15.500.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	Persen	100	100	20.394.435	100	15.500.000	100	15.500.000	100	27.000.000	100	30.000.000	
KECAMATAN MUNTILAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	94	95	3.679.900.228	98	3.386.966.052	99	3.365.299.905	100	3.452.875.198	100	3.450.223.070	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	Persen	100	100	54.000.000	100	52.000.000	100	62.000.000	100	62.000.000	100	62.000.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan	persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/ atau kelurahan	Persen	100	100	565.500.000	100	502.000.000	100	595.700.000	100	771.220.834	100	791.421.858	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persen	100	100	105.000.000	100	85.000.000	100	159.000.000	100	129.000.000	100	129.000.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	Persen	100	100	75.327.670	100	29.400.000	100	29.400.000	100	37.660.640	100	47.082.970	
KECAMATAN MUNGKID														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	94	100	4.117.416.246	100	3.941.605.508	100	4.070.252.874	100	4.088.352.846	100	4.117.416.246	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	Persen	100	100	33.017.000	100	28.000.000	100	33.017.000	100	33.017.000	100	33.017.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan	persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/ atau kelurahan	Persen	100	100	1.677.000.000	100	1.273.478.116	100	1.360.700.000	100	1.669.500.000	100	1.677.000.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persen	100	100	32.925.333	100	30.925.333	100	30.925.000	100	32.925.000	100	32.925.333	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	Persen	100	100	32.860.200	100	18.950.000	100	18.773.964	100	31.273.134	100	32.860.200	
KECAMATAN MERTOYUDAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	3.586.000.000	100	3.505.000.000		3.505.000.000		3.505.000.000		3.505.000.000	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100								
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	Persen	100	100	28.500.000	100	28.000.000	100	28.000.000	100	28.000.000	100	28.000.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan	persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/atau kelurahan	Persen	93,75	93,75	933.882.620	93,75	615.805.557	93,75	766.403.185	93,75	997.351.073	93,75	1.025.382.620	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persen	100	100	57.000.000	100	47.000.000	100	47.000.000	100	47.000.000	100	47.000.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	Persen	100	100	92.000.000	100	92.000.000	100	92.000.000	100	94.000.000	100	92.000.000	
KECAMATAN TEMPURAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.013.187.679	100	1.967.571.884	100	2.041.207.200	100	2.099.957.200	100	2.097.457.200	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	Persen	100	100	27.000.000	100	12.000.000	100	15.000.000	100	16.386.509	100	17.000.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan	persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/atau kelurahan	Persen	100	100	71.463.750	100	14.000.000	100	32.319.077	100	42.000.000	100	52.694.229	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persen	100	100	25.000.000	100	10.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	Persen	100	100	85.500.000	100	80.000.000	100	31.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KECAMATAN KAJORAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.461.648.000	100	2.397.730.000	100	2.508.788.212	100	2.570.417.582	100	2.527.207.154	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	Persen	100	100	1.000.000	100	1.500.000	100	1.500.000	100	1.500.000	100	1.500.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan	persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/atau kelurahan	Persen	100	100	56.759.154	100	41.500.000	100	41.500.000	100	55.000.000	100	55.000.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persen	100	100	110.000.000	100	17.000.000	100	27.000.000	100	32.500.000	100	35.000.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	Persen	100	100	78.561.000	100	104.077.210	100	36.761.000	100	39.261.000	100	89.261.000	
KECAMATAN KALIANGKRIK														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.183.282.649	100	2.107.956.013	100	2.129.776.088	100	2.174.045.285	100	2.187.311.222	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	Persen	100	100	1.500.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	2.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan	Persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/atau kelurahan	Persen	100	100	51.100.000	100	22.000.000	100	37.500.000	100	53.000.000	100	58.300.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persen	100	100	10.000.000	100	1.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	Persen	86	100	47.828.573	100	31.700.000	100	33.200.000	100	47.400.000	100	36.100.000	
KECAMATAN BANDONGAN														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.518.780.931	100	2.458.793.682	100	2.462.672.834	100	2.511.233.953	100	2.518.780.931	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	Persen	100	100	33.600.000	100	33.600.000	100	33.600.000	100	33.600.000	100	33.600.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan	Persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/atau kelurahan	Persen	100	100	18.000.000	100	1.000.000	100	4.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persen	100	100	5.000.000	100	1.000.000	100	5.000.000	100	5.500.000	100	5.000.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	Persen	100	100	4.500.000	100	2.000.000	100	4.500.000	100	4.500.000	100	4.500.000	
KECAMATAN CANDIMULYO														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.305.916.590	100	2.195.208.679	100	2.235.914.942	100	2.298.880.330	100	2.305.916.610	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	Persen	100	100	29.138.060	100	29.138.060	100	29.138.060	100	29.138.060	100	29.138.060	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan	Persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/atau kelurahan	Persen	100	100	22.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persen	100	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	Persen	100	100	12.500.000	100	12.500.000	100	12.500.000	100	12.500.000	100	12.500.000	
KECAMATAN PAKIS														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.474.091.769	100	2.410.631.769	100	2.417.131.769	100	2.474.091.769	100	2.474.091.769	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	Persen	100	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan	Persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/atau kelurahan	Persen	100	100	47.274.368	100	31.896.876	100	36.274.368	100	47.274.368	100	47.274.368	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persen	100	100	50.000.000	100	20.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	Persen	100	100	45.822.179	100	25.500.000	100	32.113.302	100	37.613.160	100	45.822.179	
KECAMATAN NGABLAK														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.372.966.537	100	2.314.184.820	100	2.336.336.892	100	2.362.434.617	100	2.368.268.661	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	Persen	100	100	27.663.190	100	1.742.080	100	3.242.080	100	3.500.000	100	3.500.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan	Persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/atau kelurahan	Persen	100	100	35.128.000	100	16.550.000	100	30.090.000	100	63.490.000	100	63.490.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persen	100	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	10.000.000	100	13.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	Persen	85	100	41.209.290	100	21.843.320	100	29.747.320	100	31.747.320	100	31.343.320	
KECAMATAN GRABAG														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.628.836.106	100	2.546.201.069	100	2.582.933.545	100	2.622.048.181	100	2.628.836.106	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	Persen	100	100	27.000.000	100	17.000.000	100	22.000.000	100	27.000.000	100	27.000.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan	Persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/atau kelurahan	Persen	100	100	50.000.000	100	30.000.000	100	42.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persen	100	100	20.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	100	25.000.000	100	20.000.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	Persen	100	100	72.500.000	100	44.000.000	100	39.000.000	100	65.000.000	100	72.500.000	
KECAMATAN TEGALREJO														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.226.763.995	100	2.193.114.381	100	2.233.392.896	100	2.304.997.806	100	2.308.406.560	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	Persen	100	100	27.325.800	100	7.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	100	7.000.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan	Persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/atau kelurahan	Persen	100	100	56.563.500	100	11.000.000	100	16.500.000	100	17.000.000	100	18.350.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persen	100	100	24.680.000	100	10.500.000	100	12.000.000	100	12.000.000	100	13.000.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	Persen	100	100	41.923.255	100	26.200.000	100	26.200.000	100	28.000.000	100	30.200.000	
KECAMATAN SECANG														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	3.689.676.826	100	3.664.648.477	100	3.664.648.477	100	3.764.463.860	100	3.689.676.826	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	Persen	100	100	31.743.510	100	20.500.000	100	20.500.000	100	31.743.510	100	31.743.510	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan	Persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/atau kelurahan	Persen	100	100	867.362.978	100	635.047.424	100	782.681.057	100	866.724.638	100	867.362.978	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persen	100	100	127.463.050	100	60.000.000	100	60.000.000	100	85.000.000	100	127.463.050	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	Persen	100	100	94.865.490	100	29.400.000	100	29.400.000	100	37.660.640	100	94.865.490	
KECAMATAN WINDUSARI														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.604.979.892	100	2.414.925.520	100	2.462.516.846	100	2.500.944.915	100	2.533.479.892	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	Persen	100	100	21.000.000	100	46.500.000	100	46.500.000	100	46.500.000	100	46.500.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan	persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/ atau kelurahan	Persen	100	100	23.000.000	100	33.000.000	100	33.000.000	100	52.000.000	100	33.000.000	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	Persen	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kewilayahan
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	Persen	100	100	13.000.000	100	49.000.000	100	45.000.000	100	55.000.000	100	49.000.000	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Umum

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ketercapaian, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	2.838.997.579	100	2.353.945.439	100	2.296.315.389	100	2.298.559.982	100	2.296.097.579	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Umum
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	99,5	99,5	600.000	99,5	400.000.000	99,5	750.000.000	99,5	950.000.000	99,5	950.000.000	
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Umum
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Persen	98	98	370.000.000	98	370.000.000	98,5	370.000.000	98,6	370.000.000	98,7	423.000.000	
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Umum
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persen	99,5	99,5	175.000.000	99,5	150.000.000	99,5	150.000.000	99,5	150.000.000	99,5	150.000.000	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Umum
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Persen	99,5	99,5	1.400.000.000	99,5	800.000.000	99,5	800.000.000	99,5	1.000.000.000	99,5	1.000.000.000	
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik														Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Umum
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik dan masyarakat	Persen	100	100	2.792.000.000	100	2.707.500.000	100	31.838.804.000	100	38.626.196.000	100	2.757.500.000	
					2.772.170.671.638		**2.807.532.171.475**		**2.909.713.559.159**		**3.077.510.036.018**		**3.161.180.394.847**	

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode perencanaan. Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond,* dan *continously improve* (SMART-C).

4.2.1.Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029. IKU pemerintah daerah Kabupaten Magelang tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Indikator Tujuan								
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,10	72,57	73,01	73,41	73,81	74,22	74,62
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	78,96	79,21	79,48	79,75	80,02	80,29	80,56
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,06	5,20 - 5,90	5,20 - 5,65	6,50 – 7,12	6,90 – 7,76	7,40 – 8,21	7,90 – 8,50
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	10,83	9,67 - 10,55	9,07 - 9,93	8,47 - 9,30	7,86 - 8,68	7,26 - 8,05	6,78 - 7,55
5	Indeks Kinerja Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks	57,40	61,20	62,81	64,93	67,03	69,08	70,38
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	69,40	75,07	75,09	75,10	75,12	75,13	75,14
7	Indeks Risiko Bencana	Indeks	97,42	95,58 - 94,07	94,82 – 92,67	94,06 – 91,28	93,30 – 89,80	92,53 – 88,49	91,77 – 87,09
	Indikator Sasaran								
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,83	8,74	8,86	8,98	9,10	9,22	9,32
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,62	13,04	13,23	13,43	13,62	13,81	13,96
3	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,68	74,92	75,16	75,38	75,6	75,81	76,19
4	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	79,60	80,10	80,60	81,10	81,60	82,10	82,60
5	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,81	3,88	3,96	4,04	4,10	4,17	4,23
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,99	87,42	87,86	88,30	88,74	89,18	89,62
7	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Nilai AKIP	Nilai	63,57	64,31	65,03	67,02	69,01	71,00	72,99
9	PDRB per kapita	Juta Rupiah	32,60	36,10	39,60	43,10	46,60	50,10	53,60
10	Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Persen	20,21	20,59	20,98	21,49	22,09	22,51	23,18
11	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Indeks Kinerja Pembangunan Infrastruktur Dasar	Indeks	60,47	65,73	67,76	70,48	73,18	75,89	77,58
13	Indeks Kinerja Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks	50,22	50,65	51,26	51,96	52,67	53,17	53,57
14	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	54,88	73,8	73,82	73,84	73,86	73,88	73,9
15	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	92,06	86,62	86,63	86,64	86,65	86,66	86,67

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
16	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	52,41	55,91	55,92	55,93	55,94	55,95	55,96
17	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,92	0,94	0,95	0,95	0,96	0,97	0,97

4.2.2.Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD)

Indikator kinerja daerah merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Indikator kinerja daerah mencakup indikator utama pembangunan, dan meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, serta aspek pelayanan umum.

Tabel 4.3
Indeks Kinerja Daerah

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	80,20	80,40	80,74	81,09	81,43	81,77	81,99
2	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	Persen	11,24	11,00	10,52	10,04	9,56	9,08	8,70
3	Konsumsi listrik per kapita	kWh/ kapita	595,41	604,34	613,41	622,61	631,95	641,43	651,05
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	17,10	18,36	23,46	28,56	33,66	38,77	43,87
5	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	69,40	75,07	75,09	75,10	75,12	75,13	75,14
6	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	54,88	73,80	73,82	73,84	73,86	73,88	73,90
7	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	92,06	86,62	86,63	86,64	86,65	86,66	86,67
8	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	52,41	55,91	55,92	55,93	55,94	55,95	55,96
9	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	1,51	2,69	6,90	11,11	15,32	19,52	23,73
10	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen	48,82	80,33	80,57	80,82	81,06	82,26	82,5
11	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	TonCO2eq	33.713,26	1.258.764	1.313.162	1.474.130	1.541.668	1.615.777	2.107.355
12	Indeks Risiko Bencana	Indeks	97,42	95,58 -94,07	94,82 – 92,67	94,06 – 91,28	93,30 – 89,80	92,53 – 88,49	91,77 – 87,09
13	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,92	0,94	0,95	0,95	0,96	0,97	0,97
14	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	0,81	0,78	0,75	0,72	0,68	0,65	0,61
15	Rasio jenis kelamin		101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	100,00	100,00
16	Kepadatan penduduk	Jiwa/Km^2	1.187	1.196	1.205	1.214	1.222	1.230	1.238
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,06	5,20 – 5,90	5,20 – 5,65	6,50 – 7,12	6,90 – 7,76	7,40 – 8,21	7,90 – 8,50
2	Tingkat kemiskinan	Persen	10,83	9,67 - 10,55	9,07 - 9,93	8,47 - 9,30	7,86 - 8,68	7,26 - 8,05	6,78 - 7,55
3	PDRB per kapita	Juta Rupiah	32,60	36,10	39,60	43,10	46,60	50,10	53,60
4	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	3,55	3,66 - 3,31	3,55 - 3,20	3,45 - 3,10	3,34 - 2,99	3,18 - 2,83	3,02 - 2,67
5	Indeks Gini	Indeks	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30
6	Persentase penurunan PPKS	Persen	1,15	1,17	1,19	1,21	1,23	1,25	1,28

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,10	72,57	73,01	73,41	73,81	74,22	74,62
8	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	Juta Rupiah	10,93	11,27	11,62	11,98	12,35	12,74	13,13
9	Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Persen	20,21	20,59	20,98	21,49	22,09	22,51	23,18
10	Usia harapan hidup	Tahun	74,68	74,92	75,16	75,38	75,60	75,81	76,19
11	Indeks Keluarga Sehat		0,25	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35	0,37
12	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	12,00	12,00	12,00	11,00	11,00	10,00	9,00
13	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	Persen	19,30	17,26	16,73	16,21	15,15	14,00	14,00
14	Jumlah kematian balita	Kasus	150	146	141	137	133	129	125
15	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)	Persen	62,83	70,00	75,00	80,00	84,00	95,00	95,00
16	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	Persen	83,00	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00	95,00
17	Cakupan penerimaan pemeriksaan kesehatan gratis	Persen	NA	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00
18	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	98,18	98,45	98,72	98,99	99,26	99,53	99,80
19	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	76,51	77,91	80,51	80,71	82,11	83,50	84,00
20	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	44,79	44,79	48,96	54,17	59,38	62,50	64,58
21	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,83	8,74	8,86	8,98	9,10	9,22	9,32
22	Harapan lama sekolah	Tahun	12,62	13,04	13,23	13,43	13,62	13,81	13,96
23	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang)								
	Literasi membaca SD/sederajat	Persen	87,13	85,96	86,06	86,26	86,56	86,96	87,46
	Literasi membaca SMP/sederajat	Persen	89,22	90,26	90,36	90,56	90,86	91,26	91,76
	Numerasi SD/sederajat	Persen	80,35	84,64	84,74	84,89	85,09	85,34	85,64
	Numerasi SMP/sederajat	Persen	87,36	89,18	89,28	89,43	89,63	89,88	90,18

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
24	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	88,19	88,31	88,61	88,90	89,19	90,25	90,35
25	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persen	28,11	32,72	35,71	37,55	39,48	41,51	43,59
26	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	67,90	75,88	76,20	77,20	78,20	79,81	80,60
27	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	Persen	5,62*	7,74	8,09	8,45	8,80	9,15	9,43
28	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Persen	N/A	1,794	1,816	1,838	1,860	1,881	1,894
29	Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun	Persen	88,99	90,97	92,95	94,94	96,92	98,91	100
30	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	Persen	37,80	45,00	45,76	46,51	47,27	50,85	53,46
31	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	Persen	14,75	31,18	31,84	32,69	33,45	34,20	35,06
32	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	1.902.931	1.910.662	1.918.392	1.933.854	1.949.315	1.964.776	1.966.053
33	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	Persen	13,26	24,91	25,51	26,11	26,70	27,30	27,94
34	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	79,60	80,10	80,60	81,10	81,60	82,10	82,60
35	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,267	0,266 – 0,256	0,264 – 0,245	0,262 – 0,233	0,259 – 0,222	0,257 – 0,211	0,255 – 0,200
36	Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)	Indeks	63,83	64,58 - 64,60	65,33 - 65,37	66,08 - 66,15	66,83 - 66,92	67,58 - 67,69	68,33 - 68,46
37	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	NA	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00
38	Indeks Pembangunan Olahraga	Angka	0,363	0,364	0,365	0,366	0,367	0,368	0,369
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	Angka ketergantungan		44,92	45,38	45,89	46,45	47,05	47,70	48,39
2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	63,96	65,00	66,00	67,00	68,00	70,00	72,00
3	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,6	2,61	2,63	2,66	2,69	2,73	2,77

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Persen	1,37	1,37	1,38	1,39	1,39	1,40	1,41
5	Rasio PDRB industri pengolahan	Persen	24,46	24,70	24,95	25,20	25,45	25,71	25,97
6	Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum	Persen	4,54	4,56	4,79	5,01	5,24	5,46	5,64
7	Jumlah tamu wisatawan mancanegara	Orang	296.916	299.885	302.884	305.913	308.972	312.062	318.927
8	Rasio PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	12,89	12,91	12,93	12,95	12,97	13,00	13,02
9	Indeks Kinerja Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Indeks	57,40	61,20	62,81	64,93	67,03	69,08	70,38
10	Indeks Kinerja Pembangunan Infrastruktur Dasar	Indeks	60,47	65,73	67,76	70,48	73,18	75,89	77,58
11	Indeks Kinerja Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks	50,22	50,65	51,26	51,96	52,67	53,17	53,57
12	Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota	Persen	89,198	91,33	91,38	91,43	91,47	91,52	91,57
13	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	Persen	41,04	46,25	48,21	50,17	52,13	54,25	56,21
14	Rumah tangga dengan akses hunian layak	Persen	96,30*	96,47	96,69	96,91	97,13	97,35	97,53
15	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	59,19	62,69	63,67	64,65	65,63	66,62	67,60
16	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	71,14	77,29	78,71	80,13	81,55	82,97	84,11
17	Persentase Desa Mandiri	Persen	16,08	16,35	17,71	19,07	20,44	21,80	23,16
18	Indeks Desa	Nilai	NA	0,726	0,728	0,730	0,732	0,734	0,736
19	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	NA	3,35	3,63	3,91	4,19	4,47	4,69
20	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	NA	1,92	2,21	2,51	2,80	3,09	3,32
21	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,48	0,69	0,76	0,83	0,90	0,97	1,02

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
22	*Return on Asset* (RoA) BUMD	Persen	2,38	2,65	2,80	2,94	3,09	3,23	3,38
23	Persentase peningkatan investasi	Persen	10,88	3,13	3,20	3,40	3,50	3,80	3,40
24	Pembentukan Modal Tetap Bruto (persen PDRB)	Persen	27,53	27,76	27,85	27,94	28,02	28,11	28,18
25	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten/Kota terhadap PDRB	Persen	4,96	5,68	5,77	5,87	5,96	6,05	6,14
26	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota terhadap PDRB	Persen	3,83	5,26	5,34	5,41	5,49	5,56	5,64
27	Disparitas Harga	Persen	8,92	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10
28	Tingkat inflasi	Persen	1,51	2,00 – 3,00	2,00 – 3,00	2,00 – 3,00	2,00 – 3,00	2,00 – 3,00	2,00 – 3,00
29	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,58	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	78,94	79,21	79,48	79,75	80,02	80,29	80,56
2	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Indeks	76,56*	76,56	77,33	78,11	78,88	79,65	80,27
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,92	3,92	2,0 - 2,1	2,0 - 2,1	2,1 - 2,2	2,1 - 2,2	2,2 – 2,3
4	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,81	3,88	3,96	4,04	4,10	4,17	4,23
5	Indeks Integritas Nasional (IIN)	Indeks	72,37	77,38	77,5	78	79	80	80
6	Nilai AKIP	Nilai	63,57	64,31	65,03	67,02	69,01	71,00	72,99
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,99	87,42	87,86	88,30	88,74	89,18	89,62
8	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,71	0,73	0,76	0,78	0,81	0,84	0,86
9	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	79,37	79,50	80,00	80,30	80,70	81,00	81,30
10	Persentase penegakan Perda	Persen	80,95	83,91	86,87	89,84	92,80	95,76	98,72
11	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,85	3,93	3,96	4,00	4,04	4,08	4,10
13	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kasus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Indeks Harmoni Indonesia	Angka	N/A	6,71	6,71	6,75	6,8	6,85	6,85
16	Indeks daya saing daerah	Indeks	3,65	3,66	3,67	3,68	3,69	3,70	3,71
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**								
	PENDIDIKAN								
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	88,99	90,97	92,95	94,94	96,92	98,91	100

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	99,02	99,15	99,29	99,43	99,57	99,71	99,85
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	93,99	94,66	95,33	96	96,67	97,34	98,01
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	25,34	30,31	35,29	40,27	45,25	50,22	55,20
	KESEHATAN								
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Persen	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	Persen	71,43	85,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	93,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	96,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	96,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	93,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	74,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	83,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	98,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	6,87	6,90	6,94	6,97	7,01	7,04	7,08
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Persen	94,34	94,45	94,57	95,92	97,27	98,62	100,00
3	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	92,28	92,56	93,3	94,64	95,98	97,32	100,00
4	Tingkat kemantapan jalan	Persen	89,198	91,33	91,38	91,43	91,47	91,52	91,57
5	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	29,75	41,46	53,17	64,88	76,58	88,29	100,00
6	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangan	Persen	3,20	4,71	6,85	9,41	11,98	13,69	14,56
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	4,18	4,16	4,14	4,12	4,10	4,08	4,06
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Persentase wilayah yang terlayani kegiatan trantibumlinmas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Persen	92,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	SOSIAL								
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TENAGA KERJA								
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	28,07	28,91	29,78	30,67	31,59	32,54	33,52
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar)	Persen	1,10	1,11	1,11	1,12	1,12	1,13	1,13
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme	Persen	41,33	43,40	45,57	47,84	50,24	52,75	55,39
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	25,46	25,5	26,00	26,50	27,00	27,50	28,00
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	Per 100.000 Penduduk Perempuan	8,8	8,7	8,6	8,5	8,5	8,4	8,3

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	PANGAN								
1	Persentase cadangan pangan	Persen	79,45	88,40	88,50	89,00	89,50	90,00	90,00
	PERTANAHAN								
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin	Persen	80,69	83,92	87,27	90,77	94,40	98,17	100,00
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	LINGKUNGAN HIDUP								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	Indeks	69,40	75,07	75,09	75,10	75,12	75,13	75,14
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	Persen	63,63	65	67	69	71	73	75
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	69	63	57	51	46	40	34
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Perekaman KTP Elektronik	Persen	99,78	99,80	99,82	99,84	99,86	99,88	99,90
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	76,84	77,34	77,84	78,34	78,84	79,34	79,84
3	Kepemilikan Akte Kelahiran	Persen	48,67	50,32	51,97	53,62	55,27	56,92	58,57
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	81,25	80	80	80	80	80	80
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Persentase desa mandiri	Persen	16,08	16,35	17,71	19,07	20,44	21,80	23,16
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence)	Persen	74,21	72,1	72,15	72,2	72,25	72,3	72,35
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	10,76	10,70	10,50	10,30	10,10	10,00	100,00
	PERHUBUNGAN								
1	Rasio konektivitas kabupaten	Indeks	0,64	0,64	0,66	0,66	0,68	0,68	0,69
2	Kinerja lalu lintas kabupaten	Angka	0,15	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13	0,125
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	KOPERASI DAN UKM								
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	NA	40,00	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	NA	5,55	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
	PENANAMAN MODAL								
1	Persentase Peningkatan Investasi	Persen	10,88	3,13	3,20	3,40	3,50	3,80	3,40
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	17,05	17,14	17,22	17,31	17,39	17,48	17,57
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	9	10	11	12	13	14	16
	STATISTIK								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	Persen	55,32	60	65	70	75	80	85
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	55,32	60	65	70	75	80	85
	PERSANDIAN								
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	83,72	86,23	88,82	91,48	94,23	97,05	99,97
	KEBUDAYAAN								
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	48,50	50,05	52,05	54,05	56,05	58,05	60,05
	PERPUSTAKAAN								
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	78,10	78,60	79,10	79,60	80,35	81,10	81,35
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	88,19	88,31	88,61	88,90	89,19	90,25	90,35
	KEARSIPAN								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	77,57	79,90	82,29	84,76	87,31	89,92	92,62
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	66,67	70,00	73,50	77,18	81,04	85,09	89,34

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Indeks Pengawasan Kearsipan	Angka	89,55	85,85	86	87	88	89	90
	URUSAN PILIHAN								
	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap dan budidaya	Persen	2,97	3,00	3,03	3,06	3,09	3,12	3,15
	PARIWISATA								
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	17,38	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,20
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	Persen	4,42	4,44	4,46	4,49	4,51	4,53	4,55
3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	49,87	50,37	50,87	51,38	51,89	52,41	52,94
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	4,54	4,56	4,79	5,01	5,24	5,46	5,64
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	10,30	10,40	10,51	10,61	10,72	10,83	10,93
	PERTANIAN								
1	Produktivitas pertanian per hektare per tahun	Kuintal/Ha	79,11	79,13	79,15	79,22	79,29	79,34	79,40
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	-23,95	-24,19	-24,43	-24,68	-24,92	-25,17	-25,42
	PERDAGANGAN								
1	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	48,51	50,92	53,48	56,16	58,96	61,91	65,01
2	Persentase alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	36,01	50,00	51,18	51,76	52,35	54,12	54,71
	PERINDUSTRIAN								
1	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	Persen	0,00	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana	Persen	175,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)								
3	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)								
1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	9,84	9,89	9,94	9,99	10,04	10,09	10,14
2	Rasio PAD	Persen	18,73	19,10	19,49	19,88	20,27	20,68	21,09
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	3,27	3,30	3,34	3,38	3,42	3,45	3,47
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3,21	3,24	3,27	3,30	3,33	3,36	3,36
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	60,19	63,20	66,36	69,68	73,16	76,82	80,66
6	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)								
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	84,21	84,71	85,21	85,71	86,21	86,71	87,21
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	33,21	33,71	34,21	34,71	35,21	35,71	36,21
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi	Persen	54,03	54,28	54,53	54,78	55,03	55,28	55,53

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah								
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)								
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	64,71	67,95	71,34	74,91	78,66	82,59	86,72
2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	33,93	34,27	34,61	34,96	35,31	35,66	36,02
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	17,14	17,31	17,48	17,66	17,84	18,01	18,19
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)								
1	*Budget execution*: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	97,41	97,60	97,80	98,00	98,19	98,39	98,58
2	*Revenue mobilization*: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	13,46	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	*Assets management*	Persen	4	4	4	4	4	4	4
4	*Cash Management*: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	3,42	3,45	3,49	3,52	3,56	3,59	3,63
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)								
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (*Information on resources available to frontline service delivery units*)	Persen	99,47	99,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*Public access to fiscal information*)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	FUNGSI PENUNJUANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
1	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB V
PENUTUP

RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen strategis bagi pembangunan Kabupaten Magelang, yang merupakan penjabaran visi, misi, serta program ungggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang periode tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 juga merupakan penjabaran dari tahap pertama RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045. Dalam penyusunannya, RPJMD Kabupaten Magelang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045, dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029. Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 telah memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029, serta kebijakan dan perencanaan sektoral lainnya yang berlaku.

Dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 merupakan panduan dan pedoman utama bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan dan harus dilaksanakan secara konsisten. Dokumen RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi pedoman dan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Magelang digunakan pula sebagai panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam RKPD yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dalam lima tahun ke depan. Terakhir, dalam hal untuk memastikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dapat berjalan dengan efektif dan optimal, maka perlu dilakukan pengendalian, evaluasi, dan monitoring secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna menjaga kesinambungan pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029, maka pelaksanaan RPJMD memperhatikan kaidah pelaksanaan meliputi:

1. Konsistensi perencanaan dan pendanaan, disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pengambilan keputusan yang cermat dan tegas khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level keluaran dan memastikan pelaksanaanya, serta penguatan mekanisme proses utamanya yang dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan termasuk memperhatikan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusi sosial;

2. keterkaitan perencanaan pembangunan daerah dengan nasional yang digambarkan dengan keterkaitan RPJMD dengan dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, dan RPJMD akan dijabarkan dalam dokumen RKPD setiap tahunnya, serta menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
3. penerapan cascading dalam penyusunan RPJMD dengan tetap menerapkan prinsip kerangka kerja logis, dimana penjabaran tujuan dan sasaran daerah berdasarkan visi dengan tetap memperhatikan misi, yang disusun dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, disertai indikator kinerja pembangunan yang disusun dengan memenuhi kriteria *specific, measureable, achievable, result oriented/relevant, dan time-bound (SMART)*, dimana seluruh indikator RPJMD akan dijabarkan dalam Renstra PD;
4. kerangka pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, dengan ruang lingkup meliputi: (a) pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah mencakup penjabaran dokumen RPJMD ke dokumen Renstra PD, penetapan ukuran keberhasilan, konsistensi perencanaan dan penganggaran, identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya, serta mencakup penjabaran dokumen RPJMD ke dokumen RKPD, integrasi RKPD ke Renja PD, serta (b) pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko;
5. mekanisme perubahan yang dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan melalui pemutakhiran target dalam RKPD dan Renja PD; penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan, di mana sistem elektronik terpadu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJMD, dan tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama;

6. komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan, di mana komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama yaitu kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk pihak swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia;
7. memperhatikan kebijakan pengarusutamaan pembangunan yang meliputi gender dan inklusi sosial, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), transformasi digital, pembangunan rendah karbon, dan pembangunan berketahanan iklim, yang diintegrasikan pada setiap tahapan siklus pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi, sehingga seluruh proses pembangunan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Selanjutnya sebagai pedoman transisi, pada saat RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2030–2034 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka dalam RPJMD ini sudah memuat perencanaan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2030, sebagai pedoman transisi penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum RPJMD Tahun 2030-2034 disusun.

Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 diperlukan dukungan, kesungguhan, tanggung jawab, semangat gotong royong, komitmen, serta peran aktif berbagai pihak dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Magelang. Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Magelang akan semakin maju, sejahtera, dan berkelanjutan, serta mampu berpartisipasi dalam mewujudkan visi Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 yaitu “Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera” atau Magelang Anyar Gress.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).